PERATURAN DAERAH

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2021

PERATURAN DAERAH

Daftar Isi.....i-ii

Pernyataan Tanggungjawab

Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur

Matrik Penyempurnaan Ranperda yang ditandatangani oleh Kepala Daerah

Batang Tubuh

Lampiran I Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....1-2

Lampiran I.I Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.....3-14

Lampiran I.2 Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan Belanja dan Pembiayaan 15-16

Lampiran 1.3 Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaa.....17-144

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....17-24
- Rumah Sakit Umum Daerah.....25-27
- Dinas Kesehatan.....28-33
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....34-38
- Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.....39-40
- Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 41-42
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....43-45
- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....46-50
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.....51-54
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.....55-57
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....58-59
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 60-63
- Dinas Perhubungan 64-67
- Dinas Komunikasi dan Informatika 68-70
- Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah,Perindustrian Dan Perdagangan.....71-73
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 74-76
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 77-78
- Dinas Perikanan 79-81
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga.....82-84
- Sekretariat Daerah.....85-89
- Inspektorat.....90-92
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....93-96
- Badan Keuangan Daerah.....97-102
- Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manuasia 103-104
- Sekretariat DPRD 105-112
- Kecamatan Siberut Utara 113-115
- Kecamatan Siberut Tengah.....116-118
- Kecamatan Siberut Barat 119-121
- Kecamatan Siberut Barat Daya 122-124
- Kecamatan Siberut Selatan 125-127
- Kecamatan Sipora Utara 128-130
- Kecamatan Sipora Selatan.....131-132
- Kecamatan Pagai Utara 133-136
- Kecamatan Sikakap 137-138
- Kecamatan Pagai Selatan 139-141
- Kantor Kesatuan Kebangsaan Politik dan Perlindungan Masyarakat 142-144

Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,Oerganisasi,Program.Kegiatan dan Sub Kegiatan.....145-214

Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 215

Lampiran III Laporan Operasional 216-218

Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas.....219

Lampiran V Neraca 220-222
Lampiran VI Laporan Arus Kas 223-224
Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan.....225-573
Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.....574
Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....575-576
Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir.....577
Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 578
Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.....579-580
Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.....581
Lampiran XIV Rekapitulasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan.....582
Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.....583
Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan.....584
Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek.....585
Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang.....586
Lampiran XIX Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya.....587
Lampiran XX.1 Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir.....588
Lampiran XX.2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Untuk Tahun Yang Berakhir.....589

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021, terdiri dari : (Lampiran I) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja APBD Tahun Anggaran 2021; (Lampiran II) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (Lampiran III) Laporan Operasional; (Lampiran IV) Laporan Perubahan Ekuitas; (Lampiran V) Neraca; (Lampiran VI) Laporan Arus Kas; (Lampiran VII) Catatan atas Laporan Keuangan; (Lampiran VIII) Daftar rekapitulasi piutang daerah; (Lampiran IX) Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; (Lampiran X) Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; (Lampiran XI) Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; (Lampiran XII) Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; (Lampiran XIII) Daftar rekapitulasi aset tetap; (Lampiran XIV) Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; (Lampiran XV) Daftar rekapitulasi aset lainnya; (Lampiran XVI) Daftar dana cadangan daerah; (Lampiran XVII) Daftar kewajiban jangka pendek; (Lampiran XVIII) Daftar kewajiban jangka panjang; (Lampiran XIX) Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; (Lampiran XX) Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah, Neraca dan Laporan Laba/Rugi, sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Tuapejat, 19 Agustus 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 08 TAHUN 2022

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR SUMATERA BARAT

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. bahwa terhadap hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat, telah dilakukan penyempurnaan;

b. bahwa hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon sia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok – pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah tahun 2020 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan DPRD Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 12 Agustus 2022

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

YOSEP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
Kabupaten Kepulauan Mentawai

SUKIRMAN, S.Sos,M.M
NIP. 19710116 199203 1 005

TANGGAPAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 903 – 616 -2022
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TANGGAPAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 – 616 – 2022
TANGGAL : 8 Agustus 2022
TENTANG : EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
I.	KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD/PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD/PENJABARAN PERUBAHAN APBD.	I.	KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
	Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan eraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, meliputi :		
A.	KONSISTENSI Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian antara APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 yang meliputi kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur pendapatan, belanja dan pembiayaan serta struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.	A.	KONSISTENSI Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk seterusnya akan tetap konsisten dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut : 1. Jumlah anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp865.799.014.618,00 dan Belanja Daerah sebesar Rp907.054.073.744,00 yang ada pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 *telah sesuai* dengan anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021. 2. Nomenklatur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 *telah sesuai* dengan nomenklatur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021. 3. Struktur dan klasifikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 *telah sesuai* dengan struktur dan klasifikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus tetap konsisten menyusun perda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan Perda APBD.		Pelaksanaan APBD sesuai dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
B.	LEGALITAS	B.	LEGALITAS
	Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Antara Lain:		Setuju, kedepannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan DPRD akan tetap konsistem mematuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan.
1.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 disampaikan Bupati Kepulauan Mentawai ke DPRD pada tanggal 15 Juni 2022, dan telah mendapatkan persetujuan bersama dari DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 19 Juli 2022. Hal ini *telah sesuai* dengan Pasal 194 ayat (1) dan (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.	1.	Telah sesuai
2.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah mendapat persetujuan bersama dari DPRD telah disampaikan ke Gubernur untuk di evaluasi pada tanggal 21 Juli 2022. Hal ini *telah sesuai* dengan maksud Pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di sampaikan ke Gubernur untuk di evaluasi.	2.	Telah sesuai

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	Kedepannya, Bupati Kepulauan Mentawai dan DPRD harus tetap konsisten mematuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		
3.	Kelengkapan Dokumen : Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 telah sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/Keuda tanggal 31 Mei 2022 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 yang terdiri atas : a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas: 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas; a) Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi; b) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; c) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; d) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 3) Lampiran III : Laporan operasional; 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;	3.	Kelengkapan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 telah disesuaikan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/16326/Keuda tanggal 31 Mei 2022.

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	5) Lampiran V : Neraca; 6) Lampiran VI : Laporan arus kas; 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah; 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap; 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya; 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah; 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek; 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang; 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; a) Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah b) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.		

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri atas : 1) Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran; 2) Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.	b.	Setuju untuk Lampiran I.I Ranperbup akan dicantumkan dasar hukum dan penyajian format tabel disesuaikan.
4.	Penyajian informasi pada Lampiran I.1 Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 belum *sesuai* ketentuan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyajian informasi pada kolom penjelasan harus mencantumkan dasar hukum dan menyajikan format tabel sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 903/16326/Keuda tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021.	4.	Penyajian informasi pada Lampiran I.1 Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 pada kolom penjelasan *Setuju untuk disesuaikan dengan* Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 903/16326/Keuda dan selanjutnya pada penjelasan Lampiran I.1 akan dicantumkan dasar hukum dan penyajian format tabel sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 903/16326/Keuda.
5.	Penyajian Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 *belum sepenuhnya sesuai* dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	5.	Penyajian Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 *Setuju untuk disesuaikan* dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 serta Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014.
6.	Penyajian Batang Tubuh Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 *belum sepenuhnya sesuai* dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan	6.	Penyajian Batang Tubuh Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	Perundang-undangan beserta perubahannya serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.		Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 setuju untuk di*sesuaikan* dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.
C.	KEBIJAKAN		
	Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:		
1.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	1.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
a.	PENDAPATAN DAERAH Realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebesar Rp830.153.085.297,37 atau 95,88% dari target yang dianggarkan sebesar Rp865.799.014.618,00. Target Pendapatan yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021 tersebut lebih tinggi sebesar Rp32.912.200.621,49 atau sebesar 3,95% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp832.886.813.996,51. Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :	a.	PENDAPATAN DAERAH Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menetapkan target Pendapatan Daerah pada tahun mendatang akan lebih cermat dan memperhitungkan potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai.
1)	Realisasi total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp31.638.013.029,37 atau 69,78% dari target yang dianggarkan sebesar Rp45.340.441.160,00. Target PAD yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021 tersebut lebih tinggi sebesar Rp10.434.767.604,49 atau naik 29,89% dari realisasi Tahun 2020 sebesar Rp34.905.673.555,51. Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud terdiri atas :		

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	a) Pajak Daerah Realisasi pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.860.497.217,00 atau 50,39% dari target yang dianggarkan sebesar Rp7.661.649.285,00. Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 lebih tinggi sebesar Rp4.129.855.089,00 atau naik 116,93% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.531.794.196,00. Seluruh komponen Pendapatan Pajak Daerah yang realisasinya belum mencapai target yaitu : (1) Pajak Hotel realisasi sebesar Rp641.884.990,00 atau 29,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.207.397.903,00. (2) Pajak Restoran realisasi sebesar Rp788.472.782,00 atau 52,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.504.251.382,00. (3) Pajak Hiburan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00. (4) Pajak Reklame realisasi sebesar Rp514.080,00 atau 0,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00. (5) Pajak Penerangan Jalan realisasi sebesar Rp1.621.555.607,00 atau 84,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.925.000.000,00. (6) Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan realisasi sebesar Rp50.192.091,00 atau 16,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00. (7) Pajak Sarang Burung Walet realisasi sebesar Rp500.000,00 atau 0,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00. (8) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) realisasi sebesar Rp553.717.955,00 atau 59,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp925.000.000,00.	a)	Rendahnya tingkat capaian realisasi pajak daerah pada tahun 2021 disebabkan masih adanya pembatasan aktivitas masyarakat khususnya pembatasan kunjungan dari luar negeri (wisatawan manca negara) akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga mengakibatkan penurunan kegiatan pariwisata dan usaha lainnya seperti perhotelan, usaha restoran dan usaha jasa lainnya sementara sektor pariwisata merupakan sumber PAD yang cukup besar memberi kontribusi terhadap penerimaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Secara umum, realisasi pendapatan Pajak daerah cendrung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kondisi ini disebabkan antara lain : a) Adanya dampak wabah Covid-19 sehingga adanya pembatasan aktivitas perekonomian masyarakat. b) Masih kurangnya sosialisasi tetang pajak daerah kepada masyarakat secara umum. c) Masih kurangnya koordinasi antara

<table>
<tr><th>NO</th><th>HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021</th><th>NO</th><th>TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</th></tr>
<tr><td></td><td>(9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) realisasi sebesar Rp203.659.712,00 atau 50,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00.

Gambaran realisasi pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d 2021), sebagaimana tabel berikut:

<table>
<tr><th>TA</th><th>Anggaran</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr>
<tr><td>2017</td><td>Rp 3.920.000.000,00</td><td>Rp 2.647.327.991,00</td><td>67,53</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>Rp 3.750.000.000,00</td><td>Rp 4.473.071.310,00</td><td>119,28</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>Rp 9.050.000.000,00</td><td>Rp 5.214.451.660,60</td><td>57,62</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>Rp 3.832.440.363,00</td><td>Rp 3.531.794.196,00</td><td>92,16</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>Rp 7.661.649.285,00</td><td>Rp 3.860.497.217,00</td><td>50,39</td></tr>
</table>
Memperhatikan gambaran data di atas, realisasi Pendapatan Pajak Daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 belum memenuhi target yang ditetapkan, kecuali tahun 2018. Tingkat capaian realisasi Pajak Daerah pada Tahun 2021 merupakan yang paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun nominal realisasinya sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Berkenaan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menetapkan target Pajak Daerah agar tetap memperhitungkan potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus tetap rasional serta melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan monitoring secara berkala dalam memperhitungkan potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai.</td><td></td><td>kabupaten dan kecamatan dalam hal pengelolaan retribusi

Namun kedepan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menetapkan target Pajak Daerah akan lebih memperhitungkan potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan harus tetap rasional serta melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan monitoring secara berkala dalam memperhitungkan potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai.</td></tr>
<tr><td></td><td>b) Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.033.172.955,00 atau 33,79% dari target yang dianggarkan sebesar</td><td>b)</td><td>Pencapaian realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di tahun 2021 sangat jauh dari target persentase, pencapaian Tahun 2021 dan paling rendah</td></tr>
</table>

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	Rp8.976.710.358,00. Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 lebih tinggi sebesar Rp3.000.000.000,00 atau naik 50,19%, dari realisasi Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp5.976.710.358,00. Retribusi Daerah yang realisasinya melebihi target yang ditetapkan yaitu, Retribusi Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp245.463.519,00 atau 106,60% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp230.255.666,00. Sedangkan realisasi Retribusi Daerah yang belum optimal antara lain : (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas terealisasi sebesar Rp56.897.500,00 atau 29,69% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp191.606.666,00. (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah terealisasi sebesar Rp1.124.795.610,00 atau 44,99% dari anggaran yang Telah di Tetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00. (3) Retribusi Kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp107.518.000,00 atau 27,98% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp384.227.298,00. (4) Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan terealisasi sebesar Rp31.894.000,00 atau 70,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.999.999,00. (5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan terealisasi sebesar Rp85.160.100,00 atau 40,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp209.227.298,00. (6) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga terealisasi sebesar Rp858.700.000,00 atau 22,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.807.007.031,00. (7) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan terealisasi sebesar Rp39.432.000,00 atau 56,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp70.000.000,00.		dari tahun-tahun sebelumnya disebabkan beberapa faktor diantaranya: a) Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dan Puskesmas realisasi belum sesuai target karena pelayanan kesehatan masyarakat masih banyak menggunakan surat keterangan miskin sehingga untuk pelayanan kesehatannya gratis atau tidak dipungut biaya retribusi. b) Realisasi Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan belum terealisasi sepenuhnya karena dari tiga pasar yang ada hanya dua pasar yang sudah aktif dan dapat dipungut retribusi pasar yaitu pasar yang ada di kecamatan Siberut Utara dan Kecamatan Sipora Selatan. c) Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Penyebrangan Orang pada Dinas Perhubungan sangat rendah disebabkan karena pengelolaan kapal antar pulau tahun 2021 dalam proses peralihan kepada BUMD atau Pihak ketiga sehingga untuk trip pelayanan penyebrangan kapal antar pulau berkurang dari tahun lalu, hanya satu kali pelayaran dalam seminggu.

<table>
<tr><th>NO</th><th>HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021</th><th>NO</th><th>TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</th></tr>
<tr><td></td><td>
(8) Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan terealisasi sebesar Rp147.000.000,00 atau 98,00% dari yang diaggarakan sebesar Rp150.000.000,00.
(9) Retribusi Pelayanan Penyebrangan Orang terealisasi sebesar Rp220.106.000,00 atau 18,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.192.779.733,00.
(10) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp115.351.226,00 atau 58,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp196.606.667,00.
Masih terdapat Pendapatan Retribusi Daerah yang terealisasi tetapi tidak dianggarkan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu terealisasi sebesar Rp855.000,00.
Gambaran realisasi pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d 2021), sebagaimana tabel berikut :
<table>
<tr><th>TA</th><th>Anggaran</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>2017</td><td>Rp 14.671.310.539,39</td><td>Rp 10.515.993.799,00</td><td>71,68</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>Rp 11.807.239.500,00</td><td>Rp 11.448.181.116,00</td><td>96,96</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>Rp 19.325.000.000,00</td><td>Rp 12.726.370.684,00</td><td>65,85</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>Rp 6.776.532.494,46</td><td>Rp 5.976.710.358,00</td><td>88,20</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>Rp 8.976.710.358,00</td><td>Rp 3.033.172.955,00</td><td>33,79</td></tr>
</table>
Dari data tersebut di atas, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dari Tahun 2017 sampai dengan 2021 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, dimana pencapaian realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di tahun 2021 sangat jauh dari target. Selain itu secara nominal dan persentase, pencapaian Tahun 2021 merupakan yang paling rendah dari tahun-tahun sebelumnya.
Untuk itu pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan
</td><td></td><td>
d) Untuk pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami penurunan disebabkan karena adanya penyesuaian peraturan daerah terkait pemungutan retribusi IMB.
e) Belum optimalnya perhitungan dan penetapan target retribusi yang ada di OPD.
f) Kurangnya pengawasan terhadap pengelola retribusi sehingga belum optimalnya pengelolaan retribusi secara keseluruhan.

Namun Untuk kedepan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan lebih intensif lagi melakukan upaya dan inovasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah dan lebih rasional dalam menetapkan target Pendapatan Retribusi Daerah dengan memperhitungkan secara lebih cermat potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai serta mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>NO</td><td>HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021</td><td>NO</td><td>TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</td></tr>
<tr><td></td><td>memperhitungkan secara lebih cermat potensi penerimaan yang seharusnya bisa dicapai dan lebih intensif lagi melakukan upaya dan inovasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah dari Retribusi Daerah serta mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dalam menetapkan target pendapatan.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.684.123.854,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.684.123.854,00. Realisasi tersebut merupakan bagian Laba yang dibagikan atas penyertaan modal dari investasi yang ditanamkan pada Bank Nagari sedangkan Penyertaan Modal pada PT BPR Sipora, PT BPR Pagai Utara Selatan dan Perusda Mentawai belum memberikan Kontribusi laba berupa Dividen kepada Pemda.

Gambaran realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d 2021), sebagaimana tabel berikut :

<table><tr><td>TA</td><td>Anggaran</td><td>Realisasi</td><td>%</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>2017</td><td>Rp 17.696.354.870,98</td><td>Rp 15.177.376.110,00</td><td>85,77</td></tr><tr><td>2018</td><td>Rp 15.175.000.000,00</td><td>Rp 11.558.096.627,00</td><td>76,17</td></tr><tr><td>2019</td><td>Rp 21.475.000.000,00</td><td>Rp 12.056.561.744,00</td><td>56,14</td></tr><tr><td>2020</td><td>Rp 13.850.000.000,00</td><td>Rp 12.591.521.757,00</td><td>90,91</td></tr><tr><td>2021</td><td>Rp 10.684.123.854,00</td><td>Rp 10.684.123.854,00</td><td>100,00</td></tr></table>
Memperhatikan gambaran realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 secara persentase cenderung mengalami peningkatan.</td><td>c)</td><td>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai setuju, pada tahun mendatang akan menetapkan pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.</td></tr>
</table>

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun mendatang agar dalam menetapkan pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, harus tetap memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.		
	d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp14.060.219.003,37 atau 78,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.017.957.663,00. Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah tahun 2021 yang memenuhi target yang dianggarkan antara lain : (1) Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp1.238.473.619,00 atau 123,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Sedangkan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah tahun anggaran 2021 yang realisasinya belum mencapai target yang ditetapkan antara lain : (1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp92.347.850,00 atau 3,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.750.000.000,00. (2) Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan/Sewa BMD terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00. (3) Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp1.807.419.169,00 atau 36,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00. (4) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.	d)	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain terealisasi sebesar Rp6.049.341.134,00 merupakan penerimaan lain-lain yang tidak ada pos anggarannya dan diantaranya sebesar Rp4.917.277.846,00 merupakan Dana Transfer penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah Prov. Sumbar Tw.II Tahun anggaran 2021 Berdasarkan Keputusan Kepal Badan Pendapatan Daerah No.971.1/009/Pjk-Bapenda/2021 tanggal 19 Juli 2021, yang salah input pada system aplikasi.

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	(5) Pendapatan Dana JKN FKTP terealisasi sebesar Rp3.918.676.581,00 atau 57,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.817.957.663,00. Terdapat Lain-lain PAD yang Sah yang terealisasi meskipun tidak dianggarkan, antara lain: (1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) terealisasi sebesar Rp613.814.293,00. (2) Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentu Lain terealisasi sebesar Rp6.049.341.134,00. (3) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp340.146.357,37. Gambaran realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir (Tahun Anggaran 2017 s.d 2021), sebagaimana tabel berikut :		Kedepannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan lebih cermat dan rasional dalam menetapkan target Lain-lain PAD Yang Sah, karena penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

TA	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4
2017	Rp 48.523.428.649,45	Rp 39.521.978.698,42	81,45
2018	Rp 16.500.000.000,00	Rp 17.878.835.220,56	108,36
2019	Rp 35.400.249.959,00	Rp 10.206.260.977,38	28,83
2020	Rp 20.932.543.766,32	Rp 12.805.647.244,51	61,18
2021	Rp 18.017.957.663,00	Rp 14.060.219.003,37	78,03

Memperhatikan daftar di atas, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 realisasi. Lain-lain PAD yang Sah belum memenuhi target yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2018. Berkenaan dengan capaian realisasi Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah tersebut, kedepannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus lebih cermat dan rasional dalam menetapkan target Lain-lain PAD Yang Sah, karena penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
2)	Pendapatan Transfer Realisasi Pendapatan Dana Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp775.266.457.268,00 atau 97,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp795.905.338.458,00. Target Dana Transfer yang dianggarkan Tahun Anggaran 2021 tersebut lebih tinggi Rp79.137.769.123,00 atau naik 11,04% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 yang mencapai Rp716.767.569,336,00. Pendapatan Transfer merupakan penerimaan yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat yang diberikan kepada daerah sesuai kondisi keuangan negara saat itu. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus lebih cermat dalam menetapkan target pendapatan transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat Pemerintah Pusat.		Pendapatan transfer yang telah di anggarkan pada tahun anggaran 2021 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang ditetapkan pada tahun 2021, namun terhadap realisasinya tidak semua disalurkan oleh pemerintah pusat dan kedepannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan lebih cermat dalam menetapkan target pendapatan transfer dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta lebih intensif melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun di tingkat Pemerintah Pusat.
3)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp23.248.615.000,00 atau 94,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp24.553.235.000,00, yang terdiri dari Pendapatan Hibah Dana BOS Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan Hibah merupakan Pendapatan Hibah pada Sekolah Dasar sebesar Rp16.183.336.000,00 dan Hibah Dana BOS pada SMP Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 sebesar Rp7.065.279.000,00. Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2021 tersebut *belum* mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus tetap cermat dalam menetapkan target setiap objek Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.	3)	Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan lebih cermat dalam menetapkan target setiap objek Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan lebih intens sehingga realisasi dapat tercapai sesuai target yang tetapkan.

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
4)	Pada Tahun Anggaran 2021, terdapat target Pendapatan Daerah pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya melampaui target yang ditetapkan dan tingkat capaiannya yang masih rendah dari target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain: a) Realisasi Pendapatan yang melebihi anggaran dalam APBD, antara lain : (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Retribusi Pengolahan Limbah Cair terealisasi sebesar Rp245.463.519,00 atau 106,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp230.255.666,00. (2) Badan Keuangan Daerah pada : (a) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp780.773.737,00 atau 104,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00. (b) DBH Pajak Bumi dan Bangunan terealisasi sebesar Rp10.188.780.695,00 atau 142,96% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.127.158.356,00. b) Realisasi pendapatan yang belum optimal dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain: (1) Rumah Sakit Umum Daerah pada retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp1.124.795.610,00 atau 44,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00. (2) Dinas Kesehatan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp57.752.500,00 atau 30,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp191.606.666,00. (3) Dinas Perhubungan pada Retribusi Penyebrangan di Air terealisasi sebesar Rp220.106.000,00 atau 18,45% dari yang diamggarkan sebesar Rp1.192.779.733,00. (4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pada Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan terealisasi sebesar Rp31.894.000,00 atau 70,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp44.999.999,00.	4)	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun-tahun mendatang akan lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD pemungut mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	(5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terealisasi sebesar Rp115.351.226,00 atau 58,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp196.606.667,00. (6) Dinas Perikanan pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp186.432.000,00 atau 84,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp220.000.000,00. (7) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga terealisasi sebesar Rp858.700.000,00 atau 22,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.807.007.031,00. (8) Badan Keuangan dan Aset Daerah, pada : (a) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya terealisasi sebesar Rp50.192.091,00 atau 16,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00. (b) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) realisasi sebesar Rp417.552.450,00 atau 41,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp1,000.000.000,00. c) Realisasi Pendapatan yang terealisasi tetapi tidak dianggarkan dalam APBD, pada Badan Keuangan dan Aset Daerah antara lain Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain terealisasi sebesar Rp6.049.341.134,00 dari yang semula tidak dianggarkan. d) Realisasi Pendapatan yang tidak terealisasi dalam APBD, antara lain pada Badan Keuangan Daerah pada Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00. Secara umum, permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai TA. 2021 dalam pencapaian target realisasi Pendapatan Daerah, antara lain : 1) Penetapan beberapa target rincian objek pendapatan belum sepenuhnya memperhatikan potensi dan realisasi penerimaan tahun 2021.		

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	2) Belum optimalnya kepatuhan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk membayar pajak/retribusi secara tepat waktu. 3) Pembatasan kegiatan masyarakat akibat Pandemi COVID-19, belum sepenuhnya pulih yang menyebabkan Pajak dan Retribusi masih rendah kinerjanya, bila dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. 4) Masih belum optimalnya upaya dan inovasi untuk mengintensifkan pencapaian realisasi target Pendapatan Daerah. Mcmpcrhatikan data realisasi Pendapatan Daerah di atas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam memproyeksikan target Pendapatan Daerah sesuai dengan potensi nyata, melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD pemungut mengingat Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.		
b.	BELANJA DAERAH DAN TRANSFER	b.	BELANJA DAERAH DAN TRANSFER
	1) Belanja Daerah Realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp829.394.144.601,02 atau 91.44% dari yang ditetapkan sebesar Rp907.054.073.744,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp705.615.609.606,00 terjadi peningkatan sebesar Rp201.438.464.138,00 atau 28,55%. Realisasi Belanja dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :		

<table>
<tr><th>NO</th><th>HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021</th><th>NO</th><th>TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</th></tr>
<tr><td></td><td>a) Belanja Operasi Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp544.000.215.852,02 atau 91,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp594.317.753.544,00. Realisasi Belanja Operasi dimaksud, antara lain :
(1) Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp284.566.995.633,00 atau 97,04% dari yang dianggarkan sebesar Rp293.257.908.438,00.
Gambaran capaian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 s.d 2021, sebagaimana tabel berikut :
<table>
<tr><th>TA</th><th>Anggaran</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>2017</td><td>Rp368.596.323.121,52</td><td>Rp341.179.630.571,00</td><td>92,56</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>Rp245.966.445.024,81</td><td>Rp236.024.538.016,00</td><td>95,96</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>Rp283.769.181.403,40</td><td>Rp253.815.145.464,00</td><td>89,44</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>Rp271.763.160.723,00</td><td>Rp247.582.508.950,00</td><td>91,10</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>Rp293.257.908.438,00</td><td>Rp284.566.995.633,00</td><td>97,04</td></tr>
</table>
Persentase realisasi Belanja Pegawai dari tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung berfluktuasi, dan belum mencapai target yang dianggarkan. Untuk nominal alokasi anggaran dan realisasi pada tahun 2021 mengalami penambahan dari tahun sebelumnya.
Belum optimalnya realisasi Belanja Pegawai tahun 2021 belum mencapai target karena seluruh komponen Belanja Pegawai realisasinya belum mencapai target antara lain :</td><td>a)</td><td>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun-tahun berikutnya akan lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai, terutama dalam perhitungan Gaji Pokok ASN dan tunjangan ASN, serta tambahan Penghasilan ASN. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan acress sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penuyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dan peraturan terkait lainnya.</td></tr>
</table>

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	(a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi hanya sebesar Rp155.201.991.588,00 atau 97,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp158.511.913.402,00. (b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp80.570.246.198,00 atau 97,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp82.622.980.992,00. (c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp34.622.114.355,00 atau 93,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp37.183.589.500,00. (d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi hanya sebesar Rp8.601.836.667,00 atau 95,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.979.817.683,00. (e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi hanya sebesar Rp161.934.202,00 atau 96,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp168.190.861,00. (f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi hanya sebesar Rp484.800.000,00 atau 96,65% dari yang dianggarkan sebesar Rp501.600.000,00. (g) Belanja Pegawai BOS terealisasi hanya sebesar Rp4.924.072.623,00 atau 93,09% dari yang dianggarkan sebesarRp5.289.816.000,00. Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun-tahun berikutnya harus lebih cermat dalam menghitung proyeksi Belanja Pegawai, terutama dalam perhitungan Gaji Pokok ASN dan tunjangan ASN, serta tambahan Penghasilan ASN. Untuk perhitungan gaji dan tunjangan ASN, agar memperhitungkan acress sebesar 2,5% sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penuyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dan peraturan terkait lainnya.		

<table>
<tr><th>NO</th><th>HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021</th><th>NO</th><th>TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</th></tr>
<tr><td></td><td>(2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp243.479.793.619,02 atau 85,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp283.526.877.106,00. Belum optimalnya realisasi Belanja Barang dan Jasa disebabkan seluruh komponen Belanja Barang dan Jasa realisasinya masih rendah antara lain :
(a) Belanja Barang terealisasi sebesar Rp49.276.512.969,00 atau 88,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp55.619.089.927,00.
(b) Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp122.041.969.535,02 atau 84,05% dari yang dianggarkan Rp145.198.092.735,00.
(c) Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp9.280.777.231,00 atau 84,55% dari yang dianggarkan Rp10.977.216.044,00.
(d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp46.692.738.644,00 atau 85,48% dari yang dianggarkan Rp54.621.735.400,00.
(e) Belanja Uang dan Jasa untuk diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp6.524.906.000,00 atau 90,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.230.278.000,00.
(f) Belanja Barang dan Jasa BOS terealisasi sebesar Rp9.662.889.239,00 atau 97,80% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.880.465.000,00.

Gambaran capaian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 s.d 2021, sebagaimana tabel berikut :
<table>
<tr><th>TA</th><th>Anggaran</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>2017</td><td>Rp297.162.285.682,91</td><td>Rp248.816.218.701,73</td><td>83,73</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>Rp367.988.565.028,00</td><td>Rp324.807.417.438,00</td><td>88,27</td></tr>
</table>
</td><td>(2)</td><td>Setuju, Untuk kedepannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan Belanja Barang dan Jasa, sehingga Belanja Barang dan Jasa yang berpotensi tidak terealisasi akan dialihkan, untuk Belanja Lainnya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, Pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai akan lebih optimal dalam melakukan verifikasi terhadap pengajuan anggaran Belanja Barang dan Jasa agar sesuai dengan maksud dan substansi kegiatan yang dilakukan oleh OPD, untuk menghindari terjadinya kesalahan penganggaran terhadap Belanja Barang dan Jasa tersebut pada tahun-tahun berikutnya</td></tr>
</table>

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	<table><tr><td>2019</td><td>Rp332.658.879.949,60</td><td>Rp300.118.277.176,80</td><td>90,24</td></tr><tr><td>2020</td><td>Rp313.517.648.099,00</td><td>Rp280.774.442.528,00</td><td>89,56</td></tr><tr><td>2021</td><td>Rp283.526.877.106,00</td><td>Rp243.479.793.619,02</td><td>85,88</td></tr></table> Realisasi Belanja Barang dan Jasa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung menurun baik jumlah nominalnya maupun persentase realisasinya. Pada tahun 2021, nominal dan persentasenya adalah yang terendah dari tahun sebelumnya. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan Belanja Barang dan Jasa, sehingga Belanja Barang dan Jasa yang berpotensi untuk tidak terealisasi agar dialihkan, untuk Belanja Lainnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. *Selain itu, Pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai juga harus lebih optimal dalam melakukan verifikasi terhadap pengajuan anggaran Belanja Barang dan Jasa agar sesuai dengan maksud dan substansi kegiatan yang dilakukan oleh SKPD-SKPD, untuk menghindari terjadinya kesalahan penganggaran terhadap Belanja Barang dan Jasa tersebut tahun-tahun berikutnya.*		
	b) Belanja Tak Terduga Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.582.865.326,00 atau 75,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.114.665.260,00. JIka dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp24.195.818.997,00 sangat jauh mengalami penurunan sebesar (Rp22.081.153.737,00) atau (93,44%). Hal ini disebabkan alokasi Belanja Tak Teduga di tahun sebelumnya diperuntukkan untuk Belanja Penanganan Covid-19 yang tahun ini sudah dialihkan kepada belanja pada kegiatan masing-masing OPD. Kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus lebih cermat dalam melakukan perencanaan, serta mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian	b)	Kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan lebih cermat dalam melakukan perencanaan, serta mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas penyaluran Belanja Tak Terduga terutama yang alokasi anggarannya diperuntukkan dengan peraturan perundang-undangan.

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	atas penyaluran Belanja Tak Terduga terutama yang alokasi anggarannya diperuntukkan dengan peraturan perundang-undangan.		
	2) Belanja Transfer Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp119.166.749.510,00 atau 99,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp119.789.616.987,00 , yang terdiri dari : a) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kab/Kota dan Desa realisasi sebesar Rp705.432.930,00 atau 93,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp751.915.706,00. b) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kab/Kota dan Desa realisasi sebesar Rp1.741.496.689,00 atau 99,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.754.469.981,00. c) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa realisasi sebesar Rp116.719.819.891,00 atau 99,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp117.283.231.300,00.		
	3) Pada Tahun Anggaran 2021, terdapat anggaran Belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang tidak terealisasi dan capaian realisasinya tidak optimal, antara lain : (1) RSUD pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana terealisasi sebesar Rp841.893.598,00 atau 89,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp858.109.790,00. (2) Dinas Kesehatan (a) Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya terealisasi sebesar Rp6.791.503.645,00 atau 60,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.251.248.183,00.	3)	Kami menyadari pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa OPD jika dikaitkan dengan realisasi anggaran Belanja masih belum maksimal dan belum sesuai target yang dianggarkan dalam APBD 2021. Hal ini memang benar disebabkan beberapa kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah diantaranya: a. Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	(b) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp6.544.261.344,00 atau 90,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.213.561.620,00. (c) Operasional Pelayanan Puskesmas terealisasi sebesar Rp8.185.591.692,02 atau 48,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.861.752.968,00. (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (a) Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan terealisasi sebesar Rp5.046.769.935,00 atau 74,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.781.712.783,00. (b) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota teralisasi sebesar Rp1.840.384.192,00 atau 97,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.893.132.600,00. (c) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp1.786.822.282,00 atau 72,66% dari yang dianggarakan sebesar Rp2.459.190.000,00. (d) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan realisasi sebesar Rp673.114.340,00 atau 79,11% dari yang dianggarkan sebesar Rp850.834.940,00. (4) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian realisasi sebesar Rp1.128.177.821,00 atau 81,83% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.378.722.124,00. (5) Badan Penanggulan Bencana Daerah pada Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp1.813.910.469,00 atau 82,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.201.821.870,00.		perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. b. Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan pemahaman terhadap juknis bagi pelaksana kegiatan di OPD khususnya dana transfer DAK. c. Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya. d. Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan sudah melewati batas waktu sebagaimana yang telah diatur dalam juknisnya Namun sebagai upaya peningkatan realisasi untuk mencapai target yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain:

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	(6) Dinas Ketahanan dan Pertanian pada Pendampingan Pembangunan Sarana Pendukung Pertanian realisasi sebesar Rp785.408.900,00 atau 79,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp992.239.000,00. (7) Dinas Perhubungan pada Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyebrangan dalam Daerah Kabupaten/Kota realisasi Rp8.520.283.648,00 atau 87,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.737.762.401,00. (8) Komunikasi dan Informatika pada Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah realisasi sebesar Rp2.655.270.477,00 atau 96,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.754.461.540,00. (9) Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pada Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasaran Industri terealisasi sebesar Rp8.470.400,00 atau 0.72% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.180.113.000,000. Memperhatikan data tersebut di atas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran Belanja masih di bawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD yang diduga disebabkan kendala dan permasalahan dalam pengelolaan Belanja Daerah seperti : 1) Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai akhir tahun anggaran dan pemberian kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. 2) Kesulitan melaksanakan kegiatan diakibatkan kurangnya informasi dan pemahaman juknis dan intansi terkait khususnya dana transfer DAK. 3) Keterlambatan pemenuhan syarat administrasi khususnya terkait kegiatan yang pendanaan bersumber dari DAK, seperti menginput data kontrak pada sistem yang telah diisyaratkan sebelumnya.		1) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsitensi terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2) Melakukan evaluasi tahunan untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar Belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaiman ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	4) Waktu pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan terlaksana terutama kegiatan yang pendanaan bersumber dari dana alokasi khusus dikarenakan melewati batas waktu sebagaimana yang telah diatur dalam juknisnya. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain : 1) Mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan Barang/Jasa. 2) Melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan Bendahara Pengeluaran, dan konsitensi terhadap rencana penarikan masing-masing satuan kerja, sehingga kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk menandai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Melakukan evaluasi tahunan untuk mendapatkan informasi terkini dokumen analisis standar Belanja, standar harga satuan dan standar teknis setiap tahunnya sebagai pedoman Belanja Daerah, sehingga tidak selisih jauh dengan harga pasar dan anggarannya dapat direalisasikan secara optimal sebagaiman ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. 5) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, reviu serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementrerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran.		4) Mengoptimalkan peran TAPD dan APIP dalam melakukan percepatan dalam penyusunan, verifikasi, reviu serta penetapan RKA/DPA sehingga sesuai penganggaran dan pelaksanaan sudah memenuhi/mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Melakukan koordinasi dan konsultasi pada kementrerian teknis terkait juknis pelaksanaan kegiatan khususnya yang bersumber dari dana alokasi khusus terutama untuk menyikapi kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi di awal penyusunan anggaran. 6) Melakukan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam. 7) Mengoptimalkan peran PPTK dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	7) Melakukan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara lain pengenaan denda, pencairan jaminan sampai memberikan daftar hitam. 8) Mengoptimalkan peran pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diketahui sejak awal selanjutnya diambil langkah antisipatif sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana. 9) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum. 10) Mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap kegiatan yang diprediksi Penyerapannya rendah atau tidak terealisasi, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar mempertimbangkan untuk mengalihkan anggarannya untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekonomi.		sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana. 8) Memastikan bahwa penganggaran kegiatan yang diusulkan sudah terpenuhi syarat administrasi dan mempunyai dasar hukum. 9) Membangun komitmen bersama untuk mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran. Setuju, terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisai, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mempertimbangkan untuk mengalihkan anggarannya untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekonomi.

<table>
<tr><td>NO</td><td>HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021</td><td>NO</td><td>TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI</td></tr>
<tr><td></td><td>c. PEMBIAYAAN</td><td>c.</td><td>PEMBIAYAAN</td></tr>
<tr><td></td><td>Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp42.013.999.823,09, dengan rasio SILPA Tahun Anggaran 2021 terhadap total anggaran Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp907.054.073.744,00 adalah 4,63%.

Rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2016 s.d 2021 sebagaimana dalam tabel berikut :
<table>
<tr><th>TA</th><th>Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah</th><th>SILPA</th><th>Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer Daerah</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>2017</td><td>Rp 1.192.324.008.573,43</td><td>Rp 13.568.577.680,69</td><td>1,14%</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>Rp 1.036.954.710.149,17</td><td>Rp 11.835.939.277,02</td><td>1,14%</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>Rp 1.086.940.841.186,00</td><td>Rp 29.950.726.933,23</td><td>2,76%</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>Rp 900.348.575.150,01</td><td>Rp 41.255.059.126,74</td><td>4,58%</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>Rp 907.054.073.744,00</td><td>Rp 42.013.999.823,09</td><td>4,63%</td></tr>
</table>
Memperhatikan data tersebut di atas, Rasio SILPA Tahun Anggaran 2017 s.d 2021 terus meningkat. Pada tahun 2020 dan tahun 2021, Rasio SILPA mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus lebih cermat dalam melakukan</td><td></td><td>Pada tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis Pendapatan, mengoptimalkan penyerapan Belanja Daerah dan memanfaatkan penghematan Belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

Pada akhir tahun anggaran 2021 terdapat SILPA sebesar Rp41.239.059.126,74, SILPA tersebut akan dianggarkan kembali seluruhnya ditahun anggaran berikutnya sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan sesuai peruntukkannya serta setiap pelaksanaan kegiatan akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam DPA dan memperhatikan ketersediaan dananya agar tidak membebani sumber pembiayaan lainnya.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam membahas dan menetapkan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 akan melakukan pengurangan alokasi anggaran</td></tr>
</table>

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	perhitungan prognosis Pendapatan, mengoptimalkan penyerapan Belanja Daerah dan memanfaatkan penghematan Belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan, Pada LRA untuk tahun yang berakhir s.d 31 Desember 2020 (audited), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyajikan SILPA untuk tahun yang berkahir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp.41.239.059.126,74. Idealnya, SILPA tersebut dianggarkan kembali seluruhnya ditahun anggaran berikutnya sebagai salah satu penerimaan pembiayaan sesuai peruntukkannya. Untuk itu setiap pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam DPA dan memperhatikan ketersediaan dananya agar tidak membebani sumber pembiayaan lainnya. Pemeriksaan BPK atas pengelolaan sumber pembiayaan APBD menunjukkan beberapa permasalahan antara lain : Dana transfer digunakan untuk membiayai kegiatan yang bukan peruntukkannya sehingga terjadi kekurangan dana DBH-DR sebesar Rp.36.813.179.941,26 yang seharusnya menjadi bagian dari SILPA tahun 2020 dan menyebabkan dana DBH-DR tersebut direalisasikan tidak sesuai peruntukkannya sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2022 berpotensi tidak dapat dilaksanakan disebabkan dilakukannya pergeseran anggaran untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan reboisasi tersebut sehingga berpotensi timbulnya kewajiban yang harus diselesaikan dengan pemerintah pusat tahun 2022. Dengan demikian, kedepannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam membahas dan menetapkan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 harus melakukan pengurangan alokasi anggaran terhadap kegiatan yang tidak prioritas supaya tersedia dana untuk kegiatan DBH-DR untuk menghindari terjadinya kewajiban kepada pemerintah pusat. Selain itu, untuk tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus fokus dalam melakukan pembahasan RAPBD terutama untuk anggaran yang sudah ditentukan peruntukkannya serta melaksanakan manajemen kas sesuai ketentuan dan memastikan ketersediaan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan peruntukkannya.		terhadap kegiatan yang tidak prioritas supaya tersedia dana untuk kegiatan DBH-DR untuk menghindari terjadinya kewajiban kepada pemerintah pusat. Selain itu, untuk tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan fokus dalam melakukan pembahasan RAPBD terutama untuk anggaran yang sudah ditentukan peruntukkannya serta melaksanakan manajemen kas sesuai ketentuan dan memastikan ketersediaan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan peruntukkannya.

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
2.	NERACA	2	NERACA
	Saldo aset per 31 Desember 2021 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp1.991.726.393.838,34 atau terjadi kenaikan sebesar Rp59.832.533.827,20 atau 3,10% dari saldo 31 Desember 2020 sebesar Rp1.931.893.860.011,14. Aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2021 tersebut, antara lain: a. Aset Lancar Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp56.080.707.818,40 antara lain terdiri atas: 1) Saldo Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp 42.301.599.749.09 antara lain : a) Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp37.166,020.148,09. b) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp16.000.000,00. c) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 21.637.000,00. d) Saldo Kas si Bendahara BOS sebesar Rp5.097.942.601,00. *Memperhatikan data tersebut, terjadi keterlambatan melakukan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Pencapaiannya.* *Khusus untuk pengelolaan Dana BOS, ke depannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus mengoptimalkan fungsi dari tim manajemen BOS dalam meningkatkan pembinaan terhadap sekolah khususnya yang terkait dengan pengelolaan, pelaporan, dan pemantauan atas pelaksanaan program BOS di sekolah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan terhadap dana BOS agar menjadi lebih tertib dan didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang sah.*		Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada dimasa mendatang akan tegas dan mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu oleh bendahara penerimaan yaitu paling lambat 31 Desember, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Pencapaiannya sehingga Pada akhir tahun anggaran tidak terjadi lagi keterlambatan melakukan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Kita sepakat, untuk pengelolaan Dana BOS, ke depannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan lebih mengoptimalkan fungsi dari tim manajemen BOS dalam meningkatkan pembinaan terhadap sekolah khususnya yang terkait dengan pengelolaan, pelaporan, dan pemantauan atas pelaksanaan program BOS di sekolah, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan terhadap dana BOS agar menjadi lebih tertib dan didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang sah.

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus berupaya optimal dalam menertibkan manajemen pengelolaan kas pada kas daerah agar di tahun-tahun mendatang penggunaan dana APBD memang digunakan untuk membiayai kegiatan APBD sesuai peruntukkan yang seharusnya dan dana APBD tersebut digunakan untuk kegiatan yang bersifat prioritas.		Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga akan berupaya optimal dalam menertibkan manajemen pengelolaan kas pada kas daerah agar di tahun-tahun mendatang penggunaan dana APBD memang digunakan untuk membiayai kegiatan APBD sesuai peruntukkan yang seharusnya dan digunakan untuk kegiatan yang bersifat prioritas.
	2) Piutang Daerah Saldo piutang daerah (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.210.019.920,36 yang terdiri dari antara lain : a) Piutang Pajak sebesar Rp4.811.963.070,00. b) Piutang Retribusi sebesar Rp7.221.338,00. c) Piutang LainnyaRp390.835.512,36. Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca terdapat nilai penyisihan piutang sebesar (Rp3.786.275.821,25). Sehingga nilai bersih piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.423.744.099,11. Berkenaan dengan piutang di atas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai hendaknya menyajikan penjabaran yang rinci atas nominal Penyisihan Piutang dalam Neraca serta melakukan verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut mencerminkan nilai aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sesungguhnya.	2)	Terkait dengan piutang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyajiannya pada LKPD akan menyajikan penjabaran yang rinci atas nominal Penyisihan Piutang dalam Neraca serta melakukan verifikasi dan validasi terhadap piutang-piutang sehingga nilai piutang tersebut dapat mencerminkan nilai aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sesungguhnya. Kita sepakat kedepan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu melakukan pemutakhiran, validasi dan verifikasi terhadap data piutang PBB-P2 mengingat besarnya nilai piutang pada sektor pajak PBB-P2 dengan upaya segera menyusun Standar Prosedur Operasional

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	Mengingat besarnya nilai piutang pada sektor pajak PBB-P2 bahkan lebih besar dari tahun sebelumnya, maka Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu melakukan pemutakhiran, validasi dan verifikasi terhadap data piutang PBB-P2 tersebut. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus segera menyusun Standar Prosedur Operasional (SOP) tentang penetapan, pemungutan dan pemutakhiran data PBB-P2 yang dilengkapi dengan uraian tugas masing-masing personil yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 untuk menghindari terjadinya kehilangan potensi penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak PBB-P2.		(SOP) tentang penetapan, pemungutan dan pemutakhiran data PBB-P2 yang dilengkapi dengan uraian tugas masing-masing personil yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 untuk menghindari terjadinya kehilangan potensi penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak PBB-P2.
	3) Persediaan Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp12.297.581.712,13 mengalami penurunan sebesar Rp3.886.870.186,16 atau 24,02% dibandingkan dengan saldo persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.184.451.898,29. Saldo persediaan tersebut terdiri dari antara lain : a) Persediaan ATK sebesar Rp118.883.254,00. b) Barang Cetakan sebesar Rp317.136.159,08. c) Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan sebesar Rp3.574.122.114,00. d) Obat-obatan dan Bahan Kimia sebesar Rp7.423.974.215,05. e) Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp12.502.000,00. f) Alat Listrik dan Elektronik sebesar Rp2.124.750,00. g) Bahan Suku Cadang sebesar Rp55.618.000,00. h) Pakaian Khusus dan hari tertentu sebesar Rp34.350.000,00. i) Pakaian Olahraga sebesar Rp59.661.000,00. j) Perabot Kantor sebesar Rp27.152.400,00. k) Natura dan Pakan Natura sebesar Rp4.427.230.00.	3)	Kita sepakat, kedepan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan dan RSUD mengingat sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud dan berupaya untuk pengadaan obat-obatan terlebih dahulu melakukan stock opname untuk memastikan ketersediaan obat-obatan yang lebih banyak dibutuhkan.

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	l) Bahan Perlengkapan/Peralatan Korban Bencana Barang logistic (BPBD Mentawai) sebesar Rp667.630.590,00. Nilai persediaan sebagaimana dimaksud huruf d) di atas merupakan persediaan obat-obatan pada SKPD Dinas Kesehatan dan RSUD. Dikarenakan sifat dan karakteristik bahan obat-obatan yang cenderung rentan akan kedaluwarsa dan cepat rusak yang akhirnya berpotensi menurunnya kualitas persediaan dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus melakukan pengendalian terhadap pengelolaan persediaan dimaksud. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun-tahun mendatang harus lebih meningkatkan pengendalian terhadap Persediaan serta merencanakan anggaran Belanja Barang Pakai Habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan dan penatausahaan persediaan pada OPD supaya menjadi lebih tertib guna menghindari terjadinya kesalahan berulang dalam pencatatan persediaan agar penyajian saldo persediaan pada neraca menggambarkan kondisi yang sewajarnya		
	b. Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp96.020.184.798,55 atau mengalami peningkatan sebesar Rp528.779.414,95 atau 0,55% dibandingkan dengan saldo Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp95.491.405.383,62. Investasi Jangka Panjang terdiri dari, Investasi Jangka Panjang Permanen dimana nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp96.020.184.798,55 atau mengalami peningkatan sebesar Rp2.961.602.556,49 atau 0,55% dibandingkan dengan saldo Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp95.491.405.383,62, antara lain sebagai berikut :	b.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai scpakat, kedepan akan melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	a) Bank Nagari sebesar Rp78.578.000.000,00 . b) BPR Sipora sebesar Rp5.452.263.128,61. c) BPR Pagai Utara Selatan (PUS) sebesar Rp1.042.338.460,94. d) Perusahaan Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai sebesar Rp10.947.583.209,00. Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Selanjutnya terhadap penyertaan modal, yang sampai dengan saat ini belum memberikan kontribusi laba, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan potensi penerimaan daerah dan/atau menghindari bertambahnya kerugian bagi pemerintah daerah, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait, *serta memperhitungkan agar penyertaan modal tersebut tidak dilakukan disaat terjadi defisit APBD.*		Terhadap penyertaan modal, yang sampai dengan saat ini belum memberikan kontribusi laba, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan potensi penerimaan daerah dan/atau menghindari bertambahnya kerugian bagi pemerintah daerah, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait, serta memperhitungkan agar penyertaan modal tersebut tidak dilakukan disaat terjadi defisit APBD.

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	c. Aset Tetap Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.758.772.007.433,53 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.687.835.701.079,19 terjadi peningkatan sebesar Rp70.936.306.354,34 atau 4,20%. Saldo Aset Tetap Terdiri dari : a) Tanah sebesar Rp81.645.374.920. b) Peralatan dan Mesin sebesar Rp373.213.406.608,30. c) Gedung dan Bangunan sebesar Rp665.360.403.072,94. d) Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.339.750.739.736,03. e) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp20.580.681.404,00. f) Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp52.955.574.094,00. g) Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp774.734.172.401,74). *Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) menggambarkan adanya pekerjaan fisik yang tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan. Untuk kelanjutan pembangunan di daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memprioritaskan Penyelesaian KDP tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus memperhatikan dan menindaklanjuti KDP yang dihentikan tersebut. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadiaanya diungkapkan secara memadai di dalam CALK. Namun, apabila Pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara Permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadiannya ini diungkapkan secara memadai dalam CALK* *Untuk tahun-tahun berikutnya, terkait pengelolaan terhadap aset tetap, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap serta melakukan pengendalian atas pengamanan aset tetap, khususnya aset tetap tanah dan aset tetap peralatan dan mesin*	c.	Setuju. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan memprioritaskan Penyelesaian KDP pada tahun anggaran berikutnya. Untuk KDP yang dihentikan pembangunannya sementara waktu, maka nilai KDP tersebut akan tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadiaanya diungkapkan secara memadai di dalam CALK. Sedangkan untuk Pembangunan KDP yang direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara Permanen, maka saldo KDP tersebut akan dikeluarkan dari neraca, dan kejadiannya ini diungkapkan secara memadai dalam CALK. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sepakat untuk tahun-tahun mendatang, terhadap pengelolaan terhadap aset tetap akan lebih optimal dalam melakukan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan aset tetap serta melakukan pengendalian atas pengamanan aset tetap, khususnya aset tetap tanah dan aset tetap peralatan dan mesin agar aset-aset tetap tersebut terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	agar aset-aset tetap tersebut terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta mengurangi terjadinya resiko hilang dan dapat merugikan keuangan daerah.		mengurangi terjadinya resiko hilang dan dapat merugikan keuangan daerah.
	d. Aset Lainnya Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp80.853.493.787,86 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp82.756.796.163,62 terjadi penurunan sebesar (Rp1.903.302.375,76) atau (2,30%) yang di antaranya berasal dari : 1) Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp1.338.253.318,00, merupakan Tuntutan Perbendaharaan atas Kerugian Negara/Daerah. 2) Aset Tidak berwujud sebesar Rp10.019.125.626,82, Pengurangan Aset berupa Software pada beberapa OPD di Kepulauan Mentawai. 3) Aset Lain-Lain sebesar Rp224.079.804.997,31, berupa aset yang berkondisi rusak berat pada tahun 2021. 4) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp7.636.693.876,08). 5) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar (Rp146.946.996.278,19). ***Terdapat perbedaan nilai Aset Lainnya*** *yang tercantum pada Lampiran V Neraca dengan Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021. Pada Lampiran V Neraca tercantum nilai Aset Lainnya sebesar Rp80.853.493.787,86, sedangkan pada Lampiran VII CALK tercantum nilai Aset Lainnya sebesar Rp80.687.739.031,86 maka terdapat selisih sebesar Rp165.754.756,00.*	d.	Terhadap perbedaan **nilai Aset Lainnya** yang **Terdapat** pada Lampiran V Neraca dengan Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 dapat dijelaskan bahwa terjadi kesalahan dalam pengetikan yang seharusnya nilai aset lainnya adalah Rp Rp80.687.739.031,86 **Dan terkait Perbedaan Nominal pada rincian Aset Lainnya dalam** Lampiran V Neraca rincian Aset Lain-lain dengan rincian tabel pada Lampiran VII CALK merupakan nilai ketekoran kas tahun 2021 sebesar Rp Rp165.754.756,00 yang belum tercatat dalam tabel rincian Aset Lain-lain pada CALK akibat terjadi kesalahan dalam

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	Kemudian, ***terdapat Perbedaan Nominal pada rincian Aset Lainnya*** *pada Lampiran V Neraca dengan Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021. Pada Lampiran V Neraca tercantum rincian Aset Lain-lain dengan nominal sebesar Rp224.079.804.997,31 sedangkan di CALK dengan nominal Rp223.914.050.241.31.* ***Terhadap perbedaan nilai Aset Lainnya tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar menjelaskan dan memperbaiki sebagaimana mestinya.*** Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset tersebut agar pemanfaatannya lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib.		pengetikan, yang seharusnya nilai aset lain-lain sebesar Rp224.079.804.997,31. Untuk itu terhadap kesalahan pengetikan nilai Nominal Aset Lainnya dan Rincian Aset Lain-lain pada Lampiran VII CALK akan dilakukan koreksi sebagaimana mestinya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melakukan langkah-langkah konkrit dalam pengelolaan aset lain-lain agar pemanfaatannya lebih maksimal dan penatausahaannya menjadi lebih tertib untuk menghindari terjadinya resiko hilangnya aset lain-lain akibat tidak didukung oleh data yang memadai dan akurat.
	e. Kewajiban Kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.302.517.096,00 bertambah sebesar Rp3.670.967.609,00 atau 225,01% dibandingkan saldo Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.631.549.487,00 Kewajiban tersebut merupakan Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari : 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp287.599.926,00. 2) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp5.014.917.170,00. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan maksud paragraf	e.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan segera menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kab. Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklarifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. *Kedepannya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pencatatan utang agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan utang tersebut serta pengakuan terhadap utang dimaksud dapat diyakini kewajarannya dengan disertakan oleh bukti dokumen yang mendasari pencatatan dan pelaporan utang.*		Dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sepakat kedepannya akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pencatatan utang agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan utang serta pengakuan terhadap utang dapat diyakini kewajarannya dengan disertakan oleh bukti dokumen yang mendasari pencatatan dan pelaporan utang.
3.	LAPORAN OPERASIONAL (LO) Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp831.652.882.410.37, naik sebesar Rp34.844.324.698,82 atau 4,37% dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp796.808.557.711,55 Pendapatan-LO TA 2021 tersebut terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp27.111.930.191,37 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp45.340.441.160,00 atau 59,80%. PAD-LO Tahun Anggaran 2021 tersebut terdiri atas: 1) Pendapatan Pajak-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.292.094.029,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.661.649.285,00 atau 56,02%. 2) Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.992.771.151,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.976.710.358,00 atau 33,34%. 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.684.123.854,00 sama jika dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.684.123.854,00 atau 100,00%.	3.	LAPORAN OPERASIONAL (LO) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan menjadikan Laporan Operasional sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran yang akan datang.

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	4) Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.142.941.157,37 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.017.957.663,00 atau 50,74%.		
	b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp773.339.393.063,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp795.905.338.458,00 atau 97,16%. c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp31.201.559.156,00, lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp24.553.235.000,00 atau 127,08%.		
II.	KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP BPK) BPK	II.	KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK.
	Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK, namun demikian terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, meliputi Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan kepatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:		Terhadap temuan-temuan BPK tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK dan proses pengembalian kerugian daerah dari temuan BPK tahun 2021 sudah mencapai 80%, sedangkan untuk temuan tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	1. Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penggunaan SIPLAH dalam pengadaan Belanja Barang Jasa belum optimal. 2. Kelebihan pembayan Gaji dan Tunjangan ASN pada beberapa OPD sebesar Rp120.364.775,00. 3. Pembayaran Honorarium pada empat OPD melebihi Standar Satuan Harga Regional sebesar Rp98.404.000,00. 4. Keterlambatan pekerjaan pengadaan Obat-obatan pada Dinas Kesehatan belum dikenakan denda sebesar Rp12.673.994,94. 5. Pengelolaan kegiatan Bantuan Benih/Bibit Ternak pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tidak tertib. 6. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada 15 (lima belas) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp2.511.827.689,00. 7. Kelebihan pembayaran atas 2 (dua) paket pekerjaan Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR sebesar Rp38.396.090,04. 8. Kelebihan pembayaran 14 (empat belas) paket pekerjaan Belanja Modal sebesar Rp611.180.636,92 dan keterlambatan lima paket pekerjaan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp434.980.024,75. 9. Pelaksanaan 3 (tiga) paket pekerjaan pada 2 (dua) OPD putus kontrak dan pengembalian sisa uang muka belum dicairkan sebesar Rp2.375.793.709,09. 10. Dana yang sudah ditetapkan peruntukkannya tidak tersedia di Kas Daerah. 11. Ketekoran Kas pada 3 (tiga) OPD sebesar Rp156.754.756,00. 12. Pengelolaan rekening pada 4 (empat) OPD belum memadai dan Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu belum ditetapkan. 13. Penatausahaan Persediaan pada Dinas Kesehatan belum memadai.		

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
	14. Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen pada Perusahaan Daerah Kemakmuran Mentawai tidak dapat diyakini kewajarannya. 15. Indikasi kerugian Daerah sebesar Rp5.293.783.750,00 belum diproses sesuai ketentuan dan belum seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah. 16. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memadai. Terhadap temuan BPK tersebut di atas apabila masih ada yang belum ditindaklanjuti maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus segera mengambil langkah konkrit untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.		
III.	LAIN-LAIN	III.	LAIN-LAIN
1.	Berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Kabupten Kepulauan Mentawai Tahun 2021, dimana terdapat 2 (dua) pengecualian dan beberapa temuan terkait dengan sistem pengendalian Interen dan ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan atas LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai TA. 2021. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dimaksud sesuai Peraturan Perundang-undangan.	1.	Terhadap dua pengecualian dan beberapa temuan terkait dengan sistem pengendalian Interen dan ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan atas LKPD TA. 2021, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dimaksud sesuai Peraturan Perundang-undangan.
2.	Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar	2.	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai akan tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal,

NO	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	NO	TANGGAPAN BUPATI DAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
			terhadap peraturan perundang-undangan, sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tuapejat, 12 Agustus 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

YOSEP, A.Md

WAKIL KETUA

ISAR TAILELEU, S.PAK

WAKIL KETUA

JAKOP SAGURUK, S.E

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
dan
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp830.153.085.297,37
b.	Belanja	Rp829.394.144.601,02
	Surplus/defisit	Rp758.940.696,35
c.	Pembiayaan	
	- Penerimaan	Rp41.255.059.126,74
	- Pengeluaran	Rp0,00
	Pembiayaan Netto	Rp41.255.059.126,74
	Surplus/defisit	Rp42.013.999.823,09

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp35.645.929.320,63 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp865.799.014.618,00
b.	Realisasi	Rp830.153.085.297,37
	Selisih lebih/(kurang)	Rp35.645.929.320,63

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp77.659.929.142,98 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp907.054.073.744,00
b. Realisasi	Rp829.394.144.601,02
Selisih lebih/(kurang)	Rp77.659.929.142,98

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp42.013.999.822,35) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp41.255.059.126,00)
b. Realisasi	Rp.758.940.696,35
Selisih lebih/(kurang)	(Rp42.013.999.822,35)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,74 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan Setelah perubahan	Rp41.255.059.126,00
b. Realisasi	Rp41.255.059.126,74
Selisih lebih/(kurang)	Rp0,74

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp0,00
b. Realisasi	Rp0,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 0,74 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto Setelah perubahan	Rp41.255.059.126,00
b. Realisasi	Rp41.255.059.126,74
Selisih lebih/(kurang)	Rp0,74

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.	Jumlah aset	Rp1.991.726.393.838,34
b.	Jumlah Kewajiban	Rp5.302.517.096,00
c.	Jumlah ekuitas	Rp1.986.423.876.742,34

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun 2021 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021	Rp41.198.409.617,74
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp165.306.174.976,35

c.	Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp164.547.234.280,00)
d.	Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp730.411.850,00
e.	Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp287.586.335,00
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021	Rp43.032.011.599,09

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun 2021 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.	Pendapatan LO	Rp831.652.882.410,37
b.	Beban	Rp773.917.022.050,32
c.	Surplus/Defisit dari kegiatan operasioanal	Rp57.735.860.360,05
d.	Surplus/Defisit dari kegiatan non operasioanal	(Rp807.082.432,38)
e.	Pos luar biasa	(Rp1.135.106.365,00)

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun 2021 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.	Sisa anggaran lebih awal	Rp41.255.059.126,74
b.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp41.255.059.126,74
c.	Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp42.013.999.823,09
d.	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp0,00
e.	Saldo anggaran lebih akhir	Rp42.013.999.823,09

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun 2021 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.	Ekuitas awal	Rp1.930.262.310.524,14
b.	Penambahan ekuitas dari Laporan Operasional	Rp55.793.671.562,67
c.	Dampak kumulatif perubahan kebijakan	Rp367.894.655,53
d.	Ekuitas Akhir	Rp1.986.423.876.742,34

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
   A. Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

B. Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
C. Rekapitulasi realisasi anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
D. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.

b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Lampiran III : Laporan operasional;
d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
e. Lampiran V : Neraca;
f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan modal (investasi) daerah;
l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX : Laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
A. Ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
B. Ikhtisar laporan keuangan (laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Agustus 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

MARTINUS D.

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Agustus 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

RINALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022 NOMOR: 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT: 2/44/2022

Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN - LRA**	**865.799.014.618,00**	**830.153.085.297,37**	**95,88**	**832.886.813.996,51**
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	**45.340.441.160,00**	**31.638.013.029,37**	**69,78**	**34.905.673.555,51**
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	7.661.649.285,00	3.860.497.217,00	50,39	3.531.794.196,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	8.976.710.358,00	3.033.172.955,00	33,79	5.976.710.358,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	10.684.123.854,00	10.684.123.854,00	100,00	12.591.521.757,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	18.017.957.663,00	14.060.219.003,37	78,03	12.805.647.244,51
7	**PENDAPATAN TRANSFER - LRA**	**795.905.338.458,00**	**775.266.457.268,00**	**97,41**	**716.767.569.335,00**
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	755.604.196.205,00	742.958.193.981,00	98,33	651.902.981.143,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah - LRA	40.301.142.253,00	32.308.263.287,00	**80,17**	64.864.588.192,00
10	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA**	**24.553.235.000,00**	**23.248.615.000,00**	**94,69**	**81.213.571.106,00**
11	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.553.235.000,00	23.248.615.000,00	94,69	81.213.571.106,00
12	**BELANJA**	**907.054.073.744,00**	**829.394.144.601,02**	**91,44**	**705.615.609.606,00**
13	**BELANJA OPERASI**	**594.317.753.544,00**	**544.000.215.852,02**	**91,53**	**539.416.327.902,00**
14	Belanja Pegawai	293.257.908.438,00	284.566.995.633,00	97,04	247.582.508.950,00
15	Belanja Barang dan Jasa	283.526.877.106,00	243.479.793.619,02	85,88	280.774.442.528,00
16	Belanja Subsidi	10.550.000.000,00	9.585.794.613,00	90,86	6.734.707.000,00
17	Belanja Hibah	6.012.328.000,00	5.491.419.256,00	91,34	3.853.184.836,00
18	Belanja Bantuan Sosial	970.640.000,00	876.212.731,00	90,27	471.484.588,00
19	**BELANJA MODAL**	**190.832.037.953,00**	**164.639.582.130,00**	**86,27**	**142.003.462.707,00**
20	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.569.593.220,00	25.876.770.459,00	87,51	28.871.620.930,00
22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.879.361.653,00	21.708.856.761,00	75,17	32.557.717.902,00

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6
23	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	131.490.757.080,00	115.471.089.584,00	87,82	76.035.794.152,00
24	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	892.326.000,00	1.582.865.326,00	177,39	4.538.329.723,00
25	**BELANJA TAK TERDUGA**	**2.114.665.260,00**	**1.587.597.109,00**	**75,08**	**24.195.818.997,00**
26	Belanja Tak Terduga	2.114.665.260,00	1.587.597.109,00	75,08	24.195.818.997,00
27	**BELANJA TRANSFER**	**119.789.616.987,00**	**119.166.749.510,00**	**99,48**	**115.966.872.197,00**
28	Belanja Bagi Hasil	2.506.385.687,00	2.446.929.619,00	97,63	1.563.200.931,00
29	Belanja Bantuan Keuangan	117.283.231.300,00	116.719.819.891,00	99,52	114.403.671.266,00
30	**SURPLUS / (DEFISIT)**	**(41.255.059.126,00)**	**758.940.696,35**	(1,84)	**11.304.332.193,51**
31	**PEMBIAYAAN**				
32	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**41.255.059.126,00**	**41.255.059.126,74**	**100,00**	**29.950.726.933,23**
33	Penggunaan SiLPA Tahun sebelumnya	41.255.059.126,00	41.255.059.126,74	100,00	29.950.726.933,23
34	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
36	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**PEMBIAYAAN NETTO**	**41.255.059.126,00**	**41.255.059.126,74**	**100,00**	**29.950.726.933,23**
38	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)**	**0,00**	**42.013.999.823,09**		**41.255.059.126,74**

Tuapejat, 19 Agustus 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran I.1 : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	865.799.014.618,00	830.153.085.297,37	(35.645.929.320,63)	95,88
4 . 1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	10.124.047.293,00	5.454.206.210,00	(4.669.841.083,00)	53,87
4 . 1.02	**Kesehatan**	9.509.564.329,00	5.101.224.691,00	(4.408.339.638,00)	53,64
4 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01	Dinas Kesehatan	7.009.564.329,00	3.976.429.081,00	(3.033.135.248,00)	56,73
4 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02	Rumah Sakit Umum Daerah	2.500.000.000,00	1.124.795.610,00	(1.375.204.390,00)	44,99
4 . 1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	614.482.964,00	352.981.519,00	(261.501.445,00)	57,44
4 . 1.03 . 1-03.2-10.0-00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	614.482.964,00	352.981.519,00	(261.501.445,00)	57,44
4 . 2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	1.643.613.697,00	452.511.326,00	(1.191.102.371,00)	27,53
4 . 2.09	**Perhubungan**	1.402.007.031,00	305.266.100,00	(1.096.740.931,00)	21,77
4 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.01	Dinas Perhubungan	1.402.007.031,00	305.266.100,00	(1.096.740.931,00)	21,77
4 . 2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	44.999.999,00	31.894.000,00	(13.105.999,00)	70,88
4 . 2.11 . 2-17.0-00.0-00.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	44.999.999,00	31.894.000,00	(13.105.999,00)	70,88
4 . 2.12	**Penanaman Modal**	196.606.667,00	115.351.226,00	(81.255.441,00)	58,67
4 . 2.12 . 2-18.0-00.0-00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	196.606.667,00	115.351.226,00	(81.255.441,00)	58,67
4 . 3	**Urusan Pilihan**	4.027.007.031,00	1.045.132.000,00	(2.981.875.031,00)	25,95
4 . 3.01	**Kelautan dan Perikanan**	220.000.000,00	186.432.000,00	(33.568.000,00)	84,74
4 . 3.01 . 3-27.0-00.0-00.01	Dinas Perikanan	220.000.000,00	186.432.000,00	(33.568.000,00)	84,74
4 . 3.02	**Pariwisata**	3.807.007.031,00	858.700.000,00	(2.948.307.031,00)	22,56
4 . 3.02 . 3-26.2-19.0-00.01	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.807.007.031,00	858.700.000,00	(2.948.307.031,00)	22,56
4 . 4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	850.004.346.597,00	823.201.235.761,37	(26.803.110.835,63)	96,85
4 . 4.04	**Keuangan**	850.004.346.597,00	823.201.235.761,37	(26.803.110.835,63)	96,85
4 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01	Badan Keuangan Daerah	850.004.346.597,00	823.201.235.761,37	(26.803.110.835,63)	96,85

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5	**BELANJA DAERAH**	907.054.073.744,00	829.394.144.601,02	(77.659.929.142,98)	91,44
5 . 1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	512.513.331.738,00	459.298.849.158,02	(53.214.482.579,98)	89,62
5 . 1.01	**Pendidikan**	175.644.605.348,00	169.807.704.402,00	(5.836.900.946,00)	96,68
5 . 1.01 . 1-01.22-2.0-00.01	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	175.644.605.348,00	169.807.704.402,00	(5.836.900.946,00)	96,68
5 . 1.01 . 1-01.22-2.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	152.682.010.332,00	149.004.961.986,00	(3.677.048.346,00)	97,59
5 . 1.01 . 1-01.22-2.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	119.822.744.782,00	117.920.865.492,00	(1.901.879.290,00)	98,41
5 . 1.01 . 1-01.22-2.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.143.165.550,00	27.861.522.994,00	(1.281.642.556,00)	95,60
5 . 1.01 . 1-01.22-2.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	3.716.100.000,00	3.222.573.500,00	(493.526.500,00)	86,72
5 . 1.01 . 1-01.22-2.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	22.962.595.016,00	20.802.742.416,00	(2.159.852.600,00)	90,59
5 . 1.01 . 1-01.22-2.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.893.720.696,00	6.498.935.889,00	(2.394.784.807,00)	73,07
5 . 1.01 . 1-01.22-2.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.528.928.320,00	13.072.524.201,00	(456.404.119,00)	96,63
5 . 1.01 . 1-01.22-2.0-00.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	539.946.000,00	1.231.282.326,00	691.336.326,00	228,04
5 . 1.02	**Kesehatan**	142.190.627.442,00	120.211.094.757,02	(21.979.532.684,98)	84,54
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01	**Dinas Kesehatan**	114.383.943.530,00	94.680.685.379,02	(19.703.258.150,98)	82,77
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	89.787.979.339,00	76.070.787.608,02	(13.717.191.730,98)	84,72
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	33.701.169.059,00	33.010.568.614,00	(690.600.445,00)	97,95
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.398.570.280,00	42.414.578.263,02	(12.983.992.016,98)	76,56
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	200.000.000,00	188.000.000,00	(12.000.000,00)	94,00
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	488.240.000,00	457.640.731,00	(30.599.269,00)	93,73
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	24.595.964.191,00	18.609.897.771,00	(5.986.066.420,00)	75,66
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.398.628.858,00	10.606.188.361,00	(792.440.497,00)	93,05
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.902.835.333,00	6.709.406.410,00	(5.193.428.923,00)	56,37
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.294.500.000,00	1.294.303.000,00	(197.000,00)	99,98
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02	**Rumah Sakit Umum Daerah**	27.806.683.912,00	25.530.409.378,00	(2.276.274.534,00)	91,81
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 1	**BELANJA OPERASI**	25.814.257.960,00	23.623.403.280,00	(2.190.854.680,00)	91,51
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	10.997.705.209,00	10.234.025.082,00	(763.680.127,00)	93,06
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.816.552.751,00	13.389.378.198,00	(1.427.174.553,00)	90,37
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 2	**BELANJA MODAL**	1.992.425.952,00	1.907.006.098,00	(85.419.854,00)	95,71
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.02 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.992.425.952,00	1.907.006.098,00	(85.419.854,00)	95,71
5 . 1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	161.182.774.960,00	138.080.609.781,00	(23.102.165.179,00)	85,67
5 . 1.03 . 1-03.2-10.0-00.01	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	161.182.774.960,00	138.080.609.781,00	(23.102.165.179,00)	85,67
5 . 1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	34.616.584.744,00	27.707.218.344,00	(6.909.366.400,00)	80,04
5 . 1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.511.849.125,00	6.336.528.683,00	(175.320.442,00)	97,31
5 . 1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.104.735.619,00	21.370.689.661,00	(6.734.045.958,00)	76,04

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	126.566.190.216,00	110.373.391.437,00	(16.192.798.779,00)	87,21
5 . 1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	448.314.645,00	409.534.818,00	(38.779.827,00)	91,35
5 . 1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.116.335.000,00	1.765.790.480,00	(350.544.520,00)	83,44
5 . 1.03 . 1-03.2-10.0-00.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	124.001.540.571,00	108.198.066.139,00	(15.803.474.432,00)	87,26
5 . 1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	7.489.343.515,00	6.977.724.893,00	(511.618.622,00)	93,17
5 . 1.04 . 1-04.1-03.0-00.01	**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**	7.489.343.515,00	6.977.724.893,00	(511.618.622,00)	93,17
5 . 1.04 . 1-04.1-03.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	6.228.148.559,00	5.927.077.238,00	(301.071.321,00)	95,17
5 . 1.04 . 1-04.1-03.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.671.405.139,00	2.503.315.134,00	(168.090.005,00)	93,71
5 . 1.04 . 1-04.1-03.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.556.743.420,00	3.423.762.104,00	(132.981.316,00)	96,26
5 . 1.04 . 1-04.1-03.0-00.01 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1.04 . 1-04.1-03.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	1.261.194.956,00	1.050.647.655,00	(210.547.301,00)	83,31
5 . 1.04 . 1-04.1-03.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.576.832,00	125.351.200,00	(225.632,00)	99,82
5 . 1.04 . 1-04.1-03.0-00.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.135.618.124,00	925.296.455,00	(210.321.669,00)	81,48
5 . 1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	19.925.442.843,00	18.536.443.927,00	(1.388.998.916,00)	93,03
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01	**Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	9.543.139.747,00	8.880.154.173,00	(662.985.574,00)	93,05
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	9.480.434.919,00	8.830.155.173,00	(650.279.746,00)	93,14
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.254.372.074,00	3.131.437.289,00	(122.934.785,00)	96,22
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.226.062.845,00	5.698.717.884,00	(527.344.961,00)	91,53
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	62.704.828,00	49.999.000,00	(12.705.828,00)	79,74
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.704.828,00	49.999.000,00	(12.705.828,00)	79,74
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	10.382.303.096,00	9.656.289.754,00	(726.013.342,00)	93,01
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 1	**BELANJA OPERASI**	7.895.314.818,00	7.197.625.054,00	(697.689.764,00)	91,16
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.864.033.318,00	2.781.988.400,00	(82.044.918,00)	97,14
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.031.281.500,00	4.415.636.654,00	(615.644.846,00)	87,76
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 2	**BELANJA MODAL**	2.486.988.278,00	2.458.664.700,00	(28.323.578,00)	98,86
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.02 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.486.988.278,00	2.458.664.700,00	(28.323.578,00)	98,86
5 . 1.06	**Sosial**	6.080.537.630,00	5.685.271.398,00	(395.266.232,00)	93,50
5 . 1.06 . 1-06.2-08.0-00.01	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	6.080.537.630,00	5.685.271.398,00	(395.266.232,00)	93,50
5 . 1.06 . 1-06.2-08.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	5.667.952.452,00	5.281.159.848,00	(386.792.604,00)	93,18
5 . 1.06 . 1-06.2-08.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.248.242.702,00	3.025.550.812,00	(222.691.890,00)	93,14
5 . 1.06 . 1-06.2-08.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.937.309.750,00	1.837.037.036,00	(100.272.714,00)	94,82
5 . 1.06 . 1-06.2-08.0-00.01 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	482.400.000,00	418.572.000,00	(63.828.000,00)	86,77
5 . 1.06 . 1-06.2-08.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	412.585.178,00	404.111.550,00	(8.473.628,00)	97,95
5 . 1.06 . 1-06.2-08.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	412.585.178,00	404.111.550,00	(8.473.628,00)	97,95

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	62.881.330.137,00	54.750.589.515,00	(8.130.740.622,00)	87,07
5 . 2.01	**Tenaga Kerja**	349.308.100,00	337.328.650,00	(11.979.450,00)	96,57
5 . 2.01 . 2-18.0-00.0-00.01	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	349.308.100,00	337.328.650,00	(11.979.450,00)	96,57
5 . 2.01 . 2-18.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	341.494.600,00	329.515.150,00	(11.979.450,00)	96,49
5 . 2.01 . 2-18.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	420.000,00	0,00	(420.000,00)	0,00
5 . 2.01 . 2-18.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	341.074.600,00	329.515.150,00	(11.559.450,00)	96,61
5 . 2.01 . 2-18.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	7.813.500,00	7.813.500,00	0,00	100,00
5 . 2.01 . 2-18.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.813.500,00	7.813.500,00	0,00	100,00
5 . 2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	987.749.122,00	961.986.266,00	(25.762.856,00)	97,39
5 . 2.02 . 1-06.2-08.0-00.01	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	987.749.122,00	961.986.266,00	(25.762.856,00)	97,39
5 . 2.02 . 1-06.2-08.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	961.652.600,00	936.022.259,00	(25.630.341,00)	97,33
5 . 2.02 . 1-06.2-08.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	391.652.600,00	379.290.500,00	(12.362.100,00)	96,84
5 . 2.02 . 1-06.2-08.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	570.000.000,00	556.731.759,00	(13.268.241,00)	97,67
5 . 2.02 . 1-06.2-08.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	26.096.522,00	25.964.007,00	(132.515,00)	99,49
5 . 2.02 . 1-06.2-08.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.096.522,00	25.964.007,00	(132.515,00)	99,49
5 . 2.03	**Pangan**	525.047.100,00	502.949.600,00	(22.097.500,00)	95,79
5 . 2.03 . 2-09.3-27.0-00.01	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**	525.047.100,00	502.949.600,00	(22.097.500,00)	95,79
5 . 2.03 . 2-09.3-27.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	525.047.100,00	502.949.600,00	(22.097.500,00)	95,79
5 . 2.03 . 2-09.3-27.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.03 . 2-09.3-27.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	525.047.100,00	502.949.600,00	(22.097.500,00)	95,79
5 . 2.03 . 2-09.3-27.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.03 . 2-09.3-27.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.05	**Lingkungan Hidup**	5.274.246.138,00	4.955.159.538,00	(319.086.600,00)	93,95
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.01	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**	5.274.246.138,00	4.955.159.538,00	(319.086.600,00)	93,95
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	5.274.246.138,00	4.955.159.538,00	(319.086.600,00)	93,95
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.843.246.658,00	2.758.211.918,00	(85.034.740,00)	97,01
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.430.999.480,00	2.196.947.620,00	(234.051.860,00)	90,37
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.06	**Administrasi Kependudukan dan Capil**	6.262.212.781,00	4.768.747.624,00	(1.493.465.157,00)	76,15
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	6.262.212.781,00	4.768.747.624,00	(1.493.465.157,00)	76,15
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	6.152.212.781,00	4.663.807.624,00	(1.488.405.157,00)	75,81

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.712.388.481,00	2.648.624.628,00	(63.763.853,00)	97,65
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.439.824.300,00	2.015.182.996,00	(1.424.641.304,00)	58,58
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	110.000.000,00	104.940.000,00	(5.060.000,00)	95,40
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.000.000,00	104.940.000,00	(5.060.000,00)	95,40
5 . 2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**	7.260.563.966,00	6.812.035.905,00	(448.528.061,00)	93,82
5 . 2.07 . 2-13.2-14.0-00.01	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	7.260.563.966,00	6.812.035.905,00	(448.528.061,00)	93,82
5 . 2.07 . 2-13.2-14.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	7.260.143.966,00	6.812.035.905,00	(448.108.061,00)	93,83
5 . 2.07 . 2-13.2-14.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.539.894.466,00	3.439.829.268,00	(100.065.198,00)	97,17
5 . 2.07 . 2-13.2-14.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.720.249.500,00	3.372.206.637,00	(348.042.863,00)	90,64
5 . 2.07 . 2-13.2-14.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	420.000,00	0,00	(420.000,00)	0,00
5 . 2.07 . 2-13.2-14.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	420.000,00	0,00	(420.000,00)	0,00
5 . 2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	2.663.890.398,00	950.169.118,00	(1.713.721.280,00)	35,67
5 . 2.08 . 2-13.2-14.0-00.01	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	2.663.890.398,00	950.169.118,00	(1.713.721.280,00)	35,67
5 . 2.08 . 2-13.2-14.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	2.405.602.830,00	703.314.200,00	(1.702.288.630,00)	29,24
5 . 2.08 . 2-13.2-14.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	129.200.000,00	47.945.000,00	(81.255.000,00)	37,11
5 . 2.08 . 2-13.2-14.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.276.402.830,00	655.369.200,00	(1.621.033.630,00)	28,79
5 . 2.08 . 2-13.2-14.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	258.287.568,00	246.854.918,00	(11.432.650,00)	95,57
5 . 2.08 . 2-13.2-14.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.137.568,00	85.719.248,00	(11.418.320,00)	88,25
5 . 2.08 . 2-13.2-14.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	161.150.000,00	161.135.670,00	(14.330,00)	99,99
5 . 2.09	**Perhubungan**	22.465.044.023,00	19.999.607.775,00	(2.465.436.248,00)	89,03
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.01	**Dinas Perhubungan**	22.465.044.023,00	19.999.607.775,00	(2.465.436.248,00)	89,03
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	19.965.745.303,00	17.529.011.979,00	(2.436.733.324,00)	87,80
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.901.156.528,00	4.749.395.271,00	(151.761.257,00)	96,90
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.910.588.775,00	4.591.936.098,00	(1.318.652.677,00)	77,69
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.01 . 1 . 4	Belanja Subsidi	8.650.000.000,00	7.685.794.613,00	(964.205.387,00)	88,85
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	504.000.000,00	501.885.997,00	(2.114.003,00)	99,58
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	2.499.298.720,00	2.470.595.796,00	(28.702.924,00)	98,85
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	574.253.334,00	546.969.090,00	(27.284.244,00)	95,25
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.925.045.386,00	1.923.626.706,00	(1.418.680,00)	99,93
5 . 2.10	**Komunikasi dan Informatika**	7.914.072.373,00	7.082.158.514,00	(831.913.859,00)	89,49
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	7.914.072.373,00	7.082.158.514,00	(831.913.859,00)	89,49
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	7.844.796.959,00	7.015.967.174,00	(828.829.785,00)	89,43
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.614.455.859,00	2.505.165.957,00	(109.289.902,00)	95,82

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.230.341.100,00	4.510.801.217,00	(719.539.883,00)	86,24
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01 . 2	**BELANJA MODAL**	69.275.414,00	66.191.340,00	(3.084.074,00)	95,55
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.275.414,00	66.191.340,00	(3.084.074,00)	95,55
5 . 2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	614.991.600,00	544.668.860,00	(70.322.740,00)	88,57
5 . 2.11 . 2-17.0-00.0-00.01	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**	614.991.600,00	544.668.860,00	(70.322.740,00)	88,57
5 . 2.11 . 2-17.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	478.450.800,00	413.768.860,00	(64.681.940,00)	86,48
5 . 2.11 . 2-17.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	680.000,00	(420.000,00)	61,82
5 . 2.11 . 2-17.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	477.350.800,00	413.088.860,00	(64.261.940,00)	86,54
5 . 2.11 . 2-17.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	136.540.800,00	130.900.000,00	(5.640.800,00)	95,87
5 . 2.11 . 2-17.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.540.800,00	130.900.000,00	(5.640.800,00)	95,87
5 . 2.11 . 2-17.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.12	**Penanaman Modal**	3.913.173.720,00	3.526.338.885,00	(386.834.835,00)	90,11
5 . 2.12 . 2-18.0-00.0-00.01	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	3.913.173.720,00	3.526.338.885,00	(386.834.835,00)	90,11
5 . 2.12 . 2-18.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	3.913.173.720,00	3.526.338.885,00	(386.834.835,00)	90,11
5 . 2.12 . 2-18.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.453.886.920,00	2.351.084.171,00	(102.802.749,00)	95,81
5 . 2.12 . 2-18.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.459.286.800,00	1.175.254.714,00	(284.032.086,00)	80,54
5 . 2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**	192.231.900,00	192.230.500,00	(1.400,00)	100,00
5 . 2.13 . 3-26.2-19.0-00.01	**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**	192.231.900,00	192.230.500,00	(1.400,00)	100,00
5 . 2.13 . 3-26.2-19.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	192.231.900,00	192.230.500,00	(1.400,00)	100,00
5 . 2.13 . 3-26.2-19.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.231.900,00	117.230.500,00	(1.400,00)	100,00
5 . 2.13 . 3-26.2-19.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.16	**Kebudayaan**	890.354.388,00	627.614.198,00	(262.740.190,00)	70,49
5 . 2.16 . 1-01.22-2.0-00.01	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	890.354.388,00	627.614.198,00	(262.740.190,00)	70,49
5 . 2.16 . 1-01.22-2.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	874.526.440,00	615.218.259,00	(259.308.181,00)	70,35
5 . 2.16 . 1-01.22-2.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.16 . 1-01.22-2.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	874.526.440,00	615.218.259,00	(259.308.181,00)	70,35
5 . 2.16 . 1-01.22-2.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	15.827.948,00	12.395.939,00	(3.432.009,00)	78,32
5 . 2.16 . 1-01.22-2.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.827.948,00	12.395.939,00	(3.432.009,00)	78,32
5 . 2.17	**Perpustakaan**	3.512.098.528,00	3.433.403.082,00	(78.695.446,00)	97,76
5 . 2.17 . 2-24.2-23.0-00.01	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**	3.512.098.528,00	3.433.403.082,00	(78.695.446,00)	97,76
5 . 2.17 . 2-24.2-23.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	3.512.098.528,00	3.433.403.082,00	(78.695.446,00)	97,76
5 . 2.17 . 2-24.2-23.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.599.561.078,00	2.546.649.398,00	(52.911.680,00)	97,96

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.17 . 2-24.2-23.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	912.537.450,00	886.753.684,00	(25.783.766,00)	97,17
5 . 2.18	**Kearsipan**	56.346.000,00	56.191.000,00	(155.000,00)	99,72
5 . 2.18 . 2-24.2-23.0-00.01	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**	56.346.000,00	56.191.000,00	(155.000,00)	99,72
5 . 2.18 . 2-24.2-23.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	56.346.000,00	56.191.000,00	(155.000,00)	99,72
5 . 2.18 . 2-24.2-23.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.346.000,00	56.191.000,00	(155.000,00)	99,72
5 . 3	**Urusan Pilihan**	51.888.195.408,00	47.591.840.506,00	(4.296.354.902,00)	91,72
5 . 3.01	**Kelautan dan Perikanan**	21.201.934.999,00	20.310.187.204,00	(891.747.795,00)	95,79
5 . 3.01 . 3-27.0-00.0-00.01	**Dinas Perikanan**	21.201.934.999,00	20.310.187.204,00	(891.747.795,00)	95,79
5 . 3.01 . 3-27.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	20.887.652.326,00	20.007.229.404,00	(880.422.922,00)	95,78
5 . 3.01 . 3-27.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.946.578.115,00	3.870.289.559,00	(76.288.556,00)	98,07
5 . 3.01 . 3-27.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.941.074.211,00	16.136.939.845,00	(804.134.366,00)	95,25
5 . 3.01 . 3-27.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	314.282.673,00	302.957.800,00	(11.324.873,00)	96,40
5 . 3.01 . 3-27.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	314.282.673,00	302.957.800,00	(11.324.873,00)	96,40
5 . 3.02	**Pariwisata**	7.775.385.989,00	7.582.903.115,00	(192.482.874,00)	97,52
5 . 3.02 . 3-26.2-19.0-00.01	**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**	7.775.385.989,00	7.582.903.115,00	(192.482.874,00)	97,52
5 . 3.02 . 3-26.2-19.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	7.775.385.989,00	7.582.903.115,00	(192.482.874,00)	97,52
5 . 3.02 . 3-26.2-19.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.179.742.389,00	4.085.495.603,00	(94.246.786,00)	97,75
5 . 3.02 . 3-26.2-19.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.595.643.600,00	3.497.407.512,00	(98.236.088,00)	97,27
5 . 3.03	**Pertanian**	16.151.987.046,00	14.275.127.046,00	(1.876.860.000,00)	88,38
5 . 3.03 . 2-09.3-27.0-00.01	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**	16.151.987.046,00	14.275.127.046,00	(1.876.860.000,00)	88,38
5 . 3.03 . 2-09.3-27.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	13.068.934.047,00	11.195.775.879,00	(1.873.158.168,00)	85,67
5 . 3.03 . 2-09.3-27.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.059.746.163,00	6.821.572.165,00	(238.173.998,00)	96,63
5 . 3.03 . 2-09.3-27.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.009.187.884,00	4.374.203.714,00	(1.634.984.170,00)	72,79
5 . 3.03 . 2-09.3-27.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	3.083.052.999,00	3.079.351.167,00	(3.701.832,00)	99,88
5 . 3.03 . 2-09.3-27.0-00.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.083.052.999,00	3.079.351.167,00	(3.701.832,00)	99,88
5 . 3.07	**Perindustrian**	6.758.887.374,00	5.423.623.141,00	(1.335.264.233,00)	80,24
5 . 3.07 . 2-17.0-00.0-00.01	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**	6.758.887.374,00	5.423.623.141,00	(1.335.264.233,00)	80,24
5 . 3.07 . 2-17.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	5.583.274.374,00	5.418.123.141,00	(165.151.233,00)	97,04
5 . 3.07 . 2-17.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.603.494.174,00	2.487.541.443,00	(115.952.731,00)	95,55
5 . 3.07 . 2-17.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.079.780.200,00	1.030.581.698,00	(49.198.502,00)	95,44
5 . 3.07 . 2-17.0-00.0-00.01 . 1 . 4	Belanja Subsidi	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	100,00
5 . 3.07 . 2-17.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	1.175.613.000,00	5.500.000,00	(1.170.113.000,00)	0,47

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 3.07 . 2-17.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00
5 . 3.07 . 2-17.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.170.113.000,00	0,00	(1.170.113.000,00)	0,00
5 . 4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	279.771.216.461,00	267.752.865.422,00	(12.018.351.039,00)	95,70
5 . 4.01	**Administrasi Pemerintahan**	43.306.457.367,00	40.939.226.269,00	(2.367.231.098,00)	94,53
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01	**Sekretariat Daerah**	43.306.457.367,00	40.939.226.269,00	(2.367.231.098,00)	94,53
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	42.850.768.928,00	40.503.922.407,00	(2.346.846.521,00)	94,52
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	12.044.586.265,00	11.791.487.869,00	(253.098.396,00)	97,90
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.486.182.663,00	28.392.434.538,00	(2.093.748.125,00)	93,13
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	100,00
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	455.688.439,00	435.303.862,00	(20.384.577,00)	95,53
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	404.688.439,00	384.857.745,00	(19.830.694,00)	95,10
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.01 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.000.000,00	50.446.117,00	(553.883,00)	98,91
5 . 4.02	**Pengawasan**	9.371.557.934,00	8.576.662.978,00	(794.894.956,00)	91,52
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01	**Inspektorat**	9.371.557.934,00	8.576.662.978,00	(794.894.956,00)	91,52
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	9.270.201.538,00	8.479.916.800,00	(790.284.738,00)	91,47
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.925.642.978,00	3.782.678.098,00	(142.964.880,00)	96,36
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.344.558.560,00	4.697.238.702,00	(647.319.858,00)	87,89
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	101.356.396,00	96.746.178,00	(4.610.218,00)	95,45
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.356.396,00	96.746.178,00	(4.610.218,00)	95,45
5 . 4.03	**Perencanaan**	7.232.302.053,00	6.467.269.133,00	(765.032.920,00)	89,42
5 . 4.03 . 5-01.0-00.0-00.01	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	7.232.302.053,00	6.467.269.133,00	(765.032.920,00)	89,42
5 . 4.03 . 5-01.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	7.038.595.401,00	6.373.679.133,00	(664.916.268,00)	90,55
5 . 4.03 . 5-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.177.780.661,00	3.102.858.068,00	(74.922.593,00)	97,64
5 . 4.03 . 5-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.860.814.740,00	3.270.821.065,00	(589.993.675,00)	84,72
5 . 4.03 . 5-01.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	193.706.652,00	93.590.000,00	(100.116.652,00)	48,32
5 . 4.03 . 5-01.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193.706.652,00	93.590.000,00	(100.116.652,00)	48,32
5 . 4.03 . 5-01.0-00.0-00.01 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.04	**Keuangan**	150.066.756.045,00	146.439.755.450,00	(3.627.000.595,00)	97,58
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01	**Badan Keuangan Daerah**	150.066.756.045,00	146.439.755.450,00	(3.627.000.595,00)	97,58
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	27.238.305.593,00	24.770.935.835,00	(2.467.369.758,00)	90,94
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	16.349.892.843,00	15.155.813.960,00	(1.194.078.883,00)	92,70
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.888.412.750,00	9.615.121.875,00	(1.273.290.875,00)	88,31
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	924.168.205,00	914.472.996,00	(9.695.209,00)	98,95
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	571.788.205,00	562.889.996,00	(8.898.209,00)	98,44

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	352.380.000,00	351.583.000,00	(797.000,00)	99,77
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	2.114.665.260,00	1.587.597.109,00	(527.068.151,00)	75,08
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	2.114.665.260,00	1.587.597.109,00	(527.068.151,00)	75,08
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 4	**BELANJA TRANSFER**	119.789.616.987,00	119.166.749.510,00	(622.867.477,00)	99,48
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	2.506.385.687,00	2.446.929.619,00	(59.456.068,00)	97,63
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	117.283.231.300,00	116.719.819.891,00	(563.411.409,00)	99,52
5 . 4.05	**Kepegawaian**	7.491.420.374,00	6.884.711.746,00	(606.708.628,00)	91,90
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	7.491.420.374,00	6.884.711.746,00	(606.708.628,00)	91,90
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	7.491.420.374,00	6.884.711.746,00	(606.708.628,00)	91,90
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.224.958.218,00	3.961.273.940,00	(263.684.278,00)	93,76
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.266.462.156,00	2.923.437.806,00	(343.024.350,00)	89,50
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.01 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.07	**Penelitian dan Pengembangan**	1.135.038.100,00	1.099.859.109,00	(35.178.991,00)	96,90
5 . 4.07 . 5-01.0-00.0-00.01	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	1.135.038.100,00	1.099.859.109,00	(35.178.991,00)	96,90
5 . 4.07 . 5-01.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.135.038.100,00	1.099.859.109,00	(35.178.991,00)	96,90
5 . 4.07 . 5-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00
5 . 4.07 . 5-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.131.638.100,00	1.096.459.109,00	(35.178.991,00)	96,89
5 . 4.08	**Sekretariat DPRD**	31.490.747.963,00	28.914.041.234,00	(2.576.706.729,00)	91,82
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01	**SEKRETARIAT DPRD**	31.490.747.963,00	28.914.041.234,00	(2.576.706.729,00)	91,82
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	30.719.801.495,00	28.257.582.234,00	(2.462.219.261,00)	91,98
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	12.460.045.095,00	11.911.175.257,00	(548.869.838,00)	95,59
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.259.756.400,00	16.346.406.977,00	(1.913.349.423,00)	89,52
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	770.946.468,00	656.459.000,00	(114.487.468,00)	85,15
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	770.946.468,00	656.459.000,00	(114.487.468,00)	85,15
5 . 4.11	**Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan**	26.976.094.676,00	25.869.269.163,00	(1.106.825.513,00)	95,90
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01	**Kecamatan Siberut Utara**	6.231.039.306,00	5.931.666.527,00	(299.372.779,00)	95,20
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	6.201.015.986,00	5.901.645.527,00	(299.370.459,00)	95,17
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.885.750.010,00	1.825.106.558,00	(60.643.452,00)	96,78
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.033.786.800,00	1.003.511.900,00	(30.274.900,00)	97,07
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.339.229.976,00	2.239.431.039,00	(99.798.937,00)	95,73
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	942.249.200,00	833.596.030,00	(108.653.170,00)	88,47
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01 . 2	**BELANJA MODAL**	30.023.320,00	30.021.000,00	(2.320,00)	99,99

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.991.424,00	10.991.000,00	(424,00)	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.01 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.031.896,00	19.030.000,00	(1.896,00)	99,99
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.02	**Kecamatan Siberut Tengah**	2.422.859.360,00	2.279.149.125,00	(143.710.235,00)	94,07
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.02 . 1	**BELANJA OPERASI**	2.422.859.360,00	2.279.149.125,00	(143.710.235,00)	94,07
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.02 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.460.803.360,00	1.369.797.125,00	(91.006.235,00)	93,77
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.02 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	962.056.000,00	909.352.000,00	(52.704.000,00)	94,52
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.03	**Kecamatan Siberut Barat**	2.306.532.847,00	2.241.260.202,00	(65.272.645,00)	97,17
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.03 . 1	**BELANJA OPERASI**	2.306.532.847,00	2.241.260.202,00	(65.272.645,00)	97,17
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.03 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.110.844.947,00	1.053.186.752,00	(57.658.195,00)	94,81
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.03 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.195.687.900,00	1.188.073.450,00	(7.614.450,00)	99,36
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.04	**Kecamatan Siberut Barat Daya**	2.264.498.455,00	2.214.131.085,00	(50.367.370,00)	97,78
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.04 . 1	**BELANJA OPERASI**	2.227.235.455,00	2.177.552.085,00	(49.683.370,00)	97,77
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.04 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.444.636.630,00	1.401.758.687,00	(42.877.943,00)	97,03
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.04 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	782.598.825,00	775.793.398,00	(6.805.427,00)	99,13
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.04 . 2	**BELANJA MODAL**	37.263.000,00	36.579.000,00	(684.000,00)	98,16
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.04 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.263.000,00	36.579.000,00	(684.000,00)	98,16
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.05	**Kecamatan Siberut Selatan**	2.758.145.615,00	2.652.872.192,00	(105.273.423,00)	96,18
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.05 . 1	**BELANJA OPERASI**	2.717.443.515,00	2.615.384.192,00	(102.059.323,00)	96,24
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.05 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.837.900.420,00	1.748.397.900,00	(89.502.520,00)	95,13
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.05 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	879.543.095,00	866.986.292,00	(12.556.803,00)	98,57
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.05 . 2	**BELANJA MODAL**	40.702.100,00	37.488.000,00	(3.214.100,00)	92,10
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.05 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.702.100,00	37.488.000,00	(3.214.100,00)	92,10
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.06	**Kecamatan Sipora Utara**	2.813.221.798,00	2.704.713.234,00	(108.508.564,00)	96,14
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.06 . 1	**BELANJA OPERASI**	2.790.351.376,00	2.681.863.234,00	(108.488.142,00)	96,11
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.06 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.816.642.676,00	1.729.705.019,00	(86.937.657,00)	95,21
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.06 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	973.708.700,00	952.158.215,00	(21.550.485,00)	97,79
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.06 . 2	**BELANJA MODAL**	22.870.422,00	22.850.000,00	(20.422,00)	99,91
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.06 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.870.422,00	22.850.000,00	(20.422,00)	99,91
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.08	**Kecamatan Pagai Utara**	2.441.386.748,00	2.293.721.292,00	(147.665.456,00)	93,95
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.08 . 1	**BELANJA OPERASI**	2.373.567.748,00	2.236.822.292,00	(136.745.456,00)	94,24
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.08 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.515.820.598,00	1.435.667.992,00	(80.152.606,00)	94,71
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.08 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	857.747.150,00	801.154.300,00	(56.592.850,00)	93,40
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.08 . 2	**BELANJA MODAL**	67.819.000,00	56.899.000,00	(10.920.000,00)	83,90

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.08 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.819.000,00	56.899.000,00	(10.920.000,00)	83,90
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.09	**Kecamatan Sikakap**	2.914.284.117,00	2.832.635.342,00	(81.648.775,00)	97,20
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.09 . 1	**BELANJA OPERASI**	2.914.284.117,00	2.832.635.342,00	(81.648.775,00)	97,20
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.09 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.241.200.735,00	2.170.919.939,00	(70.280.796,00)	96,86
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.09 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	673.083.382,00	661.715.403,00	(11.367.979,00)	98,31
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.10	**Kecamatan Pagai Selatan**	2.824.126.430,00	2.719.120.164,00	(105.006.266,00)	96,28
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.10 . 1	**BELANJA OPERASI**	2.673.790.238,00	2.569.872.164,00	(103.918.074,00)	96,11
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.10 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.572.586.638,00	1.491.068.423,00	(81.518.215,00)	94,82
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.10 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.101.203.600,00	1.078.803.741,00	(22.399.859,00)	97,97
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.10 . 2	**BELANJA MODAL**	150.336.192,00	149.248.000,00	(1.088.192,00)	99,28
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.10 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.336.192,00	149.248.000,00	(1.088.192,00)	99,28
5 . 4.12	**Kesatuan Bangsa dan Politik**	2.700.841.949,00	2.562.070.340,00	(138.771.609,00)	94,86
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.01	**KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	2.700.841.949,00	2.562.070.340,00	(138.771.609,00)	94,86
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.01 . 1	**BELANJA OPERASI**	2.700.841.949,00	2.562.070.340,00	(138.771.609,00)	94,86
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.189.794.149,00	1.136.505.120,00	(53.289.029,00)	95,52
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.01 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	883.819.800,00	798.337.220,00	(85.482.580,00)	90,33
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.01 . 1 . 5	Belanja Hibah	627.228.000,00	627.228.000,00	0,00	100,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6 . 1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**				
6 . 1.01	**Pendidikan**				
6 . 1.01 . 1-01.22-2.0-00.01	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**				
6 . 1.01 . 1-01.22-2.0-00.01 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	0,00	4.114.453.198,00	4.114.453.198,00	0,00
6 . 1.01 . 1-01.22-2.0-00.01 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	4.114.453.198,00	4.114.453.198,00	0,00
6 . 1.02	**Kesehatan**				
6 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01	**Dinas Kesehatan**				
6 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	0,00	4.095.726.892,00	4.095.726.892,00	0,00
6 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	4.095.726.892,00	4.095.726.892,00	0,00
6 . 4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**				
6 . 4.04	**Keuangan**				
6 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01	**Badan Keuangan Daerah**				
6 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	41.255.059.126,00	33.044.879.036,74	(8.210.180.089,26)	80,10
6 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.01 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.255.059.126,00	33.044.879.036,74	(8.210.180.089,26)	80,10

Tuapejat, 19 Agustus 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

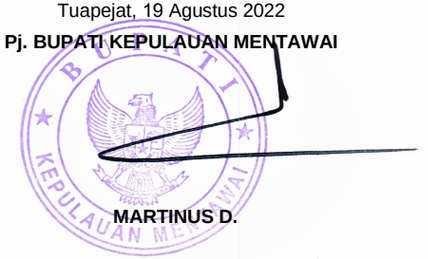

MARTINUS D.

Lampiran I.2 : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
4	**PENDAPATAN**				
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**				
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	7.661.649.285,00	3.860.497.217,00	50,39	3.531.794.196,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	8.976.710.358,00	3.033.172.955,00	33,79	5.976.710.358,00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	10.684.123.854,00	10.684.123.854,00	100,00	12.591.521.757,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	18.017.957.663,00	14.060.219.003,37	78,03	12.805.647.244,51
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**45.340.441.160,00**	**31.638.013.029,37**	**69,78**	**34.905.673.555,51**
4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER - LRA**				
4 . 2 . 1a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	755.604.196.205,00	742.958.193.981,00	98,33	651.902.981.143,00
4 . 2 . 2a	Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah - LRA	40.301.142.253,00	32.308.263.287,00	80,17	64.864.588.192,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	**795.905.338.458,00**	**775.266.457.268,00**	**97,41**	**716.767.569.335,00**
4 . 4	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA**				
4 . 4 . 1a	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.553.235.000,00	23.248.615.000,00	94,69	81.213.571.106,00
	Jumlah Pendapatan Lain - lain yang Sah	**24.553.235.000,00**	**23.248.615.000,00**	**94,69**	**81.213.571.106,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**865.799.014.618,00**	**830.153.085.297,37**	**95,88**	**832.886.813.996,51**
5	BELANJA				
5 . 1	**BELANJA OPERASI**				
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	293.257.908.438,00	284.566.995.633,00	97,04	247.582.508.950,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	283.526.877.106,00	243.479.793.619,02	85,88	280.774.442.528,00
5 . 1 . 4	Belanja Subsidi	10.550.000.000,00	9.585.794.613,00	90,86	6.734.707.000,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	6.012.328.000,00	5.491.419.256,00	91,34	3.853.184.836,00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	970.640.000,00	876.212.731,00	90,27	471.484.588,00
	Jumlah Belanja Operasi	**594.317.753.544,00**	**544.000.215.852,02**	**91,53**	**539.416.327.902,00**
5 . 2	**BELANJA MODAL**				
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00		0,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.569.593.220,00	25.876.770.459,00	87,51	28.871.620.930,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.879.361.653,00	21.708.856.761,00	75,17	32.557.717.902,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	131.490.757.080,00	115.471.089.584,00	87,82	76.035.794.152,00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	892.326.000,00	1.582.865.326,00	177,39	4.538.329.723,00
	Jumlah Belanja Modal	**190.832.037.953,00**	**164.639.582.130,00**	**86,27**	**142.003.462.707,00**

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020
5 . 3	**BELANJA TAK TERDUGA**				
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	2.114.665.260,00	1.587.597.109,00	75,08	24.195.818.997,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga	**2.114.665.260,00**	**1.587.597.109,00**	**75,08**	**24.195.818.997,00**
	Jumlah Belanja	**787.264.456.757,00**	**710.227.395.091,02**	**90,21**	**705.615.609.606,00**
5 . 4	**BELANJA TRANSFER**				
5 . 4 . 1a	Belanja Bagi Hasil	2.506.385.687,00	2.446.929.619,00	97,63	1.563.200.931,00
5 . 4 . 2a	Belanja Bantuan Keuangan	117.283.231.300,00	116.719.819.891,00	99,52	114.403.671.266,00
	Jumlah Transfer	**119.789.616.987,00**	**119.166.749.510,00**	**99,48**	**115.966.872.197,00**
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**907.054.073.744,00**	**829.394.144.601,02**	**91,44**	**821.582.481.803,00**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(41.255.059.126,00)**	**758.940.696,35**	**-1,84**	**11.304.332.193,51**
7	PEMBIAYAAN				
7 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**				
7 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA	41.255.059.126,00	41.255.059.126,74	100,00	29.950.726.933,23
7 . 1 . 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00		0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**41.255.059.126,00**	**41.255.059.126,74**	**100,00**	**29.950.726.933,23**
7 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
7 . 2 . 2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**41.255.059.126,00**	**41.255.059.126,74**	**100,00**	**29.950.726.933,23**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**42.013.999.823,09**		**41.255.059.126,74**

Tuapejat, 19 Agustus 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	**176.534.959.736,00**	**170.435.318.600,00**	**6.099.641.136,00**	**96,54**	
	URUSAN PEMERITAHAHAN BIDANG PENDIDIKAN	**175.644.605.348,00**	**169.807.704.402,00**	**5.836.900.946,00**	**96,68**	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**55.981.744.216,00**	**52.114.437.693,00**	**3.867.306.523,00**	**93,09**	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**34.303.287.520,00**	**31.305.358.692,00**	**2.997.928.828,00**	**91,26**	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 01	*Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)*	333.790.800,00	141.433.000,00	192.357.800,00	42,37	
	Belanja Operasi	59.630.000,00	41.385.000,00	18.245.000,00	69,40	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	27.970.000,00	18.000.000,00	9.970.000,00	64,35	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.660.000,00	23.385.000,00	8.275.000,00	73,86	
	Belanja Modal	274.160.800,00	100.048.000,00	174.112.800,00	36,49	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	274.160.800,00	100.048.000,00	174.112.800,00	36,49	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 02	*Penambahan Ruang Kelas Baru*	2.440.532.800,00	2.407.463.252,00	33.069.548,00	98,64	
	Belanja Operasi	150.024.000,00	119.285.000,00	30.739.000,00	79,51	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	35.800.000,00	26.900.000,00	8.900.000,00	75,14	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.224.000,00	92.385.000,00	21.839.000,00	80,88	
	Belanja Modal	2.290.508.800,00	2.288.178.252,00	2.330.548,00	99,90	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.290.508.800,00	2.288.178.252,00	2.330.548,00	99,90	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03	*Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU*	1.213.571.200,00	943.779.569,00	269.791.631,00	77,77	
	Belanja Operasi	109.791.200,00	77.420.000,00	32.371.200,00	70,52	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	25.760.000,00	21.360.000,00	4.400.000,00	82,92	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.031.200,00	56.060.000,00	27.971.200,00	66,71	
	Belanja Modal	1.103.780.000,00	866.359.569,00	237.420.431,00	78,49	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.800.000,00	21.605.455,00	194.545,00	99,11	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.081.980.000,00	844.754.114,00	237.225.886,00	78,07	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 05	*Pembangunan Perpustakaan Sekolah*	1.454.638.400,00	1.414.508.304,00	40.130.096,00	97,24	
	Belanja Operasi	75.208.400,00	42.648.400,00	32.560.000,00	56,71	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	34.860.000,00	32.140.000,00	2.720.000,00	92,20	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.348.400,00	10.508.400,00	29.840.000,00	26,04	
	Belanja Modal	1.379.430.000,00	1.371.859.904,00	7.570.096,00	99,45	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.379.430.000,00	1.371.859.904,00	7.570.096,00	99,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 06	*Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	1.939.839.720,00	1.913.745.667,00	26.094.053,00	98,65	
	Belanja Operasi	245.827.400,00	222.857.400,00	22.970.000,00	90,66	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	19.580.000,00	19.580.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	226.247.400,00	203.277.400,00	22.970.000,00	89,85	
	Belanja Modal	1.694.012.320,00	1.690.888.267,00	3.124.053,00	99,82	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.694.012.320,00	1.690.888.267,00	3.124.053,00	99,82	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 07	*Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah*	483.821.000,00	454.022.332,00	29.798.668,00	93,84	
	Belanja Operasi	37.729.000,00	8.180.000,00	29.549.000,00	21,68	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.010.000,00	6.330.000,00	680.000,00	90,30	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.719.000,00	1.850.000,00	28.869.000,00	6,02	
	Belanja Modal	446.092.000,00	445.842.332,00	249.668,00	99,94	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**446.092.000,00**	**445.842.332,00**	249.668,00	99,94	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 14	*Pengadaan Mebel Sekolah*	526.320.000,00	512.178.000,00	14.142.000,00	97,31	
	Belanja Operasi	83.592.000,00	70.242.000,00	13.350.000,00	84,03	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	4.080.000,00	2.520.000,00	61,82	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.992.000,00	66.162.000,00	10.830.000,00	85,93	
	Belanja Modal	442.728.000,00	441.936.000,00	792.000,00	99,82	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 14 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	442.728.000,00	441.936.000,00	792.000,00	99,82	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 21	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar*	17.513.066.000,00	15.228.990.105,00	2.284.075.895,00	86,96	
	Belanja Operasi	10.158.120.000,00	9.575.920.439,00	582.199.561,00	94,27	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 21 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.627.520.000,00	2.262.540.000,00	364.980.000,00	86,11	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 21 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.530.600.000,00	7.313.380.439,00	217.219.561,00	97,12	
	Belanja Modal	7.354.946.000,00	5.653.069.666,00	1.701.876.334,00	76,86	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 21 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.815.000.000,00	4.421.787.340,00	2.393.212.660,00	64,88	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 21 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	539.946.000,00	1.231.282.326,00	(691.336.326,00)	228,04	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 23	*Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik*	203.719.300,00	190.340.300,00	13.379.000,00	93,43	
	Belanja Operasi	203.719.300,00	190.340.300,00	13.379.000,00	93,43	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 23 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.719.300,00	190.340.300,00	13.379.000,00	93,43	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 26	*Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*	7.887.498.000,00	7.837.005.100,00	50.492.900,00	99,36	
	Belanja Operasi	7.887.498.000,00	7.837.005.100,00	50.492.900,00	99,36	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 26 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.887.498.000,00	7.837.005.100,00	50.492.900,00	99,36	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 27	*Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar*	52.228.300,00	49.607.600,00	2.620.700,00	94,98	
	Belanja Operasi	52.228.300,00	49.607.600,00	2.620.700,00	94,98	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 27 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	**52.228.300,00**	**49.607.600,00**	2.620.700,00	94,98	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 28	*Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah*	108.091.000,00	102.350.663,00	5.740.337,00	94,69	
	Belanja Operasi	108.091.000,00	102.350.663,00	5.740.337,00	94,69	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 28 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.091.000,00	102.350.663,00	5.740.337,00	94,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 29	*Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*	146.171.000,00	109.934.800,00	36.236.200,00	75,21	
	Belanja Operasi	146.171.000,00	109.934.800,00	36.236.200,00	75,21	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 29 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.171.000,00	109.934.800,00	36.236.200,00	75,21	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**19.310.096.400,00**	**18.985.557.941,00**	**324.538.459,00**	**98,32**	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02	*Penambahan Ruang Kelas Baru*	859.144.200,00	821.539.000,00	37.605.200,00	95,62	
	Belanja Operasi	82.977.000,00	45.650.000,00	37.327.000,00	55,02	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.480.000,00	9.400.000,00	80.000,00	99,16	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.497.000,00	36.250.000,00	37.247.000,00	49,32	
	Belanja Modal	776.167.200,00	775.889.000,00	278.200,00	99,96	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	776.167.200,00	775.889.000,00	278.200,00	99,96	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03	*Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU*	29.250.000,00	28.482.500,00	767.500,00	97,38	
	Belanja Operasi	870.000,00	680.000,00	190.000,00	78,16	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	870.000,00	680.000,00	190.000,00	78,16	
	Belanja Modal	28.380.000,00	27.802.500,00	577.500,00	97,97	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.380.000,00	27.802.500,00	577.500,00	97,97	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 05	*Pembangunan Perpustakaan Sekolah*	659.858.800,00	626.325.592,00	33.533.208,00	94,92	
	Belanja Operasi	136.222.000,00	102.917.592,00	33.304.408,00	75,55	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.280.000,00	8.020.000,00	260.000,00	96,86	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.942.000,00	94.897.592,00	33.044.408,00	74,17	
	Belanja Modal	523.636.800,00	523.408.000,00	228.800,00	99,96	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	523.636.800,00	523.408.000,00	228.800,00	99,96	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 06	*Pembangunan Laboratorium*	1.672.931.200,00	1.636.915.460,00	36.015.740,00	97,85	
	Belanja Operasi	137.470.000,00	118.725.000,00	18.745.000,00	86,36	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	24.840.000,00	24.420.000,00	420.000,00	98,31	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.630.000,00	94.305.000,00	18.325.000,00	83,73	
	Belanja Modal	1.535.461.200,00	1.518.190.460,00	17.270.740,00	98,88	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.535.461.200,00	1.518.190.460,00	17.270.740,00	98,88	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 09	*Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah*	964.401.800,00	939.447.100,00	24.954.700,00	97,41	
	Belanja Operasi	173.735.000,00	148.975.000,00	24.760.000,00	85,75	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	14.500.000,00	14.220.000,00	280.000,00	98,07	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	159.235.000,00	134.755.000,00	24.480.000,00	84,63	
	Belanja Modal	790.666.800,00	790.472.100,00	194.700,00	99,98	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	790.666.800,00	790.472.100,00	194.700,00	99,98	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12	*Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	292.167.600,00	274.743.262,00	17.424.338,00	94,04	
	Belanja Operasi	58.110.000,00	43.160.000,00	14.950.000,00	74,27	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.200.000,00	2.740.000,00	460.000,00	85,63	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.910.000,00	40.420.000,00	14.490.000,00	73,61	
	Belanja Modal	234.057.600,00	231.583.262,00	2.474.338,00	98,94	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	234.057.600,00	231.583.262,00	2.474.338,00	98,94	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14	*Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah*	1.796.455.600,00	1.737.957.960,00	58.497.640,00	96,74	
	Belanja Operasi	150.880.000,00	93.055.000,00	57.825.000,00	61,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	30.200.000,00	28.440.000,00	1.760.000,00	94,17	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.680.000,00	64.615.000,00	56.065.000,00	53,54	
	Belanja Modal	1.645.575.600,00	1.644.902.960,00	672.640,00	99,96	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.645.575.600,00	1.644.902.960,00	672.640,00	99,96	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 21	*Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah*	286.589.200,00	279.270.050,00	7.319.150,00	97,45	
	Belanja Operasi	53.770.000,00	46.650.000,00	7.120.000,00	86,76	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.710.000,00	5.860.000,00	1.850.000,00	76,01	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.060.000,00	40.790.000,00	5.270.000,00	88,56	
	Belanja Modal	232.819.200,00	232.620.050,00	199.150,00	99,91	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	232.819.200,00	232.620.050,00	199.150,00	99,91	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 25	*Pengadaan Mebel Sekolah*	190.597.000,00	181.309.000,00	9.288.000,00	95,13	
	Belanja Operasi	37.345.000,00	37.160.000,00	185.000,00	99,50	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 25 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 25 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.145.000,00	34.960.000,00	185.000,00	99,47	
	Belanja Modal	153.252.000,00	144.149.000,00	9.103.000,00	94,06	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 25 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	153.252.000,00	144.149.000,00	9.103.000,00	94,06	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 32	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama*	7.040.161.000,00	7.038.784.517,00	1.376.483,00	99,98	
	Belanja Operasi	5.012.161.000,00	5.011.041.423,00	1.119.577,00	99,98	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.662.296.000,00	2.661.532.623,00	763.377,00	99,97	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.349.865.000,00	2.349.508.800,00	356.200,00	99,98	
	Belanja Modal	2.028.000.000,00	2.027.743.094,00	256.906,00	99,99	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.028.000.000,00	2.027.743.094,00	256.906,00	99,99	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35	*Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 36	*Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik*	212.631.000,00	191.392.000,00	21.239.000,00	90,01	
	Belanja Operasi	212.631.000,00	191.392.000,00	21.239.000,00	90,01	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 36 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.631.000,00	191.392.000,00	21.239.000,00	90,01	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 37	*Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	83.581.000,00	74.611.000,00	8.970.000,00	89,27	
	Belanja Operasi	83.581.000,00	74.611.000,00	8.970.000,00	89,27	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 37 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.581.000,00	74.611.000,00	8.970.000,00	89,27	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39	*Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	4.753.186.000,00	4.722.447.000,00	30.739.000,00	99,35	
	Belanja Operasi	4.753.186.000,00	4.722.447.000,00	30.739.000,00	99,35	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.753.186.000,00	4.722.447.000,00	30.739.000,00	99,35	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40	*Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	184.602.000,00	157.592.000,00	27.010.000,00	85,37	
	Belanja Operasi	184.602.000,00	157.592.000,00	27.010.000,00	85,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	184.602.000,00	157.592.000,00	27.010.000,00	85,37	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 41	*Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah*	100.759.000,00	100.371.500,00	387.500,00	99,62	
	Belanja Operasi	100.759.000,00	100.371.500,00	387.500,00	99,62	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 41 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.759.000,00	100.371.500,00	387.500,00	99,62	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 42	*Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama*	183.781.000,00	174.370.000,00	9.411.000,00	94,88	
	Belanja Operasi	183.781.000,00	174.370.000,00	9.411.000,00	94,88	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 42 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	183.781.000,00	174.370.000,00	9.411.000,00	94,88	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**1.043.913.100,00**	**794.809.560,00**	**249.103.540,00**	**76,14**	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 14	*Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD*	76.820.160,00	76.170.120,00	650.040,00	99,15	
	Belanja Operasi	76.820.160,00	76.170.120,00	650.040,00	99,15	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.820.160,00	76.170.120,00	650.040,00	99,15	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 16	*Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD*	235.049.200,00	192.253.200,00	42.796.000,00	81,79	
	Belanja Operasi	235.049.200,00	192.253.200,00	42.796.000,00	81,79	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	235.049.200,00	192.253.200,00	42.796.000,00	81,79	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 17	*Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD*	160.243.740,00	159.536.240,00	707.500,00	99,56	
	Belanja Operasi	160.243.740,00	159.536.240,00	707.500,00	99,56	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 17 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.243.740,00	159.536.240,00	707.500,00	99,56	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 18	*Pengelolaan Dana BOP PAUD*	571.800.000,00	366.850.000,00	204.950.000,00	64,16	
	Belanja Operasi	571.800.000,00	366.850.000,00	204.950.000,00	64,16	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 18 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	571.800.000,00	366.850.000,00	204.950.000,00	64,16	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**1.324.447.196,00**	**1.028.711.500,00**	**295.735.696,00**	**77,67**	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 12	*Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan*	180.147.196,00	172.911.500,00	7.235.696,00	95,98	
	Belanja Operasi	151.226.500,00	145.111.500,00	6.115.000,00	95,96	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 12 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.226.500,00	145.111.500,00	6.115.000,00	95,96	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 12 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal	28.920.696,00	27.800.000,00	1.120.696,00	96,12	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 12 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.920.696,00	27.800.000,00	1.120.696,00	96,12	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 17	*Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan*	1.144.300.000,00	855.800.000,00	288.500.000,00	74,79	
	Belanja Operasi	1.144.300.000,00	855.800.000,00	288.500.000,00	74,79	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 17 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	1.144.300.000,00	855.800.000,00	288.500.000,00	74,79	
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**99.148.000,00**	**81.568.000,00**	**17.580.000,00**	**82,27**	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**99.148.000,00**	**81.568.000,00**	**17.580.000,00**	**82,27**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 01	*Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	99.148.000,00	81.568.000,00	17.580.000,00	82,27	
	Belanja Operasi	99.148.000,00	81.568.000,00	17.580.000,00	82,27	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.148.000,00	81.568.000,00	17.580.000,00	82,27	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**119.563.713.132,00**	**117.611.698.709,00**	**1.952.014.423,00**	**98,37**	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**115.730.962.782,00**	**114.121.188.869,00**	**1.609.773.913,00**	**98,61**	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	113.231.518.782,00	111.844.232.869,00	1.387.285.913,00	98,77	
	Belanja Operasi	113.231.518.782,00	111.844.232.869,00	1.387.285.913,00	98,77	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	113.231.518.782,00	111.844.232.869,00	1.387.285.913,00	98,77	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	2.499.444.000,00	2.276.956.000,00	222.488.000,00	91,10	
	Belanja Operasi	2.499.444.000,00	2.276.956.000,00	222.488.000,00	91,10	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.035.950.000,00	925.150.000,00	110.800.000,00	89,30	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.463.494.000,00	1.351.806.000,00	111.688.000,00	92,37	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**446.043.000,00**	**293.245.200,00**	**152.797.800,00**	**65,74**	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 05	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	446.043.000,00	293.245.200,00	152.797.800,00	65,74	
	Belanja Operasi	446.043.000,00	293.245.200,00	152.797.800,00	65,74	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	446.043.000,00	293.245.200,00	152.797.800,00	65,74	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	704.069.350,00	614.407.081,00	89.662.269,00	87,27	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	409.997.350,00	329.676.100,00	80.321.250,00	80,41	
	Belanja Operasi	409.997.350,00	329.676.100,00	80.321.250,00	80,41	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	409.997.350,00	329.676.100,00	80.321.250,00	80,41	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	47.397.000,00	46.137.000,00	1.260.000,00	97,34	
	Belanja Operasi	47.397.000,00	46.137.000,00	1.260.000,00	97,34	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.397.000,00	46.137.000,00	1.260.000,00	97,34	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	12.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	33,33	
	Belanja Operasi	12.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	**12.000.000,00**	**4.000.000,00**	8.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	234.675.000,00	234.593.981,00	81.019,00	99,97	
	Belanja Operasi	234.675.000,00	234.593.981,00	81.019,00	99,97	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	234.675.000,00	234.593.981,00	81.019,00	99,97	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90.000.000,00**	**42.353.506,00**	**47.646.494,00**	**47,06**	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	90.000.000,00	42.353.506,00	47.646.494,00	47,06	
	Belanja Operasi	90.000.000,00	42.353.506,00	47.646.494,00	47,06	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	**90.000.000,00**	**42.353.506,00**	47.646.494,00	47,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**592.638.000,00**	**540.580.553,00**	**52.057.447,00**	**91,22**	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	139.840.000,00	92.947.323,00	46.892.677,00	66,47	
	Belanja Operasi	139.840.000,00	92.947.323,00	46.892.677,00	66,47	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.840.000,00	92.947.323,00	46.892.677,00	66,47	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	228.413.000,00	226.479.300,00	1.933.700,00	99,15	
	Belanja Operasi	228.413.000,00	226.479.300,00	1.933.700,00	99,15	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 09 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.113.000,00	224.279.300,00	833.700,00	99,63	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	224.385.000,00	221.153.930,00	3.231.070,00	98,56	
	Belanja Operasi	224.385.000,00	221.153.930,00	3.231.070,00	98,56	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 11 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	840.000,00	2.460.000,00	25,45	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 11 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	221.085.000,00	220.313.930,00	771.070,00	99,65	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 150	**Penataan Organisasi**	2.000.000.000,00	1.999.923.500,00	76.500,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 150 . 152	*Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	2.000.000.000,00	1.999.923.500,00	76.500,00	100,00	
	Belanja Operasi	2.000.000.000,00	1.999.923.500,00	76.500,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 150 . 152 . 5 . 1 . 5	Belanja Hibah	2.000.000.000,00	1.999.923.500,00	76.500,00	100,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	**890.354.388,00**	**627.614.198,00**	**262.740.190,00**	**70,49**	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**658.896.148,00**	**468.078.458,00**	**190.817.690,00**	**71,04**	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**150.000.000,00**	**80.449.000,00**	**69.551.000,00**	**53,63**	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15 . 02	*Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan*	150.000.000,00	80.449.000,00	69.551.000,00	53,63	
	Belanja Operasi	150.000.000,00	80.449.000,00	69.551.000,00	53,63	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	80.449.000,00	69.551.000,00	53,63	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 16	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**407.630.148,00**	**293.136.258,00**	**114.493.890,00**	**71,91**	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya*	407.630.148,00	293.136.258,00	114.493.890,00	71,91	
	Belanja Operasi	391.802.200,00	280.740.319,00	111.061.881,00	71,65	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	391.802.200,00	280.740.319,00	111.061.881,00	71,65	
	Belanja Modal	15.827.948,00	12.395.939,00	3.432.009,00	78,32	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.827.948,00	12.395.939,00	3.432.009,00	78,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
2.16 . 1.01.01 . 01 . 17	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**101.266.000,00**	**94.493.200,00**	**6.772.800,00**	**93,31**	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02	*Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat*	101.266.000,00	94.493.200,00	6.772.800,00	93,31	
	Belanja Operasi	101.266.000,00	94.493.200,00	6.772.800,00	93,31	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.266.000,00	94.493.200,00	6.772.800,00	93,31	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	**177.090.000,00**	**105.900.100,00**	**71.189.900,00**	**59,80**	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 19	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**177.090.000,00**	**105.900.100,00**	**71.189.900,00**	**59,80**	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 19 . 02	*Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah*	177.090.000,00	105.900.100,00	71.189.900,00	59,80	
	Belanja Operasi	177.090.000,00	105.900.100,00	71.189.900,00	59,80	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	-	0,00	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.090.000,00	105.900.100,00	71.189.900,00	59,80	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**54.368.240,00**	**53.635.640,00**	**732.600,00**	**98,65**	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 18	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**54.368.240,00**	**53.635.640,00**	**732.600,00**	**98,65**	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01	*Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional*	54.368.240,00	53.635.640,00	732.600,00	98,65	
	Belanja Operasi	54.368.240,00	53.635.640,00	732.600,00	98,65	
2.16 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.368.240,00	53.635.640,00	732.600,00	98,65	
					0,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(176.534.959.736,00)**	**(170.435.318.600,00)**	**(6.099.641.136,00)**	**96,54**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Rumah Sakit Umum Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Rumah Sakit Umum Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.500.000.000,00**	**1.124.795.610,00**	**1.375.204.390,00**	**44,99**	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.500.000.000,00**	**1.124.795.610,00**	**1.375.204.390,00**	**44,99**	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	2.500.000.000,00	1.124.795.610,00	1.375.204.390,00	44,99	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 01 . 5	**BELANJA DAERAH**	**27.806.683.912,00**	**25.530.409.378,00**	**2.276.274.534,00**	**92,37**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	**27.806.683.912,00**	**25.530.409.378,00**	**2.276.274.534,00**	**91,12**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**20.643.903.957,00**	**19.252.065.330,00**	**1.391.838.627,00**	**92,12**	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.984.506.257,00**	**17.689.662.102,00**	**1.294.844.155,00**	**93,12**	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	10.842.545.209,00	10.088.075.082,00	754.470.127,00	93,04	
	Belanja Operasi	10.842.545.209,00	10.088.075.082,00	754.470.127,00	93,04	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	10.842.545.209,00	10.088.075.082,00	754.470.127,00	93,04	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	8.141.961.048,00	7.601.587.020,00	540.374.028,00	93,38	
	Belanja Operasi	8.141.961.048,00	7.601.587.020,00	540.374.028,00	94,13	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	133.800.000,00	125.950.000,00	7.850.000,00	94,13	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.008.161.048,00	7.475.637.020,00	532.524.028,00	93,35	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**877.797.700,00**	**813.835.829,00**	**63.961.871,00**	**92,51**	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	25.779.500,00	25.774.950,00	4.550,00	99,98	
	Belanja Operasi	25.779.500,00	25.774.950,00	4.550,00	99,98	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.779.500,00	25.774.950,00	4.550,00	99,98	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	708.810.200,00	680.909.961,00	27.900.239,00	95,81	
	Belanja Operasi	704.310.200,00	676.459.961,00	27.850.239,00	96,22	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.080.000,00	2.720.000,00	1.360.000,00	66,67	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	700.230.200,00	673.739.961,00	26.490.239,00	96,22	
	Belanja Modal	4.500.000,00	4.450.000,00	50.000,00	98,89	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.450.000,00	50.000,00	98,89	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	143.208.000,00	107.150.918,00	36.057.082,00	74,82	
	Belanja Operasi	143.208.000,00	107.150.918,00	36.057.082,00	74,82	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	143.208.000,00	107.150.918,00	36.057.082,00	74,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**419.500.000,00**	**408.340.679,00**	**11.159.321,00**	**97,34**	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	419.500.000,00	408.340.679,00	11.159.321,00	97,34	
	Belanja Operasi	419.500.000,00	408.340.679,00	11.159.321,00	97,34	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	419.500.000,00	408.340.679,00	11.159.321,00	97,34	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**362.100.000,00**	**340.226.720,00**	**21.873.280,00**	**93,96**	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	317.000.000,00	296.453.470,00	20.546.530,00	93,52	
	Belanja Operasi	317.000.000,00	296.453.470,00	20.546.530,00	93,52	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	317.000.000,00	296.453.470,00	20.546.530,00	93,52	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	45.100.000,00	43.773.250,00	1.326.750,00	97,06	
	Belanja Operasi	45.100.000,00	43.773.250,00	1.326.750,00	97,06	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 06 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.100.000,00	43.773.250,00	1.326.750,00	97,06	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**5.043.179.955,00**	**4.664.129.759,00**	**379.050.196,00**	**95,94**	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.092.914.903,00**	**2.948.055.476,00**	**144.859.427,00**	**96,94**	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 13	*Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	1.111.716.000,00	1.003.592.336,00	108.123.664,00	61,57	
	Belanja Operasi	61.716.000,00	35.324.336,00	26.391.664,00	53,43	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.040.000,00	5.040.000,00	-	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.676.000,00	30.284.336,00	26.391.664,00	53,43	
	Belanja Modal	1.050.000.000,00	968.268.000,00	81.732.000,00	98,89	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.050.000.000,00	968.268.000,00	81.732.000,00	98,89	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 16	*Pengadaan obat, Vaksin*	386.355.141,00	381.856.595,00	4.498.546,00	61,57	
	Belanja Operasi	386.355.141,00	381.856.595,00	4.498.546,00	98,83	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	382.955.141,00	378.456.595,00	4.498.546,00	98,83	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 17	*Pengadaan Bahan Habis Pakai*	1.100.763.762,00	1.083.812.545,00	16.951.217,00	98,47	
	Belanja Operasi	1.100.763.762,00	1.083.812.545,00	16.951.217,00	98,46	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 17 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	3.400.000,00	-	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 17 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.097.363.762,00	1.080.412.545,00	16.951.217,00	98,46	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 20	*Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	494.080.000,00	478.794.000,00	15.286.000,00	96,94	
	Belanja Operasi	494.080.000,00	478.794.000,00	15.286.000,00	96,88	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.080.000,00	4.080.000,00	-	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 20 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	490.000.000,00	474.714.000,00	15.286.000,00	96,88	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.950.265.052,00**	**1.716.074.283,00**	**234.190.769,00**	**77,27**	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 14	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana*	858.109.790,00	841.893.598,00	16.216.192,00	89,94	
	Belanja Operasi	142.609.100,00	128.261.500,00	14.347.600,00	89,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.609.100,00	128.261.500,00	14.347.600,00	89,94	
	Belanja Modal	715.500.690,00	713.632.098,00	1.868.592,00	98,89	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	715.500.690,00	713.632.098,00	1.868.592,00	98,89	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 32	*Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	965.655.262,00	827.966.268,00	137.688.994,00	89,94	
	Belanja Operasi	743.230.000,00	607.310.268,00	135.919.732,00	81,68	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.360.000,00	1.360.000,00	-	100,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	741.870.000,00	605.950.268,00	135.919.732,00	81,68	
	Belanja Modal	222.425.262,00	220.656.000,00	1.769.262,00	98,89	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.425.262,00	220.656.000,00	1.769.262,00	98,89	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 35	*Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota*	126.500.000,00	46.214.417,00	80.285.583,00	36,53	
	Belanja Operasi	126.500.000,00	46.214.417,00	80.285.583,00	36,53	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 35 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.500.000,00	46.214.417,00	80.285.583,00	36,53	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**2.119.600.000,00**	**1.614.214.289,00**	**505.385.711,00**	**75,16**	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**2.119.600.000,00**	**1.614.214.289,00**	**505.385.711,00**	**76,16**	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 02	*Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar*	2.119.600.000,00	1.614.214.289,00	505.385.711,00	76,16	
	Belanja Operasi	2.119.600.000,00	1.614.214.289,00	505.385.711,00	76,16	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.119.600.000,00	1.614.214.289,00	505.385.711,00	76,16	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(25.306.683.912,00)**	**(24.405.613.768,00)**	**(901.070.144,00)**	**96,44**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	**7.009.564.329,00**	**3.976.429.081,00**	**3.033.135.248,00**	**56,73**	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**7.009.564.329,00**	**3.976.429.081,00**	**3.033.135.248,00**	**56,73**	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	191.606.666,00	57.752.500,00	133.854.166,00	30,14	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	6.817.957.663,00	3.918.676.581,00	2.899.281.082,00	57,48	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**114.383.943.530,00**	**94.680.685.379,02**	**19.703.258.150,98**	**82,77**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	**114.383.943.530,00**	**94.680.685.379,02**	**19.703.258.150,98**	**82,77**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**49.059.994.259,00**	**47.747.788.232,00**	**1.312.206.027,00**	**97,33**	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**48.483.434.059,00**	**47.244.157.000,00**	**1.239.277.059,00**	**97,44**	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.987.329.059,00	31.447.748.614,00	539.580.445,00	98,31	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	**Belanja Operasi**	31.987.329.059,00	31.447.748.614,00	539.580.445,00	98,31	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	16.496.105.000,00	15.796.408.386,00	699.696.614,00	95,76	
	Belanja Operasi	16.496.105.000,00	15.796.408.386,00	699.696.614,00	95,76	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	522.300.000,00	506.100.000,00	16.200.000,00	96,90	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	15.973.805.000,00	15.290.308.386,00	683.496.614,00	95,72	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**362.797.200,00**	**357.433.369,00**	**5.363.831,00**	**98,52**	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	5.949.800,00	5.931.000,00	18.800,00	99,68	
	Belanja Operasi	5.949.800,00	5.931.000,00	18.800,00	99,68	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	5.949.800,00	5.931.000,00	18.800,00	99,68	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	19.998.500,00	19.998.200,00	300,00	100,00	
	Belanja Operasi	19.998.500,00	19.998.200,00	300,00	100,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	19.998.500,00	19.998.200,00	300,00	100,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	98.739.900,00	98.337.070,00	402.830,00	99,59	
	Belanja Operasi	98.739.900,00	98.337.070,00	402.830,00	99,59	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	98.739.900,00	98.337.070,00	402.830,00	99,59	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	30.000.000,00	29.700.000,00	300.000,00	99,00	
	Belanja Operasi	30.000.000,00	29.700.000,00	300.000,00	99,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.700.000,00	300.000,00	99,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	8.200.000,00	8.100.000,00	100.000,00	98,78	
	Belanja Operasi	8.200.000,00	8.100.000,00	100.000,00	98,78	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	8.100.000,00	100.000,00	98,78	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	199.909.000,00	195.367.099,00	4.541.901,00	97,73	
	Belanja Operasi	199.909.000,00	195.367.099,00	4.541.901,00	97,73	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	199.909.000,00	195.367.099,00	4.541.901,00	97,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**39.975.000,00**	**39.147.273,00**	**827.727,00**	**97,93**	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 05	*Pengadaan Mebel*	39.975.000,00	39.147.273,00	827.727,00	97,93	
	Belanja Operasi	975.000,00	295.000,00	680.000,00	30,26	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 05 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	295.000,00	295.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal	39.000.000,00	38.852.273,00	147.727,00	99,62	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.000.000,00	38.852.273,00	147.727,00	99,62	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**91.800.000,00**	**34.108.590,00**	**57.691.410,00**	**37,16**	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	91.800.000,00	34.108.590,00	57.691.410,00	37,16	
	Belanja Operasi	91.800.000,00	34.108.590,00	57.691.410,00	37,16	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	91.800.000,00	34.108.590,00	57.691.410,00	37,16	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**81.988.000,00**	**72.942.000,00**	**9.046.000,00**	**88,97**	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	20.000.000,00	15.283.000,00	4.717.000,00	76,42	
	Belanja Operasi	20.000.000,00	15.283.000,00	4.717.000,00	76,42	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	15.283.000,00	4.717.000,00	76,42	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	50.000.000,00	45.735.000,00	4.265.000,00	91,47	
	Belanja Operasi	50.000.000,00	45.735.000,00	4.265.000,00	91,47	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	45.735.000,00	4.265.000,00	91,47	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	11.988.000,00	11.924.000,00	64.000,00	99,47	
	Belanja Operasi	11.988.000,00	11.924.000,00	64.000,00	99,47	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	11.988.000,00	11.924.000,00	64.000,00	99,47	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**62.810.271.371,00**	**44.882.852.811,02**	**17.927.418.559,98**	**71,46**	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**36.583.742.003,00**	**29.078.172.142,00**	**7.505.569.861,00**	**79,48**	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 01	*Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya*	11.251.248.183,00	6.791.503.645,00	4.459.744.538,00	60,36	
	Belanja Operasi	878.615.425,00	722.719.027,00	155.896.398,00	82,26	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	32.810.000,00	32.500.000,00	310.000,00	99,06	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	845.805.425,00	690.219.027,00	155.586.398,00	81,60	
	Belanja Modal	2.303.065.965,00	2.262.739.158,00	40.326.807,00	98,25	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.303.065.965,00	2.262.739.158,00	40.326.807,00	98,25	
	Belanja Modal	6.775.066.793,00	2.511.742.460,00	4.263.324.333,00	37,07	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.775.066.793,00	2.511.742.460,00	4.263.324.333,00	37,07	
	Belanja Modal	1.294.500.000,00	1.294.303.000,00	197.000,00	99,98	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.294.500.000,00	1.294.303.000,00	197.000,00	99,98	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 02	*Pembangunan Puskesmas*	1.994.647.800,00	1.544.617.530,00	450.030.270,00	77,44	
	Belanja Operasi	159.069.000,00	61.806.800,00	97.262.200,00	38,86	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	100,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	151.519.000,00	54.256.800,00	97.262.200,00	35,81	
	Belanja Modal	1.835.578.800,00	1.482.810.730,00	352.768.070,00	80,78	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.835.578.800,00	1.482.810.730,00	352.768.070,00	80,78	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 03	*Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	2.077.470.000,00	1.701.471.600,00	375.998.400,00	81,90	
	Belanja Operasi	212.860.000,00	90.525.500,00	122.334.500,00	42,53	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 03 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	11.330.000,00	10.100.000,00	1.230.000,00	89,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	201.530.000,00	80.425.500,00	121.104.500,00	39,91	
	Belanja Modal	1.864.610.000,00	1.610.946.100,00	253.663.900,00	86,40	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.864.610.000,00	1.610.946.100,00	253.663.900,00	86,40	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 04	*Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan*	1.465.809.740,00	1.123.269.720,00	342.540.020,00	76,63	
	Belanja Operasi	38.230.000,00	19.362.600,00	18.867.400,00	50,65	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.230.000,00	4.420.000,00	3.810.000,00	53,71	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	14.942.600,00	15.057.400,00	49,81	
	Belanja Modal	1.427.579.740,00	1.103.907.120,00	323.672.620,00	77,33	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.427.579.740,00	1.103.907.120,00	323.672.620,00	77,33	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 12	*Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	2.128.390.250,00	1.556.872.000,00	571.518.250,00	73,15	
	Belanja Operasi	498.568.250,00	4.910.000,00	493.658.250,00	0,98	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 12 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.160.000,00	2.760.000,00	6.400.000,00	30,13	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	489.408.250,00	2.150.000,00	487.258.250,00	0,44	
	Belanja Modal	1.629.822.000,00	1.551.962.000,00	77.860.000,00	95,22	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.629.822.000,00	1.551.962.000,00	77.860.000,00	95,22	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 14	*Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	7.213.561.620,00	6.544.261.344,00	669.300.276,00	90,72	
	Belanja Operasi	148.655.000,00	126.650.500,00	22.004.500,00	85,20	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 14 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.360.000,00	0,00	7.360.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	141.295.000,00	126.650.500,00	14.644.500,00	89,64	
	Belanja Modal	7.064.906.620,00	6.417.610.844,00	647.295.776,00	90,84	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.064.906.620,00	6.417.610.844,00	647.295.776,00	90,84	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 16	*Pengadaan Obat, Vaksin*	3.341.689.190,00	2.962.007.473,00	379.681.717,00	88,64	
	Belanja Operasi	3.341.689.190,00	2.962.007.473,00	379.681.717,00	88,64	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 16 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	3.337.269.190,00	2.962.007.473,00	375.261.717,00	88,76	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 17	*Pengadaan Bahan Habis Pakai*	6.818.644.220,00	6.709.052.930,00	109.591.290,00	98,39	
	Belanja Operasi	6.818.644.220,00	6.709.052.930,00	109.591.290,00	98,39	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 17 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	-	100,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	6.817.964.220,00	6.708.372.930,00	109.591.290,00	98,39	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 20	*Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	292.281.000,00	145.115.900,00	147.165.100,00	49,65	
	Belanja Operasi	292.281.000,00	145.115.900,00	147.165.100,00	49,65	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	292.281.000,00	145.115.900,00	147.165.100,00	49,65	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	26.161.529.368,00	15.781.735.169,02	10.379.794.198,98	60,32	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 02	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin*	1.480.135.000,00	1.225.394.531,00	254.740.469,00	82,79	
	Belanja Operasi	1.480.135.000,00	1.225.394.531,00	254.740.469,00	82,79	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	488.240.000,00	457.640.731,00	30.599.269,00	93,73	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	991.895.000,00	767.753.800,00	224.141.200,00	77,40	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 03	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir*	50.000.000,00	43.525.000,00	6.475.000,00	87,05	
	Belanja Operasi	50.000.000,00	43.525.000,00	6.475.000,00	87,05	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	43.525.000,00	6.475.000,00	87,05	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 07	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut*	50.000.000,00	33.625.000,00	16.375.000,00	67,25	
	Belanja Operasi	50.000.000,00	33.625.000,00	16.375.000,00	67,25	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	33.625.000,00	16.375.000,00	67,25	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 14	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana*	1.476.683.400,00	910.948.943,00	565.734.457,00	61,69	
	Belanja Operasi	1.476.683.400,00	910.948.943,00	565.734.457,00	61,69	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.476.683.400,00	910.948.943,00	565.734.457,00	61,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 15	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	100.000.000,00	91.810.200,00	8.189.800,00	91,81	
	Belanja Operasi	100.000.000,00	91.810.200,00	8.189.800,00	91,81	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	91.810.200,00	8.189.800,00	91,81	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 16	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	50.000.000,00	20.507.000,00	29.493.000,00	41,01	
	Belanja Operasi	50.000.000,00	20.507.000,00	29.493.000,00	41,01	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	20.507.000,00	29.493.000,00	41,01	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 17	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	75.000.000,00	63.267.692,00	11.732.308,00	84,36	
	Belanja Operasi	75.000.000,00	63.267.692,00	11.732.308,00	84,36	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	63.267.692,00	11.732.308,00	84,36	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 19	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya*	50.000.000,00	38.568.000,00	11.432.000,00	77,14	
	Belanja Operasi	50.000.000,00	38.568.000,00	11.432.000,00	77,14	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	38.568.000,00	11.432.000,00	77,14	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 23	*Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus*	200.000.000,00	188.000.000,00	12.000.000,00	94,00	
	Belanja Operasi	200.000.000,00	188.000.000,00	12.000.000,00	94,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 23 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	188.000.000,00	12.000.000,00	94,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 25	*Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	633.402.500,00	461.138.670,00	172.263.830,00	72,80	
	Belanja Operasi	633.402.500,00	461.138.670,00	172.263.830,00	72,80	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	633.402.500,00	461.138.670,00	172.263.830,00	72,80	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 26	*Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	3.690.701.200,00	3.538.890.200,00	151.811.000,00	95,89	
	Belanja Operasi	3.560.867.200,00	3.411.572.600,00	149.294.600,00	95,81	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 26 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.680.000,00	8.000.000,00	680.000,00	92,17	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	3.552.187.200,00	3.403.572.600,00	148.614.600,00	95,82	
	Belanja Modal	129.834.000,00	127.317.600,00	2.516.400,00	98,06	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.834.000,00	127.317.600,00	2.516.400,00	98,06	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 29	*Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*	75.410.000,00	5.109.000,00	70.301.000,00	6,77	
	Belanja Operasi	75.410.000,00	5.109.000,00	70.301.000,00	6,77	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	75.410.000,00	5.109.000,00	70.301.000,00	6,77	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 33	*Operasional Pelayanan Puskesmas*	16.861.752.968,00	8.185.591.692,02	8.676.161.275,98	48,55	
	Belanja Operasi	16.629.752.695,00	7.977.885.206,02	8.651.867.488,98	47,97	
	Belanja Pegawai	1.100.640.000,00	990.710.000,00	109.930.000,00	90,01	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	15.529.112.695,00	6.987.175.206,02	8.541.937.488,98	44,99	
	Belanja Modal	232.000.273,00	207.706.486,00	24.293.787,00	89,53	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232.000.273,00	207.706.486,00	24.293.787,00	89,53	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 34	*Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	655.845.000,00	460.851.541,00	194.993.459,00	70,27	
	Belanja Operasi	655.845.000,00	460.851.541,00	194.993.459,00	70,27	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	655.845.000,00	460.851.541,00	194.993.459,00	70,27	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 35	*Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota*	712.599.300,00	514.507.700,00	198.091.600,00	72,20	
	Belanja Operasi	712.599.300,00	514.507.700,00	198.091.600,00	72,20	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	712.599.300,00	514.507.700,00	198.091.600,00	72,20	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**65.000.000,00**	**22.945.500,00**	**42.054.500,00**	**35,30**	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 02	*Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	65.000.000,00	22.945.500,00	42.054.500,00	35,30	
	Belanja Operasi	65.000.000,00	22.945.500,00	42.054.500,00	35,30	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	22.945.500,00	42.054.500,00	35,30	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**1.985.344.000,00**	**1.704.580.556,00**	**280.763.444,00**	**85,86**	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**1.853.314.000,00**	**1.669.432.856,00**	**183.881.144,00**	**90,08**	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 01	*Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 02	*Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar*	1.853.314.000,00	1.669.432.856,00	183.881.144,00	90,08	
	Belanja Operasi	1.853.314.000,00	1.669.432.856,00	183.881.144,00	90,08	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.853.314.000,00	1.669.432.856,00	183.881.144,00	90,08	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 21	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**132.030.000,00**	**35.147.700,00**	**96.882.300,00**	**26,62**	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 21 . 01	*Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	132.030.000,00	35.147.700,00	96.882.300,00	26,62	
	Belanja Operasi	132.030.000,00	35.147.700,00	96.882.300,00	26,62	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	132.030.000,00	35.147.700,00	96.882.300,00	26,62	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	**213.276.900,00**	**124.684.280,00**	**88.592.620,00**	**58,46**	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 22	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**50.060.000,00**	**37.975.000,00**	**12.085.000,00**	**75,86**	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 . 01	*Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	50.060.000,00	37.975.000,00	12.085.000,00	75,86	
	Belanja Operasi	50.060.000,00	37.975.000,00	12.085.000,00	75,86	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	50.060.000,00	37.975.000,00	12.085.000,00	75,86	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 24	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**97.744.900,00**	**41.472.280,00**	**56.272.620,00**	**42,43**	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 24 . 01	*Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	97.744.900,00	41.472.280,00	56.272.620,00	42,43	
	Belanja Operasi	97.744.900,00	41.472.280,00	56.272.620,00	42,43	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	97.744.900,00	41.472.280,00	56.272.620,00	42,43	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**65.472.000,00**	**45.237.000,00**	**20.235.000,00**	**69,09**	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 01	*Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan*	65.472.000,00	45.237.000,00	20.235.000,00	69,09	
	Belanja Operasi	65.472.000,00	45.237.000,00	20.235.000,00	69,09	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	65.472.000,00	45.237.000,00	20.235.000,00	69,09	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN	**315.057.000,00**	**220.779.500,00**	**94.277.500,00**	**70,08**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.02 . 1.02.02 . 01 . 28	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**125.452.000,00**	**52.475.000,00**	**72.977.000,00**	**41,83**	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 28 . 01	*Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	125.452.000,00	52.475.000,00	72.977.000,00	41,83	
	Belanja Operasi	125.452.000,00	52.475.000,00	72.977.000,00	41,83	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	125.452.000,00	52.475.000,00	72.977.000,00	41,83	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 29	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	189.605.000,00	168.304.500,00	21.300.500,00	88,77	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 29 . 01	*Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*	189.605.000,00	168.304.500,00	21.300.500,00	88,77	
	Belanja Operasi	189.605.000,00	168.304.500,00	21.300.500,00	88,77	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	189.605.000,00	168.304.500,00	21.300.500,00	88,77	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(107.374.379.201,00)**	**(90.704.256.298,02)**	**(16.670.122.902,98)**	**84,47**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	**614.482.964,00**	**352.981.519,00**	**261.501.445,00**	**57,44**	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**614.482.964,00**	**352.981.519,00**	**261.501.445,00**	**57,44**	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	614.482.964,00	352.981.519,00	261.501.445,00	57,44	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**161.182.774.960,00**	**138.080.609.781,00**	**23.102.165.179,00**	**85,67**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	**161.182.774.960,00**	**138.080.609.781,00**	**23.102.165.179,00**	**85,67**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**12.984.542.791,00**	**12.480.687.150,00**	**503.855.641,00**	**96,12**	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**262.891.500,00**	**255.326.500,00**	**7.565.000,00**	**97,12**	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	31.507.500,00	31.507.500,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	31.507.500,00	31.507.500,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	31.507.500,00	31.507.500,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	231.384.000,00	223.819.000,00	7.565.000,00	96,73	
	Belanja Operasi	231.384.000,00	223.819.000,00	7.565.000,00	96,73	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	231.384.000,00	223.819.000,00	7.565.000,00	96,73	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.139.305.125,00**	**10.957.652.101,00**	**181.653.024,00**	**98,37**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.066.449.125,00	5.972.858.683,00	93.590.442,00	98,46	
	Belanja Operasi	6.066.449.125,00	5.972.858.683,00	93.590.442,00	98,46	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.066.449.125,00	5.972.858.683,00	93.590.442,00	98,46	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	5.072.856.000,00	4.984.793.418,00	88.062.582,00	98,26	
	Belanja Operasi	5.072.856.000,00	4.984.793.418,00	88.062.582,00	98,26	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	287.700.000,00	284.700.000,00	3.000.000,00	98,96	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	4.785.156.000,00	4.700.093.418,00	85.062.582,00	98,22	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**408.642.345,00**	**374.603.114,00**	**34.039.231,00**	**91,67**	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	10.040.855,00	10.037.700,00	3.155,00	99,97	
	Belanja Operasi	10.040.855,00	10.037.700,00	3.155,00	99,97	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	10.040.855,00	10.037.700,00	3.155,00	99,97	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	149.988.740,00	133.350.200,00	16.638.540,00	88,91	
	Belanja Operasi	149.988.740,00	133.350.200,00	16.638.540,00	88,91	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	149.988.740,00	133.350.200,00	16.638.540,00	88,91	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	44.992.750,00	42.849.500,00	2.143.250,00	95,24	
	Belanja Operasi	44.992.750,00	42.849.500,00	2.143.250,00	95,24	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	44.992.750,00	42.849.500,00	2.143.250,00	95,24	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	20.000.000,00	9.000.000,00	11.000.000,00	45,00	
	Belanja Operasi	20.000.000,00	9.000.000,00	11.000.000,00	45,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	9.000.000,00	11.000.000,00	45,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	183.620.000,00	179.365.714,00	4.254.286,00	97,68	
	Belanja Operasi	183.620.000,00	179.365.714,00	4.254.286,00	97,68	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	183.620.000,00	179.365.714,00	4.254.286,00	97,68	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**387.045.781,00**	**377.638.000,00**	**9.407.781,00**	**97,57**	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 07 . 06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	387.045.781,00	377.638.000,00	9.407.781,00	97,57	
	Belanja Operasi	19.385.000,00	16.915.000,00	2.470.000,00	87,26	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 07 . 06 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.300.000,00	2.040.000,00	1.260.000,00	61,82	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	16.085.000,00	14.875.000,00	1.210.000,00	92,48	
	Belanja Modal	367.660.781,00	360.723.000,00	6.937.781,00	98,11	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 07 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	367.660.781,00	360.723.000,00	6.937.781,00	98,11	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**61.800.000,00**	**20.352.719,00**	**41.447.281,00**	**32,93**	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	61.800.000,00	20.352.719,00	41.447.281,00	32,93	
	Belanja Opeasi	61.800.000,00	20.352.719,00	41.447.281,00	32,93	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	20.352.719,00	41.447.281,00	32,93	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**724.858.040,00**	**495.114.716,00**	**229.743.324,00**	**68,31**	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	27.240.000,00	13.404.800,00	13.835.200,00	49,21	
	Belanja Operasi	27.240.000,00	13.404.800,00	13.835.200,00	49,21	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	27.240.000,00	13.404.800,00	13.835.200,00	49,21	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	434.976.300,00	248.214.650,00	186.761.650,00	57,06	
	Belanja Operasi	434.976.300,00	248.214.650,00	186.761.650,00	57,06	
	Belanja Pegawai	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	433.876.300,00	248.214.650,00	185.661.650,00	57,21	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	24.850.000,00	21.195.000,00	3.655.000,00	85,29	
	Belanja Operasi	24.850.000,00	21.195.000,00	3.655.000,00	85,29	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	24.850.000,00	21.195.000,00	3.655.000,00	85,29	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	237.791.740,00	212.300.266,00	25.491.474,00	89,28	
	Belanja Operasi	237.791.740,00	212.300.266,00	25.491.474,00	89,28	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09 . 06 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	680.000,00	420.000,00	61,82	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	236.691.740,00	211.620.266,00	25.071.474,00	89,41	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**8.998.097.943,00**	**6.955.558.747,00**	**2.042.539.196,00**	**77,30**	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**771.937.600,00**	**714.740.780,00**	**57.196.820,00**	**92,59**	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 02	*Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku*	392.103.940,00	360.832.040,00	31.271.900,00	92,02	
	Belanja Operasi	392.103.940,00	360.832.040,00	31.271.900,00	92,02	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	390.303.940,00	359.032.040,00	31.271.900,00	91,99	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 03	*Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai*	379.833.660,00	353.908.740,00	25.924.920,00	93,17	
	Belanja Operasi	379.833.660,00	353.908.740,00	25.924.920,00	93,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	378.033.660,00	352.108.740,00	25.924.920,00	93,14	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**8.226.160.343,00**	**6.240.817.967,00**	**1.985.342.376,00**	**75,87**	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 02	*Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan*	6.781.712.783,00	5.046.769.935,00	1.734.942.848,00	74,42	
	Belanja Operasi	696.701.680,00	655.279.835,00	41.421.845,00	94,05	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	11.220.000,00	7.140.000,00	4.080.000,00	63,64	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	685.481.680,00	648.139.835,00	37.341.845,00	94,55	
	Belanja Modal	6.085.011.103,00	4.391.490.100,00	1.693.521.003,00	72,17	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.226.089,00	39.850.000,00	1.376.089,00	96,66	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.043.785.014,00	4.351.640.100,00	1.692.144.914,00	72,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 08	*Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan*	1.444.447.560,00	1.194.048.032,00	250.399.528,00	82,66	
	Belanja Operasi	1.444.447.560,00	1.194.048.032,00	250.399.528,00	82,66	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.434.757.560,00	1.184.358.032,00	250.399.528,00	82,55	
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**10.945.859.908,00**	**9.145.312.347,00**	**1.800.547.561,00**	**83,55**	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**10.945.859.908,00**	**9.145.312.347,00**	**1.800.547.561,00**	**83,55**	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 01	*Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM*	147.461.980,00	134.077.402,00	13.384.578,00	90,92	
	Belanja Operasi	147.461.980,00	134.077.402,00	13.384.578,00	90,92	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	680.000,00	420.000,00	61,82	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	146.361.980,00	133.397.402,00	12.964.578,00	91,14	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 04	*Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan*	1.836.624.400,00	1.820.449.128,00	16.175.272,00	99,12	
	Belanja Operasi	280.924.400,00	264.890.128,00	16.034.272,00	94,29	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	277.104.400,00	261.070.128,00	16.034.272,00	94,21	
	Belanja Modal	1.555.700.000,00	1.555.559.000,00	141.000,00	99,99	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.555.700.000,00	1.555.559.000,00	141.000,00	99,99	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 06	*Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan*	6.251.582.300,00	5.697.816.801,00	553.765.499,00	91,14	
	Belanja Operasi	261.748.300,00	211.082.801,00	50.665.499,00	80,64	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.350.000,00	8.670.000,00	680.000,00	92,73	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	252.398.300,00	202.412.801,00	49.985.499,00	80,20	
	Belanja Modal	5.989.834.000,00	5.486.734.000,00	503.100.000,00	91,60	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	132.834.000,00	117.766.000,00	15.068.000,00	88,66	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.857.000.000,00	5.368.968.000,00	488.032.000,00	91,67	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 16	*Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan*	2.710.191.228,00	1.492.969.016,00	1.217.222.212,00	55,09	
	Belanja Operasi	1.694.488.170,00	1.104.439.348,00	590.048.822,00	65,18	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	17.600.000,00	2.040.000,00	15.560.000,00	11,59	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.676.888.170,00	1.102.399.348,00	574.488.822,00	65,74	
	Belanja Modal	1.015.703.058,00	388.529.668,00	627.173.390,00	38,25	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.427.775,00	8.961.818,00	30.465.957,00	22,73	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	976.275.283,00	379.567.850,00	596.707.433,00	38,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**1.893.132.600,00**	**1.840.384.192,00**	**52.748.408,00**	**97,21**	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.893.132.600,00**	**1.840.384.192,00**	**52.748.408,00**	**97,21**	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 03	*Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota*	1.893.132.600,00	1.840.384.192,00	52.748.408,00	97,21	
	Belanja Operasi	232.132.600,00	187.466.292,00	44.666.308,00	80,76	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	232.132.600,00	187.466.292,00	44.666.308,00	80,76	
	Belanja Modal	1.661.000.000,00	1.652.917.900,00	8.082.100,00	99,51	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.661.000.000,00	1.652.917.900,00	8.082.100,00	99,51	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	**2.459.190.000,00**	**1.786.822.282,00**	**672.367.718,00**	**72,66**	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**2.459.190.000,00**	**1.786.822.282,00**	**672.367.718,00**	**72,66**	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 02	*Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota*	2.459.190.000,00	1.786.822.282,00	672.367.718,00	72,66	
	Belanja Operasi	475.689.000,00	138.797.802,00	336.891.198,00	29,18	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	11.430.000,00	5.400.000,00	6.030.000,00	47,24	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	464.259.000,00	133.397.802,00	330.861.198,00	28,73	
	Belanja Modal	1.983.501.000,00	1.648.024.480,00	335.476.520,00	83,09	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.983.501.000,00	1.648.024.480,00	335.476.520,00	83,09	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**123.613.821.718,00**	**105.626.696.070,00**	**17.987.125.648,00**	**85,45**	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**123.613.821.718,00**	**105.626.696.070,00**	**17.987.125.648,00**	**85,45**	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 01	*Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan*	850.834.940,00	673.114.340,00	177.720.600,00	79,11	
	Belanja Operasi	850.834.940,00	673.114.340,00	177.720.600,00	79,11	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	841.954.940,00	664.234.340,00	177.720.600,00	78,89	
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 05	*Pembangunan Jalan*	70.434.356.841,00	59.559.271.113,00	10.875.085.728,00	84,56	
	Belanja Operasi	8.042.124.836,00	5.030.643.414,00	3.011.481.422,00	62,55	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	30.550.000,00	15.690.000,00	14.860.000,00	51,36	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	8.011.574.836,00	5.014.953.414,00	2.996.621.422,00	62,60	
	Belanja Modal	62.392.232.005,00	54.528.627.699,00	7.863.604.306,00	87,40	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.392.232.005,00	54.528.627.699,00	7.863.604.306,00	87,40	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 08	*Rekonstruksi Jalan*	49.959.189.501,00	43.846.981.617,00	6.112.207.884,00	87,77	
	Belanja Operasi	4.443.641.232,00	3.486.196.027,00	957.445.205,00	78,45	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	30.780.000,00	9.960.000,00	20.820.000,00	32,36	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	4.412.861.232,00	3.476.236.027,00	936.625.205,00	78,78	
	Belanja Modal	45.515.548.269,00	40.360.785.590,00	5.154.762.679,00	88,67	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 08 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.515.548.269,00	40.360.785.590,00	5.154.762.679,00	88,67	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 11	*Pemeliharaan Rutin Jalan*	1.828.196.200,00	1.522.599.000,00	305.597.200,00	83,28	
	Belanja Operasi	1.828.196.200,00	1.522.599.000,00	305.597.200,00	83,28	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.820.096.200,00	1.522.599.000,00	297.497.200,00	83,65	
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 11 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 12	*Pembangunan Jembatan*	8.275.000,00	8.270.000,00	5.000,00	99,94	
	Belanja Operasi	8.275.000,00	8.270.000,00	5.000,00	99,94	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	8.275.000,00	8.270.000,00	5.000,00	99,94	
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 19	*Pemeliharaan Rutin Jembatan*	532.969.236,00	16.460.000,00	516.509.236,00	3,09	
	Belanja Operasi	532.969.236,00	16.460.000,00	516.509.236,00	3,09	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	527.569.236,00	16.460.000,00	511.109.236,00	3,12	
	PROGRAM PENYELENGGARAANPENATAAN RUANG	**288.130.000,00**	**245.148.993,00**	**42.981.007,00**	**85,08**	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**288.130.000,00**	**245.148.993,00**	**42.981.007,00**	**85,08**	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 04	*Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang*	288.130.000,00	245.148.993,00	42.981.007,00	85,08	
	Belanja Operasi	288.130.000,00	245.148.993,00	42.981.007,00	85,08	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	287.450.000,00	244.468.993,00	42.981.007,00	85,05	
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(160.568.291.996)**	**(137.727.628.262)**	**(22.840.663.734)**	**85,78**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintah : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintah : 1 . 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**7.489.343.515,00**	**6.977.724.893,00**	**511.618.622,00**	**93,17**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**7.489.343.515,00**	**6.977.724.893,00**	**511.618.622,00**	**93,17**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**4.038.338.391,00**	**3.789.572.653,00**	**248.765.738,00**	**93,84**	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**126.075.000,00**	**124.478.800,00**	**1.596.200,00**	**98,73**	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	15.000.000,00	14.956.000,00	44.000,00	99,71	
	Belanja Operasi	15.000.000,00	14.956.000,00	44.000,00	99,71	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.706.000,00	44.000,00	99,35	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	111.075.000,00	109.522.800,00	1.552.200,00	98,60	
	Belanja Operasi	111.075.000,00	109.522.800,00	1.552.200,00	98,60	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	111.075.000,00	109.522.800,00	1.552.200,00	98,60	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.268.711.139,00**	**3.036.994.017,00**	**231.717.122,00**	**92,91**	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.414.385.139,00	2.301.935.134,00	112.450.005,00	95,34	
	Belanja Operasi	2.414.385.139,00	2.301.935.134,00	112.450.005,00	95,34	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.414.385.139,00	2.301.935.134,00	112.450.005,00	95,34	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	854.326.000,00	735.058.883,00	119.267.117,00	86,04	
	Belanja Operasi	854.326.000,00	735.058.883,00	119.267.117,00	86,04	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	154.260.000,00	115.660.000,00	38.600.000,00	74,98	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	700.066.000,00	619.398.883,00	80.667.117,00	88,48	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**314.785.890,00**	**309.472.338,00**	**5.313.552,00**	**98,31**	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	9.992.180,00	8.174.760,00	1.817.420,00	81,81	
	Belanja Operasi	9.992.180,00	8.174.760,00	1.817.420,00	81,81	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	9.992.180,00	8.174.760,00	1.817.420,00	81,81	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	41.645.320,00	40.045.528,00	1.599.792,00	96,16	
	Belanja Operasi	41.645.320,00	40.045.528,00	1.599.792,00	96,16	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	41.645.320,00	40.045.528,00	1.599.792,00	96,16	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	135.352.390,00	134.333.560,00	1.018.830,00	99,25	
	Belanja Operasi	108.371.920,00	107.478.160,00	893.760,00	99,18	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	108.371.920,00	107.478.160,00	893.760,00	99,18	
	Belanja Modal	26.980.470,00	26.855.400,00	125.070,00	99,54	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.980.470,00	26.855.400,00	125.070,00	99,54	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	43.760.000,00	43.743.390,00	16.610,00	99,96	
	Belanja Operasi	43.760.000,00	43.743.390,00	16.610,00	99,96	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	43.760.000,00	43.743.390,00	16.610,00	99,96	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	100,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	65.636.000,00	64.775.100,00	860.900,00	98,69	
	Belanja Operasi	65.636.000,00	64.775.100,00	860.900,00	98,69	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	65.636.000,00	64.775.100,00	860.900,00	98,69	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**120.176.362,00**	**120.053.200,00**	**123.162,00**	**99,90**	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 05	*Pengadaan Mebel*	120.176.362,00	120.053.200,00	123.162,00	99,90	
	Belanja Operasi	21.580.000,00	21.557.400,00	22.600,00	99,90	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	21.580.000,00	21.557.400,00	22.600,00	99,90	
	Belanja Modal	98.596.362,00	98.495.800,00	100.562,00	99,90	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.596.362,00	98.495.800,00	100.562,00	99,90	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**125.280.000,00**	**124.807.500,00**	**472.500,00**	**99,62**	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	95.280.000,00	95.047.500,00	232.500,00	99,76	
	Belanja Operasi	95.280.000,00	95.047.500,00	232.500,00	99,76	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	95.280.000,00	95.047.500,00	232.500,00	99,76	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	30.000.000,00	29.760.000,00	240.000,00	99,20	
	Belanja Operasi	30.000.000,00	29.760.000,00	240.000,00	99,20	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.760.000,00	240.000,00	99,20	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**83.310.000,00**	**73.766.798,00**	**9.543.202,00**	**88,54**	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	49.612.000,00	40.292.430,00	9.319.570,00	81,22	
	Belanja Operasi	49.612.000,00	40.292.430,00	9.319.570,00	81,22	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	49.612.000,00	40.292.430,00	9.319.570,00	81,22	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	18.750.000,00	18.568.200,00	181.800,00	99,03	
	Belanja Operasi	18.750.000,00	18.568.200,00	181.800,00	99,03	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	18.568.200,00	181.800,00	99,03	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	14.948.000,00	14.906.168,00	41.832,00	99,72	
	Belanja Operasi	14.948.000,00	14.906.168,00	41.832,00	99,72	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	14.948.000,00	14.906.168,00	41.832,00	99,72	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**2.072.283.000,00**	**2.059.974.419,00**	**12.308.581,00**	**99,41**	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 24	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**2.072.283.000,00**	**2.059.974.419,00**	**12.308.581,00**	**99,41**	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 24 . 02	*Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni*	2.072.283.000,00	2.059.974.419,00	12.308.581,00	99,41	
	Belanja Operasi	2.072.283.000,00	2.059.974.419,00	12.308.581,00	99,41	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 24 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	76.750.000,00	72.750.000,00	4.000.000,00	94,79	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.995.533.000,00	1.987.224.419,00	8.308.581,00	99,58	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**1.378.722.124,00**	**1.128.177.821,00**	**250.544.303,00**	**81,83**	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 26	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**1.378.722.124,00**	**1.128.177.821,00**	**250.544.303,00**	**81,83**	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 26 . 02	*Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian*	1.378.722.124,00	1.128.177.821,00	250.544.303,00	81,83	
	Belanja Operasi	243.104.000,00	202.881.366,00	40.222.634,00	83,45	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 26 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	17.760.000,00	4.720.000,00	13.040.000,00	26,58	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	225.344.000,00	198.161.366,00	27.182.634,00	87,94	
	Belanja Modal	1.135.618.124,00	925.296.455,00	210.321.669,00	81,48	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.135.618.124,00	925.296.455,00	210.321.669,00	81,48	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(7.489.343.515,00)**	**(6.977.724.893,00)**	**(511.618.622,00)**	**93,17**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintaha : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintaha : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.05 . 1.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**9.543.139.747,00**	**8.880.154.173,00**	**662.985.574,00**	**93,05**	
	URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**9.543.139.747,00**	**8.880.154.173,00**	**662.985.574,00**	**93,05**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**8.673.020.177,00**	**8.035.327.473,00**	**637.692.704,00**	**92,65**	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.107.214.074,00**	**7.575.156.025,00**	**532.058.049,00**	**93,44**	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	3.085.152.074,00	3.016.967.289,00	68.184.785,00	97,79	
	Belanja Operasi	3.085.152.074,00	3.016.967.289,00	68.184.785,00	97,79	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.085.152.074,00	3.016.967.289,00	68.184.785,00	97,79	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	5.022.062.000,00	4.558.188.736,00	463.873.264,00	90,76	
	Belanja Operasi	5.022.062.000,00	4.558.188.736,00	463.873.264,00	90,76	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	167.250.000,00	112.500.000,00	54.750.000,00	67,26	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	4.854.812.000,00	4.445.688.736,00	409.123.264,00	91,57	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**250.706.103,00**	**235.992.600,00**	**14.713.503,00**	**94,13**	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	8.047.675,00	8.029.500,00	18.175,00	99,77	
	Belanja Operasi	8.047.675,00	8.029.500,00	18.175,00	99,77	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	8.047.675,00	8.029.500,00	18.175,00	99,77	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	63.704.828,00	50.999.000,00	12.705.828,00	80,06	
	Belanja Operasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal	62.704.828,00	49.999.000,00	12.705.828,00	79,74	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.704.828,00	49.999.000,00	12.705.828,00	79,74	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	85.935.200,00	85.370.200,00	565.000,00	99,34	
	Belanja Operasi	85.935.200,00	85.370.200,00	565.000,00	99,34	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	870.000,00	870.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	85.065.200,00	84.500.200,00	565.000,00	99,34	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	19.178.400,00	19.168.400,00	10.000,00	99,95	
	Belanja Operasi	19.178.400,00	19.168.400,00	10.000,00	99,95	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	19.178.400,00	19.168.400,00	10.000,00	99,95	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	3.750.000,00	2.400.000,00	1.350.000,00	64,00	
	Belanja Operasi	3.750.000,00	2.400.000,00	1.350.000,00	64,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	2.400.000,00	1.350.000,00	64,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	70.090.000,00	70.025.500,00	64.500,00	99,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	Belanja Operasi	70.090.000,00	70.025.500,00	64.500,00	99,91	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	70.090.000,00	70.025.500,00	64.500,00	99,91	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**39.000.000,00**	**4.848.988,00**	**34.151.012,00**	**12,43**	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	39.000.000,00	4.848.988,00	34.151.012,00	12,43	
	Belanja Operasi	39.000.000,00	4.848.988,00	34.151.012,00	12,43	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	4.848.988,00	34.151.012,00	12,43	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**276.100.000,00**	**219.329.860,00**	**56.770.140,00**	**79,44**	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	256.340.000,00	213.569.860,00	42.770.140,00	83,32	
	Belanja Operasi	256.340.000,00	213.569.860,00	42.770.140,00	83,32	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	256.340.000,00	213.569.860,00	42.770.140,00	83,32	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	
	Belanja Operasi	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	100,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**829.827.870,00**	**804.943.700,00**	**24.884.170,00**	**97,00**	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**829.827.870,00**	**804.943.700,00**	**24.884.170,00**	**97,00**	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 01	*Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*	829.827.870,00	804.943.700,00	24.884.170,00	97,00	
	Belanja Operasi	829.827.870,00	804.943.700,00	24.884.170,00	97,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00			
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	828.727.870,00	803.843.700,00	24.884.170,00	97,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**40.291.700,00**	**39.883.000,00**	**408.700,00**	**98,99**	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 23	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**40.291.700,00**	**39.883.000,00**	**408.700,00**	**98,99**	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 23 . 02	*Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	40.291.700,00	39.883.000,00	408.700,00	98,99	
	Belanja Operasi	40.291.700,00	39.883.000,00	408.700,00	98,99	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	40.291.700,00	39.883.000,00	408.700,00	98,99	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(9.543.139.747,00)**	**(8.880.154.173,00)**	**(662.985.574,00)**	**93,05**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**10.382.303.096,00**	**9.656.289.754,00**	**726.013.342,00**	**93,01**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**10.382.303.096,00**	**9.656.289.754,00**	**726.013.342,00**	**93,01**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**4.709.983.018,00**	**4.539.509.700,00**	**170.473.318,00**	**93,01**	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.176.557.318,00**	**4.081.105.595,00**	**95.451.723,00**	**97,71**	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.688.423.318,00	2.608.128.400,00	80.294.918,00	97,01	
	Belanja Operasi	2.688.423.318,00	2.608.128.400,00	80.294.918,00	97,01	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.688.423.318,00	2.608.128.400,00	80.294.918,00	97,01	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1.488.134.000,00	1.472.977.195,00	15.156.805,00	98,98	
	Belanja Operasi	1.488.134.000,00	1.472.977.195,00	15.156.805,00	98,98	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	155.850.000,00	155.200.000,00	650.000,00	99,58	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.332.284.000,00	1.317.777.195,00	14.506.805,00	98,91	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**216.374.100,00**	**210.975.421,00**	**5.398.679,00**	**97,50**	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	12.446.500,00	12.402.163,00	44.337,00	99,64	
	Belanja Operasi	12.446.500,00	12.402.163,00	44.337,00	99,64	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	12.446.500,00	12.402.163,00	44.337,00	99,64	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	77.361.800,00	72.387.037,00	4.974.763,00	93,57	
	Belanja Operasi	77.361.800,00	72.387.037,00	4.974.763,00	93,57	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	77.361.800,00	72.387.037,00	4.974.763,00	93,57	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	17.005.800,00	16.722.177,00	283.623,00	98,33	
	Belanja Operasi	17.005.800,00	16.722.177,00	283.623,00	98,33	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	17.005.800,00	16.722.177,00	283.623,00	98,33	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	104.560.000,00	104.464.044,00	95.956,00	99,91	
	Belanja Operasi	104.560.000,00	104.464.044,00	95.956,00	99,91	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	104.560.000,00	104.464.044,00	95.956,00	99,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**62.000.000,00**	**49.834.810,00**	**12.165.190,00**	**80,38**	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	62.000.000,00	49.834.810,00	12.165.190,00	80,38	
	Belanja Operasi	62.000.000,00	49.834.810,00	12.165.190,00	80,38	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	49.834.810,00	12.165.190,00	80,38	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**255.051.600,00**	**197.593.874,00**	**57.457.726,00**	**77,47**	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	55.100.000,00	49.401.664,00	5.698.336,00	89,66	
	Belanja Operasi	55.100.000,00	49.401.664,00	5.698.336,00	89,66	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	55.100.000,00	49.401.664,00	5.698.336,00	89,66	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	185.541.600,00	135.971.210,00	49.570.390,00	73,28	
	Belanja Operasi	185.541.600,00	135.971.210,00	49.570.390,00	73,28	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	185.541.600,00	135.971.210,00	49.570.390,00	73,28	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	14.410.000,00	12.221.000,00	2.189.000,00	84,81	
	Belanja Operasi	14.410.000,00	12.221.000,00	2.189.000,00	84,81	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	14.410.000,00	12.221.000,00	2.189.000,00	84,81	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**353.510.200,00**	**329.470.950,00**	**24.039.250,00**	**93,20**	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**22.958.200,00**	**22.291.000,00**	**667.200,00**	**97,09**	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 03	*Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota*	22.958.200,00	22.291.000,00	667.200,00	97,09	
	Belanja Operasi	22.958.200,00	22.291.000,00	667.200,00	97,09	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	22.958.200,00	22.291.000,00	667.200,00	97,09	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**330.552.000,00**	**307.179.950,00**	**23.372.050,00**	**92,93**	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 03	*Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota*	148.694.000,00	140.377.450,00	8.316.550,00	94,41	
	Belanja Operasi	148.694.000,00	140.377.450,00	8.316.550,00	94,41	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	148.694.000,00	140.377.450,00	8.316.550,00	94,41	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 06	*Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit*	181.858.000,00	166.802.500,00	15.055.500,00	91,72	
	Belanja Operasi	173.358.000,00	159.212.500,00	14.145.500,00	91,84	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	173.358.000,00	159.212.500,00	14.145.500,00	91,84	
	Belanja Modal	8.500.000,00	7.590.000,00	910.000,00	89,29	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.500.000,00	7.590.000,00	910.000,00	89,29	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**5.318.809.878,00**	**4.787.309.104,00**	**531.500.774,00**	**90,01**	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**4.798.690.424,00**	**4.336.951.804,00**	**461.738.620,00**	**90,38**	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 01	*Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	2.201.821.870,00	1.813.910.469,00	387.911.401,00	82,38	
	Belanja Operasi	2.160.740.000,00	1.776.310.669,00	384.429.331,00	82,21	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	2.151.220.000,00	1.766.790.669,00	384.429.331,00	82,13	
	Belanja Modal	41.081.870,00	37.599.800,00	3.482.070,00	91,52	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.081.870,00	37.599.800,00	3.482.070,00	91,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 06	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri*	2.596.868.554,00	2.523.041.335,00	73.827.219,00	97,16	
	Belanja Operasi	206.800.800,00	156.286.335,00	50.514.465,00	75,57	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 06 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.140.000,00	9.140.000,00	0,00	100,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	197.660.800,00	147.146.335,00	50.514.465,00	74,44	
	Belanja Modal	2.390.067.754,00	2.366.755.000,00	23.312.754,00	99,02	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.390.067.754,00	2.366.755.000,00	23.312.754,00	99,02	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 26	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**520.119.454,00**	**450.357.300,00**	**69.762.154,00**	**86,59**	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 26 . 01	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat*	520.119.454,00	450.357.300,00	69.762.154,00	86,59	
	Belanja Operasi	472.780.800,00	403.637.400,00	69.143.400,00	85,38	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 26 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	471.680.800,00	403.637.400,00	68.043.400,00	85,57	
	Belanja Modal	47.338.654,00	46.719.900,00	618.754,00	98,69	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.338.654,00	46.719.900,00	618.754,00	98,69	
SURPLUS / (DEFISIT)		(10.382.303.096,00)	(9.656.289.754,00)	726.013.342,00	93,01	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Sosial
Unit Organisasi : 1 . 06 . 02 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 02 . 01 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.06 . 1.06.02 . 01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**7.068.286.752,00**	**6.647.257.664,00**	**421.029.088,00**	**94,04**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	**6.080.537.630,00**	**5.685.271.398,00**	**395.266.232,00**	**93,50**	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**172.556.000,00**	**170.336.051,00**	**2.219.949,00**	**98,71**	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 15	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**69.970.000,00**	**69.621.700,00**	**348.300,00**	**99,50**	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 15 . 02	*Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT*	69.970.000,00	69.621.700,00	348.300,00	99,50	
	Belanja Operasi	69.970.000,00	69.621.700,00	348.300,00	99,50	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	69.970.000,00	69.621.700,00	348.300,00	99,50	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 17	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**102.586.000,00**	**100.714.351,00**	**1.871.649,00**	**98,18**	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 17 . 03	*Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	73.066.000,00	72.432.651,00	633.349,00	99,13	
	Belanja Operasi	73.066.000,00	72.432.651,00	633.349,00	99,13	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	73.066.000,00	72.432.651,00	633.349,00	99,13	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 17 . 05	*Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)*	29.520.000,00	28.281.700,00	1.238.300,00	95,81	
	Belanja Operasi	29.520.000,00	28.281.700,00	1.238.300,00	95,81	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	29.520.000,00	28.281.700,00	1.238.300,00	95,81	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**204.104.300,00**	**180.948.400,00**	**23.155.900,00**	**88,65**	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 19	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**204.104.300,00**	**180.948.400,00**	**23.155.900,00**	**88,65**	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 19 . 06	*Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat*	37.924.300,00	29.588.000,00	8.336.300,00	78,02	
	Belanja Operasi	37.924.300,00	29.588.000,00	8.336.300,00	78,02	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	37.924.300,00	29.588.000,00	8.336.300,00	78,02	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 19 . 12	*Pemberian Layanan Rujukan*	166.180.000,00	151.360.400,00	14.819.600,00	91,08	
	Belanja Operasi	166.180.000,00	151.360.400,00	14.819.600,00	91,08	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	166.180.000,00	151.360.400,00	14.819.600,00	91,08	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	971.785.178,00	856.181.683,00	115.603.495,00	88,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.06 . 1.06.02 . 01 . 22	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**971.785.178,00**	**856.181.683,00**	**115.603.495,00**	**88,10**	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 22 . 01	*Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	146.145.000,00	121.983.758,00	24.161.242,00	83,47	
	Belanja Operasi	146.145.000,00	121.983.758,00	24.161.242,00	83,47	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	146.145.000,00	121.983.758,00	24.161.242,00	83,47	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 22 . 03	*Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan KeluargaÂ*	221.769.236,00	195.358.675,00	26.410.561,00	88,09	
	Belanja Operasi	203.808.250,00	178.803.675,00	25.004.575,00	87,73	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	203.808.250,00	178.803.675,00	25.004.575,00	87,73	
	Belanja Modal	17.960.986,00	16.555.000,00	1.405.986,00	92,17	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.960.986,00	16.555.000,00	1.405.986,00	92,17	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 22 . 04	*Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*	603.870.942,00	538.839.250,00	65.031.692,00	89,23	
	Belanja Operasi	482.400.000,00	418.572.000,00	63.828.000,00	86,77	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 00 . 04 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	482.400.000,00	418.572.000,00	63.828.000,00	86,77	
	Belanja Operasi	106.665.750,00	106.375.750,00	290.000,00	99,73	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	106.665.750,00	106.375.750,00	290.000,00	99,73	
	Belanja Modal	14.805.192,00	13.891.500,00	913.692,00	93,83	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.805.192,00	13.891.500,00	913.692,00	93,83	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**30.701.000,00**	**30.108.800,00**	**592.200,00**	**98,07**	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 23	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**30.701.000,00**	**30.108.800,00**	**592.200,00**	**98,07**	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 23 . 04	*Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan*	30.701.000,00	30.108.800,00	592.200,00	98,07	
	Belanja Operasi	30.701.000,00	30.108.800,00	592.200,00	98,07	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	30.701.000,00	30.108.800,00	592.200,00	98,07	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**4.701.391.152,00**	**4.447.696.464,00**	**253.694.688,00**	**94,60**	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.896.022.702,00**	**3.661.645.512,00**	**234.377.190,00**	**93,98**	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.115.942.702,00	2.913.970.812,00	201.971.890,00	93,52	
	Belanja Operasi	3.115.942.702,00	2.913.970.812,00	201.971.890,00	93,52	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.115.942.702,00	2.913.970.812,00	201.971.890,00	93,52	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	780.080.000,00	747.674.700,00	32.405.300,00	95,85	
	Belanja Operasi	780.080.000,00	747.674.700,00	32.405.300,00	95,85	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	127.820.000,00	107.100.000,00	20.720.000,00	83,79	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	652.260.000,00	640.574.700,00	11.685.300,00	98,21	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	193.700.250,00	191.466.278,00	2.233.972,00	98,85	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	3.996.050,00	3.996.050,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	3.996.050,00	3.996.050,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	3.996.050,00	3.996.050,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	62.168.200,00	60.355.528,00	1.812.672,00	97,08	
	Belanja Operasi	62.168.200,00	60.355.528,00	1.812.672,00	97,08	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	62.168.200,00	60.355.528,00	1.812.672,00	97,08	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	12.684.000,00	12.684.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	12.684.000,00	12.684.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	12.684.000,00	12.684.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	114.852.000,00	114.430.700,00	421.300,00	99,63	
	Belanja Operasi	114.852.000,00	114.430.700,00	421.300,00	99,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	114.852.000,00	114.430.700,00	421.300,00	99,63	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**328.380.000,00**	**322.325.550,00**	**6.054.450,00**	**98,16**	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 07 . 01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	328.380.000,00	322.325.550,00	6.054.450,00	98,16	
	Belanja Operasi	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 07 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal	325.000.000,00	318.945.550,00	6.054.450,00	98,14	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	325.000.000,00	318.945.550,00	6.054.450,00	98,14	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52.649.200,00**	**50.025.780,00**	**2.623.420,00**	**95,02**	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	40.150.000,00	37.526.580,00	2.623.420,00	93,47	
	Belanja Operasi	40.150.000,00	37.526.580,00	2.623.420,00	93,47	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	40.150.000,00	37.526.580,00	2.623.420,00	93,47	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	12.499.200,00	12.499.200,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	12.499.200,00	12.499.200,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	12.499.200,00	12.499.200,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**230.639.000,00**	**222.233.344,00**	**8.405.656,00**	**96,36**	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	31.750.000,00	24.052.900,00	7.697.100,00	75,76	
	Belanja Operasi	31.750.000,00	24.052.900,00	7.697.100,00	75,76	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	31.750.000,00	24.052.900,00	7.697.100,00	75,76	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	198.889.000,00	198.180.444,00	708.556,00	99,64	
	Belanja Operasi	144.070.000,00	143.460.944,00	609.056,00	99,58	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 09 . 09 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	142.970.000,00	142.360.944,00	609.056,00	99,57	
	Belanja Modal	54.819.000,00	54.719.500,00	99.500,00	99,82	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.819.000,00	54.719.500,00	99.500,00	99,82	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**987.749.122,00**	**961.986.266,00**	**25.762.856,00**	**97,39**	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**628.618.670,00**	**613.868.359,00**	**14.750.311,00**	**97,65**	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 15	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**55.643.970,00**	**54.446.600,00**	**1.197.370,00**	**97,85**	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 15 . 01	*Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG*	14.579.000,00	14.114.300,00	464.700,00	96,81	
	Belanja Operasi	14.579.000,00	14.114.300,00	464.700,00	96,81	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	14.579.000,00	14.114.300,00	464.700,00	96,81	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 15 . 03	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG*	30.760.970,00	30.328.300,00	432.670,00	98,59	
	Belanja Operasi	15.543.500,00	15.243.300,00	300.200,00	98,07	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	15.543.500,00	15.243.300,00	300.200,00	98,07	
	Belanja Modal	15.217.470,00	15.085.000,00	132.470,00	99,13	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.217.470,00	15.085.000,00	132.470,00	99,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
2.02 . 1.06.02 . 01 . 15 . 04	*Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG*	10.304.000,00	10.004.000,00	300.000,00	97,09	
	Belanja Operasi	10.304.000,00	10.004.000,00	300.000,00	97,09	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	10.304.000,00	10.004.000,00	300.000,00	97,09	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 16	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**572.974.700,00**	**559.421.759,00**	**13.552.941,00**	**97,63**	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 16 . 02	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi*	572.974.700,00	559.421.759,00	13.552.941,00	97,63	
	Belanja Operasi	2.974.700,00	2.690.000,00	284.700,00	90,43	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	2.974.700,00	2.690.000,00	284.700,00	90,43	
	Belanja Operasi	570.000.000,00	556.731.759,00	13.268.241,00	97,67	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	*Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*	570.000.000,00	556.731.759,00	13.268.241,00	97,67	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**51.084.400,00**	**48.288.800,00**	**2.795.600,00**	**94,53**	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 25	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**38.539.600,00**	**36.484.000,00**	**2.055.600,00**	**94,67**	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 25 . 01	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*	22.194.600,00	21.529.300,00	665.300,00	97,00	
	Belanja Operasi	22.194.600,00	21.529.300,00	665.300,00	97,00	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	22.194.600,00	21.529.300,00	665.300,00	97,00	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 25 . 02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	16.345.000,00	14.954.700,00	1.390.300,00	91,49	
	Belanja Operasi	16.345.000,00	14.954.700,00	1.390.300,00	91,49	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	16.345.000,00	14.954.700,00	1.390.300,00	91,49	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 26	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**12.544.800,00**	**11.804.800,00**	**740.000,00**	**94,10**	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 26 . 01	*Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	12.544.800,00	11.804.800,00	740.000,00	94,10	
	Belanja Operasi	12.544.800,00	11.804.800,00	740.000,00	94,10	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	12.544.800,00	11.804.800,00	740.000,00	94,10	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**308.046.052,00**	**299.829.107,00**	**8.216.945,00**	**97,33**	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 27	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**111.330.000,00**	**108.274.200,00**	**3.055.800,00**	**97,26**	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 27 . 01	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	111.330.000,00	108.274.200,00	3.055.800,00	97,26	
	Belanja Operasi	111.330.000,00	108.274.200,00	3.055.800,00	97,26	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	111.330.000,00	108.274.200,00	3.055.800,00	97,26	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 28	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**34.845.652,00**	**31.179.407,00**	**3.666.245,00**	**89,48**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
2.02 . 1.06.02 . 01 . 28 . 01	*Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	34.845.652,00	31.179.407,00	3.666.245,00	89,48	
	Belanja Operasi	23.966.600,00	20.300.400,00	3.666.200,00	84,70	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	23.966.600,00	20.300.400,00	3.666.200,00	84,70	
	Belanja Modal	10.879.052,00	10.879.007,00	45,00	100,00	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.879.052,00	10.879.007,00	45,00	100,00	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 29	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**161.870.400,00**	**160.375.500,00**	**1.494.900,00**	**99,08**	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 29 . 01	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	161.870.400,00	160.375.500,00	1.494.900,00	99,08	
	Belanja Operasi	161.870.400,00	160.375.500,00	1.494.900,00	99,08	
2.02 . 1.06.02 . 01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	161.870.400,00	160.375.500,00	1.494.900,00	99,08	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(7.068.286.752,00)**	**(6.647.257.664,00)**	**(421.029.088,00)**	**94,04**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 03 Pangan
Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**16.677.034.146,00**	**14.778.076.646,00**	**1.898.957.500,00**	**88,61**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	**525.047.100,00**	**492.812.100,00**	**32.235.000,00**	**93,86**	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**525.047.100,00**	**492.812.100,00**	**32.235.000,00**	**93,86**	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 17	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 17 . 03	*Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 19	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**525.047.100,00**	**492.812.100,00**	**32.235.000,00**	**93,86**	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 19 . 02	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	525.047.100,00	492.812.100,00	32.235.000,00	93,86	
	Belanja Operasi	525.047.100,00	492.812.100,00	32.235.000,00	93,86	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	525.047.100,00	492.812.100,00	32.235.000,00	93,86	
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	**16.151.987.046,00**	**14.285.264.546,00**	**1.866.722.500,00**	**88,44**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**10.192.590.713,00**	**9.556.222.450,00**	**636.368.263,00**	**93,76**	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.341.111.163,00**	**8.845.085.549,00**	**496.025.614,00**	**94,69**	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.766.416.163,00	6.678.552.165,00	87.863.998,00	98,70	
	Belanja Operasi	6.766.416.163,00	6.678.552.165,00	87.863.998,00	98,70	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.766.416.163,00	6.678.552.165,00	87.863.998,00	98,70	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	2.574.695.000,00	2.166.533.384,00	408.161.616,00	84,15	
	Belanja Operasi	2.574.695.000,00	2.166.533.384,00	408.161.616,00	84,15	
	Belanja Pegawai	272.470.000,00	136.220.000,00	136.250.000,00	49,99	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	2.302.225.000,00	2.030.313.384,00	271.911.616,00	88,19	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**412.372.650,00**	**367.437.180,00**	**44.935.470,00**	**89,10**	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	9.999.650,00	8.112.500,00	1.887.150,00	81,13	
	Belanja Operasi	9.999.650,00	8.112.500,00	1.887.150,00	81,13	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	9.999.650,00	8.112.500,00	1.887.150,00	81,13	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	86.499.000,00	82.180.180,00	4.318.820,00	95,01	
	Belanja Operasi	86.499.000,00	82.180.180,00	4.318.820,00	95,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
3.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	86.499.000,00	82.180.180,00	4.318.820,00	95,01	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	33.600.000,00	16.342.700,00	17.257.300,00	48,64	
	Belanja Operasi	33.600.000,00	16.342.700,00	17.257.300,00	48,64	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	16.342.700,00	17.257.300,00	48,64	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	15.000.000,00	12.400.000,00	2.600.000,00	82,67	
	Belanja Operasi	15.000.000,00	12.400.000,00	2.600.000,00	82,67	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.400.000,00	2.600.000,00	82,67	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	267.274.000	248.401.800	18.872.200,00	92,94	
	Belanja Operasi	267.274.000	248.401.800	18.872.200,00	92,94	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	267.274.000	248.401.800	18.872.200,00	92,94	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80.000.000,00**	**68.835.721,00**	**11.164.279,00**	**86,04**	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	60.000.000,00	48.835.721,00	11.164.279,00	81,39	
	Belanja Operasi	60.000.000,00	48.835.721,00	11.164.279,00	81,39	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	48.835.721,00	11.164.279,00	81,39	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**65.343.000,00**	**42.538.000,00**	**22.805.000,00**	**65,10**	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	65.343.000,00	42.538.000,00	22.805.000,00	65,10	
	Belanja Operasi	65.343.000,00	42.538.000,00	22.805.000,00	65,10	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	65.343.000,00	42.538.000,00	22.805.000,00	65,10	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 09 . 11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 09 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 150	**Penataan Organisasi**	293.763.900,00	232.326.000,00	61.437.900,00	79,09	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 150 . 154	*Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	293.763.900,00	232.326.000,00	61.437.900,00	79,09	
	Belanja Operasi	293.763.900,00	232.326.000,00	61.437.900,00	79,09	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 150 . 154 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	293.763.900,00	232.326.000,00	61.437.900,00	79,09	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**2.206.544.150,00**	**1.347.162.300,00**	**859.381.850,00**	**61,05**	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 15	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**992.239.000,00**	**785.408.900,00**	**206.830.100,00**	**79,16**	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 02	*Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	992.239.000,00	785.408.900,00	206.830.100,00	79,16	
	Belanja Operasi	992.239.000,00	785.408.900,00	206.830.100,00	79,16	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.720.000,00	4.080.000,00	640.000,00		
3.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	987.519.000,00	781.328.900,00	206.190.100,00	79,12	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 16	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 16 . 02	*Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 20	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**1.214.305.150,00**	**561.753.400,00**	**652.551.750,00**	**46,26**	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 20 . 01	*Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain*	1.214.305.150,00	561.753.400,00	652.551.750,00	46,26	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	Belanja Operasi	1.214.305.150,00	561.753.400,00	652.551.750,00	46,26	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	2.720.000,00	5.880.000,00		
3.03 . 2.03.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.205.705.150,00	559.033.400,00	646.671.750,00	46,37	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 21	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 21 . 01	*Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**3.752.852.183,00**	**3.381.879.796,00**	**370.972.387,00**	**90,11**	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 22	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**3.752.852.183,00**	**3.381.879.796,00**	**370.972.387,00**	**90,11**	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 22 . 01	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani*	2.699.660.516,00	2.676.872.129,00	22.788.387,00	99,16	
	Belanja Operasi	190.958.684,00	171.872.129,00	19.086.555,00	90,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00		
3.03 . 2.03.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	188.918.684,00	171.872.129,00	17.046.555,00	90,98	
	Belanja Modal	2.508.701.832,00	2.505.000.000,00	3.701.832,00	99,85	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.508.701.832,00	2.505.000.000,00	3.701.832,00	99,85	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 22 . 02	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 22 . 03	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 22 . 08	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya*	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
	Belanja Operasi	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 22 . 09	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya*	753.191.667,00	705.007.667,00	48.184.000,00	93,60	
	Belanja Operasi	178.840.500,00	130.656.500,00	48.184.000,00	73,06	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 22 . 09 . 5 . 21. 1	Belanja Pegawai	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	173.340.500,00	130.656.500,00	42.684.000,00	75,38	
	Belanja Modal	574.351.167,00	574.351.167,00	0,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	574.351.167,00	574.351.167,00	0,00	100,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 28	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 28 . 01	*Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 30	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 30 . 03	*Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan*	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 34	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 34 . 01	*Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 34 . 03	*Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 150	**Penataan Organisasi**	**293.763.900,00**	**232.326.000,00**	**61.437.900,00**	**79,09**	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 150 . 154	*Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	293.763.900,00	232.326.000,00	61.437.900,00	79,09	
	Belanja Operasi	293.763.900,00	232.326.000,00	61.437.900,00	79,09	
3.03 . 2.03.01 . 00 . 150 . 154 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	293.763.900,00	232.326.000,00	61.437.900,00	79,09	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(16.677.034.146,00)**	**(14.778.076.646,00)**	**(1.898.957.500,00)**	**88,55**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**5.274.246.138,00**	**4.955.159.538,00**	**319.086.600,00**	**93,95**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	**5.274.246.138,00**	**4.955.159.538,00**	**319.086.600,00**	**93,95**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**4.241.002.738,00**	**4.004.378.960,00**	**236.623.778,00**	**94,42**	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.718.136.658,00**	**2.633.951.918,00**	**84.184.740,00**	**96,90**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.718.136.658,00	2.633.951.918,00	84.184.740,00	96,90	
	Belanja Operasi	2.718.136.658,00	2.633.951.918,00	84.184.740,00	96,90	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.718.136.658,00	2.633.951.918,00	84.184.740,00	96,90	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**186.846.480,00**	**159.188.986,00**	**27.657.494,00**	**85,20**	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	2.654.600,00	2.654.600,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	2.654.600,00	2.654.600,00	0,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	2.654.600,00	2.654.600,00	0,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	49.059.880,00	49.042.380,00	17.500,00	99,96	
	Belanja Operasi	49.059.880,00	49.042.380,00	17.500,00	99,96	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	49.059.880,00	49.042.380,00	17.500,00	99,96	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	16.800.000,00	16.700.000,00	100.000,00	99,40	
	Belanja Operasi	16.800.000,00	16.700.000,00	100.000,00	99,40	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.700.000,00	100.000,00	99,40	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	118.332.000,00	90.792.006,00	27.539.994,00	76,73	
	Belanja Operasi	118.332.000,00	90.792.006,00	27.539.994,00	76,73	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	118.332.000,00	90.792.006,00	27.539.994,00	76,73	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.236.139.600,00**	**1.117.596.056,00**	**118.543.544,00**	**90,41**	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	18.000.000,00	16.166.968,00	1.833.032,00	89,82	
	Belanja Operasi	18.000.000,00	16.166.968,00	1.833.032,00	89,82	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	16.166.968,00	1.833.032,00	89,82	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	1.218.139.600,00	1.101.429.088,00	116.710.512,00	90,42	
	Belanja Operasi	1.218.139.600,00	1.101.429.088,00	116.710.512,00	90,42	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	119.110.000,00	118.260.000,00	850.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.099.029.600,00	983.169.088,00	115.860.512,00	89,46	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**99.880.000,00**	**93.642.000,00**	**6.238.000,00**	**93,75**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	18.480.000,00	12.657.000,00	5.823.000,00	68,49	
	Belanja Operasi	18.480.000,00	12.657.000,00	5.823.000,00	68,49	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	18.480.000,00	12.657.000,00	5.823.000,00	68,49	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	73.600.000,00	73.185.000,00	415.000,00	99,44	
	Belanja Operasi	73.600.000,00	73.185.000,00	415.000,00	99,44	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	73.600.000,00	73.185.000,00	415.000,00	99,44	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAI KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**6.153.000,00**	**5.241.000,00**	**912.000,00**	**85,18**	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**6.153.000,00**	**5.241.000,00**	**912.000,00**	**85,18**	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 01	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*	6.153.000,00	5.241.000,00	912.000,00	85,18	
	Belanja Operasi	6.153.000,00	5.241.000,00	912.000,00	85,18	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	6.153.000,00	5.241.000,00	912.000,00	85,18	
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAI KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**714.766.000,00**	**643.519.778,00**	**71.246.222,00**	**90,03**	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**714.766.000,00**	**643.519.778,00**	**71.246.222,00**	**90,03**	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 01	*Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati*	714.766.000,00	643.519.778,00	71.246.222,00	90,03	
	Belanja Operasi	714.766.000,00	643.519.778,00	71.246.222,00	90,03	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	714.766.000,00	643.519.778,00	71.246.222,00	90,03	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 02	*Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**46.510.000,00**	**41.870.000,00**	**4.640.000,00**	**90,02**	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**46.510.000,00**	**41.870.000,00**	**4.640.000,00**	**90,02**	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 03	*Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	46.510.000,00	41.870.000,00	4.640.000,00	90,02	
	Belanja Operasi	46.510.000,00	41.870.000,00	4.640.000,00	90,02	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	46.510.000,00	41.870.000,00	4.640.000,00	90,02	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**15.401.900,00**	**12.435.800,00**	**2.966.100,00**	**80,74**	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**15.401.900,00**	**12.435.800,00**	**2.966.100,00**	**80,74**	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 01	*Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH*	15.401.900,00	12.435.800,00	2.966.100,00	80,74	
	Belanja Operasi	15.401.900,00	12.435.800,00	2.966.100,00	80,74	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	15.401.900,00	12.435.800,00	2.966.100,00	80,74	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**250.412.500,00**	**247.714.000,00**	**2.698.500,00**	**98,92**	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 29	**Pengelolaan Sampah**	**250.412.500,00**	**247.714.000,00**	**2.698.500,00**	**98,92**	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 29 . 03	*Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota*	244.772.500,00	242.704.000,00	2.068.500,00	99,15	
	Belanja Operasi	244.772.500,00	242.704.000,00	2.068.500,00	99,15	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 29 . 03 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		
2.05 . 2.05.01 . 01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	238.772.500,00	236.704.000,00	2.068.500,00	99,13	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 29 . 05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan*	5.640.000,00	5.010.000,00	630.000,00	88,83	
	Belanja Operasi	5.640.000,00	5.010.000,00	630.000,00	88,83	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	5.010.000,00	630.000,00	88,83	
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(5.274.246.138,00)**	**(4.955.159.538,00)**	**(319.086.600,00)**	**93,95**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 06 Administrasi Kependudukan dan Capil
Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**6.262.212.781,00**	**4.769.427.624,00**	**1.492.785.157,00**	**76,16**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	**6.262.212.781,00**	**4.769.427.624,00**	**1.492.785.157,00**	**76,16**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**4.208.246.781,00**	**4.053.555.844,00**	**154.690.937,00**	**96,32**	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.753.046.481,00**	**3.631.756.628,00**	**121.289.853,00**	**96,77**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.627.488.481,00	2.576.964.628,00	50.523.853,00	98,08	
	Belanja Operasi	2.627.488.481,00	2.576.964.628,00	50.523.853,00	98,08	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.627.488.481,00	2.576.964.628,00	50.523.853,00	98,08	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1.125.558.000,00	1.054.792.000,00	70.766.000,00	93,71	
	Belanja Operasi	1.125.558.000,00	1.054.792.000,00	70.766.000,00	93,71	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	81.600.000,00	70.300.000,00	11.300.000,00	86,15	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.043.958.000,00	984.492.000,00	59.466.000,00	94,30	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**251.126.700,00**	**229.576.421,00**	**21.550.279,00**	**91,42**	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	7.235.000,00	7.235.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	7.235.000,00	7.235.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	7.235.000,00	7.235.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	111.100.000,00	105.620.000,00	5.480.000,00	95,07	
	Belanja Operasi	1.100.000,00	680.000,00	420.000,00	61,82	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	680.000,00	420.000,00	61,82	
	Belanja Modal	110.000.000,00	104.940.000,00	5.060.000,00	95,40	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.000.000,00	104.940.000,00	5.060.000,00	95,40	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	73.395.700,00	72.436.821,00	958.879,00	98,69	
	Belanja Operasi	73.395.700,00	72.436.821,00	958.879,00	98,69	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	680.000,00	420.000,00	61,82	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	72.295.700,00	71.756.821,00	538.879,00	99,25	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	32.496.000,00	17.384.600,00	15.111.400,00	53,50	
	Belanja Operasi	32.496.000,00	17.384.600,00	15.111.400,00	53,50	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	32.496.000,00	17.384.600,00	15.111.400,00	53,50	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**48.113.600,00**	**40.048.751,00**	**8.064.849,00**	**83,24**	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	37.200.000,00	29.135.151,00	8.064.849,00	78,32	
	Belanja Operasi	37.200.000,00	29.135.151,00	8.064.849,00	78,32	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	29.135.151,00	8.064.849,00	78,32	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	10.913.600,00	10.913.600,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	10.913.600,00	10.913.600,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	10.913.600,00	10.913.600,00	0,00	100,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**155.960.000,00**	**152.174.044,00**	**3.785.956,00**	**97,57**	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	48.260.000,00	45.718.500,00	2.541.500,00	94,73	
	Belanja Operasi	48.260.000,00	45.718.500,00	2.541.500,00	94,73	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	48.260.000,00	45.718.500,00	2.541.500,00	94,73	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	107.700.000,00	106.455.544,00	1.244.456,00	98,84	
	Belanja Operasi	107.700.000,00	106.455.544,00	1.244.456,00	98,84	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	107.700.000,00	106.455.544,00	1.244.456,00	98,84	
	PROGRAM PENDAFTARAAN PENDUDUK	**919.332.700,00**	**303.981.500,00**	**615.351.200,00**	**33,07**	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**726.432.700,00**	**279.376.500,00**	**447.056.200,00**	**38,46**	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 04	*Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*	726.432.700,00	279.376.500,00	447.056.200,00	38,46	
	Belanja Operasi	726.432.700,00	279.376.500,00	447.056.200,00	38,46	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	726.432.700,00	279.376.500,00	447.056.200,00	38,46	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 16	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	192.900.000,00	24.605.000,00	168.295.000,00	12,76	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 02	*Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan*	192.900.000,00	24.605.000,00	168.295.000,00	12,76	
	Belanja Operasi	192.900.000,00	24.605.000,00	168.295.000,00	12,76	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	680.000,00	420.000,00	61,82	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	191.800.000,00	23.925.000,00	167.875.000,00	12,47	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**1.114.633.300,00**	**411.890.280,00**	**702.743.020,00**	**36,95**	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 19	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**642.169.700,00**	**280.452.180,00**	**361.717.520,00**	**43,67**	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 19 . 02	*Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil*	642.169.700,00	280.452.180,00	361.717.520,00	43,67	
	Belanja Operasi	642.169.700,00	280.452.180,00	361.717.520,00	43,67	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	642.169.700,00	280.452.180,00	361.717.520,00	43,67	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 20	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**472.463.600,00**	**131.438.100,00**	**341.025.500,00**	**27,82**	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 20 . 10	*Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil*	472.463.600,00	131.438.100,00	341.025.500,00	27,82	
	Belanja Operasi	472.463.600,00	131.438.100,00	341.025.500,00	27,82	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	472.463.600,00	131.438.100,00	341.025.500,00	27,82	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 26	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**20.000.000,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 26 . 02	*Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain*	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	Belanja Operasi	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
2.06 . 2.06.01 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(6.262.212.781,00)**	**(4.769.427.624,00)**	**(1.492.785.157,00)**	**76,15**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa
Unit Organisasi : 2 . 07 . 02 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
2.07 . 2.07.02 . 00 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**9.924.454.364,00**	**7.762.205.023,00**	**2.162.249.341,00**	**78,21**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	**7.260.563.966,00**	**6.812.035.905,00**	**448.528.061,00**	**93,82**	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**1.303.057.000,00**	**1.044.357.658,00**	**258.699.342,00**	**80,15**	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 17	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**1.303.057.000,00**	**1.044.357.658,00**	**258.699.342,00**	**80,15**	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 17 . 03	*Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa*	85.486.500,00	42.640.000,00	42.846.500,00	49,88	
	Belanja Operasi	85.486.500,00	42.640.000,00	42.846.500,00	49,88	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	85.486.500,00	42.640.000,00	42.846.500,00	49,88	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 17 . 04	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*	400.724.600,00	191.710.358,00	209.014.242,00	47,84	
	Belanja Operasi	400.724.600,00	191.710.358,00	209.014.242,00	47,84	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	400.724.600,00	191.710.358,00	209.014.242,00	47,84	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 17 . 09	*Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*	816.845.900,00	810.007.300,00	6.838.600,00	99,16	
	Belanja Operasi	816.845.900,00		816.845.900,00	0,00	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	816.845.900,00	810.007.300,00	6.838.600,00	99,16	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 17 . 11	*Fasilitasi Penyusunan Profil Desa*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**465.375.200,00**	**464.345.400,00**	**1.029.800,00**	**99,78**	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 18	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**465.375.200,00**	**464.345.400,00**	**1.029.800,00**	**99,78**	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 18 . 09	*Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*	465.375.200,00	464.345.400,00	1.029.800,00	99,78	
	Belanja Operasi	465.375.200,00	464.345.400,00	1.029.800,00	99,78	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	465.375.200,00	464.345.400,00	1.029.800,00	99,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**5.492.131.766,00**	**5.303.332.847,00**	**188.798.919,00**	**96,56**	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.243.805.466,00**	**5.093.426.036,00**	**150.379.430,00**	**97,13**	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.356.834.466,00	3.296.769.268,00	60.065.198,00	98,21	
	Belanja Operasi	3.356.834.466,00	3.296.769.268,00	60.065.198,00	98,21	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.356.834.466,00	3.296.769.268,00	60.065.198,00	98,21	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1.886.971.000,00	1.796.656.768,00	90.314.232,00	95,21	
	Belanja Operasi	1.886.971.000,00	1.796.656.768,00	90.314.232,00	95,21	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	183.060.000,00	143.060.000,00	40.000.000,00	78,15	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.703.911.000,00	1.653.596.768,00	50.314.232,00	97,05	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**181.935.800,00**	**162.386.600,00**	**19.549.200,00**	**89,25**	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	64.997.900,00	56.893.000,00	8.104.900,00	87,53	
	Belanja Operasi	64.997.900,00	56.893.000,00	8.104.900,00	87,53	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	64.997.900,00	56.893.000,00	8.104.900,00	87,53	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	23.999.900,00	16.629.800,00	7.370.100,00	69,29	
	Belanja Operasi	23.999.900,00	16.629.800,00	7.370.100,00	69,29	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	23.999.900,00	16.629.800,00	7.370.100,00	69,29	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	4.500.000,00	2.400.000,00	2.100.000,00	53,33	
	Belanja Operasi	4.500.000,00	2.400.000,00	2.100.000,00	53,33	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	2.400.000,00	2.100.000,00	53,33	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	88.438.000,00	86.463.800,00	1.974.200,00	97,77	
	Belanja Operasi	88.438.000,00	86.463.800,00	1.974.200,00	97,77	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	88.438.000,00	86.463.800,00	1.974.200,00	97,77	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**51.390.500,00**	**44.520.211,00**	**6.870.289,00**	**86,63**	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	26.400.000,00	21.480.811,00	4.919.189,00	81,37	
	Belanja Operasi	26.400.000,00	21.480.811,00	4.919.189,00	81,37	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	21.480.811,00	4.919.189,00	81,37	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	24.990.500,00	23.039.400,00	1.951.100,00	92,19	
	Belanja Operasi	24.570.500,00	23.039.400,00	1.531.100,00	93,77	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	24.570.500,00	23.039.400,00	1.531.100,00	93,77	
	Belanja Modal	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 08 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.000.000,00**	**3.000.000,00**	**12.000.000,00**	**20,00**	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	15.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	20,00	
	Belanja Operasi	15.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	20,00	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	20,00	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 15	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 15 . 03	*Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.07 . 2.07.02 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**2.663.890.398,00**	**950.169.118,00**	**1.713.721.280,00**	**35,67**	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**2.663.890.398,00**	**950.169.118,00**	**1.713.721.280,00**	**35,67**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
2.08 . 2.07.02 . 00 . 17	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**765.600.000,00**	**266.848.200,00**	**498.751.800,00**	**34,85**	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 17 . 07	*Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK*	765.600.000,00	266.848.200,00	498.751.800,00	34,85	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	765.600.000,00	266.848.200,00	498.751.800,00	34,85	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 18	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**852.853.678,00**	**205.029.848,00**	**647.823.830,00**	**24,04**	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 18 . 02	*Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB*	216.719.848,00	41.719.848,00	175.000.000,00	19,25	
	Belanja Operasi	207.414.300,00	32.414.300,00	175.000.000,00	15,63	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	207.414.300,00	32.414.300,00	175.000.000,00	15,63	
	Belanja Modal	9.305.548,00	9.305.548,00	0,00	100,00	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.305.548,00	9.305.548,00	0,00	100,00	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 18 . 03	*Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)*	636.133.830,00	163.310.000,00	472.823.830,00	25,67	
	Belanja Operasi	636.133.830,00	163.310.000,00	472.823.830,00	25,67	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 18 . 03 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	102.000.000,00	22.425.000,00	79.575.000,00	21,99	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	534.133.830,00	140.885.000,00	393.248.830,00	26,38	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 19	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**513.044.820,00**	**440.167.670,00**	**72.877.150,00**	**85,80**	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 19 . 01	*Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	18.030.000,00	0,00	18.030.000,00	0,00	
	Belanja Operasi	18.030.000,00	0,00	18.030.000,00	0,00	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	18.030.000,00	0,00	18.030.000,00	0,00	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 19 . 06	*Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB*	318.973.920,00	297.544.270,00	21.429.650,00	93,28	
	Belanja Operasi	69.991.900,00	59.994.900,00	9.997.000,00	85,72	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 19 . 06 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	2.720.000,00	1.680.000,00	61,82	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	65.591.900,00	57.274.900,00	8.317.000,00	87,32	
	Belanja Modal	87.832.020,00	76.413.700,00	11.418.320,00	87,00	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.832.020,00	76.413.700,00	11.418.320,00	87,00	
	Belanja Modal	161.150.000,00	161.135.670,00	14.330,00	99,99	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	161.150.000,00	161.135.670,00	14.330,00	99,99	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 19 . 10	*Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*	170.265.900,00	142.623.400,00	27.642.500,00	83,77	
	Belanja Operasi	170.265.900,00	142.623.400,00	27.642.500,00	83,77	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 19 . 10 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	100,00	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	147.465.900,00	119.823.400,00	27.642.500,00	81,25	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 19 . 12	*Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran*	5.775.000,00	0,00	5.775.000,00	0,00	
	Belanja Operasi	5.775.000,00	0,00	5.775.000,00	0,00	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	5.775.000,00	0,00	5.775.000,00	0,00	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 20	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**532.391.900,00**	**38.123.400,00**	**494.268.500,00**	**7,16**	
2.08 . 2.07.02 . 00 . 20 . 04	*Pembinaan Terpadu Kampung KB*	532.391.900,00	38.123.400,00	494.268.500,00	7,16	
	Belanja Operasi	532.391.900,00	38.123.400,00	494.268.500,00	7,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
2.08 . 2.07.02 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	532.391.900,00	38.123.400,00	494.268.500,00	7,16	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(9.924.454.364,00)**	**(7.762.205.023,00)**	**(2.162.249.341,00)**	**78,21**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan
Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.402.007.031,00**	**305.266.100,00**	**1.096.740.931,00**	**21,77**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.402.007.031,00**	**305.266.100,00**	**1.096.740.931,00**	**21,77**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	1.402.007.031,00	305.266.100,00	1.096.740.931,00	21,77	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**22.465.044.023,00**	**19.999.607.775,00**	**2.465.436.248,00**	**89,03**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	**22.465.044.023,00**	**19.999.607.775,00**	**2.465.436.248,00**	**89,03**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**8.627.499.236,00**	**7.903.202.116,00**	**724.297.120,00**	**91,60**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11.365.000,00**	**11.024.600,00**	**340.400,00**	**97,00**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	11.365.000,00	11.024.600,00	340.400,00	97,00	
	Belanja Operasi	11.365.000,00	11.024.600,00	340.400,00	97,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	11.365.000,00	11.024.600,00	340.400,00	97,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.778.982.528,00**	**7.375.908.123,00**	**403.074.405,00**	**94,82**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.680.956.528,00	4.563.925.271,00	117.031.257,00	97,50	
	Belanja Operasi	4.680.956.528,00	4.563.925.271,00	117.031.257,00	97,50	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.680.956.528,00	4.563.925.271,00	117.031.257,00	97,50	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	3.098.026.000,00	2.811.982.852,00	286.043.148,00	90,77	
	Belanja Operasi	3.098.026.000,00	2.811.982.852,00	286.043.148,00	90,77	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	181.920.000,00	159.850.000,00	22.070.000,00	87,87	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	2.916.106.000,00	2.652.132.852,00	263.973.148,00	90,95	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**399.802.208,00**	**363.824.980,00**	**35.977.228,00**	**91,00**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	3.489.000,00	3.364.888,00	124.112,00	96,44	
	Belanja Operasi	3.489.000,00	3.364.888,00	124.112,00	96,44	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	3.489.000,00	3.364.888,00	124.112,00	96,44	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	113.209.408,00	97.158.000,00	16.051.408,00	85,82	
	Belanja Operasi	14.300.000,00	9.600.000,00	4.700.000,00	67,13	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	9.600.000,00	4.700.000,00	67,13	
	Belanja Modal	98.909.408,00	87.558.000,00	11.351.408,00	88,52	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.909.408,00	87.558.000,00	11.351.408,00	88,52	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	82.533.800,00	70.346.202,00	12.187.598,00	85,23	
	Belanja Operasi	82.533.800,00	70.346.202,00	12.187.598,00	85,23	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	82.533.800,00	70.346.202,00	12.187.598,00	85,23	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	20.600.000,00	13.349.792,00	7.250.208,00	64,80	
	Belanja Operasi	20.600.000,00	13.349.792,00	7.250.208,00	64,80	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	13.349.792,00	7.250.208,00	64,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	167.970.000,00	167.606.098,00	363.902,00	99,78	
	Belanja Operasi	167.970.000,00	167.606.098,00	363.902,00	99,78	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	167.970.000,00	167.606.098,00	363.902,00	99,78	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**203.699.500,00**	**0,00**	**203.699.500,00**	**0,00**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 07 . 07	*Pengadaan Aset Tetap Lainnya*	203.699.500,00	0,00	203.699.500,00	0,00	
	Belanja Operasi	203.699.500,00	0,00	203.699.500,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 07 . 07 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	203.019.500,00	0,00	203.019.500,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 07 . 10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 07 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**182.925.000,00**	**115.699.713,00**	**67.225.287,00**	**63,25**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	162.000.000,00	95.179.213,00	66.820.787,00	58,75	
	Belanja Operasi	162.000.000,00	95.179.213,00	66.820.787,00	58,75	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000,00	95.179.213,00	66.820.787,00	58,75	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	20.925.000,00	20.520.500,00	404.500,00	98,07	
	Belanja Modal	20.925.000,00	20.520.500,00	404.500,00	98,07	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 08 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.925.000,00	20.520.500,00	404.500,00	98,07	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.725.000,00**	**36.744.700,00**	**13.980.300,00**	**72,44**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	49.995.000,00	36.744.700,00	13.250.300,00	73,50	
	Belanja Operasi	49.995.000,00	36.744.700,00	13.250.300,00	73,50	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	49.995.000,00	36.744.700,00	13.250.300,00	73,50	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	
	Belanja Operasi	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**1.123.163.600,00**	**1.049.647.887,00**	**73.515.713,00**	**93,45**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**534.611.600,00**	**508.436.890,00**	**26.174.710,00**	**95,10**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 01	*Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*	534.611.600,00	508.436.890,00	26.174.710,00	95,10	
	Belanja Operasi	108.116.000,00	81.941.300,00	26.174.700,00	75,79	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.110.000,00	2.550.000,00	680.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	104.006.000,00	79.391.300,00	24.614.700,00	76,33	
	Belanja Modal	426.495.600,00	426.495.590,00	10,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	426.495.600,00	426.495.590,00	10,00	100,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 06	*Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 23	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**588.552.000,00**	**541.210.997,00**	**47.341.003,00**	**91,96**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00 . 23 . 01	***Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	**588.552.000,00**	**541.210.997,00**	**47.341.003,00**	**91,96**	
	Belanja Operasi	588.552.000,00	541.210.997,00	47.341.003,00	91,96	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 23 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.840.000,00	2.280.000,00	680.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	80.712.000,00	37.045.000,00	43.667.000,00	45,90	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	504.000.000,00	501.885.997,00	2.114.003,00	99,58	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**12.714.381.187,00**	**11.046.757.772,00**	**1.667.623.415,00**	**86,88**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 36	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**	**280.641.600,00**	**41.241.188,00**	**239.400.412,00**	**14,70**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 36 . 01	*Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota*	280.641.600,00	41.241.188,00	239.400.412,00	14,70	
	Belanja Operasi	280.641.600,00	41.241.188,00	239.400.412,00	14,70	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	280.641.600,00	41.241.188,00	239.400.412,00	14,70	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 37	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**9.737.762.401,00**	**8.520.283.648,00**	**1.217.478.753,00**	**87,50**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 37 . 02	*Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	9.737.762.401,00	8.520.283.648,00	1.217.478.753,00	87,50	
	Belanja Operasi	9.709.839.075,00	8.507.888.648,00	1.201.950.427,00	87,62	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 37 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.270.000,00	3.410.000,00	680.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.052.569.075,00	818.684.035,00	233.885.040,00	77,78	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 3	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	8.650.000.000,00	7.685.794.613,00	964.205.387,00	88,85	
	Belanja Modal	27.923.326,00	12.395.000,00	15.528.326,00	44,39	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.923.326,00	12.395.000,00	15.528.326,00	44,39	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 38	**Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal**	**34.500.000,00**	**8.872.000,00**	**25.628.000,00**	**25,72**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 38 . 02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal*	34.500.000,00	8.872.000,00	25.628.000,00	25,72	
	Belanja Operasi	34.500.000,00	8.872.000,00	25.628.000,00	25,72	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	8.872.000,00	25.628.000,00	25,72	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 42	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**155.496.800,00**	**69.931.800,00**	**85.565.000,00**	**44,97**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 42 . 01	*Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal*	52.547.000,00	13.193.000,00	39.354.000,00	25,11	
	Belanja Operasi	52.547.000,00	13.193.000,00	39.354.000,00	25,11	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 42 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	52.547.000,00	13.193.000,00	39.354.000,00	25,11	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 42 . 03	*Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal*	63.174.800,00	56.738.800,00	6.436.000,00	89,81	
	Belanja Operasi	63.174.800,00	56.738.800,00	6.436.000,00	89,81	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 42 . 03 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	**3.300.000,00**	**0,00**	680.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 42 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	59.874.800,00	56.738.800,00	3.136.000,00	94,76	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 42 . 04	*Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal*	39.775.000,00	0,00	39.775.000,00	0,00	
	Belanja Operasi	39.775.000,00	0,00	39.775.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	39.775.000,00	0,00	39.775.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
2.09 . 2.09.01 . 00 . 43	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**2.505.980.386,00**	**2.406.429.136,00**	**99.551.250,00**	**96,03**	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 43 . 02	*Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau*	2.505.980.386,00	2.406.429.136,00	99.551.250,00	96,03	
	Belanja Operasi	580.935.000,00	482.802.430,00	98.132.570,00	83,11	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 43 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	**19.080.000,00**	**17.380.000,00**	680.000,00	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	561.855.000,00	465.422.430,00	96.432.570,00	82,84	
	Belanja Modal	1.925.045.386,00	1.923.626.706,00	1.418.680,00	99,93	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 43 . 02 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.925.045.386,00	1.923.626.706,00	1.418.680,00	99,93	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(21.063.036.992,00)**	**(19.694.341.675,00)**	**(1.368.695.317,00)**	93,50	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 10 Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 =3 - 4	6	7
2.10 . 2.10.00 . 00 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**7.914.072.373,00**	**7.082.158.514,00**	**831.913.859,00**	**89,49**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**7.914.072.373,00**	**7.082.158.514,00**	**831.913.859,00**	**89,49**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**4.259.116.759,00**	**3.816.650.037,00**	**442.466.722,00**	**89,61**	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.412.031.859,00**	**3.285.663.357,00**	**126.368.502,00**	**96,30**	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.494.185.859,00	2.392.505.957,00	101.679.902,00	95,92	
	Belanja Operasi	2.494.185.859,00	2.392.505.957,00	101.679.902,00	95,92	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 02 . 01. 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.494.185.859,00	2.392.505.957,00	101.679.902,00	95,92	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	917.846.000,00	893.157.400,00	24.688.600,00	97,31	
	Belanja Operasi	917.846.000,00	893.157.400,00	24.688.600,00	97,31	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 02 . 02. 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	115.950.000,00	111.300.000,00	101.679.902,00	95,92	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	801.896.000,00	781.857.400,00	20.038.600,00	97,50	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**341.697.600,00**	**199.701.356,00**	**141.996.244,00**	**58,44**	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	3.065.500,00	2.563.500,00	502.000,00	83,62	
	Belanja Operasi	3.065.500,00	2.563.500,00	502.000,00	83,62	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	3.065.500,00	2.563.500,00	502.000,00	83,62	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	76.327.600,00	75.797.600,00	530.000,00	99,31	
	Belanja Operasi	76.327.600,00	75.797.600,00	530.000,00	99,31	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	76.327.600,00	75.797.600,00	530.000,00	99,31	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	79.020.500,00	16.581.000,00	62.439.500,00	20,98	
	Belanja Operasi	79.020.500,00	16.581.000,00	62.439.500,00	20,98	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	79.020.500,00	16.581.000,00	62.439.500,00	20,98	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	15.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	33,33	
	Belanja Operasi	15.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	33,33	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	33,33	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	168.284.000,00	99.759.256,00	68.524.744,00	59,28	
	Belanja Operasi	168.284.000,00	99.759.256,00	68.524.744,00	59,28	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	168.284.000,00	99.759.256,00	68.524.744,00	59,28	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**26.958.300,00**	**22.729.300,00**	**4.229.000,00**	**84,31**	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 07 . 05	*Pengadaan Mebel*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 =3 - 4	6	7
2.10 . 2.10.00 . 00 . 07 . 11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	26.958.300,00	22.729.300,00	4.229.000,00	84,31	
	Belanja Operasi	2.604.300,00	1.454.300,00	1.150.000,00	55,84	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 07 . 11 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	680.000,00	101.679.902,00	95,92	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 07 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.504.300,00	774.300,00	730.000,00	51,47	
	Belanja Modal	24.354.000,00	21.275.000,00	3.079.000,00	87,36	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 07 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.354.000,00	21.275.000,00	3.079.000,00	87,36	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**241.999.000,00**	**75.080.129,00**	**166.918.871,00**	**31,02**	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	217.000.000,00	50.081.129,00	166.918.871,00	23,08	
	Belanja Operasi	217.000.000,00	50.081.129,00	166.918.871,00	23,08	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	217.000.000,00	50.081.129,00	166.918.871,00	23,08	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	24.999.000,00	24.999.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	24.999.000,00	24.999.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	24.999.000,00	24.999.000,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**236.430.000,00**	**233.475.895,00**	**2.954.105,00**	**98,75**	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	46.320.000,00	43.785.895,00	2.534.105,00	94,53	
	Belanja Operasi	46.320.000,00	43.785.895,00	2.534.105,00	94,53	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	46.320.000,00	43.785.895,00	2.534.105,00	94,53	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	190.110.000,00	189.690.000,00	420.000,00	99,78	
	Belanja Operasi	190.110.000,00	189.690.000,00	420.000,00	99,78	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 09 . 09 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	680.000,00	101.679.902,00	95,92	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	189.010.000,00	189.010.000,00	0,00	100,00	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**128.674.574,00**	**121.774.800,00**	**6.899.774,00**	**94,64**	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 15	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**128.674.574,00**	**121.774.800,00**	**6.899.774,00**	**94,64**	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 15 . 05	*Pengelolaan Media Komunikasi Publik*	93.019.574,00	88.773.300,00	4.246.274,00	95,44	
	Belanja Operasi	53.658.000,00	49.416.800,00	4.241.200,00	92,10	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	101.679.902,00	95,92	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	53.658.000,00	49.416.800,00	4.241.200,00	92,10	
	Belanja Modal	39.361.574,00	39.356.500,00	5.074,00	99,99	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.361.574,00	39.356.500,00	5.074,00	99,99	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 15 . 06	*Pelayanan Informasi Publik*	9.117.500,00	9.117.500,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	9.117.500,00	9.117.500,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	9.117.500,00	9.117.500,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 15 . 07	*Layanan Hubungan Media*	7.591.000,00	7.568.500,00	22.500,00	99,70	
	Belanja Operasi	7.591.000,00	7.568.500,00	22.500,00	99,70	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	7.591.000,00	7.568.500,00	22.500,00	99,70	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 15 . 11	*Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah*	8.280.500,00	6.323.000,00	1.957.500,00	76,36	
	Belanja Operasi	8.280.500,00	6.323.000,00	1.957.500,00	76,36	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	8.280.500,00	6.323.000,00	1.957.500,00	76,36	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 15 . 12	*Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas*	10.666.000,00	9.992.500,00	673.500,00	93,69	
	Belanja Operasi	10.666.000,00	9.992.500,00	673.500,00	93,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 =3 - 4	6	7
2.10 . 2.10.00 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	10.666.000,00	9.992.500,00	673.500,00	93,69	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**3.526.281.040,00**	**3.143.733.677,00**	**382.547.363,00**	**89,15**	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 16	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**2.754.461.540,00**	**2.655.270.477,00**	**99.191.063,00**	**96,40**	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 16 . 03	*Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah*	2.754.461.540,00	2.655.270.477,00	99.191.063,00	96,40	
	Belanja Operasi	2.748.901.700,00	2.649.710.637,00	99.191.063,00	96,39	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	2.748.901.700,00	2.649.710.637,00	99.191.063,00	96,39	
	Belanja Modal	5.559.840,00	5.559.840,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.559.840,00	5.559.840,00	0,00	100,00	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 17	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**771.819.500,00**	**488.463.200,00**	**283.356.300,00**	**63,29**	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 17 . 07	*Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 17 . 10	*Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah*	771.819.500,00	488.463.200,00	283.356.300,00	63,29	
	Belanja Operasi	771.819.500,00	488.463.200,00	283.356.300,00	63,29	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.120.000,00	0,00	101.679.902,00	95,92	
2.10 . 2.10.00 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	769.699.500,00	488.463.200,00	281.236.300,00	63,46	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(7.914.072.373,00)**	**(7.082.158.514,00)**	**(831.913.859,00)**	89,49	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	**44.999.999,00**	**31.894.000,00**	**13.105.999,00**	**70,88**	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.999.999,00	31.894.000,00	13.105.999,00	70,88	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	44.999.999,00	31.894.000,00	13.105.999,00	70,88	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**7.373.878.974,00**	**5.968.292.001,00**	**1.405.586.973,00**	**80,94**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	**614.991.600,00**	**544.668.860,00**	**70.322.740,00**	**88,57**	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**454.310.000,00**	**390.979.060,00**	**63.330.940,00**	**86,06**	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**454.310.000,00**	**390.979.060,00**	**63.330.940,00**	**86,06**	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19 . 01	*Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi*	454.310.000,00	390.979.060,00	63.330.940,00	86,06	
	Belanja Operasi	454.310.000,00	390.979.060,00	63.330.940,00	86,06	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	454.310.000,00	390.979.060,00	63.330.940,00	86,06	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 22	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 22 . 01	*Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**160.681.600,00**	**153.689.800,00**	**6.991.800,00**	**95,65**	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**137.640.800,00**	**131.580.000,00**	**6.060.800,00**	**95,60**	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 07 . 02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	137.640.800,00	131.580.000,00	6.060.800,00	95,60	
	Belanja Operasi	1.100.000,00	680.000,00	420.000,00	61,82	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 07 . 02 . 5 . 1 . 1	*Belanja Pegawai*	1.100.000,00	680.000,00	420.000,00	61,82	
	Belanja Modal	136.540.800,00	130.900.000,00	5.640.800,00	95,87	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.540.800,00	130.900.000,00	5.640.800,00	95,87	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	23.040.800,00	22.109.800,00	931.000,00	95,96	
	Belanja Operasi	23.040.800,00	22.109.800,00	931.000,00	95,96	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	23.040.800,00	22.109.800,00	931.000,00	95,96	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
2.11 . 2.11.01 . 00 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	**6.758.887.374,00**	**5.423.623.141,00**	**1.335.264.233,00**	**80,24**	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**3.382.118.000,00**	**2.207.463.050,00**	**1.174.654.950,00**	**65,27**	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 15	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**3.382.118.000,00**	**2.207.463.050,00**	**1.174.654.950,00**	**65,27**	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 15 . 04	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*	1.180.113.000,00	8.470.400,00	1.171.642.600,00	0,72	
	Belanja Operasi	10.000.000,00	8.470.400,00	1.529.600,00	84,70	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.470.400,00	1.529.600,00	84,70	
	Belanja Modal	1.170.113.000,00	0,00	1.170.113.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.170.113.000,00	0,00	1.170.113.000,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 15 . 05	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*	2.202.005.000,00	2.198.992.650,00	3.012.350,00	99,86	
	Belanja Operasi	1.901.200.000,00	1.901.200.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 3	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	300.805.000,00	297.792.650,00	3.012.350,00	99,00	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	300.805.000,00	297.792.650,00	3.012.350,00	99,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**454.310.000,00**	**390.979.060,00**	**63.330.940,00**	**86,06**	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19 . 01	*Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi*	454.310.000,00	390.979.060,00	63.330.940,00	86,06	
	Belanja Operasi	454.310.000,00	390.979.060,00	63.330.940,00	86,06	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	454.310.000,00	390.979.060,00	63.330.940,00	86,06	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 22	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 22 . 01	*Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**3.376.769.374,00**	**3.216.160.091,00**	**160.609.283,00**	**95,24**	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.022.944.174,00**	**2.890.461.443,00**	**132.482.731,00**	**95,62**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.496.104.174,00	2.382.401.443,00	113.702.731,00	95,44	
	Belanja Operasi	2.496.104.174,00	2.382.401.443,00	113.702.731,00	95,44	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.496.104.174,00	2.382.401.443,00	113.702.731,00	95,44	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	526.840.000,00	508.060.000,00	18.780.000,00	96,44	
	Belanja Operasi	526.840.000,00	508.060.000,00	18.780.000,00	96,44	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	105.510.000,00	103.260.000,00	2.250.000,00	97,87	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	421.330.000,00	404.800.000,00	16.530.000,00	96,08	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**263.125.200,00**	**255.638.154,00**	**7.487.046,00**	**97,15**	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	3.112.400,00	2.982.900,00	129.500,00	95,84	
	Belanja Operasi	3.112.400,00	2.982.900,00	129.500,00	95,84	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	3.112.400,00	2.982.900,00	129.500,00	95,84	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
3.07 . 2.11.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 06 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	68.334.800,00	66.534.920,00	1.799.880,00	97,37	
	Belanja Operasi	68.334.800,00	66.534.920,00	1.799.880,00	97,37	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	67.654.800,00	65.854.920,00	1.799.880,00	97,34	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	26.795.000,00	25.883.100,00	911.900,00	96,60	
	Belanja Operasi	26.795.000,00	25.883.100,00	911.900,00	96,60	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	26.795.000,00	25.883.100,00	911.900,00	96,60	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	164.883.000,00	160.237.234,00	4.645.766,00	97,18	
	Belanja Operasi	164.883.000,00	160.237.234,00	4.645.766,00	97,18	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	164.883.000,00	160.237.234,00	4.645.766,00	97,18	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**40.900.000,00**	**34.260.194,00**	**6.639.806,00**	**83,77**	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	40.900.000,00	34.260.194,00	6.639.806,00	83,77	
	Belanja Operasi	35.400.000,00	28.760.194,00	6.639.806,00	81,24	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	28.760.194,00	6.639.806,00	81,24	
	Belanja Modal	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49.800.000,00**	**35.800.300,00**	**13.999.700,00**	**71,89**	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	49.800.000,00	35.800.300,00	13.999.700,00	71,89	
	Belanja Operasi	49.800.000,00	35.800.300,00	13.999.700,00	71,89	
3.07 . 2.11.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	35.800.300,00	13.999.700,00	71,89	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(7.328.878.975,00)**	**(5.936.398.001,00)**	**(1.392.480.974,00)**	**81,00**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 12 Penanaman Modal
Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
2.12 . 2.12.01 . 01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	**196.606.667,00**	**115.351.226,00**	**81.255.441,00**	**58,67**	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**196.606.667,00**	**115.351.226,00**	**81.255.441,00**	**58,67**	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	196.606.667,00	115.351.226,00	81.255.441,00	58,67	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**4.262.481.820,00**	**3.863.667.535,00**	**398.814.285,00**	**90,64**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	**349.308.100,00**	**337.328.650,00**	**11.979.450,00**	**96,57**	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**349.308.100,00**	**337.328.650,00**	**11.979.450,00**	**96,57**	
2.01 . 2.12.01 . 01 . 16	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**349.308.100,00**	**337.328.650,00**	**11.979.450,00**	**96,57**	
2.01 . 2.12.01 . 01 . 16 . 01	*Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi*	280.870.500,00	275.083.500,00	5.787.000,00	97,94	
	Belanja Operasi	280.870.500,00	275.083.500,00	5.787.000,00	97,94	
2.01 . 2.12.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	280.870.500,00	275.083.500,00	5.787.000,00	97,94	
2.01 . 2.12.01 . 01 . 16 . 02	*Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja*	68.437.600,00	62.245.150,00	6.192.450,00	90,95	
	Belanja Operasi	60.624.100,00	54.431.650,00	6.192.450,00	89,79	
2.01 . 2.12.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	420.000,00	0,00	420.000,00		
2.01 . 2.12.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	60.204.100,00	54.431.650,00	5.772.450,00	90,41	
	Belanja Modal	7.813.500,00	7.813.500,00	0,00	100,00	
2.01 . 2.12.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.813.500,00	7.813.500,00	0,00	100,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	**3.913.173.720,00**	**3.526.338.885,00**	**386.834.835,00**	**90,11**	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**66.925.000,00**	**66.610.400,00**	**314.600,00**	**99,53**	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**66.925.000,00**	**66.610.400,00**	**314.600,00**	**99,53**	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 01	*Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*	66.925.000,00	66.610.400,00	314.600,00	99,53	
	Belanja Operasi	66.925.000,00	66.610.400,00	314.600,00	99,53	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	66.925.000,00	66.610.400,00	314.600,00	99,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 03	*Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**370.798.000,00**	**143.087.200,00**	**227.710.800,00**	**38,59**	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**370.798.000,00**	**143.087.200,00**	**227.710.800,00**	**38,59**	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 01	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal*	56.350.000,00	55.691.000,00	659.000,00	98,83	
	Belanja Operasi	56.350.000,00	55.691.000,00	659.000,00	98,83	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	56.350.000,00	55.691.000,00	659.000,00	98,83	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal*	209.797.200,00	30.749.400,00	179.047.800,00	14,66	
	Belanja Operasi	209.797.200,00	30.749.400,00	179.047.800,00	14,66	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	209.797.200,00	30.749.400,00	179.047.800,00	14,66	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 03	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal*	104.650.800,00	56.646.800,00	48.004.000,00	54,13	
	Belanja Operasi	104.650.800,00	56.646.800,00	48.004.000,00	54,13	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	104.650.800,00	56.646.800,00	48.004.000,00	54,13	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**3.475.450.720,00**	**3.316.641.285,00**	**158.809.435,00**	**95,43**	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.978.254.920,00**	**2.858.929.126,00**	**119.325.794,00**	**95,99**	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.341.786.920,00	2.253.634.171,00	88.152.749,00	96,24	
	Belanja Operasi	2.341.786.920,00	2.253.634.171,00	88.152.749,00		
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.341.786.920,00	2.253.634.171,00	88.152.749,00	96,24	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	636.468.000,00	605.294.955,00	31.173.045,00	95,10	
	Belanja Operasi	636.468.000,00	605.294.955,00	31.173.045,00	95,10	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	111.000.000,00	96.770.000,00	14.230.000,00	87,18	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	525.468.000,00	508.524.955,00	16.943.045,00	96,78	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**265.052.300,00**	**260.908.250,00**	**4.144.050,00**	**98,44**	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	9.987.400,00	9.970.750,00	16.650,00	99,83	
	Belanja Operasi	9.987.400,00	9.970.750,00	16.650,00	99,83	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	9.987.400,00	9.970.750,00	16.650,00	99,83	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	93.054.900,00	92.517.200,00	537.700,00	99,42	
	Belanja Operasi	93.054.900,00	92.517.200,00	537.700,00	99,42	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	680.000,00	420.000,00	61,82	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	91.954.900,00	91.837.200,00	117.700,00	99,87	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	17.989.000,00	17.979.000,00	10.000,00	99,94	
	Belanja Operasi	17.989.000,00	17.979.000,00	10.000,00	99,94	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	17.989.000,00	17.979.000,00	10.000,00	99,94	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	5.425.000,00	3.300.000,00	2.125.000,00	60,83	
	Belanja Operasi	5.425.000,00	3.300.000,00	2.125.000,00	60,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	5.425.000,00	3.300.000,00	2.125.000,00	60,83	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	138.596.000,00	137.141.300,00	1.454.700,00	98,95	
	Belanja Operasi	138.596.000,00	137.141.300,00	1.454.700,00	98,95	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	138.596.000,00	137.141.300,00	1.454.700,00	98,95	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**140.093.500,00**	**112.598.973,00**	**27.494.527,00**	**80,37**	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	101.550.000,00	74.060.473,00	27.489.527,00	72,93	
	Belanja Operasi	101.550.000,00	74.060.473,00	27.489.527,00	72,93	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	101.550.000,00	74.060.473,00	27.489.527,00	72,93	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	38.543.500,00	38.538.500,00	5.000,00	99,99	
	Belanja Operasi	38.543.500,00	38.538.500,00	5.000,00	99,99	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	38.543.500,00	38.538.500,00	5.000,00	99,99	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**92.050.000,00**	**84.204.936,00**	**7.845.064,00**	**91,48**	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	57.200.000,00	50.415.118,00	6.784.882,00	88,14	
	Belanja Operasi	57.200.000,00	50.415.118,00	6.784.882,00	88,14	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	57.200.000,00	50.415.118,00	6.784.882,00	88,14	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	14.200.000,00	13.439.818,00	760.182,00	94,65	
	Belanja Operasi	14.200.000,00	13.439.818,00	760.182,00	94,65	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	13.439.818,00	760.182,00	94,65	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	11.500.000,00	11.200.000,00	300.000,00	97,39	
	Belanja Operasi	11.500.000,00	11.200.000,00	300.000,00	97,39	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	11.200.000,00	300.000,00	97,39	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	100,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	100,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(4.065.875.153,00)**	**(3.748.316.309,00)**	**(317.558.844,00)**	**92,19**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 18 Kearsipan
Unit Organisasi : 2 . 18 . 01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**3.568.444.528,00**	**3.489.594.082,00**	**78.850.446,00**	**97,79**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	**3.512.098.528,00**	**3.433.403.082,00**	**78.695.446,00**	**97,76**	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**54.355.000,00**	**54.355.000,00**	**0,00**	**100,00**	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 15	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**54.355.000,00**	**54.355.000,00**	**0,00**	**100,00**	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 15 . 02	*Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	54.355.000,00	54.355.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	54.355.000,00	54.355.000,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	54.355.000,00	54.355.000,00	0,00	100,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**3.457.743.528,00**	**3.379.048.082,00**	**78.695.446,00**	**97,72**	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	3.112.905.078,00	3.056.561.487,00	56.343.591,00	98,19	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.514.961.078,00	2.463.399.398,00	51.561.680,00	97,95	
	Belanja Operasi	2.514.961.078,00	2.463.399.398,00	51.561.680,00	97,95	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.514.961.078,00	2.463.399.398,00	51.561.680,00	97,95	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	597.944.000,00	593.162.089,00	4.781.911,00	99,20	
	Belanja Operasi	597.944.000,00	593.162.089,00	4.781.911,00	99,20	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	84.600.000,00	83.250.000,00	1.350.000,00	98,40	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	513.344.000,00	509.912.089,00	3.431.911,00	99,33	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**231.486.970,00**	**230.911.500,00**	**575.470,00**	**99,75**	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	7.378.550,00	7.378.550,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	7.378.550,00	7.378.550,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	7.378.550,00	7.378.550,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	47.523.720,00	47.028.600,00	495.120,00	98,96	
	Belanja Operasi	47.523.720,00	47.028.600,00	495.120,00	98,96	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	47.523.720,00	47.028.600,00	495.120,00	98,96	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	16.055.700,00	16.055.700,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	16.055.700,00	16.055.700,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	16.055.700,00	16.055.700,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	160.529.000,00	160.448.650,00	80.350,00	99,95	
	Belanja Operasi	160.529.000,00	160.448.650,00	80.350,00	99,95	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	160.529.000,00	160.448.650,00	80.350,00	99,95	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**17.696.500,00**	**8.374.695,00**	**9.321.805,00**	**47,32**	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	10.800.000,00	1.478.395,00	9.321.605,00	13,69	
	Belanja Operasi	10.800.000,00	1.478.395,00	9.321.605,00	13,69	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
2.17 . 2.18.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	1.478.395,00	9.321.605,00	13,69	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	6.896.500,00	6.896.300,00	200,00	100,00	
	Belanja Operasi	6.896.500,00	6.896.300,00	200,00	100,00	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	6.896.500,00	6.896.300,00	200,00	100,00	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95.654.980,00**	**83.200.400,00**	**12.454.580,00**	**86,98**	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	43.505.000,00	36.260.250,00	7.244.750,00	83,35	
	Belanja Operasi	43.505.000,00	36.260.250,00	7.244.750,00	83,35	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	43.505.000,00	36.260.250,00	7.244.750,00	83,35	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	28.000.000,00	22.791.150,00	5.208.850,00	81,40	
	Belanja Operasi	28.000.000,00	22.791.150,00	5.208.850,00	81,40	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	22.791.150,00	5.208.850,00	81,40	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	100,00	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	19.999.980,00	19.999.000,00	980,00	100,00	
	Belanja Operasi	19.999.980,00	19.999.000,00	980,00	100,00	
2.17 . 2.18.01 . 00 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	19.999.980,00	19.999.000,00	980,00	100,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	**56.346.000,00**	**56.191.000,00**	**155.000,00**	**99,72**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**56.346.000,00**	**56.191.000,00**	**155.000,00**	**99,72**	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 15	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**56.346.000,00**	**56.191.000,00**	**155.000,00**	**99,72**	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 15 . 01	*Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis*	56.346.000,00	56.191.000,00	155.000,00	99,72	
	Belanja Operasi	56.346.000,00	56.191.000,00	155.000,00	99,72	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	56.346.000,00	56.191.000,00	155.000,00	99,72	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(3.568.444.528,00)**	**(3.489.594.082,00)**	**(78.850.446,00)**	**97,79**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 01 Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 Dinas Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 . 01 Dinas Perikanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
3.01 . 3.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	**220.000.000,00**	**186.432.000,00**	**33.568.000,00**	**84,74**	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**220.000.000,00**	**186.432.000,00**	**33.568.000,00**	**84,74**	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	220.000.000,00	186.432.000,00	33.568.000,00	84,74	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**21.201.934.999,00**	**20.310.187.204,00**	**891.747.795,00**	**95,79**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	**21.201.934.999,00**	**20.310.187.204,00**	**891.747.795,00**	**95,79**	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**13.123.490.221,00**	**12.507.252.934,00**	**616.237.287,00**	**95,30**	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 16	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**12.753.458.093,00**	**12.176.377.600,00**	**577.080.493,00**	**95,48**	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 16 . 01	*Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil*	12.753.458.093,00	12.176.377.600,00	577.080.493,00	95,48	
	Belanja Operasi	12.529.921.278,00	11.960.997.600,00	568.923.678,00	95,46	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.840.000,00	6.400.000,00	440.000,00	93,57	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	12.523.081.278,00	11.954.597.600,00	568.483.678,00	95,46	
	Belanja Modal	223.536.815,00	215.380.000,00	8.156.815,00	96,35	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223.536.815,00	215.380.000,00	8.156.815,00	96,35	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**370.032.128,00**	**330.875.334,00**	**39.156.794,00**	**89,42**	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 02	*Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*	370.032.128,00	330.875.334,00	39.156.794,00	89,42	
	Belanja Operasi	370.032.128,00	330.875.334,00	39.156.794,00	89,42	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.110.000,00	2.550.000,00	1.560.000,00	62,04	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	365.922.128,00	328.325.334,00	37.596.794,00	89,73	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**1.120.735.913,00**	**1.077.623.177,00**	**43.112.736,00**	**96,15**	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 24	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**1.120.735.913,00**	**1.077.623.177,00**	**43.112.736,00**	**96,15**	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 24 . 02	*Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	324.565.980,00	315.780.300,00	8.785.680,00	97,29	
	Belanja Operasi	286.427.642,00	280.802.500,00	5.625.142,00	98,04	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.840.000,00	1.360.000,00	480.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	284.587.642,00	279.442.500,00	5.145.142,00	98,19	
	Belanja Modal	38.138.338,00	34.977.800,00	3.160.538,00	91,71	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.138.338,00	34.977.800,00	3.160.538,00	91,71	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 24 . 03	*Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	682.402.933,00	653.945.877,00	28.457.056,00	95,83	
	Belanja Operasi	631.895.413,00	603.445.877,00	28.449.536,00	95,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
3.01 . 3.01.01 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	631.895.413,00	603.445.877,00	28.449.536,00	95,50	
	Belanja Modal	50.507.520,00	50.500.000,00	7.520,00	99,99	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.507.520,00	50.500.000,00	7.520,00	99,99	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 24 . 05	*Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat*	113.767.000,00	107.897.000,00	5.870.000,00	94,84	
	Belanja Operasi	113.767.000,00	107.897.000,00	5.870.000,00	94,84	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	113.767.000,00	107.897.000,00	5.870.000,00	94,84	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**233.950.500,00**	**218.412.100,00**	**15.538.400,00**	**93,36**	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 27	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**233.950.500,00**	**218.412.100,00**	**15.538.400,00**	**93,36**	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 27 . 01	*Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*	233.950.500,00	218.412.100,00	15.538.400,00	93,36	
	Belanja Operasi	233.950.500,00	218.412.100,00	15.538.400,00	93,36	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 27 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.040.000,00	560.000,00	480.000,00	53,85	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	232.910.500,00	217.852.100,00	15.058.400,00	93,53	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**6.723.758.365,00**	**6.506.898.993,00**	**216.859.372,00**	**96,77**	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**213.550.000,00**	**210.546.000,00**	**3.004.000,00**	**98,59**	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	213.550.000,00	210.546.000,00	3.004.000,00	98,59	
	Belanja Operasi	213.550.000,00	210.546.000,00	3.004.000,00	98,59	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	213.550.000,00	210.546.000,00	3.004.000,00	98,59	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.289.544.115,00**	**5.103.463.385,00**	**186.080.730,00**	**96,48**	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.782.928.115,00	3.718.859.559,00	64.068.556,00	98,31	
	Belanja Operasi	3.782.928.115,00	3.718.859.559,00	64.068.556,00	98,31	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.782.928.115,00	3.718.859.559,00	64.068.556,00	98,31	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1.506.616.000,00	1.384.603.826,00	122.012.174,00	91,90	
	Belanja Operasi	1.506.616.000,00	1.384.603.826,00	122.012.174,00	91,90	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	149.820.000,00	140.560.000,00	9.260.000,00	93,82	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.356.796.000,00	1.244.043.826,00	112.752.174,00	91,69	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**474.104.250,00**	**469.235.738,00**	**4.868.512,00**	**98,97**	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	10.477.500,00	10.213.500,00	264.000,00	97,48	
	Belanja Operasi	10.477.500,00	10.213.500,00	264.000,00	97,48	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	10.477.500,00	10.213.500,00	264.000,00	97,48	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	150.230.750,00	149.462.850,00	767.900,00	99,49	
	Belanja Operasi	150.230.750,00	149.462.850,00	767.900,00	99,49	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	150.230.750,00	149.462.850,00	767.900,00	99,49	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	45.400.000,00	45.360.000,00	40.000,00	99,91	
	Belanja Operasi	45.400.000,00	45.360.000,00	40.000,00	99,91	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	45.400.000,00	45.360.000,00	40.000,00	99,91	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	30.000.000,00	27.900.000,00	2.100.000,00	93,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	Belanja Operasi	30.000.000,00	27.900.000,00	2.100.000,00	93,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	27.900.000,00	2.100.000,00	93,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	232.896.000,00	231.199.388,00	1.696.612,00	99,27	
	Belanja Operasi	232.896.000,00	231.199.388,00	1.696.612,00	99,27	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	232.896.000,00	231.199.388,00	1.696.612,00	99,27	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**350.500.000,00**	**342.318.716,00**	**8.181.284,00**	**97,67**	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	350.500.000,00	342.318.716,00	8.181.284,00	97,67	
	Belanja Operasi	350.500.000,00	342.318.716,00	8.181.284,00	97,67	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	350.500.000,00	342.318.716,00	8.181.284,00	97,67	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	396.060.000,00	381.335.154,00	14.724.846,00	96,28	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	151.652.000,00	141.210.000,00	10.442.000,00	93,11	
	Belanja Operasi	151.652.000,00	141.210.000,00	10.442.000,00	93,11	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	151.652.000,00	141.210.000,00	10.442.000,00	93,11	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	200.008.000,00	199.516.954,00	491.046,00	99,75	
	Belanja Operasi	200.008.000,00	199.516.954,00	491.046,00	99,75	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	200.008.000,00	199.516.954,00	491.046,00	99,75	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 09 . 10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	44.400.000,00	40.608.200,00	3.791.800,00	91,46	
	Belanja Operasi	44.400.000,00	40.608.200,00	3.791.800,00	91,46	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	40.608.200,00	3.791.800,00	91,46	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(20.981.934.999,00)**	**(20.123.755.204,00)**	**(858.179.795,00)**	**95,91**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 3 . 02 Pariwisata
Unit Organisasi : 3 . 02 . 02 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 02 . 01 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
3.02 . 3.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.807.007.031,00**	**858.700.000,00**	**2.948.307.031,00**	**22,56**	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**3.807.007.031,00**	**858.700.000,00**	**2.948.307.031,00**	**22,56**	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	3.807.007.031,00	858.700.000,00	2.948.307.031,00	22,56	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**7.967.617.889,00**	**7.775.133.615,00**	**192.484.274,00**	**97,58**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	**192.231.900,00**	**192.230.500,00**	**1.400,00**	**100,00**	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**164.065.000,00**	**164.064.500,00**	**500,00**	**100,00**	
2.13 . 3.02.02 . 01 . 15	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**89.065.000,00**	**89.064.500,00**	**500,00**	**100,00**	
2.13 . 3.02.02 . 01 . 15 . 01	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor*	89.065.000,00	89.064.500,00	500,00	100,00	
	Belanja Operasi	89.065.000,00	89.064.500,00	500,00	100,00	
2.13 . 3.02.02 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	89.065.000,00	89.064.500,00	500,00	100,00	
2.13 . 3.02.02 . 01 . 16	**Pemberdayaan dan PengEmbangan Organisasi Pemuda Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	
2.13 . 3.02.02 . 01 . 16 . 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	28.166.900,00	28.166.000,00	900,00	100,00	
2.13 . 3.02.02 . 01 . 17	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**28.166.900,00**	**28.166.000,00**	**900,00**	**100,00**	
2.13 . 3.02.02 . 01 . 17 . 02	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar*	28.166.900,00	28.166.000,00	900,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	Belanja Operasi	28.166.900,00	28.166.000,00	900,00	100,00	
2.13 . 3.02.02 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	28.166.900,00	28.166.000,00	900,00	100,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	**7.775.385.989,00**	**7.582.903.115,00**	**192.482.874,00**	**97,52**	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**381.987.500,00**	**364.203.550,00**	**17.783.950,00**	**95,34**	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 15	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**381.987.500,00**	**364.203.550,00**	**17.783.950,00**	**95,34**	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 15 . 04	*Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota*	381.987.500,00	364.203.550,00	17.783.950,00	95,34	
	Belanja Operasi	381.987.500,00	364.203.550,00	17.783.950,00	95,34	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 15 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	381.507.500,00	364.203.550,00	17.303.950,00	95,46	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**694.919.500,00**	**673.215.412,00**	**21.704.088,00**	**96,88**	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 19	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**694.919.500,00**	**673.215.412,00**	**21.704.088,00**	**96,88**	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 19 . 02	*Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota*	694.919.500,00	673.215.412,00	21.704.088,00	96,88	
	Belanja Operasi	694.919.500,00	673.215.412,00	21.704.088,00	96,88	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	694.919.500,00	673.215.412,00	21.704.088,00	96,88	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**6.698.478.989,00**	**6.545.484.153,00**	**152.994.836,00**	**97,72**	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.645.662.389,00**	**5.550.335.603,00**	**95.326.786,00**	**98,31**	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.040.602.389,00	3.948.133.603,00	92.468.786,00	97,71	
	Belanja Operasi	4.040.602.389,00	3.948.133.603,00	92.468.786,00	97,71	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.040.602.389,00	3.948.133.603,00	92.468.786,00	97,71	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1.605.060.000,00	1.602.202.000,00	2.858.000,00	99,82	
	Belanja Operasi	1.605.060.000,00	1.602.202.000,00	2.858.000,00	99,82	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	138.660.000,00	137.362.000,00	1.298.000,00	99,06	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.466.400.000,00	1.464.840.000,00	1.560.000,00	99,89	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**349.519.000,00**	**329.863.200,00**	**19.655.800,00**	**94,38**	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 04 . 02	*Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah*	349.519.000,00	329.863.200,00	19.655.800,00	94,38	
	Belanja Operasi	349.519.000,00	329.863.200,00	19.655.800,00	94,38	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	349.519.000,00	329.863.200,00	19.655.800,00	94,38	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**358.539.600,00**	**351.662.500,00**	**6.877.100,00**	**98,08**	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	6.072.000,00	6.072.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	6.072.000,00	6.072.000,00	0,00	100,00	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	6.072.000,00	6.072.000,00	0,00	100,00	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	102.693.500,00	101.699.000,00	994.500,00	99,03	
	Belanja Operasi	102.693.500,00	101.699.000,00	994.500,00	99,03	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	102.693.500,00	101.699.000,00	994.500,00	99,03	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	21.454.100,00	17.984.100,00	3.470.000,00	83,83	
	Belanja Operasi	21.454.100,00	17.984.100,00	3.470.000,00	83,83	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	21.454.100,00	17.984.100,00	3.470.000,00	83,83	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	16.800.000,00	15.600.000,00	1.200.000,00	92,86	
	Belanja Operasi	16.800.000,00	15.600.000,00	1.200.000,00	92,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	15.600.000,00	1.200.000,00	92,86	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	211.520.000,00	210.307.400,00	1.212.600,00	99,43	
	Belanja Operasi	211.520.000,00	210.307.400,00	1.212.600,00	99,43	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	211.520.000,00	210.307.400,00	1.212.600,00	99,43	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**103.800.000,00**	**82.462.650,00**	**21.337.350,00**	**79,44**	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	103.800.000,00	82.462.650,00	21.337.350,00	79,44	
	Belanja Operasi	103.800.000,00	82.462.650,00	21.337.350,00	79,44	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	103.800.000,00	82.462.650,00	21.337.350,00	79,44	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**240.958.000,00**	**231.160.200,00**	**9.797.800,00**	**95,93**	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	66.998.000,00	63.464.200,00	3.533.800,00	94,73	
	Belanja Operasi	66.998.000,00	63.464.200,00	3.533.800,00	94,73	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	66.998.000,00	63.464.200,00	3.533.800,00	94,73	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	173.960.000,00	167.696.000,00	6.264.000,00	96,40	
	Belanja Operasi	173.960.000,00	167.696.000,00	6.264.000,00	96,40	
3.02 . 3.02.02 . 01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	173.960.000,00	167.696.000,00	6.264.000,00	96,40	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(4.160.610.858,00)**	**(6.916.433.615,00)**	**2.755.822.757,00**	166,24	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.01 . 4.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**43.306.457.367,00**	**40.939.226.269,00**	**2.367.231.098,00**	**94,53**	
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	**43.306.457.367,00**	**40.939.226.269,00**	**2.367.231.098,00**	**94,53**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**31.200.928.044,00**	**30.585.237.208,00**	**615.690.836,00**	**98,03**	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.376.740.952,00**	**15.947.410.500,00**	**429.330.452,00**	**97,38**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.173.816.784,00	10.935.489.667,00	238.327.117,00	97,87	
	Belanja Operasi	11.173.816.784,00	10.935.489.667,00	238.327.117,00	97,87	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	11.173.816.784,00	10.935.489.667,00	238.327.117,00	97,87	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	5.202.924.168,00	5.011.920.833,00	191.003.335,00	96,33	
	Belanja Operasi	5.202.924.168,00	5.011.920.833,00	191.003.335,00	96,33	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	390.120.000,00	385.220.000,00	4.900.000,00	98,74	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	4.812.804.168,00	4.626.700.833,00	186.103.335,00	96,13	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.130.991.700,00**	**2.119.659.578,00**	**11.332.122,00**	**99,47**	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	963.564.100,00	958.890.830,00	4.673.270,00	99,52	
	Belanja Operasi	963.564.100,00	958.890.830,00	4.673.270,00	99,52	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	2.160.000,00	40.000,00	98,18	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	961.364.100,00	956.730.830,00	4.633.270,00	99,52	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	148.160.000,00	148.020.100,00	139.900,00	99,91	
	Belanja Operasi	148.160.000,00	148.020.100,00	139.900,00	99,91	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	148.160.000,00	148.020.100,00	139.900,00	99,91	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	211.053.600,00	205.569.456,00	5.484.144,00	97,40	
	Belanja Operasi	211.053.600,00	205.569.456,00	5.484.144,00	97,40	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	211.053.600,00	205.569.456,00	5.484.144,00	97,40	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	808.214.000,00	807.179.192,00	1.034.808,00	99,87	
	Belanja Operasi	808.214.000,00	807.179.192,00	1.034.808,00	99,87	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	808.214.000,00	807.179.192,00	1.034.808,00	99,87	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**205.601.081,00**	**199.805.645,00**	**5.795.436,00**	**97,18**	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 07 . 01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas*	32.899.000,00	28.959.645,00	3.939.355,00	88,03	
	Belanja Operasi	32.899.000,00	28.959.645,00	3.939.355,00	88,03	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 07. 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	
	Belanja Modal	32.219.000,00	28.959.645,00	3.259.355,00	89,88	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.219.000,00	28.959.645,00	3.259.355,00	89,88	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 07 . 10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan*	172.702.081,00	170.846.000,00	1.856.081,00	98,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	Belanja Operasi	52.365.000,00	50.855.500,00	1.509.500,00	97,12	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 07 . 10 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	52.365.000,00	50.855.500,00	1.509.500,00	97,12	
	Belanja Modal	120.337.081,00	119.990.500,00	346.581,00	99,71	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.337.081,00	119.990.500,00	346.581,00	99,71	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	546.960.000,00	496.586.619,00	50.373.381,00	90,79	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	546.960.000,00	496.586.619,00	50.373.381,00	90,79	
	Belanja Operasi	495.960.000,00	446.140.502,00	49.819.498,00	89,95	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	495.960.000,00	446.140.502,00	49.819.498,00	89,95	
	Belanja Modal	51.000.000,00	50.446.117,00	553.883,00	98,91	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.000.000,00	50.446.117,00	553.883,00	98,91	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**	**8.047.601.950,00**	**8.029.191.963,00**	**18.409.987,00**	**99,77**	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak*	325.448.400,00	316.760.999,00	8.687.401,00	97,33	
	Belanja Operasi	325.448.400,00	316.760.999,00	8.687.401,00	97,33	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	325.448.400,00	316.760.999,00	8.687.401,00	97,33	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan*	6.401.816.300,00	6.397.989.932,00	3.826.368,00	99,94	
	Belanja Operasi	6.401.816.300,00	6.397.989.932,00	3.826.368,00	99,94	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 09 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.610.000,00	6.520.000,00	90.000,00	98,64	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	6.395.206.300,00	6.391.469.932,00	3.736.368,00	99,94	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	1.084.147.250,00	1.081.938.432,00	2.208.818,00	99,80	
	Belanja Operasi	1.084.147.250,00	1.081.938.432,00	2.208.818,00	99,80	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 09 . 09 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.980.000,00	5.100.000,00	880.000,00	85,28	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.078.167.250,00	1.076.838.432,00	1.328.818,00	99,88	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 09 . 10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau*	236.190.000,00	232.502.600,00	3.687.400,00	98,44	
	Belanja Operasi	236.190.000,00	232.502.600,00	3.687.400,00	98,44	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	236.190.000,00	232.502.600,00	3.687.400,00	98,44	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 15	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil**	**1.893.627.481,00**	**1.883.969.398,00**	**9.658.083,00**	**99,49**	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 15 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala*	464.019.481,00	456.318.202,00	7.701.279,00	98,34	
	Belanja Operasi	464.019.481,00	456.318.202,00	7.701.279,00	98,34	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	464.019.481,00	456.318.202,00	7.701.279,00	98,34	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 15 . 02	*Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah*	70.676.000,00	70.450.000,00	226.000,00	99,68	
	Belanja Operasi	70.676.000,00	70.450.000,00	226.000,00	99,68	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	70.676.000,00	70.450.000,00	226.000,00	99,68	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 15 . 04	*Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil*	1.358.932.000,00	1.357.201.196,00	1.730.804,00	99,87	
	Belanja Operasi	1.358.932.000,00	1.357.201.196,00	1.730.804,00	99,87	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.358.932.000,00	1.357.201.196,00	1.730.804,00	99,87	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 16	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**728.614.400,00**	**728.516.750,00**	**97.650,00**	**99,99**	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 16 . 01	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah*	408.958.500,00	408.903.700,00	54.800,00	99,99	
	Belanja Operasi	408.958.500,00	408.903.700,00	54.800,00	99,99	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	408.958.500,00	408.903.700,00	54.800,00	99,99	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 16 . 02	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah*	319.655.900,00	319.613.050,00	42.850,00	99,99	
	Belanja Operasi	319.655.900,00	319.613.050,00	42.850,00	99,99	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	319.655.900,00	319.613.050,00	42.850,00	99,99	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17	**Penataan Organisasi**	**466.411.380,00**	**447.412.683,00**	**18.998.697,00**	**95,93**	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 01	*Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*	329.416.184,00	312.542.063,00	16.874.121,00	94,88	
	Belanja Operasi	277.136.500,00	261.743.583,00	15.392.917,00	94,45	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	276.456.500,00	261.063.583,00	15.392.917,00	94,43	
	Belanja Modal	52.279.684,00	50.798.480,00	1.481.204,00	97,17	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.279.684,00	50.798.480,00	1.481.204,00	97,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 03	*Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	60.968.848,00	59.580.960,00	1.387.888,00	97,72	
	Belanja Operasi	51.242.500,00	49.880.900,00	1.361.600,00	97,34	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	51.242.500,00	49.880.900,00	1.361.600,00	97,34	
	Belanja Modal	9.726.348,00	9.700.060,00	26.288,00	99,73	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.726.348,00	9.700.060,00	26.288,00	99,73	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 04	*Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan*	76.026.348,00	75.289.660,00	736.688,00	99,03	
	Belanja Operasi	66.300.000,00	65.589.600,00	710.400,00	98,93	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	66.300.000,00	65.589.600,00	710.400,00	98,93	
	Belanja Modal	9.726.348,00	9.700.060,00	26.288,00	99,73	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.726.348,00	9.700.060,00	26.288,00	99,73	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**804.379.100,00**	**732.684.072,00**	**71.695.028,00**	**91,09**	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18 . 01	*Fasilitasi Keprotokolan*	98.980.500,00	61.916.500,00	37.064.000,00	62,55	
	Belanja Operasi	98.980.500,00	61.916.500,00	37.064.000,00	62,55	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	98.980.500,00	61.916.500,00	37.064.000,00	62,55	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18 . 02	*Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*	150.166.100,00	134.167.298,00	15.998.802,00	89,35	
	Belanja Operasi	150.166.100,00	134.167.298,00	15.998.802,00	89,35	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	150.166.100,00	134.167.298,00	15.998.802,00	89,35	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18 . 03	*Pendokumentasian Tugas Pimpinan*	555.232.500,00	536.600.274,00	18.632.226,00	96,64	
	Belanja Operasi	555.232.500,00	536.600.274,00	18.632.226,00	96,64	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	555.232.500,00	536.600.274,00	18.632.226,00	96,64	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**9.684.338.880,00**	**8.646.972.653,00**	**1.037.366.227,00**	**89,29**	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 19	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**980.306.400,00**	**928.400.853,00**	**51.905.547,00**	**94,71**	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 19 . 01	*Penataan Administrasi Pemerintahan*	163.851.000,00	147.465.000,00	16.386.000,00	90,00	
	Belanja Operasi	163.851.000,00	147.465.000,00	16.386.000,00	90,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	163.851.000,00	147.465.000,00	16.386.000,00	90,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 19 . 02	*Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*	555.328.000,00	549.942.520,00	5.385.480,00	99,03	
	Belanja Operasi	523.109.000,00	517.942.520,00	5.166.480,00	99,01	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	523.109.000,00	517.942.520,00	5.166.480,00	99,01	
	Belanja Modal	32.219.000,00	32.000.000,00	219.000,00	99,32	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.219.000,00	32.000.000,00	219.000,00	99,32	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 19 . 03	*Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	261.127.400,00	230.993.333,00	30.134.067,00	88,46	
	Belanja Operasi	261.127.400,00	230.993.333,00	30.134.067,00	88,46	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	261.127.400,00	230.993.333,00	30.134.067,00	88,46	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**7.267.859.480,00**	**6.342.401.300,00**	**925.458.180,00**	**87,27**	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20 . 01	*Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	1.242.117.180,00	1.145.006.700,00	97.110.480,00	92,18	
	Belanja Operasi	1.200.328.500,00	1.104.416.700,00	95.911.800,00	92,01	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	879.848.500,00	784.416.700,00	95.431.800,00	89,15	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal	41.788.680,00	40.590.000,00	1.198.680,00	97,13	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.788.680,00	40.590.000,00	1.198.680,00	97,13	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20 . 02	*Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait*	249.481.500,00	118.064.700,00	131.416.800,00	47,32	
	Belanja Operasi	249.481.500,00	118.064.700,00	131.416.800,00	47,32	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	249.481.500,00	118.064.700,00	131.416.800,00	47,32	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20 . 03	*Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait*	5.776.260.800,00	5.079.329.900,00	696.930.900,00	87,93	
	Belanja Operasi	5.776.260.800,00	5.079.329.900,00	696.930.900,00	87,93	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	5.776.260.800,00	5.079.329.900,00	696.930.900,00	87,93	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**942.333.900,00**	**916.782.700,00**	**25.551.200,00**	**97,29**	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 . 01	*Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah*	252.472.500,00	251.148.300,00	1.324.200,00	99,48	
	Belanja Operasi	252.472.500,00	251.148.300,00	1.324.200,00	99,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	252.472.500,00	251.148.300,00	1.324.200,00	99,48	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 . 02	*Fasilitasi Bantuan Hukum*	513.098.900,00	494.911.300,00	18.187.600,00	96,46	
	Belanja Operasi	478.524.100,00	460.792.300,00	17.731.800,00	96,29	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	478.524.100,00	460.792.300,00	17.731.800,00	96,29	
	Belanja Modal	34.574.800,00	34.119.000,00	455.800,00	98,68	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.574.800,00	34.119.000,00	455.800,00	98,68	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 . 03	*Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum*	176.762.500,00	170.723.100,00	6.039.400,00	96,58	
	Belanja Operasi	176.762.500,00	170.723.100,00	6.039.400,00	96,58	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	176.762.500,00	170.723.100,00	6.039.400,00	96,58	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 22	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	493.839.100,00	459.387.800,00	34.451.300,00	93,02	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 22 . 01	*Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*	493.839.100,00	459.387.800,00	34.451.300,00	93,02	
	Belanja Operasi	451.680.000,00	419.387.800,00	32.292.200,00	92,85	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	451.680.000,00	419.387.800,00	32.292.200,00	92,85	
	Belanja Modal	42.159.100,00	40.000.000,00	2.159.100,00	94,88	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.159.100,00	40.000.000,00	2.159.100,00	94,88	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**2.421.190.443,00**	**1.707.016.408,00**	**714.174.035,00**	**70,50**	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 23	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**268.756.122,00**	**234.333.900,00**	**34.422.222,00**	**87,19**	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 23 . 01	*Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan*	209.277.722,00	187.448.600,00	21.829.122,00	89,57	
	Belanja Operasi	198.651.220,00	187.448.600,00	11.202.620,00	94,36	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	198.651.220,00	187.448.600,00	11.202.620,00	94,36	
	Belanja Modal	10.626.502,00	0,00	10.626.502,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.626.502,00	0,00	10.626.502,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 23 . 02	*Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*	59.478.400,00	46.885.300,00	12.593.100,00	78,83	
	Belanja Operasi	59.478.400,00	46.885.300,00	12.593.100,00	78,83	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	59.478.400,00	46.885.300,00	12.593.100,00	78,83	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 24	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**690.451.896,00**	**466.196.000,00**	**224.255.896,00**	**67,52**	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 24 . 01	*Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan*	80.807.500,00	74.846.100,00	5.961.400,00	92,62	
	Belanja Operasi	80.807.500,00	74.846.100,00	5.961.400,00	92,62	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	80.807.500,00	74.846.100,00	5.961.400,00	92,62	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 24 . 02	*Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*	469.112.400,00	278.429.900,00	190.682.500,00	59,35	
	Belanja Operasi	469.112.400,00	278.429.900,00	190.682.500,00	59,35	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	469.112.400,00	278.429.900,00	190.682.500,00	59,35	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 24 . 03	*Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*	140.531.996,00	112.920.000,00	27.611.996,00	80,35	
	Belanja Operasi	121.500.100,00	93.920.000,00	27.580.100,00	77,30	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	121.500.100,00	93.920.000,00	27.580.100,00	77,30	
	Belanja Modal	19.031.896,00	19.000.000,00	31.896,00	99,83	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.031.896,00	19.000.000,00	31.896,00	99,83	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 25	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**1.397.559.425,00**	**943.884.708,00**	**453.674.717,00**	**67,54**	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 25 . 01	*Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	579.149.400,00	444.885.908,00	134.263.492,00	76,82	
	Belanja Operasi	579.149.400,00	444.885.908,00	134.263.492,00	76,82	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	579.149.400,00	444.885.908,00	134.263.492,00	76,82	
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 25 . 02	*Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik*	601.755.425,00	308.852.200,00	292.903.225,00	51,33	
	Belanja Operasi	601.755.425,00	308.852.200,00	292.903.225,00	51,33	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	601.755.425,00	308.852.200,00	292.903.225,00	51,33	
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 25 . 03	*Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*	216.654.600,00	190.146.600,00	26.508.000,00	87,76	
	Belanja Operasi	216.654.600,00	190.146.600,00	26.508.000,00	87,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.01 . 4.01.01 . 01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	216.654.600,00	190.146.600,00	26.508.000,00	87,76	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 26	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**64.423.000,00**	**62.601.800,00**	**1.821.200,00**	**97,17**	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 26 . 03	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air*	64.423.000,00	62.601.800,00	1.821.200,00	97,17	
	Belanja Operasi	64.423.000,00	62.601.800,00	1.821.200,00	97,17	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	64.423.000,00	62.601.800,00	1.821.200,00	97,17	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(43.306.457.367,00)**	**(40.939.226.269,00)**	**(2.367.231.098,00)**	**94,53**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan	: 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan	: 4 . 02	Pengawasan
Unit Organisasi	: 4 . 02 . 01	Inspektorat
Sub Unit Organisasi	: 4 . 02 . 01 . 01	Inspektorat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.02 . 4.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**9.371.557.934,00**	**8.576.662.978,00**	**794.894.956,00**	**91,52**	
	INSPEKTORAT DAERAH	**9.371.557.934,00**	**8.576.662.978,00**	**794.894.956,00**	**91,52**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**5.040.651.156,00**	**4.813.313.517,00**	**227.337.639,00**	**95,49**	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.259.008.978,00**	**4.099.406.098,00**	**159.602.880,00**	**96,25**	
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	3.800.692.978,00	3.677.778.098,00	122.914.880,00	96,77	
	Belanja Operasi	3.800.692.978,00	3.677.778.098,00	122.914.880,00	96,77	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.800.692.978,00	3.677.778.098,00	122.914.880,00	96,77	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	458.316.000,00	421.628.000,00	36.688.000,00	92,00	
	Belanja Operasi	458.316.000,00	421.628.000,00	36.688.000,00	92,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	123.400.000,00	103.800.000,00	19.600.000,00	84,12	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	334.916.000,00	317.828.000,00	17.088.000,00	94,90	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**83.129.000,00**	**55.814.500,00**	**27.314.500,00**	**67,14**	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	7.700.000,00	7.400.000,00	300.000,00	96,10	
	Belanja Operasi	7.700.000,00	7.400.000,00	300.000,00	96,10	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.400.000,00	300.000,00	96,10	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	75.429.000,00	48.414.500,00	27.014.500,00	64,19	
	Belanja Operasi	75.429.000,00	48.414.500,00	27.014.500,00	64,19	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	75.429.000,00	48.414.500,00	27.014.500,00	64,19	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**336.982.580,00**	**314.645.969,00**	**22.336.611,00**	**93,37**	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	7.000.000,00	6.863.200,00	136.800,00	98,05	
	Belanja Operasi	7.000.000,00	6.863.200,00	136.800,00	98,05	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.863.200,00	136.800,00	98,05	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	125.758.180,00	122.197.410,00	3.560.770,00	97,17	
	Belanja Operasi	125.758.180,00	122.197.410,00	3.560.770,00	97,17	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	124.658.180,00	121.097.410,00	3.560.770,00	97,14	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	20.020.000,00	20.015.500,00	4.500,00	99,98	
	Belanja Operasi	20.020.000,00	20.015.500,00	4.500,00	99,98	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	20.020.000,00	20.015.500,00	4.500,00	99,98	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	10.216.000,00	10.016.000,00	200.000,00	98,04	
	Belanja Operasi	10.216.000,00	10.016.000,00	200.000,00	98,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	10.216.000,00	10.016.000,00	200.000,00	98,04	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	173.988.400,00	155.553.859,00	18.434.541,00	89,40	
	Belanja Operasi	173.988.400,00	155.553.859,00	18.434.541,00	89,40	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	173.988.400,00	155.553.859,00	18.434.541,00	89,40	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**118.978.718,00**	**112.399.500,00**	**6.579.218,00**	**94,47**	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	82.204.718,00	76.264.500,00	5.940.218,00	92,77	
	Belanja Operasi	6.970.000,00	5.640.000,00	1.330.000,00	80,92	
	Belanja Pegawai	450.000,00	0,00	450.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	6.520.000,00	5.640.000,00	880.000,00	86,50	
	Belanja Modal	75.234.718,00	70.624.500,00	4.610.218,00	93,87	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.234.718,00	70.624.500,00	4.610.218,00	93,87	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	36.774.000,00	36.135.000,00	639.000,00	98,26	
	Belanja Operasi	15.774.000,00	15.135.000,00	639.000,00	95,95	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	15.774.000,00	15.135.000,00	639.000,00	95,95	
	Belanja Modal	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95.960.000,00**	**89.720.150,00**	**6.239.850,00**	**93,50**	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	95.960.000,00	89.720.150,00	6.239.850,00	93,50	
	Belanja Operasi	95.960.000,00	89.720.150,00	6.239.850,00	93,50	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	95.960.000,00	89.720.150,00	6.239.850,00	93,50	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**146.591.880,00**	**141.327.300,00**	**5.264.580,00**	**96,41**	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	76.383.000,00	72.805.250,00	3.577.750,00	95,32	
	Belanja Operasi	76.383.000,00	72.805.250,00	3.577.750,00	95,32	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	76.383.000,00	72.805.250,00	3.577.750,00	95,32	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	19.610.000,00	18.030.000,00	1.580.000,00	91,94	
	Belanja Operasi	19.610.000,00	18.030.000,00	1.580.000,00	91,94	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	19.610.000,00	18.030.000,00	1.580.000,00	91,94	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	50.598.880,00	50.492.050,00	106.830,00	99,79	
	Belanja Operasi	50.598.880,00	50.492.050,00	106.830,00	99,79	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	50.598.880,00	50.492.050,00	106.830,00	99,79	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**3.379.702.500,00**	**2.992.364.800,00**	**387.337.700,00**	**88,54**	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**2.785.210.500,00**	**2.482.853.100,00**	**302.357.400,00**	**89,14**	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 01	*Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*	443.621.000,00	302.040.000,00	141.581.000,00	68,09	
	Belanja Operasi	443.621.000,00	302.040.000,00	141.581.000,00	68,09	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	443.621.000,00	302.040.000,00	141.581.000,00	68,09	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 02	*Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*	361.767.000,00	320.910.000,00	40.857.000,00	88,71	
	Belanja Operasi	361.767.000,00	320.910.000,00	40.857.000,00	88,71	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	361.767.000,00	320.910.000,00	40.857.000,00	88,71	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 03	*Reviu Laporan Kinerja*	391.486.000,00	391.191.000,00	295.000,00	99,92	
	Belanja Operasi	391.486.000,00	391.191.000,00	295.000,00	99,92	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	391.486.000,00	391.191.000,00	295.000,00	99,92	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 04	*Reviu Laporan Keuangan*	45.879.900,00	38.610.000,00	7.269.900,00	84,15	
	Belanja Operasi	45.879.900,00	38.610.000,00	7.269.900,00	84,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	45.879.900,00	38.610.000,00	7.269.900,00	84,15	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 05	*Pengawasan Desa*	1.048.781.000,00	1.012.351.000,00	36.430.000,00	96,53	
	Belanja Operasi	1.048.781.000,00	1.012.351.000,00	36.430.000,00	96,53	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.048.781.000,00	1.012.351.000,00	36.430.000,00	96,53	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 06	*Kerjasama Pengawasan Internal*	159.550.000,00	99.471.300,00	60.078.700,00	62,34	
	Belanja Operasi	159.550.000,00	99.471.300,00	60.078.700,00	62,34	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	159.550.000,00	99.471.300,00	60.078.700,00	62,34	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 07	*Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*	334.125.600,00	318.279.800,00	15.845.800,00	95,26	
	Belanja Operasi	334.125.600,00	318.279.800,00	15.845.800,00	95,26	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	334.125.600,00	318.279.800,00	15.845.800,00	95,26	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**594.492.000,00**	**509.511.700,00**	**84.980.300,00**	**85,71**	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 02	*Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	594.492.000,00	509.511.700,00	84.980.300,00	85,71	
	Belanja Operasi	594.492.000,00	509.511.700,00	84.980.300,00	85,71	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	594.492.000,00	509.511.700,00	84.980.300,00	85,71	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**951.204.278,00**	**770.984.661,00**	**180.219.617,00**	**81,05**	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**509.057.800,00**	**462.444.300,00**	**46.613.500,00**	**90,84**	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 01	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan*	3.535.000,00	2.719.800,00	815.200,00	76,94	
	Belanja Operasi	3.535.000,00	2.719.800,00	815.200,00	76,94	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	3.535.000,00	2.719.800,00	815.200,00	76,94	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 02	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan*	505.522.800,00	459.724.500,00	45.798.300,00	90,94	
	Belanja Operasi	505.522.800,00	459.724.500,00	45.798.300,00	90,94	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	505.522.800,00	459.724.500,00	45.798.300,00	90,94	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18	**Pendampingan dan Asistensi**	**442.146.478,00**	**308.540.361,00**	**133.606.117,00**	**69,78**	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 01	*Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*	159.404.478,00	116.589.178,00	42.815.300,00	73,14	
	Belanja Operasi	154.282.800,00	111.467.500,00	42.815.300,00	72,25	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	154.282.800,00	111.467.500,00	42.815.300,00	72,25	
	Belanja Modal	5.121.678,00	5.121.678,00	0,00	100,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.121.678,00	5.121.678,00	0,00	100,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 02	*Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*	72.417.000,00	65.484.400,00	6.932.600,00	90,43	
	Belanja Operasi	72.417.000,00	65.484.400,00	6.932.600,00	90,43	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	72.417.000,00	65.484.400,00	6.932.600,00	90,43	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 03	*Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*	193.634.000,00	126.466.783,00	67.167.217,00	65,31	
	Belanja Operasi	193.634.000,00	126.466.783,00	67.167.217,00	65,31	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	193.634.000,00	126.466.783,00	67.167.217,00	65,31	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 04	*Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*	16.691.000,00	0,00	16.691.000,00	0,00	
	Belanja Operasi	16.691.000,00	0,00	16.691.000,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	16.691.000,00	0,00	16.691.000,00	0,00	
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(9.371.557.934,00)**	**(8.576.662.978,00)**	**(794.894.956,00)**	**91,52**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 03 Perencanaan
Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**8.367.340.153,00**	**7.567.128.242,00**	**800.211.911,00**	**90,44**	
	PERENCANAAN	**7.232.302.053,00**	**6.467.269.133,00**	**765.032.920,00**	**89,42**	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**1.130.615.200,00**	**973.702.400,00**	**156.912.800,00**	**86,12**	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**548.827.000,00**	**430.819.900,00**	**118.007.100,00**	**78,50**	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 05	*Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota*	361.604.000,00	262.991.100,00	98.612.900,00	72,73	
	Belanja Operasi	361.604.000,00	262.991.100,00	98.612.900,00	72,73	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	361.604.000,00	262.991.100,00	98.612.900,00	72,73	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 07	*Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota*	187.223.000,00	167.828.800,00	19.394.200,00	89,64	
	Belanja Operasi	187.223.000,00	167.828.800,00	19.394.200,00	89,64	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	187.223.000,00	167.828.800,00	19.394.200,00	89,64	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**205.775.000,00**	**185.767.800,00**	**20.007.200,00**	**90,28**	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 02	*Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD*	205.775.000,00	185.767.800,00	20.007.200,00	90,28	
	Belanja Operasi	205.775.000,00	185.767.800,00	20.007.200,00	90,28	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	205.095.000,00	185.087.800,00	20.007.200,00	90,24	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**376.013.200,00**	**357.114.700,00**	**18.898.500,00**	**94,97**	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 03	*Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah*	376.013.200,00	357.114.700,00	18.898.500,00	94,97	
	Belanja Operasi	376.013.200,00	357.114.700,00	18.898.500,00	94,97	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	376.013.200,00	357.114.700,00	18.898.500,00	94,97	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**517.657.500,00**	**445.969.202,00**	**71.688.298,00**	**86,15**	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**152.329.500,00**	**140.377.383,00**	**11.952.117,00**	**92,15**	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 04	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan*	61.994.000,00	55.748.589,00	6.245.411,00	89,93	
	Belanja Operasi	61.994.000,00	55.748.589,00	6.245.411,00	89,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	61.994.000,00	55.748.589,00	6.245.411,00	89,93	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 08	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia*	90.335.500,00	84.628.794,00	5.706.706,00	93,68	
	Belanja Operasi	90.335.500,00	84.628.794,00	5.706.706,00	93,68	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	90.335.500,00	84.628.794,00	5.706.706,00	93,68	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**216.819.000,00**	**172.786.000,00**	**44.033.000,00**	**79,69**	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 04	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian*	109.411.000,00	88.507.600,00	20.903.400,00	80,89	
	Belanja Operasi	109.411.000,00	88.507.600,00	20.903.400,00	80,89	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	109.411.000,00	88.507.600,00	20.903.400,00	80,89	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 08	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA*	107.408.000,00	84.278.400,00	23.129.600,00	78,47	
	Belanja Operasi	107.408.000,00	84.278.400,00	23.129.600,00	78,47	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	107.408.000,00	84.278.400,00	23.129.600,00	78,47	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**148.509.000,00**	**132.805.819,00**	**15.703.181,00**	**89,43**	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 01	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 04	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur*	74.173.000,00	61.306.400,00	12.866.600,00	82,65	
	Belanja Operasi	74.173.000,00	61.306.400,00	12.866.600,00	82,65	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	74.173.000,00	61.306.400,00	12.866.600,00	82,65	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 08	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan*	74.336.000,00	71.499.419,00	2.836.581,00	96,18	
	Belanja Operasi	74.336.000,00	71.499.419,00	2.836.581,00	96,18	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	74.336.000,00	71.499.419,00	2.836.581,00	96,18	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**5.584.029.353,00**	**5.047.597.531,00**	**536.431.822,00**	**90,39**	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.585.758.661,00**	**3.510.437.468,00**	**75.321.193,00**	**97,90**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.060.540.661,00	2.986.978.068,00	73.562.593,00	97,60	
	Belanja Operasi	3.060.540.661,00	2.986.978.068,00	73.562.593,00	97,60	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.060.540.661,00	2.986.978.068,00	73.562.593,00	97,60	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	525.218.000,00	523.459.400,00	1.758.600,00	99,67	
	Belanja Operasi	525.218.000,00	523.459.400,00	1.758.600,00	99,67	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	113.160.000,00	113.160.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	412.058.000,00	410.299.400,00	1.758.600,00	99,57	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**886.226.700,00**	**756.785.367,00**	**129.441.333,00**	**85,39**	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	23.752.000,00	23.752.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	23.752.000,00	23.752.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	23.752.000,00	23.752.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	309.438.200,00	225.398.490,00	84.039.710,00	72,84	
	Belanja Operasi	304.488.200,00	225.398.490,00	79.089.710,00	74,03	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	303.808.200,00	224.718.490,00	79.089.710,00	73,97	
	Belanja Modal	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	121.326.500,00	113.375.700,00	7.950.800,00	93,45	
	Belanja Operasi	121.326.500,00	113.375.700,00	7.950.800,00	93,45	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	120.646.500,00	113.375.700,00	7.270.800,00	93,97	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	35.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	71,43	
	Belanja Operasi	35.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	71,43	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	71,43	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	396.710.000,00	369.259.177,00	27.450.823,00	93,08	
	Belanja Operasi	396.710.000,00	369.259.177,00	27.450.823,00	93,08	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	396.710.000,00	369.259.177,00	27.450.823,00	93,08	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**197.141.652,00**	**97.785.000,00**	**99.356.652,00**	**49,60**	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	197.141.652,00	97.785.000,00	99.356.652,00	49,60	
	Belanja Operasi	8.385.000,00	4.195.000,00	4.190.000,00	50,03	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 11 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.360.000,00	680.000,00	680.000,00	50,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	7.025.000,00	3.515.000,00	3.510.000,00	50,04	
	Belanja Modal	188.756.652,00	93.590.000,00	95.166.652,00	49,58	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.756.652,00	93.590.000,00	95.166.652,00	49,58	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**426.100.000,00**	**383.870.516,00**	**42.229.484,00**	**90,09**	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	426.100.000,00	383.870.516,00	42.229.484,00	90,09	
	Belanja Operasi	426.100.000,00	383.870.516,00	42.229.484,00	90,09	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	426.100.000,00	383.870.516,00	42.229.484,00	90,09	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**488.802.340,00**	**298.719.180,00**	**190.083.160,00**	**61,11**	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	109.700.000,00	49.768.497,00	59.931.503,00	45,37	
	Belanja Operasi	109.700.000,00	49.768.497,00	59.931.503,00	45,37	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	109.700.000,00	49.768.497,00	59.931.503,00	45,37	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	108.905.000,00	64.956.150,00	43.948.850,00	59,64	
	Belanja Operasi	108.905.000,00	64.956.150,00	43.948.850,00	59,64	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	108.905.000,00	64.956.150,00	43.948.850,00	59,64	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	187.595.000,00	179.234.533,00	8.360.467,00	95,54	
	Belanja Operasi	187.595.000,00	179.234.533,00	8.360.467,00	95,54	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 . 09 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	186.915.000,00	178.554.533,00	8.360.467,00	95,53	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 . 10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	82.602.340,00	4.760.000,00	77.842.340,00	5,76	
	Belanja Operasi	82.602.340,00	4.760.000,00	77.842.340,00	5,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	82.602.340,00	4.760.000,00	77.842.340,00	5,76	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**1.135.038.100,00**	**1.099.859.109,00**	**35.178.991,00**	**96,90**	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**1.135.038.100,00**	**1.099.859.109,00**	**35.178.991,00**	**96,90**	
4.07 . 4.03.01 . 01 . 17	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**1.135.038.100,00**	**1.099.859.109,00**	**35.178.991,00**	**96,90**	
4.07 . 4.03.01 . 01 . 17 . 04	*Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan*	449.364.100,00	430.481.554,00	18.882.546,00	95,80	
	Belanja Operasi	449.364.100,00	430.481.554,00	18.882.546,00	95,80	
4.07 . 4.03.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	449.364.100,00	430.481.554,00	18.882.546,00	95,80	
4.07 . 4.03.01 . 01 . 17 . 08	*Penelitian dan Pengembangan Kehutanan*	685.674.000,00	669.377.555,00	16.296.445,00	97,62	
	Belanja Operasi	685.674.000,00	669.377.555,00	16.296.445,00	97,62	
4.07 . 4.03.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	100,00	
4.07 . 4.03.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	682.274.000,00	665.977.555,00	16.296.445,00	97,61	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(8.367.340.153,00)**	**(7.567.128.242,00)**	**(800.211.911,00)**	**90,44**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan
Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 Badan Keuangan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	**850.004.346.597,00**	**823.201.235.761,37**	**26.803.110.835,63**	**96,85**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**29.545.773.139,00**	**24.686.163.493,37**	**4.859.609.645,63**	**83,55**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pajak Daerah	7.661.649.285,00	3.860.497.217,00	3.801.152.068,00	50,39	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.684.123.854,00	10.684.123.854,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah	11.200.000.000,00	10.141.542.422,37	1.058.457.577,63	90,55	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**795.905.338.458,00**	**775.266.457.268,00**	**20.638.881.190,00**	**97,41**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	755.604.196.205,00	742.958.193.981,00	12.646.002.224,00	98,33	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.301.142.253,00	32.308.263.287,00	7.992.878.966,00	80,17	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**24.553.235.000,00**	**23.248.615.000,00**	**1.304.620.000,00**	**94,69**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.553.235.000,00	23.248.615.000,00	1.304.620.000,00	94,69	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**150.066.756.045,00**	**146.439.755.450,00**	**3.627.000.595,00**	**97,58**	
	KEUANGAN	**150.066.756.045,00**	**146.439.755.450,00**	**3.627.000.595,00**	**97,58**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**21.220.621.789,00**	**19.244.977.719,00**	**1.975.644.070,00**	**90,69**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**301.937.000,00**	**299.517.000,00**	**2.420.000,00**	**99,20**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	301.937.000,00	299.517.000,00	2.420.000,00	99,20	
	Belanja Operasi	301.937.000,00	299.517.000,00	2.420.000,00	99,20	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	301.937.000,00	299.517.000,00	2.420.000,00	99,20	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.138.121.323,00**	**16.273.109.553,00**	**1.865.011.770,00**	**89,72**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.003.695.323,00	14.596.599.553,00	1.407.095.770,00	91,21	
	Belanja Operasi	16.003.695.323,00	14.596.599.553,00	1.407.095.770,00	91,21	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	14.770.512.843,00	13.983.673.960,00	786.838.883,00	94,67	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.233.182.480,00	612.925.593,00	620.256.887,00	49,70	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	2.134.426.000,00	1.676.510.000,00	457.916.000,00	78,55	
	Belanja Operasi	2.134.426.000,00	1.676.510.000,00	457.916.000,00	78,55	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.567.920.000,00	1.164.660.000,00	403.260.000,00	74,28	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	566.506.000,00	511.850.000,00	54.656.000,00	90,35	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.118.366.950,00**	**1.100.494.028,00**	**17.872.922,00**	**98,40**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	36.544.750,00	36.544.750,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	Belanja Operasi	36.544.750,00	36.544.750,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	36.544.750,00	36.544.750,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	354.256.700,00	353.832.760,00	423.940,00	99,88	
	Belanja Operasi	354.256.700,00	353.832.760,00	423.940,00	99,88	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	680.000,00	420.000,00	61,82	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	353.156.700,00	353.152.760,00	3.940,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	101.841.500,00	93.864.400,00	7.977.100,00	92,17	
	Belanja Operasi	101.841.500,00	93.864.400,00	7.977.100,00	92,17	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	680.000,00	420.000,00	61,82	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	100.741.500,00	93.184.400,00	7.557.100,00	92,50	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	36.000.000,00	28.050.000,00	7.950.000,00	77,92	
	Belanja Operasi	36.000.000,00	28.050.000,00	7.950.000,00	77,92	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	28.050.000,00	7.950.000,00	77,92	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	589.724.000,00	588.202.118,00	1.521.882,00	99,74	
	Belanja Operasi	589.724.000,00	588.202.118,00	1.521.882,00	99,74	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	589.724.000,00	588.202.118,00	1.521.882,00	99,74	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**584.630.596,00**	**583.260.500,00**	**1.370.096,00**	**99,77**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	584.630.596,00	583.260.500,00	1.370.096,00	99,77	
	Belanja Operasi	17.260.000,00	17.260.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal	367.490.596,00	366.216.500,00	1.274.096,00	99,65	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	367.490.596,00	366.216.500,00	1.274.096,00	99,65	
	Belanja Modal	199.880.000,00	199.784.000,00	96.000,00	99,95	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	199.880.000,00	199.784.000,00	96.000,00	99,95	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**650.952.000,00**	**598.168.383,00**	**52.783.617,00**	**91,89**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	650.952.000,00	598.168.383,00	52.783.617,00	91,89	
	Belanja Operasi	650.952.000,00	598.168.383,00	52.783.617,00	91,89	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	650.952.000,00	598.168.383,00	52.783.617,00	91,89	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**426.613.920,00**	**390.428.255,00**	**36.185.665,00**	**91,52**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	250.440.000,00	230.583.900,00	19.856.100,00	92,07	
	Belanja Operasi	250.440.000,00	230.583.900,00	19.856.100,00	92,07	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	250.440.000,00	230.583.900,00	19.856.100,00	92,07	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 . 10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	176.173.920,00	159.844.355,00	16.329.565,00	90,73	
	Belanja Operasi	176.173.920,00	159.844.355,00	16.329.565,00	90,73	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	176.173.920,00	159.844.355,00	16.329.565,00	90,73	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**127.103.092.856,00**	**125.684.957.994,00**	**1.418.134.862,00**	**98,88**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**2.821.580.630,00**	**2.750.379.463,00**	**71.201.167,00**	**97,48**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 01	*Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS*	131.197.000,00	130.358.431,00	838.569,00	99,36	
	Belanja Operasi	131.197.000,00	130.358.431,00	838.569,00	99,36	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	131.197.000,00	130.358.431,00	838.569,00	99,36	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 02	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	120.564.000,00	119.118.442,00	1.445.558,00	98,80	
	Belanja Operasi	120.564.000,00	119.118.442,00	1.445.558,00	98,80	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	120.564.000,00	119.118.442,00	1.445.558,00	98,80	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 07	*Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	930.956.980,00	917.414.393,00	13.542.587,00	98,55	
	Belanja Operasi	895.224.100,00	881.735.893,00	13.488.207,00	98,49	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.360.000,00	680.000,00	680.000,00	50,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	893.864.100,00	881.055.893,00	12.808.207,00	98,57	
	Belanja Modal	35.732.880,00	35.678.500,00	54.380,00	99,85	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.732.880,00	35.678.500,00	54.380,00	99,85	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 08	*Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	983.698.000,00	955.300.534,00	28.397.466,00	97,11	
	Belanja Operasi	983.698.000,00	955.300.534,00	28.397.466,00	97,11	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	983.698.000,00	955.300.534,00	28.397.466,00	97,11	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 09	*Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	311.651.000,00	309.481.163,00	2.169.837,00	99,30	
	Belanja Operasi	311.651.000,00	309.481.163,00	2.169.837,00	99,30	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	311.651.000,00	309.481.163,00	2.169.837,00	99,30	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 13	*Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	343.513.650,00	318.706.500,00	24.807.150,00	92,78	
	Belanja Operasi	300.255.000,00	276.712.500,00	23.542.500,00	92,16	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	298.895.000,00	276.712.500,00	22.182.500,00	92,58	
	Belanja Modal	40.758.650,00	40.095.000,00	663.650,00	98,37	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.758.650,00	40.095.000,00	663.650,00	98,37	
	Belanja Modal	2.500.000,00	1.899.000,00	601.000,00	75,96	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.500.000,00	1.899.000,00	601.000,00	75,96	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**1.345.653.000,00**	**1.309.283.820,00**	**36.369.180,00**	**97,30**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 01	*Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	296.847.000,00	286.548.375,00	10.298.625,00	96,53	
	Belanja Operasi	296.847.000,00	286.548.375,00	10.298.625,00	96,53	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	295.747.000,00	286.548.375,00	9.198.625,00	96,89	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 03	*Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	187.958.000,00	187.940.200,00	17.800,00	99,99	
	Belanja Operasi	187.958.000,00	187.940.200,00	17.800,00	99,99	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	187.958.000,00	187.940.200,00	17.800,00	99,99	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 06	*Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*	248.676.500,00	248.188.332,00	488.168,00	99,80	
	Belanja Operasi	248.676.500,00	248.188.332,00	488.168,00	99,80	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	248.676.500,00	248.188.332,00	488.168,00	99,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*	359.330.000,00	354.998.963,00	4.331.037,00	98,79	
	Belanja Operasi	359.330.000,00	354.998.963,00	4.331.037,00	98,79	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	359.330.000,00	354.998.963,00	4.331.037,00	98,79	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 09	*Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait*	252.841.500,00	231.607.950,00	21.233.550,00	91,60	
	Belanja Operasi	252.841.500,00	231.607.950,00	21.233.550,00	91,60	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	252.841.500,00	231.607.950,00	21.233.550,00	91,60	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**1.031.576.979,00**	**870.948.092,00**	**160.628.887,00**	**84,43**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 02	*Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban*	42.035.000,00	41.643.300,00	391.700,00	99,07	
	Belanja Operasi	42.035.000,00	41.643.300,00	391.700,00	99,07	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	42.035.000,00	41.643.300,00	391.700,00	99,07	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 03	*Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	23.869.800,00	23.869.800,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	23.869.800,00	23.869.800,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	23.869.800,00	23.869.800,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 04	*Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*	258.097.100,00	248.740.796,00	9.356.304,00	96,37	
	Belanja Operasi	258.097.100,00	248.740.796,00	9.356.304,00	96,37	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	258.097.100,00	248.740.796,00	9.356.304,00	96,37	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 05	*Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	241.506.079,00	206.649.196,00	34.856.883,00	85,57	
	Belanja Operasi	113.700.000,00	85.749.200,00	27.950.800,00	75,42	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	113.020.000,00	85.069.200,00	27.950.800,00	75,27	
	Belanja Modal	127.806.079,00	120.899.996,00	6.906.083,00	94,60	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.806.079,00	120.899.996,00	6.906.083,00	94,60	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 06	*Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD*	25.532.000,00	18.948.800,00	6.583.200,00	74,22	
	Belanja Operasi	25.532.000,00	18.948.800,00	6.583.200,00	74,22	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	25.532.000,00	18.948.800,00	6.583.200,00	74,22	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 07	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah*	133.473.000,00	27.667.700,00	105.805.300,00	20,73	
	Belanja Operasi	133.473.000,00	27.667.700,00	105.805.300,00	20,73	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	133.473.000,00	27.667.700,00	105.805.300,00	20,73	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10	*Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*	138.930.000,00	136.694.500,00	2.235.500,00	98,39	
	Belanja Operasi	138.930.000,00	136.694.500,00	2.235.500,00	98,39	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	138.930.000,00	136.694.500,00	2.235.500,00	98,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 11	*Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	168.134.000,00	166.734.000,00	1.400.000,00	99,17	
	Belanja Operasi	168.134.000,00	166.734.000,00	1.400.000,00	99,17	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	168.134.000,00	166.734.000,00	1.400.000,00	99,17	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**121.904.282.247,00**	**120.754.346.619,00**	**1.149.935.628,00**	**99,06**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	121.904.282.247,00	120.754.346.619,00	1.149.935.628,00	99,06	
	Belanja Operasi	121.904.282.247,00	120.754.346.619,00	1.149.935.628,00	99,06	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6	Belanja Tidak Terduga	2.114.665.260,00	1.587.597.109,00	527.068.151,00	75,08	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	Belanja Bagi Hasil	2.506.385.687,00	2.446.929.619,00	59.456.068,00	97,63	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	Belanja Bantuan Keuangan	117.283.231.300,00	116.719.819.891,00	563.411.409,00	99,52	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 03	*Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	**583.436.500,00**	**537.416.800,00**	**46.019.700,00**	**92,11**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**583.436.500,00**	**537.416.800,00**	**46.019.700,00**	**92,11**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 03	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah*	42.989.000,00	40.447.700,00	2.541.300,00	94,09	
	Belanja Operasi	42.989.000,00	40.447.700,00	2.541.300,00	94,09	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	42.989.000,00	40.447.700,00	2.541.300,00	94,09	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 05	*Penatausahaan Barang Milik Daerah*	67.155.500,00	64.816.400,00	2.339.100,00	96,52	
	Belanja Operasi	67.155.500,00	64.816.400,00	2.339.100,00	96,52	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	67.155.500,00	64.816.400,00	2.339.100,00	96,52	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 06	*Inventarisasi Barang Milik Daerah*	92.353.000,00	82.136.800,00	10.216.200,00	88,94	
	Belanja Operasi	92.353.000,00	82.136.800,00	10.216.200,00	88,94	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	92.353.000,00	82.136.800,00	10.216.200,00	88,94	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 09	*Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah*	103.989.000,00	98.572.000,00	5.417.000,00	94,79	
	Belanja Operasi	103.989.000,00	98.572.000,00	5.417.000,00	94,79	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	103.989.000,00	98.572.000,00	5.417.000,00	94,79	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 10	*Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	197.622.000,00	177.650.900,00	19.971.100,00	89,89	
	Belanja Operasi	197.622.000,00	177.650.900,00	19.971.100,00	89,89	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	197.622.000,00	177.650.900,00	19.971.100,00	89,89	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 11	*Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	56.793.000,00	53.702.900,00	3.090.100,00	94,56	
	Belanja Operasi	56.793.000,00	53.702.900,00	3.090.100,00	94,56	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	56.793.000,00	53.702.900,00	3.090.100,00	94,56	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 12	*Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	22.535.000,00	20.090.100,00	2.444.900,00	89,15	
	Belanja Operasi	22.535.000,00	20.090.100,00	2.444.900,00	89,15	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	22.535.000,00	20.090.100,00	2.444.900,00	89,15	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**1.159.604.900,00**	**972.402.937,00**	**187.201.963,00**	**83,86**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**1.159.604.900,00**	**972.402.937,00**	**187.201.963,00**	**83,86**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 03	*Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*	22.234.500,00	7.234.500,00	15.000.000,00	32,54	
	Belanja Operasi	22.234.500,00	7.234.500,00	15.000.000,00	32,54	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	22.234.500,00	7.234.500,00	15.000.000,00	32,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 04	*Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*	246.910.000,00	242.319.100,00	4.590.900,00	98,14	
	Belanja Operasi	96.910.000,00	92.419.100,00	4.490.900,00	95,37	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	96.910.000,00	92.419.100,00	4.490.900,00	95,37	
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal	150.000.000,00	149.900.000,00	100.000,00	99,93	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	149.900.000,00	100.000,00	99,93	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 07	*Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*	127.299.900,00	8.160.000,00	119.139.900,00	6,41	
	Belanja Operasi	127.299.900,00	8.160.000,00	119.139.900,00	6,41	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	127.299.900,00	8.160.000,00	119.139.900,00	6,41	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 11	*Penagihan Pajak Daerah*	155.696.000,00	152.367.619,00	3.328.381,00	97,86	
	Belanja Operasi	155.696.000,00	152.367.619,00	3.328.381,00	97,86	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	155.696.000,00	152.367.619,00	3.328.381,00	97,86	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 13	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	129.959.500,00	120.499.200,00	9.460.300,00	92,72	
	Belanja Operasi	129.959.500,00	120.499.200,00	9.460.300,00	92,72	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	129.959.500,00	120.499.200,00	9.460.300,00	92,72	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 14	*Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*	477.505.000,00	441.822.518,00	35.682.482,00	92,53	
	Belanja Operasi	477.505.000,00	441.822.518,00	35.682.482,00	92,53	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	477.505.000,00	441.822.518,00	35.682.482,00	92,53	
				0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**699.937.590.552,00**	**676.761.480.311,37**	23.176.110.240,63	96,69	
				0,00	0,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			**0,00**	**0,00**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**41.255.059.126,00**	**33.044.879.036,74**	**8.210.180.089,26**	**80,10**	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.255.059.126,00	33.044.879.036,74	8.210.180.089,26	80,10	
PEMBIAYAAN NETTO		**41.255.059.126,00**	**33.044.879.036,74**	**8.210.180.089,26**	**80,10**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 05 Kepegawaian
Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.05 . 4.05.01 . 01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**7.491.420.374,00**	**6.884.711.746,00**	**606.708.628,00**	**91,90**	
	KEPEGAWAIAN	**7.491.420.374,00**	**6.884.711.746,00**	**606.708.628,00**	**91,90**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**4.921.505.934,00**	**4.606.496.248,00**	**315.009.686,00**	**93,60**	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.598.459.034,00**	**4.322.886.756,00**	**275.572.278,00**	**94,01**	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	4.120.478.218,00	3.863.393.940,00	257.084.278,00	93,76	
	Belanja Operasi	4.120.478.218,00	3.863.393.940,00	257.084.278,00	93,76	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.120.478.218,00	3.863.393.940,00	257.084.278,00	93,76	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	477.980.816,00	459.492.816,00	18.488.000,00	96,13	
	Belanja Operasi	477.980.816,00	459.492.816,00	18.488.000,00	96,13	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	103.800.000,00	97.200.000,00	6.600.000,00	93,64	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	374.180.816,00	362.292.816,00	11.888.000,00	96,82	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**208.126.900,00**	**187.305.969,00**	**20.820.931,00**	**90,00**	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	2.858.100,00	1.645.000,00	1.213.100,00	57,56	
	Belanja Operasi	2.858.100,00	1.645.000,00	1.213.100,00	57,56	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	2.858.100,00	1.645.000,00	1.213.100,00	57,56	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	7.822.400,00	6.142.200,00	1.680.200,00	78,52	
	Belanja Operasi	7.822.400,00	6.142.200,00	1.680.200,00	78,52	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 1. 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	7.822.400,00	6.142.200,00	1.680.200,00	78,52	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	44.318.900,00	40.103.470,00	4.215.430,00	90,49	
	Belanja Operasi	44.318.900,00	40.103.470,00	4.215.430,00	90,49	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	43.638.900,00	39.423.470,00	4.215.430,00	90,34	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	15.178.500,00	11.850.000,00	3.328.500,00	78,07	
	Belanja Operasi	15.178.500,00	11.850.000,00	3.328.500,00	78,07	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	15.178.500,00	11.850.000,00	3.328.500,00	78,07	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	100,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	131.749.000,00	121.365.299,00	10.383.701,00	92,12	
	Belanja Operasi	131.749.000,00	121.365.299,00	10.383.701,00	92,12	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	131.749.000,00	121.365.299,00	10.383.701,00	92,12	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**97.800.000,00**	**80.198.523,00**	**17.601.477,00**	**82,00**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	97.800.000,00	80.198.523,00	17.601.477,00	82,00	
	Belanja Operasi	97.800.000,00	80.198.523,00	17.601.477,00	82,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	97.800.000,00	80.198.523,00	17.601.477,00	82,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**17.120.000,00**	**16.105.000,00**	**1.015.000,00**	**94,07**	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	17.120.000,00	16.105.000,00	1.015.000,00	94,07	
	Belanja Operasi	17.120.000,00	16.105.000,00	1.015.000,00	94,07	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	17.120.000,00	16.105.000,00	1.015.000,00	94,07	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	**2.569.914.440,00**	**2.278.215.498,00**	**291.698.942,00**	**88,65**	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**277.497.640,00**	**265.856.408,00**	**11.641.232,00**	**95,80**	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 02	*Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk*	209.276.740,00	198.679.515,00	10.597.225,00	94,94	
	Belanja Operasi	209.276.740,00	198.679.515,00	10.597.225,00	94,94	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	209.276.740,00	198.679.515,00	10.597.225,00	94,94	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 06	*Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian*	30.004.000,00	29.650.300,00	353.700,00	98,82	
	Belanja Operasi	30.004.000,00	29.650.300,00	353.700,00	98,82	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	30.004.000,00	29.650.300,00	353.700,00	98,82	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 11	*Pengelolaan Data Kepegawaian*	38.216.900,00	37.526.593,00	690.307,00	98,19	
	Belanja Operasi	38.216.900,00	37.526.593,00	690.307,00	98,19	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	38.216.900,00	37.526.593,00	690.307,00	98,19	
	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16	**Mutasi dan Promosi ASN**	**1.266.976.300,00**	**1.243.027.890,00**	**23.948.410,00**	**98,11**	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 01	*Pengelolaan Mutasi ASN*	1.202.260.300,00	1.179.042.190,00	23.218.110,00	98,07	
	Belanja Operasi	1.202.260.300,00	1.179.042.190,00	23.218.110,00	98,07	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.202.260.300,00	1.179.042.190,00	23.218.110,00	98,07	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 02	*Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*	64.716.000,00	63.985.700,00	730.300,00	98,87	
	Belanja Operasi	64.716.000,00	63.985.700,00	730.300,00	98,87	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	64.716.000,00	63.985.700,00	730.300,00	98,87	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**1.025.440.500,00**	**769.331.200,00**	**256.109.300,00**	**75,02**	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 01	*Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN*	1.025.440.500,00	769.331.200,00	256.109.300,00	75,02	
	Belanja Operasi	1.025.440.500,00	769.331.200,00	256.109.300,00	75,02	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.025.440.500,00	769.331.200,00	256.109.300,00	75,02	
SURPLUS / (DEFISIT)		(7.491.420.374,00)	(6.884.711.746,00)	(606.708.628,00)	91,90	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan	**:**	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan	**:**	4 . 08	Sekretariat DPRD
Unit Organisasi	**:**	4 . 08 . 01	SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	**:**	4 . 08 . 01 . 01	SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.08 . 4.08.01 . 01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**31.490.747.963,00**	**28.914.041.234,00**	**2.576.706.729,00**	**91,82**	
	SEKRETARIAT DPRD	**31.490.747.963,00**	**28.914.041.234,00**	**2.576.706.729,00**	**91,82**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**16.774.716.763,00**	**15.470.232.762,00**	**1.304.484.001,00**	**92,22**	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.613.788.895,00**	**4.327.057.978,00**	**286.730.917,00**	**93,79**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.060.142.895,00	2.973.952.822,00	86.190.073,00	97,18	
	Belanja Operasi	3.060.142.895,00	2.973.952.822,00	86.190.073,00	97,18	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.060.142.895,00	2.973.952.822,00	86.190.073,00	97,18	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	1.553.646.000,00	1.353.105.156,00	200.540.844,00	87,09	
	Belanja Operasi	1.553.646.000,00	1.353.105.156,00	200.540.844,00	87,09	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	218.280.000,00	187.710.000,00	30.570.000,00	86,00	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.335.366.000,00	1.165.395.156,00	169.970.844,00	87,27	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.348.864.668,00**	**1.231.994.236,00**	**116.870.432,00**	**91,34**	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	18.821.800,00	18.812.285,00	9.515,00	99,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	Belanja Operasi	18.821.800,00	18.812.285,00	9.515,00	99,95	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	18.821.800,00	18.812.285,00	9.515,00	99,95	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	60.042.468,00	50.739.800,00	9.302.668,00	84,51	
	Belanja Operasi	24.285.000,00	16.914.800,00	7.370.200,00	69,65	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	23.185.000,00	16.914.800,00	6.270.200,00	72,96	
	Belanja Modal	35.757.468,00	33.825.000,00	1.932.468,00	94,60	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.757.468,00	33.825.000,00	1.932.468,00	94,60	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	506.092.400,00	435.631.450,00	70.460.950,00	86,08	
	Belanja Operasi	506.092.400,00	435.631.450,00	70.460.950,00	86,08	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	680.000,00	420.000,00	61,82	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	504.992.400,00	434.951.450,00	70.040.950,00	86,13	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	153.020.000,00	139.400.500,00	13.619.500,00	91,10	
	Belanja Operasi	153.020.000,00	139.400.500,00	13.619.500,00	91,10	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	920.000,00	680.000,00	240.000,00	73,91	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	152.100.000,00	138.720.500,00	13.379.500,00	91,20	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	125.000.000,00	123.300.000,00	1.700.000,00	98,64	
	Belanja Operasi	125.000.000,00	123.300.000,00	1.700.000,00	98,64	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	123.300.000,00	1.700.000,00	98,64	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	485.888.000,00	464.110.201,00	21.777.799,00	95,52	
	Belanja operasi	485.888.000,00	464.110.201,00	21.777.799,00	95,52	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	485.888.000,00	464.110.201,00	21.777.799,00	95,52	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**741.209.000,00**	**625.394.000,00**	**115.815.000,00**	**84,37**	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 07 . 02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	741.209.000,00	625.394.000,00	115.815.000,00	84,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	Belanja Operasi	6.020.000,00	2.760.000,00	3.260.000,00	45,85	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 07 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.020.000,00	2.760.000,00	3.260.000,00	45,85	
	Belanja Modal	735.189.000,00	622.634.000,00	112.555.000,00	84,69	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	735.189.000,00	622.634.000,00	112.555.000,00	84,69	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**291.000.000,00**	**103.918.310,00**	**187.081.690,00**	**35,71**	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	291.000.000,00	103.918.310,00	187.081.690,00	35,71	
	Belanja Operasi	291.000.000,00	103.918.310,00	187.081.690,00	35,71	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	291.000.000,00	103.918.310,00	187.081.690,00	35,71	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**448.990.000,00**	**283.264.303,00**	**165.725.697,00**	**63,09**	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	417.890.000,00	253.730.303,00	164.159.697,00	60,72	
	Belanja Operasi	417.890.000,00	253.730.303,00	164.159.697,00	60,72	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	417.890.000,00	253.730.303,00	164.159.697,00	60,72	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	31.100.000,00	29.534.000,00	1.566.000,00	94,96	
	Belanja Operasi	31.100.000,00	29.534.000,00	1.566.000,00	94,96	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 09 . 09 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.534.000,00	466.000,00	98,45	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 152	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**9.316.614.200,00**	**8.884.828.435,00**	**431.785.765,00**	**95,37**	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 152 . 00	**Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD**	**9.164.522.200,00**	**8.744.712.435,00**	**419.809.765,00**	**95,42**	
	Belanja Operasi	9.164.522.200,00	8.744.712.435,00	419.809.765,00	95,42	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 152 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.164.522.200,00	8.744.712.435,00	419.809.765,00	95,42	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 152 . 152	*Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD*	152.092.000,00	140.116.000,00	11.976.000,00	92,13	
	Belanja Operasi	152.092.000,00	140.116.000,00	11.976.000,00	92,13	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 152 . 152 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.400.000,00	680.000,00	3.720.000,00	15,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.08 . 4.08.01 . 01 . 152 . 152 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	147.692.000,00	139.436.000,00	8.256.000,00	94,41	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 150	**Layanan Administrasi DPRD**	**14.250.000,00**	**13.775.500,00**	**474.500,00**	**96,67**	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 150 . 152	*Fasilitasi Fraksi DPRD*	14.250.000,00	13.775.500,00	474.500,00	96,67	
	Belanja Operasi	14.250.000,00	13.775.500,00	474.500,00	96,67	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 150 . 152 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	13.775.500,00	474.500,00	96,67	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**14.716.031.200,00**	**13.443.808.472,00**	**1.272.222.728,00**	**91,35**	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 15	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**1.534.252.000,00**	**1.216.311.000,00**	**317.941.000,00**	**79,28**	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 15 . 01	*Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	467.025.000,00	366.553.000,00	100.472.000,00	78,49	
	Belanja Operasi	467.025.000,00	366.553.000,00	100.472.000,00	78,49	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	467.025.000,00	366.553.000,00	100.472.000,00	78,49	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 15 . 02	*Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	823.441.000,00	662.054.300,00	161.386.700,00	80,40	
	Belanja Operasi	823.441.000,00	662.054.300,00	161.386.700,00	80,40	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	823.441.000,00	662.054.300,00	161.386.700,00	80,40	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 15 . 03	*Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan*	192.161.000,00	148.703.700,00	43.457.300,00	77,38	
	Belanja Operasi	192.161.000,00	148.703.700,00	43.457.300,00	77,38	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	192.161.000,00	148.703.700,00	43.457.300,00	77,38	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 15 . 04	*Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik*	51.625.000,00	39.000.000,00	12.625.000,00	75,54	
	Belanja Operasi	51.625.000,00	39.000.000,00	12.625.000,00	75,54	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	51.625.000,00	39.000.000,00	12.625.000,00	75,54	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 16	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**564.681.000,00**	**474.026.055,00**	**90.654.945,00**	**83,95**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.08 . 4.08.01 . 01 . 16 . 01	*Pembahasan KUA dan PPAS*	48.405.000,00	40.238.700,00	8.166.300,00	83,13	
	Belanja Operasi	48.405.000,00	40.238.700,00	8.166.300,00	83,13	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	48.405.000,00	40.238.700,00	8.166.300,00	83,13	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 16 . 03	*Pembahasan APBD*	496.562.000,00	416.073.855,00	80.488.145,00	83,79	
	Belanja Operasi	496.562.000,00	416.073.855,00	80.488.145,00	83,79	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	495.202.000,00	416.073.855,00	79.128.145,00	84,02	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 16 . 06	*Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	19.714.000,00	17.713.500,00	2.000.500,00	89,85	
	Belanja Operasi	19.714.000,00	17.713.500,00	2.000.500,00	89,85	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	19.714.000,00	17.713.500,00	2.000.500,00	89,85	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 17	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	2.369.749.000,00	2.335.041.377,00	34.707.623,00	98,54	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 17 . 01	*Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum*	571.290.000,00	554.019.200,00	17.270.800,00	96,98	
	Belanja Operasi	571.290.000,00	554.019.200,00	17.270.800,00	96,98	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	571.290.000,00	554.019.200,00	17.270.800,00	96,98	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 17 . 03	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat*	531.655.500,00	527.627.951,00	4.027.549,00	99,24	
	Belanja Operasi	531.655.500,00	527.627.951,00	4.027.549,00	99,24	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	531.655.500,00	527.627.951,00	4.027.549,00	99,24	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 17 . 04	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian*	669.444.000,00	658.266.426,00	11.177.574,00	98,33	
	Belanja Operasi	669.444.000,00	658.266.426,00	11.177.574,00	98,33	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	669.444.000,00	658.266.426,00	11.177.574,00	98,33	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 17 . 05	*Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam*	580.732.500,00	578.500.800,00	2.231.700,00	99,62	
	Belanja Operasi	580.732.500,00	578.500.800,00	2.231.700,00	99,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.08 . 4.08.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	580.732.500,00	578.500.800,00	2.231.700,00	99,62	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 17 . 07	*Pengawasan Penggunaan Anggaran*	16.627.000,00	16.627.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	16.627.000,00	16.627.000,00	0,00	100,00	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	16.627.000,00	16.627.000,00	0,00	100,00	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 18	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	1.782.736.000,00	1.357.963.960,00	424.772.040,00	76,17	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 18 . 02	*Bimbingan Teknis DPRD*	1.392.836.000,00	1.030.387.960,00	362.448.040,00	73,98	
	Belanja Operasi	1.392.836.000,00	1.030.387.960,00	362.448.040,00	73,98	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.392.836.000,00	1.030.387.960,00	362.448.040,00	73,98	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 18 . 03	*Publikasi dan Dokumentasi Dewan*	80.600.000,00	51.500.000,00	29.100.000,00	63,90	
	Belanja Operasi	80.600.000,00	51.500.000,00	29.100.000,00	63,90	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	79.500.000,00	51.500.000,00	28.000.000,00	64,78	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 18 . 04	*Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	60.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
	Belanja Operasi	60.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 18 . 05	*Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi*	240.000.000,00	230.000.000,00	10.000.000,00	95,83	
	Belanja Operasi	240.000.000,00	230.000.000,00	10.000.000,00	95,83	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	230.000.000,00	10.000.000,00	95,83	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 18 . 07	*Penyusunan Program Kerja DPRD*	9.300.000,00	6.076.000,00	3.224.000,00	65,33	
	Belanja Operasi	9.300.000,00	6.076.000,00	3.224.000,00	65,33	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	6.076.000,00	3.224.000,00	65,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.08 . 4.08.01 . 01 . 19	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**4.710.506.000,00**	**4.410.681.000,00**	**299.825.000,00**	**93,63**	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 19 . 01	*Kunjungan Kerja dalam Daerah*	2.469.980.000,00	2.367.246.000,00	102.734.000,00	95,84	
	Belanja Operasi	2.469.980.000,00	2.367.246.000,00	102.734.000,00	95,84	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	2.469.980.000,00	2.367.246.000,00	102.734.000,00	95,84	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 19 . 03	*Pelaksanaan Reses*	2.240.526.000,00	2.043.435.000,00	197.091.000,00	91,20	
	Belanja Operasi	2.240.526.000,00	2.043.435.000,00	197.091.000,00	91,20	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	2.240.526.000,00	2.043.435.000,00	197.091.000,00	91,20	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 20	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**465.476.200,00**	**416.107.880,00**	**49.368.320,00**	**89,39**	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 20 . 01	*Penyusunan Kode Etik DPRD*	461.310.000,00	416.107.880,00	45.202.120,00	90,20	
	Belanja Operasi	461.310.000,00	416.107.880,00	45.202.120,00	90,20	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	461.310.000,00	416.107.880,00	45.202.120,00	90,20	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 20 . 02	*Pengawasan Kode Etik DPRD*	4.166.200,00	0,00	4.166.200,00	0,00	
	Belanja Operasi	4.166.200,00	0,00	4.166.200,00	0,00	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	4.166.200,00	0,00	4.166.200,00	0,00	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 22	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**3.288.631.000,00**	**3.233.677.200,00**	**54.953.800,00**	**98,33**	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 22 . 01	*Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	3.263.446.000,00	3.230.609.700,00	32.836.300,00	98,99	
	Belanja Operasi	3.263.446.000,00	3.230.609.700,00	32.836.300,00	98,99	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	3.263.446.000,00	3.230.609.700,00	32.836.300,00	98,99	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 22 . 02	*Penyusunan Laporan Kinerja DPRD*	25.185.000,00	3.067.500,00	22.117.500,00	12,18	
	Belanja Operasi	25.185.000,00	3.067.500,00	22.117.500,00	12,18	
4.08 . 4.08.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	25.185.000,00	3.067.500,00	22.117.500,00	12,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
SURPLUS / (DEFISIT)		**(31.490.747.963,00)**	**(28.914.041.234,00)**	**(2.576.706.729,00)**	**91,82**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 11 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 11 . 01 Kecamatan Siberut Utara
Sub. Unit Organisasi : 4 . 11 . 01 . 01 Kecamatan Siberut Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.11 . 4.11.01 . 01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**2.930.528.234,00**	**2.839.609.458,00**	**90.918.776,00**	**96,90**	
	KECAMATAN	**2.930.528.234,00**	**2.839.609.458,00**	**90.918.776,00**	**96,90**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.753.115.810,00**	**2.664.592.458,00**	**88.523.352,00**	**96,78**	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**127.865.000,00**	**127.365.000,00**	**500.000,00**	**99,61**	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 01 . 07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	127.865.000,00	127.365.000,00	500.000,00	99,61	
	Belanja Operasi	127.865.000,00	127.365.000,00	500.000,00	99,61	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	127.865.000,00	127.365.000,00	500.000,00	99,61	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 02 . 01	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.396.378.010,00**	**2.328.638.558,00**	**67.739.452,00**	**97,17**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.816.150.010,00	1.755.506.558,00	60.643.452,00	96,66	
	Belanja Operasi	1.816.150.010,00	1.755.506.558,00	60.643.452,00	96,66	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.816.150.010,00	1.755.506.558,00	60.643.452,00	96,66	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	580.228.000,00	573.132.000,00	7.096.000,00	98,78	
	Belanja Operasi	580.228.000,00	573.132.000,00	7.096.000,00	98,78	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	510.628.000,00	503.532.000,00	7.096.000,00	98,61	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**149.852.800,00**	**146.432.900,00**	**3.419.900,00**	**97,72**	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	1.515.100,00	1.515.100,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	1.515.100,00	1.515.100,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.515.100,00	1.515.100,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	43.611.400,00	42.611.500,00	999.900,00	97,71	
	Belanja Operasi	43.611.400,00	42.611.500,00	999.900,00	97,71	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	43.611.400,00	42.611.500,00	999.900,00	97,71	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	2.656.300,00	1.156.300,00	1.500.000,00	43,53	
	Belanja Operasi	2.656.300,00	1.156.300,00	1.500.000,00	43,53	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	2.656.300,00	1.156.300,00	1.500.000,00	43,53	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	102.070.000,00	101.150.000,00	920.000,00	99,10	
	Belanja Operasi	102.070.000,00	101.150.000,00	920.000,00	99,10	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	102.070.000,00	101.150.000,00	920.000,00	99,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.11 . 4.11.01 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**26.000.000,00**	**14.197.343,00**	**11.802.657,00**	**54,61**	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	26.000.000,00	14.197.343,00	11.802.657,00	54,61	
	Belanja Operasi	26.000.000,00	14.197.343,00	11.802.657,00	54,61	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	14.197.343,00	11.802.657,00	54,61	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.020.000,00**	**47.958.657,00**	**5.061.343,00**	**90,45**	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	27.800.000,00	25.800.000,00	2.000.000,00	92,81	
	Belanja Operasi	27.800.000,00	25.800.000,00	2.000.000,00	92,81	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	27.800.000,00	25.800.000,00	2.000.000,00	92,81	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	5.500.000,00	2.438.657,00	3.061.343,00	44,34	
	Belanja Operasi	5.500.000,00	2.438.657,00	3.061.343,00	44,34	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	2.438.657,00	3.061.343,00	44,34	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	19.720.000,00	19.720.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	19.720.000,00	19.720.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	19.720.000,00	19.720.000,00	0,00	100,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**18.191.424,00**	**18.191.000,00**	**424,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 18	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**18.191.424,00**	**18.191.000,00**	**424,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 18 . 03	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	18.191.424,00	18.191.000,00	424,00	100,00	
	Belanja Operasi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal	10.991.424,00	10.991.000,00	424,00	100,00	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.991.424,00	10.991.000,00	424,00	100,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**83.112.000,00**	**81.112.000,00**	**2.000.000,00**	**97,59**	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 19	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**83.112.000,00**	**81.112.000,00**	**2.000.000,00**	**97,59**	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 19 . 01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	34.709.000,00	32.719.000,00	1.990.000,00	94,27	
	Belanja Operasi	34.709.000,00	32.719.000,00	1.990.000,00	94,27	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	34.709.000,00	32.719.000,00	1.990.000,00	94,27	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 19 . 03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	48.403.000,00	48.393.000,00	10.000,00	99,98	
	Belanja Operasi	48.403.000,00	48.393.000,00	10.000,00	99,98	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	48.403.000,00	48.393.000,00	10.000,00	99,98	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**38.589.000,00**	**38.589.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 27	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**38.589.000,00**	**38.589.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 27 . 01	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI*	38.589.000,00	38.589.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	Belanja Operasi	38.589.000,00	38.589.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	38.589.000,00	38.589.000,00	0,00	100,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**37.520.000,00**	**37.125.000,00**	**395.000,00**		
4.11 . 4.11.01 . 01 . 28	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**37.520.000,00**	**37.125.000,00**	**395.000,00**	**98,95**	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 28 . 03	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	37.520.000,00	37.125.000,00	395.000,00	98,95	
	Belanja Operasi	37.520.000,00	37.125.000,00	395.000,00	98,95	
4.11 . 4.11.01 . 01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	37.520.000,00	37.125.000,00	395.000,00	98,95	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(2.930.528.234,00)**	**(2.839.609.458,00)**	**(90.918.776,00)**	**96,90**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 11 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 11 . 02 Kecamatan Siberut Tengah
Sub. Unit Organisasi : 4 . 11 . 02 . 01 Kecamatan Siberut Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.11 . 4.11.02 . 01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**2.422.859.360,00**	**2.279.149.125,00**	**143.710.235,00**	**94,07**	
	KECAMATAN	**2.422.859.360,00**	**2.279.149.125,00**	**143.710.235,00**	**94,07**	
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.205.924.460,00**	**2.073.628.225,00**	**132.296.235,00**	**94,00**	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.800.000,00**	**30.800.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 01 . 07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.043.443.360,00**	**1.928.555.125,00**	**114.888.235,00**	**94,38**	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.396.477.860,00	1.321.997.125,00	74.480.735,00	94,67	
	Belanja Operasi	1.396.477.860,00	1.321.997.125,00	74.480.735,00	94,67	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.396.477.860,00	1.321.997.125,00	74.480.735,00	94,67	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	646.965.500,00	606.558.000,00	40.407.500,00	93,75	
	Belanja Operasi	646.965.500,00	606.558.000,00	40.407.500,00	93,75	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	64.325.500,00	47.800.000,00	16.525.500,00	74,31	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	582.640.000,00	558.758.000,00	23.882.000,00	95,90	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**119.681.100,00**	**103.273.100,00**	**16.408.000,00**	**86,29**	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	2.000.500,00	2.000.500,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	2.000.500,00	2.000.500,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	2.000.500,00	2.000.500,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	29.420.200,00	27.235.600,00	2.184.600,00	92,57	
	Belanja Operasi	29.420.200,00	27.235.600,00	2.184.600,00	92,57	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	29.420.200,00	27.235.600,00	2.184.600,00	92,57	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	3.503.400,00	2.106.000,00	1.397.400,00	60,11	
	Belanja Operasi	3.503.400,00	2.106.000,00	1.397.400,00	60,11	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	3.503.400,00	2.106.000,00	1.397.400,00	60,11	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	84.757.000,00	71.931.000,00	12.826.000,00	84,87	
	Belanja Operasi	84.757.000,00	71.931.000,00	12.826.000,00	84,87	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	84.757.000,00	71.931.000,00	12.826.000,00	84,87	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.000.000,00**	**5.000.000,00**	**1.000.000,00**	**83,33**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.11 . 4.11.02 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	6.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	83,33	
	Belanja Operasi	6.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	83,33	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	83,33	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	**12.250.000,00**	**12.020.000,00**	**230.000,00**	**98,12**	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 18	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**12.250.000,00**	**12.020.000,00**	**230.000,00**	**98,12**	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 18 . 03	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	12.250.000,00	12.020.000,00	230.000,00	98,12	
	Belanja Operasi	12.250.000,00	12.020.000,00	230.000,00	98,12	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	12.020.000,00	230.000,00	98,12	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**39.999.900,00**	**32.209.900,00**	**7.790.000,00**	**80,52**	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 19	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**39.999.900,00**	**32.209.900,00**	**7.790.000,00**	**80,52**	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 19 . 01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 19 . 03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	19.999.900,00	12.209.900,00	7.790.000,00	61,05	
	Belanja Operasi	19.999.900,00	12.209.900,00	7.790.000,00	61,05	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	19.999.900,00	12.209.900,00	7.790.000,00	61,05	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 27	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 27 . 01	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**164.685.000,00**	**161.291.000,00**	**3.394.000,00**	**97,94**	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 28	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**164.685.000,00**	**161.291.000,00**	**3.394.000,00**	**97,94**	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 28 . 03	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	88.514.000,00	85.147.000,00	3.367.000,00	96,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	Belanja Operasi	88.514.000,00	85.147.000,00	3.367.000,00	96,20	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	88.514.000,00	85.147.000,00	3.367.000,00	96,20	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 28 . 06	*Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	76.171.000,00	76.144.000,00	27.000,00	99,96	
	Belanja Operasi	76.171.000,00	76.144.000,00	27.000,00	99,96	
4.11 . 4.11.02 . 01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	76.171.000,00	76.144.000,00	27.000,00	99,96	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(2.422.859.360,00)**	**(2.279.149.125,00)**	**(143.710.235,00)**	**94,07**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 11 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 11 . 03 Kecamatan Siberut Barat
Sub. Unit Organisasi : 4 . 11 . 03 . 01 Kecamatan Siberut Barat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.11 . 4.11.03 . 01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**2.306.532.847,00**	**2.241.260.202,00**	**65.272.645,00**	**97,17**	
	KECAMATAN	**2.306.532.847,00**	**2.241.260.202,00**	**65.272.645,00**	**97,17**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.099.771.847,00**	**2.035.757.202,00**	**64.014.645,00**	**96,95**	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**165.805.000,00**	**164.035.000,00**	**1.770.000,00**	**98,93**	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 01 . 07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	165.805.000,00	164.035.000,00	1.770.000,00	98,93	
	Belanja Operasi	165.805.000,00	164.035.000,00	1.770.000,00	98,93	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	165.805.000,00	164.035.000,00	1.770.000,00	98,93	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.705.474.947,00**	**1.646.560.752,00**	**58.914.195,00**	**96,55**	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.055.944.947,00	999.386.752,00	56.558.195,00	94,64	
	Belanja Operasi	1.055.944.947,00	999.386.752,00	56.558.195,00	94,64	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.055.944.947,00	999.386.752,00	56.558.195,00	94,64	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	649.530.000,00	647.174.000,00	2.356.000,00	99,64	
	Belanja Operasi	649.530.000,00	647.174.000,00	2.356.000,00	99,64	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	54.900.000,00	53.800.000,00	1.100.000,00	98,00	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	594.630.000,00	593.374.000,00	1.256.000,00	99,79	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**186.003.100,00**	**183.672.650,00**	**2.330.450,00**	**98,75**	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	3.960.000,00	3.948.450,00	11.550,00	99,71	
	Belanja Operasi	3.960.000,00	3.948.450,00	11.550,00	99,71	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	3.948.450,00	11.550,00	99,71	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	48.443.100,00	47.544.200,00	898.900,00	98,14	
	Belanja Operasi	48.443.100,00	47.544.200,00	898.900,00	98,14	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	48.443.100,00	47.544.200,00	898.900,00	98,14	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	133.600.000,00	132.180.000,00	1.420.000,00	98,94	
	Belanja Operasi	133.600.000,00	132.180.000,00	1.420.000,00	98,94	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	133.600.000,00	132.180.000,00	1.420.000,00	98,94	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**7.488.800,00**	**7.488.800,00**	**0,00**	**100,00**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.11 . 4.11.03 . 01 . 07 . 11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	7.488.800,00	7.488.800,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	7.488.800,00	7.488.800,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	7.488.800,00	7.488.800,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.000.000,00**	**10.000.000,00**	**1.000.000,00**	**90,91**	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	11.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	90,91	
	Belanja Operasi	11.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	90,91	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	10.000.000,00	1.000.000,00	90,91	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**74.420.000,00**	**73.480.000,00**	**940.000,00**	**98,74**	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 18	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**74.420.000,00**	**73.480.000,00**	**940.000,00**	**98,74**	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 18 . 03	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	74.420.000,00	73.480.000,00	940.000,00	98,74	
	Belanja Operasi	74.420.000,00	73.480.000,00	940.000,00	98,74	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	74.420.000,00	73.480.000,00	940.000,00	98,74	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**51.903.000,00**	**51.803.000,00**	**100.000,00**	**99,81**	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 19	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**51.903.000,00**	**51.803.000,00**	**100.000,00**	**99,81**	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 19 . 01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	41.903.000,00	41.803.000,00	100.000,00	99,76	
	Belanja Operasi	41.903.000,00	41.803.000,00	100.000,00	99,76	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	41.903.000,00	41.803.000,00	100.000,00	99,76	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 19 . 03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 27	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 27 . 01	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PEMBINAA DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**80.438.000,00**	**80.220.000,00**	**218.000,00**	**99,73**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.11 . 4.11.03 . 01 . 28	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**80.438.000,00**	**80.220.000,00**	**218.000,00**	**99,73**	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 28 . 03	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	80.438.000,00	80.220.000,00	218.000,00	99,73	
	Belanja Operasi	80.438.000,00	80.220.000,00	218.000,00	99,73	
4.11 . 4.11.03 . 01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	80.438.000,00	80.220.000,00	218.000,00	99,73	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(2.306.532.847,00)**	**(2.241.260.202,00)**	**(65.272.645,00)**	**97,17**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 11 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 11 . 04 Kecamatan Siberut Barat Daya
Sub. Unit Organisasi : 4 . 11 . 04. 01 Kecamatan Siberut Barat Daya

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.11 . 4.11.04 . 00 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**2.264.498.455,00**	**2.214.131.085,00**	**50.367.370,00**	**97,78**	
	KECAMATAN	**2.264.498.455,00**	**2.214.131.085,00**	**50.367.370,00**	**97,78**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.173.273.455,00**	**2.121.846.085,00**	**51.427.370,00**	**97,63**	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**64.968.800,00**	**64.948.800,00**	**20.000,00**	**99,97**	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 01 . 07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	64.968.800,00	64.948.800,00	20.000,00	99,97	
	Belanja Operasi	64.968.800,00	64.948.800,00	20.000,00	99,97	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	64.968.800,00	64.948.800,00	20.000,00	99,97	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.827.183.630,00**	**1.777.623.260,00**	**49.560.370,00**	**97,29**	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.393.696.630,00	1.350.818.687,00	42.877.943,00	96,92	
	Belanja Operasi	1.393.696.630,00	1.350.818.687,00	42.877.943,00	96,92	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.393.696.630,00	1.350.818.687,00	42.877.943,00	96,92	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	433.487.000,00	426.804.573,00	6.682.427,00	98,46	
	Belanja Operasi	433.487.000,00	426.804.573,00	6.682.427,00	98,46	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	384.287.000,00	377.604.573,00	6.682.427,00	98,26	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**117.097.750,00**	**116.904.750,00**	**193.000,00**	**99,84**	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	5.997.650,00	5.997.650,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	5.997.650,00	5.997.650,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	5.997.650,00	5.997.650,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	54.150.000,00	54.150.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	54.150.000,00	54.150.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	54.150.000,00	54.150.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	7.000.100,00	6.997.100,00	3.000,00	99,96	
	Belanja Operasi	7.000.100,00	6.997.100,00	3.000,00	99,96	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	7.000.100,00	6.997.100,00	3.000,00	99,96	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	49.950.000,00	49.760.000,00	190.000,00	99,62	
	Belanja Operasi	49.950.000,00	49.760.000,00	190.000,00	99,62	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	49.950.000,00	49.760.000,00	190.000,00	99,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.11 . 4.11.04 . 00 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**39.870.275,00**	**39.186.275,00**	**684.000,00**	**98,28**	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 07 . 02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	21.870.000,00	21.191.000,00	679.000,00	96,90	
	Belanja Operasi	870.000,00	870.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	870.000,00	870.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal	21.000.000,00	20.321.000,00	679.000,00	96,77	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.000.000,00	20.321.000,00	679.000,00	96,77	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 07 . 06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	18.000.275,00	17.995.275,00	5.000,00	99,97	
	Belanja Operasi	1.737.275,00	1.737.275,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 06 . 09 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	870.000,00	870.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	867.275,00	867.275,00	0,00	100,00	
	Belanja Modal	16.263.000,00	16.258.000,00	5.000,00	99,97	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 07 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.263.000,00	16.258.000,00	5.000,00	99,97	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49.000.000,00**	**48.980.000,00**	**20.000,00**	**99,96**	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	49.000.000,00	48.980.000,00	20.000,00	99,96	
	Belanja Operasi	49.000.000,00	48.980.000,00	20.000,00	99,96	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	48.980.000,00	20.000,00	99,96	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	75.153.000,00	74.203.000,00	950.000,00	98,74	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	40.653.000,00	40.153.000,00	500.000,00	98,77	
	Belanja Operasi	40.653.000,00	40.153.000,00	500.000,00	98,77	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	40.653.000,00	40.153.000,00	500.000,00	98,77	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 09 . 10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	19.500.000,00	19.050.000,00	450.000,00	97,69	
	Belanja Operasi	19.500.000,00	19.050.000,00	450.000,00	97,69	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 09 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	19.050.000,00	450.000,00	97,69	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**29.140.000,00**	**29.140.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 18	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**29.140.000,00**	**29.140.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 18 . 03	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	29.140.000,00	29.140.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	29.140.000,00	29.140.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	29.140.000,00	29.140.000,00	0,00	100,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**35.565.000,00**	**35.565.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 19	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**35.565.000,00**	**35.565.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 19 . 01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	23.965.000,00	23.965.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	23.965.000,00	23.965.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	23.965.000,00	23.965.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 19 . 03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	Belanja Operasi	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	100,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**26.520.000,00**	**27.580.000,00**	**(1.060.000,00)**	**104,00**	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 28	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**26.520.000,00**	**27.580.000,00**	**(1.060.000,00)**	**104,00**	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 28 . 18	*Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan*	26.520.000,00	27.580.000,00	(1.060.000,00)	104,00	
	Belanja Operasi	26.520.000,00	27.580.000,00	(1.060.000,00)	104,00	
4.11 . 4.11.04 . 00 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	26.520.000,00	27.580.000,00	(1.060.000,00)	104,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(2.264.498.455,00)**	**(2.214.131.085,00)**	**(50.367.370,00)**	**97,73**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 11 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 11 . 05 Kecamatan Siberut Selatan
Sub. Unit Organisasi : 4 . 11 . 05 . 01 Kecamatan Siberut Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.11 . 4.11.05 . 01 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**2.758.145.615,00**	**2.652.872.192,00**	**105.273.423,00**	**96,18**	
	KECAMATAN	**2.758.145.615,00**	**2.652.872.192,00**	**105.273.423,00**	**96,18**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.636.410.615,00**	**2.533.842.192,00**	**102.568.423,00**	**96,11**	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**97.590.000,00**	**96.830.000,00**	**760.000,00**	**99,22**	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 01 . 07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	97.590.000,00	96.830.000,00	760.000,00	99,22	
	Belanja Operasi	97.590.000,00	96.830.000,00	760.000,00	99,22	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	97.590.000,00	96.830.000,00	760.000,00	99,22	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.297.540.420,00**	**2.207.839.900,00**	**89.700.520,00**	**96,10**	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.783.600.420,00	1.694.547.900,00	89.052.520,00	95,01	
	Belanja Operasi	1.783.600.420,00	1.694.547.900,00	89.052.520,00	95,01	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.783.600.420,00	1.694.547.900,00	89.052.520,00	95,01	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	513.940.000,00	513.292.000,00	648.000,00	99,87	
	Belanja Operasi	513.940.000,00	513.292.000,00	648.000,00	99,87	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	54.300.000,00	53.850.000,00	450.000,00	99,17	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	459.640.000,00	459.442.000,00	198.000,00	99,96	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**144.473.320,00**	**136.592.720,00**	**7.880.600,00**	**94,55**	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	4.574.300,00	3.880.700,00	693.600,00	84,84	
	Belanja Operasi	4.574.300,00	3.880.700,00	693.600,00	84,84	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	4.574.300,00	3.880.700,00	693.600,00	84,84	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	47.985.020,00	41.915.020,00	6.070.000,00	87,35	
	Belanja Operasi	47.985.020,00	41.915.020,00	6.070.000,00	87,35	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	47.985.020,00	41.915.020,00	6.070.000,00	87,35	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	2.794.000,00	1.747.000,00	1.047.000,00	62,53	
	Belanja Operasi	2.794.000,00	1.747.000,00	1.047.000,00	62,53	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	2.794.000,00	1.747.000,00	1.047.000,00	62,53	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	89.120.000,00	89.050.000,00	70.000,00	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	Belanja Operasi	89.120.000,00	89.050.000,00	70.000,00	99,92	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	89.120.000,00	89.050.000,00	70.000,00	99,92	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**40.702.100,00**	**37.488.000,00**	**3.214.100,00**	**92,10**	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 07 . 10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	40.702.100,00	37.488.000,00	3.214.100,00	92,10	
	Belanja Modal	40.702.100,00	37.488.000,00	3.214.100,00	92,10	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.702.100,00	37.488.000,00	3.214.100,00	92,10	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.400.000,00**	**8.386.797,00**	**13.203,00**	**99,84**	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	8.400.000,00	8.386.797,00	13.203,00	99,84	
	Belanja Operasi	8.400.000,00	8.386.797,00	13.203,00	99,84	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.386.797,00	13.203,00	99,84	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**47.704.775,00**	**46.704.775,00**	**1.000.000,00**	**97,90**	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
	Belanja Operasi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	14.704.775,00	14.704.775,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	14.704.775,00	14.704.775,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	14.704.775,00	14.704.775,00	0,00	100,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**24.260.000,00**	**22.905.000,00**	**1.355.000,00**	**94,41**	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 18	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**24.260.000,00**	**22.905.000,00**	**1.355.000,00**	**94,41**	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 18 . 03	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	24.260.000,00	22.905.000,00	1.355.000,00	94,41	
	Belanja Operasi	24.260.000,00	22.905.000,00	1.355.000,00	94,41	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	24.260.000,00	22.905.000,00	1.355.000,00	94,41	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**62.855.000,00**	**62.225.000,00**	**630.000,00**	**99,00**	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 19	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**62.855.000,00**	**62.225.000,00**	**630.000,00**	**99,00**	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 19 . 01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 19 . 03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	42.855.000,00	42.225.000,00	630.000,00	98,53	
	Belanja Operasi	42.855.000,00	42.225.000,00	630.000,00	98,53	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	42.855.000,00	42.225.000,00	630.000,00	98,53	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.11 . 4.11.05 . 01 . 27	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 27 . 01	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI*	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**34.620.000,00**	**33.900.000,00**	**720.000,00**	**97,92**	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 28	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**34.620.000,00**	**33.900.000,00**	**720.000,00**	**97,92**	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 28 . 09	*Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*	34.620.000,00	33.900.000,00	720.000,00	97,92	
	Belanja Operasi	34.620.000,00	33.900.000,00	720.000,00	97,92	
4.11 . 4.11.05 . 01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	34.620.000,00	33.900.000,00	720.000,00	97,92	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(2.758.145.615,00)**	**(2.652.872.192,00)**	**(105.273.423,00)**	**96,18**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 11 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 11 . 06 Kecamatan Sipora Utara
Sub. Unit Organisasi : 5 . 11 . 06. 01 Kecamatan Sipora Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.11 . 4.11.06 . 00 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**2.813.221.798,00**	**2.704.713.234,00**	**108.508.564,00**	**96,14**	
	KECAMATAN	**2.813.221.798,00**	**2.704.713.234,00**	**108.508.564,00**	**96,14**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.637.196.498,00**	**2.530.387.934,00**	**106.808.564,00**	**95,95**	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**82.395.000,00**	**80.360.000,00**	**2.035.000,00**	**97,53**	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 01 . 07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	82.395.000,00	80.360.000,00	2.035.000,00	97,53	
	Belanja Operasi	82.395.000,00	80.360.000,00	2.035.000,00	97,53	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	82.395.000,00	80.360.000,00	2.035.000,00	97,53	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.292.170.676,00**	**2.197.924.250,00**	**94.246.426,00**	**95,89**	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.749.842.676,00	1.664.555.019,00	85.287.657,00	95,13	
	Belanja Operasi	1.749.842.676,00	1.664.555.019,00	85.287.657,00	95,13	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.749.842.676,00	1.664.555.019,00	85.287.657,00	95,13	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	542.328.000,00	533.369.231,00	8.958.769,00	98,35	
	Belanja Operasi	542.328.000,00	533.369.231,00	8.958.769,00	98,35	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	66.120.000,00	64.470.000,00	1.650.000,00	97,50	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	476.208.000,00	468.899.231,00	7.308.769,00	98,47	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**144.811.100,00**	**144.594.550,00**	**216.550,00**	**99,85**	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	6.984.500,00	6.904.500,00	80.000,00	98,85	
	Belanja Operasi	6.984.500,00	6.904.500,00	80.000,00	98,85	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	6.984.500,00	6.904.500,00	80.000,00	98,85	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	62.769.500,00	62.691.950,00	77.550,00	99,88	
	Belanja Operasi	62.769.500,00	62.691.950,00	77.550,00	99,88	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 06 . 04 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	62.089.500,00	62.011.950,00	77.550,00	99,88	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	15.618.100,00	15.608.100,00	10.000,00	99,94	
	Belanja Operasi	15.618.100,00	15.608.100,00	10.000,00	99,94	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	15.618.100,00	15.608.100,00	10.000,00	99,94	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	59.439.000,00	59.390.000,00	49.000,00	99,92	
	Belanja Operasi	59.439.000,00	59.390.000,00	49.000,00	99,92	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	59.439.000,00	59.390.000,00	49.000,00	99,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.11 . 4.11.06 . 00 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**22.870.422,00**	**22.850.000,00**	**20.422,00**	**99,91**	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 07 . 06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	22.870.422,00	22.850.000,00	20.422,00	99,91	
	Belanja Modal	22.870.422,00	22.850.000,00	20.422,00	99,91	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 07 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.870.422,00	22.850.000,00	20.422,00	99,91	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**34.688.300,00**	**26.425.634,00**	**8.262.666,00**	**76,18**	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	30.000.000,00	21.744.634,00	8.255.366,00	72,48	
	Belanja Operasi	30.000.000,00	21.744.634,00	8.255.366,00	72,48	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	21.744.634,00	8.255.366,00	72,48	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 08 . 04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	4.688.300,00	4.681.000,00	7.300,00	99,84	
	Belanja Operasi	4.688.300,00	4.681.000,00	7.300,00	99,84	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	4.688.300,00	4.681.000,00	7.300,00	99,84	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60.261.000,00**	**58.233.500,00**	**2.027.500,00**	**96,64**	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	55.881.000,00	53.853.500,00	2.027.500,00	96,37	
	Belanja Operasi	55.881.000,00	53.853.500,00	2.027.500,00	96,37	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	55.881.000,00	53.853.500,00	2.027.500,00	96,37	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	100,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	52.735.000,00	52.295.000,00	440.000,00	99,17	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 18	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**52.735.000,00**	**52.295.000,00**	**440.000,00**	**99,17**	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 18 . 02	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan*	18.300.000,00	17.960.000,00	340.000,00	98,14	
	Belanja Operasi	18.300.000,00	17.960.000,00	340.000,00	98,14	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	17.960.000,00	340.000,00	98,14	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 18 . 03	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	34.435.000,00	34.335.000,00	100.000,00	99,71	
	Belanja Operasi	34.435.000,00	34.335.000,00	100.000,00	99,71	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	34.435.000,00	34.335.000,00	100.000,00	99,71	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**21.084.800,00**	**21.084.800,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 19	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**21.084.800,00**	**21.084.800,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 19 . 01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	16.134.800,00	16.134.800,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	16.134.800,00	16.134.800,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	16.134.800,00	16.134.800,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 19 . 03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	100,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**16.952.500,00**	**16.952.500,00**	**0,00**	**100,00**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.11 . 4.11.06 . 00 . 27	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**16.952.500,00**	**16.952.500,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 27 . 01	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI*	16.952.500,00	16.952.500,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	16.952.500,00	16.952.500,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	16.952.500,00	16.952.500,00	0,00	100,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**85.253.000,00**	**83.993.000,00**	**1.260.000,00**	**98,52**	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 28	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**85.253.000,00**	**83.993.000,00**	**1.260.000,00**	**98,52**	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 28 . 03	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	29.919.000,00	29.379.000,00	540.000,00	98,20	
	Belanja Operasi	29.919.000,00	29.379.000,00	540.000,00	98,20	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	29.919.000,00	29.379.000,00	540.000,00	98,20	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 28 . 06	*Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	55.334.000,00	54.614.000,00	720.000,00	98,70	
	Belanja Operasi	55.334.000,00	54.614.000,00	720.000,00	98,70	
4.11 . 4.11.06 . 00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	55.334.000,00	54.614.000,00	720.000,00	98,70	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(2.813.221.798,00)**	**(2.704.713.234,00)**	**(108.508.564,00)**	**96,14**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan	**:** 4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan	**:** 4 . 11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi	**:** 4 . 11 . 07	Kecamatan Sipora Selatan
Sub Unit Organisasi	**:** 4 . 11 . 07 . 01	Kecamatan Sipora Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.11 . 4.11.07 . 01 . 01 . 07 . 5	**BELANJA DAERAH**	**3.300.511.072,00**	**3.092.057.069,00**	**208.454.003,00**	**93,68**	
	KECAMATAN	**3.300.511.072,00**	**3.092.057.069,00**	**208.454.003,00**	**93,68**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**3.179.705.876,00**	**3.008.270.269,00**	**171.435.607,00**	**94,61**	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**102.540.000,00**	**102.480.000,00**	**60.000,00**	**99,94**	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 01 . 07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	102.540.000,00	102.480.000,00	60.000,00	99,94	
	Belanja Operasi	102.540.000,00	102.480.000,00	60.000,00	99,94	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 01 . 07 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.540.000,00	102.480.000,00	60.000,00	99,94	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.899.530.976,00**	**2.793.837.039,00**	**105.693.937,00**	**96,35**	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 02 . 01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.226.909.976,00	2.151.111.039,00	75.798.937,00	96,60	
	Belanja Operasi	2.226.909.976,00	2.151.111.039,00	75.798.937,00	96,60	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.226.909.976,00	2.151.111.039,00	75.798.937,00	96,60	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	672.621.000,00	642.726.000,00	29.895.000,00	95,56	
	Belanja Operasi	672.621.000,00	642.726.000,00	29.895.000,00	95,56	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	112.320.000,00	88.320.000,00	24.000.000,00	78,63	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 02 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	560.301.000,00	554.406.000,00	5.895.000,00	98,95	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**153.634.900,00**	**109.470.480,00**	**44.164.420,00**	**71,25**	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	5.970.000,00	3.550.000,00	2.420.000,00	59,46	
	Belanja Operasi	5.970.000,00	3.550.000,00	2.420.000,00	59,46	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 06 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.970.000,00	3.550.000,00	2.420.000,00	59,46	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	77.964.900,00	57.866.480,00	20.098.420,00	74,22	
	Belanja Operasi	77.964.900,00	57.866.480,00	20.098.420,00	74,22	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 06 . 04 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.964.900,00	57.866.480,00	20.098.420,00	74,22	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	69.700.000,00	48.054.000,00	21.646.000,00	68,94	
	Belanja Operasi	69.700.000,00	48.054.000,00	21.646.000,00	68,94	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 06 . 09 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.700.000,00	48.054.000,00	21.646.000,00	68,94	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**24.000.000,00**	**2.482.750,00**	**21.517.250,00**	**10,34**	

4.11 . 4.11.07 . 01 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	24.000.000,00	2.482.750,00	21.517.250,00	10,34	
	Belanja Operasi	24.000.000,00	2.482.750,00	21.517.250,00	10,34	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 08 . 02 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	2.482.750,00	21.517.250,00	10,34	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**63.437.696,00**	**44.389.300,00**	**19.048.396,00**	**69,97**	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 18	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**63.437.696,00**	**44.389.300,00**	**19.048.396,00**	**69,97**	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 18 . 03	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	63.437.696,00	44.389.300,00	19.048.396,00	69,97	
	Belanja Operasi	44.405.800,00	25.359.300,00	19.046.500,00	57,11	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 18 . 03 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.405.800,00	25.359.300,00	19.046.500,00	57,11	
	Belanja Modal	19.031.896,00	19.030.000,00	1.896,00	99,99	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.031.896,00	19.030.000,00	1.896,00	99,99	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**44.690.000,00**	**27.220.000,00**	**17.470.000,00**	**60,91**	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 19	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**44.690.000,00**	**27.220.000,00**	**17.470.000,00**	**60,91**	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 19 . 01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	44.690.000,00	27.220.000,00	17.470.000,00	60,91	
	Belanja Operasi	44.690.000,00	27.220.000,00	17.470.000,00	60,91	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 19 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.690.000,00	27.220.000,00	17.470.000,00	60,91	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**12.677.500,00**	**12.177.500,00**	**500.000,00**	**96,06**	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 27	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**12.677.500,00**	**12.177.500,00**	**500.000,00**	**96,06**	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 27 . 01	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K*	12.677.500,00	12.177.500,00	500.000,00	96,06	
	Belanja Operasi	12.677.500,00	12.177.500,00	500.000,00	96,06	
4.11 . 4.11.07 . 01 . 27 . 01 . 5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.677.500,00	12.177.500,00	500.000,00	96,06	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(3.300.511.072,00)**	**(3.092.057.069,00)**	**(208.454.003,00)**	**93,68**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 11 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 11 . 08 Kecamatan Pagai Utara
Sub. Unit Organisasi : 4 . 11 . 08 . 01 Kecamatan Pagai Utara

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.11 . 4.11.08 . 00 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**2.441.386.748,00**	**2.293.721.292,00**	**147.665.456,00**	**93,95**	
	KECAMATAN	**2.441.386.748,00**	**2.293.721.292,00**	**147.665.456,00**	**93,95**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.301.386.748,00**	**2.156.108.792,00**	**145.277.956,00**	**93,69**	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.058.220.598,00**	**1.976.210.092,00**	**82.010.506,00**	**96,02**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.480.520.598,00	1.403.167.992,00	77.352.606,00	94,78	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.480.520.598,00	1.403.167.992,00	77.352.606,00	94,78	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	34.200.000,00	573.042.100,00	-538.842.100,00	1.675,56	
	Belanja Operasi	34.200.000,00	573.042.100,00	-538.842.100,00	1.675,56	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	577.700.000,00	573.042.100,00	4.657.900,00	99,19	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**106.221.150,00**	**107.104.700,00**	**-883.550,00**	**100,83**	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	4.050.750,00	4.010.800,00	39.950,00	99,01	
	Belanja Operasi	4.050.750,00	4.010.800,00	39.950,00	99,01	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	4.050.750,00	4.010.800,00	39.950,00	99,01	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	36.186.400,00	34.529.100,00	1.657.300,00	95,42	
	Belanja Operasi	36.186.400,00	34.529.100,00	1.657.300,00	95,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.11 . 4.11.08 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	36.186.400,00	34.529.100,00	1.657.300,00	95,42	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	6.259.000,00	6.179.800,00	79.200,00	98,73	
	Belanja Operasi	6.259.000,00	6.179.800,00	79.200,00	98,73	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	6.259.000,00	6.179.800,00	79.200,00	98,73	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	59.725.000,00	62.385.000,00	-2.660.000,00	104,45	
	Belanja Operasi	59.725.000,00	62.385.000,00	-2.660.000,00	104,45	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	59.725.000,00	62.385.000,00	-2.660.000,00	104,45	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**68.919.000,00**	**57.999.000,00**	**10.920.000,00**	**84,16**	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 07 . 01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	68.919.000,00	57.999.000,00	10.920.000,00	84,16	
	Belanja Modal	67.819.000,00	56.899.000,00	10.920.000,00	83,90	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.819.000,00	56.899.000,00	10.920.000,00	83,90	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.650.000,00**	**1.825.000,00**	**1.825.000,00**	**50,00**	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 08 . 03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	3.650.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	50,00	
	Belanja Operasi	3.650.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	50,00	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	1.825.000,00	1.825.000,00	50,00	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**64.376.000,00**	**12.970.000,00**	**51.406.000,00**	**20,15**	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 09 . 03	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar*	14.500.000,00	12.970.000,00	1.530.000,00	89,45	
	Belanja Operasi	14.500.000,00	12.970.000,00	1.530.000,00	89,45	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	12.970.000,00	1.530.000,00	89,45	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	49.876.000,00	0,00	49.876.000,00	0,00	
	Belanja Operasi	49.876.000,00	0,00	49.876.000,00	0,00	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	49.876.000,00	0,00	49.876.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**56.800.000,00**	**55.922.500,00**	**877.500,00**	**98,46**	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 19	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**56.800.000,00**	**55.922.500,00**	**877.500,00**	**98,46**	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 19 . 01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 19 . 03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	48.300.000,00	47.422.500,00	877.500,00	98,18	
	Belanja Operasi	48.300.000,00	47.422.500,00	877.500,00	98,18	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	48.300.000,00	47.422.500,00	877.500,00	98,18	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 27	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 27 . 01	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI*	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**74.700.000,00**	**73.190.000,00**	**1.510.000,00**	**97,98**	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 28	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**74.700.000,00**	**73.190.000,00**	**1.510.000,00**	**97,98**	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 28 . 03	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	35.940.000,00	35.910.000,00	30.000,00	99,92	
	Belanja Operasi	35.940.000,00	35.910.000,00	30.000,00	99,92	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	35.940.000,00	35.910.000,00	30.000,00	99,92	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 28 . 18	*Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan*	38.760.000,00	37.280.000,00	1.480.000,00	96,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	Belanja Operasi	38.760.000,00	37.280.000,00	1.480.000,00	96,18	
4.11 . 4.11.08 . 00 . 28 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	38.760.000,00	37.280.000,00	1.480.000,00	96,18	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(2.441.386.748,00)**	**(2.293.721.292,00)**	**(147.665.456,00)**	**93,95**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 11 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 11 . 09 Kecamatan Sikakap
Unit Organisasi : 4 . 11 . 09 .01 Kecamatan Sikakap

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.11 . 4.11.09 . 00 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**2.914.284.117,00**	**2.832.635.342,00**	**81.648.775,00**	**97,20**	
	KECAMATAN	**2.914.284.117,00**	**2.832.635.342,00**	**81.648.775,00**	**97,20**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.777.186.117,00**	**2.696.674.842,00**	**80.511.275,00**	**97,10**	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**41.580.000,00**	**41.520.000,00**	**60.000,00**	**99,86**	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 01 . 07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	41.580.000,00	41.520.000,00	60.000,00	99,86	
	Belanja Operasi	41.580.000,00	41.520.000,00	60.000,00	99,86	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	41.580.000,00	41.520.000,00	60.000,00	99,86	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.578.460.735,00**	**2.507.263.939,00**	**71.196.796,00**	**97,24**	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.196.800.735,00	2.126.519.939,00	70.280.796,00	96,80	
	Belanja Operasi	2.196.800.735,00	2.126.519.939,00	70.280.796,00	96,80	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.196.800.735,00	2.126.519.939,00	70.280.796,00	96,80	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	381.660.000,00	380.744.000,00	916.000,00	99,76	
	Belanja Operasi	381.660.000,00	380.744.000,00	916.000,00	99,76	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 02 . 02 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	337.260.000,00	336.344.000,00	916.000,00	99,73	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**101.103.300,00**	**98.508.260,00**	**2.595.040,00**	**97,43**	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	30.003.300,00	27.408.260,00	2.595.040,00	91,35	
	Belanja Operasi	30.003.300,00	27.408.260,00	2.595.040,00	91,35	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	30.003.300,00	27.408.260,00	2.595.040,00	91,35	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**33.000.000,00**	**26.340.561,00**	**6.659.439,00**	**79,82**	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	33.000.000,00	26.340.561,00	6.659.439,00	79,82	
	Belanja Operasi	33.000.000,00	26.340.561,00	6.659.439,00	79,82	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	26.340.561,00	6.659.439,00	79,82	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**23.042.082,00**	**23.042.082,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	Belanja Operasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 09 . 09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	21.042.082,00	21.042.082,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	21.042.082,00	21.042.082,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	21.042.082,00	21.042.082,00	0,00	100,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**29.035.000,00**	**28.370.000,00**	**665.000,00**	**97,71**	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 18	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**29.035.000,00**	**28.370.000,00**	**665.000,00**	**97,71**	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 18 . 03	*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*	29.035.000,00	28.370.000,00	665.000,00	97,71	
	Belanja Operasi	29.035.000,00	28.370.000,00	665.000,00	97,71	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	29.035.000,00	28.370.000,00	665.000,00	97,71	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**47.650.500,00**	**47.178.000,00**	**472.500,00**	**99,01**	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 19	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**47.650.500,00**	**47.178.000,00**	**472.500,00**	**99,01**	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 19 . 01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	20.000.500,00	19.990.500,00	10.000,00	99,95	
	Belanja Operasi	20.000.500,00	19.990.500,00	10.000,00	99,95	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	20.000.500,00	19.990.500,00	10.000,00	99,95	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 19 . 03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	27.650.000,00	27.187.500,00	462.500,00	98,33	
	Belanja Operasi	27.650.000,00	27.187.500,00	462.500,00	98,33	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	27.650.000,00	27.187.500,00	462.500,00	98,33	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**14.662.500,00**	**14.662.500,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 27	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**14.662.500,00**	**14.662.500,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 27 . 01	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI*	14.662.500,00	14.662.500,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	14.662.500,00	14.662.500,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	14.662.500,00	14.662.500,00	0,00	100,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**45.750.000,00**	**45.750.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 28	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**45.750.000,00**	**45.750.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 28 . 03	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.09 . 00 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	100,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(2.914.284.117,00)**	**(2.832.635.342,00)**	**(81.648.775,00)**	**97,20**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 11 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4 . 11 . 10 Kecamatan Pagai Selatan
Sub. Unit Organisasi : 4 . 11 . 10 . 01 Kecamatan Pagai Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.11 . 4.11.10 . 00 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**2.824.126.430,00**	**2.719.120.164,00**	**105.006.266,00**	**96,28**	
	KECAMATAN	**2.824.126.430,00**	**2.719.120.164,00**	**105.006.266,00**	**96,28**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.654.635.430,00**	**2.552.974.664,00**	**101.660.766,00**	**96,17**	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**87.490.000,00**	**87.455.000,00**	**35.000,00**	**99,96**	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 01 . 07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	87.490.000,00	87.455.000,00	35.000,00	99,96	
	Belanja Operasi	87.490.000,00	87.455.000,00	35.000,00	99,96	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	87.490.000,00	87.455.000,00	35.000,00	99,96	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.157.079.638,00**	**2.066.675.155,00**	**90.404.483,00**	**95,81**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.509.946.638,00	1.428.428.423,00	81.518.215,00	94,60	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 02 . 01 . 5 . 1 . 1	**Belanja Pegawai**	1.509.946.638,00	1.428.428.423,00	81.518.215,00	94,60	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	647.133.000,00	638.246.732,00	8.886.268,00	98,63	
	Belanja Operasi	647.133.000,00	638.246.732,00	8.886.268,00	98,63	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	647.133.000,00	638.246.732,00	8.886.268,00	98,63	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**284.815.792,00**	**274.770.509,00**	**10.045.283,00**	**96,47**	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	8.685.800,00	8.639.000,00	46.800,00	99,46	
	Belanja Operasi	8.685.800,00	8.639.000,00	46.800,00	99,46	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	8.685.800,00	8.639.000,00	46.800,00	99,46	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 06 . 02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	82.496.192,00	82.010.000,00	486.192,00	99,41	
	Belanja Operasi	6.700.000,00	6.400.000,00	300.000,00	95,52	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	6.400.000,00	300.000,00	95,52	
	Belanja Modal	74.436.192,00	74.250.000,00	186.192,00	99,75	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.436.192,00	74.250.000,00	186.192,00	99,75	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	31.015.800,00	30.985.800,00	30.000,00	99,90	
	Belanja Operasi	31.015.800,00	30.985.800,00	30.000,00	99,90	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	31.015.800,00	30.985.800,00	30.000,00	99,90	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	162.618.000,00	153.135.709,00	9.482.291,00	94,17	
	Belanja Operasi	162.618.000,00	153.135.709,00	9.482.291,00	94,17	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	162.618.000,00	153.135.709,00	9.482.291,00	94,17	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**76.580.000,00**	**75.678.000,00**	**902.000,00**	**98,82**	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.11 . 4.11.10 . 00 . 07 . 05	*Pengadaan Mebel*	76.580.000,00	75.678.000,00	902.000,00	98,82	
	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Belanja Modal	75.900.000,00	74.998.000,00	902.000,00	98,81	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.900.000,00	74.998.000,00	902.000,00	98,81	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.800.000,00**	**4.526.000,00**	**274.000,00**	**94,29**	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	4.800.000,00	4.526.000,00	274.000,00	94,29	
	Belanja Operasi	4.800.000,00	4.526.000,00	274.000,00	94,29	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.526.000,00	274.000,00	94,29	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**43.870.000,00**	**43.870.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 09 . 02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	35.960.000,00	35.960.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	35.960.000,00	35.960.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	35.960.000,00	35.960.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	7.910.000,00	7.910.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	7.910.000,00	7.910.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	7.910.000,00	7.910.000,00	0,00	100,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**39.973.000,00**	**39.918.000,00**	**55.000,00**	**99,86**	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 19	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**39.973.000,00**	**39.918.000,00**	**55.000,00**	**99,86**	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 19 . 01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	25.290.000,00	25.290.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	25.290.000,00	25.290.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	25.290.000,00	25.290.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 19 . 03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	14.683.000,00	14.628.000,00	55.000,00	99,63	
	Belanja Operasi	14.683.000,00	14.628.000,00	55.000,00	99,63	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	14.683.000,00	14.628.000,00	55.000,00	99,63	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**10.625.000,00**	**10.625.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 27	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**10.625.000,00**	**10.625.000,00**	**0,00**	**100,00**	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 27 . 01	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI*	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	100,00	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	100,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**118.893.000,00**	**115.602.500,00**	**3.290.500,00**	**97,23**	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 28	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**118.893.000,00**	**115.602.500,00**	**3.290.500,00**	**97,23**	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 28 . 03	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	54.950.000,00	51.862.500,00	3.087.500,00	94,38	
	Belanja Operasi	54.950.000,00	51.862.500,00	3.087.500,00	94,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.11 . 4.11.10 . 00 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	54.950.000,00	51.862.500,00	3.087.500,00	94,38	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 28 . 06	*Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	63.943.000,00	63.740.000,00	203.000,00	99,68	
	Belanja Operasi	63.943.000,00	63.740.000,00	203.000,00	99,68	
4.11 . 4.11.10 . 00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	63.943.000,00	63.740.000,00	203.000,00	99,68	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(2.824.126.430,00)**	**(2.719.120.164,00)**	**(105.006.266,00)**	**96,28**	

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4 . 12 Kesatuan Bangsa dan Politik
Unit Organisasi : 4 . 12 . 02 KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.12 . 4.12.02 . 00 . 00 . 00 . 5	**BELANJA DAERAH**	**2.700.841.949,00**	**2.562.070.340,00**	**138.771.609,00**	**94,86**	
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	**2.700.841.949,00**	**2.562.070.340,00**	**138.771.609,00**	**94,86**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1.738.640.149,00**	**1.625.264.640,00**	**113.375.509,00**	**93,48**	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.503.370.149,00**	**1.413.515.120,00**	**89.855.029,00**	**94,02**	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	1.189.794.149,00	1.136.505.120,00	53.289.029,00	95,52	
	Belanja Operasi	1.189.794.149,00	1.136.505.120,00	53.289.029,00	95,52	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.189.794.149,00	1.136.505.120,00	53.289.029,00	95,52	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 02 . 02	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	313.576.000,00	277.010.000,00	36.566.000,00	88,34	
	Belanja Operasi	313.576.000,00	277.010.000,00	36.566.000,00	88,34	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	313.576.000,00	277.010.000,00	36.566.000,00	88,34	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**199.349.000,00**	**184.936.448,00**	**14.412.552,00**	**92,77**	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 06 . 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	4.995.100,00	4.995.100,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	4.995.100,00	4.995.100,00	0,00	100,00	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	4.995.100,00	4.995.100,00	0,00	100,00	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 06 . 04	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	68.573.300,00	68.139.300,00	434.000,00	99,37	
	Belanja Operasi	68.573.300,00	68.139.300,00	434.000,00	99,37	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	68.573.300,00	68.139.300,00	434.000,00	99,37	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 06 . 05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	10.002.600,00	9.802.600,00	200.000,00	98,00	
	Belanja Operasi	10.002.600,00	9.802.600,00	200.000,00	98,00	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	10.002.600,00	9.802.600,00	200.000,00	98,00	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 06 . 06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	15.000.000,00	14.800.000,00	200.000,00	98,67	
	Belanja Operasi	15.000.000,00	14.800.000,00	200.000,00	98,67	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.800.000,00	200.000,00	98,67	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 06 . 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	100.778.000,00	87.199.448,00	13.578.552,00	86,53	
	Belanja Operasi	100.778.000,00	87.199.448,00	13.578.552,00	86,53	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	100.778.000,00	87.199.448,00	13.578.552,00	86,53	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13.800.000,00**	**7.181.072,00**	**6.618.928,00**	**52,04**	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 08 . 02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	13.800.000,00	7.181.072,00	6.618.928,00	52,04	
	Belanja Operasi	13.800.000,00	7.181.072,00	6.618.928,00	52,04	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	7.181.072,00	6.618.928,00	52,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
4.12 . 4.12.02 . 00 . 09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**22.121.000,00**	**19.632.000,00**	**2.489.000,00**	**88,75**	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 09 . 01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	17.001.000,00	14.512.000,00	2.489.000,00	85,36	
	Belanja Operasi	17.001.000,00	14.512.000,00	2.489.000,00	85,36	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	17.001.000,00	14.512.000,00	2.489.000,00	85,36	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 09 . 06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	100,00	
	Belanja Operasi	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	100,00	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	100,00	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**642.228.000,00**	**642.103.000,00**	**125.000,00**	**99,98**	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 16	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan**	**642.228.000,00**	**642.103.000,00**	**125.000,00**	**99,98**	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 16 . 04	*Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	642.228.000,00	642.103.000,00	125.000,00	99,98	
	Belanja Operasi	642.228.000,00	642.103.000,00	125.000,00	99,98	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.875.000,00	125.000,00	99,17	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	627.228.000,00	627.228.000,00	0,00	100,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**90.658.000,00**	**87.958.200,00**	**2.699.800,00**	**97,02**	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 17	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**90.658.000,00**	**87.958.200,00**	**2.699.800,00**	**97,02**	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 17 . 03	*Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	90.658.000,00	87.958.200,00	2.699.800,00	97,02	
	Belanja Operasi	90.658.000,00	87.958.200,00	2.699.800,00	97,02	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	90.658.000,00	87.958.200,00	2.699.800,00	97,02	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**75.252.300,00**	**68.399.800,00**	**6.852.500,00**	**90,89**	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 18	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**75.252.300,00**	**68.399.800,00**	**6.852.500,00**	**90,89**	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 18 . 03	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	75.252.300,00	68.399.800,00	6.852.500,00	90,89	
	Belanja Operasi	75.252.300,00	68.399.800,00	6.852.500,00	90,89	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	75.252.300,00	68.399.800,00	6.852.500,00	90,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 3 - 4	6	7
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**154.063.500,00**	**138.344.700,00**	**15.718.800,00**	**89,80**	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 19	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**154.063.500,00**	**138.344.700,00**	**15.718.800,00**	**89,80**	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 19 . 03	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	55.640.000,00	51.716.200,00	3.923.800,00	92,95	
	Belanja Operasi	55.640.000,00	51.716.200,00	3.923.800,00	92,95	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	55.640.000,00	51.716.200,00	3.923.800,00	92,95	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 19 . 04	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	46.887.500,00	36.330.000,00	10.557.500,00	77,48	
	Belanja Operasi	46.887.500,00	36.330.000,00	10.557.500,00	77,48	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	46.887.500,00	36.330.000,00	10.557.500,00	77,48	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 19 . 05	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan*	51.536.000,00	50.298.500,00	1.237.500,00	97,60	
	Belanja Operasi	51.536.000,00	50.298.500,00	1.237.500,00	97,60	
4.12 . 4.12.02 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Barang dan Jasa	51.536.000,00	50.298.500,00	1.237.500,00	97,60	
SURPLUS / (DEFISIT)		**(2.700.841.949,00)**	**(2.562.070.340,00)**	**(138.771.609,00)**	**94,86**	

Tuapejat, 19 Agustus 2022
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS. D

Lampiran I.4 : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	**01**					**PENDIDIKAN**								
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.2.00**				**DINAS PENDIDIKAN**	**152.682.010.332,00**	**149.004.961.986,00**	**22.962.595.016,00**	**20.802.742.416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.2.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**33.019.149.200,00**	**31.311.695.277,00**	**22.962.595.016,00**	**20.802.742.416,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.2.00**	**02**	**2.01**	**00**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**19.317.629.600,00**	**18.447.176.702,00**	**14.985.657.920,00**	**12.858.181.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	59.630.000,00	41.385.000,00	274.160.800,00	100.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	150.024.000,00	119.285.000,00	2.290.508.800,00	2.288.178.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	109.791.200,00	77.420.000,00	1.103.780.000,00	866.359.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	75.208.400,00	42.648.400,00	1.379.430.000,00	1.371.859.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	245.827.400,00	222.857.400,00	1.694.012.320,00	1.690.888.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	37.729.000,00	8.180.000,00	446.092.000,00	445.842.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	83.592.000,00	70.242.000,00	442.728.000,00	441.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	10.158.120.000,00	9.575.920.439,00	7.354.946.000,00	5.653.069.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	203.719.300,00	190.340.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.887.498.000,00	7.837.005.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	52.228.300,00	49.607.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	108.091.000,00	102.350.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	146.171.000,00	109.934.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.2.00**	**02**	**2.02**	**00**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**11.362.080.000,00**	**11.068.797.515,00**	**7.948.016.400,00**	**7.916.760.426,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	82.977.000,00	45.650.000,00	776.167.200,00	775.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	870.000,00	680.000,00	28.380.000,00	27.802.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	136.222.000,00	102.917.592,00	523.636.800,00	523.408.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	137.470.000,00	118.725.000,00	1.535.461.200,00	1.518.190.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	173.735.000,00	148.975.000,00	790.666.800,00	790.472.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	58.110.000,00	43.160.000,00	234.057.600,00	231.583.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	150.880.000,00	93.055.000,00	1.645.575.600,00	1.644.902.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	53.770.000,00	46.650.000,00	232.819.200,00	232.620.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	37.345.000,00	37.160.000,00	153.252.000,00	144.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	5.012.161.000,00	5.011.041.423,00	2.028.000.000,00	2.027.743.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	212.631.000,00	191.392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	83.581.000,00	74.611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.753.186.000,00	4.722.447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	184.602.000,00	157.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	100.759.000,00	100.371.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	183.781.000,00	174.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.2.00**	**02**	**2.03**	**00**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**1.043.913.100,00**	**794.809.560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	76.820.160,00	76.170.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	235.049.200,00	192.253.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	160.243.740,00	159.536.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	571.800.000,00	366.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.2.00**	**02**	**2.04**	**00**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**1.295.526.500,00**	**1.000.911.500,00**	**28.920.696,00**	**27.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	151.226.500,00	145.111.500,00	28.920.696,00	27.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.144.300.000,00	855.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.2.00**	**04**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**99.148.000,00**	**81.568.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.2.00**	**04**	**2.01**	**00**	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**99.148.000,00**	**81.568.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	99.148.000,00	81.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**01**	**1.01.2.22.0.00.2.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**119.563.713.132,00**	**117.611.698.709,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	115.730.962.782,00	114.121.188.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	113.231.518.782,00	111.844.232.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.499.444.000,00	2.276.956.000,00						
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	01	2.05	00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	446.043.000,00	293.245.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	446.043.000,00	293.245.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	704.069.350,00	614.407.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	409.997.350,00	329.676.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.397.000,00	46.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.675.000,00	234.593.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000,00	42.353.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000,00	42.353.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.638.000,00	540.580.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.840.000,00	92.947.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	228.413.000,00	226.479.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	224.385.000,00	221.153.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	01	2.13	00	Penataan Organisasi	2.000.000.000,00	1.999.923.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.22.0.00.2.00	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2.000.000.000,00	1.999.923.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	02					KESEHATAN								
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00				RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	25.814.257.960,00	23.623.403.280,00	1.992.425.952,00	1.907.006.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	0.00	00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.055.254.003,00	2.761.573.661,00	1.987.925.952,00	1.902.556.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.042.914.903,00	1.979.787.476,00	1.050.000.000,00	968.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	61.716.000,00	35.324.336,00	1.050.000.000,00	968.268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	386.355.141,00	381.856.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.100.763.762,00	1.083.812.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	494.080.000,00	478.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.012.339.100,00	781.786.185,00	937.925.952,00	934.288.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	142.609.100,00	128.261.500,00	715.500.690,00	713.632.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	743.230.000,00	607.310.268,00	222.425.262,00	220.656.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	126.500.000,00	46.214.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	03	0.00	00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.119.600.000,00	1.614.214.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	03	2.02	00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.119.600.000,00	1.614.214.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	2.119.600.000,00	1.614.214.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.639.403.957,00	19.247.615.330,00	4.500.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.984.506.257,00	17.689.662.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.842.545.209,00	10.088.075.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.141.961.048,00	7.601.587.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	873.297.700,00	809.385.829,00	4.500.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.779.500,00	25.774.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	704.310.200,00	676.459.961,00	4.500.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.208.000,00	107.150.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.500.000,00	408.340.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	419.500.000,00	408.340.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.09	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.100.000,00	340.226.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	317.000.000,00	296.453.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	01	2.09	19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.100.000,00	43.773.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00				**DINAS KESEHATAN**	**89.787.979.339,00**	**76.070.787.608,02**	**24.595.964.191,00**	**18.609.897.771,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	0.00	00	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**38.253.307.180,00**	**26.311.807.313,02**	**24.556.964.191,00**	**18.571.045.498,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	00	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**12.388.612.085,00**	**10.842.150.730,00**	**24.195.129.918,00**	**18.236.021.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	878.615.425,00	722.719.027,00	10.372.632.758,00	6.068.784.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	159.069.000,00	61.806.800,00	1.835.578.800,00	1.482.810.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	212.860.000,00	90.525.500,00	1.864.610.000,00	1.610.946.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	38.230.000,00	19.362.600,00	1.427.579.740,00	1.103.907.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	498.568.250,00	4.910.000,00	1.629.822.000,00	1.551.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	148.655.000,00	126.650.500,00	7.064.906.620,00	6.417.610.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	3.341.689.190,00	2.962.007.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	6.818.644.220,00	6.709.052.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	292.281.000,00	145.115.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	00	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**25.799.695.095,00**	**15.446.711.083,02**	**361.834.273,00**	**335.024.086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.480.135.000,00	1.225.394.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	50.000.000,00	43.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	50.000.000,00	33.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1.476.683.400,00	910.948.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100.000.000,00	91.810.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50.000.000,00	20.507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	75.000.000,00	63.267.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	50.000.000,00	38.568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	23	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	200.000.000,00	188.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	633.402.500,00	461.138.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3.560.867.200,00	3.411.572.600,00	129.834.000,00	127.317.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	75.410.000,00	5.109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	16.629.752.695,00	7.977.885.206,02	232.000.273,00	207.706.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	655.845.000,00	460.851.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	712.599.300,00	514.507.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.00**	**02**	**2.03**	**00**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**65.000.000,00**	**22.945.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	65.000.000,00	22.945.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**1.985.344.000,00**	**1.704.580.556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.00**	**03**	**2.02**	**00**	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**1.853.314.000,00**	**1.669.432.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	03	2.02	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.853.314.000,00	1.669.432.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.00**	**03**	**2.03**	**00**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**132.030.000,00**	**35.147.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	132.030.000,00	35.147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.00**	**04**	**0.00**	**00**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**213.276.900,00**	**124.684.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.00**	**04**	**2.01**	**00**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**50.060.000,00**	**37.975.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50.060.000,00	37.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.00**	**04**	**2.03**	**00**	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**97.744.900,00**	**41.472.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	97.744.900,00	41.472.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.00**	**04**	**2.06**	**00**	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**65.472.000,00**	**45.237.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	65.472.000,00	45.237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.00**	**05**	**0.00**	**00**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN**	**315.057.000,00**	**220.779.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	05	2.01	00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.452.000,00	52.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	125.452.000,00	52.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	05	2.02	00	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	189.605.000,00	168.304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	189.605.000,00	168.304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**02**	**1.02.0.00.0.00.01.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**49.020.994.259,00**	**47.708.935.959,00**	**39.000.000,00**	**38.852.273,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.483.434.059,00	47.244.157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.987.329.059,00	31.447.748.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.496.105.000,00	15.796.408.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	362.797.200,00	357.433.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.949.800,00	5.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.998.500,00	19.998.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.739.900,00	98.337.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.200.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.909.000,00	195.367.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	975.000,00	295.000,00	39.000.000,00	38.852.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	975.000,00	295.000,00	39.000.000,00	38.852.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.800.000,00	34.108.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.800.000,00	34.108.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.988.000,00	72.942.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	15.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	45.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.988.000,00	11.924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03					**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00				**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**34.616.584.744,00**	**27.707.218.344,00**	**126.566.190.216,00**	**110.373.391.437,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**2.913.086.840,00**	**2.564.068.647,00**	**6.085.011.103,00**	**4.391.490.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	02	2.01	00	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	771.937.600,00	714.740.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	392.103.940,00	360.832.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	379.833.660,00	353.908.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	02	2.02	00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.141.149.240,00	1.849.327.867,00	6.085.011.103,00	4.391.490.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	696.701.680,00	655.279.835,00	6.085.011.103,00	4.391.490.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.444.447.560,00	1.194.048.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**2.384.622.850,00**	**1.714.489.679,00**	**8.561.237.058,00**	**7.430.822.668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**2.384.622.850,00**	**1.714.489.679,00**	**8.561.237.058,00**	**7.430.822.668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	147.461.980,00	134.077.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	280.924.400,00	264.890.128,00	1.555.700.000,00	1.555.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	261.748.300,00	211.082.801,00	5.989.834.000,00	5.486.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	03	2.01	16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	1.694.488.170,00	1.104.439.348,00	1.015.703.058,00	388.529.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.00**	**05**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**232.132.600,00**	**187.466.292,00**	**1.661.000.000,00**	**1.652.917.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.00**	**05**	**2.01**	**00**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**232.132.600,00**	**187.466.292,00**	**1.661.000.000,00**	**1.652.917.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	05	2.01	03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	232.132.600,00	187.466.292,00	1.661.000.000,00	1.652.917.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.00**	**08**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**475.689.000,00**	**138.797.802,00**	**1.983.501.000,00**	**1.648.024.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.00**	**08**	**2.01**	**00**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**475.689.000,00**	**138.797.802,00**	**1.983.501.000,00**	**1.648.024.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	475.689.000,00	138.797.802,00	1.983.501.000,00	1.648.024.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.00**	**10**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**15.706.041.444,00**	**10.737.282.781,00**	**107.907.780.274,00**	**94.889.413.289,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.00**	**10**	**2.01**	**00**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**15.706.041.444,00**	**10.737.282.781,00**	**107.907.780.274,00**	**94.889.413.289,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	850.834.940,00	673.114.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	8.042.124.836,00	5.030.643.414,00	62.392.232.005,00	54.528.627.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	4.443.641.232,00	3.486.196.027,00	45.515.548.269,00	40.360.785.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.828.196.200,00	1.522.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	8.275.000,00	8.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	532.969.236,00	16.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.00**	**12**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**288.130.000,00**	**245.148.993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.00**	**12**	**2.04**	**00**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**288.130.000,00**	**245.148.993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	288.130.000,00	245.148.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**12.616.882.010,00**	**12.119.964.150,00**	**367.660.781,00**	**360.723.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.01**	**00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**262.891.500,00**	**255.326.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.507.500,00	31.507.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	231.384.000,00	223.819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**11.139.305.125,00**	**10.957.652.101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.066.449.125,00	5.972.858.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.072.856.000,00	4.984.793.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**408.642.345,00**	**374.603.114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.040.855,00	10.037.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.988.740,00	133.350.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.992.750,00	42.849.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.620.000,00	179.365.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.07**	**00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**19.385.000,00**	**16.915.000,00**	**367.660.781,00**	**360.723.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.385.000,00	16.915.000,00	367.660.781,00	360.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**61.800.000,00**	**20.352.719,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.800.000,00	20.352.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**03**	**1.03.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**724.858.040,00**	**495.114.716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.240.000,00	13.404.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	434.976.300,00	248.214.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.850.000,00	21.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	237.791.740,00	212.300.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	04					**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**								
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00				**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**	**6.228.148.559,00**	**5.927.077.238,00**	**1.261.194.956,00**	**1.050.647.655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03	0.00	00	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**2.072.283.000,00**	**2.059.974.419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03	2.03	00	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**2.072.283.000,00**	**2.059.974.419,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.072.283.000,00	2.059.974.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	05	0.00	00	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**243.104.000,00**	**202.881.366,00**	**1.135.618.124,00**	**925.296.455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	05	2.01	00	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**243.104.000,00**	**202.881.366,00**	**1.135.618.124,00**	**925.296.455,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	243.104.000,00	202.881.366,00	1.135.618.124,00	925.296.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	0.00	00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.912.761.559,00**	**3.664.221.453,00**	**125.576.832,00**	**125.351.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.01	00	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**126.075.000,00**	**124.478.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.075.000,00	109.522.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.02	00	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.268.711.139,00**	**3.036.994.017,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.414.385.139,00	2.301.935.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	854.326.000,00	735.058.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	00	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**287.805.420,00**	**282.616.938,00**	**26.980.470,00**	**26.855.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.992.180,00	8.174.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.645.320,00	40.045.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.371.920,00	107.478.160,00	26.980.470,00	26.855.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.760.000,00	43.743.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.636.000,00	64.775.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**04**	**1.04.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.07**	**00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**21.580.000,00**	**21.557.400,00**	**98.596.362,00**	**98.495.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	21.580.000,00	21.557.400,00	98.596.362,00	98.495.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**04**	**1.04.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**125.280.000,00**	**124.807.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.280.000,00	95.047.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	29.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**04**	**1.04.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**83.310.000,00**	**73.766.798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.612.000,00	40.292.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.750.000,00	18.568.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.948.000,00	14.906.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**05**					**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM SETA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.03.00**				**Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	**9.480.434.919,00**	**8.830.155.173,00**	**62.704.828,00**	**49.999.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.03.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**829.827.870,00**	**804.943.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.03.00**	**02**	**2.01**	**00**	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**829.827.870,00**	**804.943.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	829.827.870,00	804.943.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.03.00**	**04**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**40.291.700,00**	**39.883.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.03.00**	**04**	**2.01**	**00**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**40.291.700,00**	**39.883.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.291.700,00	39.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.03.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.610.315.349,00**	**7.985.328.473,00**	**62.704.828,00**	**49.999.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.03.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.107.214.074,00**	**7.575.156.025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.085.152.074,00	3.016.967.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.022.062.000,00	4.558.188.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.03.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**188.001.275,00**	**185.993.600,00**	**62.704.828,00**	**49.999.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.047.675,00	8.029.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000,00	1.000.000,00	62.704.828,00	49.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.935.200,00	85.370.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.178.400,00	19.168.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.750.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.090.000,00	70.025.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.03.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**39.000.000,00**	**4.848.988,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000,00	4.848.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.03.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**276.100.000,00**	**219.329.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	256.340.000,00	213.569.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.00**				**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**7.895.314.818,00**	**7.197.625.054,00**	**2.486.988.278,00**	**2.458.664.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**345.010.200,00**	**321.880.950,00**	**8.500.000,00**	**7.590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.00**	**03**	**2.02**	**00**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**22.958.200,00**	**22.291.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	22.958.200,00	22.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.00**	**03**	**2.03**	**00**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**322.052.000,00**	**299.589.950,00**	**8.500.000,00**	**7.590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	148.694.000,00	140.377.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	173.358.000,00	159.212.500,00	8.500.000,00	7.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.00**	**04**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**2.840.321.600,00**	**2.336.234.404,00**	**2.478.488.278,00**	**2.451.074.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.00**	**04**	**2.01**	**00**	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**2.367.540.800,00**	**1.932.597.004,00**	**2.431.149.624,00**	**2.404.354.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.160.740.000,00	1.776.310.669,00	41.081.870,00	37.599.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	206.800.800,00	156.286.335,00	2.390.067.754,00	2.366.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.00**	**04**	**2.04**	**00**	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**472.780.800,00**	**403.637.400,00**	**47.338.654,00**	**46.719.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	472.780.800,00	403.637.400,00	47.338.654,00	46.719.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.709.983.018,00**	**4.539.509.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.176.557.318,00**	**4.081.105.595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.688.423.318,00	2.608.128.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	01	2.02	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.488.134.000,00	1.472.977.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**216.374.100,00**	**210.975.421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.446.500,00	12.402.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.361.800,00	72.387.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.005.800,00	16.722.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.560.000,00	104.464.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**62.000.000,00**	**49.834.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.000.000,00	49.834.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**05**	**1.05.0.00.0.00.04.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**255.051.600,00**	**197.593.874,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.100.000,00	49.401.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.541.600,00	135.971.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.410.000,00	12.221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**06**					**SOSIAL**								
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.02.00**				**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**5.667.952.452,00**	**5.281.159.848,00**	**412.585.178,00**	**404.111.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**172.556.000,00**	**170.336.051,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**02**	**2.01**	**00**	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**69.970.000,00**	**69.621.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	06	1.06.2.08.0.00.02.00	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	69.970.000,00	69.621.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**02**	**2.03**	**00**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**102.586.000,00**	**100.714.351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	06	1.06.2.08.0.00.02.00	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	73.066.000,00	72.432.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	06	1.06.2.08.0.00.02.00	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	29.520.000,00	28.281.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**04**	**0.00**	**00**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**204.104.300,00**	**180.948.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**04**	**2.01**	**00**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**204.104.300,00**	**180.948.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	06	1.06.2.08.0.00.02.00	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	37.924.300,00	29.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	06	1.06.2.08.0.00.02.00	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	166.180.000,00	151.360.400,00						
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**05**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**939.019.000,00**	**825.735.183,00**	**32.766.178,00**	**30.446.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**05**	**2.02**	**00**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**939.019.000,00**	**825.735.183,00**	**32.766.178,00**	**30.446.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	06	1.06.2.08.0.00.02.00	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	146.145.000,00	121.983.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	06	1.06.2.08.0.00.02.00	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	203.808.250,00	178.803.675,00	17.960.986,00	16.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	06	1.06.2.08.0.00.02.00	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	589.065.750,00	524.947.750,00	14.805.192,00	13.891.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**06**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**30.701.000,00**	**30.108.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**06**	**2.01**	**00**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**30.701.000,00**	**30.108.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	06	1.06.2.08.0.00.02.00	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	30.701.000,00	30.108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.321.572.152,00**	**4.074.031.414,00**	**379.819.000,00**	**373.665.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.896.022.702,00**	**3.661.645.512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	06	1.06.2.08.0.00.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.115.942.702,00	2.913.970.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	06	1.06.2.08.0.00.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	780.080.000,00	747.674.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**193.700.250,00**	**191.466.278,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	06	1.06.2.08.0.00.02.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.996.050,00	3.996.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	06	1.06.2.08.0.00.02.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.168.200,00	60.355.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	06	1.06.2.08.0.00.02.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.684.000,00	12.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	06	1.06.2.08.0.00.02.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114.852.000,00	114.430.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**01**	**2.07**	**00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.380.000,00**	**3.380.000,00**	**325.000.000,00**	**318.945.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	06	1.06.2.08.0.00.02.00	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.380.000,00	3.380.000,00	325.000.000,00	318.945.550,00				
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52.649.200,00**	**50.025.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	06	1.06.2.08.0.00.02.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.150.000,00	37.526.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	06	1.06.2.08.0.00.02.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.499.200,00	12.499.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**06**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**175.820.000,00**	**167.513.844,00**	**54.819.000,00**	**54.719.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	06	1.06.2.08.0.00.02.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.750.000,00	24.052.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	06	1.06.2.08.0.00.02.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	144.070.000,00	143.460.944,00	54.819.000,00	54.719.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
2						**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	**07**	**2.18.2.07.0.00.01.00**				**TENAGA KERJA**								
2	**07**	**2.18.2.07.0.00.01.00**				**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**341.494.600,00**	**329.515.150,00**	**7.813.500,00**	**7.813.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**07**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**341.494.600,00**	**329.515.150,00**	**7.813.500,00**	**7.813.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**07**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**341.494.600,00**	**329.515.150,00**	**7.813.500,00**	**7.813.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**07**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	280.870.500,00	275.083.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**07**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	60.624.100,00	54.431.650,00	7.813.500,00	7.813.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**08**					**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.02.00**				**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**961.652.600,00**	**936.022.259,00**	**26.096.522,00**	**25.964.007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**613.401.200,00**	**598.783.359,00**	**15.217.470,00**	**15.085.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**02**	**2.01**	**00**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**40.426.500,00**	**39.361.600,00**	**15.217.470,00**	**15.085.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	08	1.06.2.08.0.00.02.00	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	14.579.000,00	14.114.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	08	1.06.2.08.0.00.02.00	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	15.543.500,00	15.243.300,00	15.217.470,00	15.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	08	1.06.2.08.0.00.02.00	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	10.304.000,00	10.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**02**	**2.02**	**00**	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**572.974.700,00**	**559.421.759,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	08	1.06.2.08.0.00.02.00	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	572.974.700,00	559.421.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**06**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**51.084.400,00**	**48.288.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**06**	**2.01**	**00**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**38.539.600,00**	**36.484.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
2	08	1.06.2.08.0.00.02.00	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	22.194.600,00	21.529.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	08	1.06.2.08.0.00.02.00	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16.345.000,00	14.954.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**06**	**2.02**	**00**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**12.544.800,00**	**11.804.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	08	1.06.2.08.0.00.02.00	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12.544.800,00	11.804.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**07**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**297.167.000,00**	**288.950.100,00**	**10.879.052,00**	**10.879.007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**07**	**2.01**	**00**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**111.330.000,00**	**108.274.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	08	1.06.2.08.0.00.02.00	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	111.330.000,00	108.274.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**07**	**2.02**	**00**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**23.966.600,00**	**20.300.400,00**	**10.879.052,00**	**10.879.007,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	08	1.06.2.08.0.00.02.00	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.966.600,00	20.300.400,00	10.879.052,00	10.879.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**08**	**1.06.2.08.0.00.02.00**	**07**	**2.03**	**00**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**161.870.400,00**	**160.375.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	08	1.06.2.08.0.00.02.00	07	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	161.870.400,00	160.375.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**09**					**PANGAN**								
2	**09**	**2.09.3.27.0.00.02.00**				**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**	**525.047.100,00**	**492.812.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**09**	**2.09.3.27.0.00.02.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**525.047.100,00**	**492.812.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**09**	**2.09.3.27.0.00.02.00**	**03**	**2.02**	**00**	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
2	09	2.09.3.27.0.00.02.00	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	09	2.09.3.27.0.00.02.00	03	2.04	00	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	525.047.100,00	492.812.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	09	2.09.3.27.0.00.02.00	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	525.047.100,00	492.812.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**11**					**LINGKUNGAN HIDUP**								
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.00**				**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**	**5.274.246.138,00**	**4.955.159.538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAI KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**6.153.000,00**	**5.241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**6.153.000,00**	**5.241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	6.153.000,00	5.241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.00**	**04**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAI KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**714.766.000,00**	**643.519.778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.00**	**04**	**2.01**	**00**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**714.766.000,00**	**643.519.778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	714.766.000,00	643.519.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.00**	**06**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**46.510.000,00**	**41.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.00**	**06**	**2.01**	**00**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**46.510.000,00**	**41.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	46.510.000,00	41.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.00**	**07**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**15.401.900,00**	**12.435.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.00**	**07**	**2.02**	**00**	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**15.401.900,00**	**12.435.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	15.401.900,00	12.435.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	11	0.00	00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	250.412.500,00	247.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.00**	**11**	**2.01**	**00**	**Pengelolaan Sampah**	**250.412.500,00**	**247.714.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	244.772.500,00	242.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	5.640.000,00	5.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.241.002.738,00	4.004.378.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.718.136.658,00**	**2.633.951.918,00**						
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.718.136.658,00	2.633.951.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**186.846.480,00**	**159.188.986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.654.600,00	2.654.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.059.880,00	49.042.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.800.000,00	16.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.332.000,00	90.792.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.236.139.600,00**	**1.117.596.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	16.166.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.218.139.600,00	1.101.429.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**11**	**2.11.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**99.880.000,00**	**93.642.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.480.000,00	12.657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.600.000,00	73.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
2	**12**					**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**				**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**6.152.212.781,00**	**4.663.807.624,00**	**110.000.000,00**	**104.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENDAFTARAAN PENDUDUK**	**919.332.700,00**	**303.301.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**02**	**2.01**	**00**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**726.432.700,00**	**279.376.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	726.432.700,00	279.376.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**02**	**2.02**	**00**	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**192.900.000,00**	**23.925.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	192.900.000,00	23.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**1.114.633.300,00**	**411.890.280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**642.169.700,00**	**280.452.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	642.169.700,00	280.452.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**03**	**2.02**	**00**	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**472.463.600,00**	**131.438.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03	2.02	10	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	472.463.600,00	131.438.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**05**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**05**	**2.01**	**00**	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.098.246.781,00**	**3.948.615.844,00**	**110.000.000,00**	**104.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.753.046.481,00**	**3.631.756.628,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.627.488.481,00	2.576.964.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.125.558.000,00	1.054.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**141.126.700,00**	**124.636.421,00**	**110.000.000,00**	**104.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.235.000,00	7.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.100.000,00	680.000,00	110.000.000,00	104.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.395.700,00	72.436.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.900.000,00	14.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.496.000,00	17.384.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**48.113.600,00**	**40.048.751,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.200.000,00	29.135.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.913.600,00	10.913.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**12**	**2.12.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**155.960.000,00**	**152.174.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.260.000,00	45.718.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.700.000,00	106.455.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**13**					**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.01.00**				**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**7.260.143.966,00**	**6.812.035.905,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.01.00**	**04**	**0.00**	**00**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**1.303.057.000,00**	**1.044.357.658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.01.00**	**04**	**2.01**	**00**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**1.303.057.000,00**	**1.044.357.658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	13	2.13.2.14.0.00.01.00	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	85.486.500,00	42.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13	2.13.2.14.0.00.01.00	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	400.724.600,00	191.710.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13	2.13.2.14.0.00.01.00	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	816.845.900,00	810.007.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.01.00**	**05**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**465.375.200,00**	**464.345.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.01.00**	**05**	**2.01**	**00**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**465.375.200,00**	**464.345.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
2	13	2.13.2.14.0.00.01.00	09	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	465.375.200,00	464.345.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.01.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.491.711.766,00**	**5.303.332.847,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.01.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.243.805.466,00**	**5.093.426.036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	13	2.13.2.14.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.356.834.466,00	3.296.769.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13	2.13.2.14.0.00.01.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.886.971.000,00	1.796.656.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.01.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**181.935.800,00**	**162.386.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	13	2.13.2.14.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.997.900,00	56.893.000,00						
2	13	2.13.2.14.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.999.900,00	16.629.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13	2.13.2.14.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.500.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13	2.13.2.14.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.438.000,00	86.463.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.01.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.970.500,00**	**44.520.211,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	13	2.13.2.14.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.400.000,00	21.480.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13	2.13.2.14.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.570.500,00	23.039.400,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**13**	**2.13.2.14.0.00.01.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	13	2.13.2.14.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**14**					**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.01.00**				**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**2.405.602.830,00**	**703.314.200,00**	**258.287.568,00**	**246.854.918,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.01.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**2.405.602.830,00**	**703.314.200,00**	**258.287.568,00**	**246.854.918,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.01.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**765.600.000,00**	**266.848.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	14	2.13.2.14.0.00.01.00	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	765.600.000,00	266.848.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.01.00**	**03**	**2.02**	**00**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**843.548.130,00**	**195.724.300,00**	**9.305.548,00**	**9.305.548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
2	14	2.13.2.14.0.00.01.00	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	207.414.300,00	32.414.300,00	9.305.548,00	9.305.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14	2.13.2.14.0.00.01.00	03	2.02	03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	636.133.830,00	163.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.01.00**	**03**	**2.03**	**00**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**264.062.800,00**	**202.618.300,00**	**248.982.020,00**	**237.549.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	14	2.13.2.14.0.00.01.00	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14	2.13.2.14.0.00.01.00	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	69.991.900,00	59.994.900,00	248.982.020,00	237.549.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14	2.13.2.14.0.00.01.00	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	170.265.900,00	142.623.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14	2.13.2.14.0.00.01.00	03	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	5.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**14**	**2.13.2.14.0.00.01.00**	**03**	**2.04**	**00**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**532.391.900,00**	**38.123.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	14	2.13.2.14.0.00.01.00	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	532.391.900,00	38.123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**15**					**PERHUBUNGAN**								
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.00**				**Dinas Perhubungan**	**19.965.745.303,00**	**17.529.011.979,00**	**2.499.298.720,00**	**2.470.595.796,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**696.668.000,00**	**623.152.297,00**	**426.495.600,00**	**426.495.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.00**	**02**	**2.02**	**00**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**108.116.000,00**	**81.941.300,00**	**426.495.600,00**	**426.495.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	108.116.000,00	81.941.300,00	426.495.600,00	426.495.590,00				
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.00**	**02**	**2.05**	**00**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.00**	**02**	**2.09**	**00**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**588.552.000,00**	**541.210.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	588.552.000,00	541.210.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**10.761.412.475,00**	**9.110.736.066,00**	**1.952.968.712,00**	**1.936.021.706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.00**	**03**	**2.06**	**00**	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**	**280.641.600,00**	**41.241.188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	03	2.06	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	280.641.600,00	41.241.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.00**	**03**	**2.07**	**00**	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**9.709.839.075,00**	**8.507.888.648,00**	**27.923.326,00**	**12.395.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	03	2.07	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.709.839.075,00	8.507.888.648,00	27.923.326,00	12.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.00**	**03**	**2.08**	**00**	**Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal**	**34.500.000,00**	**8.872.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	03	2.08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	34.500.000,00	8.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.00**	**03**	**2.12**	**00**	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**155.496.800,00**	**69.931.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	03	2.12	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	52.547.000,00	13.193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	63.174.800,00	56.738.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	03	2.12	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	39.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.00**	**03**	**2.13**	**00**	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**580.935.000,00**	**482.802.430,00**	**1.925.045.386,00**	**1.923.626.706,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	03	2.13	02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	580.935.000,00	482.802.430,00	1.925.045.386,00	1.923.626.706,00				
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**8.507.664.828,00**	**7.795.123.616,00**	**119.834.408,00**	**108.078.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.01**	**00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11.365.000,00**	**11.024.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.365.000,00	11.024.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.778.982.528,00**	**7.375.908.123,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.680.956.528,00	4.563.925.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.098.026.000,00	2.811.982.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**300.892.800,00**	**276.266.980,00**	**98.909.408,00**	**87.558.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.489.000,00	3.364.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.300.000,00	9.600.000,00	98.909.408,00	87.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82.533.800,00	70.346.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.600.000,00	13.349.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.970.000,00	167.606.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.07**	**00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**203.699.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	203.699.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**162.000.000,00**	**95.179.213,00**	**20.925.000,00**	**20.520.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.000.000,00	95.179.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	20.925.000,00	20.520.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**15**	**2.15.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.725.000,00**	**36.744.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.995.000,00	36.744.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**16**					**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
2	**16**	**2.16.2.21.0.00.01.00**				**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**7.844.796.959,00**	**7.015.967.174,00**	**69.275.414,00**	**66.191.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
2	**16**	**2.16.2.21.0.00.01.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**89.313.000,00**	**82.418.300,00**	**39.361.574,00**	**39.356.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**16**	**2.16.2.21.0.00.01.00**	**02**	**2.01**	**00**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**89.313.000,00**	**82.418.300,00**	**39.361.574,00**	**39.356.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	53.658.000,00	49.416.800,00	39.361.574,00	39.356.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	9.117.500,00	9.117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	7.591.000,00	7.568.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	8.280.500,00	6.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	10.666.000,00	9.992.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	03	0.00	00	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.520.721.200,00	3.138.173.837,00	5.559.840,00	5.559.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**16**	**2.16.2.21.0.00.01.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**2.748.901.700,00**	**2.649.710.637,00**	**5.559.840,00**	**5.559.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.748.901.700,00	2.649.710.637,00	5.559.840,00	5.559.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**16**	**2.16.2.21.0.00.01.00**	**03**	**2.02**	**00**	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**771.819.500,00**	**488.463.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	771.819.500,00	488.463.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	01	0.00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.234.762.759,00	3.795.375.037,00	24354000,00	21275000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**16**	**2.16.2.21.0.00.01.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.412.031.859,00**	**3.285.663.357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.494.185.859,00	2.392.505.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	917.846.000,00	893.157.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**16**	**2.16.2.21.0.00.01.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**341.697.600,00**	**199.701.356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.065.500,00	2.563.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.327.600,00	75.797.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	79.020.500,00	16.581.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.284.000,00	99.759.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**16**	**2.16.2.21.0.00.01.00**	**01**	**2.07**	**00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.604.300,00**	**1.454.300,00**	**24.354.000,00**	**21.275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.604.300,00	1.454.300,00	24.354.000,00	21.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**16**	**2.16.2.21.0.00.01.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**241.999.000,00**	**75.080.129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	217.000.000,00	50.081.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.999.000,00	24.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**16**	**2.16.2.21.0.00.01.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**236.430.000,00**	**233.475.895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.320.000,00	43.785.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	2.16.2.21.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.110.000,00	189.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**17**					**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.07.00**				**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**	**478.450.800,00**	**413.768.860,00**	**136.540.800,00**	**130.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.07.00**	**05**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**454.310.000,00**	**390.979.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	17	2.17.3.30.3.31.07.00	05	2.01	00	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	454.310.000,00	390.979.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	17	2.17.3.30.3.31.07.00	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	454.310.000,00	390.979.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.07.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**24.140.800,00**	**22.789.800,00**	**136.540.800,00**	**130.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.07.00**	**01**	**2.07**	**00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.100.000,00**	**680.000,00**	**136.540.800,00**	**130.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	17	2.17.3.30.3.31.07.00	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.100.000,00	680.000,00	136.540.800,00	130.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.07.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**23.040.800,00**	**22.109.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	17	2.17.3.30.3.31.07.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.040.800,00	22.109.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**17**	**2.17.3.30.3.31.07.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	17	2.17.3.30.3.31.07.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**18**					**PENANAMAN MODAL**								
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**				**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**3.913.173.720,00**	**3.526.338.885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	**04**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**66.925.000,00**	**66.610.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	**04**	**2.01**	**00**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**66.925.000,00**	**66.610.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	66.925.000,00	66.610.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	**05**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**370.798.000,00**	**143.087.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	**05**	**2.01**	**00**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**370.798.000,00**	**143.087.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	56.350.000,00	55.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	209.797.200,00	30.749.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	104.650.800,00	56.646.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.475.450.720,00**	**3.316.641.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.978.254.920,00**	**2.858.929.126,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.341.786.920,00	2.253.634.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	636.468.000,00	605.294.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**265.052.300,00**	**260.908.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.987.400,00	9.970.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.054.900,00	92.517.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.989.000,00	17.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.425.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.596.000,00	137.141.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**140.093.500,00**	**112.598.973,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.550.000,00	74.060.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.543.500,00	38.538.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**92.050.000,00**	**84.204.936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.200.000,00	50.415.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000,00	13.439.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.500.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**18**	**2.18.2.07.0.00.01.00**	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**19**					**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**								
2	**19**	**3.26.2.19.0.00.01.00**				**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**192.231.900,00**	**192.230.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**19**	**3.26.2.19.0.00.01.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**164.065.000,00**	**164.064.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**19**	**3.26.2.19.0.00.01.00**	**02**	**2.01**	**00**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**89.065.000,00**	**89.064.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
2	19	3.26.2.19.0.00.01.00	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	89.065.000,00	89.064.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**19**	**3.26.2.19.0.00.01.00**	**02**	**2.02**	**00**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	19	3.26.2.19.0.00.01.00	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**19**	**3.26.2.19.0.00.01.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**28.166.900,00**	**28.166.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**19**	**3.26.2.19.0.00.01.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**28.166.900,00**	**28.166.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	19	3.26.2.19.0.00.01.00	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	28.166.900,00	28.166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**22**					**KEBUDAYAAN**								
2	**22**					**DINAS PENDIDIKAN**	**874.526.440,00**	**615.218.259,00**	**15.827.948,00**	**12.395.939,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.2.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**643.068.200,00**	**455.682.519,00**	**15.827.948,00**	**12.395.939,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.2.00**	**02**	**2.01**	**00**	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**150.000.000,00**	**80.449.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	22	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	150.000.000,00	80.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.2.00**	**02**	**2.02**	**00**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**391.802.200,00**	**280.740.319,00**	**15.827.948,00**	**12.395.939,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	22	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	391.802.200,00	280.740.319,00	15.827.948,00	12.395.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.2.00**	**02**	**2.03**	**00**	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**101.266.000,00**	**94.493.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	22	1.01.2.22.0.00.2.00	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	101.266.000,00	94.493.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.2.00**	**03**	**2.01**	**00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**54.368.240,00**	**53.635.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.2.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**54.368.240,00**	**53.635.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	22	1.01.2.22.0.00.2.00	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	54.368.240,00	53.635.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.2.00**	**04**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**177.090.000,00**	**105.900.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**22**	**1.01.2.22.0.00.2.00**	**04**	**2.01**	**00**	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**177.090.000,00**	**105.900.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	22	1.01.2.22.0.00.2.00	04	2.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	177.090.000,00	105.900.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**23**					**PERPUSTAKAAN**								
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.1.00**				**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**	**3.512.098.528,00**	**3.433.403.082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.1.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**54.355.000,00**	**54.355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.1.00**	**02**	**2.01**	**00**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**54.355.000,00**	**54.355.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	23	2.24.2.23.0.00.1.00	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	54.355.000,00	54.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.1.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.457.743.528,00**	**3.379.048.082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.1.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.112.905.078,00**	**3.056.561.487,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	23	2.24.2.23.0.00.1.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.514.961.078,00	2.463.399.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23	2.24.2.23.0.00.1.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	597.944.000,00	593.162.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.1.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**231.486.970,00**	**230.911.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	23	2.24.2.23.0.00.1.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.378.550,00	7.378.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23	2.24.2.23.0.00.1.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.523.720,00	47.028.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23	2.24.2.23.0.00.1.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.055.700,00	16.055.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23	2.24.2.23.0.00.1.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.529.000,00	160.448.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.1.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**17.696.500,00**	**8.374.695,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	23	2.24.2.23.0.00.1.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.000,00	1.478.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23	2.24.2.23.0.00.1.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.896.500,00	6.896.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**23**	**2.24.2.23.0.00.1.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95.654.980,00**	**83.200.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	23	2.24.2.23.0.00.1.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.505.000,00	36.260.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
2	23	2.24.2.23.0.00.1.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.000.000,00	22.791.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23	2.24.2.23.0.00.1.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	23	2.24.2.23.0.00.1.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.999.980,00	19.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**24**					**KEARSIPAN**								
2	**24**	**2.24.2.23.0.00.1.00**				**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**	**56.346.000,00**	**56.191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**24**	**2.24.2.23.0.00.1.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**56.346.000,00**	**56.191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	**24**	**2.24.2.23.0.00.1.00**	**02**	**2.01**	**00**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**56.346.000,00**	**56.191.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	24	2.24.2.23.0.00.1.00	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	56.346.000,00	56.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**								
3	**25**					**KELAUATAN DAN PERIKANAN**								
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.1.00**				**Dinas Perikanan**	**20.887.652.326,00**	**20.007.229.404,00**	**314.282.673,00**	**302.957.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.1.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**12.899.953.406,00**	**12.291.872.934,00**	**223.536.815,00**	**215.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.1.00**	**03**	**2.02**	**00**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**12.529.921.278,00**	**11.960.997.600,00**	**223.536.815,00**	**215.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	25	3.25.0.00.0.00.1.00	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	12.529.921.278,00	11.960.997.600,00	223.536.815,00	215.380.000,00				
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.1.00**	**03**	**2.03**	**00**	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**370.032.128,00**	**330.875.334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	25	3.25.0.00.0.00.1.00	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	370.032.128,00	330.875.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.1.00**	**04**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**1.032.090.055,00**	**992.145.377,00**	**88.645.858,00**	**85.477.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.1.00**	**04**	**2.04**	**00**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**1.032.090.055,00**	**992.145.377,00**	**88.645.858,00**	**85.477.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	25	3.25.0.00.0.00.1.00	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	286.427.642,00	280.802.500,00	38.138.338,00	34.977.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.1.00	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	631.895.413,00	603.445.877,00	50.507.520,00	50.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.1.00	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	113.767.000,00	107.897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.1.00**	**06**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**233.950.500,00**	**218.412.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.1.00**	**06**	**2.02**	**00**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**233.950.500,00**	**218.412.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
3	25	3.25.0.00.0.00.1.00	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	233.950.500,00	218.412.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.1.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.721.658.365,00**	**6.504.798.993,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.1.00**	**01**	**2.01**	**00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**213.550.000,00**	**210.546.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	25	3.25.0.00.0.00.1.00	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	213.550.000,00	210.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.1.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.289.544.115,00**	**5.103.463.385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	25	3.25.0.00.0.00.1.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.782.928.115,00	3.718.859.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.1.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.506.616.000,00	1.384.603.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.1.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**472.004.250,00**	**467.135.738,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	25	3.25.0.00.0.00.1.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.477.500,00	10.213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.1.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.1.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.230.750,00	149.462.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.1.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.400.000,00	45.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.1.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.1.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	232.896.000,00	231.199.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.1.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**350.500.000,00**	**342.318.716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	25	3.25.0.00.0.00.1.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.500.000,00	342.318.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**25**	**3.25.0.00.0.00.1.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**396.060.000,00**	**381.335.154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	25	3.25.0.00.0.00.1.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.652.000,00	141.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.1.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.008.000,00	199.516.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.1.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.400.000,00	40.608.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**26**					**PARIWISATA**								

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.1.00**				**DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**7.775.385.989,00**	**7.582.903.115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.1.00**	**06**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**381.987.500,00**	**364.203.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.1.00**	**06**	**2.01**	**00**	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**381.987.500,00**	**364.203.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	26	3.26.2.19.0.00.1.00	06	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	381.987.500,00	364.203.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.1.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**694.919.500,00**	**673.215.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.1.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**694.919.500,00**	**673.215.412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	26	3.26.2.19.0.00.1.00	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	694.919.500,00	673.215.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.1.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**6.698.478.989,00**	**6.545.484.153,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.1.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.645.662.389,00**	**5.550.335.603,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	26	3.26.2.19.0.00.1.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.040.602.389,00	3.948.133.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	26	3.26.2.19.0.00.1.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.605.060.000,00	1.602.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.1.00**	**01**	**2.04**	**00**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**349.519.000,00**	**329.863.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	26	3.26.2.19.0.00.1.00	01	2.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	349.519.000,00	329.863.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.1.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**358.539.600,00**	**351.662.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	26	3.26.2.19.0.00.1.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.072.000,00	6.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	26	3.26.2.19.0.00.1.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.693.500,00	101.699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	26	3.26.2.19.0.00.1.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.454.100,00	17.984.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	26	3.26.2.19.0.00.1.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.800.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	26	3.26.2.19.0.00.1.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.520.000,00	210.307.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.1.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**103.800.000,00**	**82.462.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	26	3.26.2.19.0.00.1.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.800.000,00	82.462.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**26**	**3.26.2.19.0.00.1.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**240.958.000,00**	**231.160.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
3	26	3.26.2.19.0.00.1.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.998.000,00	63.464.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	26	3.26.2.19.0.00.1.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	173.960.000,00	167.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**27**					**PERTANIAN**								
3	**27**	**3.27.2.19.0.00.1.00**				**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**	**13.068.934.047,00**	**11.205.913.379,00**	**3.083.052.999,00**	**3.079.351.167,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**27**	**3.27.2.19.0.00.1.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**2.206.544.150,00**	**1.347.162.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**27**	**3.27.2.19.0.00.1.00**	**02**	**2.01**	**00**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**992.239.000,00**	**785.408.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	27	3.27.2.19.0.00.1.00	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	992.239.000,00	785.408.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**27**	**3.27.2.19.0.00.1.00**	**02**	**2.06**	**00**	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**1.214.305.150,00**	**561.753.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	27	3.27.2.19.0.00.1.00	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.214.305.150,00	561.753.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**27**	**3.27.2.19.0.00.1.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**669.799.184,00**	**302.528.629,00**	**3.083.052.999,00**	**3.079.351.167,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**27**	**3.27.2.19.0.00.1.00**	**03**	**2.02**	**00**	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**669.799.184,00**	**302.528.629,00**	**3.083.052.999,00**	**3.079.351.167,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	27	3.27.2.19.0.00.1.00	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	190.958.684,00	171.872.129,00	2.508.701.832,00	2.505.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.19.0.00.1.00	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.19.0.00.1.00	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.19.0.00.1.00	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.19.0.00.1.00	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	178.840.500,00	130.656.500,00	574.351.167,00	574.351.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**27**	**3.27.2.19.0.00.1.00**	**05**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**27**	**3.27.2.19.0.00.1.00**	**05**	**2.01**	**00**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	27	3.27.2.19.0.00.1.00	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
3	**27**	**3.27.2.19.0.00.1.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.192.590.713,00**	**9.556.222.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**27**	**3.27.2.19.0.00.1.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.341.111.163,00**	**8.845.085.549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	27	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.766.416.163,00	6.678.552.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.574.695.000,00	2.166.533.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**27**	**3.27.2.19.0.00.1.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**412.372.650,00**	**367.437.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	27	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.650,00	8.112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.499.000,00	82.180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.600.000,00	16.342.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	267.274.000,00	248.401.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**27**	**3.27.2.19.0.00.1.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80.000.000,00**	**68.835.721,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	27	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	48.835.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**27**	**3.27.2.19.0.00.1.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**65.343.000,00**	**42.538.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	27	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.343.000,00	42.538.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**27**	**3.27.2.19.0.00.1.00**	**01**	**2.13**	**00**	**Penataan Organisasi**	**293.763.900,00**	**232.326.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	27	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	293.763.900,00	232.326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**31**					**PERINDUSTRIAN**								
3	**31**	**3.27.2.19.0.00.1.00**				**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan**	**5.583.274.374,00**	**5.418.123.141,00**	**1.175.613.000,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**31**	**3.27.2.19.0.00.1.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**2.212.005.000,00**	**2.207.463.050,00**	**1.170.113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
3	**31**	**3.27.2.19.0.00.1.00**	**02**	**2.01**	**00**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**2.212.005.000,00**	**2.207.463.050,00**	**1.170.113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	31	3.27.2.19.0.00.1.00	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10.000.000,00	8.470.400,00	1.170.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	3.27.2.19.0.00.1.00	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2.202.005.000,00	2.198.992.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**31**	**3.27.2.19.0.00.1.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.371.269.374,00**	**3.210.660.091,00**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**31**	**3.27.2.19.0.00.1.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.022.944.174,00**	**2.890.461.443,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	31	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.496.104.174,00	2.382.401.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	526.840.000,00	508.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**31**	**3.27.2.19.0.00.1.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**263.125.200,00**	**255.638.154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	31	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.112.400,00	2.982.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.334.800,00	66.534.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.795.000,00	25.883.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.883.000,00	160.237.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**31**	**3.27.2.19.0.00.1.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**35.400.000,00**	**28.760.194,00**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	31	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.400.000,00	28.760.194,00	5.500.000,00	5.500.000,00				
3	**31**	**3.27.2.19.0.00.1.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49.800.000,00**	**35.800.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	31	3.27.2.19.0.00.1.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.800.000,00	35.800.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
4	**01**					**SEKRETARIAT DAERAH**								
4	**01**	**4.01.3.29.0.00.1.00**				**SEKRETARIAT DAERAH**	**42.850.768.928,00**	**40.503.922.407,00**	**455.688.439,00**	**435.303.862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
4	**01**	**4.01.3.29.0.00.1.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**9.533.597.300,00**	**8.500.263.653,00**	**150.741.580,00**	**146.709.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**01**	**4.01.3.29.0.00.1.00**	**02**	**2.01**	**00**	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**948.087.400,00**	**896.400.853,00**	**32.219.000,00**	**32.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	163.851.000,00	147.465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	523.109.000,00	517.942.520,00	32.219.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	261.127.400,00	230.993.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**01**	**4.01.3.29.0.00.1.00**	**02**	**2.02**	**00**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**7.226.070.800,00**	**6.301.811.300,00**	**41.788.680,00**	**40.590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.200.328.500,00	1.104.416.700,00	41.788.680,00	40.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	249.481.500,00	118.064.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	5.776.260.800,00	5.079.329.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**01**	**4.01.3.29.0.00.1.00**	**02**	**2.03**	**00**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**907.759.100,00**	**882.663.700,00**	**34.574.800,00**	**34.119.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	252.472.500,00	251.148.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	478.524.100,00	460.792.300,00	34.574.800,00	34.119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	176.762.500,00	170.723.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**01**	**4.01.3.29.0.00.1.00**	**02**	**2.04**	**00**	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**451.680.000,00**	**419.387.800,00**	**42.159.100,00**	**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	451.680.000,00	419.387.800,00	42.159.100,00	40.000.000,00				
4	**01**	**4.01.3.29.0.00.1.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**2.391.532.045,00**	**1.688.016.408,00**	**29.658.398,00**	**19.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**01**	**4.01.3.29.0.00.1.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**258.129.620,00**	**234.333.900,00**	**10.626.502,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	198.651.220,00	187.448.600,00	10.626.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	59.478.400,00	46.885.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**01**	**4.01.3.29.0.00.1.00**	**03**	**2.02**	**00**	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**671.420.000,00**	**447.196.000,00**	**19.031.896,00**	**19.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	80.807.500,00	74.846.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	469.112.400,00	278.429.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	121.500.100,00	93.920.000,00	19.031.896,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**01**	**4.01.3.29.0.00.1.00**	**03**	**2.03**	**00**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**1.397.559.425,00**	**943.884.708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	579.149.400,00	444.885.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	601.755.425,00	308.852.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	216.654.600,00	190.146.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**01**	**4.01.3.29.0.00.1.00**	**03**	**2.04**	**00**	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**64.423.000,00**	**62.601.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	64.423.000,00	62.601.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**01**	**4.01.3.29.0.00.1.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**30.925.639.583,00**	**30.315.642.346,00**	**275.288.461,00**	**269.594.862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**01**	**4.01.3.29.0.00.1.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**16.376.740.952,00**	**15.947.410.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.173.816.784,00	10.935.489.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.202.924.168,00	5.011.920.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**01**	**4.01.3.29.0.00.1.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.130.991.700,00**	**2.119.659.578,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	963.564.100,00	958.890.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	148.160.000,00	148.020.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	211.053.600,00	205.569.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	808.214.000,00	807.179.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**01**	**4.01.3.29.0.00.1.00**	**01**	**2.07**	**00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**53.045.000,00**	**50.855.500,00**	**152.556.081,00**	**148.950.145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	680.000,00	-	32.219.000,00	28.959.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	52.365.000,00	50.855.500,00	120.337.081,00	119.990.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**01**	**4.01.3.29.0.00.1.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**495.960.000,00**	**446.140.502,00**	**51.000.000,00**	**50.446.117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	495.960.000,00	446.140.502,00	51.000.000,00	50.446.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**01**	**4.01.3.29.0.00.1.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.047.601.950,00**	**8.029.191.963,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	325.448.400,00	316.760.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.401.816.300,00	6.397.989.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.084.147.250,00	1.081.938.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	236.190.000,00	232.502.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**01**	**4.01.3.29.0.00.1.00**	**01**	**2.11**	**00**	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**1.893.627.481,00**	**1.883.969.398,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	464.019.481,00	456.318.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	70.676.000,00	70.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.358.932.000,00	1.357.201.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**01**	**4.01.3.29.0.00.1.00**	**01**	**2.12**	**00**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**728.614.400,00**	**728.516.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	408.958.500,00	408.903.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	319.655.900,00	319.613.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**01**	**4.01.3.29.0.00.1.00**	**01**	**2.13**	**00**	**Penataan Organisasi**	**394.679.000,00**	**377.214.083,00**	**71.732.380,00**	**70.198.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	277.136.500,00	261.743.583,00	52.279.684,00	50.798.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	51.242.500,00	49.880.900,00	9.726.348,00	9.700.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	66.300.000,00	65.589.600,00	9.726.348,00	9.700.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**01**	**4.01.3.29.0.00.1.00**	**01**	**2.14**	**00**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**804.379.100,00**	**732.684.072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	98.980.500,00	61.916.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	150.166.100,00	134.167.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.3.29.0.00.1.00	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	555.232.500,00	536.600.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**02**					**SEKRETARIAT DEWAN**								
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.1.00**				**SEKRETARIAT DEWAN**	**30.719.801.495,00**	**28.257.582.234,00**	**770.946.468,00**	**656.459.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.1.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**14.716.031.200,00**	**13.443.808.472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.1.00**	**02**	**2.01**	**00**	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**1.534.252.000,00**	**1.216.311.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	467.025.000,00	366.553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	823.441.000,00	662.054.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	192.161.000,00	148.703.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	51.625.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.1.00**	**02**	**2.02**	**00**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**564.681.000,00**	**474.026.055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	48.405.000,00	40.238.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.02	03	Pembahasan APBD	496.562.000,00	416.073.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	19.714.000,00	17.713.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.1.00**	**02**	**2.03**	**00**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**2.369.749.000,00**	**2.335.041.377,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	571.290.000,00	554.019.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	531.655.500,00	527.627.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	669.444.000,00	658.266.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	580.732.500,00	578.500.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	16.627.000,00	16.627.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.1.00**	**02**	**2.04**	**00**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**1.782.736.000,00**	**1.357.963.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	1.392.836.000,00	1.030.387.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	80.600.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	60.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	240.000.000,00	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	9.300.000,00	6.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.1.00**	**02**	**2.05**	**00**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**4.710.506.000,00**	**4.410.681.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	2.469.980.000,00	2.367.246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	2.240.526.000,00	2.043.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.1.00**	**02**	**2.06**	**00**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**465.476.200,00**	**416.107.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	461.310.000,00	416.107.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	4.166.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.1.00**	**02**	**2.08**	**00**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**3.288.631.000,00**	**3.233.677.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.263.446.000,00	3.230.609.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	25.185.000,00	3.067.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.1.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**16.003.770.295,00**	**14.813.773.762,00**	**770.946.468,00**	**656.459.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.1.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.613.788.895,00**	**4.327.057.978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.060.142.895,00	2.973.952.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.553.646.000,00	1.353.105.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.1.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.313.107.200,00**	**1.198.169.236,00**	**35.757.468,00**	**33.825.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.821.800,00	18.812.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.285.000,00	16.914.800,00	35.757.468,00	33.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	506.092.400,00	435.631.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	153.020.000,00	139.400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	125.000.000,00	123.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485.888.000,00	464.110.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.1.00**	**01**	**2.07**	**00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6.020.000,00**	**2.760.000,00**	**735.189.000,00**	**622.634.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.020.000,00	2.760.000,00	735.189.000,00	622.634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.1.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**291.000.000,00**	**103.918.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	291.000.000,00	103.918.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.1.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**448.990.000,00**	**283.264.303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	417.890.000,00	253.730.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.100.000,00	29.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.1.00**	**01**	**2.15**	**00**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**9.316.614.200,00**	**8.884.828.435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	9.164.522.200,00	8.744.712.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	152.092.000,00	140.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**02**	**4.02.0.00.0.00.1.00**	**01**	**2.16**	**00**	**Layanan Administrasi DPRD**	**14.250.000,00**	**13.775.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	02	4.02.0.00.0.00.1.00	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	14.250.000,00	13.775.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
5						**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**								
5	**01**					**PERENCANAAN**								
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**				**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**7.038.595.401,00**	**6.373.679.133,00**	**193.706.652,00**	**93.590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.130.615.200,00**	**973.702.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**02**	**2.01**	**00**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**548.827.000,00**	**430.819.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	361.604.000,00	262.991.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	187.223.000,00	167.828.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**02**	**2.02**	**00**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**205.775.000,00**	**185.767.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	205.775.000,00	185.767.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**02**	**2.03**	**00**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**376.013.200,00**	**357.114.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	376.013.200,00	357.114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**517.657.500,00**	**445.969.202,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**152.329.500,00**	**140.377.383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	61.994.000,00	55.748.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	90.335.500,00	84.628.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**03**	**2.02**	**00**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**216.819.000,00**	**172.786.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	109.411.000,00	88.507.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	107.408.000,00	84.278.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**03**	**2.03**	**00**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**148.509.000,00**	**132.805.819,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	74.173.000,00	61.306.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	74.336.000,00	71.499.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.390.322.701,00**	**4.954.007.531,00**	**193.706.652,00**	**93.590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.585.758.661,00**	**3.510.437.468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.060.540.661,00	2.986.978.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	525.218.000,00	523.459.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**881.276.700,00**	**756.785.367,00**	**4.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.752.000,00	23.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	304.488.200,00	225.398.490,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	121.326.500,00	113.375.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	396.710.000,00	369.259.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**01**	**2.07**	**00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**8.385.000,00**	**4.195.000,00**	**188.756.652,00**	**93.590.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.385.000,00	4.195.000,00	188.756.652,00	93.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**426.100.000,00**	**383.870.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	426.100.000,00	383.870.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**488.802.340,00**	**298.719.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.700.000,00	49.768.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.905.000,00	64.956.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	187.595.000,00	179.234.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.602.340,00	4.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**02**					**KEUANGAN**								
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.1.00**				**BADAN KEUANGAN DAERAH**	**27.238.305.593,00**	**24.770.935.835,00**	**924.168.205,00**	**914.472.996,00**	**2.114.665.260,00**	**1.587.597.109,00**	**119.789.616.987,00**	**119.166.749.510,00**
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.1.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**4.992.013.000,00**	**4.732.038.879,00**	**206.797.609,00**	**198.572.496,00**	**2.114.665.260,00**	**1.587.597.109,00**	**119.789.616.987,00**	**119.166.749.510,00**
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.1.00**	**02**	**2.01**	**00**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**2.742.589.100,00**	**2.672.706.963,00**	**78.991.530,00**	**77.672.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	131.197.000,00	130.358.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	120.564.000,00	119.118.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	895.224.100,00	881.735.893,00	35.732.880,00	35.678.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	983.698.000,00	955.300.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	311.651.000,00	309.481.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300.255.000,00	276.712.500,00	43.258.650,00	41.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.1.00**	**02**	**2.02**	**00**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**1.345.653.000,00**	**1.309.283.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	296.847.000,00	286.548.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	02	2.02	02	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	187.958.000,00	187.940.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	248.676.500,00	248.188.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	359.330.000,00	354.998.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	252.841.500,00	231.607.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.1.00**	**02**	**2.03**	**00**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**903.770.900,00**	**750.048.096,00**	**127.806.079,00**	**120.899.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	42.035.000,00	41.643.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	23.869.800,00	23.869.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	258.097.100,00	248.740.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	113.700.000,00	85.749.200,00	127.806.079,00	120.899.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	25.532.000,00	18.948.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	133.473.000,00	27.667.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	138.930.000,00	136.694.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	168.134.000,00	166.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.1.00**	**02**	**2.04**	**00**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.114.665.260,00**	**1.587.597.109,00**	**119.789.616.987,00**	**119.166.749.510,00**
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.665.260,00	1.587.597.109,00	119.789.616.987,00	119.166.749.510,00
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.1.00**	**02**	**2.05**	**00**	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.1.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**583.436.500,00**	**537.416.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.1.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**583.436.500,00**	**537.416.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	42.989.000,00	40.447.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	67.155.500,00	64.816.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	92.353.000,00	82.136.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	103.989.000,00	98.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	197.622.000,00	177.650.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	56.793.000,00	53.702.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	22.535.000,00	20.090.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.1.00**	**04**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1.009.604.900,00**	**822.502.937,00**	**150.000.000,00**	**149.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.1.00**	**04**	**2.01**	**00**	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**1.009.604.900,00**	**822.502.937,00**	**150.000.000,00**	**149.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	22.234.500,00	7.234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	96.910.000,00	92.419.100,00	150.000.000,00	149.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	127.299.900,00	8.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	155.696.000,00	152.367.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	129.959.500,00	120.499.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	477.505.000,00	441.822.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.1.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**20.653.251.193,00**	**18.678.977.219,00**	**567.370.596,00**	**566.000.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.1.00**	**01**	**2.01**	**00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**301.937.000,00**	**299.517.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	301.937.000,00	299.517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.1.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.138.121.323,00**	**16.273.109.553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.003.695.323,00	14.596.599.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.134.426.000,00	1.676.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.1.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.118.366.950,00**	**1.100.494.028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.544.750,00	36.544.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	354.256.700,00	353.832.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	101.841.500,00	93.864.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36.000.000,00	28.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	589.724.000,00	588.202.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.1.00**	**01**	**2.07**	**00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**17.260.000,00**	**17.260.000,00**	**567.370.596,00**	**566.000.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.260.000,00	17.260.000,00	567.370.596,00	566.000.500,00				
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.1.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**650.952.000,00**	**598.168.383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650.952.000,00	598.168.383,00						
5	**02**	**5.02.0.00.0.00.1.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**426.613.920,00**	**390.428.255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.440.000,00	230.583.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.1.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.173.920,00	159.844.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**03**					**KEPEGAWAIAN**								
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.03.00**				**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**7.491.420.374,00**	**6.884.711.746,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.03.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**2.569.914.440,00**	**2.278.215.498,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.03.00**	**02**	**2.01**	**00**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**277.497.640,00**	**265.856.408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	03	5.03.5.04.0.00.03.00	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	209.276.740,00	198.679.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03	5.03.5.04.0.00.03.00	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	30.004.000,00	29.650.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03	5.03.5.04.0.00.03.00	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	38.216.900,00	37.526.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.03.00**	**02**	**2.02**	**00**	**Mutasi dan Promosi ASN**	**1.266.976.300,00**	**1.243.027.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	03	5.03.5.04.0.00.03.00	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	1.202.260.300,00	1.179.042.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03	5.03.5.04.0.00.03.00	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	64.716.000,00	63.985.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.03.00**	**02**	**2.03**	**00**	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**1.025.440.500,00**	**769.331.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	03	5.03.5.04.0.00.03.00	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	1.025.440.500,00	769.331.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.03.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.921.505.934,00**	**4.606.496.248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.03.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.598.459.034,00**	**4.322.886.756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	03	5.03.5.04.0.00.03.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.120.478.218,00	3.863.393.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03	5.03.5.04.0.00.03.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	477.980.816,00	459.492.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.03.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**208.126.900,00**	**187.305.969,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	03	5.03.5.04.0.00.03.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.858.100,00	1.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03	5.03.5.04.0.00.03.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.822.400,00	6.142.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03	5.03.5.04.0.00.03.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.318.900,00	40.103.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03	5.03.5.04.0.00.03.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.178.500,00	11.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03	5.03.5.04.0.00.03.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03	5.03.5.04.0.00.03.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	131.749.000,00	121.365.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.03.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**97.800.000,00**	**80.198.523,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	03	5.03.5.04.0.00.03.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.800.000,00	80.198.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**03**	**5.03.5.04.0.00.03.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**17.120.000,00**	**16.105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	03	5.03.5.04.0.00.03.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.120.000,00	16.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**05**					**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.1.00**				**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.135.038.100,00**	**1.099.859.109,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**1.135.038.100,00**	**1.099.859.109,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**05**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**02**	**2.03**	**00**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**1.135.038.100,00**	**1.099.859.109,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	05	5.01.5.05.0.00.1.00	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	449.364.100,00	430.481.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	05	5.01.5.05.0.00.1.00	02	2.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	685.674.000,00	669.377.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6						**UNSUR PENGAWAS**								
6	**01**					**INSPEKTORAT**								
6	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**				**INSPEKTORAT**	**9.270.201.538,00**	**8.479.916.800,00**	**101.356.396,00**	**96.746.178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**3.379.702.500,00**	**2.992.364.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**02**	**2.01**	**00**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**2.785.210.500,00**	**2.482.853.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	443.621.000,00	302.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	361.767.000,00	320.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	391.486.000,00	391.191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	45.879.900,00	38.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	02	2.01	05	Pengawasan Desa	1.048.781.000,00	1.012.351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	159.550.000,00	99.471.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	334.125.600,00	318.279.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**02**	**2.02**	**00**	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**594.492.000,00**	**509.511.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	594.492.000,00	509.511.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**946.082.600,00**	**765.862.983,00**	**5.121.678,00**	**5.121.678,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**509.057.800,00**	**462.444.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	3.535.000,00	2.719.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	505.522.800,00	459.724.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**03**	**2.02**	**00**	**Pendampingan dan Asistensi**	**437.024.800,00**	**303.418.683,00**	**5.121.678,00**	**5.121.678,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	154.282.800,00	111.467.500,00	5.121.678,00	5.121.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	72.417.000,00	65.484.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	193.634.000,00	126.466.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	16.691.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.944.416.438,00**	**4.721.689.017,00**	**96.234.718,00**	**91.624.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.259.008.978,00**	**4.099.406.098,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.800.692.978,00	3.677.778.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	458.316.000,00	421.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**01**	**2.05**	**00**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**83.129.000,00**	**55.814.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.700.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.429.000,00	48.414.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**336.982.580,00**	**314.645.969,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	6.863.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.758.180,00	122.197.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.020.000,00	20.015.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.216.000,00	10.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.988.400,00	155.553.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**01**	**2.07**	**00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**22.744.000,00**	**20.775.000,00**	**96.234.718,00**	**91.624.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.970.000,00	5.640.000,00	75.234.718,00	70.624.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.774.000,00	15.135.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95.960.000,00**	**89.720.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.960.000,00	89.720.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**01**	**5.01.5.05.0.00.1.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**146.591.880,00**	**141.327.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.383.000,00	72.805.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.610.000,00	18.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01	5.01.5.05.0.00.1.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.598.880,00	50.492.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7						**UNSUR KEWILAYAHAN**								
7	**01**					**KECAMATAN**								
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.6.00**				**KECAMATAN SIBERUT UTARA**	**2.919.536.810,00**	**2.828.618.458,00**	**10.991.424,00**	**10.991.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.6.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.753.115.810,00**	**2.664.592.458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.6.00**	**01**	**2.01**	**00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**127.865.000,00**	**127.365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.6.00	01	2.01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.865.000,00	127.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.6.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.396.378.010,00**	**2.328.638.558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.6.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.816.150.010,00	1.755.506.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.6.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	580.228.000,00	573.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.6.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**149.852.800,00**	**146.432.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
7	01	7.01.5.05.0.00.6.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.515.100,00	1.515.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.6.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.611.400,00	42.611.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.6.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.656.300,00	1.156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.6.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.070.000,00	101.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.6.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**26.000.000,00**	**14.197.343,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.6.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.000.000,00	14.197.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.6.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.020.000,00**	**47.958.657,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.6.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.6.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.500.000,00	2.438.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.6.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.720.000,00	19.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.6.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**10.991.424,00**	**10.991.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.6.00**	**02**	**2.04**	**00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**10.991.424,00**	**10.991.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.6.00	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.200.000,00	7.200.000,00	10.991.424,00	10.991.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.6.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**83.112.000,00**	**81.112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.6.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**83.112.000,00**	**81.112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.6.00	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.709.000,00	32.719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.6.00	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.403.000,00	48.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.6.00**	**05**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**38.589.000,00**	**38.589.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.6.00**	**05**	**2.01**	**00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**38.589.000,00**	**38.589.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
7	01	7.01.5.05.0.00.6.00	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	38.589.000,00	38.589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.6.00**	**06**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**37.520.000,00**	**37.125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.6.00**	**06**	**2.01**	**00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**37.520.000,00**	**37.125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.6.00	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	37.520.000,00	37.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.7.00**				**KECAMATAN SIBERUT TENGAH**	**2.422.859.360,00**	**2.279.149.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.7.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.205.924.460,00**	**2.073.628.225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.7.00**	**01**	**2.01**	**00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.800.000,00**	**30.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.7.00	01	2.01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.7.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.043.443.360,00**	**1.928.555.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.7.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.396.477.860,00	1.321.997.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.7.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	646.965.500,00	606.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.7.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**119.681.100,00**	**103.273.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.7.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.500,00	2.000.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.7.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.420.200,00	27.235.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.7.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.503.400,00	2.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.7.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.757.000,00	71.931.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.7.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.7.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.7.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.7.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.7.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.7.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**12.250.000,00**	**12.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.7.00**	**02**	**2.04**	**00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**12.250.000,00**	**12.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.7.00	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12.250.000,00	12.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.7.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**39.999.900,00**	**32.209.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.7.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**39.999.900,00**	**32.209.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.7.00	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.7.00	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.999.900,00	12.209.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.7.00**	**05**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.7.00**	**05**	**2.01**	**00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.7.00	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.7.00**	**06**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**164.685.000,00**	**161.291.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.7.00**	**06**	**2.01**	**00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**164.685.000,00**	**161.291.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.7.00	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	88.514.000,00	85.147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.7.00	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	76.171.000,00	76.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.8.00**				**KECAMATAN SIBERUT BARAT**	**2.306.532.847,00**	**2.241.260.202,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.8.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.099.771.847,00**	**2.035.757.202,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.8.00**	**01**	**2.01**	**00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**165.805.000,00**	**164.035.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.8.00	01	2.01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	165.805.000,00	164.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.8.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.705.474.947,00**	**1.646.560.752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.8.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.055.944.947,00	999.386.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.8.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	649.530.000,00	647.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.8.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**186.003.100,00**	**183.672.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.8.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.960.000,00	3.948.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.8.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.443.100,00	47.544.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.8.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.600.000,00	132.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.8.00**	**01**	**2.07**	**00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**7.488.800,00**	**7.488.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.8.00	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.488.800,00	7.488.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.8.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**24.000.000,00**	**24.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.8.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.8.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.8.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.8.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**74.420.000,00**	**73.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.8.00**	**02**	**2.04**	**00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**74.420.000,00**	**73.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.8.00	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	74.420.000,00	73.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.8.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**51.903.000,00**	**51.803.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.8.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**51.903.000,00**	**51.803.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.8.00	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	41.903.000,00	41.803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.8.00	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.8.00**	**05**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.8.00**	**05**	**2.01**	**00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.8.00	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.8.00**	**06**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**80.438.000,00**	**80.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.8.00**	**06**	**2.01**	**00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**80.438.000,00**	**80.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.8.00	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	80.438.000,00	80.220.000,00						
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**				**KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA**	**2.227.235.455,00**	**2.177.552.085,00**	**37.263.000,00**	**36.579.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.136.010.455,00**	**2.085.267.085,00**	**37.263.000,00**	**36.579.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**01**	**2.01**	**00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**64.968.800,00**	**64.948.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.968.800,00	64.948.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.827.183.630,00**	**1.777.623.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.393.696.630,00	1.350.818.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	433.487.000,00	426.804.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**117.097.750,00**	**116.904.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.997.650,00	5.997.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.150.000,00	54.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.100,00	6.997.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.950.000,00	49.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**01**	**2.07**	**00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.607.275,00**	**2.607.275,00**	**37.263.000,00**	**36.579.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	870.000,00	870.000,00	21.000.000,00	20.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.737.275,00	1.737.275,00	16.263.000,00	16.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49.000.000,00**	**48.980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.000.000,00	48.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**75.153.000,00**	**74.203.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.653.000,00	40.153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.500.000,00	19.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**29.140.000,00**	**29.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**02**	**2.04**	**00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**29.140.000,00**	**29.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	29.140.000,00	29.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**35.565.000,00**	**35.565.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**35.565.000,00**	**35.565.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23.965.000,00	23.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**06**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**26.520.000,00**	**27.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**06**	**2.01**	**00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**26.520.000,00**	**27.580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	26.520.000,00	27.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**				**KECAMATAN SIBERUT SELATAN**	**2.717.443.515,00**	**2.615.384.192,00**	**40.702.100,00**	**37.488.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.595.708.515,00**	**2.496.354.192,00**	**40.702.100,00**	**37.488.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**01**	**2.01**	**00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**97.590.000,00**	**96.830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.590.000,00	96.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.297.540.420,00**	**2.207.839.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.783.600.420,00	1.694.547.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	513.940.000,00	513.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**144.473.320,00**	**136.592.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.574.300,00	3.880.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.985.020,00	41.915.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.794.000,00	1.747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.120.000,00	89.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**01**	**2.07**	**00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**0,00**	**40.702.100,00**	**37.488.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	40.702.100,00	37.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.400.000,00**	**8.386.797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.400.000,00	8.386.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**47.704.775,00**	**46.704.775,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.704.775,00	14.704.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**24.260.000,00**	**22.905.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**02**	**2.04**	**00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**24.260.000,00**	**22.905.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	24.260.000,00	22.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**62.855.000,00**	**62.225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**62.855.000,00**	**62.225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.855.000,00	42.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**05**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**05**	**2.01**	**00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**06**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**34.620.000,00**	**33.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.9.00**	**06**	**2.01**	**00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**34.620.000,00**	**33.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.9.00	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	34.620.000,00	33.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.11.00**				**KECAMATAN SIPORA UTARA**	**2.790.351.376,00**	**2.681.863.234,00**	**22.870.422,00**	**22.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.11.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.614.326.076,00**	**2.507.537.934,00**	**22.870.422,00**	**22.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.11.00**	**01**	**2.01**	**00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**82.395.000,00**	**80.360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.11.00	01	2.01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.395.000,00	80.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.11.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.292.170.676,00**	**2.197.924.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.11.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.749.842.676,00	1.664.555.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.11.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	542.328.000,00	533.369.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.11.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**144.811.100,00**	**144.594.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.11.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.984.500,00	6.904.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
7	01	7.01.5.05.0.00.11.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.769.500,00	62.691.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.11.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.618.100,00	15.608.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.11.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.439.000,00	59.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.11.00**	**01**	**2.07**	**00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**0,00**	**0,00**	**22.870.422,00**	**22.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.11.00	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	22.870.422,00	22.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.11.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**34.688.300,00**	**26.425.634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.11.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	21.744.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.11.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.688.300,00	4.681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.11.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60.261.000,00**	**58.233.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.11.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.881.000,00	53.853.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.11.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.11.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**52.735.000,00**	**52.295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.11.00**	**02**	**2.04**	**00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**52.735.000,00**	**52.295.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.11.00	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	18.300.000,00	17.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.11.00	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	34.435.000,00	34.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.11.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**21.084.800,00**	**21.084.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.11.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**21.084.800,00**	**21.084.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.11.00	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.134.800,00	16.134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.11.00	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.11.00**	**05**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**16.952.500,00**	**16.952.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.11.00**	**05**	**2.01**	**00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**16.952.500,00**	**16.952.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
7	01	7.01.5.05.0.00.11.00	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	16.952.500,00	16.952.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.11.00**	**06**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**85.253.000,00**	**83.993.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.11.00**	**06**	**2.01**	**00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**85.253.000,00**	**83.993.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.11.00	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	29.919.000,00	29.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.11.00	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	55.334.000,00	54.614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.12.00**				**KECAMATAN SIPORA SELATAN**	**3.281.479.176,00**	**3.073.027.069,00**	**19.031.896,00**	**19.030.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.12.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.179.705.876,00**	**3.008.270.269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.12.00**	**01**	**2.01**	**00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**102.540.000,00**	**102.480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.12.00	01	2.01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.540.000,00	102.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.12.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.899.530.976,00**	**2.793.837.039,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.12.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.226.909.976,00	2.151.111.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.12.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	672.621.000,00	642.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.12.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**153.634.900,00**	**109.470.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.12.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.970.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.12.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.964.900,00	57.866.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.12.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.700.000,00	48.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.12.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**24.000.000,00**	**2.482.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.12.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	2.482.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.12.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**44.405.800,00**	**25.359.300,00**	**19.031.896,00**	**19.030.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.12.00**	**02**	**2.04**	**00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**44.405.800,00**	**25.359.300,00**	**19.031.896,00**	**19.030.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.12.00	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	44.405.800,00	25.359.300,00	19.031.896,00	19.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.12.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**44.690.000,00**	**27.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.12.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**44.690.000,00**	**27.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.12.00	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	44.690.000,00	27.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.12.00**	**05**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**12.677.500,00**	**12.177.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.12.00**	**05**	**2.01**	**00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**12.677.500,00**	**12.177.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.12.00	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	12.677.500,00	12.177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.13.00**				**KECAMATAN PAGAI UTARA**	**2.373.567.748,00**	**2.236.822.292,00**	**67.819.000,00**	**56.899.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.13.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.233.567.748,00**	**2.099.209.792,00**	**67.819.000,00**	**56.899.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.13.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.058.220.598,00**	**1.976.210.092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.13.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.480.520.598,00	1.403.167.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.13.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	577.700.000,00	573.042.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.13.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**106.221.150,00**	**107.104.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.13.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.050.750,00	4.010.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.13.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.186.400,00	34.529.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.13.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.259.000,00	6.179.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.13.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.725.000,00	62.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.13.00**	**01**	**2.07**	**00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**67.819.000,00**	**56.899.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
7	01	7.01.5.05.0.00.13.00	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.100.000,00	1.100.000,00	67.819.000,00	56.899.000,00				
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.13.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.650.000,00**	**1.825.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.13.00	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.650.000,00	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.13.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**64.376.000,00**	**12.970.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.13.00	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	14.500.000,00	12.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.13.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.876.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.13.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**56.800.000,00**	**55.922.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.13.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**56.800.000,00**	**55.922.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.13.00	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.13.00	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.300.000,00	47.422.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.13.00**	**05**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.13.00**	**05**	**2.01**	**00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**8.500.000,00**	**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.13.00	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.13.00**	**06**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**74.700.000,00**	**73.190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.13.00**	**06**	**2.01**	**00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**74.700.000,00**	**73.190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.13.00	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35.940.000,00	35.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.13.00	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	38.760.000,00	37.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.14.00**				**KECAMATAN SIKAKAP**	**2.914.284.117,00**	**2.832.635.342,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.14.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.777.186.117,00**	**2.696.674.842,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.14.00**	**01**	**2.01**	**00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**41.580.000,00**	**41.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.14.00	01	2.01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.580.000,00	41.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.14.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.578.460.735,00**	**2.507.263.939,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.14.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.196.800.735,00	2.126.519.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.14.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	381.660.000,00	380.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.14.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**101.103.300,00**	**98.508.260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.14.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.003.300,00	27.408.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.14.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.100.000,00	71.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.14.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**33.000.000,00**	**26.340.561,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.14.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000,00	26.340.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.14.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**23.042.082,00**	**23.042.082,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.14.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.14.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.042.082,00	21.042.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.14.00**	**02**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**29.035.000,00**	**28.370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.14.00**	**02**	**2.04**	**00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**29.035.000,00**	**28.370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.14.00	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	29.035.000,00	28.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.14.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**47.650.500,00**	**47.178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.14.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**47.650.500,00**	**47.178.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
7	01	7.01.5.05.0.00.14.00	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.500,00	19.990.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.14.00	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.650.000,00	27.187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.14.00**	**05**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**14.662.500,00**	**14.662.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.14.00**	**05**	**2.01**	**00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**14.662.500,00**	**14.662.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.14.00	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	14.662.500,00	14.662.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.14.00**	**06**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**45.750.000,00**	**45.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.14.00**	**06**	**2.01**	**00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**45.750.000,00**	**45.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.14.00	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	45.750.000,00	45.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.15.00**				**KECAMATAN PAGAI SELATAN**	**2.673.790.238,00**	**2.569.872.164,00**	**150.336.192,00**	**149.248.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.15.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.504.299.238,00**	**2.403.726.664,00**	**150.336.192,00**	**149.248.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.15.00**	**01**	**2.01**	**00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**87.490.000,00**	**87.455.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.15.00	01	2.01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.490.000,00	87.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.15.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.157.079.638,00**	**2.066.675.155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.15.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.509.946.638,00	1.428.428.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.15.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	647.133.000,00	638.246.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.15.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**210.379.600,00**	**200.520.509,00**	**74.436.192,00**	**74.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.15.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.685.800,00	8.639.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.15.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.060.000,00	7.760.000,00	74.436.192,00	74.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.15.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.015.800,00	30.985.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
7	01	7.01.5.05.0.00.15.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.618.000,00	153.135.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.15.00**	**01**	**2.07**	**00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**680.000,00**	**680.000,00**	**75.900.000,00**	**74.998.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.15.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	680.000,00	680.000,00	75.900.000,00	74.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.15.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.800.000,00**	**4.526.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.15.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000,00	4.526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.15.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**43.870.000,00**	**43.870.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.15.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.960.000,00	35.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.15.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.910.000,00	7.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.15.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**39.973.000,00**	**39.918.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.15.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**39.973.000,00**	**39.918.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.15.00	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.290.000,00	25.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	7.01.5.05.0.00.15.00	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.683.000,00	14.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.15.00**	**05**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**10.625.000,00**	**10.625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.15.00**	**05**	**2.01**	**00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**10.625.000,00**	**10.625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.15.00	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.15.00**	**06**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**118.893.000,00**	**115.602.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**01**	**7.01.5.05.0.00.15.00**	**06**	**2.01**	**00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**118.893.000,00**	**115.602.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	01	7.01.5.05.0.00.15.00	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	54.950.000,00	51.862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
7	01	7.01.5.05.0.00.15.00	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	63.943.000,00	63.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8						**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**								
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.00**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.00**				**KANTOR KESATUAN KEBANGSAAN POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**2.700.841.949,00**	**2.562.070.340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.00**	**03**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**642.228.000,00**	**642.103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.00**	**03**	**2.01**	**00**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan**	**642.228.000,00**	**642.103.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	642.228.000,00	642.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.00**	**04**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**90.658.000,00**	**87.958.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.00**	**04**	**2.01**	**00**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**90.658.000,00**	**87.958.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	90.658.000,00	87.958.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.00**	**05**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**75.252.300,00**	**68.399.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.00**	**05**	**2.01**	**00**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**75.252.300,00**	**68.399.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	75.252.300,00	68.399.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.00**	**06**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**154.063.500,00**	**138.344.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.00**	**06**	**2.01**	**00**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**154.063.500,00**	**138.344.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	55.640.000,00	51.716.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	46.887.500,00	36.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan	51.536.000,00	50.298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.00**	**01**	**0.00**	**00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.738.640.149,00**	**1.625.264.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.02**	**00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.503.370.149,00**	**1.413.515.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.118.394.149,00	1.072.205.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	384.976.000,00	341.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.06**	**00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**199.349.000,00**	**184.936.448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.100,00	4.995.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.573.300,00	68.139.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE						Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Transfer	
							Operasi		Modal		Tidak Terduga			
							Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.002.600,00	9.802.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.778.000,00	87.199.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.08**	**00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**13.800.000,00**	**7.181.072,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.800.000,00	7.181.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**01**	**8.01.0.00.0.00.01.00**	**01**	**2.09**	**00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**22.121.000,00**	**19.632.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.001.000,00	14.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						JUMLAH	**594.317.753.544,00**	**544.000.215.852,02**	**190.832.037.953,00**	**164.639.582.130,00**	**2.114.665.260,00**	**1.587.597.109,00**	**119.789.616.987,00**	**119.166.749.510,00**

Tuapejat, 19 Agustus 2022
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran II : **Peraturan Daerah**
Nomor : **2 Tahun 2022**
Tanggal : **19 Agustus 2022**

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	2021	2020
1	2		4
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	**41.255.059.126,74**	**29.950.726.933,23**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	41.255.059.126,74	29.950.726.933,23
3	**Sub Total**	**0,00**	**0,00**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	42.013.999.823,09	41.255.059.126,74
5	**Sub Total**	**42.013.999.823,09**	**41.255.059.126,74**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	**42.013.999.823,09**	**41.255.059.126,74**

Tuapejat, 19 Agustus 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran III : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
1	**KEGIATAN OPERASIONAL**				
2	**PENDAPATAN - LO**				
3	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO**				
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO	4.292.094.029,00	4.077.683.488,00	(214.410.541,00)	(5,26)
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	2.992.771.151,00	5.944.474.967,00	2.951.703.816,00	49,65
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	10.684.123.854,00	12.591.521.757,00	1.907.397.903,00	15,15
7	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	9.142.941.157,37	12.805.647.244,51	3.662.706.087,14	28,60
8	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**27.111.930.191,37**	**35.419.327.456,51**	**8.307.397.265,14**	**23,45**
9	**PENDAPATAN TRANSFER - LO**				
10	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**				
11	Dana Bagi Hasil	22.052.156.406,00	12.208.279.004,00	(9.843.877.402,00)	(80,63)
12	Dana Alokasi Umum	548.987.977.000,00	556.457.541.000,00	7.469.564.000,00	1,34
13	Dana Alokasi Khusus - Fisik	69.985.666.825,00	49.701.316.885,00	(20.284.349.940,00)	(40,81)
14	Dana Alokasi Khusus - NonFisik	41.685.806.550,00	68.323.778.130,00	26.637.971.580,00	38,99
15	Dana Desa	60.246.587.200,00	0,00	(60.246.587.200,00)	100,00
16	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan**	**742.958.193.981,00**	**686.690.915.019,00**	**(56.267.278.962,00)**	**(8,19)**
17	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	30.381.199.082,00	36.147.772.243,00	5.766.573.161,00	15,95
19	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**30.381.199.082,00**	**36.147.772.243,00**	**5.766.573.161,00**	**15,95**
21	**Jumlah Pendapatan Transfer**	**773.339.393.063,00**	**722.838.687.262,00**	**(50.500.705.801,00)**	**(6,99)**
22	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO**				

NO	URAIAN	2021	2020	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
23	Pendapatan Hibah - LO	8.439.410.656,00	38.550.542.993,04	30.111.132.337,04	78,11
24	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	22.762.148.500,00	0,00	(22.762.148.500,00)	0,00
26	**Jumlah Pendapatan Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**31.201.559.156,00**	**38.550.542.993,04**	**7.348.983.837,04**	**19,06**
27	**Jumlah Pendapatan**	**831.652.882.410,37**	**796.808.557.711,55**	**(34.844.324.698,82)**	**(4,37)**
28	**BEBAN**				
29	**BEBAN OPERASI**				
30	Beban Pegawai - LO	284.540.969.277,00	247.582.508.950,00	(36.958.460.327,00)	(14,93)
31	Beban Persediaan	50.155.288.889,78	68.565.926.728,35	18.410.637.838,57	26,85
32	Beban Jasa	130.139.430.814,62	156.310.236.935,33	26.170.806.120,71	16,74
33	Beban Pemeliharaan	7.027.027.663,53	12.170.938.382,00	5.143.910.718,47	42,26
34	Beban Perjalanan Dinas	46.584.216.644,00	55.129.530.479,00	8.545.313.835,00	15,50
35	Beban Subsidi	9.585.794.613,00	6.734.707.000,00	(2.851.087.613,00)	(42,33)
36	Beban Hibah	19.777.337.264,00	4.035.684.836,00	(15.741.652.428,00)	(390,06)
37	Beban Bantuan Sosial	876.212.731,00	471.484.588,00	(404.728.143,00)	(85,84)
38	**Jumlah Beban Operasi**	**548.686.277.896,93**	**551.001.017.898,68**	**2.314.740.001,75**	**0,42**
39	Beban Penyusutan Aset Tetap	100.856.715.912,13	101.689.717.196,00	833.001.283,87	0,82
40	Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	19.762.132,00	0,00	(19.762.132,00)	100,00
41	Beban Amortisasi	1.074.696.125,36	1.231.381.525,36	156.685.400,00	12,72
42	Beban Penyisihan Piutang	347.787.554,90	577.220.751,71	229.433.196,81	39,75
43	Beban Lain-lain	3.765.032.919,00	8.838.477.225,53	5.073.444.306,53	57,40
44	**Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi, Penyisishan dan Lain-lain**	**106.063.994.643,39**	**112.336.796.698,60**	**6.272.802.055,21**	**5,58**
45	**BEBAN TRANSFER**				
46	Beban Transfer				
47	Beban Bagi Hasil	2.446.929.619,00	1.563.200.931,00	(883.728.688,00)	(56,53)
48	Beban Bantuan Keuangan	116.719.819.891,00	57.174.250.160,00	(59.545.569.731,00)	(104,15)
49	**Jumlah Beban Transfer**	**119.166.749.510,00**	**58.737.451.091,00**	**(60.429.298.419,00)**	**(102,88)**
50	**Jumlah Beban**	**773.917.022.050,32**	**722.075.265.688,28**	**(51.841.756.362,04)**	**(7,18)**
51	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI**	**57.735.860.360,05**	**74.733.292.023,27**	**16.997.431.663,22**	**22,74**
52	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**				
53	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	URAIAN	2021	2020	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
57	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	807.082.432,38	648.505.702,62	(158.576.729,76)	(24,45)
60	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**	**(807.082.432,38)**	**(648.505.702,62)**	**158.576.729,76**	**(24,45)**
61	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA**	**56.928.777.927,67**	**74.084.786.320,65**	**17.156.008.392,98**	**23,16**
62					
63	**POS LUAR BIASA**				
64	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Beban Luar Biasa	1.135.106.365,00	345.200.000,00	(789.906.365,00)	(228,83)
66	**SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA**	**(1.135.106.365,00)**	**(345.200.000,00)**	789.906.365,00	(228,83)
67	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	**55.793.671.562,67**	**73.739.586.320,65**	17.945.914.757,98	24,34

Tuapejat, 19 Agustus 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran IV : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
1	2		4
1	**EKUITAS AWAL**	**1.930.262.310.524,14**	**1.975.077.960.958,04**
2	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	**55.793.671.562,67**	**73.739.586.320,65**
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
6	Koreksi ekuitas lainnya	367.894.655,53	(118.555.236.754,55)
7	**EKUITAS AKHIR**	**1.986.423.876.742,34**	**1.930.262.310.524,14**

Tuapejat, 19 Agustus 2022
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran V : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NERACA
Per 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
1	2	3	4
1	**ASET**		
2	**ASET LANCAR**		
3	Kas di Kas Daerah	37.166.020.148,09	37.083.956.419,74
4	Kas di Bendahara Penerimaan	16.000.000,00	56.663.100,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	21.637.000,00	0,00
6	Kas di FKTP	0,00	0,00
7	Kas di Bendahara BOS	5.097.942.601,00	4.114.453.198,00
8	Piutang Pajak	4.811.963.070,00	4.405.623.663,00
9	Piutang Retribusi	7.221.338,00	97.703.142,00
10	Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	6.844.342.051,00
11	Piutang Lainnya	390.835.512,36	390.835.512,36
12	Penyisihan Piutang	(3.786.275.821,25)	(3.438.488.266,35)
13	Beban Dibayar Dimuka	57.782.258,07	70.416.666,67
14	Persediaan	12.297.581.712,13	16.184.451.898,29
15	**JUMLAH ASET LANCAR**	**56.080.707.818,40**	**65.809.957.384,71**
16	**INVESTASI JANGKA PANJANG**		
17	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**		
18	Dana Bergulir	0,00	0,00
19	Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
20	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen**	0,00	0,00
21	**Investasi Jangka Panjang Permanen**		
22	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	96.020.184.798,55	95.491.405.383,62

NO	URAIAN	2021	2020
1	2	3	4
23	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen**	**96.020.184.798,55**	**95.491.405.383,62**
24	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG**	**96.020.184.798,55**	**95.491.405.383,62**
25	**ASET TETAP**		
26	Tanah	81.645.374.920,00	80.167.437.020,00
27	Peralatan dan Mesin	373.213.406.608,30	354.804.302.232,30
28	Gedung dan Bangunan	665.360.403.072,94	642.970.806.097,47
29	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.339.750.739.736,03	1.141.199.238.936,03
30	Aset Tetap Lainnya	20.580.681.404,00	18.946.541.582,00
31	Konstruksi Dalam Pengerjaan	52.955.574.094,00	128.399.475.260,00
32	Akumulasi Penyusutan	(774.734.172.401,74)	(678.652.100.048,61)
33	**JUMLAH ASET TETAP**	**1.758.772.007.433,53**	**1.687.835.701.079,19**
34	**DANA CADANGAN**		
35	Dana Cadangan	0,00	0,00
36	**JUMLAH DANA CADANGAN**	**0,00**	**0,00**
37	**ASET LAINNYA**		
38	Tagihan Jangka Panjang	1.338.253.318,00	607.841.468,00
39	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
40	Aset Tidak Berwujud	10.019.125.626,82	9.667.542.626,82
41	Aset Lain-lain	224.079.804.997,31	228.649.635.645,31
42	- Barang Rusak Berat	63.497.439.687,00	68.122.004.191,00
43	- Barang dalam penelusuran	9.304.583.008,00	8.446.808.908,00
44	- Barang bukan aset tetap	0,00	0,00
45	- Barang di mutasikan	137.084.259.662,00	1.029.577.175,00
46	- Barang Hilang	179.813.700,00	211.053.700,00
47	- Barang dikuasai pihak ketiga	3.054.095.796,00	3.054.095.796,00
48	- Barang yang dihibahkan	2.848.017.845,86	139.840.255.332,86
49	- Perumahan KM 2	3.900.000.000,00	3.900.000.000,00
50	- Jaminan Pelaksanaan	3.946.795.542,45	3.946.795.542,45
51	- Dana bergulir	99.045.000,00	99.045.000,00
52	- Ketekoran Kas	165.754.756,00	0,00
53	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(7.636.693.876,08)	(6.561.997.750,72)
54	Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	(146.946.996.278,19)	(150.423.795.977,79)

NO	URAIAN	2021	2020
1	2	3	4
55	Aset yang dibatasi Penggunaanya	0,00	817.570.152,00
56	**JUMLAH ASET LAINNYA**	**80.853.493.787,86**	**82.756.796.163,62**
57	**JUMLAH ASET**	**1.991.726.393.838,34**	**1.931.893.860.011,14**
58	**KEWAJIBAN**		
59	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		
60	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	287.599.926,00	13.591,00
61	Utang Bunga	0,00	0,00
62	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
63	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
64	Utang Beban	0,00	0,00
65	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.014.917.170,00	813.965.744,00
66	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**5.302.517.096,00**	**813.979.335,00**
67	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**		
68	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
69	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	817.570.152,00
70	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**0,00**	**817.570.152,00**
71	**JUMLAH KEWAJIBAN**	**5.302.517.096,00**	**1.631.549.487,00**
72	**EKUITAS**		
73	EKUITAS	1.986.423.876.742,34	1.930.262.310.524,14
74	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**	**1.991.726.393.838,34**	**1.931.893.860.011,14**

Tuapejat, 19 Agustus 2022
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran VI : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

N0	URAIAN	2021	2020
1	2	3	4
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	***Arus Kas Masuk***		
3	Penerimaan Pajak Daerah	3.860.497.217,00	3.531.794.196,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	3.033.172.955,00	5.976.710.358,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.684.123.854,00	12.591.521.757,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	13.967.871.153,37	12.805.647.244,51
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil	22.052.156.406,00	12.208.279.004,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	548.987.977.000,00	556.457.541.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	69.985.666.825,00	49.701.316.885,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - NonFisik	41.685.806.550,00	68.323.778.130,00
11	Penerimaan Dana Desa	60.246.587.200,00	0,00
12	Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.308.263.287,00	29.303.430.192,00
13	Penerimaan Pendapatan Hibah	23.248.615.000,00	23.984.150.000,00
14	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
15	***Jumlah Arus Kas Masuk***	**830.060.737.447,37**	**774.884.168.766,51**
16	***Arus Kas Keluar***		
17	Belanja Pegawai	284.566.995.633,00	349.810.972.110,00
18	Belanja Barang dan Jasa	243.479.793.619,02	178.545.979.368,00
19	Belanja Subsidi	9.585.794.613,00	6.734.707.000,00
20	Belanja Hibah	5.491.419.256,00	3.853.184.836,00
21	Belanja Bantuan Sosial	876.212.731,00	471.484.588,00
22	Belanja Tidak Terduga	1.587.597.109,00	24.195.818.997,00
23	Belanja Bagi Hasil	2.446.929.619,00	1.563.200.931,00
24	Belanja Bantuan Keuangan	116.719.819.891,00	114.403.671.266,00
25	***Jumlah Arus Kas Keluar***	**664.754.562.471,02**	**679.579.019.096,00**
26	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**	**165.306.174.976,35**	**95.305.149.670,51**
27	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**		
28	***Arus Kas Masuk***		
29	Penjualan Peralatan Mesin Hasil Lelang	92.347.850,00	0,00
30	Penjualan Hasil Perikanan	0,00	0,00

N0	URAIAN	2021	2020
1	2	3	4
31	***Jumlah Arus Kas Masuk***	**92.347.850,00**	**0,00**
32	*Arus Kas Keluar*		
33	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.876.770.459,00	28.871.620.930,00
35	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.708.856.761,00	32.557.717.902,00
36	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.471.089.584,00	76.035.794.152,00
37	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.582.865.326,00	4.538.329.723,00
38	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
39	*Jumlah Arus Kas Keluar*	164.639.582.130,00	142.003.462.707,00
40	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**	**(164.547.234.280,00)**	**(142.003.462.707,00)**
41	**Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran**		
42	***Arus Kas Masuk***		
43	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	42.982.323.420,00	38.216.462.847,00
44	***Jumlah Arus Kas Masuk***	**42.982.323.420,00**	**38.216.462.847,00**
45	*Arus Kas Keluar*		
46	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	42.694.737.085,00	38.216.462.847,00
47	***Jumlah Arus Kas Keluar***	**42.694.737.085,00**	**38.216.462.847,00**
48	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran**	**287.586.335,00**	**0,00**
49	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	1.046.527.031,35	(46.698.313.036,49)
50	Saldo Awal Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran	41.198.409.617,74	29.950.740.524,23
51	Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran	42.244.936.649,09	41.198.409.617,74
52	Saldo Akhir Kas di BUD dan Bendahara Penerimaan	56.663.100,00	56.663.100,00
53	**Saldo Akhir Kas**	**42.301.599.749,09**	**41.255.072.717,74**
54	Terdiri Dari :		
55	Kas di Kas Daerah	37.166.020.148,09	37.083.956.419,74
56	Kas di Bendahara Penerimaan	16.000.000,00	56.663.100,00
57	Kas di Bendahara Pengeluaran	21.637.000,00	0,00
58	Kas di BLUD	0,00	0,00
59	Kas Dana BOS	5.097.942.601,00	4.114.453.198,00

Tuapejat, 19 Agustus 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. INFORMASI UMUM

Kabupaten Kepulauan Mentawai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kabupaten Kepulauan Mentawai, merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Barat, Secara geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai berada di Bagian Barat Negara Kesatuan Republik Indonesia dipisahkan oleh Selat Mentawai dengan Pulau Sumatera, yang terletak antara 00 55' 00" – 30 21' 00" LS dan 980 35' 00" – 1000 32' 00" BT dengan luas wilayah tercatat 6.011,35 Km^2 dan garis pantai sepanjang 1.402,66 Km.

Daratan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini terpisahkan dari Provinsi Sumatera Barat oleh laut dengan perbatasan di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Siberut, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Selat Mentawai dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari tiga pulau besar yaitu Pulau Siberut, Sipora dan Pagai Utara Selatan dan 98 pulau kecil lainnya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dari 99 Pulau tersebut, satu pulau telah dinyatakan hilang, yaitu Pulau Sibikti yang ada di Kecamatan Siberut Barat Daya.

Keadaan geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai bervariasi antara daratan, sungai, dan bukit-bukit, dimana rata-rata ketinggian daerahseluruh kecamatan dari permukaan laut adalah dua meter. Kabupaten Kepulauan Mentawai beribukota di Tuapejat yang terletak di Kecamatan Sipora Utara, untuk mencapai Ibukota Provinsi Sumatera Barat, harus ditempuh melalui jalur laut. Begitu pula halnya transportasi dari masing-masing Ibu kota Kecamatan ke Kota Padang ataupun ke Ibu kota Kabupaten harus ditempuh melalui jalur laut kecuali dari Padang ke Ibukota Kabupaten (PP) bisa ditempuh melalui jalur udara dua kali seminggu.

Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki 10 Kecamatan, 43 desa dan dusun menjadi 354 dusun yakni:

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa	Dusun
1.	Pagai Selatan	Bulasat	4	49
2.	Sikakap	Taikako	3	44
3.	Pagai Utara	Saumanganya	3	30
4.	Sipora Selatan	Sioban	7	48
5.	Sipora Utara	Sido Makmur	6	29
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	5	36
7.	Siberut Barat Daya	Taileleu	3	30
8.	Siberut Tengah	Saibi Samukop	3	33
9.	Siberut Utara	Muara Sikabaluan	6	26
10.	Siberut Barat	Simalegi	3	29
	Jumlah		**43**	**354**

Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai pada awal tahun 2020 berjumlah 87.623 jiwa, yang terdiri dari 45.477 jiwa Laki-laki dan 42.146 jiwa perempuan. Berikut jumlah penduduk masing-masing kecamatan:

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1.	Pagai Selatan	4.890	4.483	9.373	10,70
2.	Sikakap	5.298	4.921	10.219	11,66
3.	Pagai Utara	3.142	2.889	6.031	6,88
4.	Sipora Selatan	5.054	4.758	9.812	11,20
5.	Sipora Utara	6.161	5.807	11.968	13,66
6	Siberut Selatan	5.116	4.817	9.933	11,34
7.	Siberut Barat Daya	3.697	3.361	7.058	8,05
8.	Siberut Tengah	3.676	3.413	7.089	8,09
9	Siberut Utara	4.352	3.985	8.337	9,51
10	Siberut Barat	4.091	3.712	7.803	8,91
	TOTAL	**45.477**	**42.146**	**87.623**	100,00

(sumber data BPS: KKMDA – 2020)

Jika dilihat dari persentase penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat rata-rata penyebaran penduduk di sepuluh kecamatan sebesar 9,99%, sebagaimana terlihat pada gambar sebagai berikut:

Tahun 2021 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 pada masa Yudas Sabaggalet sebagai Bupati dan Kortanius Sabeleake sebagai Wakil Bupati Kepulauan Mentawai untuk periode 2017-2022.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2021 berjumlah 20 orang yang semuanya laki-laki. Anggota terbanyak berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berjumlah 4 orang. Partai Nasional Demokrat (NASDEM) berjumlah 3 orang. Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan

Indonesia (Perindo), dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) masing-masing perwakilannya yang duduk di DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai berjumlah 2 orang sedangkan perwakilan dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) hanya mendapatkan 1 kursi.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai per Desember 2021 tercatat sejumlah 2.573 orang, terdiri dari 12 pegawai golongan I, 593 orang pegawai golongan II, 1.684 orang pegawai golongan III, dan 296 orang golongan IV. Bila dirinci berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, terdapat sebanyak 159 orang pegawai lulusan Pasca Sarjana (S2), lulusan sarjana (S1/D-IV) sebanyak 1.390 orang pegawai, lulusan (DIII) sebanyak 374 pegawai, lulusan DII/DI sebanyak 83 orang pegawai, lulusan SMA/sederajat sebanyak 548 orang pegawai, lulusan SMP/sederajat sebanyak 13 orang pegawai dan lulusan SD sebanyak 6 orang pegawai. Pada tahun 2021 terdapat tenaga fungsional bidang Pendidikan sebanyak 556 orang, tenaga fungsional bidang kesehatan sebanyak 236 dan fungsional lainnya sebanyak 30 orang.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan entitas pelaporan selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi neraca keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
2) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
3) Menyediakan informasi mengenai upaya pemerintah daerah dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas;
4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
5) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam penyusunan Laporan keuangan tahun anggaran 2021 terlebih dahulu dilakukan konversi laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Konversi mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pada pos-pos laporankeuangan, struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dengan ketersediaan informasi-informasi tersebut, maka diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, artinya dapat menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, risiko dan ketidakpastian yang terkait, serta dapat menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran. Selain itu juga untuk mengetahui apakah sumber daya uang yang diperoleh dan digunakan telah sesuai dengan ketentuan termasuk kepatuhan terhadap batas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Laporan keuangan tahun anggaran 2021 disusun berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak melakukan Penyajian kembali untuk laporan keuangan tahun anggaran 2021. Kondisi ini sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian kembali Laporan Keuangan, sehingga untuk hal-hal yang tidak disajikan kembali tidak dilakukan perbandingan perangkaan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi OPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan demikian laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi sampai dengan tersaji sebagai satu entitas tunggal.

1.3. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan
1.1. Informasi Umum
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Capaian Kinerja Keuangan
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LRA
2.4. Capaian Kinerja Keuangan berbasis LO

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Berbasis LO
3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
4.2. Entitas Pelaporan Keuangan
4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan.
4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Pengungkapan Infomasi Penting Lainnya
Bab VII Penutup
Lampiran-Lampiran

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Kebijakan fiskal/keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah dengan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 baik APBD murni maupun APBD perubahan, selain itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan berbagai kebijakan penanganan pandemi *Covid-19* di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan pengamanan ekonomi nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan fiskal dan penganggaran melalui *refocusing* dan realokasi belanja yang bukan prioritas untuk dialihkan pada kegiatan-kegiatan sebagai upaya percepatan penanganan dampak pandemi *Covid-19*.

Beberapa produk hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2020 dan perubahannya adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan tanggal 29 Desember 2020;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2021;
3. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Standar Biaya Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, tanggal 29 Desember 2020;
5. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya (Refocussing I);
6. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, (*Refocusing* APBD Tahap II sebagai tindak lanjut dari Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 906/2525/Keuda/ perihal Pemetaan Numenklatur terkait penggunaan dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi dan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/I/10649/2021 Perihal Pelaksanaan Kegiatan BOK);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, (*Refocusing* APBD Tahap III sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 untuk pengendalian penyebaran COVID-19 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 36.B/LHP/XVIII.PDG/04/2021);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, (Pergeseran Nomor Rekening pada Sub Kegiatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Dinas PUPR);

9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Tanggal 13 Desember 2021; dan
10. Surat Keputusan Bupati Nomor 387 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 yang tetapkan tanggal 16 Desember 2020.

2.1. INDIKATOR EKONOMI MAKRO

Hasil Pelaksanaan kebijakan fiskal/keuangan yang telah diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2020, dapat dilihat dalam beberapa indikator Ekonomi Makro, yaitu :

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 mencapai 61,35 sedangkan IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2020 mencapai 61,09 jika dibandingkan dengan tahun lalu terjadi peningkatan sebesar 0,26 poin. Gambaran IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai Jika dilihat dari tahun 2017 sampai tahun 2021, IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai cendrung meningkat dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2020 IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai cenderung menurun sebagai akibat dari Dampak pandemi *Covid-19* telah memberikan dampak negatif pada situasi sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. *Covid-19* memberikan tekanan negatif terhadap ekonomi nasional, akibat terganggunya sisi permintaan dan penawaran. Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh sangat lambat pada tahun 2020 dan diperkirakan masih terdampak hingga tahun 2022, Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 juga diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Mentawai bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 sebesar Rp3.041.550.000.000 sedangkan tahun 2020 PDRB sebesar Rp2.956.010.000.000. Jika dibandingkan dengan PDRB tahun 2020 PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp85.540.000.000,00 atau 2,89% dari tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan kondisi perekonomian Kabupaten Kepulauan Mentawai mulai meningkat lagi dibanding tahun 2020 yang cenderung menurun akibat dampak Covid-19.

3) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kepulauan Mentawai sebesar 2,89 persen, jumlah ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2020 dimana laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Mentawai (1,85%). Angka ini masih dibawah pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, yaitu sebesar 3,29 persen. Selanjutnya, jika dilihat dari persentase penduduk miskin, 14,84 persen dari penduduk Kepulauan Mentawai tergolong miskin. Angka ini merupakan persentase tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Sumatera Barat. Persentase terendah yaitu Kota Sawahlunto yang mencapai 2,1 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, persentase penduduk miskin meningkat sebesar 0,49 persen dimana pada tahun 2020 persentase penduduk miskin yaitu 14,35 persen.

Pada tahun 2021 ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,31 persen. Hal ini berbanding lurus dengan realisasi capaian kinerja indikator ekonomi makro pertumbuhan ekonomi nasional triwulan 1, 2 dan 3 yang mengalami perlambatan bahkan negatif yaitu pada angka 2,97 persen, minus 5,32 persen triwulan 2 dan minus 3,49 pada triwulan 3. Begitu juga dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang mengalami perlambatan yaitu pada triwulan 1 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 3,92 persen, triwulan 2 sebesar minus 4,91 persen dan triwulan 3 sebesar minus 2,87 persen.

Perlambatan ini diakibatkan oleh masih rendahnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat seperti pada sektor pertanian, perdagangan, jasa akomodasi dan kontruksi. Begitu juga dengan proyeksi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 diperkirakan naik menjadi 3,74 persen dari 2,92 persen pada capaian tahun 2019.

4) Tingkat Inflasi

Persentase laju inflasi Kabupaten Kepulauan Mentawai masih merujuk pada laju inflasi Kota Padang. Hal ini disebabkan karena jumlah komoditas dan pasar belum memenuhi dan masih banyak barang-barang komoditas yang didatangkan dan dibawa dari Kota Padang.

Menurut data BPS pada bulan Maret Tahun 2021 Sumatera Barat (gabungan 2 kota) mengalami inflasi sebesar 0,31 persen atau terjadi kenaikan IHK (Indeks Harga Konsumen) dari 105,05 pada bulan Februari 2021 menjadi 105,38 pada bulan Maret 2021. Laju tahun kalender Sumatera Barat (gabungan 2 kota) Maret 2021 mengalami inflasi sebesar 0,06 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 1,78 persen. Angka ini terbentuk dari gabungan 2 kota IHK di Sumatera Barat, yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Pada bulan Maret 2021, Kota Padang mengalami inflasi sebesar 0,32, sedangkan di Kota Bukittinggi terjadi inflasi sebesar 0,31 persen.

Pada bulan Desember 2021, Sumatera Barat mengalami inflasi sebesar 0,42 persen atau terjadi kenaikan IHK dari 106,34 pada bulan November 2021 menjadi 106,79 pada bulan Desember 2021. Laju inflasi tahun kalender dan laju inflasi tahun ke tahun Sumatera Barat atau Desember 2021 terhadap Desember 2020 sebesar 1,40 persen. Adapun tingkat inflasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merujuk pada tingkat inflasi di Kota Padang menurut data Statistik tahun 2021 menunjukan angka sebesar 1,71 % lebih tinggi dibandingkan dengan angka Inflasi pada tahun 2020 sebesar 1,56%, kenaikan inflasi tersebut diakibatkan karena Kota Padang masih dalam proses pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan ini juga mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2.2. PERUBAHAN APBD TAHUN BERJALAN

APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pada tahun anggaran berjalan terjadi beberapa kali perubahan penjabaran APBD melalui refocusing anggaran antara lain :

1. Perubahan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang penjabaran APBD Tahun 2021 merupakan Refocussing tahap I terkait adanya Peraturam Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA

2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya;

2. Refocusing tahap II perubahan kedua Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 906/2525/Keuda Perihal Pemetaan Numenklatur terkait Penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi dan Surat KABIRO Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/I/10649/2021 Perihal Pelaksanaan Kegiatan BOK;
3. Refocusing tahap III perubahan ketiga Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 27 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 untuk pengendalian penyebaran COVID-19 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 36.B/LHP/XVIII.PDG/04/2021;
4. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawi Tahun Anggaran 2021.
5. Peraturan Bupati Kepulaua Mentawai Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD 2021 Pergeseran Nomor Rekening pada Sub Kegiatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Secara total penyesuaian APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang
1	Pendapatan	894.814.131.643,00	865.799.014.618,00	(29.015.117.025,00)
2	Belanja	939.299.880.087,00	907.054.073.744,00	(32.245.806.343,00)
3	Surplus/Defisit	(44.485.748.444,00)	(41.255.059.126,00)	3.230.689.318,00
4	Pembiayaan :			
	- Penerimaan	44.485.748.444,00	41.255.059.126,00	(3.230.689.318,00)
	- Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
	- Pembiayaan Netto	44.485.748.444,00	41.255.059.126,00	(3.230.689.318,00)
5	SILPA/SIKPA	0,00	0,00	0,00

Perubahan anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan mengingat terdapatnya beberapa hal yang harus diakomodir dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sedang berjalan. Kondisi-kondisi tersebut di antaranya adalah:

1) Terjadinya perubahan pendapatan yang disebabkan adanya perubahan pencapaian target pendapatan antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta Lain-Lain Pendapatan Daerah.
2) Perubahan belanja perlu dilakukan karena adanya kebijakan-kebijakan strategis yang harus diakomodir, disamping adanya pergeseran-pergeseran antar kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kode rekening pada pos belanja sehingga target kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan dapat tercapai.

3) Terjadinya perubahan pembiayaan terutama disebabkan adanya perubahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dengan adanya Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2020 tanggal 12 Agustus 2021 dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan tanggal 12 Agustus 2021.

2.3. KEBIJAKAN KEUANGAN

Penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, Kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan. Daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pinjaman tersebut dapat berupa pinjaman jangka pendek untuk membiayai kesulitan arus kas daerah dan pinjaman jangka panjang untuk membiayai kebutuhan pengeluaran untuk penyediaan sarana dan prasarana daerah.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelaksanaan anggaran, sementara disiplin anggaran ditunjukkan untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Prinsip yang lain yang dilaksanakan adalah prinsip partisipatif untuk mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta prinsip anggaran kinerja yang didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur yang berasal dari sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.

2.3.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi Daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Berdasarkan Undang-Undang, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak dan 28 (dua puluh delapan) jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi daerah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi daerah tersebut secara umum dipungut hampir di semua Daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktik merupakan jenis pungutan yang potensial. Sesuai dengan amanat Perundang-undangan yang berlaku dan potensi yang ada pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, jenis pajak yang dipungut meliputi 9 (Sembilan) jenis pajak yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Adapun jenis retribusi yang dipungut meliputi 3 (tiga) jenis yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan diarahkan kepada:

1) Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional.
2) Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi untuk menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar dalam menggerakkan perekonomian daerah.
3) Menyesuaikan kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi.
4) Penyesuaian pendapatan yang berasal dari dana kapitalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional.
5) Mendukung upaya-upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah antara lain:
   a. Meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bertahap dan proporsional.
   b. Mengoptimalkan realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pada sektor pajak dan retribusi.
6) Memberikan peran yang luas kepada kas/bendahara umum daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
7) Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan.
8) Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberi kemudahan pada wajib pajak dan wajib retribusi melalui penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan.
9) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
10) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
11) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi Sumatera Barat dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan antara lain terdiri dari:

1) Dana Alokasi Umum

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar, oleh karenanya diperlukan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan. Untuk mengurangi ketimpangan kebutuhan pembiayaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

Berdasarkan konsep *fiscal gap*, distribusi DAU bagi daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar.

2) Dana Alokasi Khusus

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk menetapkan prediksi belanja daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai selama TA 2021 antara lain:

a) Mengalokasikan anggaran urusan pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud sebagai upaya pembangunan pendidikan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan bermoral dan berakhlak yang dilaksanakan melalui beberapa program belanja langsung dalam bentuk program kegiatan maupun belanja tidak langsung melalui hibah dan bantuan sosial.

b) Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar 10% sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai salah satu wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang dilaksanakan melalui pelayanan dasar di puskesmas dan rujukan ke RSUD.

c) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang meliputi infrastruktur di lingkungan urusan pekerjaan umum dan urusan perhubungan yang berfungsi sebagai daya dukung dalam pengembangan daerah dan peningkatan perekonomian daerah.

d) Peningkatan program revitalisasi pertanian yang dilaksanakan dengan meningkatkan produktivitas per satuan hektar dengan diiringi peningkatan pendapatan petani. Revitalisasi pertanian dalam skala yang luas (komponen pendukung bidang pertanian) ini meliputi upaya

intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan optimalisasi panca usaha pertanian dan pengolahan pasca panen.

e) Peningkatan aktivitas perekonomian melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM sehingga memiliki daya saing yang sekaligus seiring dengan upaya penyediaan lapangan pekerjaan dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

f) Pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya dengan tetap memegang teguh kearifan lokal yang berkelanjutan sehingga dapat tampil dan berkontribusi dalam pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya di kancah nasional dan internasional yang diharapkan akan memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah.

g) Pengendalian lingkungan hidup dan tata ruang dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan program *pro-environment* yang diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang mengikuti prinsip pengelolaan yang lestari terhadap lingkungan, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah, air dan udara untuk menghindari degradasi yang berakibat pada timbulnya bencana. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan penyediaan fasilitas umumberupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana diamanatkan perundang-undangan yang memiliki fungsi antara lain untuk estetika dan kelestarian lingkungan hidup serta edukasi.

h) Pemanfaatan sisa dana dari kegiatan tahun sebelumnya yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang harus dianggarkan kembali dalam bentuk kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan.

i) Efektivitas dan efisiensi serta rasionalisasi pengalokasian dan penggunaan anggaran APBD tahun 2021 untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2.3.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan manajemen daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal, atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah. Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam keadaan defisit sebesar Rp41.043.612.121,09 maka dilakukan kebijakan dengan menggunakan SILPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp41.255.059.126,74.

2.3.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pasca tahun-tahun anggaran berikutnya.Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain:

1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya dianggarkan berdasarkan prakiraan yang rasional dengan memproyeksi kelebihan penerimaan dari pendapatan daerah dan realisasi penyerapan anggaran belanja. Penetapan besaran nilai SILPA secara definitif setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD TA 2020 dan dilaksanakan pada perubahan APBD TA 2021.

2) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

3) Penerimaan pinjaman daerah dianggarkan sesuai dengan rencana penarikan pinjaman dalam Tahun Anggaran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, termasuk penerimaan dari penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada Tahun Anggaran berkenaan.

4) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dianggarkan untuk rencana penerimaan berasal dari pengembalian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya termasuk juga penerimaaan yang berasal dari pemberian pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga).

Pada Tahun Anggaran 2021, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan berasal dari SILPA Tahun Anggaran sebelumnya.

2.3.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut antara lain untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok hutang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

1) Pembentukan dana cadangan dilaksanakan melalui penetapan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tentang tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang dibiayai dana cadangan, besaran dan rincian dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.

2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah merupakan penganggaran kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang termasuk didalamnya investasi nirlaba yang tujuan, besaran dan rincian penyertaan modal ditetapkan melalui PeraturanDaerah.

3) Pembayaran pokok hutang adalah jumlah pembayaran pokokhutang yang jatuh tempo dan harus dibayar dalam Tahun Anggaran berjalan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

4) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan apabila kondisi dalam keadaan surplus dan diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga.

2.4. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah sebesar Rp830.153.085.297,37 atau 95,88% dari target pendapatan sebesar Rp865.799.014.618,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2020 sebesar Rp832.886.813.996,51, maka mengalami penurunan sebesar (Rp2.733.728.699,14) atau (3,12%).

Realisasi belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp829.394.144.601,02 atau 91,44% dari anggaran Rp907.054.073.744,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp705.615.609.606,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp123.778.534.995,02 atau 17,54%. Berdasarkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 diperoleh Surplus APBD sebesar Rp758.940.696,35.

Pembiayaan TA 2021 menghasilkan nilai pembiayaan netto sebesar Rp41.255.059.126,74 yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp41.255.059.126,74 dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 sehingga diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp 42.013.999.823,09.

2.5. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LO

Laporan Operasional Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021, menunjukkan pendapatan sebesar Rp831.652.882.410,37 dibandingkan dengan pendapatan tahun 2020 sebesar Rp796.808.557.711,55, maka terdapat peningkatan sebesar Rp34.844.324.698,82 atau 4,37%.

Beban pada tahun 2021 sebesar Rp773.917.022.050,32 Apabila dibandingkan dengan beban pada tahun 2020 sebesar Rp722.075.265.688,28 maka terdapat peningkatan sebesar Rp51.841.756.362,04 atau 7,18%. Dengan demikian, berdasarkan pendapatan dan beban pada tahun 2021 tersebut diperoleh surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp57.735.860.360,05. Apabila dibandingkan dengan surplus dari kegiatan operasional pada Tahun 2020 sebesar Rp74.733.292.023,27 maka diperoleh penurunan sebesar (Rp16,997.431.663,22) atau (7,18%).

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional tahun 2021 sebesar (Rp807.082.432,38) dan tahun 2020 sebesar (Rp648.505.702,62) dengan peningkatan sebesar (Rp158.576.729,76) atau 24,45%. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat surplus/defisit dari Pos Luar Biasa sebesar (Rp.1.135.106.365,00) sementara pada tahun 2020 surplus/defisit dari Pos Luar sebesar (Rp345.200.000,00). Dengan demikian surplus LO setelah pos luar biasa tahun 2021 sebesar Rp55.793.671.562,67 jika dibandingkan dengan surplus LO tahun 2020 sebesar Rp73.739.586.320,65 maka diperoleh penurunan sebesar (Rp17.945.914.757,98) atau (24,34%).

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR KINERJA KEUANGAN -LRA

Realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp830.153.085.297,37 atau 95,88% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp865.799.014.618,00. Realisasi belanja sebesar Rp829.394.144.601,02 atau 91,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp907.054.073.744,00 dan berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja daerah diperoleh surplus sebelum Pembiayaan Netto sebesar Rp758.940.696,35.

Berikut ini uraian realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Rp	31.638.013.029,37
Pendapatan Transfer	Rp	775.266.457.268,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	23.248.615.000,00
Jumlah	**Rp**	**830.153.085.297,37**

Adapun OPD yang mengelola pendapatan sebanyak 12 OPD dari 36 OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

No	OPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	7.009.564.329,00	3.976.429.081,00	56,73	3.976.429.081,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	2.500.000.000,00	1.124.795.610,00	44,99	1.124.795.610,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	614.482.964,00	352.981.519,00	57,44	352.981.519,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	286.848.628,00
5	Dinas Perhubungan	1.402.007.031,00	305.266.100,00	21,77	305.266.100,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	196.606.667,00	115.351.226,00	58,67	115.351.226,00
7	Dinas Perikanan	220.000.000,00	186.432.000,00	84,74	186.432.000,00
8	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	3.807.007.031,00	858.700.000,00	22,56	3.807.007.031,00
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	44.999.999,00	31.894.000,00	70,88	31.894.000,00
10	Kecamatan Sipora Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kecamatan Siberut Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Badan Keuangan Daerah (SKPD)	850.004.346.597,00	823.201.235.761,37	96,85	799.949.143.935,37

No	OPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
-	PPKD	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan		**865.799.014.618,00**	**830.153.085.297,37**	95,88	**810.136.149.130,37**

2. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2021 periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dapat diuraian sebagai berikut:

Belanja Operasi	Rp	544.000.215.852,02
Belanja Modal	Rp	164.639.582.130,00
Belanja Tak Terduga	Rp	1.587.597.109,00
Belanja Transfer	Rp	119.166.749.510,00
Jumlah	**Rp**	**829.394.144.601,02**

Urusan pemerintahan dan organisasi pada pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan oleh 36 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berikut rincian realisasi Belanja Daerah masing-masing OPD sebagai berikut:

No	Entitas Akuntansi	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	176.534.959.736,00	170.435.318.600,00	96,54	155.212.576.107,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	27.806.683.912,00	25.530.409.378,00	91,81	24.711.268.158,00
3	Dinas Kesehatan	114.383.943.530,00	94.680.685.379,02	82,77	96.201.298.646,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	161.182.774.960,00	138.080.609.781,00	85,67	85.040.801.963,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.489.343.515,00	6.977.724.893,00	93,17	19.510.495.218,00
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.700.841.949,00	2.562.070.340,00	94,86	2.869.203.955,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.543.139.747,00	8.880.154.173,00	93,05	9.601.675.729,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.068.286.752,00	6.647.257.664,00	94,04	5.342.674.661,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.382.303.096,00	9.656.289.754,00	93,01	5.988.042.094,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.274.246.138,00	4.955.159.538,00	93,95	5.779.894.155,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.262.212.781,00	4.768.747.624,00	76,15	5.088.386.255,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.924.454.364,00	7.762.205.023,00	78,21	8.002.788.236,00
13	Dinas Perhubungan	22.465.044.023,00	19.999.607.775,00	89,03	16.790.762.611,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.914.072.373,00	7.082.158.514,00	89,49	8.016.047.473,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.262.481.820,00	3.863.667.535,00	90,64	3.970.831.087,00

No	Entitas Akuntansi	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.568.444.528,00	3.489.594.082,00	97,79	3.965.363.010,00
17	Dinas Perikanan	21.201.934.999,00	20.310.187.204,00	95,79	13.304.371.190,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	7.967.617.889,00	7.775.133.615,00	97,58	13.462.215.944,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16.677.034.146,00	14.778.076.646,00	88,61	14.053.769.608,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	7.373.878.974,00	5.968.292.001,00	80,94	5.521.380.632,00
21	Sekretariat Daerah	43.306.457.367,00	40.939.226.269,00	94,53	44.156.672.611,00
-	KDH dan WKDH	0,00	0,00	0,00	533.575.450,00
22	Sekretariat DPRD	31.490.747.963,00	28.914.041.234,00	91,82	25.753.131.187,00
-	DPRD	0,00	0,00	0,00	8.380.806.768,00
23	Kecamatan Pagai Utara	2.441.386.748,00	2.293.721.292,00	93,95	2.412.484.421,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	3.300.511.072,00	3.092.057.069,00	93,68	4.780.673.033,00
25	Kecamatan Sipora Utara	2.813.221.798,00	2.704.713.234,00	96,14	2.995.600.161,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	2.758.145.615,00	2.652.872.192,00	96,18	4.207.363.869,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	2.264.498.455,00	2.214.131.085,00	97,78	2.269.565.638,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	2.422.859.360,00	2.279.149.125,00	94,07	2.179.879.854,00
29	Kecamatan Siberut Utara	2.930.528.234,00	2.839.609.458,00	96,90	3.163.868.462,00
30	Kecamatan Siberut Barat	2.306.532.847,00	2.241.260.202,00	97,17	3.329.195.644,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	2.824.126.430,00	2.719.120.164,00	96,28	2.795.767.974,00
32	Kecamatan Sikakap	2.914.284.117,00	2.832.635.342,00	97,20	3.147.268.622,00
33	Inspektorat	9.371.557.934,00	8.576.662.978,00	91,52	9.094.747.103,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.367.340.153,00	7.567.128.242,00	90,44	12.062.247.864,00
35	Badan Keuangan Daerah (SKPD)	150.066.756.045,00	146.439.755.450,00	97,58	28.079.690.024,00
-	PPKD	0,00	0,00	0,00	151.222.067.618,00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.491.420.374,00	6.884.711.746,00	91,90	8.584.028.768,00
Total Belanja		**907.054.073.744,00**	**829.394.144.601,02**	**91,44**	**821.582.481.803,00**

3. Realisasi Pembiayaan TA 2021

Rincian Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 menunjukan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp41.255.059.126,74 dengan uraian sebagai berikut:

Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp	41.255.059.126,74
Jumlah Penerimaan	**Rp**	**41.255.059.126,74**

Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	0
Jumlah Pengeluaran	**Rp**	**0**
Pembiayaan Netto	**Rp**	**41.255.059.126,74**

3.2 IKHTISAR KINERJA KEUANGAN BERBASIS LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan-LO Tahun 20201

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 menunjukkan pendapatan-LO sebesar Rp831.652.882.410,37 dan beban-LO sebesar Rp773.917.022.050,32, Sehingga diperoleh Surplus Laporan Operasional sebesar Rp 55.793.671.562,67.

Pendapatan-LO sebesar Rp832.139.348.910,37 terdiri dari:

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	**:**	**Rp**	**27.111.930.191,37**
Pendapatan Pajak Daerah – LO	:	Rp	4.292.094.029,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	:	Rp	2.992.771.151,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	:	Rp	10.684.123.854,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	:	Rp	9.142.941.157,37
PENDAPATAN TRANSFER – LO	**:**	**Rp**	**773.339.393.063,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	:	Rp	742.958.193.981,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	:	Rp	30.381.199.082,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	**:**	**Rp**	**31.201.559.156,00**
Pendapatan Hibah – LO	:	Rp	8.439.410.656,00
Dana Darurat – LO	:	Rp	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	:	Rp	22.762.148.500,00

2. Beban-LO Tahun 2021

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 menunjukkan Beban-LO sebesar Rp773.917.022.050,32 terdiri dari:

No	URAIAN	BEBAN - LO 2021 (Rp)
1	Beban Pegawai - LO	284.540.969.277,00
2	Beban Persediaan	50.155.288.889,78
3	Beban Jasa	130.139.430.814,62
4	Beban Pemeliharaan	7.027.027.663,53
5	Beban Perjalanan Dinas	46.584.216.644,00
6	Beban Bunga	0,00
7	Beban Subsidi	9.585.794.613,00
8	Beban Hibah	19.777.337.264,00

No	URAIAN	BEBAN - LO 2021 (Rp)
9	Beban Bantuan Sosial	876.212.731,00
10	Beban Penyisihan Piutang	347.787.554,90
11	Beban Lain-lain	3.765.032.919,00
12	Beban Penyusutan Aset Tetap	100.856.715.912,13
13	Beban penyusutan Aset Lainnya	19.762.132,00
14	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.074.696.125,36
15	Beban Bagi Hasil	2.446.929.619,00
16	Beban Bantuan Keuangan	116.719.819.891,00
17	beban Transfer	0,00
	JUMLAH	773.917.022.050,32

3. Surplus / Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO
   Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp807.082.432,38).

4. Beban Luar Biasa - LO
   Beban Luar Biasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.135.106.365,00.

3.3 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan

Secara umum pencapaian target kinerja keuangan khususnya pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, bila dilihat dari realisasi pendapatan daerah maka secara umum target yang telah ditetapkan belum maksimal, yaitu pencapaian target pendapatan daerah hanya sebesar 93,20% antara lain disebabkan tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.

Hambatan tersebut antara lain:

a. Adanya wabah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan pembangunan dan perekonomian masyarakat. Seperti pada sektor pariwisata yang merupakan sektor andalan bagi pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai karena ada *Social Distancing* dan pembatasan Berskala Besar (PSBB) bahkan negara-negara di dunia ada yang *lockdown* sehingga mengurangi wisatawan baik dari dalam daerah maupun wisatawan dari mancanegara.
b. Tidak terealisasinya pendapatan akibat belum optimalnya penghitungan target pendapatan di beberapa OPD seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perikanan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
c. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat untuk mengurus balik nama atas hak yang sudah dibelinya.
d. PBB sektor pedesaan, disebabkan belum adanya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB dan belum optimalnya sekretaris desa selaku pemungut pajak.
e. Pajak sarang burung wallet, disebabkan belum adanya keterbukaan oleh wajib pajak atas

jual beli yang dilakukan (belum adanya kesadaran wajib pajak), namun bidang pajak optimis kedepannya untuk mengoptimalkan dengan cara sosialisasi secara berkesinambungan.

f. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan.
g. Belum terintegrasinya pelayanan perizinan secara penuh dari persyaratan-persyaratan yang menjadi syarat dalam pengajuan perizinan.
h. Belum adanya kesadaran wajib retribusi untuk membayar retribusi.
i. Tidak disiplinnya wajib retribusi untuk membayar retribusi.

2. Belanja Daerah

Penyerapan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 91,44%. Terdapat peningkatan penyerapan belanja daerah jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020, hal ini menunjukan bahwa kegiatan-kegiatan masyarakat sudah mulai ada peningkatan dengan berkurangnya dampak pandemic covid-19 sehingga tingkat konsumsi masyarakat mulai bergerak kembali.

3. Pembiayaan

Penyerapan pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp41.255.059.126,74 atau 100%.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ASUMSI DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1. Asumsi Dasar Kemandirian Entitas
   Setiap unit organisasi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.
2. Asumsi Kesinambungan Entitas
   Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
3. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang
   Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

4.2. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Sedangkan entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa "*tiap-tiapkementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan*". Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 232 ayat (1) menyatakan bahwa *"entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah"*.Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa *"Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terdiri atas sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SKPD"*. Entitas akuntasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 terdiri dari 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Umum Daerah
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13. Dinas Perhubungan
14. Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
17. Dinas Perikanan
18. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
19. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
20. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
21. Inspektorat
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Keuangan Daerah
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25. Sekretariat Daerah
26. Sekretariat DPRD
27. Kecamatan Pagai Utara
28. Kecamatan Sipora Selatan
29. Kecamatan Sipora Utara
30. Kecamatan Siberut Selatan
31. Kecamatan Siberut Barat Daya
32. Kecamatan Siberut Tengah
33. Kecamatan Siberut Utara
34. Kecamatan Siberut Barat
35. Kecamatan Pagai Selatan
36. Kecamatan Sikakap

Laporan pertanggungjawaban yang merupakan tanggungjawab OPD berupa laporan keuangan memiliki komponen-komponen yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah basis basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional yang berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang diuraikan sebagai berikut:

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
2. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
3. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa pembiayaan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap Tahun Anggaran. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Namun demikian bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.
4. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1. Definisi
   Pendapatan-LO adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pengakuan
   Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.
3. Pengukuran
   Pengukuran pendapatan-LO menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan/atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

1. Definisi
   Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
   Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

2. Klasifikasi Pendapatan-LRA
   a. Pendapatan LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
   b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut :
      1) urusan pemerintahan daerah;
      2) organisasi;
      3) kelompok.
   c. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut :
      1) jenis;
      2) objek;
      3) rincian objek pendapatan.
   d. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari: PendapatanAsli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah
   e. Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
   f. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
   g. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
   h. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualain, dan lain-lain pendapatan.
   i. Pendapatan transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
   j. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas :
      1) transfer pemerintah pusat-dana perimbangan;
      2) transfer pemerintah pusat lainnya;
      3) transfer pemerintah provinsi.
   k. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan:
      1) dana bagi hasil;
      2) dana alokasi umum;
      3) dana alokasi khusus.
   l. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam.

m. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.

n. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

o. Kelompok Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri atas obyek pendapatan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.

p. Kelompok Transfer Pemerintah Provinsi merupakan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya dari provinsi.

q. Kelompok lain-lain Pendapatan yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

(a) hibah;
(b) dana darurat;
(c) pendapatan lainnya.

r. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat, perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

s. Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam.

t. Kelompok pendapatan lainnya antara lain berupa bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

u. Secara ringkas klasifikasi pendapatan dapat dilihat pada table :

Kode Akun	Kelompok	Jenis
4.	Pendapatan – LRA	
4.1.	PendapatanAsli Daerah – LRA	
4.1.1.		Pajak Daerah - LRA
4.1.2.		Retribusi Daerah - LRA
4.1.3		Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan - LRA
4.1.4		Lain-lain PAD yang sah - LRA
4.2.	Pendapatan Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer – LRA	
4.2.1		Bagi Hasil/DAU/DAK/Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA
4.2.2.		Pendapatan Transfer PemerintahLainnya - LRA
4.2.3.		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4.2.4.		BantuanKeuangan – LRA
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah – LRA	
4.3.1.		PendapatanHibah - LRA
4.3.2.		Dana Darurat - LRA
4.3.3.		PendapatanLainnya - LRA

3. Pengakuan

a. Pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut :

1) diakui pada saat penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan;

2) diakui pada saat diterima di Bendahara Penerimaan OPD; dan
3) diakui pada saat diterima oleh entitas penerimaan diluar entitas bendahara.

b. Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran OPD, yang secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD selaku BUD.
c. Dalam kriteria pengakuan pendapatan,konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
d. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
e. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun BUD.
f. Pendapatan Kas yang diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerimaan wajib melaporkannya melalui mekanisme pengesahan pendapatan kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

4. Transaksi Pendapatan Dalam Bentuk Barang dan Jasa

a. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang tidak dilaporkan dalam LRA melainkan harus dilaporkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh transaksi berwujud barang adalah hibah dalam wujud barang, dan barang rampasan.
b. Transaksi pendapatan dalam bentuk jasa tidak dapat dilaporkan dalam LRA melainkan cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
c. Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang yang menghasilkan aset tetap dikapitalisasikan ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.

5. Pengukuran

a. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
b. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
c. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan**.**
d. Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada Pemerintah Daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

6. Penyajian
   a. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
   b. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
   c. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :
      1) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran.
      2) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
      3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
      4) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Beban

1. Definisi
   Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang berdampak menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2. Klasifikasi Beban
   a. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban), organisasi, dan fungsi.
   b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan beban yang didasarkan pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas.
   c. Klasifikasi beban menurut ekonomi (jenis beban) adalah sebagai berikut :
      Beban Operasi-LO
      - Beban Pegawai;
      - Beban Barang dan Jasa;
      - Beban Bunga;
      - Beban Subsidi;
      - Beban Hibah;
      - Beban Bantuan Sosial;
      - Beban Penyusutan dan amortisasi;
      - Beban Penyisihan Piutang;
      - Beban Lain-lain.

      Beban Transfer
      - Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah;
      - Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya;
      - Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya;
      - Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa;
      - Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya;
      - Beban Transfer Dana Otonomi Khusus;

      Defisit Non Operasional
      Beban Luar Biasa
   d. Beban Pegawai adalah beban Pemerintah Daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan

oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukkan modal.

e. Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaranataukonsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barangdanjasa yanghabispakai, perjalanandinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

f. Beban jasa merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk pengadaan jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk membantu melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah.

g. Beban bunga utang adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang berasal dari pelunasan atas bunga dari pinjaman/utang.

h. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya terkait pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

i. Beban subsidi adalah beban Pemerintah Daerah yang timbul karena memberikan subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu dengan tujuan agar harga jual produk/ jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

j. Beban hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

k. Beban bantuan sosial adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/ barang/jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok/masyarakat yang sifatnya secara tidak terus menerus dan selektif guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

l. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait dengan ketertagihan piutang.

m. Beban lain-lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.

n. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Pengakuan
   a. Beban diakui pada saat :
      1) timbulnya kewajiban;
      2) terjadinya konsumsi aset;
      3) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
   b. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah.

c. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

d. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

e. Pengakuan Beban dapat dikelompokkan atas pengakuan beban SKPD dan pengakuan beban pada PPKD.

f. Pengakuan Beban pada SKPD terdiri atas :

1) beban pegawai diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) jika pembayarannya dilakukan melalui LS sedangkan pembayaran melalui UP/GU/ TU diakui ketika pembayaran atas beban tersebut telah disahkan oleh pengguna anggaran.
2) beban barang dan jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

g. Pengakuan Beban pada PPKD yaitu :

1) beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Meskipun demikian beban bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, misalnya untuk keperluan pelaporan. Saat beban bunga jatuh tempo untuk dibayarkan biasanya dinyatakan dalam perjanjian atau suatu dokumen tertentu yang menjadi dasar pengenaan bunga.
2) beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
3) beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban atau sesuai dengan NPHD yang dilakukan bersamaan dengan penyaluran hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi persyaratan-persyaratan penyaluran hibah.
4) beban bantuan sosial diakui bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran beban sosial tersebut.
5) beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun.
6) beban transfer diakui saat SP2D diterbitkan atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah jika dokumen memadai. Dalamhal padaakhirTahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

4. Pencatatan

a. Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Metode penghitungannya dilakukan adalah sebagai berikut:

1) perpektual (pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan), beban persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai perunit sesuai metode penilaian yang digunakan;
2) periodik (pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi), beban persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo

awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

b. Penyusutan/ amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi:
   1) metode garis lurus (*straight line method*)
   2) metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
   3) metode unit produksi (*unit of production method*)

c. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

5. Pengukuran
   a. Beban dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
   b. Beban dari transaksi pertukaran diukurdengan menggunakan hargasebenarnya (*actualprice*)yangdibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
6. Penyajiandan Pelaporan
   a. Beban disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas beban dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
   b. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban antara lain :
      1) pengeluaran beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran;
      2) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran beban daerah;
      3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Belanja-LRA

1. Definisi
   Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
2. Klasifikasi Belanja-LRA
   a. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
   b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
   c. Klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:
      Belanja Operasi :
      - Belanja Pegawai;
      - Belanja Barang;
      - Bunga;
      - Subsidi;
      - Hibah;
      - Bantuan Sosial.

Belanja Modal:
- Belanja Aset Tetap;
- Belanja Aset Lainnya;

Belanja Lain-lain/ Tak Terduga
Transfer

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun untuk tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja Barang dapat dibedakan menjadi:
- belanja barang dan jasa, merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/ penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dan SKPKD, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengelauaran untuk biaya pelatihan dan penelitian;
- belanja pemeliharaan, adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain pemerliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:
- pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemerintah Daerah;
- pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk diserahkan ke masyarakat;
- perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja bunga adalah pengeluaran Pemerintahan Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Belanja subsidi adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus.

Bantuan sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk transfer uang atau barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Bantuan keuangan adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang dan jasa, baik bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangkapemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Khusus kepada partai politik, bantuan keuangan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Kriteria untuk belanja tak terduga adalah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, dinas, dan lembaga teknis.

d. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

e. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

Belanja :	
Pelayanan Umum	xxx
Pertahanan	xxx
Ketertiban dan Keamanan	xxx
Ekonomi	xxx
Perlindungan Lingkungan Hidup	xxx
Perumahan dan Permukiman	xxx

Kesehatan		xxx
Pariwisata dan Budaya	xxx	
Agama		xxx
Pendidikan		xxx
Perlindungan sosial		xxx

f. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

3. Perlakuan Akuntansi Belanja Pemeliharaan
   a. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset etap) jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
      1) manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
         - bertambah ekonomi/efesien;
         - bertambah umur ekonomis;
         - bertambah volume;
         - bertambah kapasitas produksi.
      2) nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/ aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
   b. Pengeluaran belanja pemeliharaan atau dengan istilah lainnya Pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditures*) akan diperlakukan sebagai belanja modal yang memenuhi kapitalisasi aset akan dibahas pada lampiran kebijakan akuntansi ini pada lampiran tentang aset tetap.
   c. Penganggaran belanja pemeliharaan/pengeluaran setelah perolehan yang memenuhi batas kapitalisasi aset yang dimaksud dalam poin.III.6 dianggarkan dalam rekening belanja modal.

4. Pengakuan
   Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
   a. belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
   b. khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
   c. dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur badan layanan umum.
   d. khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir Tahun Anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah, Pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari kas yang telahditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.

5. Pengukuran
   Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

6. Penyajian
   a. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

b. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

c. Hal-hal yang perlu diungkap sehubungan dengan belanja antara lain:
   a) pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya Tahun Anggaran.
   b) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
   c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan-LRA

a. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

b. Klasifikasi
   a) Pembiayaan dapat diklasifikasikan atas penerimaan pembiayaan danpengeluaran pembiayaan.
   b) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
   c) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
   d) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode Tahun Anggaran tertentu.

c. Pengakuan
   a. Pengakuan pembiayaan juga dibagi atas klasifikasi pembiayaan.
   b. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
   c. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

d. Pengukuran
   a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
   b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

e. Penyajian
   a) Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (Aktivitas Investasi atau Aktivitas Pendanaan), serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
   b) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Netto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

1) Definisi

Pendapatan-LO adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab wewenang entitas pemerintah daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah daerah.

2) Klasifikasi Pendapatan-LO

a. Pendapatan LO diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut:
   (a) urusan pemerintahan daerah;
   (b) organisasi;
   (c) kelompok.
c. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut:
   (a) jenis;
   (b) objek;
   (c) rincian objek pendapatan.
d. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
e. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
f. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
g. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
h. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualain, dan lain-lain pendapatan.
i. Pendapatan transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
j. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas :
   (a) transfer pemerintah pusat-dana perimbangan;
   (b) transfer pemerintah pusat lainnya;
   (c) transfer pemerintah provinsi.
k. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan:
   (a) dana bagi hasil;

(b) dana alokasi umum;
(c) dana alokasi khusus.

l. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam.
m. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum.
n. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
o. Kelompok Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri atas obyek pendapatan dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.
p. Kelompok Transfer Pemerintah Provinsi merupakan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya dari provinsi.
q. Kelompok lain-lain Pendapatan yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
(a) hibah;
(b) dana darurat;
(c) pendapatan lainnya.
r. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat, perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
s. Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam.
t. Kelompok pendapatan lainnya antara lain berupa bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
u. Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

3) Pendapatan Operasional
a. Dalam kebijakan ini, pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions)*.
b. Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut.
c. Disamping itu adakalanya Pemerintah Daerah menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan. Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran.

4) Pendapatan Operasional dari Transaksi Non Pertukaran
a. Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi non-pertukaran timbul dari:
(a) pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memaksakan pembayaran oleh publik (seperti pajak daerah, denda, dan sanksi);
(b) perimbangan keuangan, berbentuk kas atau non kas, dari entitas pelaporan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) untuk pemerintah daerah;
(c) hibah yang diterima dari pemerintah asing, dan atau lembaga internasional;

(d) penghapusan utang;
(e) sumbangan dari masyarakat dan/ atau lembaga masyarakat;
(f) dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran untuk entitas akuntansi.

b. Pendapatan operasional dari transaksi non-pertukaran harus diakui bila seluruh kondisi dibawah ini dipenuhi, yaitu apabila:
(a) pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
(b) klaim atas sumber daya dapat dilaksanakan secara legal;
(c) besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih;
(d) jumlahnya dapat diestimasi.

c. Aliran masuk sumber daya dari transaksi non pertukaran di satu sisi diakui sebagai aset dan di sisi lain diakui sebagai pendapatan operasional, kecuali bila transaksi aliran masuk tersebut mengakibatkan timbulnya kewajiban.

d. Pengakuan pendapatan daerah pada pendapatan operasional non pertukaran dipengaruhi oleh metode pemungutan pendapatan daerah yang digunakan. Secara prinsip terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment.*

e. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pengakuan pada pendapatan yang dipungut bersadarkan metode *self assessment* antara lain SPTPD, Faktur, Bill, Karcis, Kupon, Stiker, Surat Keterangan, nota dan sejenisnya.

f. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pengakuan pada pendapatan yang dipungut bersadarkan metode *official assessment* antara lain : SKPD, SKRD, SPPT, STPD, SKPDKB, kontrak kerja, kontrak sewa dan perjanjian lainnya.

g. Berikut secara rinci pengakuan atas pendapatan :

OPD	Jenis	Pengakuan
Dinas Pendapatan Daerah	Pajak Hotel	SPTPD dan BILL
	Pajak Restoran	SPTPD dan BILL
	Pajak Hiburan	Karcis
	Pajak Reklame	SKPD
	Pajak Penerangan Jalan	Nota
	Pajak Material bukan Logam dan Batuan	STPD
	Pajak Air Tanah	SKPD
	Pajak Sarang Burung Walet	STPD
	PBB P2	SPPT
	BPHTB	SSPD-BPHTB
	Retribusi Kekayaan Daerah(Kendaraan Dinas)	SKRD
Dinas pekerjaan Umum	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	SKRD
	Denda Keterlantaran Pelaksanaan Pekerjaan	SS
KP2T	Ret.Izin mendirikan Bangunan (IMB)	SS
	Ret.Izin Gangguan/Keamanan (HO)	SS
	Ret.Izin Usaha Perikanan	SS
Dinas Kelautan & Perikanan	Ret. Tempat Pelelangan Ikan	Karcis
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	SKRD
Kesbang polinmas	Ret. Alat Pemadam Kebakaran	Stiker

OPD	Jenis	Pengakuan
DPPKAD	Jasa Giro	Nota
	Bunga Deposito	Nota
	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah (BUMD)	SS
	Perusahaan Patungan/Milik Swasta	SS
	Pendapatan dari Pengembalian Temuan Inspektorat	SS
	Pendapatan dari Pengambilan Temuan Pemeriksaan BPK	SS
	Pendapatan dari Pengembalian Lainnya	SS
	Pend. Dari pengemb. keleb. Pemby.gaji & tunjangan hasil Pengolahan dana bergulir	SS
	Bagi Hasil Pajak/Non Pajak	Nota atau Laporan
	Dana Alokasi Umum (DAU)	Nota atau Laporan
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Nota atau Laporan
	Pendapatan Hibah	Nota atau Laporan
	Pendapatan Bantuan Keuangan	Nota atau Laporan
RSUD	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Karcis dan Surat Keterangan
Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	Ret. Pemakaian kekayaan Daerah	SKRD
	Ret. Tempat Penginapan	Kontrak Kerja dan Sewa
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	KK Baru	
	KK Penggantian	
	Surat Pindah Datang	
	Penerbitan e-KTP	
	Akte perkawinan	
	Surat keterangan dari Bidan	
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	Ret. Parkir di tepi jalan umum	Karcis dan Kontrak Kerja
	Ret.PKB (Keur)	Surat keterangan
	Ret.Teminal	Karcis
	Ret. Khusus tempat Parkir	Karcis dan Kontrak Kerja
	Ret.Izin Trayek	Surat Keterangan
	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	SKRD
	Ret. Pelayanan Kepelabuhan	Karcis
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah (Bus)	SS
Dinas Kesehatan	Ret. Pelayanan Kesehatan	Surat Keterangan
	Ret. Pelayanan Umum	Karcis
	Ret. Jamkesmas/askes sosial/ jampersal dr pusat	SS
	Ret. Pemeriksaan kesehatan haji lanjutan	Surat Keterangan

OPD	Jenis	Pengakuan
	Ret. Pelkes askes sosial kapasitas dr PT.Askes	SS
	Ret.pelkes jamkesda k apitasi dr PT Askes	SS
	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	SKRD
Perindakkop UM &KM	Ret. Pasar	Karcis dan SKRD
Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan	Ret. Pelayanan Persampahan/kebersihan	Kupon dan Karcis
Dinas pertanian Perkebunan &Peternakan	Ret.Pelayanan Pasar Hewan	Karcis dan Surat Keterangan
	Retribusi Rumah Potong Hewan	Karcis
	Penjualan Hasil perkebunan/Hasil Kebun Pemda	Kontrak kerja dan Sewa
	Penjualan Hasil perkebunan/Hasil Kebun Pemda	SS

5) Pendapatan Operasional dari Transaksi Pertukaran

a. Pendapatan Operasional yang diperolah dari transaksi pertukaran timbul bila entitas pemerintah menyerahkan barang dan/ atau jasa kepada publik atau ke entitas pemerintahan lainnya dan mendapat imbalan.

b. Suatu transaksi pertukaran (*exchange transaction*) terjadi bila satu pihak menerima aset/ jasa, dan secara langsung menerima nilai yang sebanding (terutama dalam bentuk kas, barang, jasa, atau penggunaan aset) dari entitas lain sebagai imbalannya.

c. Pendapatan yang berasal dari pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat merupakan pendapatan operasional dari transaksi pertukaran yang sering dijumpai pada Pemerintah Daerah. Contoh pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang menghasilkan pendapatan-LO pertukaran antara lain berupa retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan.

d. Kadangkala Pemerintah Daerah juga menghasilkan produk yang hasilnya ditujukan kepada masyarakat, seperti produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

e. Pendapatan-LO juga dapat diperoleh sebagai akibat dari penggunaan aset pemerintah yang dapat berupa sewa atas penggunaan aset berwujud Pemerintah Daerah, seperti sewa alat berat, bunga yang dibebankan kepada peminjam dana pemerintah, royalty atas penggunaan aset tak berwujud pemerintah, dan deviden atau lainnya yang setara dengan deviden atas hasil investasi pemerintah.

6) Pengakuan

a. Pendapatan-LO diakui pada saat :
   (a) timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned;*
   (b) pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun yang masih piutang (*realizable*).

b. Pengakuan pendapatan dapat dikelompokkan berdasarkan atas jenis pendapatan dan pengelola pendapatan tersebut yaitu pengakuan pendapatan-LO pada PPKD dan pengakuan pendapatan-LO pada SKPD.

c. Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk SKPD.

d. Akuntansi Pendapatan-LOpada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional.

e. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

f. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD:

(a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

- PAD melalui penetapan
  PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak,dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

- PAD tanpa penetapan
  PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan JasaGiro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

- PAD dari hasil eksekusi jaminan
  Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

(b) Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO,mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut.

Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanyakas pada RekeningKas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

(c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori

pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD,antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan.

Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

(d) Pendapatan Non operasional
Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang,Surplus dariKegiatan Non OperasionalLainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

g. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD, yaitu pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.

h. Pengakuan pendapatan-LO pada SKPD dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
(a) Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait;

(b) Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. PendapatanPajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait;

(c) kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

7) Pengukuran
a. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperolehdari transaksi nonpertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.

b. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.Pendapatan-LO daritransaksi pertukaran harusdiakuipada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

8) Penyajian
a. Pendapatan LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LO dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah :
   (a) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   (b) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   (c) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
   (d) informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1) Definisi
   a. Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagaiuangtunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan /dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
   b. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
   c. Laporan Keuangan mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.
   d. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

2) Klasifikasi Kas dan Setara Kas
   a. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup :
      (a) kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD);
      (b) kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.
   b. Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
      (a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
      (b) setara kas adalah merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari3 bulan tanggal perolehannya, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

c. Tabel berikut menjelaskan struktur kas dan setara kas secara ringkas:

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

3) Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4) Penyajian

a. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
b. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
c. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
   (a) rincian kas dan setara kas;
   (b) kebijakan manajemen setara kas; dan
   (c) informasi lainnya yang dianggap penting.

4.3.8 Kebijakan Akuntansi Piutang

1) Definisi

a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
b. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

c. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2) Klasifikasi Piutang

a. Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan piutang jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

b. Piutang Jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam janga waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

c. Berdasarkan peristiwa mendasari, piutang jangka pendek dibedakan menjadi:
   (a) piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   (b) piutang berdasarkan perikatan perjanjian;
   (c) piutang berdasarkan transfer pemerintahan;
   (d) piutang beradasarkan tuntutan ganti rugi;
   (e) piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

d. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain berdasarkan Undang-Undang Pajak, Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.

e. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.

f. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, dan piutang Dana Bagi Hasil.

g. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP).

h. Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, merupakan piutang yang disebabkan karena terjadinya peristiwa lain pada poin III.3 huruf a, b, c, dan d.

i. Piutang jangka panjang dapat berupa :
   (a) piutang yang terjadi karena kurang bayar dan ketetapan kurang bayarnya melebihi 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca;
   (b) piutang jangka panjang karena perikatan. Dalam perikatan tersebut terdapat angsuran pembayaran piutang dan bunganya;

j. Uang Muka Beban/Beban dibayar dimuka digunakan untuk pembayaran/ realisasi dana yang telah dilaksanakan namun pekerjaan atas pembayaran tersebut belum dilaksanakan oleh pihak yang menerima pembayaran tersebut.

3) Pengakuan

a. Piutangdiakui saat:
   (a) diterbitkan surat ketetapan; atau
   (b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
   (c) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

b. Pengakuan piutang jangka pendek dibedakan atas peristiwa mendasarinya.

c. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang terkait. Misalnya piutang pajak daerah merupakan piutang yang timbul dari pendapatan pajak daerah oleh sebab itu pengakuan piutang pajak daerah harus didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan pajak daerah. Untuk dapat diakui sebagai piutang, maka harus dipenuhi kriteria:
   (a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
   (b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

d. Piutang berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi kriteria:
   (a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
   (b) jumlah piutang dapat diukur;
   (c) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
   (d) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

e. Piutang Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria berikut:
   (a) piutang dana bagi hasil (DBH), apabila alokasi defenitif jumlah yang menjadi hak daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah;
   (b) piutang dana alokasi umum, apabila pada akhir Tahun Anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu Tahun Anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu;
   (c) piutang dana alokasi khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka Pemerintah Daerah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK;
   (d) piutang transfer lainnya diakui bila :
      - dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah;
      - dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.
   (e) piutang bagi hasil dari Provinsi, apabila alokasi defenitif jumlah menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah;
   (f) piutang transfer antar daerah, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah, belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai Piutang Pemerintah Daerah.

f. Uang Muka Beban/Beban dibayar dimuka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening kas umum daerah untuk pembayaran Uang Muka Beban/Beban dibayar dimuka.

g. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dapat diakui bila telah memenuhi kriteria :
   (a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
   (b) telah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKPD) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian daerah;
   (c) dan bila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

h. Pengakuan piutang jangka panjang dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapan piutang.

5) Pengukuran
   a. Piutang dicatat dan diukur sebesar:
      (a) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau
      (b) nilai bersih yang dapat direalisasikan (*netrealizable value*).
   b. Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizablevalue*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.
   c. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang(*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.
   d. Pengukuran piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan, dicatat sebagai berikut :
      (a) untuk metode *official assessment* piutang dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan surat ketetapan, surat keputusan keberatan, putusan pengadilan, putusan peninjauan kembali, surat penetapan dan/atau surat tagihan, dan hak negara untuk melakukan tindakan penagihan;
      (b) untuk *self assesment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.
   e. Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah sebagai berikut :
      (a) piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang akan dikeluarkan dari kas daerah, dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar padatanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut, apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee,* dan/atau biaya-biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;
      (b) piutang dari penjualan dicatat sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan, apabila di dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;

(c) piutang dari kemitraan dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;
(d) piutang dari pemberian fasilitas/jasa dicatat berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima;
(e) piutang transaksi dibayar dimuka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar Pemerintah Daerah.

f. Piutang yang timbul karena adanya putusan lembaga peradilan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam putusan tersebut.
g. Pengukuran Piutang Transfer antar pemerintahan adalah sebagai berikut:
(a) dana bagi hasil dicatat sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(b) dana alokasi umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
(c) dana alokasi khusus dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan diisetujui oleh Pemerintah Pusat.
h. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam nilai SKTJM atau SKPS.

6) Penyisihan Piutang
1. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/ disisihkan dari akun piutang.
2. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net reliazable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo/ umur piutang dan upaya penagihan.
3. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang.
4. Kriteria Kualitas Piutang
Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah:
a. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
1) Jatuh tempo piutang; dan/atau
2) Upaya penagihan.
b. Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
1) kualitas lancar;
2) kualitas kurang lancar;
3) kualitas diragukan; dan

4) kualitas macet.

c. Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.

d. Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

1) Pajak daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:

a) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- (b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- (c) wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- (d) wajib pajak kooperatif; dan/atau
- (e) wajib pajak likuid; dan/atau
- (f) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengankriteria:
- (a) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;dan/atau
- (d) wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan;dan/atau
- (e) wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5tahun; dan/atau
- (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- (d) wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
- (e) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
- (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu)bulan perhitung sejak tanggal surat tagihan ketigabelum melakukan pelunasan; dan/atau
- (c) wajib pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
- (d) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- (e) wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

b) Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*officialassessment*) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- (a) umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- (b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
- (c) wajib pajak kooperatif; dan/atau
- (d) wajib pajak likuid; dan/atau

(e) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
(a) umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
(b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu)bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertamabelum melakukan pelunasan; dan/atau
(c) wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;dan/atau
(d) wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
(a) umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5tahun; dan/atau
(b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu)bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan keduabelum melakukan pelunasan; dan/atau
(c) wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
(d) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
(a) umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
(b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketigabelum melakukan pelunasan; dan/atau
(c) wajib pajak tidak diketahui keberadaannya dan/atau
(d) wajib pajak bangkrut/ meninggal dunia; dan/atau
(e) wajib pajak mengalami musibah *(force majeure)*.

2) Piutang retribusi yang dapat dilakukan dengan ketentuan:
a) Kualitas Lancar
(1) Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b) Kualitas Kurang Lancar
(1) Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga)bulan; dan/atau
(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c) Kualitas Diragukan
(1) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (duabelas) bulan; dan atau
(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d) Kualitas Macet
(1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

3) Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak danretribusi
a) Kualitas Lancar
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b) Kualitas Kurang Lancar
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c) Kualitas Diragukan
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

d) Kualitas Macet
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejaktanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
Tata cara penagihan piutang diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan piutang di daerah.

5. Penentuan Besaran Penyisihan Piutang
Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahu (periode pelaporan) ditentukan:
a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;
b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) daripiutang dengan kualitas kurang lancar;
c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai bagunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai bagunanatau nilai barang sitaan (jika ada).

6. Pencatatan Akuntansi
Pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang. Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan/tanggal pelaporan.
Jurnal pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-SKPKD dalam media Buku Jurnal Umum dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxxx x.	x.x.xx.xx	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih*)	xxx	

**) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam Laporan Operasional (LO)*

**) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan dalam Neraca sebagai pengurang akun piutang*

7. Pelaporan
Pelaporan penyisihan piutang meliputi:
a. beban penyisihan piutang;
b. penyisihan piutang tidak tertagih.
Beban penyisihan piutang disajikan dalam laporan operasional (LO) dan penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam neraca.
Berikut disajikan ilustrasi pelaporan beban penyisihan piutang tidakter tagih dalam Laporan Operasional (LO), piutang dan penyisihanpiutang tidak tertagih dalam neraca.

Format LO

DINAS X
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 20XX

URAIAN	20XX
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	xxx
PENDAPATAN ASLI DAERAH	xxx
Pendapatan Pajak Daerah	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx
Lain-lain PAD yang sah	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	
	xxx
BEBAN	
Beban Pegawai	xxx
Beban Persedian	xxx
Beban Jasa	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx
Beban Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	xxx
Beban Penyusutan	xxx
	xxx
JUMLAH BEBAN	
SURFLUS (DEFISIT)- LO	xxx
	xxx

Format Neraca
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA….
SKPD…..
NERACA
31 Desember 20XX

Aset		Kewajiban:	
Aset Lancar:		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	Jumlah Kewajiban Jk. Pendek	xxx
Piutang	xxx		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		Utang Jangka Panjang	xxx
Persediaan		Jumlah Kewajiban Jk. Panjang	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx		
		Ekuitas	xxx
Investasi Jangka Panjang		Jumlah Ekuitas	xxx
Investasi Non Permanen:			
Dana Bergulir	xxx		
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	xxx		
Investasi Permanen:			
Penyertaan Modal Pemda	xxx		
Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx		
Aset Tetap:			
Tanah	xxx		
Peralatan dan Mesin	xxx		
Gedung dan Bangunan	xxx		
Jalan, Jaringan dan Irigasi	xxx		
Aset Tetap Lainnya	xxx		
Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx		
Akumulasi Penyusutan	(xxx)		
Jumlah Aset Tetap	xxx		

Aset Lainnya			
Jumlah Aset Lainnya	xxx		
JUMLAH ASET	xxx	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	xxx

8. Penghapusan
   a. Penghapusan piutang oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
      1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
      2) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.
   b. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang
      1) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
         a. piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
         b. debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
         c. debitor mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
         d. debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
         e. debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
         f. debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
         g. debitor yang tidak dapat ditemukan lagi karena:
            (1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
            (2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
         h. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pernyataan Gubernur/ Bupati/Walikota; dan/atau
         i. objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
      2) Tata cara penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih;
      4) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
   c. Penghapus tagihan atau penghapusan mutlak piutang
      1) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
         a. penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/debitor kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar;

b. penghapus tagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
c. penghapus tagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
d. penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reschedulling dan penurunan tarif bunga kredit;
e. penghapus tagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang;
f. penghapus tagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain;
g. penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
   1) Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan;
   2) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

7) Penghapusan Piutang
   a. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau penghapusan atas piutang dimaksud.
   b. Piutang pajak dan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   c. Piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi dapat dihapuskan secara bersyarat dan mutlak. Penghapusan secara bersyarat merupakan penghapusan dari pembukuan piutang Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah (*write down*). Penghapusan secara mutlak merupakan penghapusan hak tagih daerah (*write off*).
   d. Penghapusan piutang secara mutlak sebagaimana dimaksud pada poin VII.4, dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.
   e. Penghapusan piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi didasarkan atas peraturan perundang-undangan.
   f. Pembayaran/pelunasan terhadap piutang yang telah dihapuskan, dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pajak/retribusi/bagian laba BUMD/lain-lain PAD yang Sah atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung jenis piutang.

8) Inventarisasi Piutang untuk Pelaporan
   a. Nilai piutang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan kejadian yang berkaitan dengan piutang tersebut. Penyesuaian nilai piutang harus dilakukan dalam hal adanya kejadian yang mengakibatkan hak daerah berkurang atau bertambah atas pendapatan daerah. Kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan penyesuaian nilai piutang antara lain :

(a) pembayaran/pelunasan;
(b) penundaan pelunasan piutang;
(c) pembatalan surat penetapan;
(d) keputusan pengadilan;
(e) kejadian lainnya yang dapat mengakibatkan piutang harus disesuaikan.

b. Penyesuaian nilai nominal dari piutang, harus didukung dokumen sumber yang mengakibatkan penyesuaian nilai nominal dari piutang. Nilai nominal piutang diakui sebesar dokumen sumber awal pengakuan piutang dikurangi atau ditambah sebesar selisih nilai nominal yang tercantum pada dokumen sumber yang mengakibatkan timbulnya penyesuaian.
c. Nilai nominal piutang yang dilaporkan harus disajikan secara lengkap dalam laporan keuangan. Oleh karena hal tersebut dan agar dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya, maka diperlukan suatu proses inventarisasi piutang secara periodik terutama pada akhir periode pelaporan. Proses inventarisasi piutang tersebut dapat berjalan bila dokumen sumber yang mempengaruhi nilai nominal dari piutang diadministrasikan secara baik.

9) Penyajian
a. Piutang disajikan pada Neraca.
b. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dan dikurangi penyisihan kerugian piutang tak tertagih.
c. Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak dan wajib retribusi pada periode berjalan tahun berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.
d. Dalam penyajian neraca untuk piutang jangka panjang dapat dibedakan bagian lancar piutang dan piutang jangka panjang. Piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan dalam aset lancar, sedangkan piutang yang pengembaliaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan pada Aset Non Lancar yaitu Kelompok Aset Lain-lain.
e. Untuk piutang yang dalam tertunggak tetap disajikan sebagai piutang pada aset lancar dengan mengasumsikan bahwa piutang yang tertunggak tersebut diharapkan pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dan dilakukan penyisihan sesuai dengan umur piutangnya. Contohnya adalah penyajian piutang ganti kerugian daerah dapat dilakukan sebagai berikut :
(a) nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan SKTJM atau SKPS disajikan sebagai piutang jangka pendek;
(b) nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya disajikan sebagai piutang jangka panjang.
g. Untukpiutangyang sedang dalam penyelesaian seperti penghapusan piutang, penanaman modal negara, *debt swap* dicatat pada aset lain-lain.
h. Dalam pengungkapan per tanggal neraca, dapat dilakukan reklasifikasi dari piutang jangka panjang ke piutang lancar karena jatuh tempo pengembaliannya sudah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
i. Piutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila piutang dalam mata uang asing, maka piutang tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran

mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

j. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:
   (a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
   (b) rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
   (c) penjelasan atas penyelesaian piutang;
   (d) dalam hal terdapat barang/ uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan.

4.3.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

a) Definisi
   a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
   b. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
   c. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
   d. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
   e. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
   f. Pemerintah Daerah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
   g. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas.

b) Klasifikasi Investasi
   a. Investasi Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.
   b. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:
      (a) dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
      (b) investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
      (c) berisiko rendah.
   c. Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada poin III.2, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:
      (a) surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
      (b) surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga

yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Daerah; atau

(c) surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

d. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
   (a) deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
   (b) pembelian surat utang negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
   (c) Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca;
   (d) Reksa dana;

e. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

f. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

g. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:
   (a) penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
   (b) investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

h. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain dapat berupa:
   (a) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;
   (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
   (c) dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
   (d) Investasi Non Permanen Lainnya.

i. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas atau lembaga/organisasi tertentu.

j. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah Daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan

kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

k. Akuntansi untuk investasi Pemerintah Daerah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

4) Pengakuan Investasi

a. Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:
   (a) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
   (b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

b. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

c. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada paragraf diatas, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

d. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

e. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Dan untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi Pemerintah Daerah.

f. Pengakuan Investasi diakui pada saat diterbitkannya SP2D untuk penyaluran dana investasi.

g. Secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir untuk menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) pada neraca. *Net reliazable value* diperoleh berdasarkan nilai nominal perolehan dikurangi dengan penyisihan investasi yang tidak tertagih.

h. Penyisihan nilai investasi yang tidak tertagih dilakukan dalam analisa umur (*aging analysis*) yang ditetapkan sebagai berikut :
   (a) lancar, apabila belum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, tidak dilakukan penyisihan dana bergulir tidak tertagih;
   (b) kurang lancar, apabila telah melampau jangka waktu 1 (satu) tahun, namun belum melampaui jangka waktu 4 (empat) tahun, dilakukan penyisihan sebesar50%;

(c) diragukan, apabila telah melampaui jangka waktu 4 (empat) tahun namun belum melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, dilakukan penyisihan sebesar 75%;
(d) macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dilakukan penyisihan sebesar 100%.

5) Pengukuran Investasi
a. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
c. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
e. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
f. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
g. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
h. Investasi nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
i. Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
j. Investasi nonpermanen dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, jika dan hanya jika investasi tersebut dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual atau berupa investasi dalam bentuk tagihan.
k. Dalam hal investasi dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual, nilai invesatasi dicatat sebesar nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan. Dalam hal investasi berupa tagihan, nilai invesatasi dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.
l. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar asetyang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.
m. Investasi dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset nonmoneter atau kombinasi aset moneter dan nonmoneter.

n. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.
o. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
p. Diskonto atau premium merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (*carrying value*) investasi tersebut. Amortisasi diskonto atau premium akan mengurangi diskonto atau premi. Amortisasi diskonto atau premium akan diakui sebagai pengurang atau penambah pendapatan bunga dalam laporan operasional. Pendapatan bunga LRA tidak dipengaruhi oleh amortisasi diskonto atau premium.
q. Jika investasipemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau biaya perolehan mengalam penurunan nilai, maka penurunannya harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Penurunan nilai terjadi jika nilai tercatat investasi lebih besar dibandingkan dengan nilai wajar investasi tersebut.

6) Metode Penilaian Investasi
a. Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
(a) metode biaya
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
(b) metode ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah Daerah akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
(c) metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
b. Penggunaan metode pada paragraf diatas tentang metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
(a) kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
(b) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
(c) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
(d) kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
c. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

(a) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
(b) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
(c) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
(d) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

d. Dalam hal penerapan metode ekuitas untuk kepemilikan investasi dalam bentuk saham, dimungkinkan bersaldo minus (negatif) karena perusahaan daerah terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Investasi bersaldo minus diakui oleh Pemerintah Daerah sepanjang dapat diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum, dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum (*incurred legal/ constructive obligation*) terhadap perusahaan daerah tersebut.
e. Apabila pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum terhadap perusahaan daerah tersebut, maka investasi bersaldo minus disajikan sebesar nihil pada neraca.

7) Pengakuan Hasil Investasi
a. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
b. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang nonpermanen berupa pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) diakui sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional pada saat dividen diumumkan dalam RUPS. Pendapatan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut diakui sebagai pengurang piutang dividen pada neraca pada saat kas diterima. Penerimaan dividen tunai (*cash dividend*) tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
c. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada laporan operasional. Hasil investasi berupa dividen tunai akan diakui sebagai pengurang piutang dividen pada saat kas diterima. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai tersebut akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.
d. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pemerintah pada neraca. Dividen tunai diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS. Dividen tunai yang telah diterima pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

f. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negative tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil.

h. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

i. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi *(investee*) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban.

j. Pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

8) Pelepasan dan Pemindahan Investasi

a. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

b. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/kerugian pelepasan investasi. Keuntungan/ kerugian pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

9) Pengungkapan

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah, antara lain:

a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
b. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
c. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;
d. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
e. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
f. Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas;
g. Investasi yang disajikan dengan nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
h. Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum;
i. Perubahan klasifikasi pos investasi;
j. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi;

4.3.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

1) Definisi
   a. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
   b. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
      a. barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
      b. bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
      c. barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
      d. barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan;

2) Klasifikasi Persediaan
   a. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa barang pakai habis seperti alat / bahan untuk kegiatan kantor, barang tak pakai habis seperti komponen dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
   Klasifikasi persediaan sebagai berikut:

Objek	Rincian Objek
Barang Pakai Habis	1. Bahan
	2. Suku Cadang
	3. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
	4. Obat-obatan
	5. Persediaan untuk dijual/diserahkan
	6. Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga
	7. Natura dan pakan
	8. Persediaan penelitian
	9. Persediaan dalam proses
Barang Tak Pakai Habis	1. Komponen
	2. Pipa
Barang Bekas Dipakai	1. Komponen bekas dan pipa bekas

   b. Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
   c. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
   d. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
   e. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
   f. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang dan persediaan yang tidak lagi digunakan disebabkan karena tidak sesuainya dengan peraturan perundang-undangan tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Pengakuan
   a. Persediaan diakui pada saat :
      (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

(b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

b. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/ dokumen yang dapat diverifikasi, dan bersifat netral). Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kwitansi, dan berita acara serah terima (BAST).

c. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

d. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

e. Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

f. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebaga ibeban.

g. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4) Metode Pencatatan

a. Persediaan dicatat dengan metode periodik, dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK, barang cetakan, materai dan bahan kebersihan di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

b. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya berkelanjutan dan membutuhkan pengendalian yang kuat, contohnya obat-obatan dan tiket kapal. Dengan metode perpetual pencatatan dilakukan setiap ada persediaan masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu termutakhirkan.

5) Pengukuran

a. Persediaan disajikan sebesar:
   (a) harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian;
   (b) harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
   (c) nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

b. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan metode *first in first out* (FIFO);
c. Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing;
d. Harga pokok produksidan persediaan hewan dan tanaman meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
e. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

6) Beban Persediaan
   a. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use ofgood*);
   b. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional;
   c. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan dalam dalam jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan;
   d. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
   e. Selisih persediaan pencatatan antara hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) dengan yang dibukukan yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa ataupun rusak maka selisih persediaan ini dipertimbangkan sebagai suatu kejadian yang abnormal dan diperlakukan sebagai beban.

7) Pengungkapan
   Laporan keuangan mengungkapkan:
   a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
   b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
   c. kondisi persediaan.

4.3.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1) Definisi
   a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
   b. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Daerah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Daerah adalah:

(a) aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
(b) hak atas tanah.

c. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

2) Klasifikasi Aset Tetap

a. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

(a) tanah;
(b) peralatan dan mesin;
(c) gedung dan bangunan;
(d) jalan, irigasi, dan jaringan;
(e) aset tetap lainnya; dan
(f) konstruksi dalam pengerjaan.

b. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

c. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

e. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Walaupun tidak ada defenisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut :

(a) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;

(b) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif;

(c) tidak dapat dipindah-pindahkan;

(d) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

f. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

g. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

h. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3) Pengakuan

a. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi sebagai berikut :
   (a) berwujud;
   (b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   (c) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
   (d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
   (e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
   (f) memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.

b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:
   (a) alat angkutan/alat-alat besar sebesar Rp3.000.000,00;
   (b) peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat sebesar Rp1.500.000,00;
   (c) gedung dan bangunan dengan nilai perolehan Rp25.000.000,00.

c. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

d. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

e. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya dengan nilai tercatat dan aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

f. Pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

g. Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

(a) penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut;

(b) pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian;

(c) pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.

4) Pengukuran

a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

b. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya.

c. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

d. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

5) Penilaian Awal Aset Tetap

a. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

b. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

c. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

d. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi poin 5.b bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti Poin 5.a. Penilaian kembali yang dimaksud dan poin yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

e. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

6) Komponen Biaya

a. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat berfungsi untuk penggunaan yang dimaksudkan.

b. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

(a) biaya persiapan tempat;
(b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
(c) biaya pemasangan (*instalation cost*);
(d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
(e) biaya konstruksi;
(f) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).

c. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

d. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, juga termasuk dalam harga perolehan peralatan dan mesin adalah honor pejabat/panitia pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan.

e. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak dan juga termasuk dalam harga perolehan gedung dan bangunan adalah honor pejabat/ panitia pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan/PHO.

f. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan,

biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

g. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

h. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

i. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi :

   (a) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
   (b) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
   (c) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

j. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

k. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas). Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

7) Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Belanja perencanaan yang fisiknya tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran berkenaan dianggarkan pada kelompok belanja barang dan jasa.

b. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode Tahun Anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

d. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

8) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

9) Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)
   a. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

   b. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

   c. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

10) Aset Donasi
   a. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

   b. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

   c. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

   d. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

11) Pengeluran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditure*)
   a. Aset tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan. Aset tetap bagi Pemerintah Daerah, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain merupakan komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

   b. Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

c. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.

d. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

e. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

f. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.

g. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.

h. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400m^2 menjadi 500m^2.

i. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

   (a) Alat-alat angkutan/alat-alat besar sebesar Rp3.000.000,00;

   (b) Peralatan dan mesin lainya selain alat angkutan dan alat-alat besar sebesar Rp1.500.000,00.

j. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:

   (a) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp25.000.000,00 maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan;

   (b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,00, maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir ke dalam nilai gedung dan bangunan.

k. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian. Hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan dengan nilai melebihi Rp300.000,00 maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan.

l. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

m. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/*Over haul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	>15% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	*Overhaul*	>15% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	*Overhaul*	>15% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	>20% s.d. 30%	1
		>30% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>50% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Overhaul*	>20% s.d. 30%	01
		>30% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	>30% s.d. 30%	1
		>30% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>20% s.d. 30%	1
		>30% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	>15% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>50% s.d.75%	9
		>75% s.d.100%	12

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/*Over haul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	>10% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>10% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	*Overhaul*	>10% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	*Overhaul*	>10% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 35%	0
Alat Kantor	*Overhaul*	>35% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 35%	0
		>35% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	*Overhaul*	>15% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	>15% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	>20% s.d. 35%	2
		>35% s.d 50%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/*Over haul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	>10% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d. 35%	0
		>35% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	>0% s.d. 35%	0
		>35% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d. 35%	2
		>35% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	*Overhaul*	>10% s.d. 35%	3
		>35% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	>10% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non	*Overhaul*	>10% s.d. 25%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/*Over haul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Destructive Testing laboratory			
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	>15% s.d. 35%	1
		>35% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	>10% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	*Overhaul*	>10% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	*Overhaul*	>10% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/*Over haul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Komputer Unit	*Overhaul*	>15% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	*Overhaul*	>15% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	>10% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	>10% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	>10% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>10% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>10% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>10% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/*Over haul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	>10% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	>10% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	*Overhaul*	>10% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	*Overhaul*	>10% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>10% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	*Overhaul*	>10% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	>10% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/*Over haul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	*Overhaul*	>10% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	*Overhaul*	>10% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	*Overhaul*	>15% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	*Renovasi*	>10% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	*Renovasi*	>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d 100%	30
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	*Renovasi*	>25% s.d. 50%	5
		>50% s.d 65%	10
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	*Renovasi*	>10% s.d. 30%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/*Over haul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	*Renovasi*	>10% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	*Renovasi*	>10% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	*Renovasi*	>15% s.d. 30%	1
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	*Renovasi*	>15% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	*Renovasi*	>2% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	*Renovasi*	>2% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	*Renovasi*	>2% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai &Penanggulangan Bencana alam	*Renovasi*	>2% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan	*Renovasi*	>2% s.d. 5%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/*Over haul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Sumber air dan Tanah			
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	*Renovasi*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	*Renovasi*	>15% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	*Renovasi*	>15% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolahan Sampah	*Renovasi*	>15% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	*Renovasi*	>10% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>10% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>10% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>10% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>10% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/*Over haul* dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>5% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>15% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	*Overhaul*	>15% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	*Overhaul*	>15% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	*Overhaul*	>15% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	*Overhaul*	>15% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	*Overhaul*	>15% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>25% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>15% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	*ovasi /Overhaul*	>25% s.d. 100%	5

12) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

13) Penyusutan
a. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
b. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang penyusutan dibahas pada lampiran tersendiri dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini.

14) Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)
a. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

b. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

15) Akuntansi Tanah
a. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan akuntansi tentang akuntansi aset tetap.

b. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.

c. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, namun belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik Pemerintah Daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan yang tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut :

(a) dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

(b) dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara

memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain;

(c) dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

(d) perlakuan tanah yang masih dalam sengketa /proses pengadilan :

- Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

16) Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

a. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

(a) nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
(b) peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
(c) tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
(d) sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

c. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

e. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

f. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

g. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

h. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan.

17) Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)

a. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

(a) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
(b) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
(c) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
(d) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

b. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.

c. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

18) Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*)

a. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

b. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

d. Penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

19) Pengungkapan

a. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

(a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
(b) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- Penambahan;
- Pelepasan;
- Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
- Mutasi aset tetap lainnya.

(c) informasi penyusutan, meliputi:

- Nilai penyusutan;
- Metode penyusutan yang digunakan;
- Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

(d) laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

b. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

(a) dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
(b) tanggal efektif penilaian kembali;
(c) jika ada, nama penilai independen;
(d) hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.

4.3.12 Kebijakan Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan

1) Definisi

a. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

c. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau

tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

d. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
   (a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
   (b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
   (c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
   (d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

e. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi
   (a) Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan akuntansi ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan akuntansi ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

   (b) Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
      (a) proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
      (b) setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
      (c) biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.

   (c) Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

      (a) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau

      (b) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

c) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
   a. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
      (a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
      (b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
      (c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

   b. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

   c. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

(a) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
(b) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

d. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

d) Pengukuran
Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

e) Biaya Konstruksi
a. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

b. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
(a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
(b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
(c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
(d) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
(e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

c. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
(a) asuransi;
(b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
(c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

d. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
(a) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
(b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
(c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

e. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

f. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

g. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

h. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

i. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

j. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

k. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeur*maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

l. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeur* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeur*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

m. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

n. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam poin IV.3. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

f) Pengungkapan

a. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
   (a) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
   (b) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;
   (c) jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
   (d) uang muka kerja yang diberikan;
   (e) retensi.

b. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

4.3.13 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Lainnya

1) Definisi

a. Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

b. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan.

2) Klasifikasi

a. Aset lainnya dapat diklasifikasikan sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Aset Lainnya	Uraian
1. Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
3. Aset Tidak Berwujud	*Goodwill*
	Hak Cipta atau Hak Paten
	Royalti
	Software
	Lisensi dan *Franchise*
	Hasil Kajian / Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
4. Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

b. Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

c. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
(a) tagihan jangka panjang;
(b) kemitraan dengan pihak ketiga; dan
(c) aset lain-lain.

d. Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:
(a) aset tak berwujud; dan
(b) asset lain-lain.

3) Pengakuan

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan penjualan angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan tuntutan kerugian daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untukmengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2) Kerjasamapemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun guna serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun serah guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)
Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintahdaerahuntuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor.Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tak Berwujud
Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) *Goodwill*
Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.*Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak paten atau hak cipta
Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah.Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti
Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) *Software*
Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

Perlakuan khusus dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a) Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah.

Dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut maka untuk software seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan software komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

(a) Tahap awal kegiatan
Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternative, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternative untuk pengembangan software tersebut.

(b) Tahap pengembangan aplikasi
Aktifitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi software dan software interface, koding, menginstall ke hardware, testing, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasionalkan software.

(c) Tahap setelah implementasi/operasionalisasi
Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional software dan pemeliharaan software.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktifitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya.

Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:
(a) Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan
(b) Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

b) Perolehan *software* secara eksternal
Untukpembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan.

Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah daerah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai

peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Untukmenentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap software yang diperoleh secara eksternal tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah:

a) Apakahharga perolehan awal dari *software* terdiri dari harga pembelian *software* dan pembayaran untuk lisensi penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;

b) apakah ada batasan waktu/izin penggunaan *software*;

c) berapa lama izinpengunaan.

Denganmemperhatikan hal-hal tersebut diatas maka perlakuan akuntansi untuk *software* yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:

(a) Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.

(b) *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.

(c) *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.

c) Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

Pada kebanyakan kasus, sifat ilmiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB atau penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu kebanyakan pengeluaran perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

(a) Meningkatkan fungsi *software*;
(b) Meningkatkan efisiensi *software*.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari *software* pada praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *up-grade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

a) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.

b) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikanmanfaatjangkapanjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
Perlakuan Untuk Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

a) Pengakuan Yang Diperoleh Secara Internal

Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

(1) Tahap penelitian atau riset

Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi.

Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:

(a) Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (new knowledge);

(b) Pencarian untuk, evaluasi dan seleksi akhir atas, penerapan temuan hasil penelitian atau pengetahuan lainnya;

(c) Pencarian atas alternatif untuk material, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;

(d) Formula, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan

(2) Tahap Pengembangan

ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) *harus diakui jika, dan hanya jika,* pemerintah daerah dapat memperlihatkan *seluruh kondisi* dibawah ini, yaitu adanya:

(a) Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
(b) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
(c) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
(d) Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang;
(e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan Aset Tidak Berwujud tersebut;
(f) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasikan adanya ATB dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis atau manfaat sosial dimasa datang. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan *(further advance)* atas tahap penelitian/riset.

Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:
(a) Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
(b) Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
(c) Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
(d) Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:
(a) Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
(b) Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
(c) Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.

Jika pemerintah daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas kegiatan internal untuk menghasilkan ATB, maka seluruh pengeluaran atas kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

b) Pengakuan dari Penelitian Dibiayai Instansi Lain

Pada praktek di pemerintahan daerah terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi tertentu, namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.
Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintah daerah dan konsep entitas maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat aset apabila dari belanja yang dikeluarkan dari anggaran tersebut menghasilkan aset walaupun penelitiannya dilakukan oleh lembaga lain. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan bahwa perguruan tinggi atau lembaga litbang yang memperoleh dana penelitian dari pemerintah tidak dapat mengalihkan pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kontrol terhadap aset yang dihasilkan yang merupakan salah satu kriteria untuk mengakui ATB.

Namun demikian instansi pemerintah yang memberikan dana tidak dapat serta merta mengakui ATB tersebut, kecuali jika memenuhi karakteristik ATB dan memenuhi kriteria pengakuan. ATB yang berasal dari Penelitian dan Pengembangan, harus sesuai dengan kriteria pengakuan ATB dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian. Biaya perolehan ATB yang dihasilkan secara internal dari pengembangan adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak tanggal ATB pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Sehingga tidak semua biaya penelitian dan pengembangan yang telah dikeluarkan diakui sebagai ATB. Biaya penelitian dikeluarkan dan biaya tahap pengembangan terkait dengan ATB tersebut sebelum kriteria pengakuan dipenuhi tidak boleh diakui sebagai ATB. Dengan demikian harus ada penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai hal ini.

Dengan demikian pihak perguruan tinggi dan/atau lembaga litbang yang melakukan penelitian tidak mencatat ATB tersebut, namun sesuai dengan pasal 10 PP 20/2005, perguruan tinggi atau lembaga litbang tersebut adalah sebagai pengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukannya. Dalam pasal 11 PP tersebut juga disebutkan bahwa perguruan tinggi dan lembaga litbang tersebut mengupayakan perlindungan hukum atas pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan. Dengan demikian apabila hasil penelitian tersebut dipatenkan, dan biaya patennya dikeluarkan oleh instansi lembaga penelitian, maka ATB berupa paten tersebut dicatat oleh lembaga penelitian sebesar jumlah biaya patennya.

7) Aset tak berwujud dalam pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

8) Aset tak berwujud lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah jumlah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Untuk dapat diakui sebagai ATB maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi kriteria ATB dan kriteria pengakuan.
Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pengakuan awal sebesar biayaperolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.

Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.
Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:
a. kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
b. biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

5. Aset Lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu

proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

2) Kriteria Aset Tak Berwujud (ATB)

1. Dapat diindentifikasi
   Yang dimaksud dapat diidentifikasi adalah:
   a. Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB ini dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Namun demikian tidak berarti bahwa ATB baru diakui dan disajikan di neraca jika entitas bermaksud memindahtangankan, menyewakan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Identifikasi serta pengakuan ini harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah entitas tersebut bermaksud melakukannya atau tidak;

   b. Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

      Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati, mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang terjadi perolehan secara gabungan.

      Dalam hal ATB diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini dapat juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut. Dalam hal demikian entitas tetap harus mengidentifikasi adanya ATB tersebut. Beberapa ATB biasanya dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk dagang, dan *franchise*.

      Sebagai ilustrasi, suatu entitas membeli *hardware*, *software,* dan modul untuk kegiatan tertentu. Sepanjang *software* tersebut dapat dipisahkan dari *hardware* terkait dan memberikan manfaat masa depan maka *software* tersebut diidentifikasi sebagai ATB.

      Sebaliknya dalam hal *software* komputer ternyata tidak dapat dipisahkan dari *hardware*, misal, tanpa adanya *software* tersebut *hardware* tidak dapat beroperasi, maka *software* tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai ATB tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari *hardware* dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun jika *software* tersebut dapat dipisahkan dari hardware, dapat diakui sebagai ATB. Misalnya *software* dapat dipasang di beberapa *hardware* dan *hardware* tetap dapat dijalankan tanpa tergantung pada *software* tersebut, maka *software* diakui sebagai ATB.

2. Pengendalian
   Pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut ”mengendalikan aset” jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset

tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan entitas untuk mengendalikan hak tersebut. Instansi pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi masa depan karena adanya pengetahuan teknis yang dimilikinya. Pengetahuan teknis ini dapat diperoleh dari riset atau pengembangan atau mungkin dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan.

3. Manfaat Ekonomi Masa Depan
   Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk dapat memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah.

   Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

3) Cara Perolehan Aset Tak Berwujud

1. Pembelian
   Pembelian ATB bisa dilakukan secara terpisah (individual) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.

2. Pengembangan secara internal
   ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatan-kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB akan dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.

3. Pertukaran
   ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.

4. Kerjasama
   Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerja sama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tangungjawabnya atas ATB tersebut.

5. Donasi/hibah
   ATB, yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya ada suatu perusahaan software yang memberikan software aplikasinya kepada suatu instansi pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

6. Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets)
   Pemerintah dapat memegang banyak ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.

4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud
Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)
   Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

2. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)
   Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

5) Pengukuran
1. Tagihan Jangka Panjang
   a. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan;
   b. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominaldalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM);
   c. Kemitraan dengan pihak ketiga
      1) Sewa di nilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan;
      2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji;
      3) Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut;
      4) Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

2. Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

3. Biaya untuk aset tak berwujud yang diperoleh secara eksternal terdiri dari:
   (a) Pembelian
      1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

      2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
         - biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
         - biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
         - biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

   (b) Pertukaran
   Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

   (c) Kerjasama
   ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.

   (d) Donasi/Hibah
   ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

4. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
   (a) aset tak berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
   (b) pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari;
   (c) aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

5. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan

dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsungterhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah Dibebankan Tidak Dapat Diakui sebagai Aset.

6. ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
7. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

6) Amortisasi

1. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll).
2. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
3. Masa manfaat aset tak berwujud adalah 5 (lima) tahun.
4. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas.
5. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap.
6. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus.Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

7) Penurunan Nilai (*Impairment*)

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera.

Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun, atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya,

nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud.

Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8) Penghentian Dan Pelepasan ATB

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagimemiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

PelepasanATB dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan, dengan cara:

a. dijual;
b. dipertukarkan;
c. dihibahkan; atau
d. dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN dan Permendagri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebut dengan penghapusan.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

9) Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. besaran dan rincian aset lainnya;
b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
d. informasi lainnya yang penting.

4.3.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1) Definisi

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. Karakterisitik utama kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
3. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
4. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

2) Klasifikasi Kewajiban

1. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.
3. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
4. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
5. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

6. Pendapatan diterima dimuka adalah nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Pendapatan Diterima Dimuka sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

7. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
   a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
   b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
   c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui

8. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

9. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

10. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:
    a. pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran; dan
    b. terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian	
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek	
2.1.1.		Utang Kepada Pihak Ketiga
2.1.2.		Utang Bunga
		Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
2.1.3.		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2.1.4.		Kewajiban Lancar Lainnya
2.1.5.		Utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan

Kode Akun	Uraian	
		Utang Pemerintah Daerah yang diperjualbelikan
		Perubahan valuta asing
		Pendapatan Diterima Dimuka
2.1.6.		Utang Jangka Pendek Lainnya
2.2.	Kewajiban Jangka Panjang	
2.2.1.		Utang Dalam Negeri
2.2.2.		Utang Jangka Panjang Lainnya

3) Pengakuan Kewajiban

1. Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

2. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.

3. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Pembedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban.

4. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

5. Kewajiban dapat timbul dari:
   (a) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
   (b) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
   (c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
   (d) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

6. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

   a. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai Pemerintah Daerah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar

dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

b. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

c. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke Pemerintah Daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

d. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

e. Pada saat Pemerintah Daerah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa Pemerintah Daerah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

f. Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun biayabiaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

g. Dengan kata lain Pemerintah Daerah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi pada poin IV.6 ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

1) badan legislatif (DPRD) telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,

2) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

3) Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui Pemerintah Daerah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di suatu kecamatan dan DPRD mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari Pemerintah Daerah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan Pemerintah Daerah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh Pemerintah Daerah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk Pemerintah Daerah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke Pemerintah Daerah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan Pemerintah Daerah.

7. Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kewajiban atau pendekatan pendapatan. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

4) Pengukuran Kewajiban

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

3. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.

V.1 Utang Kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

1. Pada saat Pemerintah Daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah Daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut berdasarkan surat perjanjian/kontrak.

2. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

3. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.

V.2 Utang Bunga (*Accrued Interest*)

1. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
2. Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk dan substansi yang sama dengan Surat Utang Negara (SUN).

V.3 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

1. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

V.4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

1. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

V.5 Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

V.6 Utang Pemerintah Daerah yang tidak Diperjualbelikan dan yang Diperjualbelikan

Penilaian utang Pemerintah Daerah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:

a. utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*)
b. utang pemerintah daerah yang diperjualbelikan (*traded debt*)

V.6.1 Utang Pemerintah Daerah yang tidak Diperjualbelikan (*Non-Traded Debt*)

1. Nilai nominal atas utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.
2. Contoh dari utang Pemerintah Daerah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan international seperti *IMF*, *World Bank*, *ADB* dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).
3. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang Pemerintah Daerah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

V.6.2 Utang Pemerintah Daerah yang Diperjualbelikan (*Traded Debt*)

1. Akuntansi untuk utang Pemerintah Daerah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari Pemerintah Daerah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban Pemerintah Daerah.
2. Utang Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.
3. Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari (*face*) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari (*face*). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.
4. Sekuritas utang pemerintah daerah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Obligasi Daerah, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila dijual dengan nilai par. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.
5. Amortisasi atas diskonto atau premium menggunakan metode garis lurus.

V.7 Perubahan Valuta Asing

1. Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
2. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.
3. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
4. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
5. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.
6. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

V.8 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

5) Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

1. Untuk sekuritas utang Pemerintah Daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
2. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.
3. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

6) Tunggakan

1. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.
2. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Daerah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang Pemerintah Daerah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.
3. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan Pemerintah Daerah menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas entitas.
4. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan didalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

7) Restrukturisasi Utang

1. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.
2. Restrukturisasi dapat berupa :
   a. pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru
   b. penjadwalan ulang atau modifikasi persayaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan dapat berbentuk :
      (1) Perubahan jadwal pembayaran;
      (2) Penambahan masa tenggang; atau
      (3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
3. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak temasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.
4. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan .
5. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut

harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.

6. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

7. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.

8) Penghapusan Utang

1. Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

2. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

3. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada poin VIII.5 berlaku.

4. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan poin VIII.5, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.

5. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

   (a) nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau
   (b) biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

6. Penilaian kembali aset pada poin VIII.1.5 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

9) Biaya-Biaya Yang Berhubungan Dengan Utang Pemerintah Daerah

1. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Daerah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

   a. bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
   b. amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
   c. amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya.
   d. perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

2. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

3. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman terebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada poin IX.4

4. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasikan adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek Pemerintah Daerah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.

5. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

10) Penyajian

1. Utang Pemerintah Daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

2. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
   (a) jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
   (b) jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
   (c) bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
   (d) konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
   (e) perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
      1) Pengurangan pinjaman;
      2) Modifikasi persyaratan utang;
      3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
      4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
      5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
      6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
   (f) jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
   (g) biaya pinjaman:
      1) Perlakuan biaya pinjaman;
      2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
      3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

3. Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.15 Kebijakan Akuntansi Penyusutan

1) Definisi
   1. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
   2. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
   3. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional
   4. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
   5. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
   6. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.
   7. Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal tahun sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tetap yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diproleh pada awal tahun buku berikutnya.
   8. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :
      (a) menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah
      (b) mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan
      (c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis alam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.
   9. Untuk perhitungan penyusutan, waktu penyusutan ditentukan berdasarkan pada bulan saat aset tersebut digunakan. Pendekatan ini disebut pendekatan bulanan.

2) Objek Penyusutan
   1. Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap :
      a. Peralatan dan Mesin;
      b. Gedung dan Bangunan;
      c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
   2. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

3. Aset renovasi sebagaimana dimaksud pada poin III.2 merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi kapitalisasi aset tetap.
4. Penyusutan tidak dilakukan terhadap :
   (a) aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan akan diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
   (b) aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang akan diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
5. Aset tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam poin III.4 huruf (a) mengatur :
   (a) direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang;
   (b) tidak dicantumkan dalam laporan barang milik daerah dan neraca;
   (c) diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan.
6. Aset tetap yang dalam kondisi rusak sebagaimana dimaksud dalam poin III.5 huruf (b) mengatur :
   (a) direklasifikasi ke dalam daftar barang rusak berat;
   (b) tidak dicantumkan dalam laporan barang milik daerah dan neraca;
   (c) diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan.
7. Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut :
   (a) direklasifikasikan dari daftar barang hilang ke akun aset tetap
   (b) disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap
      (1) dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka aset tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah aset tetap bersangkutan ditemukan kembali;
      (2) dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyustan aset tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke daftar barang hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana aset tetap bersangkutan dicatat pada daftar barang hilang.

3) Nilai Yang Dapat Disusutkan
1. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014
2. Nilai buku sebagaimana dimaksud pada poin IV.1 merupakan nilai buku yang tercatat dalam pembukuan
3. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan, dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar.
4. Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi penyusutan aset tetap.
5. Koreksi penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada poin IV.4 yaitu :
   (a) diperhitungkan sebagai penambah nilai akun akumulasi penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca;

(b) diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan;
(c) dikecualikan untuk aset tetap yang sudah dihapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya penyusutan aset tetap.

6. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/ atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
7. Perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan Aset Tetap tersebut, yang meliputi penyesuaian atas:
   (a) nilai yang dapat disusutkan; dan
   (b) nilai akumulasi penyusutan.
8. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu
9. Nilai residu merupakan nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat
10. Untuk perhitungan penyusutan, waktu penyusutan ditentukan berdasarkan pada bulan saat aset tersebut digunakan. Pendekatan ini disebut pendekatan bulanan.

4) Masa Manfaat

a. Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok Aset Tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan :
   (a) daya pakai; dan
   (b) tingkat keausan fisik dan/ atau keusangan dari aset tetap yang bersangkutan.

c. Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan, dikecualikan dalam hal :
   (a) terjadi perubahan karakteristik fisik/ penggunaan aset tetap;
   (b) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat;
   (c) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

d. Perbaikan yang dimaksud pada poin V.2 huruf (b) meliputi :
   (a) renovasi, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud peningkatan masa manfaat, kualitas dan/ atau kapasitas
   (b) restorasi, merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya
   (c) *overhaul,* merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud peningkatan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas

e. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap.

f. Dan perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap akibat perbaikan yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap akibat perbaikan.

g. Untuk perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan berdasarkan pendekatan Tahunan dengan penyajian penyusutan secara tahunan.

Masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1		Alat-Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	3		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	
1	3	2	7		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan	5

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	8	3	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	2	9		Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	5
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	5
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	5
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	5
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	1	Sumur	5
1	3	2	13	2	Produksi	5
1	3	2	13	3	Pengolahan dan Pemurnian	5
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	5
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	5

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	5
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	4
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	3	Alat SAR	4
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	4
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	3
1	3	2	17		Peralatan Proses Produksi	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1	3	2	18		Rambu-Rambu	
1	3	2	18	1	Rambu-rambu Lalulintas Darat	7
1	3	2	18	2	Rambu-rambu Lalulintas Udara	7
1	3	2	18	3	Rambu-rambu Lalulintas Laut	7
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	5
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1		Bangunan Gedung	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	2		Monumen	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	3		Bangunan Menara	
1	3	3	3	1	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	4		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	4	1	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	2	3	Bangunan pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih /Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	10
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30

5) METODE PENYUSUTAN

1. Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line methode*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama, dan formulanya:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

2. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap lainnya disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut.

3. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

4. Khusus penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan tersendiri dengan perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkar}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut :

a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap masa periode untuk dihitung akhir tahun;

b. Masa manfaat adalah periode atau suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktifitas pemerintahan dan /atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktifitas pemerintah dan /atau pelayanan publik.

6) PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

1. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
2. Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.
3. Pencatatan penyusutan Aset Tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.

7) PENYAJIAN

a. Akumulasi penyusutan merupakan pengurang pos aset tetap.
b. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.
c. Informasi mengenai penyusutan aset tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat :
   (a) nilai penyusutan;
   (b) metode penyusutan yang digunakan;
   (c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
   (d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
d. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya, karena aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
e. Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada VIII.3 dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.16 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1) Definisi

a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
b. Dalam basis akrual pemerintah daerah hanya menyajikan satu pos ekuitas.

2) Klasifikasi Ekuitas

a. Akun Ekuitas pada neraca berbasis akrual terdiri atas Ekuitas, Ekuitas SAL dan Ekuitas untuk dikonsolidasikan.

b. Saldo Ekuitas diperoleh dariekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit-LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.

c. Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL yang mencakup antara lain estimasi pendapatan, estimasi penerimaan pembiayaan, apropriasi belanja, apropriasi pengeluaran pembiayaan, dan estimasi perubahan SAL, surplus/ defisit-LRA.

d. Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

3) Penyajian

Ekuitas disajikan dalam neraca, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

4.3.17 Kebijakan Akuntansi Ekuitas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan.

1) Koreksi Kesalahan

a. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

b. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

c. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

d. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
(a) kesalahan yang tidak berulang;
(b) kesalahan yang berulang dan sistemik;

e. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
(a) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
(b) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

f. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

g. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.

h. Koreksi Pengembalian Pendapatan-LRA yang sifatnya normal (sistemik) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

i. Koreksi dan pengembalian Pendapatan-LRA yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

j. Koreksi dan pengembalian Pendapatan-LRA yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

k. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.

l. Kecuali penerimaan kembali belanja hibah dibukukan dalam pendapatan LRA- dalam pos pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.

m. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

n. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

o. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*)atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

p. Contoh koreksi kesalahan belanja :

   (a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain LRA;

   (b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di *mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain LRA;

   (c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas;dan

   (d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.

q. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila

laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

r. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas :

(a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di *mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap;

(b) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

s. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

t. Contoh koreksi kesalahan beban :

(a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salahperhitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO;

(b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

u. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuanganperiode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

v. Contoh koreksi kesalahan pendapatan LRA :

(a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun saldo anggaran lebih;

(b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah pusat, dikoreksi oleh :

a. Pemerintah Daerah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas;
b. Pemerintah Pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

w. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas

x. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO :

(a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas;
(b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah pusat, dikoreksi dengan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas.

y. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

z. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan :

(a) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih;

(b) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu Pemerintah Daerah mengembalikan kelabihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas

aa. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan :

(a) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah saldo kas dan menambah akun saldo anggaran lebih;

(b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan akun saldo anggaran lebih.

bb. Koreksi kesalahan tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

cc. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatankewajiban :

(a) Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambahkan kewajiban;

(b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambahakan kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

dd. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

ee. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

ff. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

gg. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode keselahan ditemukan.

hh. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada poin II.29 adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

ii. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada poin II.10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluran kas untuk mengembalilkan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

jj. Koreksi kesalhaan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

kk. Koreksi kesalahan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2) Perubahan Kebijakan Akuntansi

a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecendrungan arah (*trend)* posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

d. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
   (a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan

   (b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

e. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

f. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Perubahan Estimasi Akuntansi
   a. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
   b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
   c. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4) Operasi yang Tidak Dilanjutkan
   a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas akuntansi dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, program, atau kegiatan terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
   b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
   c. Agar Laporan Keuangan disajikan komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
   d. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, penjualan, hibah dan lain-lain.
   e. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
      (a) penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand*(permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
      (b) fungsi tersebut tetap ada;
      (c) beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain;
      (d) menutup suatu fasilitas yang berutilitas amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa menganggu operasi tersebut.

4.3.18 Kebijakan PenyajianKembali (*Restatement*) Neraca

1) Definisi
   a. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.

b. Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

c. Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

(a) piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
(b) beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
(c) persediaan,di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh;
(d) investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;
(e) aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
(f) aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
(g) utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
(h) pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
(i) ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

2) Tahapan Penyajian Kembali

a. Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

(a) menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dst

(b) menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual.

b. Jurnal Standar

Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagai berikut :

URAIAN	AKUN	DEBIT	KREDIT
Penyajian kembali nilai wajar piutang	EKUITAS CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah akun akumulasi penyisihan piutang tak tertagih sebesar jumlah cadangan piutang yang seharusnya dicadangkan s/d tahun terakhir sebelum pelaksanaan basis akrual)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai beban dibayar dimuka	Beban Dibayar dimuka EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai beban dibayar dimuka)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai persediaan	Persediaan EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai persediaan, bila berkurang maka jurnal akan sebaliknya)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai investasi jangka pendek	Investasi Jangka Pendek EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai investasi jangka pendek)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai investasi jangka panjang	Investasi Jangka panjang EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai investasi jangka panjang, dan sebaliknya bila nilai investasi jangka panjang berkurang akibat investee mengalami kerugian)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilaibuku aset tetap	EKUITAS Akumulasi penyusutan (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Akumulasi penyusutan)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilaibuku aktiva tidak berwujud	EKUITAS Akumulasi Amortisasi (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai akumulasi penyusutan)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai utang jangka pendek	EKUITAS Utang Bunga jk pendek (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka pendek)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai utang jangka panjang	EKUITAS Utang Bunga jk panjang (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka panjang)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai Ekuitas	EKUITAS DANA EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali reklasifikasi ekuitas)	XXX	XXX

4.4. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan, beberapa informasi penting yang perlu disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menganut prinsip substansi mengungguli bentuk formalnya *(substanceover form)*. Artinya informasi dimaksudkan untuk menyajikandengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.

2) Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas dan basis akrual yaitu:
   (1) Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
   (2) Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca dan pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional.

3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah Tahun Anggaran 2019 (periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019).

4) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayaratau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.

5) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Dasar Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran adalah:

1. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Tahun 2020.
8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 54 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;dan
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2020.
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.

5.1.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran bertujuan memberikan informasi tentang kinerja keuangan berupa realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan perundang-undangan.

5.1.3 Definisi

1. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
2. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

3. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
5. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
6. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

5.1.4 PENJELASAN POS –POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp830.153.085.297,37 atau 95,88% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp865.799.014.618,00. Adapun realisasi belanja daerah sebesar Rp829.394.144.601,02 dari target Anggaran sebesar Rp907.054.073.744,00 atau 91,44% sehingga diperoleh Surplus sebelum Pembiayaan Netto antara realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah sebesar Rp758.940.696,35, Surplus tersebut selanjutnya ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp41.255.059.126,74 sehingga pada akhirnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) akhir tahun menjadi sebesar Rp42.013.999.823,09.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp**830.153.085.297,37** terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah	Rp	31.638.013.029,37
Pendapatan Transfer	Rp	775.266.457.268,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	23.248.615.000,00
Jumlah	**Rp**	**830.153.085.297,37**

Sedangkan realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara keseluruhan untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp**829.394.144.601,02** atau mencapai 91,44%. Realisasi belanja daerah tersebut terdiri dari:

Belanja Operasi	Rp	544.000.215.852,02
Belanja Modal	Rp	164.639.582.130,00
Belanja Tak Terduga	Rp	1.587.597.109,00
Belanja Transfer	Rp	119.166.749.510,00
Jumlah	**Rp**	**829.394.144.601,02**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021 diuraikan sebagai berikut:

		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)
5.1.4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	**45.340.441.160,00**	**31.638.013.029,37**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.638.013.029,37 atau mencapai 869,77% dari target anggaran sebesar Rp45.340.441.160,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Pendapatan Pajak Daerah	7.661.649.285,00	3.860.497.217,00	50,39	3.531.794.196,00
2	Hasil Retribusi Daerah	8.976.710.358,00	3.033.172.955,00	33,79	5.976.710.358,00
3	Hasil Pengelolaan Kekeyaan Daerah Yang Dipisahkan	10.684.123.854,00	10.684.123.854,00	100,00	12.591.521.757,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	18.017.957.663,00	14.060.219.003,37	78,03	12.805.647.244,51
Jumlah		**45.340.441.160,00**	**31.638.013.029,37**	69,78	**34.905.673.555,51**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah masing-masing diuraikan sebagai berikut:

		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)
5.1.4.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	**7.661.649.285,00**	**3.860.497.217,00**

Realisasi pendapatan pajak daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.860.497.217,00 atau 50,39% dari target anggaran sebesar Rp7.661.649.285,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Pajak Hotel	2.207.397.903,00	641.884.990,00	29,08	576.730.104,00
2	Pajak Restoran	1.504.251.382,00	788.472.782,00	52,42	750.797.384,00
3	Pajak Hiburan	200.000.000,00	0,00	0,00	4.525.500,00
4	Pajak Reklame	100.000.000,00	514.080,00	0,51	0,00
5	Pajak Penerangan Jalan	1.925.000.000,00	1.621.555.607,00	84,24	1.505.914.264,00
6	Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	50.192.091,00	16,73	74.761.015,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	500.000,00	0,50	1.700.000,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	925.000.000,00	553.717.955,00	59,86	450.299.578,00
9	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	400.000.000,00	203.659.712,00	50,91	167.066.351,00
Jumlah		**7.661.649.285,00**	**3.860.497.217,00**	**50,39**	**3.531.794.196,00**

		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)
5.1.4.1.2	**Pendapatan Retribusi Daerah**	**8.976.710.358,00**	**3.033.172.955,00**

Realisasi pendapatan retribusi daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.033.172.955,00 atau 33,79% dari target anggaran sebesar Rp8.976.710.358,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Retribusi Jasa Umum	2.921.862.332,00	1.428.011.629,00	48,87	3.136.485.025,00
2	Retribusi Jasa Usaha	5.858.241.359,00	1.489.810.100,00	25,43	2.773.125.940,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	196.606.667,00	115.351.226,00	58,67	67.099.393,00
Jumlah		**8.976.710.358,00**	**3.033.172.955,00**	**33,79**	**5.976.710.358,00**

Pendapatan Retribusi Daerah dengan rincian realisasi sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
I	**Retribusi Jasa Umum**	**2.921.862.332,00**	**1.428.011.629,00**	**48,87**	**3.104.487.025,00**
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	191.606.666,00	56.897.500,00	29,69	84.348.500,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	0,00	855.000,00	100,00	0,00
3	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	2.500.000.000,00	1.124.795.610,00	44,99	2.733.289.897,00
4	Retribusi Rumah Tangga	230.255.666,00	245.463.519,00	106,60	0,00
5	Pelayanan Air Bersih	0,00	0,00	0,00	286.848.628,00
II	**Retribusi Jasa Usaha**	**5.858.241.359,00**	**1.489.810.100,00**	**25,43**	**2.805.123.940,00**
6	Pemakaian Kekayaan Daerah kendaraan bermotor	384.227.298,00	107.518.000,00	27,98	162.844.000,00
7	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	44.999.999,00	31.894.000,00	70,88	0,00
8	Pelayanan Pasar-Kios	0,00	0,00	0,00	31.998.000,00
9	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	209.227.298,00	85.160.100,00	40,70	108.332.200,00
10	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.807.007.031,00	858.700.000,00	22,56	1.226.800.000,00
11	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	70.000.000,00	39.432.000,00	56,33	57.635.000,00
12	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	150.000.000,00	147.000.000,00	98,00	0,00
13	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	1.192.779.733,00	220.106.000,00	18,45	1.217.514.740,00
III	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**196.606.667,00**	**115.351.226,00**	**58,67**	**67.099.393,00**
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	196.606.667,00	115.351.226,00	58,67	67.099.393,00
Jumlah		**8.976.710.358,00**	**3.033.172.955,00**	**33,79**	**5.976.710.358,00**

Secara umum retribusi Kabupaten Kepulauan Mentawai menurun dari tahun sebelumnya. Namun jika dilihat dari masing-masing sumber pendapatan retribusi terdapat dua jenis pendapatan retibusi yang realisasinya mencapai lebih dari 100%, yaitu Retribusi Rumah Tangga yang merupakan retribusi pelayanan air PDAM yang di kelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Realisasi pendapatan retribusi daerah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat pada masing-masing OPD sebagai berikut :

No.	OPD	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Dinas Kesehatan	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	191.606.666,00	56.897.500,00	29,69	84.348.500,00
		Retribusi Pelayanan Kesehatan di	0,00	855.000,00	100,00	0,00

No.	OPD	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		Puskesmas Pembantu				
2	RSUD	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	2.500.000.000,00	1.124.795.610,00	44,99	2.733.289.897,00
3	Dinas PUPR	Retribusi pengolahan limbah Cair (Rumah Tangga)	230.255.666,00	245.463.519,00	106,60	162.844.000,00
		Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor	384.227.298,00	107.518.000,00	27,98	0,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pelayanan Air Bersih	0,00	0,00	0,00	286.848.628,00
5	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	209.227.298,00	85.160.100,00	40,70	108.332.200,00
		Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	1.192.779.733,00	220.106.000,00	18,45	1.217.514.740,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	196.606.667,00	115.351.226,00	58,67	67.099.393,00
7	Dinas Perikanan	Penjualan Produksi Usaha Daerah	220.000.000,00	186.432.000,00	84,74	57.635.000,00
8	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Tempat rekreasi dan olahraga	3.807.007.031,00	858.700.000,00	22,56	1.226.800.000,00
9	Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	44.999.999,00	31.894.000,00	70,88	0,00
10	Kecamatan Sipora Selatan	Pelayanan Pasar-Kios	-	-	0,00	4.858.000,00
11	Kecamatan Siberut Utara	Pelayanan Pasar-Kios	-	-	0,00	27.140.000,00
Jumlah			**8.976.710.358,00**	**3.033.172.955,00**	**96,96**	**5.976.710.358,00**

Dari tabel diatas, menunjukan adanya penurunan realisasi pendapatan retribusi dari tahun 2021 sebagaimana uraian berikut:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan merupakan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas. Pada Tahun 2021 retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas mengalami penurunan sebesar 31,53% dari tahun sebelumnya.
2) pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2021 hanya sebesar 44,99% terjadi penurunan sebesar 52,98% dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan retribusi kesehataan pada RSUD karena mulai berkurangnya pelayanan rumah sakit dimasa pandemi *covid-19*.
3) Retribusi pengolahan limbah Cair merupakan retribusi Rumah Tangga berupa pelayanan penyediaan air PDAM atau Retribusi Pelayanan Air Bersih yang dikelola sebelumnya oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan tahun 2021 pengelolaannya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pendapatan Retribusi Rumah Tangga pada tahun 2021 terealisasi sebesar 106,00% melebihi dari target yang sudah ditentukan, hal ini karena adanya peningkatan kebutuhan air bersih masyarakat khususnya di Tuapejat sehingga pemasangan jaringan air bersih terus bertambah.
4) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni hanya terealisasi

sebesar 27,98% dari target anggaran.

5) Realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Dinas Perhubungan terealisasi sebesar 40,70% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, begitu juga dengan realisasi retribusi penyeberangan menurun dengan realisasi sebesar 18,45%. Penurunan pendapatan retribusi kepelabuhan dan penyeberangan ini disebabkan karena pengelolaan operasional kapal antar pulau sedang dalam proses peralihan kepada BUMD atau Perusda sehingga rute pelayaran kapal penyeberangan antar pulau berkurang hanya satu kali dalam seminggu.
6) Pendapatan Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu tahun 2021 terealisasi sebesar 58,67% jika dibandingkan realisasi pendapatan retribusi tahun lalu mengalami peningkatan sebesar 71,91%.
7) Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha pada Dinas Perikanan tahun 2021 bersumber dari retribusi hasil Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan terealisasi sebesar Rp186.432.000,00.
8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Perikanan terealisasi sebesar 84,74% dari target yang dianggarkan, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan peningkatan lebih dari 100% dari realisasi tahun 2020.
9) Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga tahun 2021 belum terealisasi sesuai target yang diharapkan yakni hanya sebesar 22,56% bahkan cenderung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena masih adanya dampak pandemi *covid-19* yang mengakibatkan aktifitas pariwisata belum berjalan dengan maksimal karena turis dari mancanegara yang ingin berkunjung ke Mentawai masih takut bahkan tempat-tempat wisata/resort-resort di lingkungan Kabupaten Kepulauan mentawai cendrung tutup karena belum ada wisatawan yang berkunjung baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
10) Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan Pertokoan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp31.894.000,00. Atau 70,88%. Pelaporan pengelolaan retribusi pasar Grosir dan Pertokoan berada di Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan sedangkan pengelolaan dan pemungutan retribusi pasar masih dikelola oleh Kecamatan Siberut Utara dengan realisasi pendapatan sebesar Rp27.140.000,00 dan Kecamatan Sipora Selatan dengan realisasi sebesar Rp4.858.000,00. Jika dibandingkan total realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar tahun 2021 dengan tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan yakni sebesar 0,33% dari tahun sebelumnya.

Secara umum, realisasi pendapatan retribusi daerah cendrung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, kondisi ini disebabkan antara lain :

a. Adanya dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2019 sehingga kegiatan perekonomian masyarakat belum berjalan maksimal.
b. Belum optimalnya perhitungan dan penetapan target retribusi yang ada di OPD.
c. Masih kurangnya sosialisasi tetang retribusi daerah kepada masyarakat secara umum.
d. Kurangnya pengawasan terhadap pengelola retribusi sehingga belum optimalnya pengelolaan retribusi secara keseluruhan.
e. Kurangnya koordinasi antara kabupaten dan kecamatan dalam hal pengelolaan retribusi.

		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)
5.1.4.1.3	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**10.684.123.854,00**	**10.684.123.854,00**

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.684.123.854,00 atau 100,00% dari target anggaran sebesar Rp10.684.123.854,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp12.591.521.757,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp1.907.397.903,00 atau 15,15%. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD atau hasil dari investasi yang ditanamkan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sedangkan penyertaan modal pada PT BPR Sipora, PT BPR Pagai Utara Selatan, dan Perusda Mentawai Sejahtera belum memberikan kontribusi berupa deviden.

		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)
5.1.4.1.4	**Lain–Lain PAD Yang Sah**	**18.017.957.663,00**	**14.060.219.003,37**

Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.060.219.003,37 atau 78,03% dari target anggaran sebesar Rp18.017.957.663,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp12.805.647.244,51 terjadi peningkatan sebesar Rp1.254.571.758,86 atau 9,80% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	2.750.000.000,00	92.347.850,00	3,36	0,00
2	pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan / sewa BMD	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Jasa Giro	5.000.000.000,00	1.807.419.169,00	36,15	1.218.726.360,00
4	Penerimaan Bunga Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	0,00	613.814.293,00	100,00	402.992.755,55
6	Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain	0,00	6.049.341.134,00	100,00	0,00
7	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	340.146.357,37	100,00	189.215.000,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	2.000.000.000,00	0,00	0,00	3.882.309.329,08
9	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00	1.238.473.619,00	123,85	0,00
10	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	975.121.399,88
12	Pendapatan Dana JKN FKTP	6.817.957.663,00	3.918.676.581,00	57,48	6.137.282.400,00
Jumlah		**18.017.957.663,00**	**14.060.219.003,37**	**78,03**	**12.805.647.244,51**

Dari table pendapatan Lain-lain pendaptan asli daerah yang sah diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pada tahun 2021 terdapat realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp92.347.850 sedangkan tahun 2020 tidak terealisasi. Hasil Penjualan Daerah Yang Tidak Dipisahkan tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan aset daerah peralatan dan mesin di beberapa OPD yang melalui proses lelang oleh KPKNL tahun 2021 sebagaimana daftar barang lelang terdapat dalam **Lampiran 5**.
b. Pendapatan dari pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan pada tahun 2021 yang ditargetkan senilai Rp450.000.000,00 tidak terealisasi.
c. Realisasi Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp 1.803.942.343,00 atau 36,08% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami peningkatan cukup besar yakni senilai Rp585.215.983,00 atau meningkat sebesar 48,02%. Dari jumlah tersebut terdapat jasa giro pada rekening dana bos sebesar Rp2.649.025,00 dan Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp827.801,00.
d. Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/TGR tahun 2021 sebesar Rp613.814.293,00 mekipun tidak ada target anggarannya. Realisasi TGR tersebut bersumber dari pengembalian temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas laporan pertanggungjawaban keuangan OPD, jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 52,31%.
e. Penerimaan Komisi, Potongan atau Lain terealisasi sebesar Rp6.049.341.134,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
1	07-Jan-2021	Pemindahbukuan dari Kas Daerah BNI ke Rekening Kas Daerah 11.8 di Bank Nagari	1.300.000,00
2	12-Jan-2021	Pengembalian/penyetoran uang bansos lansia miskin dan penyandang disabilitas berat tahun anggaran 2020 atas nama: 1. Piktoria (Lansia), 2. Nurliani (Disabilitas Berat) dan 3. Reihan Farezki (Disabilitas Berat) karena sudah meninggal oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.600.000,00
3	18-Jan-2021	Penyetoran dilakukan oleh Bapak Maru (Anggota DPRD Kep. Mtw) dengan keterangan Setoran Jaminan Asuransi	25.000.000,00
4	21-Jan-2021	Penyetoran dilakukan oleh Bapak Muhamad Nasir dengan keterangan Pengembalian	9.000.000,00
5	22-Jan-2021	Transaksi dilakukan secara transfer oleh yang bersangkutan (Pengembalian An.Syamsimar)	10.000.000,00
6	22-Jan-2021	Penyetoran dilakukan oleh Bapak Maru (Anggota DPRD Kep. Mtw) dengan keterangan Setoran Asuransi	16.850.000,00
7	04-Feb-2021	Pengembalian potongan Kas Daerah Susulan Januari- Induk Februari 2021 - Taspen Bend IX No 522 Tgl 4 Feb 2021	1.300.000,00
8	02-Mar-2021	Transaksi dilakukan secara transfer oleh yang bersangkutan (TRANSFER DARI JASMAINI TGL 2 MARET 2021 NO BEN IX 931)	5.000.000,00
9	04-Mar-2021	Potongan kas daerah DAPEM feb & Maret (TASPEN)	1.300.000,00
10	26-Mar-2021	Pembayaran Pajak Makan Minum di RM Onang Sikakap oleh Maria Palma OPD Kec. Sikakap	431.250,00
11	09-Apr-2021	Potongan Kas Daerah Susulan bulan Maret dan Induk April 2021- Taspen	1.300.000,00
12	13-Apr-2021	Pembayaran pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah atas nama Sariuli Purba, yang disetorkan oleh yang bersangkutan.	150.000,00
13	19-Apr-2021	Transaksi dilakukan secara transfer oleh Surya Musfarita Klaim BG 62820041682-MANDIRI	389.551.000,00

No	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
14	19-Apr-2021	Pengembalian sisa dana Reses I (Pertama) Tahun 2021 oleh Sekretariat DPRD	4.475.000,00
15	06-May-2021	Pengembalian Potongan Kas Daerah DAPEM INDUK/221040306/05-2021 - Taspen	1.100.000,00
16	08-Jun-2021	Pembayaran Ppn 10% Belanja alat untuk cetak spanduk atas nama Sabar (CV.Tunas Jaya), untuk kegiatan MMD Puskesmas Sikakap tgl 10 April 2021	200.000,00
17	08-Jun-2021	Pembayaran Ppn 10% Belanja alat untuk cetak spanduk atas nama Sabar (CV.Tunas Jaya), untuk kegiatan pemicuan STBM Puskesmas Sikakap tgl 15 Maret 2021	100.000,00
18	10-Jun-2021	Pengembalian Potongan Kas Daerah DAPEM INDUK 06-2021 –TASPEN	500.000,00
19	14-Jun-2021	PENUTUPAN REKENING DAN BUNGA DIKURANGI PAJAK BUNGA	148.321.893,00
20	15-Jun-2021	Pengembalian sisa dana dari rekening tabungan yang ditutup, yaitu dengan nomor rekening 2113.0210.00526-3 / DAK SMPN 3 Siberut Utara	38.360,00
21	15-Jun-2021	Pengembalian sisa dana dari rekening tabungan yang ditutup, yaitu dengan nomor rekening 2113.0210.00497-1 / DAK SMPN 4 Siberut Utara	119.031,00
22	18-Jun-2021	Pengembalian sisa dana dari rekening tabungan yang ditutup, yaitu dengan nomor rekening 2111.0210.02484-7 / SMPN 1 Siberut Selatan	188.183,00
23	18-Jun-2021	Pengembalian sisa dana dari rekening tabungan yang ditutup, yaitu dengan nomor rekening 2111.0210.04085-3 / SDN 13 Muara Siberut	8.373,00
24	18-Jun-2021	Pengembalian sisa dana dari rekening tabungan yang ditutup, yaitu dengan nomor rekening 2111.0210.06208-2 / DAK SMPN 2 Siberut Tengah	48.900,00
25	21-Jun-2021	Pengembalian sisa dana dari rekening tabungan yang ditutup, yaitu dengan nomor rekening 2111.0210.06202-3 / DAK SDN 02 Matotonan	86.752,00
26	21-Jun-2021	Pengembalian sisa dana dari rekening tabungan yang ditutup, yaitu dengan nomor rekening 2111.0210.04655-7 / DAK SDN 16 Saliguma	75.346,00
27	09-Jul-2021	Pengembalian Pot Kas Daerah DAPEM INDUK 062021 – TASPEN	400.000,00
28	03-Aug-2021	Transanfer penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah Prov. Sumbar Tw.II Tahun anggaran 2021 Berdasarkan Keputusan Kepal Badan Pendapatan Daerah No.971.1/009/Pjk-Bapenda/2021 tanggal 19 Juli 2021	4.917.277.846,00
29	04-Aug-2021	SSPD Pph sebesar 3% atas Belanja pengadaan masker Covid-19 oleh SD Swasta Santa Maria	50.000,00
30	04-Aug-2021	SSPD Pph sebesar 3% atas Belanja pengadaan laptop oleh SD Swasta Santa Maria	149.000,00
31	04-Aug-2021	SSPD Pph sebesar 3% atas Belanja pengadaan lemari arsip oleh SD Swasta Santa Maria	55.000,00
32	04-Aug-2021	SSPD Pph sebesar 3% atas Belanja pengadaan kursi siswa oleh SD Swasta Santa Maria	109.500,00
33	04-Aug-2021	SSPD Pph sebesar 3% atas Belanja pengadaan meja siswa oleh SD Swasta Santa Maria	191.000,00
34	09-Aug-2021	Transaksi tidak ada dalam rincian mutasi rekening	400.000,00
35	26-Aug-2021	Pembayaran pajak penginapan atas penyewaan mess oleh Desa Sinaka selama 1 Tahun	909.091,00
36	26-Aug-2021	Pembayaran pajak atas penyewaan gudang oleh Desa Sinaka selama 1 Tahun	327.273,00
37	09-Sep-2021	TASPEN/DAPEM INDUK 08-2021	400.000,00
38	08-Oct-2021	TASPEN/DAPEM INDUK 8 2021	400.000,00

No	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
39	21-Oct-2021	Pengembalian kelebihan pembayaran pada kegiatan belanja hibah Sidang Sinode AM Ke IX Tahun 2021 pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Tahun 2021 oleh Dinas Sekretariat Daerah	1.000,00
40	04-Nov-2021	Pengembalian sisa dana dari beberapa rekening sekolah yang dorman/pasif (rekening DAK atau rekening dana BOS) atas penutupan yang dilakukan sesuai dengan surat BKD No. 900/527/BKD-KKM/IX-2021 tanggal 2 November 2021 tentang Rekomendasi Penutupan Rekening Tabungan Dorman/Pasif	374.800,00
41	04-Nov-2021	Pengembalian sisa dana dari rekening tabungan yang ditutup, yaitu dengan nomor rekening 2110.0210.16331-4 / DAK SDN 02 Sigapokna	200,00
42	09-Nov-2021	Transaksi tidak ada dalam rincian mutasi rekening	400.000,00
43	16-Nov-2021	SSPD Pph 4% Belanja Kendaraan Roda Tiga oleh SDN 07 Madobag Siberut Selatan	14.545,00
44	26-Nov-2021	Transaksi dilakukan secara transfer dari BNI Cabang Padang PT KLAIM GB CV. YANSA	11.864.979,00
45	09-Dec-2021	TASPEN/DAPEM INDUK 82021	300.000,00
46	14-Dec-2021	Pengembalian belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN OPD Kec. Pagai Utara tahun anggaran 2021	4.400.000,00
47	14-Dec-2021	Pengembalian belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, OPD Kec. Pagai Utara	3.740.000,00
48	22-Dec-2021	Pengembalian UYHD pada kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sunga dalam satu daerah Kab/Kota, sub kegiatan rehabilitasi seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya tahun anggaran 2021	9.636.000,00
49	23-Dec-2021	Penyetoran kembali dana PMI Mentawai dari pencairan SP2D PMI Mentawai	200.000.000,00
50	29-Dec-2021	Transaksi dilakukan secara transfer oleh yang bersangkutan 'PT KB BUKOPIN SYARIAHYOGYAKARTAYOGYAKART - SDOBIDJ1	271.871.335,00
51	30-Dec-2021	Pengembalian kelebihan dana subsidi Pemda ke PLTBM Siberut oleh Perusda Kemakmuran Mentawai	25.477,00
		TOTAL	**6.049.341.134,00**

f. Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp340.146.357,37 dengan target anggaran senilai Rp0,00. Pendapatan tersebut merupakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada dinas teknis. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi pendapatan denda keterlambatan sebesar 79,77%.

g. Sedangkan Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan tahun 2021 tidak terealisasi sesuai dengan target anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00.

h. Tahun 2021 terdapat Realisasi Pendapatan dari Pengembalian atas temuan BPK sebesar Rp1.238.473.619,00 yang melebihi target anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 sedangkan tahun anggaran 2020 tidak terealisasi.

i. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya tahun 2021 tidak dianggarkan sedangkan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp975.121.399,88 yang merupakan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas, pendapatan dari pengembalian pihak ketiga, dan pendapatan dari kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa lainnya.

j. Realisasi Pendapatan Dana JKN FKTP sebesar Rp3.918.676.581,00 atau 57,48% dari anggaran sebesar Rp6.817.957.663,00 yang merupakan dana yang dibayarkan oleh BPJS

Kesehatan kepada puskesmas sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan bagi peserta JKN yang bersumber dari hasil pengelolaan dan pengembangan dana iuran peserta JKN dan BPJS Kesehatan. Berikut rincian Realisasi Pendapatan Dana JKN FKTP masing-masing Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain:

No	Uraian	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Mapadegat	483.092.000,00	836.086.800,00
2	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Sioban	409.722.200,00	845.459.000,00
3	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Sikakap	462.658.700,00	707.429.700,00
4	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Muara Sikabaluan	376.452.980,00	548.391.300,00
5	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Muara Siberut	327.665.620,00	454.649.700,00
6	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Betaet	109.338.291,00	195.187.700,00
7	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Saibi Samukop	278.291.220,00	460.248.200,00
8	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Peipei	367.250.300,00	613.165.500,00
9	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Saumanganya	160.921.300,00	269.274.200,00
10	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Malakopa	333.113.441,00	413.227.900,00
11	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Bosua	88.646.360,00	118.961.200,00
12	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Bulasat	118.211.500,00	147.231.200,00
13	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Sarereiket	201.928.000,00	283.700.000,00
14	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Sigapokna	96.930.904,00	88.860.000,00
15	Pendapatan Dana JKN FKTP Puskesmas Simatalu	104.453.765,00	155.410.000,00
	Jumlah	**3.918.676.581,00**	**6.137.282.400,00**

5.1.4.2	PENDAPATAN TRANSFER	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)
		795.905.338.458,00	775.266.457.268,00

Realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp775.266.457.268,00 atau 97,41% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp795.905.338.458,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp716.767.569.335,00 maka terdapat peningkatan sebesar Rp58.498.887.993,00 atau 8,16% .

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Pendapatan dari Transfer ini besarannya sangat tergantung kondisi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Realisasi Transfer sebesar Rp742.958.193.981,00 terdiri atas:

NO	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	755.604.196.205,00	742.958.193.981,00	98,33	651.902.981.143,00

NO	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	0,00	35.561.158.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.301.142.253,00	32.308.263.287,00	80,17	29.303.430.192,00
	Jumlah	**795.905.338.458,00**	**775.266.457.268,00**	**97,41**	**716.767.569.335,00**

Pendapatan Transfer dapat diuraikan masing-masing sebagai berikut:

	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)
5.1.4.2.1 Transfer Pemerintah Pusat	**755.604.196.205,00**	**742.958.193.981,00**

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp742.958.193.981,00 atau 98,33% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp755.604.196.205,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp651.902.981.143,00 terdapat peningkatan sebesar Rp91.055.212.838,00 atau 13,97%. Realisasi pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat ini besarannya sangat tergantung dari kondisi keuangan Pemerintah Pusat.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat bersumber dari Dana Perimbangan yang terealisasi sebesar Rp682.711.606.781,00 dari target anggaran sebesar Rp694.748.318.205,00 dan Dana Desa yang terealisasi sebesar Rp60.246.587.200,00 dari target anggaran sebesar Rp60.855.878.000. Berikut rincian pendapatan transfer pusat dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil (DBH)	15.529.472.205,00	22.052.156.406,00	142,00	9.487.250.653,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	0,00	0,00	0,00	3.494.252.475,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	548.987.977.000,00	548.987.977.000,00	100,00	556.457.541.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	83.137.513.000,00	69.985.666.825,00	84,18	49.701.316.885,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	47.093.356.000,00	41.685.806.550,00	88,52	32.762.620.130,00
6	Dana Desa	60.855.878.000,00	60.246.587.200,00	99,00	0,00
Jumlah		**755.604.196.205,00**	**742.958.193.981,00**	**98,33**	**651.902.981.143,00**

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2021 terealisasi sebesar Rp22.052.156.406,00 atau 142,00%, melebihi dari target yang dianggarkan yakni sebesar Rp.15.529.472.205,00. Berikut rincian Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Bagi Hasil dari PBB Sektor Pertambangan	0,00	0,00	65,61	4.694.834.507,00
2	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.127.158.356,00	10.188.780.695,00	142,96	0,00

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	0,00	0,00	53,05	4.712.652.580,00
4	DBH PPh Pasal 21	4.100.726.400,00	4.214.483.100,00	102,77	0,00
5	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	85.479.884,00	147.254.600,00	172,27	0,00
6	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	53.939.273,00	64.159.809,00	118,95	79.763.566,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	516.000,00	100,00	0,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	617.268.530,00	681.801.615,00	110,45	0,00
9	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	400.516.880,00	637.767.593,00	159,24	0,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.173.757.902,00	4.366.637.954,00	200,88	0,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	76.254.890,00	100,00	0,00
12	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	970.624.980,00	1.674.500.150,00	172,52	0,00
	Jumlah	**15.529.472.205,00**	**22.052.156.406,00**	**142,00**	**9.487.250.653,00**

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber daya alam tahun 2021 sudah tergabung dalam Dana Bagi Hasil (DBH) sesuai nomenklatur pendapatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesfikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sedangkan pada tahun 2020 Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terealisasi sebesar Rp3.494.252.475,00 atau 82,43% dari target anggaran sebesar Rp**4.238.941.410,00.**

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp 548.987.977.000,00 atau terealisasi 100% sesuai dengan anggaran yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, terdapat penurunan sebesar Rp7.469.564.000,00, atau (1,34%) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum	548.987.977.000,00	548.987.977.000,00	100	556.457.541.000,00
Jumlah		**548.987.977.000,00**	**548.987.977.000,00**	**100**	**556.457.541.000,00**

Tahun anggaran 2020 Dana Alokasi Umum (DAU) hanya terealisasi sebesar 99,75% dikarenakan DAU untuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak disalurkan oleh pemerintah pusat.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2021 sebesar Rp69.985.666.825,00 atau 84,18% dari anggarannya sebesar Rp83.137.513.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp49.701.316.885,00 terdapat peningkatan realisasi pendapatan dana alokasi khusus sebesar Rp20.284.349.940,00 atau 40,81%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	7.133.772.000,00	6.498.403.228,00	91,09	12.168.799.342,00
2	DAK Bidang Pendidikan SD (DAk Affirmasi)	0,00	0,00	0,00	1.240.660.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	6.303.091.000,00	5.464.085.550,00	86,69	0,00
4	DAK Bidang Pendidikan SMP (DAk Affirmasi)	0,00	0,00	0,00	1.129.807.700,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	820.000.000,00	510.477.650,00	62,25	0,00
6	DAK Bidang Kesehatan (Reguler)	0,00	0,00	0,00	15.353.401.688,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.050.000.000,00	968.268.000,00	92,22	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	4.679.203.000,00	4.475.855.752,00	95,65	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	9.156.871.000,00	7.821.767.944,00	85,42	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	304.174.000,00	251.986.870,00	82,84	0,00
11	DAK Bidang KB (Reguler)	0,00	0,00	0,00	310.136.151,00
12	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya	1.668.995.000,00	0,00	0,00	0,00
13	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DAK Affirmasi)	0,00	0,00	100,00	5.375.569.000,00
14	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	1.170.113.000,00	0,00	0,00	0,00
15	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	2.855.000.000,00	2.505.000.000,00	87,74	0,00
16	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	1.060.000.000,00	525.010.034,00	49,53	863.672.629,00
17	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	22.969.790.000,00	19.972.180.900,00	86,95	0,00
18	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	7.068.068.000,00	6.001.225.000,00	84,91	0,00
19	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	3.607.834.000,00	3.104.734.000,00	86,06	0,00
20	DAK Bidang Air Minum (DAK Affirmasi)	0,00	0,00	87,59	3.280.125.000,00
21	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	1.666.313.000,00	1.666.230.900,00	100,00	0,00
22	DAK Bidang Sanitasi (DAK Affirmasi)	0,00	0,00	0,00	3.199.310.000,00
23	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	6.324.289.000,00	5.115.693.000,00	80,89	0,00
24	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	5.300.000.000,00	0,00	0,00	4.371.000.000,00
25	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0,00	3.441.047.997,00	100,00	0,00

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
26	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	0,00	1.663.700.000,00	100,00	0,00
27	DAK Bidang Pariwisata (DAK Penugasan)	0,00	0,00	0,00	2.408.835.375,00
	JUMLAH	**83.137.513.000,00**	**69.985.666.825,00**	**84,18**	**49.701.316.885,00**

5. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2021 terealisasi sebesar Rp41.685.806.550 atau 88,52% dari target anggaran sebesar Rp47.093.356.000,00 sedangkan tahun 2020 DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp32.762.620.130,00 sehingga terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp8.923.186.420 atau meningkat 27,24% dari tahun sebelumnya.

Berikut rincian DAK Non Fisik Tahun 2021 antara lain:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	16.630.412.000,00	16.630.412.000,00	100,00	488.450.000,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	9.182.742.000,00	540.000.000,00	5,88	
3	DAK Tunjangan Profesi Guru	0,00	0,00	0,00	14.529.375.000,00
4	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00	8.642.742.000,00	100,00	
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	539.400.000,00	530.700.000,00	98,39	1.002.600.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.171.500.000,00	1.171.450.000,00	100,00	961.268.000,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.366.728.000,00	11.206.210.700,00	98,59	13.258.925.461,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	485.334.000,00	0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	712.599.000,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.480.135.000,00	0,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.239.254.000,00	0,00	0,00	1.058.309.400,00
12	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.251.286.000,00	390.304.000,00	31,19	0,00
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.033.966.000,00	1.713.005.850,00	84,22	981.619.600,00
14	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	370.982.000,00	100,00	0,00
15	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	490.000.000,00	100,00	0,00
16	DAK Dana Pelayanan Kepariwisataan	0,00	0,00	0,00	482.072.669,00
	Jumlah	**47.093.356.000,00**	**41.685.806.550,00**	**88,52**	**32.762.620.130,00**

6. Dana Desa (DD)

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Desa Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 sebesar Rp60.246.587.200,00 atau 99,00% dari Anggaran yang ditargetkan yakni sebesar Rp60.855.878.000,00 sedangkan tahun 2020 realisasi Dana Desa sebesar Rp57.229.421.106,00,

terdapat peningkatan sebesar Rp3.017.166.094,00, atau 5,27% dari tahun sebelumnya. Rincian dana desa pada 43 desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai berikut:

NO	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Desa Betumonga Kec. Pagai Utara	1.146.691.000,00	1.146.691.000,00	100,00	1.105.059.000,00
2	Desa Silabu kec. Pagai Utara	1.287.278.000,00	1.087.422.400,00	84,47	1.200.131.000,00
3	Desa Saumanganya kec. Pagai Utara	1.256.907.000,00	1.256.907.000,00	100,00	1.512.530.000,00
4	Desa Bosua kec. Sipora Selatan	1.392.731.000,00	1.392.731.000,00	100,00	1.195.348.107,00
5	Desa Beriulou kec. Sipora Selatan	1.985.492.000,00	1.985.492.000,00	100,00	1.190.443.000,00
6	Desa Nemnemleleu kec. Sipora Selatan	1.075.428.000,00	925.742.400,00	86,08	1.249.644.000,00
7	Desa Mara kec. Sipora Selatan	2.704.457.000,00	2.704.457.000,00	100,00	1.074.076.000,00
8	Desa Sioban kec. Sipora Selatan	1.024.677.000,00	1.024.677.000,00	100,00	1.245.175.000,00
9	Desa Matobe kec. Sipora Selatan	995.768.000,00	995.768.000,00	100,00	1.057.472.000,00
10	Desa Saureinu kec. Sipora Selatan	1.008.067.000,00	1.008.067.000,00	100,00	1.384.670.000,00
11	Desa Muara Siberut kec. Siberut Selatan	1.260.662.000,00	1.260.662.000,00	100,00	962.762.000,00
12	Desa Maileppet kec. Siberut Selatan	1.220.444.000,00	1.220.444.000,00	100,00	1.089.598.000,00
13	Desa Muntei kec. Siberut Selatan	1.059.048.000,00	1.059.048.000,00	100,00	1.327.069.000,00
14	Desa Matotonan kec. Siberut Selatan	1.495.056.000,00	1.495.056.000,00	100,00	1.294.981.000,00
15	Desa Madobag kec. Siberut Selatan	1.809.701.000,00	1.809.701.000,00	100,00	1.671.834.000,00
16	Desa Bojakan kec. Siberut Utara	1.166.448.000,00	1.166.448.000,00	100,00	1.159.804.000,00
17	Desa Sotboyak kec. Siberut Utara	1.141.703.000,00	1.141.703.000,00	100,00	1.071.324.000,00
18	Desa Mongan Poula kec. Siberut Utara	1.165.762.000,00	1.165.762.000,00	100,00	1.202.436.000,00
19	Desa Muara Sikabaluan kec. Sibeurt Utara	1.277.272.000,00	1.277.272.000,00	100,00	1.093.685.000,00
20	Desa Sirilogui kec. Siberut Utara	1.474.582.000,00	1.474.582.000,00	100,00	1.149.635.000,00
21	Desa Malancan kec. Siberut Utara	1.102.215.000,00	1.102.215.000,00	100,00	1.288.052.000,00

NO	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
22	Desa Simatalu kec. Siberut Barat	2.722.159.000,00	2.722.159.000,00	100,00	2.059.625.000,00
23	Desa Sigapokna kec. Siberut Barat	1.231.604.000,00	1.231.604.000,00	100,00	1.702.276.000,00
24	Desa Simalegi kec. Siberut Barat	1.553.414.000,00	1.553.414.000,00	100,00	1.226.234.000,00
25	Desa Katurei kec. Siberut Barat daya	1.563.050.000,00	1.563.050.000,00	100,00	1.473.143.999,00
26	Desa Sagulubek kec. Siberut Barat daya	1.849.614.000,00	1.849.614.000,00	100,00	1.572.699.000,00
27	Desa Pasakiat Taileleu kec. Siberut Barat daya	1.486.710.000,00	1.486.710.000,00	100,00	1.711.627.000,00
28	Desa Saibi Samukop Kec. Siberut Tengah	2.831.503.000,00	2.831.503.000,00	100,00	2.273.602.000,00
29	Desa Cimpungan kec. Siberut tengah	1.330.249.000,00	1.330.249.000,00	100,00	1.267.836.000,00
30	Desa Saliguma kec. Siberut Tengah	2.021.748.000,00	1.761.998.400,00	87,15	1.471.090.000,00
31	Desa Betumonga kec. Sipora Utara	1.492.124.000,00	1.492.124.000,00	100,00	1.264.793.000,00
32	Desa Goiso oinan kec. Sipora Utara	1.062.950.000,00	1.062.950.000,00	100,00	1.104.614.000,00
33	Desa Tuapejat kec. Sipora Utara	1.664.332.000,00	1.664.332.000,00	100,00	1.158.392.000,00
34	Desa Sido Makmur kec. Sipora Utara	1.193.511.000,00	1.193.511.000,00	100,00	958.591.000,00
35	Desa Bukit Pamewa kec. Sipora Utara	872.556.000,00	872.556.000,00	100,00	805.062.000,00
36	Desa Sipora Jaya kec. Sipora Utara	1.083.241.000,00	1.083.241.000,00	100,00	910.526.000,00
37	Desa Sikakap kec. Sikakap	1.131.713.000,00	1.131.713.000,00	100,00	1.592.607.000,00
38	Desa Matobe kec. Sikakap	1.036.525.000,00	1.036.525.000,00	100,00	1.347.554.000,00
39	Desa Taikako kec. Sikakap	1.333.901.000,00	1.333.901.000,00	100,00	1.717.906.000,00
40	Desa Sinaka kec. Pagai Selatan	1.509.968.000,00	1.509.968.000,00	100,00	1.728.122.000,00
41	Desa Bulasat kec. Pagai Selatan	1.266.846.000,00	1.266.846.000,00	100,00	1.484.290.000,00
42	Desa Malakopa kec. Pagai Selatan	1.092.081.000,00	1.092.081.000,00	100,00	1.298.452.000,00
43	Desa Makalo kec. Pagai Selatan	1.475.690.000,00	1.475.690.000,00	100,00	1.574.651.000,00
	JUMLAH	**60.855.878.000,00**	**60.246.587.200,00**	**99,00**	**57.229.421.106,00**

		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)
5.1.4.2.2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya**	**0,00**	**0,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-lainnya per 31 Desember 2021 bernilai Rp0,00

		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)
5.1.4.2.3	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**40.301.142.253,00**	**32.308.263.287,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi adalah sebesar Rp32.308.263.287,00 atau 80,17% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp40.301.142.253,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan realisasi Rp29.303.430.192,00 maka terjadi peningkatan realisasi pendapatan sebesar Rp3.004.833.095,00 atau 10,25% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	13.468.232.664,00	9.978.766.714,00	74,09	7.146.076.249,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.841.687.594,00	3.933.227.038,00	81,24	3.602.887.787,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	13.019.815.809,00	10.810.326.874,00	83,03	8.706.954.316,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	100.995.216,00	66.886.130,00	66,23	80.046.703,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	8.870.410.970,00	7.519.056.531,00	84,77	9.767.465.137,00
Jumlah		**40.301.142.253,00**	**32.308.263.287,00**	**80,17**	**29.303.430.192,00**

		ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)
5.1.4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**24.553.235.000,00**	**23.248.615.000,00**

Lain-Lain Pendapatan yang Sah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp23.248.615.000,00 atau 94,69% dari target anggaran sebesar Rp24.553.235.000,00. Lain-lain pendaptan daerah yang sah merupakan pendapatan hibah Dana BOS. Pendapatan Hibah Dana BOS merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar yang diberikan kepada 127 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 25 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1) Realisasi dana BOS pada Sekolah Dasar (SD) tahun 2021 sebesar Rp16.183.336.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Dana BOS SD
1	SD Negeri 01 Sikakap	SIKAKAP	262.080.000,00
2	SD Negeri 02 Taikako	SIKAKAP	67.200.000,00
3	SD Negeri 03 Taikako	SIKAKAP	81.200.000,00
4	SD Negeri 07 Matobe	SIKAKAP	108.528.000,00
5	SD Negeri 15 Sikakap	SIKAKAP	156.148.000,00
6	SD Negeri 17 Taikako	SIKAKAP	95.200.000,00
7	SD Negeri 21 Makalo	SIKAKAP	183.568.000,00
8	SD Negeri 26 Taikako	SIKAKAP	157.472.000,00
9	SD Negeri 32 Matobe	SIKAKAP	30.912.000,00
10	SD Negeri 35 Matobe	SIKAKAP	69.104.000,00
11	SD Negeri 36 Taikako	SIKAKAP	67.200.000,00
12	SD Negeri 38 Sikakap	SIKAKAP	78.064.000,00
13	SD Negeri 06 Sinaka	Pagai Selatan	126.240.000,00
14	SD Negeri 08 Makalo	Pagai Selatan	122.880.000,00
15	SD Negeri 09 Makalo	Pagai Selatan	92.400.000,00
16	SD Negeri 12 Malakopa	Pagai Selatan	69.328.000,00
17	SD Negeri 13 Bulasat	Pagai Selatan	100.464.000,00
18	SD Negeri 14 Malakopa	Pagai Selatan	23.856.000,00
19	SD Negeri 16 Makalo	Pagai Selatan	92.960.000,00
20	SD Negeri 22 Makalo	Pagai Selatan	67.200.000,00
21	SD Negeri 23 Sinaka	Pagai Selatan	70.672.000,00
22	SD Negeri 24 Malakopa	Pagai Selatan	91.056.000,00
23	SD Negeri 25 Malakopa	Pagai Selatan	158.368.000,00
24	SD Negeri 28 Makalo	Pagai Selatan	107.200.000,00
25	SD Negeri 29 Sinaka	Pagai Selatan	107.200.000,00
26	SD Negeri 30 Sinaka	Pagai Selatan	107.200.000,00
27	SD Negeri 31 Bulasat	Pagai Selatan	116.608.000,00
28	SD Negeri 34 Sinaka	Pagai Selatan	107.200.000,00
29	SD Negeri 39 Malakopa	Pagai Selatan	62.832.000,00
30	SD Negeri 40 Bulasat	Pagai Selatan	107.200.000,00
31	SD Negeri 41 Bulasat	Pagai Selatan	113.248.000,00
32	SD Negeri 42 Sinaka	Pagai Selatan	107.200.000,00
33	SD Negeri 04 Betumonga	Pagai Utara	207.440.000,00
34	SD Negeri 05 Silabu	Pagai Utara	131.504.000,00
35	SD Negeri 10 Saumanganya	Pagai Utara	107.200.000,00
36	SD Negeri 11 Saumanganya	Pagai Utara	135.184.000,00
37	SD Negeri 18 Saumanganya	Pagai Utara	210.240.000,00
38	SD Negeri 19 Saumanganya	Pagai Utara	107.200.000,00
39	SD Negeri 20 Saumanganya	Pagai Utara	75.376.000,00

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Dana BOS SD
40	SD Negeri 27 Silabu	Pagai Utara	111.008.000,00
41	SD Negeri 33 Betumonga	Pagai Utara	89.280.000,00
42	SD Negeri 37 Saumanganya	Pagai Utara	107.200.000,00
43	SD Negeri 43 Silabu	Pagai Utara	107.200.000,00
44	SD Negeri 01 Sioban	Sipora Selatan	150.528.000,00
45	SD Negeri 02 Nemnemleleu	Sipora Selatan	124.962.000,00
46	SD Negeri 03 Beriulou	Sipora Selatan	129.936.000,00
47	SD Negeri 04 Bosua	Sipora Selatan	114.256.000,00
48	SD Negeri 06 Saureinu	Sipora Selatan	67.200.000,00
49	SD Negeri 07 Nemnemleleu	Sipora Selatan	107.200.000,00
50	SD Negeri 08 Matobe	Sipora Selatan	83.216.000,00
51	SD Negeri 09 Saureinu	Sipora Selatan	104.160.000,00
52	SD Negeri 10 Mara	Sipora Selatan	67.200.000,00
53	SD Negeri 14 Bosua	Sipora Selatan	112.464.000,00
54	SD Negeri 19 Matobe	Sipora Selatan	67.200.000,00
55	SD Negeri 20 Mara	Sipora Selatan	67.200.000,00
56	SD Negeri 25 Bosua	Sipora Selatan	115.040.000,00
57	SD Negeri 27 Beriulou	Sipora Selatan	107.200.000,00
58	SD Negeri 05 Goisooinan	Sipora Utara	65.184.000,00
59	SD Negeri 11 Tuapejat	Sipora Utara	67.200.000,00
60	SD Negeri 12 Betumonga	Sipora Utara	107.200.000,00
61	SD Negeri 13 Tuapejat	Sipora Utara	252.896.000,00
62	SD Negeri 15 Betumonga	Sipora Utara	20.160.000,00
63	SD Negeri 16 Tuapejat	Sipora Utara	253.858.000,00
64	SD Negeri 17 Tuapejat	Sipora Utara	293.394.000,00
65	SD Negeri 18 Tuapejat	Sipora Utara	72.912.000,00
66	SD Negeri 21 Goisooinan	Sipora Utara	84.896.000,00
67	SD Negeri 22 Tuapejat	Sipora Utara	118.944.000,00
68	SD Negeri 23 Tuapejat	Sipora Utara	171.090.000,00
69	SD Negeri 24 Betumonga	Sipora Utara	107.200.000,00
70	SD Negeri 26 Tuapejat	Sipora Utara	67.200.000,00
71	SD Negeri 02 Matotonan	Siberut Selatan	308.912.000,00
72	SD Negeri 06 Madobag	Siberut Selatan	169.472.000,00
73	SD Negeri 07 Madobag	Siberut Selatan	172.832.000,00
74	SD Negeri 09 Muara Siberut	Siberut Selatan	151.088.000,00
75	SD Negeri 12 Muntei	Siberut Selatan	110.992.000,00
76	SD Negeri 13 Muara Siberut	Siberut Selatan	314.384.000,00
77	SD Negeri 15 Simalepet	Siberut Selatan	140.672.000,00
78	SD Negeri 21 Madobag	Siberut Selatan	162.192.000,00

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Dana BOS SD
79	SD Negeri 23 Muntei	Siberut Selatan	99.008.000,00
80	SD Negeri 24 Madobag	Siberut Selatan	114.368.000,00
81	SD Negeri 01 Saibi Samukop	Siberut Tengah	378.530.000,00
82	SD Negeri 03 Saibi Samukop	Siberut Tengah	210.464.000,00
83	SD Negeri 10 Saliguma	Siberut Tengah	107.200.000,00
84	SD Negeri 10 Cimpungan	Siberut Tengah	171.600.000,00
85	SD Negeri 13 Cimpungan	Siberut Tengah	94.096.000,00
86	SD Negeri 16 Saliguma	Siberut Tengah	335.456.000,00
87	SD Negeri 20 Saibi Samukop	Siberut Tengah	172.944.000,00
88	SD Negeri 22 Saliguma	Siberut Tengah	180.000.000,00
89	SD Negeri 04 Katurei	Siberut Barat Daya	117.840.000,00
90	SD Negeri 05 Katurei	Siberut Barat Daya	146.848.000,00
91	SD Negeri 08 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	160.512.000,00
92	SD Negeri 11 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	168.464.000,00
93	SD Negeri 14 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	366.836.000,00
94	SD Negeri 17 Muntei	Siberut Barat Daya	161.520.000,00
95	SD Negeri 18 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	177.200.000,00
96	SD Negeri 19 Katurei	Siberut Barat Daya	126.688.000,00
97	SD Negeri 25 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	69.012.000,00
98	SD Negeri 26 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	107.200.000,00
99	SD Negeri 27 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	107.200.000,00
100	SD Negeri 28 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	160.512.000,00
101	SD Negeri 02 Sigapokna	Siberut Barat	182.576.000,00
102	SD Negeri 05 Simatalu	Siberut Barat	191.088.000,00
103	SD Negeri 11 Simalegi	Siberut Barat	95.872.000,00
104	SD Negeri 14 Simalegi	Siberut Barat	107.200.000,00
105	SD Negeri 16 Sigapokna	Siberut Barat	136.992.000,00
106	SD Negeri 17 Simatalu	Siberut Barat	20.160.000,00
107	SD Negeri 18 Simalegi	Siberut Barat	197.568.000,00
108	SD Negeri 19 Sigapokna	Siberut Barat	116.048.000,00
109	SD Negeri 22 Simatalu	Siberut Barat	194.448.000,00
110	SD Negeri 24 Sigapokna	Siberut Barat	141.472.000,00
111	SD Negeri 25 Simatalu	Siberut Barat	150.992.000,00
112	SD Negeri 26 Simalegi	Siberut Barat	61.824.000,00
113	SD Negeri 27 Simatalu	Siberut Barat	149.312.000,00
114	SD Negeri 28 Simatalu	Siberut Barat	97.440.000,00
115	SD Negeri 29 Simatalu	Siberut Barat	73.920.000,00
116	SD Negeri 01 Malancan	Siberut Utara	78.288.000,00
117	SD Negeri 03 Sotboyak	Siberut Utara	67.200.000,00

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Jumlah Dana BOS SD
118	SD Negeri 04 Muara Sikabaluan	Siberut Utara	67.200.000,00
119	SD Negeri 06 Malancan	Siberut Utara	124.208.000,00
120	SD Negeri 07 Sirilogui	Siberut Utara	227.936.000,00
121	SD Negeri 08 Muara Sikabaluan	Siberut Utara	86.576.000,00
122	SD Negeri 09 Muara Sikabaluan	Siberut Utara	129.472.000,00
123	SD Negeri 12 Mongan Poula	Siberut Utara	101.314.000,00
124	SD Negeri 15 Bojakan	Siberut Utara	108.768.000,00
125	SD Negeri 20 Malancan	Siberut Utara	67.200.000,00
126	SD Negeri 21 Muara Sikabaluan	Siberut Utara	67.200.000,00
127	SD Negeri 23 Bojakan	Siberut Utara	80.304.000,00

2) Realisasi salur Dana BOS pada SMP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 sebesar Rp7.065.279.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH DANA BOS
1	SMP NEGERI 1 PUS	SIKAKAP	888.210.000,00
2	SMP Negeri 2 Sikakap	SIKAKAP	257.573.000,00
3	SMP Negeri 3 Sikakap	SIKAKAP	126.768.000,00
4	SMP Negeri 1 Pagai Selatan	Pagai Selatan	94.830.000,00
5	SMP Negeri 2 Pagai Selatan	Pagai Selatan	287.591.000,00
6	SMP Negeri 3 Pagai Selatan	Pagai Selatan	124.200.000,00
7	SMP Negeri 4 Pagai Selatan	Pagai Selatan	95.910.000,00
8	SMP Negeri 1 Pagai Utara	Pagai Utara	281.892.000,00
9	SMP Negeri 1 Sipora	Sipora Selatan	520.833.000,00
10	SMP Negeri 2 Sipora Selatan	Sipora Selatan	232.654.000,00
11	SMP NEGERI 1 SIPORA UTARA	Sipora Utara	154.066.000,00
12	SMP Negeri 2 Sipora	Sipora Utara	565.591.000,00
13	SMP NEGERI 1 SIBERUT SELATAN	Siberut Selatan	563.367.000,00
14	SMP NEGERI 2 SIBERUT SELATAN	Siberut Selatan	249.473.000,00
15	SMP NEGERI 1 SIBERUT TENGAH	Siberut Tengah	453.803.000,00
16	SMP NEGERI 2 SIBERUT TENGAH	Siberut Tengah	198.599.000,00
17	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT DAYA	Siberut Barat Daya	284.640.000,00
18	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT DAYA	Siberut Barat Daya	180.112.000,00
19	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	170.692.000,00
20	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	129.238.000,00
21	SMP NEGERI 3 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	261.320.000,00
22	SMP NEGERI 1 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	592.557.000,00
23	SMP NEGERI 2 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	163.988.000,00
24	SMP NEGERI 3 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	83.400.000,00

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	JUMLAH DANA BOS
25	SMP NEGERI 4 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	103.972.000,00
	TOTAL		**7.065.279.000,00**

5.1.4.4 BELANJA

ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)
907.054.073.744,00	**829.394.144.601,02**

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp829.394.144.601,02 atau mencapai 91,44% dari alokasi anggaran sebesar Rp907.054.073.744,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp705.615.609.606,00 menunjukan peningkatan sebesar Rp123.778.534.995,02 atau 17,54%.

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp829.394.144.601,02 terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Operasi	594.317.753.544,00	544.000.215.852,02	91,53	539.416.327.902,00
2	Belanja Modal	190.832.037.953,00	164.639.582.130,00	86,27	142.003.462.707,00
3	Belanja Tak Terduga	2.114.665.260,00	1.587.597.109,00	75,08	24.195.818.997,00
4	Belanja Transfer	119.789.616.987,00	119.166.749.510,00	99,48	0,00
	Jumlah	**907.054.073.744,00**	**829.394.144.601,02**	91,44	**705.615.609.606,00**

5.1.4.4.1 Belanja Operasi

ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)
594.317.753.544,00	**544.000.215.852,02**

Rincian realisasi Belanja Operasi Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp544.000.215.852,02 atau 89,08% dari anggaran sebesar Rp594.317.753.544,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp539.416.327.902,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.583.887.950,02 atau 0,85% karena adanya penambahan belanja pegawai dari dana BOS.

Realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Pegawai	293.257.908.438,00	284.566.995.633,00	97,04	247.582.508.950,00
2	Belanja Barang dan Jasa	283.526.877.106,00	243.479.793.619,02	85,88	280.774.442.528,00
3	Subsidi	10.550.000.000,00	9.585.794.613,00	90,86	6.734.707.000,00
4	Hibah	6.012.328.000,00	5.491.419.256,00	91,34	3.853.184.836,00
5	Bantuan Sosial	970.640.000,00	876.212.731,00	90,27	471.484.588,00
	Jumlah	**594.317.753.544,00**	**544.000.215.852,02**	91,53	**539.416.327.902,00**

Realisasi Belanja Operasi diuraikan masing-masing sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 sebesar Rp284.566.995.633,00 atau 97,04% dari anggaran sebesar Rp293.257.908.438,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp247.582.508.950,00 mengalami peningkatan sebesar Rp36.984.486.683,00 atau 14,94%.

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	158.511.913.402,00	155.201.991.588,00	97,91	172.979.200.446,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	82.622.980.992,00	80.570.246.198,00	97,52	71.683.308.904,00
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	37.183.589.500,00	34.622.114.355,00	93,11	0,00
5.1.1.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.979.817.683,00	8.601.836.667,00	95,79	0,00
5.1.1.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	168.190.861,00	161.934.202,00	96,28	0,00
5.1.1.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	501.600.000,00	484.800.000,00	96,65	2.919.999.600,00
5.1.1.88	Belanja Pegawai BOS	5.289.816.000,00	4.924.072.623,00	93,09	0,00
	Jumlah	**293.257.908.438,00**	**284.566.995.633,00**	**97,04**	**247.582.508.950,00**

Dari tabel diatas menunjukan realisasi belanja pegawai tahun 2021 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Dari jumlah realisasi tersebut diantaranya adalah belanja pegawai-BOS sebesar Rp4.924.072.623,00.

1) Gaji dan Tunjangan ASN

Rincian belanja gaji dan tunjangan pegawai tahun 2021 sebagai berikut:

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	116.016.884.476,00	114.789.528.992,00	98,94	112.559.013.414,00
5.1.1.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	249.183.000,00	228.420.500,00	91,67	0,00
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11.329.846.764,00	11.004.847.133,00	97,13	10.929.243.051,00
5.1.1.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	16.459.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.340.333.250,00	4.991.920.000,00	93,48	5.693.199.000,00
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.725.459.000,00	4.678.777.000,00	99,01	4.500.643.000,00
5.1.1.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	32.046.000,00	25.179.000,00	78,57	0,00
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.162.089.580,00	2.927.088.000,00	92,57	2.881.355.000,00
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.700.569.813,00	7.439.995.197,00	96,62	6.427.475.620,00
5.1.1.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	21.544.240,00	5.576.340,00	25,88	0,00

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	315.750.143,00	202.769.239,00	64,22	233.284.040,00
5.1.1.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	4.535.850,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.258.914,00	1.768.092,00	24,36	1.726.673,00
5.1.1.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.000,00	2.758,00	27,58	0,00
5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.367.682.080,00	7.921.206.870,00	94,66	7.684.612.722,00
5.1.1.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	55.036.800,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	239.395.490,00	235.883.084,00	98,53	0,00
5.1.1.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	348.880,00	348.880,00	100,00	0,00
5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	724.186.150,00	707.649.021,00	97,72	0,00
5.1.1.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.644.643,00	1.046.591,00	63,64	0,00
5.1.1.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	199.899.329,00	39.984.891,00	20,00	0,00
5.1.1.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	**158.511.913.402,00**	**155.201.991.588,00**	**97,91**	**150.910.552.520,00**

2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	41.871.801.494,00	40.711.550.228,00	0,00
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	183.333.680,00	164.351.937,00	0,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	0,00	0,00	70.541.562.104,00
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.164.932.044,00	1.140.932.044,00	1.085.000.000,00
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	39.402.913.774,00	38.553.411.989,00	0,00
	Tunjangan Khusus Guru	0,00	0,00	56.746.800,00
	JUMLAH	**82.622.980.992,00**	**80.570.246.198,00**	**71.683.308.904,00**

3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.1.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	16.630.412.000,00	15.961.819.860,00	0,00
5.1.1.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	8.642.742.000,00	8.640.927.480,00	0,00
5.1.1.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00
5.1.1.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.997.500.000,00	1.530.000.015,00	0,00
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.119.765.500,00	5.021.635.000,00	0,00
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	785.820.000,00	566.390.000,00	0,00
5.1.1.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	20.750.000,00	20.750.000,00	0,00
5.1.1.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	1.037.250.000,00	982.800.000,00	0,00
5.1.1.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.409.350.000,00	1.357.792.000,00	0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	56.746.800,00
	Jumlah	**37.183.589.500,00**	**34.622.114.355,00**	**56.746.800,00**

4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.1.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	478.779.104,00	443.415.000,00	0,00
5.1.1.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	49.316.100,00	37.522.800,00	0,00
5.1.1.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	69.350.400,00	46.203.960,00	0,00
5.1.1.04.04.0001	Uang Paket DPRD	38.682.000,00	38.052.000,00	38.682.000,00
5.1.1.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	654.370.500,00	642.951.750,00	0,00
5.1.1.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	74.724.300,00	22.433.729,00	0,00
5.1.1.04.07.0001	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	67.964.400,00	45.394.033,00	0,00
5.1.1.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.520.000.000,00	2.478.000.000,00	0,00
5.1.1.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	630.000.000,00	619.500.000,00	630.000.000,00
5.1.1.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	10.214.221,00	169.163,00	0,00
5.1.1.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	280.000,00	0,00	0,00
5.1.1.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	38.403.666,00	38.580.696,00	0,00
5.1.1.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	913.248,00	835.884,00	0,00
5.1.1.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	2.739.744,00	2.507.652,00	0,00
5.1.1.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.750.000.000,00	1.621.720.000,00	1.652.160.000,00
5.1.1.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.584.000.000,00	2.561.400.000,00	2.244.000.000,00
5.1.1.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.080.000,00	3.150.000,00	0,00
	JUMLAH	**8.979.817.683,00**	**8.601.836.667,00**	**4.564.842.000,00**

5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.1.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.500.000,00	54.619.500,00	0,00
5.1.1.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
5.1.1.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.172.600,00	2.027.760,00	0,00
5.1.1.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.322.381,00	1.322.381,00	0,00
5.1.1.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	225.000,00	68.561,00	0,00
5.1.1.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.241.600,00	5.241.600,00	0,00
5.1.1.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00	93.600,00	0,00
5.1.1.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00	280.800,00	0,00
	JUMLAH	**168.190.861,00**	**161.934.202,00**	**0,00**

6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.1.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	184.800.000,00	2.520.000.000,00
5.1.1.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	300.000.000,00	399.999.600,00
	JUMLAH	**501.600.000,00**	**484.800.000,00**	**2.919.999.600,00**

7) Belanja Pegawai BOS

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.1.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	5.289.816.000,00	4.924.072.623,00	0,00
	JUMLAH	**5.289.816.000,00**	**4.924.072.623,00**	**0,00**

Pada tahun 2021 realisasi belanja pegawai – BOS sekolah Dasar (SD) sebesar Rp2.262.540.000, dengan uraian per sekolah sebagai berikut:

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	REALISASI BOS
1	SD Negeri 01 Sikakap	SIKAKAP	43.200.000
2	SD Negeri 02 Taikako	SIKAKAP	15.000.000
3	SD Negeri 03 Taikako	SIKAKAP	15.000.000
4	SD Negeri 07 Matobe	SIKAKAP	18.000.000
5	SD Negeri 15 Sikakap	SIKAKAP	33.800.000

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	REALISASI BOS
6	SD Negeri 17 Taikako	SIKAKAP	19.500.000
7	SD Negeri 21 Makalo	SIKAKAP	23.400.000
8	SD Negeri 26 Taikako	SIKAKAP	39.600.000
9	SD Negeri 32 Matobe	SIKAKAP	10.400.000
10	SD Negeri 35 Matobe	SIKAKAP	15.000.000
11	SD Negeri 36 Taikako	SIKAKAP	14.400.000
12	SD Negeri 38 Sikakap	SIKAKAP	15.000.000
13	SD Negeri 06 Sinaka	Pagai Selatan	31.600.000
14	SD Negeri 08 Makalo	Pagai Selatan	19.200.000
15	SD Negeri 09 Makalo	Pagai Selatan	13.800.000
16	SD Negeri 12 Malakopa	Pagai Selatan	25.650.000
17	SD Negeri 13 Bulasat	Pagai Selatan	16.800.000
18	SD Negeri 14 Malakopa	Pagai Selatan	8.800.000
19	SD Negeri 16 Makalo	Pagai Selatan	13.800.000
20	SD Negeri 22 Makalo	Pagai Selatan	8.400.000
21	SD Negeri 23 Sinaka	Pagai Selatan	21.000.000
22	SD Negeri 24 Malakopa	Pagai Selatan	15.000.000
23	SD Negeri 25 Malakopa	Pagai Selatan	37.800.000
24	SD Negeri 28 Makalo	Pagai Selatan	6.000.000
25	SD Negeri 29 Sinaka	Pagai Selatan	18.000.000
26	SD Negeri 30 Sinaka	Pagai Selatan	15.000.000
27	SD Negeri 31 Bulasat	Pagai Selatan	13.200.000
28	SD Negeri 34 Sinaka	Pagai Selatan	18.740.000
29	SD Negeri 39 Malakopa	Pagai Selatan	19.200.000
30	SD Negeri 40 Bulasat	Pagai Selatan	18.600.000
31	SD Negeri 41 Bulasat	Pagai Selatan	21.600.000
32	SD Negeri 42 Sinaka	Pagai Selatan	19.200.000
33	SD Negeri 04 Betumonga	Pagai Utara	41.400.000
34	SD Negeri 05 Silabu	Pagai Utara	30.000.000
35	SD Negeri 10 Saumanganya	Pagai Utara	16.600.000
36	SD Negeri 11 Saumanganya	Pagai Utara	42.400.000
37	SD Negeri 18 Saumanganya	Pagai Utara	46.800.000
38	SD Negeri 19 Saumanganya	Pagai Utara	19.600.000

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	REALISASI BOS
39	SD Negeri 20 Saumanganya	Pagai Utara	30.000.000
40	SD Negeri 27 Silabu	Pagai Utara	7.200.000
41	SD Negeri 33 Betumonga	Pagai Utara	-
42	SD Negeri 37 Saumanganya	Pagai Utara	8.800.000
43	SD Negeri 43 Silabu	Pagai Utara	10.050.000
44	SD Negeri 01 Sioban	Sipora Selatan	19.800.000
45	SD Negeri 02 Nemnemleleu	Sipora Selatan	11.400.000
46	SD Negeri 03 Beriulou	Sipora Selatan	14.300.000
47	SD Negeri 04 Bosua	Sipora Selatan	18.300.000
48	SD Negeri 06 Saureinu	Sipora Selatan	26.400.000
49	SD Negeri 07 Nemnemleleu	Sipora Selatan	10.800.000
50	SD Negeri 08 Matobe	Sipora Selatan	16.200.000
51	SD Negeri 09 Saureinu	Sipora Selatan	31.500.000
52	SD Negeri 10 Mara	Sipora Selatan	10.800.000
53	SD Negeri 14 Bosua	Sipora Selatan	9.600.000
54	SD Negeri 19 Matobe	Sipora Selatan	10.800.000
55	SD Negeri 20 Mara	Sipora Selatan	4.800.000
56	SD Negeri 25 Bosua	Sipora Selatan	3.000.000
57	SD Negeri 27 Beriulou	Sipora Selatan	18.000.000
58	SD Negeri 05 Goisooinan	Sipora Utara	12.000.000
59	SD Negeri 11 Tuapejat	Sipora Utara	9.900.000
60	SD Negeri 12 Betumonga	Sipora Utara	15.000.000
61	SD Negeri 13 Tuapejat	Sipora Utara	52.400.000
62	SD Negeri 15 Betumonga	Sipora Utara	3.600.000
63	SD Negeri 16 Tuapejat	Sipora Utara	24.000.000
64	SD Negeri 17 Tuapejat	Sipora Utara	34.800.000
65	SD Negeri 18 Tuapejat	Sipora Utara	14.100.000
66	SD Negeri 21 Goisooinan	Sipora Utara	11.360.000
67	SD Negeri 22 Tuapejat	Sipora Utara	18.000.000
68	SD Negeri 23 Tuapejat	Sipora Utara	18.000.000
69	SD Negeri 24 Betumonga	Sipora Utara	8.400.000
70	SD Negeri 26 Tuapejat	Sipora Utara	12.000.000
71	SD Negeri 02 Matotonan	Siberut Selatan	33.300.000

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	REALISASI BOS
72	SD Negeri 06 Madobag	Siberut Selatan	36.800.000
73	SD Negeri 07 Madobag	Siberut Selatan	15.000.000
74	SD Negeri 09 Muara Siberut	Siberut Selatan	27.600.000
75	SD Negeri 12 Muntei	Siberut Selatan	17.100.000
76	SD Negeri 13 Muara Siberut	Siberut Selatan	68.100.000
77	SD Negeri 15 Simalepet	Siberut Selatan	53.400.000
78	SD Negeri 21 Madobag	Siberut Selatan	28.800.000
79	SD Negeri 23 Muntei	Siberut Selatan	33.600.000
80	SD Negeri 24 Madobag	Siberut Selatan	9.600.000
81	SD Negeri 01 Saibi Samukop	Siberut Tengah	12.600.000
82	SD Negeri 03 Saibi Samukop	Siberut Tengah	1.500.000
83	SD Negeri 10 Saliguma	Siberut Tengah	9.000.000
84	SD Negeri 10 Cimpungan	Siberut Tengah	7.200.000
85	SD Negeri 13 Cimpungan	Siberut Tengah	12.000.000
86	SD Negeri 16 Saliguma	Siberut Tengah	21.600.000
87	SD Negeri 20 Saibi Samukop	Siberut Tengah	9.000.000
88	SD Negeri 22 Saliguma	Siberut Tengah	48.000.000
89	SD Negeri 04 Katurei	Siberut Barat Daya	8.400.000
90	SD Negeri 05 Katurei	Siberut Barat Daya	20.000.000
91	SD Negeri 08 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	10.950.000
92	SD Negeri 11 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	11.400.000
93	SD Negeri 14 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	12.000.000
94	SD Negeri 17 Muntei	Siberut Barat Daya	8.100.000
95	SD Negeri 18 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	15.600.000
96	SD Negeri 19 Katurei	Siberut Barat Daya	10.800.000
97	SD Negeri 25 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	14.400.000
98	SD Negeri 26 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	-
99	SD Negeri 27 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	4.000.000
100	SD Negeri 28 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	4.800.000
101	SD Negeri 02 Sigapokna	Siberut Barat	9.000.000
102	SD Negeri 05 Simatalu	Siberut Barat	9.600.000
103	SD Negeri 11 Simalegi	Siberut Barat	9.000.000
104	SD Negeri 14 Simalegi	Siberut Barat	18.000.000

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	REALISASI BOS
105	SD Negeri 16 Sigapokna	Siberut Barat	600.000
106	SD Negeri 17 Simatalu	Siberut Barat	3.000.000
107	SD Negeri 18 Simalegi	Siberut Barat	9.600.000
108	SD Negeri 19 Sigapokna	Siberut Barat	8.400.000
109	SD Negeri 22 Simatalu	Siberut Barat	48.000.000
110	SD Negeri 24 Sigapokna	Siberut Barat	21.600.000
111	SD Negeri 25 Simatalu	Siberut Barat	18.000.000
112	SD Negeri 26 Simalegi	Siberut Barat	8.400.000
113	SD Negeri 27 Simatalu	Siberut Barat	24.000.000
114	SD Negeri 28 Simatalu	Siberut Barat	14.400.000
115	SD Negeri 29 Simatalu	Siberut Barat	18.000.000
116	SD Negeri 01 Malancan	Siberut Utara	22.800.000
117	SD Negeri 03 Sotboyak	Siberut Utara	13.200.000
118	SD Negeri 04 Muara Sikabaluan	Siberut Utara	5.040.000
119	SD Negeri 06 Malancan	Siberut Utara	7.200.000
120	SD Negeri 07 Sirilogui	Siberut Utara	8.400.000
121	SD Negeri 08 Muara Sikabaluan	Siberut Utara	2.400.000
122	SD Negeri 09 Muara Sikabaluan	Siberut Utara	18.000.000
123	SD Negeri 12 Mongan Poula	Siberut Utara	31.900.000
124	SD Negeri 15 Bojakan	Siberut Utara	19.500.000
125	SD Negeri 20 Malancan	Siberut Utara	13.200.000
126	SD Negeri 21 Muara Sikabaluan	Siberut Utara	8.400.000
127	SD Negeri 23 Bojakan	Siberut Utara	12.450.000
	TOTAL		**2.262.540.000**

sedang realisasi dana BOS SMP pada 25 SMP sebesar Rp2.661.532.623,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	REALISASI BOS
1	SMP NEGERI 1 PUS	SIKAKAP	314.490.000
2	SMP Negeri 2 Sikakap	SIKAKAP	65.790.000
3	SMP Negeri 3 Sikakap	SIKAKAP	33.900.000
4	SMP Negeri 1 Pagai Selatan	Pagai Selatan	28.905.000
5	SMP Negeri 2 Pagai Selatan	Pagai Selatan	62.400.000

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	REALISASI BOS
6	SMP Negeri 3 Pagai Selatan	Pagai Selatan	9.850.000
7	SMP Negeri 4 Pagai Selatan	Pagai Selatan	31.930.000
8	SMP Negeri 1 Pagai Utara	Pagai Utara	84.940.000
9	SMP Negeri 1 Sipora	Sipora Selatan	228.619.623
10	SMP Negeri 2 Sipora Selatan	Sipora Selatan	63.455.000
11	SMP NEGERI 1 SIPORA UTARA	Sipora Utara	25.800.000
12	SMP Negeri 2 Sipora	Sipora Utara	194.356.000
13	SMP NEGERI 1 SIBERUT SELATAN	Siberut Selatan	205.860.000
14	SMP NEGERI 2 SIBERUT SELATAN	Siberut Selatan	77.866.000
15	SMP NEGERI 1 SIBERUT TENGAH	Siberut Tengah	201.930.000
16	SMP NEGERI 2 SIBERUT TENGAH	Siberut Tengah	102.210.000
17	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT DAYA	Siberut Barat Daya	122.050.000
18	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT DAYA	Siberut Barat Daya	92.140.000
19	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	105.596.000
20	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	58.530.000
21	SMP NEGERI 3 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	97.355.000
22	SMP NEGERI 1 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	284.635.000
23	SMP NEGERI 2 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	57.100.000
24	SMP NEGERI 3 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	52.095.000
25	SMP NEGERI 4 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	59.730.000
	TOTAL		**2.661.532.623**

Secara rinci anggaran dan realisasi belanja pegawai per OPD dijabarkan sebagai berikut:

NO	OPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	119.822.744.782,00	117.920.865.492,00	98,41	97.333.401.335,00
2	Dinas Kesehatan	33.701.169.059,00	33.010.568.614,00	97,95	28.090.114.697,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	10.997.705.209,00	10.234.025.082,00	93,06	7.820.159.216,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.511.849.125,00	6.336.528.683,00	97,31	5.534.499.518,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.671.405.139,00	2.503.315.134,00	93,71	2.254.770.463,00
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.189.794.149,00	1.136.505.120,00	95,52	1.076.947.131,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.254.372.074,00	3.131.437.289,00	96,22	2.793.632.836,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.248.242.702,00	3.025.550.812,00	93,14	2.908.942.340,00

NO	OPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.864.033.318,00	2.781.988.400,00	97,14	2.531.231.307,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.843.246.658,00	2.758.211.918,00	97,01	2.482.215.507,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.712.388.481,00	2.648.624.628,00	97,65	2.520.300.928,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.669.094.466,00	3.487.774.268,00	95,06	3.007.183.454,00
13	Dinas Perhubungan	4.901.156.528,00	4.749.395.271,00	96,9	4.586.970.454,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.614.455.859,00	2.505.165.957,00	95,82	2.304.359.597,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.454.306.920,00	2.351.084.171,00	95,79	2.226.273.713,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.599.561.078,00	2.546.649.398,00	97,96	2.270.366.368,00
17	Dinas Perikanan	3.946.578.115,00	3.870.289.559,00	98,07	3.376.997.661,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	4.179.742.389,00	4.085.495.603,00	97,75	3.705.616.942,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.059.746.163,00	6.821.572.165,00	96,63	5.741.607.284,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.604.594.174,00	2.488.221.443,00	95,53	2.311.963.569,00
21	DPRD	0,00	0,00	0,00	8.380.806.768,00
22	KDH dan WKDH	0,00	0,00	0,00	533.575.450,00
23	Sekretariat Daerah	12.044.586.265,00	11.791.487.869,00	97,9	10.314.462.110,00
24	Sekretariat DPRD	12.460.045.095,00	11.911.175.257,00	95,59	2.931.363.249,00
25	Kecamatan Pagai Utara	1.515.820.598,00	1.435.667.992,00	94,71	1.394.014.421,00
26	Kecamatan Sipora Selatan	2.339.229.976,00	2.239.431.039,00	95,73	2.021.415.133,00
27	Kecamatan Sipora Utara	1.816.642.676,00	1.729.705.019,00	95,21	1.554.090.011,00
28	Kecamatan Siberut Selatan	1.837.900.420,00	1.748.397.900,00	95,13	1.791.055.817,00
29	Kecamatan Siberut Barat Daya	1.444.636.630,00	1.401.758.687,00	97,03	1.288.047.288,00
30	Kecamatan Siberut Tengah	1.460.803.360,00	1.369.797.125,00	93,77	1.225.411.854,00
31	Kecamatan Siberut Utara	1.885.750.010,00	1.825.106.558,00	96,78	1.716.831.898,00
32	Kecamatan Siberut Barat	1.110.844.947,00	1.053.186.752,00	94,81	945.400.144,00
33	Kecamatan Pagai Selatan	1.572.586.638,00	1.491.068.423,00	94,82	1.531.405.224,00
34	Kecamatan Sikakap	2.241.200.735,00	2.170.919.939,00	96,86	2.098.510.646,00
35	Inspektorat	3.925.642.978,00	3.782.678.098,00	96,36	3.597.789.213,00
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.181.180.661,00	3.106.258.068,00	97,64	2.777.941.795,00
37	Badan Keuangan Daerah	16.349.892.843,00	15.155.813.960,00	92,7	14.112.318.839,00
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.224.958.218,00	3.961.273.940,00	93,76	4.490.514.770,00
Total Belanja Pegawai		**293.257.908.438,00**	**284.566.995.633,00**	**97,04**	**247.582.508.950,00**

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp243.479.793.619,02 atau sebesar 85,88% dari anggaran sebesar

Rp283.526.877.106,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp106.919.918.025,00 menunjukan peningkatan sebesar Rp136.559.875.594,02 atau 127,72%, rincian belanja barang dan jasa tahun 2021 sebagai berikut:

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.01	Belanja Barang	55.619.089.927,00	49.276.512.969,00	88,60	31.167.000.728,00
5.1.2.02	Belanja Jasa	145.198.092.735,00	122.041.969.536,02	84,05	0,00
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	10.977.216.044,00	9.280.777.231,00	84,55	10.471.828.926,00
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	54.621.735.400,00	46.692.738.644,00	85,48	53.426.148.904,00
5.1.2.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.230.278.000,00	6.524.906.000,00	90,24	9.835.378.967,00
5.1.2.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	9.880.465.000,00	9.662.889.239,00	97,80	2.019.560.500,00
	Jumlah	**283.526.877.106,00**	**243.479.793.619,02**	**85,88**	**106.919.918.025,00**

Belanja barang dan jasa dalam APBD terdiri dari belanja barang dan belanja jasa untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rekapitulasi belanja barang dan jasa terdiri dari:

3) **Belanja Barang**

Belanja Barang tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	55.448.445.399,00	49.142.024.840,00	88,63	31.167.000.728,00
5.1.2.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	170.644.528,00	134.488.129,00	78,81	0,00
5.1.2.01.03	Belanja Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**55.619.089.927,00**	**49.276.512.969,00**	**88,60**	**31.167.000.728,00**

Rincian realisasi Belanja Barang Tahun 2021 dan 2020 terdiri dari:

a. Belanja Bahan Pakai Habis

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	98.986.879,00	88.067.737,00	88,97	46.508.700,00
5.1.2.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	57.742.000,00	57.967.000,00	100,39	27.810.000,00
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.100.285.200,00	8.858.371.284,00	87,70	11.326.467.973,00
5.1.2.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	120.300.000,00	80.792.000,00	67,16	78.660.000,00
5.1.2.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	165.300.150,00	160.800.000,00	97,28	51.878.750,00

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.620.000,00	1.620.000,00	100,00	-
5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	72.000.000,00	71.281.600,00	99,00	-
5.1.2.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	4.427.706,00	88.000,00	1,99	-
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.908.833.000,00	4.428.618.977,00	90,22	4.399.310.871,00
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.370.567.375,00	1.213.090.609,00	88,51	-
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.480.832.600,00	1.242.166.419,00	83,88	
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	241.515.400,00	187.582.521,00	77,67	218.514.500,00
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	100.550.000,00	28.194.000,00	28,04	
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.277.761.100,00	1.228.633.526,00	96,16	
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	429.701.435,00	380.792.086,00	88,62	378.085.526,00
5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	261.995.950,00	255.656.630,00	97,58	
5.1.2.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	1.045.000,00	0,00	0,00	
5.1.2.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	45.020.000,00	44.770.000,00	99,44	
5.1.2.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	50.275.500,00	49.188.000,00	97,84	42.532.136,00
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.223.074.700,00	2.193.525.350,00	98,67	
5.1.2.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.623.278.931,00	3.254.338.968,00	89,82	4.022.442.539,00
5.1.2.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.693.795.277,00	5.467.183.715,00	96,02	0,00
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	13.324.107.648,00	12.035.629.500,00	90,33	0,00
5.1.2.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.111.581.400,00	1.972.338.960,00	93,41	234.807.400,00
5.1.2.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	381.998.417,00	380.916.500,00	99,72	0,00
5.1.2.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	33.407.231,00	33.365.000,00	99,87	0,00

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	5.000.000,00	4.480.000,00	89,60	0,00
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.193.777.500,00	3.063.897.717,00	73,06	0,00
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	694.870.000,00	613.580.620,00	88,30	0,00
5.1.2.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	849.405.000,00	565.516.613,00	66,58	0,00
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	927.645.000,00	614.211.008,00	66,21	0,00
5.1.2.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	81.500.000,00	81.278.000,00	99,73	0,00
5.1.2.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	140.000.000,00	139.436.000,00	99,60	0,00
5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	242.715.000,00	239.010.500,00	98,47	0,00
5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	27.500.000,00	26.865.000,00	97,69	0,00
5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	103.870.000,00	78.771.000,00	75,84	12.227.273,00
5 . 1 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	4.741.000,00
5 . 1 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	0,00	0,00	2.011.342.361,00
5 . 1 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Dokumentasi Kegiatan	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00
5 . 1 . 2 . 01 . 15	Belanja Buku Siswa	0,00	0,00	0,00	9.680.798.500,00
5 . 1 . 2 . 01 . 16	Belanja Perlengkapan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.345.288.408,00
5 . 1 . 2 . 01 . 17	Belanja Perlengkapan Dapur	0,00	0,00	0,00	91.286.190,00
5 . 1 . 2 . 01 . 19	Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	315.063.590,00
5 . 1 . 2 . 01 . 20	Belanja Perlengkapan Kegiatan Kemasyarakatan/hari - hari besar	0,00	0,00	0,00	18.700.000,00
5 . 1 . 2 . 01 . 21	Belanja Spanduk/Baliho/ Bendera	0,00	0,00	0,00	7.950.000,00
5 . 1 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	34.270.000,00
5 . 1 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	0,00	0,00	0,00	1.012.568.800,00
5 . 1 . 2 . 02 . 07	Belanja Perlengkapan / Peralatan	0,00	0,00	0,00	1.247.125.985,00
5 . 1 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan/Peralatan Praktek dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	28.125.400,00
5 . 1 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan Reagen Laboratorium	0,00	0,00	0,00	26.731.100,00
5 . 1 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Pameran	0,00	0,00	0,00	14.982.000,00
5 . 1 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Promosi	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00
	Jumlah	**55.448.445.399,00**	**49.142.024.840,00**	0,00	**38.289.194.002,00**

b. Belanja Barang Tak Habis Pakai

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.2.01.02.0001	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Baja	16.170.500,00	16.168.000,00	0,00
5.1.2.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	32.000.000,00	28.220.000,00	0,00
5.1.2.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	42.764.600,00	11.490.000,00	0,00
5.1.2.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	78.610.679,00	78.610.129,00	0,00
5.1.2.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	1.098.749,00	0,00	0,00
Jumlah		**170.644.528,00**	**134.488.129,00**	**0,00**

c. Belanja Barang Bekas Dipakai

Pada Tahun Anggaran 2021 Pemeritntah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak menganggarkan Belanja barang bekas dipakai hingga akhir tahun belanja barang bekas dipakai bernilai nihil.

4) Belanja Jasa

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	110.259.448.035,00	95.225.703.083,02	18.010.884.680,00
5.1.2.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.480.221.712,00	4.669.471.460,00	3.799.420.176,00
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.343.079.540,00	8.459.468.224,00	2.112.685.179,00
5.1.2.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	488.718.000,00	420.852.800,00	455.269.980,00
5.1.2.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	250.000.000,00	214.169.000,00	0,00
	Belanja Sewa sarana mobilitas	0,00	0,00	8.329.393.300,00
5.1.2.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	13.789.325.448,00	10.020.299.519,00	0,00
5.1.2.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.408.670.000,00	1.221.437.250,00	0,00
	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	5.370.883.550,00
5.1.2.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	474.000.000,00	256.500.000,00	782.904.000,00
	Belanja beasiswa Pendidikan Non PNS	0,00	0,00	5.461.767.020,00
	Belanja Pengembangan SDM Non Aparatur	0,00	0,00	25.000.000,00
5.1.2.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.704.630.000,00	1.554.068.200,00	803.577.000,00
	belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	4.060.084.711,00
	JUMLAH	**145.198.092.735,00**	**122.041.969.536,02**	**49.211.869.596,00**

a. Belanja Jasa Kantor

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.384.050.000,00	810.556.000,00	1.609.425.000,00
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.704.686.100,00	5.166.166.100,00	0,00
5.1.2.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	151.200.000,00	134.900.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.343.846.000,00	2.799.502.075,00	0,00
5.1.2.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	49.650.000,00	39.100.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	501.400.000,00	486.280.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	12.175.864.500,00	12.114.841.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	29.008.145.910,00	21.919.785.918,02	0,00
5.1.2.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	221.940.000,00	137.818.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	88.089.750,00	88.082.100,00	0,00
5.1.2.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	580.200.000,00	390.820.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	581.350.000,00	555.805.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	144.900.000,00	139.835.858,00	0,00
5.1.2.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	29.800.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	820.455.000,00	733.790.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	293.084.000,00	236.670.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	10.000.000,00	7.280.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.874.970.000,00	22.133.522.611,00	0,00
5.1.2.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	30.000.000,00	29.760.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.131.639.000,00	7.751.427.640,00	0,00
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	4.349.753.681,00
5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.018.760.000,00	832.592.328,00	0,00
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.478.610.000,00	4.243.240.946,00	0,00

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.2.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.119.010.000,00	2.728.361.719,00	0,00
5.1.2.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.267.900.000,00	2.079.664.772,00	0,00
5.1.2.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	141.190.000,00	133.980.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	33.600.000,00	22.470.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	224.325.000,00	201.480.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	300.045.700,00	156.559.609,00	0,00
5.1.2.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	350.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Pengembangan Sistem Informasi	0,00	0,00	94.980.000,00
	Belanja Jasa Pemeliharaan Sistem Informasi	0,00	0,00	28.250.000,00
5.1.2.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	25.000.000,00	0,00	
	Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi	0,00	0,00	3.871.781.471,00
5.1.2.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	44.200.000,00	40.050.000,00	
	Belanja Jasa Laundry	0,00	0,00	19.640.000,00
5.1.2.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	261.526.000,00	187.400.000,00	
5.1.2.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	39.000.000,00	5.370.200,00	
5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	538.500.000,00	475.050.000,00	515.150.000,00
	Belanja Jasa Hiburan	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.2.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	1.207.304.075,00	1.151.292.118,00	0,00
	Belanja Jasa Kerja	0,00	0,00	1.331.239.000,00
	Belanja Jasa Dekorasi	0,00	0,00	14.000.000,00
	Belanja Jasa Advokasi	0,00	0,00	31.000.000,00
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	57.600.000,00	34.425.088,00	36.724.270,00
5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	178.380.000,00	126.183.451,00	299.425.115,00
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.651.900.000,00	2.558.436.292,00	3.607.041.497,00
5.1.2.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	548.475.000,00	462.900.000,00	493.570.000,00
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.744.602.000,00	3.450.591.648,00	1.249.373.827,00
5.1.2.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	195.700.000,00	57.920.000,00	27.345.464,00
5.1.2.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	10.800.000,00	2.600.000,00	0,00
	Belanja Jasa Iuran Keanggotaan	0,00	0,00	25.000.000,00
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	335.650.000,00	152.477.850,00	160.440.000,00
	Belanaja Jasa Administrasi Pemungutan PBB	0,00	0,00	11.940.000,00

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.2.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	360.000.000,00	311.114.760,00	0,00
5.1.2.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	881.500.000,00	0,00	0,00
	Belanja Jasa Domain Website	0,00	0,00	5.500.000,00
	Belanja Sertifikasi	0,00	0,00	226.305.355,00
	Jumlah	**110.259.448.035,00**	**95.225.703.083,02**	**18.010.884.680,00**

b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.2.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	603.562.672,00	0,00	0,00
5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.247.039.232,00	4.056.545.867,00	0,00
5.1.2.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	156.396.414,00	153.232.402,00	0,00
5.1.2.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	473.223.394,00	459.693.191,00	0,00
	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	0,00	0,00	3.799.420.176,00
	belanja premi asuransi ketenagakerjaan	0,00	0,00	272.052,00
	Jumlah	**5.480.221.712,00**	**4.669.471.460,00**	**3.799.692.228,00**

c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.2.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	5.209.840,00	2.604.920,00	0,00
5.1.2.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	132.900.000,00	108.338.600,00	0,00
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	226.620.000,00
5.1.2.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.2.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	96.600.000,00	49.880.000,00	0,00
5.1.2.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	13.500.000,00	0,00	0,00
5.1.2.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	10.055.369.700,00	8.261.039.784,00	0,00
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	0,00	8.102.773.300,00
5.1.2.02.04.0146	Belanja Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	0,00	0,00	0,00
	Belanja Sewa Alat Komunikasi	0,00	0,00	2.090.375.179,00
5.1.2.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	4.500.000,00	2.604.920,00	0,00
5.1.2.02.04.0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	1.200.000,00
	Belanja Sewa Alat Peraga	0,00	0,00	21.110.000,00

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Jumlah	**10.343.079.540,00**	**8.459.468.224,00**	**10.419.768.479,00**

d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.2.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	300.000.000,00	262.777.800,00	455.269.980,00
5.1.2.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	28.050.000,00	27.500.000,00	0,00
5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	36.550.000,00	23.215.000,00	0,00
5.1.2.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	124.118.000,00	107.360.000,00	0,00
	JUMLAH	**488.718.000,00**	**420.852.800,00**	**455.269.980,00**

e. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.2.02.06.0120	Belanja Sewa Jaringan Induk Distribusi	250.000.000,00	214.169.000,00	0,00
	Jumlah	**250.000.000,00**	**214.169.000,00**	**0,00**

f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	200.000.000,00	99.528.000,00	49,76	0,00
5.1.2.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	24.000.000,00	23.676.000,00	98,65	0,00
5.1.2.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	3.180.545.220,00	3.087.012.634,00	97,06	0,00
5.1.2.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	200.000.000,00	199.692.500,00	99,85	0,00
5.1.2.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	8.907.085.228,00	5.746.998.258,00	64,52	0,00
5.1.2.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	387.695.000,00	265.244.577,00	68,42	0,00

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	100.000.000,00	98.730.500,00	98,73	0,00
5.1.2.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	500.000.000,00	499.417.050,00	99,88	0,00
5.1.2.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 2 . 19 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0,00	0,00	0,00	704.176.000
5 . 1 . 2 . 19 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	4.349.849.150
5 . 1 . 2 . 19 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	0,00	0,00	72.501.000
5 . 1 . 2 . 19 . 06	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian	0,00	0,00	0,00	199.357.400
5 . 1 . 2 . 19 . 07	Belanja Jasa Konsultasi Badan Hukum	0,00	0,00	0,00	45.000.000
	Jumlah	**13.789.325.448,00**	**10.020.299.519,00**	**72,67**	**5.370.883.550,00**

g. Belanja jasa Konsultansi Non Kontruksi

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	100.000.000,00	98.725.000,00	98,73	0,00
5.1.2.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.118.670.000,00	1.027.880.900,00	91,88	0,00
5.1.2.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	190.000.000,00	94.831.350,00	49,91	0,00
	Jumlah	**1.408.670.000,00**	**1.221.437.250,00**	**86,71**	**0,00**

h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	270.000.000,00	144.000.000,00	53,33	620.904.000
5.1.2.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	204.000.000,00	112.500.000,00	55,15	162.000.000
	Jumlah	**474.000.000,00**	**256.500.000,00**	**54,11**	**782.904.000,00**

i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.244.700.000,00	1.043.970.200,00	83,87	740.397.000
5.1.2.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.392.180.000,00	447.360.000,00	32,13	-
5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	52.000.000,00	52.000.000,00	100,00	63.180.000
5.1.2.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	15.750.000,00	10.738.000,00	68,18	-
	Jumlah	**2.704.630.000,00**	**1.554.068.200,00**	**57,46**	**803.577.000,00**

5) Belanja Pemeliharaan

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.123.040.000,00	4.594.273.254,00	89,68	3.584.026.595,00
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.210.763.308,00	2.782.645.477,00	86,67	3.272.240.831,00
5.1.2.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.643.412.736,00	1.903.858.500,00	72,02	3.424.400.000,00
5 . 1 . 2 . 18 . 05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	191.161.500,00
	Jumlah	**10.977.216.044,00**	**9.280.777.231,00**	**84,55**	**10.471.828.926,00**

a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	175.000.000,00	54.231.418,00	30,99	0,00
5.1.2.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.500.000,00	2.656.000,00	35,41	0,00
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.698.160.000,00	1.538.981.463,00	90,63	0,00
5.1.2.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	18.000.000,00	16.500.000,00	91,67	0,00
5.1.2.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	185.000.000,00	142.158.610,00	76,84	0,00

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.690.000.000,00	1.677.273.995,00	99,25	0,00
5.1.2.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	19.513.000,00	97,57	0,00
5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	261.690.000,00	244.675.250,00	93,50	0,00
5.1.2.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film	88.000.000,00	87.854.600,00	99,83	0,00
5.1.2.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Cetak	154.010.000,00	104.667.200,00	67,96	0,00
5.1.2.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	137.500.000,00	93.590.000,00	68,07	0,00
5.1.2.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	250.000.000,00	247.714.000,00	99,09	0,00
5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	286.890.000,00	236.707.718,00	82,51	0,00
5.1.2.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	146.250.000,00	126.250.000,00	86,32	0,00
5.1.2.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	**5.123.040.000,00**	**4.594.273.254,00**	**89,68**	**0,00**

b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.999.871.308,00	2.622.734.533,00	87,43	0,00
5.1.2.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	56.000.000,00	55.050.000,00	98,30	0,00
5.1.2.03.03.0026	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam	89.920.000,00	89.860.944,00	99,93	0,00

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	15.096.000,00	15.000.000,00	99,36	0,00
5.1.2.03.03.0046	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	49.876.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**3.210.763.308,00**	**2.782.645.477,00**	**86,67**	**0,00**

c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.557.880.000,00	1.287.650.500,00	82,65	0,00
5.1.2.03.04.0020	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan	10.000.000,00	9.841.000,00	98,41	0,00
5.1.2.03.04.0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	325.532.736,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03.04.0120	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	750.000.000,00	606.367.000,00	80,85	0,00
	Jumlah	**2.643.412.736,00**	**1.903.858.500,00**	**72,02**	**0,00**

6) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri dengan rincian sebagai berikut :

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.941.748.400,00	24.195.933.959,00	86,59	0,00
5.1.2.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	825.225.000,00	621.824.647,00	75,35	0,00
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.684.762.000,00	21.704.980.038,00	84,51	0,00
5.1.2.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00	0,00
5.1.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	28.281.188.600,00
5.1.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	25.144.960.304,00
	Jumlah	**54.621.735.400,00**	**46.692.738.644,00**	**85,48**	**53.426.148.904,00**

7) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.2.05.01.0003	Belanja Beasiswa	5.231.578.000,00	4.532.206.000,00	86,63	0,00
5.1.2.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	1.992.700.000,00	1.992.700.000,00	100	0,00
5 . 1 . 2 . 27 . 02	Belanja Uang untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	5.136.000.000,00
	Jumlah	**7.230.278.000,00**	**6.524.906.000,00**	**90,24**	**5.136.000.000,00**

8) **Belanja Barang dan Jasa BOS**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2021 sebesar Rp23.248.615.000,00 atau 94,69% dari pagu anggaran sebesar Rp24.553.235.000,00. Belanja barang dan Jasa BOS terdiri dari Belanja Barang BOS pada 127 Sekolah Dasar (SD) dan Belanja Barang BOS SMP di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Belanja barang BOS masing - masing sekolah dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja barang dan jasa BOS SD sebesar Rp**7.313.380.439** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Belanja Barang BOS
1	SD Negeri 01 Sikakap	SIKAKAP	118.161.000
2	SD Negeri 02 Taikako	SIKAKAP	51.100.000
3	SD Negeri 03 Taikako	SIKAKAP	52.920.000
4	SD Negeri 07 Matobe	SIKAKAP	47.565.000
5	SD Negeri 15 Sikakap	SIKAKAP	76.842.000
6	SD Negeri 17 Taikako	SIKAKAP	66.060.000
7	SD Negeri 21 Makalo	SIKAKAP	117.138.000
8	SD Negeri 26 Taikako	SIKAKAP	50.884.000
9	SD Negeri 32 Matobe	SIKAKAP	5.679.000
10	SD Negeri 35 Matobe	SIKAKAP	38.603.300
11	SD Negeri 36 Taikako	SIKAKAP	38.600.000
12	SD Negeri 38 Sikakap	SIKAKAP	50.497.600
13	SD Negeri 06 Sinaka	Pagai Selatan	78.640.000
14	SD Negeri 08 Makalo	Pagai Selatan	49.534.000
15	SD Negeri 09 Makalo	Pagai Selatan	60.585.000
16	SD Negeri 12 Malakopa	Pagai Selatan	37.711.000
17	SD Negeri 13 Bulasat	Pagai Selatan	68.399.000
18	SD Negeri 14 Malakopa	Pagai Selatan	15.056.000
19	SD Negeri 16 Makalo	Pagai Selatan	52.653.000
20	SD Negeri 22 Makalo	Pagai Selatan	46.140.000
21	SD Negeri 23 Sinaka	Pagai Selatan	45.846.000
22	SD Negeri 24 Malakopa	Pagai Selatan	50.356.000
23	SD Negeri 25 Malakopa	Pagai Selatan	55.888.000
24	SD Negeri 28 Makalo	Pagai Selatan	48.339.150
25	SD Negeri 29 Sinaka	Pagai Selatan	71.868.000
26	SD Negeri 30 Sinaka	Pagai Selatan	45.823.000

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Belanja Barang BOS
27	SD Negeri 31 Bulasat	Pagai Selatan	58.408.000
28	SD Negeri 34 Sinaka	Pagai Selatan	38.095.000
29	SD Negeri 39 Malakopa	Pagai Selatan	38.872.000
30	SD Negeri 40 Bulasat	Pagai Selatan	48.600.000
31	SD Negeri 41 Bulasat	Pagai Selatan	40.648.000
32	SD Negeri 42 Sinaka	Pagai Selatan	41.020.000
33	SD Negeri 04 Betumonga	Pagai Utara	86.170.000
34	SD Negeri 05 Silabu	Pagai Utara	43.099.000
35	SD Negeri 10 Saumanganya	Pagai Utara	46.455.000
36	SD Negeri 11 Saumanganya	Pagai Utara	64.620.000
37	SD Negeri 18 Saumanganya	Pagai Utara	84.094.000
38	SD Negeri 19 Saumanganya	Pagai Utara	44.950.800
39	SD Negeri 20 Saumanganya	Pagai Utara	30.553.000
40	SD Negeri 27 Silabu	Pagai Utara	45.003.000
41	SD Negeri 33 Betumonga	Pagai Utara	0
42	SD Negeri 37 Saumanganya	Pagai Utara	49.150.000
43	SD Negeri 43 Silabu	Pagai Utara	31.100.000
44	SD Negeri 01 Sioban	Sipora Selatan	75.978.000
45	SD Negeri 02 Nemnemleleu	Sipora Selatan	48.226.000
46	SD Negeri 03 Beriulou	Sipora Selatan	51.738.600
47	SD Negeri 04 Bosua	Sipora Selatan	35.255.600
48	SD Negeri 06 Saureinu	Sipora Selatan	27.800.000
49	SD Negeri 07 Nemnemleleu	Sipora Selatan	42.470.000
50	SD Negeri 08 Matobe	Sipora Selatan	45.391.300
51	SD Negeri 09 Saureinu	Sipora Selatan	54.960.000
52	SD Negeri 10 Mara	Sipora Selatan	15.631.000
53	SD Negeri 14 Bosua	Sipora Selatan	45.664.000
54	SD Negeri 19 Matobe	Sipora Selatan	41.900.000
55	SD Negeri 20 Mara	Sipora Selatan	46.940.000
56	SD Negeri 25 Bosua	Sipora Selatan	51.140.000
57	SD Negeri 27 Beriulou	Sipora Selatan	32.600.000
58	SD Negeri 05 Goisooinan	Sipora Utara	45.212.500
59	SD Negeri 11 Tuapejat	Sipora Utara	42.380.000
60	SD Negeri 12 Betumonga	Sipora Utara	36.400.000
61	SD Negeri 13 Tuapejat	Sipora Utara	119.490.000
62	SD Negeri 15 Betumonga	Sipora Utara	16.560.000
63	SD Negeri 16 Tuapejat	Sipora Utara	123.451.400
64	SD Negeri 17 Tuapejat	Sipora Utara	104.659.000
65	SD Negeri 18 Tuapejat	Sipora Utara	45.217.300
66	SD Negeri 21 Goisooinan	Sipora Utara	45.036.000
67	SD Negeri 22 Tuapejat	Sipora Utara	39.500.600

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Belanja Barang BOS
68	SD Negeri 23 Tuapejat	Sipora Utara	85.698.500
69	SD Negeri 24 Betumonga	Sipora Utara	33.730.000
70	SD Negeri 26 Tuapejat	Sipora Utara	38.875.000
71	SD Negeri 02 Matotonan	Siberut Selatan	116.718.000
72	SD Negeri 06 Madobag	Siberut Selatan	62.510.000
73	SD Negeri 07 Madobag	Siberut Selatan	73.913.500
74	SD Negeri 09 Muara Siberut	Siberut Selatan	76.499.000
75	SD Negeri 12 Muntei	Siberut Selatan	51.371.000
76	SD Negeri 13 Muara Siberut	Siberut Selatan	125.807.500
77	SD Negeri 15 Simalepet	Siberut Selatan	59.078.500
78	SD Negeri 21 Madobag	Siberut Selatan	62.477.000
79	SD Negeri 23 Muntei	Siberut Selatan	46.169.200
80	SD Negeri 24 Madobag	Siberut Selatan	54.768.000
81	SD Negeri 01 Saibi Samukop	Siberut Tengah	159.070.000
82	SD Negeri 03 Saibi Samukop	Siberut Tengah	87.101.000
83	SD Negeri 10 Saliguma	Siberut Tengah	74.453.500
84	SD Negeri 10 Cimpungan	Siberut Tengah	60.949.000
85	SD Negeri 13 Cimpungan	Siberut Tengah	38.646.000
86	SD Negeri 16 Saliguma	Siberut Tengah	167.011.000
87	SD Negeri 20 Saibi Samukop	Siberut Tengah	73.369.000
88	SD Negeri 22 Saliguma	Siberut Tengah	57.179.500
89	SD Negeri 04 Katurei	Siberut Barat Daya	52.940.000
90	SD Negeri 05 Katurei	Siberut Barat Daya	70.661.000
91	SD Negeri 08 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	78.129.000
92	SD Negeri 11 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	74.847.000
93	SD Negeri 14 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	139.648.200
94	SD Negeri 17 Muntei	Siberut Barat Daya	77.838.000
95	SD Negeri 18 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	73.767.500
96	SD Negeri 19 Katurei	Siberut Barat Daya	53.915.000
97	SD Negeri 25 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	41.157.800
98	SD Negeri 26 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	34.904.000
99	SD Negeri 27 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	22.082.000
100	SD Negeri 28 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	62.612.000
101	SD Negeri 02 Sigapokna	Siberut Barat	73.103.000
102	SD Negeri 05 Simatalu	Siberut Barat	83.924.000
103	SD Negeri 11 Simalegi	Siberut Barat	66.792.000
104	SD Negeri 14 Simalegi	Siberut Barat	39.201.400
105	SD Negeri 16 Sigapokna	Siberut Barat	55.844.000
106	SD Negeri 17 Simatalu	Siberut Barat	17.160.000
107	SD Negeri 18 Simalegi	Siberut Barat	105.367.000
108	SD Negeri 19 Sigapokna	Siberut Barat	43.928.700

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Belanja Barang BOS
109	SD Negeri 22 Simatalu	Siberut Barat	61.798.589
110	SD Negeri 24 Sigapokna	Siberut Barat	51.538.600
111	SD Negeri 25 Simatalu	Siberut Barat	60.229.000
112	SD Negeri 26 Simalegi	Siberut Barat	34.361.000
113	SD Negeri 27 Simatalu	Siberut Barat	63.603.000
114	SD Negeri 28 Simatalu	Siberut Barat	63.062.800
115	SD Negeri 29 Simatalu	Siberut Barat	34.222.000
116	SD Negeri 01 Malancan	Siberut Utara	42.813.000
117	SD Negeri 03 Sotboyak	Siberut Utara	34.671.000
118	SD Negeri 04 Muara Sikabaluan	Siberut Utara	47.160.000
119	SD Negeri 06 Malancan	Siberut Utara	67.278.000
120	SD Negeri 07 Sirilogui	Siberut Utara	109.936.000
121	SD Negeri 08 Muara Sikabaluan	Siberut Utara	43.421.000
122	SD Negeri 09 Muara Sikabaluan	Siberut Utara	61.123.000
123	SD Negeri 12 Mongan Poula	Siberut Utara	45.618.700
124	SD Negeri 15 Bojakan	Siberut Utara	32.787.800
125	SD Negeri 20 Malancan	Siberut Utara	33.113.000
126	SD Negeri 21 Muara Sikabaluan	Siberut Utara	45.299.000
127	SD Negeri 23 Bojakan	Siberut Utara	42.802.000
	Jumlah SD		**7.313.380.439**

b. Belanja barang dan jasa BOS SMP sebesar Rp**2.349.508.800** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	JUMLAH
1	SMP NEGERI 1 PUS	SIKAKAP	403.366.500
2	SMP Negeri 2 Sikakap	SIKAKAP	105.405.000
3	SMP Negeri 3 Sikakap	SIKAKAP	42.907.000
4	SMP Negeri 1 Pagai Selatan	Pagai Selatan	29.555.900
5	SMP Negeri 2 Pagai Selatan	Pagai Selatan	116.716.000
6	SMP Negeri 3 Pagai Selatan	Pagai Selatan	49.800.000
7	SMP Negeri 4 Pagai Selatan	Pagai Selatan	16.980.000
8	SMP Negeri 1 Pagai Utara	Pagai Utara	169.333.022
9	SMP Negeri 1 Sipora	Sipora Selatan	182.083.811
10	SMP Negeri 2 Sipora Selatan	Sipora Selatan	101.917.000
11	SMP NEGERI 1 SIPORA UTARA	Sipora Utara	72.503.000
12	SMP Negeri 2 Sipora	Sipora Utara	234.710.000
13	SMP NEGERI 1 SIBERUT SELATAN	Siberut Selatan	172.062.600

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	JUMLAH
14	SMP NEGERI 2 SIBERUT SELATAN	Siberut Selatan	63.117.900
15	SMP NEGERI 1 SIBERUT TENGAH	Siberut Tengah	119.723.000
16	SMP NEGERI 2 SIBERUT TENGAH	Siberut Tengah	35.189.000
17	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT DAYA	Siberut Barat Daya	65.539.300
18	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT DAYA	Siberut Barat Daya	14.366.000
19	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	13.579.700
20	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	19.652.767
21	SMP NEGERI 3 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	73.996.100
22	SMP NEGERI 1 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	145.932.000
23	SMP NEGERI 2 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	53.475.200
24	SMP NEGERI 3 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	26.652.500
25	SMP NEGERI 4 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	20.945.500
	JUMLAH SMP		**2.349.508.800**

Realisasi Belanja Barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp243.479.793.619,02 dengan uraian pada masing-masing OPD sebagai berikut:

No	OPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.017.691.990,00	28.476.741.253,00	94,87
2	Rumah Sakit Umum Daerah	14.816.552.751,00	13.389.378.198,00	90,37
3	Dinas Kesehatan	55.398.570.280,00	42.414.578.263,02	76,56
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.104.735.619,00	21.370.689.661,00	76,04
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.556.743.420,00	3.423.762.104,00	96,26
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.226.062.845,00	5.698.717.884,00	91,53
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.031.281.500,00	4.415.636.654,00	87,76
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.328.962.350,00	2.216.327.536,00	95,16
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.534.234.984,00	4.877.153.314,00	74,64
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.430.999.480,00	2.196.947.620,00	90,37
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.439.824.300,00	2.015.182.996,00	58,58
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.996.652.330,00	4.027.575.837,00	67,16
13	Dinas Perhubungan	5.910.588.775,00	4.591.936.098,00	77,69
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.230.341.100,00	4.510.801.217,00	86,24

No	OPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.557.131.000,00	1.443.670.558,00	92,71
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.800.361.400,00	1.504.769.864,00	83,58
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	968.883.450,00	942.944.684,00	97,32
18	Dinas Perikanan	16.941.074.211,00	16.136.939.845,00	95,25
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	3.712.875.500,00	3.614.638.012,00	97,35
20	Sekretariat Daerah	30.486.182.663,00	28.392.434.538,00	93,13
21	Inspektorat	5.344.558.560,00	4.697.238.702,00	87,89
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.992.452.840,00	4.367.280.174,00	87,48
23	Badan Keuangan Daerah	10.888.412.750,00	9.615.121.875,00	88,31
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.266.462.156,00	2.923.437.806,00	89,50
25	Sekretariat DPRD	18.259.756.400,00	16.346.406.977,00	89,52
26	Kecamatan Siberut Utara	1.033.786.800,00	1.003.511.900,00	97,07
27	Kecamatan Siberut Tengah	962.056.000,00	909.352.000,00	94,52
28	Kecamatan Siberut Barat	1.195.687.900,00	1.188.073.450,00	99,36
29	Kecamatan Siberut Barat Daya	782.598.825,00	775.793.398,00	99,13
30	Kecamatan Siberut Selatan	879.543.095,00	866.986.292,00	98,57
31	Kecamatan Sipora Utara	973.708.700,00	952.158.215,00	97,79
32	Kecamatan Sipora Selatan	942.249.200,00	833.596.030,00	88,47
33	Kecamatan Pagai Utara	857.747.150,00	801.154.300,00	93,40
34	Kecamatan Sikakap	673.083.382,00	661.715.403,00	98,31
35	Kecamatan Pagai Selatan	1.101.203.600,00	1.078.803.741,00	97,97
36	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat	883.819.800,00	798.337.220,00	90,33
Jumlah		**283.526.877.106,00**	**243.479.793.619,02**	**85,88**

Dari total realisasi belanja barang dan jasa, terdapat sebesar Rp370.747.086,00 diantaranya merupakan realisasi belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana JKN/FKTP tahun anggaran 2021, dengan rincian masing-masing puskesmas sebagai berikut:

NO	PUSKESMAS	REALISASI 2021	REALISASI 2020
1	Muara Sikabaluan	28.732.000,00	443.928.380,00
2	SaibiSamukop	5.500.000,00	328.855.020,00
3	Saumangayak	84.420.000,00	203.608.300,00
4	Peipei	5.500.000,00	598.634.800,00
5	Mapaddegat	30.500.000,00	690.815.167,00
6	Sikakap	55.250.600,00	608.684.500,00
7	Malakopa	82.986.000,00	395.674.241,00
8	Muara Siberut	5.500.000,00	415.708.920,00

NO	PUSKESMAS	REALISASI	
		2021	2020
9	Sioban	28.739.000,00	748.001.061,00
10	Bulasat	5.287.000,00	229.194.380,00
11	Bosua	5.500.000,00	107.270.160,00
12	Betaet	5.500.000,00	152.473.260,00
13	Sarereiket	5.500.000,00	267.797.000,00
14	Simatalu	5.500.000,00	114.543.000,00
15	Sigapokna	16.332.486,00	77.316.000,00
TOTAL		**370.747.086,00**	**5.382.504.189,00**

9) **Belanja Subsidi**

Realisasi Belanja Subsidi periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.585.794.613,00 atau 90,86% dari anggaran sebesar Rp10.550.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja subsidi tahun 2020 sebesar Rp6.734.707.000,00 terdapat peningkatan belanja sebesar Rp2.851.087.613,00, atau 42,33% dengan rincian sebagai berikut :

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.1.4.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	100,00	6.734.707.000,00
5.1.4.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	8.650.000.000,00	7.685.794.613,00	88,85	0,00
	Jumlah	**10.550.000.000,00**	**9.585.794.613,00**	**90,86**	**6.734.707.000,00**

Belanja subsidi tahun 2021 merupakan pemberian subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai untuk operasional PLTBM pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Naskah Perjanjian Subsidi Daerah Nomor: 671/01/NPSD/Koperindag/2021 dan No. 39/539/PKM/VIII/2021 Tgl. 6 Agustus 2021 dan Pemberian subsidi ini kepada PT Mentawai Anugerah Sejahtera berdasarkan Naskah Perjanjian Subsidi Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Perhubungan dengan PT Mentawai Anugerah Sejahtera sesuai dengan NPSD Nomor: NPSD.552/04.2/DISHUB/2021 dan Nomor: 01/PT.MAS/2021/PDG tentang Pemberian Subsidi Untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyelenggaraan Angkutan Laut Cepat Rute Penyeberangan Antara Padang-Sikakap (PP) dan Padang-Siberut-Sikabaluan (PP) Tahun Anggaran 2021.

Berikut rincian belanja subsidi tahun anggaran 2021 antara lain :

No	Penerima Subsidi	Anggaran	Realisasi	Dasar Pembayaran
		(Rp)	(Rp)	
I	**Subsidi Kepada PERUSDA**	**1.900.000.000,00**	**1.900.000.000,00**	
1	Belanja Subsidi Kepada Perusda PLTBM TAHAP I	1.056.220.320,00	1.056.220.320,00	671/01/NPSD/Koperindag/2021 dan No. 39/539/PKM/VIII/2021 Tgl. 6 Agustus 2021
2	Subsidi tahap II PLTBM (Perusda)	843.779.680,00	843.779.680,00	671/01/NPSD/Koperindag/2021 dan No. 39/539/PKM/VIII/2021 Tgl. 6 Agustus 2021
II	**Belanja Subsidi Kepada Perusahaan PT.Mentawai Anugerah Sejahtera**	**8.650.000.000,00**	**7.685.794.613,00**	
1	Subsidi Kapal MV. Mentawai Fast	3.950.000.000,00	3.852.450.000,00	NPSD.552/04.2//DISHUB/2021 dan Nomor: 01/PT.MAS/2021/PDG

No	Penerima Subsidi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Dasar Pembayaran
2	Subsidi Kapal Antar Pulau	4.700.000.000,00	3.833.344.613,00	NPSD Nomor: 550/02/DISHUB/2021 dan Nomor: 055/ASIMI/IV/2021
	Jumlah	**10.550.000.000,00**	**9.585.794.613,00**	

Pemberian subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai sebesar Rp1.900.000.000,00 untuk operasional PLTBM pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dengan rincian sebagai berikut:

No	Penerima Subsidi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Dasar Pembayaran	Nomor SP2D
1	Belanja Subsidi Kepada PT. Kemakmuran Mentawai (Perusda) untuk operasional PLTBM TAHAP I	1.056.220.320,00	1.056.220.320,00	671/01/NPSD/Koperindag/2021 dan No. 39/539/PKM/VIII/2021 Tgl. 6 Agustus 2021	08.03/04.0/00028/LS/2.17.3.30.3.31.07/P.03/8/21, Tgl. 10 Agustus 2021
2	Belanja Subsidi Kepada PT. Kemakmuran Mentawai (Perusda) tahap II untuk operasional PLTBM (Perusda)	843.779.680,00	843.779.680,00	671/01/NPSD/Koperindag/2021 dan No. 39/539/PKM/VIII/2021 Tgl. 6 Agustus 2021	08.03/04.0/000047/LS/2.17.3.30.3.31.07/P.04/12/21, Tgl. 20 Desember 2021
	Jumlah	**1.900.000.000,00**	**1.900.000.000,00**		

Realisasi belanja subsidi sebesar Rp7.685.794.613,00 pada Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengeporasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyebrangan dalam daerah Kabupaten/kota merupakan pemberian subsidi kepada PT Mentawai Anugerah Sejahtera berdasarkan Naskah Perjanjian Subsidi Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas Perhubungan dengan PT. Mentawai Anugerah Sejahtera dengan uraian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH SUBSIDI	NOMOR SP2D	Dasar Pembayaran	KET
1	Pembayaran Subsidi Bulan Januari 2021 ke PT. Mentawai Anugrah Sejahtera Antara Padang-Sikakap PP, Padang-Siberut PP	335.000.000,00	08.03/04.0/000002/LS/2.15.0.00.0.00.01.00/M/2/2021 Tgl. 19 Feb 2021	NPSD.552/04.2/DISHUB/2021 dan Nomor: 01/PT.MAS/2021/PDG	kapal M. Fast
2	Pembayaran subsidi Bulan Februari 2021Ke PT. Mentawai Anugrah Sejahtera Antara Padang - Sikakap Antara PAdang- Sikakap PP, Padang - Siberut PP	391.750.000,00	08.03/04.0/000005/LS/2.15.0.00.0.00.01.00/M/3/2021 tgl. 15 Maret 2021	NPSD.552/04.2/DISHUB/2021 dan Nomor: 01/PT.MAS/2021/PDG	kapal M. Fast
3	Pembayaran subsidi tahap 3 untuk bulan Maret 2021 untuk angkutan laut cepat rute padang -Sikakap dan Padang - Siberut (PP)	367.800.000,00	08.03/04.0/07/LS/2.15.01/P.01/5/2021 tgl. 9 April 2021	NPSD.552/04.2/DISHUB/2021 dan Nomor: 01/PT.MAS/2021/PDG	kapal M. Fast
4	Pemberian subsidi pembayaran dimuka bulan April dan Mei 2021 untuk penyediaan dan penyelenggaraan Angkutan Laut cepat rute penyebrangan antar Padang - Sikakap (PP) dan Padang-Siberut (PP)	500.100.000,00	08.03/04.0/15/LS/2.015.01/P.01/4/2021 tgl. 30 April 2021	NPSD.552/04.2/DISHUB/2021 dan Nomor: 01/PT.MAS/2021/PDG	kapal M. Fast
5	Pemberian Subsidi Untuk Kegiatan Penyediaan Dan Penyelenggaraan Antara Padang-Sikakap(PP) dan Padang-Siberut (PP) Tahun	76.100.000,00	08.03/04.0/000047/LS/2.15.0.00.0.00.01/P.2/7/21, tgl. 30 Juli 2021	NPSD.552/04.2/DISHUB/2021 dan Nomor: 01/PT.MAS/2021/PDG	kapal M. Fast

NO.	URAIAN	JUMLAH SUBSIDI	NOMOR SP2D	Dasar Pembayaran	KET
	2021 Untuk Kekurangan Pembayaran Bulan April Dan Mei 2021				
6	Pemberian subsidi untuk kegiatan penyediaan dan penyelenggaraan antara Padang-Sikakap (PP) dan Padang-Siberut (PP) tahun 2021 untuk Bulan Juni 2021.	243.200.000,00	08.03/04.0/000050/LS/2.15.0.00.0.00.01/P.02/7/21, tgl 6 juli 2021	NPSD.552/04.2/DISHUB/2021 dan Nomor: 01/PT.MAS/2021/PDG	kapal M. Fast
7	Pemberiaan subsidi untuk kegiatan penyediaan dan penyelengaraan antara padang-sikakap (PP) dan padang-siberut (PP) tahun 2021 untuk kekurangan pembayaran bulan Juli 2021	414.350.000,00	08.03/04.0/000062/LS/2.15.0.00.0.00.01.00/P.03/8, tgl. 10 Agust 2021	NPSD.552/04.2/DISHUB/2021 dan Nomor: 01/PT.MAS/2021/PDG	kapal M. Fast
8	Pembayaran subsidi untuk kegiatan penyediaan dan penyeberangan antara Padang-Sikakap (PP) dan Padang-Siberut (PP) tahun 2021 untuk bulan Agustus 2021	325.650.000,00	08.03/04.0/000076/LS/2.15.0.00.0.00.01/P.03/9/21, tgl 13 Sept 2021	NPSD.552/04.2/DISHUB/2021 dan Nomor: 01/PT.MAS/2021/PDG	kapal M. Fast
9	Pembayaran Subsidi untuk kegiatan penyediaan dan penyelengaraan antara Padang-Sikakap (PP) dan Padang-Siberut (PP) untuk bulan September 2021	287.800.000,00	08.03/04.0/000083/LS/2.15.0.00.01.00/P.03/10/2021, tgl 5 Oktobr 2021	NPSD.552/04.2//DISHUB/2021 dan Nomor: 01/PT.MAS/2021/PDG	kapal M. Fast
10	Pembayaran Subsidi untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyelengaraan Antara Padang-Sikakai (PP) dan Padang-Siberut (PP) untuk Bulan Oktober 2021	340.750.000,00	08.03/04.0/000102/LS/2.15.01/P.04/11/21, tgl. 11 Nov 2021	NPSD.552/04.2/DISHUB/2021 dan Nomor: 01/PT.MAS/2021/PDG	kapal M. Fast
11	Pembayaran Subsidi Untuk kegiatan Penyediaan dan Penyelengaraan antara Padang-Sikakap (PP) dan Padang-Siberut (PP) untuk bulan November 2021.	269.950.000,00	08.03/04.0/000129/LS/2.15.0.00.0.00.01/P.04/2021, tgl. 6 Des 2021	NPSD.552/04.2/DISHUB/2021 dan Nomor: 01/PT.MAS/2021/PDG	kapal M. Fast
12	Pembayaran Subsidi untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyelenggaraan antara Padang-Sikakap (PP) dan Padang-Siberut (PP) untuk Bulan Desember 2021	300.000.000,00	08.03/04.00/000142/LS/2.15.0.00.0.00.01.00/P.04/12, tgl 27 Des 2021	NPSD.552/04.2/DISHUB/2021 dan Nomor: 01/PT.MAS/2021/PDG	kapal M. Fast
13	Pemberian subsidi termyn 1 sebesar 40% untuk penyelengaraan pelayanan angkutan publik kapal antar pulau	1.837.405.700,00	08.03/04.0/000095/LS/2.15.0.00.01.00/P.03/10/2021, tgl. 27 Oktober 2021	NPSD Nomor: 550/02/DISHUB/2021 dan Nomor: 055/ASIMI/IV/2021	Kapal Antar Pulau (PT.ASIMI)
14	Pembayaran Subsidi Termyn II Untuk Penyelengaraan Pelayanan Angkutan Publik Kapal Antar Pulau	1.836.313.913,00	08.03/04.0/000130/LS/2.15.0.00.0.00.01.00/P.04/12, tgl. 7 Des 2021	NPSD Nomor: 550/02/DISHUB/2021 dan Nomor: 055/ASIMI/IV/2021	Kapal Antar Pulau (PT.ASIMI)
15	Pemberian Subsidi Termyn III untuk Penyelenggaraan Pelayana Angkutan Publik Kapal Antar Pulau	112.200.000,00	08.03/02.0/000167/LS/2.15.0.00.0.00.01.00/P.04/12, tgl. 27 Des 2021	NPSD Nomor: 550/02/DISHUB/2021 dan Nomor: 055/ASIMI/IV/2021	Kapal Antar Pulau (PT.ASIMI)
16	Subsidi BBM untuk penyelenggaraan pelayanan angkutan publik kapal antar pulau bulan Januari s.d Maret 2021	47.425.000,00	SP2D GU	-	PT. EKINDO PUTERA ANDALAS
	JUMLAH	**7.685.794.613,00**			

10) Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.491.419.256,00 atau 91,34% dari alokasi anggaran Rp6.012.328.000,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 belanja hibah terealisasi sebesar Rp3.853.184.836,00 maka terdapat peningkatan sebesar Rp1.638.234.420,00 atau 42,52%.
Rincian Belanja Hibah Tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.5.04	Hibah Kepada BUMD	2.000.000.000,00	1.999.923.500,00	100,00	0,00
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.385.100.000,00	2.864.267.756,00	84,61	0,00
5.1.5.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	627.228.000,00	627.228.000,00	100	0,00
	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	1.698.634.836,00
	Beanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/ swasta	0,00	0,00	0,00	999.300.000,00
	Belanja Hibah Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	1.155.250.000,00
Jumlah		**6.012.328.000,00**	**5.491.419.256,00**	**91,34**	**3.853.184.836,00**

1. Belanja Hibah kepada BUMD tahun 2021 merupakan belanja hibah uang pada kegiatan Akademi Komunitas Negeri (AKN) Kampus pada Dinas Pendidikan yang terealisasi sebesar Rp1.999.923.500,00 dari pagu anggaran sebesar 2.000.000.000,00.
2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp2.864.267.756,00 merupakan belanja hibah pada Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan P3A, Dinas Pariwisata, Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan tahun 2021, dengan uraian sebagai berikut:

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
5.1.5.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dan P3A	2.486.100.000,00	1.967.381.759,00	79,14
5.1.5.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada Dinas Pariwisata	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
5.1.5.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan	824.000.000,00	821.885.997,00	99,74
Jumlah		**3.385.100.000,00**	**2.864.267.756,00**	84,61

a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang terealisasi sebesar Rp1.967.381.759,00 terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	Belanja Hibah pada Dinas Pendidikan yang diberikan kepada Penyelenggara PKBM dan Sekolah PAUD	1.716.100.000,00	1.222.650.000,00	71,25
2	Belanja hibah kepada organisasi wanita GOW dan DWP pada dinas Sosial dan P3A	570.000.000,00	556.731.759,00	97,67
3	Belanja hibah kepada organisasi Palang merah Indonesia kab. Kep. Mentawai (PMI) pada Dinas Kesehatan	200.000.000,00	188.000.000,00	94,00
	Jumlah	**2.486.100.000,00**	**1.967.381.759,00**	**79,14**

Dari tabel di atas belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perudang-undangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja hibah Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.222.650.000,00 merupakan belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan berupa hibah uang kepada Penyelenggara Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebesar Rp961.650.000,00, dan Hibah uang kepada Sekolah PAUD sebesar Rp261.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	ORGANISASI/BADAN /LEMBAGA	Lokasi	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Penyelenggara Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM)					
1	PKBM Buggei Simalio	Sagulubbek Kec. Siberut Barat Daya	96.600.000	96.600.000	100,00
2	PKBM Nyiur Melambai	Ps. Taileleu Kec. Siberut Barat Daya	59.650.000	59.650.000	100,00
3	PKBM Karonanta	Simatalu Kec. Siberut Barat	116.050.000	116.050.000	100,00
4	PKBM Roroi Baga	Nemnemleleu Kec. Sipora Selatan	105.900.000	105.900.000	100,00
5	PKBM Puagaijat Toro Purimanuaijat	Muara Sikabaluan Kec. Siberut Utara	70.650.000	70.650.000	100,00
6	PKBM Silibet Sibau	Muara Siberut Kec. Siberut Selatan	72.300.000	72.300.000	100,00
7	PKBM Alito	Saibi Samukop Kec. Siberut Tengah	65.800.000	65.800.000	100,00
8	PKBM Galai Ake	Makalo Kec. Pagai Selatan	134.750.000	134.750.000	100,00
9	PKBM Sura	Saumanganya Kec. Pagai Utara	74.500.000	74.500.000	100,00
10	PKBM Pusurakat	Betumonga Kec. Sipora Utara	116.400.000	116.400.000	100,00
11	PKBM Siberut Utara	Malancan Kec. Siberut Utara	49.050.000	49.050.000	100,00
	JUMLAH		**961.650.000**	**961.650.000**	**100,00**
TK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1	TK Kristen Terang Nusantara Bersinar	Taikako Kec. Sikakap	5.700.000	3.306.000	58,00
2	TK Bintang Mulia 03	Sikakap Kec. Sikakap	5.400.000	3.132.000	58,00
3	TK Kristen Rehoboth Terpadu	Saureinu Kec. Sipora Selatan	9.300.000	5.394.000	58,00
4	TK Keret Baga Rebana	Matobe Kec. Sikakap	5.100.000	2.958.000	58,00
5	TK YBTI Sirilogui	Sirilogui Kec. Siberut Utara	7.200.000	4.176.000	58,00

No.	ORGANISASI/BADAN /LEMBAGA	Lokasi	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
6	TK Kristen Gilgal Terpadu	Sioban Kec. Sipora Selatan	8.100.000	4.872.000	60,15
7	TK Sinar Pemulihan Matobe	Matobe Kec. Sipora Selatan	5.400.000	3.132.000	58,00
8	TK Maranatha Siberut Selatan	Muara Siberut Kec. Siberut Selatan	5.700.000	3.306.000	58,00
9	TK Teratai Sikakap	Sikakap Kec. Sikakap	6.600.000	3.828.000	58,00
10	TK Kristen Pemulihan Sirisurak	Saibi Samukop Kec. Siberut Tengah	6.000.000	3.480.000	58,00
11	TK Pemulihan Mapadegat	Mapadegat Kec. Sipora Utara	7.500.000	4.350.000	58,00
12	TK Teratai Muara Siberut	Muara Siberut Kec. Siberut Selatan	12.300.000	7.134.000	58,00
13	TK Bukit Moria Nemnemleleu	Nemnemleleu Kec. Sipora Selatan	6.600.000	3.828.000	58,00
14	TK YBTI Sotboyak	Sotboyak Kec. Siberut Utara	6.300.000	3.654.000	58,00
15	TK YBTI Universal	Sigapokna Kec. Siberut Barat	13.200.000	7.656.000	58,00
16	TK Paidia GKPM	Sikakap Kec. Sikakap	7.200.000	4.176.000	58,00
17	TK Sasaraina	Sikakap Kec. Sikakap	4.500.000	2.610.000	58,00
18	TK PPK YBTI	Cimpungan Kec. Siberut Tengah	5.700.000	3.306.000	58,00
19	TK Margaretha Gotab	Saliguma Kec. Siberut Tengah	4.500.000	2.610.000	58,00
20	TK Kristen Terpadu Simoilaklak	Saibi Samukop Kec. Siberut Tengah	7.200.000	4.176.000	58,00
21	Paud Surat Baga Terpadu	Matobe Kec. Sipora Selatan	6.300.000	3.654.000	58,00
22	TK Bukit Moria Sagitsi	Sagitsi Kec. Sipora Selatan	4.800.000	2.784.000	58,00
23	TK YBTI Mongan Poula	Mongan Poula Kec. Siberut Utara	7.200.000	4.176.000	58,00
24	TK Pemulihan Teitei Sinabak	Maileppet Kec. Siberut Selatan	12.600.000	7.308.000	58,00
25	TK Margaretha Puro	Muara Siberut Kec. Siberut Selatan	9.600.000	5.568.000	58,00
26	TK Kristen Terang Bersinar Sirilanggai	Malancan Kec. Siberut Utara	14.100.000	8.178.000	58,00
27	TK Pemulihan Mara	Mara Kec. Sipora Selatan	4.800.000	2.784.000	58,00
28	TK Karunia Pemulihan	Sidomakmur Kec. Sipora Utara	4.200.000	2.436.000	58,00
29	TK Margaretta Saliguma	Saliguma Kec. Siberut Tengah	6.000.000	3.480.000	58,00
30	TK Kasih Ibu	Sipora Jaya Kec. Sipora Utara	20.400.000	11.832.000	58,00
31	TK Margaretta Sagulubbek	Sagulubbek Kec. Siberut Barat Daya	45.300.000	26.100.000	57,62
32	KB Darma Wanita Gotab	Saliguma Kec. Siberut Tengah	6.900.000	4.002.000	58,00
33	TK Bukit Moria Monga Sibagau	Mara Kec. Sipora Selatan	3.600.000	2.088.000	58,00
34	TK Rimata	Saibi Samukop Kec. Siberut Tengah	6.900.000	4.002.000	58,00
35	TK Kasih Pemulihan	Goisooinan Kec. Sipora Utara	2.700.000	1.566.000	58,00
36	TK Purimanuajat Terpadu	Saibi Samukop Kec. Siberut Tengah	25.200.000	14.616.000	58,00
37	Paud Kristen Simakirisau Terpadu	Saureinu Kec. Sipora Selatan	5.700.000	3.306.000	58,00

No.	ORGANISASI/BADAN /LEMBAGA	Lokasi	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
38	TK Darma Wanita Saliguma	Saliguma Kec. Siberut Tengah	14.100.000	8.178.000	58,00
39	TK Bintang Mulia 02	Sikakap Kec. Sikakap	6.300.000	3.654.000	58,00
40	TK Mawar Saron	Bosua Kec. Sipora Selatan	6.600.000	3.828.000	58,00
41	TK Marturia Terpadu	Saibi Samukop Kec. Siberut Tengah	8.100.000	4.698.000	58,00
42	TK Calvary	Betumonga Kec. Sipora Selatan	9.000.000	5.220.000	58,00
43	TK Anugerah Pemulihan	Tuapejat Kec. Sipora Utara	37.500.000	21.750.000	58,00
44	TK Islam Bakti 44	Saliguma Kec. Siberut Tengah	16.500.000	9.570.000	58,00
45	TK Kristen Menahem Terpadu	Mara Kec. Sipora Selatan	4.500.000	2.610.000	58,00
46	TK YBTIU Simatoro	Maileppet Kec. Siberut Selatan	10.200.000	5.916.000	58,00
47	TK Harapan Terpadu	Maileppet Kec. Siberut Selatan	11.400.000	6.612.000	58,00
	JUMLAH		**450.000.000**	**261.000.000**	**58,00**
	TOTAL PKBM+PAUD		**1.411.650.000**	**1.222.650.000**	**86,61**

2) Hibah uang kepada Penyediaan Palang Merah Indonesia (PMI) di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp188.000.000,00 pada Dinas Kesehatan.
3) Belanja Hibah pada Dinas Sosial dan P3A yang diberikan kepada Organisasi Wanita sebesar Rp556.731.759,00 yakni Hibah kepada organisasi Darma Wanita Persatuan (DWP) sebesar Rp178.449.392,00, hibah kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) sebesar Rp188.282.367,00 dan Hibah uang kepada Ikatan Istri Anggota DPRD (IKIAD) sebesar Rp190.000.000,00.

b. Belanja Hibah kepada badan dan lembaga, nirlaba sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp75.000.000,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan belanja hibah berupa uang kepada organisasi Pemuda Pancasila Mentawai sebesar Rp25.000.000,00- dan hibah uang kepada organisasi Gerakan Pramuka Kepulauan Mentawai Kwartir Cabang 15 sebesar Rp50.000.000,00,
c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sejumlah Rp821.885.997,00 merupakan Belanja hibah berupa uang kepada Pelaksanaan kegiatan Sidang Sinode BKPM di Siberut Tengah sebesar Rp320.000.000,00 pada Sekretariat Daerah dan Hibah barang kepada badan dan lembaga bersifat sosial kemasyarakatan berupa bantuan 2 unit alat angkutan mobil Pickup kepada Desa sebesar Rp501.885.997,00 pada Dinas Perhubungan.

3. Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp627.228.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

NO	PENERIMA HIBAH	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Parta Amanat Nasional (PAN)	42.966.000,00	42.966.000,00	100,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	112.840.000,00	112.840.000,00	100,00

NO	PENERIMA HIBAH	ANGGARAN	REALISASI	%
3	Partai Demorat	52.206.000,00	52.206.000,00	100,00
4	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	38.458.000,00	38.458.000,00	100,00
5	Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)	54.348.000,00	54.348.000,00	100,00
6	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	96.362.000,00	96.362.000,00	100,00
7	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	76.412.000,00	76.412.000,00	100,00
8	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	76.048.000,00	76.048.000,00	100,00
9	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	77.588.000,00	77.588.000,00	100,00
	JUMLAH	**627.228.000,00**	**627.228.000,00**	**100,00**

11) **Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp876.212.731,00 atau 90,27% dari anggaran Rp970.640.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp471.484.588,00 terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp404.728.143,00 atau 85,84%.

Rincian Belanja bantuan sosial tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

No	Penerima Bansos	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.1.6.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	488.240.000,00	457.640.731,00	93,73	0,00
5.1.6.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	482.400.000,00	418.572.000,00	86,77	0,00
-	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	0,00	0,00	86,36	342.000.000,00
-	Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	0,00	0,00	63,47	129.484.588,00
Jumlah		**970.640.000,00**	**876.212.731,00**	**78,58**	**471.484.588,00**

Belanja bantuan sosial kepada individu tahun 2021 terealisasi sebesar Rp457.640.731,00 merupakan kegiatan pada Dinas Kesehatan berupa bantuan sosial yang direncanakan kepada individu yakni pemberian bantuan kepada ibu bersalin yang dirujuk ke Padang atau bantuan kepada ibu bersalin dari keluarga tidak mampu sesuai dengan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 14 Tahun 2021 Tanggal 15 April 2021, NPHD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Palang Merah Indonesia Kab. Kep. Mentawai Nomor: 477/NPHD/Dinkes/2021 tgl. 26/4/2021.

Sedangkan belanja bantuan sosial kepada keluarga tahun 2021 sebesar Rp418.572.000,00 merupakan kegiatan Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa bantuan sosial yang direncanakan kepada keluarga dalam bentuk bantuan pemasangan instalasi listrik sebanyak 268 KK dengan dasar pembayaran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 448 Tahun 2021 tanggal 27 Des 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 305 Tahun 2021 tentang Penerima Bantuan Sosial Penerangan Listrik bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten.

5.1.4.4.2 Belanja Modal	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
	190.832.037.953,00	164.639.582.130,00

Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp164.639.582.130,00 atau 86,27% dari anggaran sebesar Rp190,832,037,953.00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp142.003.462.707.00 maka terdapat peningkatan sebesar Rp22.636.119.423 atau 15,94%.

Belanja Modal ini merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode/tahun. Belanja Modal tersebut terdiri dari:

No	Penerima Hibah	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.569.593.220,00	25.876.770.459,00	87,51	28.871.620.930,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.879.361.653,00	21.708.856.761,00	75,17	32.557.717.902,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	131.490.757.080,00	115.471.089.584,00	87,82	76.035.794.152,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	892.326.000,00	1.582.865.326,00	177,39	4.538.329.723,00
	Jumlah	**190.832.037.953,00**	**164.639.582.130,00**	86,27	**142.003.462.707,00**

Realisasi Belanja Modal masing-masing OPD sebagai berikut:

No	OPD	Aanggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.978.422.964,00	20.815.138.355,00	90,59	26.209.074.766,00
2	Dinas Kesehatan	24.595.964.191,00	18.609.897.771,00	75,66	19.799.729.322,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.992.425.952,00	1.907.006.098,00	95,71	4.251.187.185,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	126.566.190.216,00	110.373.391.437,00	87,21	68.859.584.388,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.261.194.956,00	1.050.647.655,00	83,31	6.818.514.979,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	62.704.828,00	49.999.000,00	79,74	47.575.000,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	438.681.700,00	430.075.557,00	98,04	94.156.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.486.988.278,00	2.458.664.700,00	98,86	342.341.291,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-			388.348.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	110.000.000,00	104.940.000,00	95,40	436.005.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	258.707.568,00	246.854.918,00	95,42	385.084.151,00
12	Dinas Perhubungan	2.499.298.720,00	2.470.595.796,00	98,85	279.503.000,00

No	OPD	Aanggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	69.275.414,00	66.191.340,00	95,55	897.609.100,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.813.500,00	7.813.500,00	100,00	291.782.150,00
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-		102.816.000,00
16	Dinas Perikanan	314.282.673,00	302.957.800,00	96,40	-
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	-	-		4.298.151.090,00
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.083.052.999,00	3.079.351.167,00	99,88	267.459.750,00
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.312.153.800,00	136.400.000,00	10,40	153.130.000,00
20	Sekretariat Daerah	455.688.439,00	435.303.862,00	95,53	2.719.565.835,00
21	Sekretariat DPRD	770.946.468,00	656.459.000,00	85,15	492.478.900,00
22	Kecamatan Pagai Utara	67.819.000,00	56.899.000,00	83,90	-
23	Kecamatan Sipora Selatan	19.031.896,00	19.030.000,00	99,99	1.363.323.000,00
24	Kecamatan Sipora Utara	22.870.422,00	22.850.000,00	99,91	187.957.000,00
25	Kecamatan Siberut Selatan	40.702.100,00	37.488.000,00	92,10	1.205.952.000,00
26	Kecamatan Siberut Barat Daya	37.263.000,00	36.579.000,00	98,16	45.000.000,00
27	Kecamatan Siberut Utara	10.991.424,00	10.991.000,00	100,00	114.556.800,00
28	Kecamatan Siberut Barat	-	-		899.982.000,00
29	Kecamatan Pagai Selatan	150.336.192,00	149.248.000,00	99,28	-
30	Kecamatan Sikakap	-	-		15.000.000,00
31	Inspektorat	101.356.396,00	96.746.178,00	95,45	55.390.000,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	193.706.652,00	93.590.000,00	48,32	94.110.000,00
33	Badan Keuangan Daerah	924.168.205,00	914.472.996,00	98,95	888.096.000,00
Total Belanja Modal		**190.832.037.953,00**	**164.639.582.130,00**	**86,27**	**142.003.462.707,00**

Dari total belanja modal, terdapat sebesar Rp207.706.486,00 diantaranya merupakan belanja modal yang bersumber dari dana JKN/FKTP dengan rincian masing-masing puskesmas sebagai berikut:

NO	Puskesmas	Kode Rek	Uraian	Jumlah
1	Puskesmas Sioban	5.2.02.05.02.0006	Pembayaran Belanja Pengadaan Televisi	6.300.000,00
2	Puskesmas Sioban	5.2.02.10.02.0003	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer Printer Brother DCP - T520W	2.950.000,00
		5.2.02.10.02.0003	Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer Printer Epson L3210 + Infus	2.699.000,00
3	Puskesmas Sikabaluan	5.2.02.05.02.0004	Pembayaran Belanja Modal Alat Pendingin : AC 1 Pk	4.416.000,00

NO	Puskesmas	Kode Rek	Uraian	Jumlah
4	Puskesmas Sikabaluan	5.2.02.05.02.0006	Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya : Televisi Samsung Full HD TV 43LN5003 SM	4.950.000,00
5	Puskesmas Sikabaluan	5.2.02.01.03.0005	Pembayaran belanja Modal Pompa Air	4.216.000,00
6	Puskesmas Sikabaluan	5.1.02.02.01.0014	Pembayaran belanja Modal Peralatan Personal Komputer : Printer Brother	9.650.000,00
7	Puskesmas Saumanganya	5.2.03.02.02.03.002	Belanja Pengadaan Body Boat	79.420.000,00
8	Puskesmas Bulasat	5.1.02.02.01.0014	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Printer Epson	2.787.000,00
9	Puskesmas Sigapokna	5.2.02.10.01.0003	Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit lainnya : Comp HP AIO 22-DF0144D	6.588.832,00
10	Puskesmas Sigapokna	5.2.02.10.02.0003	Pembayaran Belanja Modal Personal Komputer : Printer Brother DCP - T720DW	4.243.654,00
11	Puskesmas Malakopa	5.2.03.02.02.03.002	Pembayaran Belanja Pengadaan Body Boat	79.486.000,00
Total				**207.706.486,00**

a. Belanja Modal - Tanah

Pada tahun anggaran 2021 belanja tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak menganggarkan belanja tanah sehingga tidak ada penambahan realisasi belanja tanah tahun 2021, sama dengan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak menganggarkan belanja tanah.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2021 sebesar Rp25.876.770.459.00 atau 87,51% dari anggaran sebesar Rp29,569,593,220.00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp28,871,620,930.00 maka terdapat penurunan belanja sebesar Rp2.994.850.471.00 atau 10,37%. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin antara lain:

No	OPD	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Alat Bantu	102.885.000,00	101.362.500,00	98,52	145.992.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.293.685.110,00	4.998.188.195,00	94,42	2.635.063.000,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	525.000,00	-	-	-
4	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	936.661.200,00	909.836.000,00	97,14	1.530.350.250,00
5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	87.000.000,00	86.000.000,00	98,85	124.446.000,00
6	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	8.500.000,00	7.590.000,00	89,29	-
7	Belanja Modal Alat Kantor	35.625.650,00	33.944.000,00	95,28	1.221.941.840,00
8	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.509.270.413,00	945.461.818,00	37,68	1.212.874.200,00

No	OPD	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
9	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	161.200.000,00	155.616.800,00	96,54	140.728.650,00
10	Belanja Modal Alat Studio	133.627.142,00	130.782.718,00	97,87	436.949.045,00
11	Belanja Modal Alat Komunikasi	11.814.900,00	11.810.000,00	99,96	290.950.000,00
12	Belanja Modal Peralatan Pemancar	69.063.000,00	69.036.000,00	99,96	193.875.000,00
13	Belanja Modal Alat Kedokteran	8.938.545.337,00	8.587.007.050,00	96,07	5.752.629.541,00
14	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.640.570.862,00	1.319.299.590,00	80,42	102.418.900,00
15	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	34.007.520,00	34.000.000,00	99,98	113.300.000,00
16	Belanja Modal Komputer unit	3.927.423.275,00	3.423.489.659,00	87,17	4.106.797.600,00
17	Belanja Modal Peralatan Komputer	5.679.188.811,00	5.063.346.129,00	89,16	-
18	Pengadaan alat bengkel tak bermesin	-	-	-	68.788.500,00
19	Pengadaan Alat Ukur	-	-	-	32.000.000,00
20	Pengadaan Alat Pengolahan	-	-	-	9.500.000,00
21	Pengadaan Alat Kesehatan	-	-	-	1.033.267.645,00
22	Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	-	-	-	9.718.263.759,00
23	Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	-	-	-	1.485.000,00
	JUMLAH	**29.569.593.220,00**	**25.876.770.459,00**	**87,51**	**28.871.620.930,00**

Dari total realisasi belanja modal peralatan dan mesin tersebut terdapat belanja modal peralatan dan mesin dari dana BOS SMP sebesar Rp2.027.743.094 yang terdiri dari peralatan dan mesin personal computer sebesar Rp1.623,685.598,00 dan KIB E sebesar 404.057.496, serta dari dana BOS SD pengadaan peralatan personal computer sebesar Rp4.421.787.340,00 dan pengadaan buku ilmu pengetahuan umum BOS SD sebesar Rp1.231.282.326,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk masing-masing OPD yaitu:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 20201 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.909.548.644,00	6.511.331.828,00	73,08
2	Dinas Kesehatan	11.398.628.858,00	10.606.188.361,00	93,05
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.992.425.952,00	1.907.006.098,00	95,71
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	448.314.645,00	409.534.818,00	91,35
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	125.576.832,00	125.351.200,00	99,82
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	62.704.828,00	49.999.000,00	79,74

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 20201 (Rp)	%
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	438.681.700,00	430.075.557,00	98,04
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.486.988.278,00	2.458.664.700,00	98,86
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	110.000.000,00	104.940.000,00	95,40
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	97.557.568,00	85.719.248,00	87,87
11	Dinas Perhubungan	574.253.334,00	546.969.090,00	95,25
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	69.275.414,00	66.191.340,00	95,55
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.813.500,00	7.813.500,00	100,00
14	Dinas Perikanan	314.282.673,00	302.957.800,00	96,40
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	142.040.800,00	136.400.000,00	96,03
16	Sekretariat Daerah	404.688.439,00	384.857.745,00	95,10
17	Sekretariat DPRD	770.946.468,00	656.459.000,00	85,15
18	Kecamatan Pagai Utara	67.819.000,00	56.899.000,00	83,90
19	Kecamatan Sipora Selatan	19.031.896,00	19.030.000,00	99,99
20	Kecamatan Sipora Utara	22.870.422,00	22.850.000,00	99,91
21	Kecamatan Siberut Selatan	40.702.100,00	37.488.000,00	92,10
22	Kecamatan Siberut Barat Daya	37.263.000,00	36.579.000,00	98,16
23	Kecamatan Siberut Utara	10.991.424,00	10.991.000,00	100,00
24	Kecamatan Pagai Selatan	150.336.192,00	149.248.000,00	99,28
25	Inspektorat	101.356.396,00	96.746.178,00	95,45
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	193.706.652,00	93.590.000,00	48,32
27	Badan Keuangan Daerah	571.788.205,00	562.889.996,00	98,44
Jumlah		**29.569.593.220,00**	**25.876.770.459,00**	87,51

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut:

1) Belanja Modal Alat Bantu

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5 . 2 . 2 . 03 . 04	Pengadaan Electric Generating Set	0.00	0.00	15,950,000.00
5 . 2 . 2 . 03 . 05/ 5.2.2.01.03.0005	Pengadaan Pompa	102,885,000.00	101,362,500.00	130,042,000.00
Jumlah		**102,885,000.00**	**101,362,500.00**	**145,992,000.00**

2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5 . 2 . 2 . 04 . 01/5.2.2.02.01.0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	947,970,000.00	835,659,550.00	978,000,000.00
5 . 2 . 2 . 04 . 04/5.2.2.02.01.0006	Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	3,785,610,000.00	3,623,569,000.00	1,112,958,000.00
5 . 2 . 2 . 04 . 05/5.2.2.02.01.0004	Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	560,105,110.00	538,959,645.00	100,355,000.00
5 . 2 . 2 . 04 . 06	Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0.00	0.00	443,750,000.00
Jumlah		**5,293,685,110.00**	**4,998,188,195.00**	**2,635,063,000.00**

3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.2.2.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	525,000.00	0,00	0,00
Jumlah		525,000.00	**0,00**	0,00

4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5 . 2 . 2 . 06 . 02/ 5.2.2.02.03.0002	Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	936,661,200.00	909,836,000.00	527,205,250.00
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	0,00	0,00	1,003,145,000.00
Jumlah		**936,661,200.00**	**909,836,000.00**	**1,530,350,250.00**

5) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.2.2.07.02/ 5.2.2.02.04.0002	Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang	87,000,000.00	86,000,000.00	124,446,000.00
Jumlah		**87,000,000.00**	**86,000,000.00**	**124,446,000.00**

6) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.2.2.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	8,500,000.00	7,590,000.00	0,00
Jumlah		**8,500,000.00**	**7,590,000.00**	0,00

7) Belanja Modal Alat Kantor

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.2.2.05.01.0001	Pengadaan Mesin Ketik	9,500,000.00	9,492,500.00	0,00

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	155,491,140.00
5.2.2.05.01.0005	Pengadaan Alat Kantor Lainnya	26,125,650.00	24,451,500.00	1,066,450,700.00
Jumlah		**35,625,650.00**	**33,944,000.00**	**1,221,941,840.00**

8) Belanja Modal Alat Rumah Tangga

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Pengadaan Meubelair	0,00	0,00	433,359,450.00
5.2.2.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1,332,808,774.00	512,782,678.00	0,00
5 . 2 . 2 . 15 . 03	Pengadaan Alat Pembersih	0,00	0,00	69,655,000.00
5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	331,952,640.00	323,928,140.00	283,459,900.00
5.2.2.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	3,000,000.00	2,970,000.00	68,628,650.00
5.2.2.05.02.0006	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	808,028,999.00	73,786,500.00	357,171,200.00
5.2.2.05.02.0007	Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	33,480,000.00	31,994,500.00	600,000.00
Jumlah		**2,509,270,413.00**	**945,461,818.00**	**1,212,874,200.00**

9) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.2.2.05.03.0001	Pengadaan Meja Kerja Pejabat	37,200,000.00	32,348,400.00	81,278,900.00
5 . 2 . 2 . 17 . 02	Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	14,850,000.00
5.2.2.05.03.0003	Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	112,000,000.00	111,388,400.00	4,800,000.00
5.2.2.05.03.0007	Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	12,000,000.00	11,880,000.00	39,799,750.00
Jumlah		**161,200,000.00**	**155,616,800.00**	**140,728,650.00**

10) Belanja Modal Alat Studio

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5 . 2 . 2 . 18 . 01	Pengadaan Peralatan Studio Visual	0,00	0,00	349,384,045.00
5.2.2.06.01.0002	Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	26,233,118.00	25,000,000.00	67,265,000.00
5.2.2.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	41,120,047.00	39,685,900.00	0,00
5 . 2 . 2 . 18 . 05	Pengadaan Peralatan Computing	0,00	0,00	14,300,000.00
5.2.2.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	66,273,977.00	66,096,818.00	6,000,000.00
Jumlah		**133,627,142.00**	**130,782,718.00**	**436,949,045.00**

11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Komunikasi

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.2.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	11,814,900.00	11,810,000.00	0,00
5 . 2 . 2 . 19 . 03	Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	0,00	290,950,000.00
	Jumlah	**11,814,900.00**	**11,810,000.00**	**290,950,000.00**

12) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Pemancar

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM	0,00	0,00	**193,875,000.00**
5.2.2.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	69,063,000.00	69,036,000.00	0,00
Jumlah		**69,063,000.00**	**69,036,000.00**	**193,875,000.00**

13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5 . 2 . 2 . 21 . 01	Pengadaan Alat Kedokteran Umum	8,933,745,517.00	8,587,007,050.00	3,423,522,538.00
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	0,00	0,00	470,000,000.00
5 . 2 . 2 . 21 . 08	Pengadaan Alat Kedokteran Bedah	0,00	0,00	291,000,000.00
5 . 2 . 2 . 21 . 09	Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	4,799,820.00	0,00	823,499,078.00
5 . 2 . 2 . 21 . 19	Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	0,00	0,00	370,646,609.00
5 . 2 . 2 . 21 . 20	Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	0,00	0,00	373,961,316.00
Jumlah		**8,938,545,337.00**	**8,587,007,050.00**	**5,752,629,541.00**

14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan ALat boratorium

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.2.2.08.01.0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	426,495,600.00	426,495,590.00	0,00
5 . 2 . 2 . 23 . 12	Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi	0,00	0,00	38,873,900.00
5 . 2 . 2 . 23 . 16	Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	21,635,000.00
5.2.2.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	222,425,262.00	220,656,000.00	0,00
5.2.2.08.07.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	991,650,000.00	672,148,000.00	0,00

5 . 2 . 2 . 23 . 48	Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B	0,00	0,00	41,910,000.00
Jumlah		**1,640,570,862.00**	**1,319,299,590.00**	**102,418,900.00**

15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.2.2.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	34,007,520.00	34,000,000.00	**0,00**
5 . 2 . 2 . 29 . 05	Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang	0,00	0,00	113,300,000.00
Jumlah		**34,007,520.00**	**34,000,000.00**	**113,300,000.00**

16) Belanja Modal Peralatan Mesin Pengadaan Komputer

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5 . 2 . 2 . 16 . 01	Pengadaan Komputer Unit Jaringan	-	-	11.895.000,00
5.2.2.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.773.799.533,00	1.120.985.565,00	-
5 . 2 . 2 . 16 . 02/5.2.2.10.01.0002	Pengadaan Personal Komputer	2.153.623.742,00	4.898.490.581,00	952.747.085,00
5 . 2 . 2 . 16 . 03/5.2.2.10.02.0001	Pengadaan Peralatan Komputer Main Frame	104.500.000,00	104.400.000,00	-
5 . 2 . 2 . 16 . 04	Pengadaan Peralatan Mini Komputer	-	-	9.950.000,00
5 . 2 . 2 . 16 . 05/5.2.2.10.02.0003	Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.513.063.263,00	2.302.504.094,00	431.585.515,00
5 . 2 . 2 . 16 . 06/5.2.2.10.02.0004	Pengadaan Peralatan Jaringan	45.500.000,00	45.500.000,00	2.700.620.000,00
5.2.2.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	16.125.548,00	14.955.548,00	-
Jumlah		**9.606.612.086,00**	**8.486.835.788,00**	**4.106.797.600,00**

17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	0	0	68.788.500,00
Jumlah		**0**	**0**	**68.788.500,00**

18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Ukur

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5 . 2 . 2 . 11 . 10	Pengadaan Alat Timbangan/Blora	0	0	32,000,000.00
Jumlah		**0**	**0**	**32,000,000.00**

19) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pengolahan

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5 . 2 . 2 . 12 . 01	Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	**0**	**0**	**9,500,000.00**
Jumlah		**0**	**0**	**9,500,000.00**

20) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kesehatan

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5 . 2 . 2 . 22 . 01	Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	-	-	18,330,000.00
5 . 2 . 2 . 22 . 02	Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitas Medis	-	-	10,014,937,645.00
Jumlah		**-**	**-**	**10,033,267,645.00**

21) Belanja Modal dan Peralatan Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5 . 2 . 2 . 24 . 13	Pengadaan Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	0,00	0,00	9,718,263,759.00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**9,718,263,759.00**

22) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

No Rek	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5 . 2 . 2 . 35 . 01	Pengadaan Alat Bantu Keamanan	0,00	0,00	1,485,000.00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**1,485,000.00**

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun anggaran 2021 sebesar Rp21.708.856.761.00 atau 75.17% dari anggaran sebesar Rp 28,879,361,653.00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 32,557,717,902.00 terdapat penurunan sebesar (Rp10,848,861,143.00) atau 33.32% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
5.2.3.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	21.255.594.673,00	18.710.480.294,00	88,03	26.197.682.926,00
5.2.3.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	7.462.616.980,00	2.837.240.797,00	38,02	6.237.604.976,00
5.2.3.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	161.150.000,00	161.135.670,00	99,99	0,00

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan menara	0,00	0,00	0,00	122.430.000,00
JUMLAH		**28.879.361.653,00**	**21.708.856.761,00**	**75,17**	**32.557.717.902,00**

Realisasi belanja gedung dan bangunan tahun anggaran 2021 terdapat pada 5 OPD yaitu:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13,528,928,320.00	13,072,524,201.00	96.63
2	Dinas Kesehatan	11,902,835,333.00	6,709,406,410.00	56.37
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2,116,335,000.00	1,765,790,480.00	83.44
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	161,150,000.00	161,135,670.00	99.99
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1,170,113,000.00	0,00	0.00
Jumlah		**28,879,361,653.00**	**21,708,856,761.00**	75.17

Rincian objek Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut:

1) Belanja Modal Gedung Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5 . 2 . 3 . 01 . 01	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	19,917,955,760.00	17,372,841,381.00	8,274,800,495.00
5 . 2 . 3 . 01 . 05	Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	2,461,917,500.00
5 . 2 . 3 . 01 . 06	Pengadaan Bangunan Kesehatan	1,337,638,913.00	1,337,638,913.00	11,701,615,981.00
5 . 2 . 3 . 01 . 10	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	16,874,400.00
5 . 2 . 3 . 01 . 12	Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar	0,00	0,00	76,900,000.00
5 . 2 . 3 . 01 . 14	Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	59,810,000.00
5 . 2 . 3 . 01 . 19	Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	2,621,128,108.00
5 . 2 . 3 . 21	Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00	0,00	85,628,000.00
5 . 2 . 3 . 01 . 27	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	899,008,442.00
JUMLAH		**21,255,594,673.00**	**18,710,480,294.00**	**26,197,682,926.00**

2) Belanja Modal Gedung Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5 . 2 . 3 . 02 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	605,182,000.00

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5 . 2 . 3 . 02 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	7,462,616,980.00	2,837,240,797.00	1,129,976,500.00
5 . 2 . 3 . 02 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	4,502,446,476.00
Jumlah		**7,462,616,980.00**	**2,837,240,797.00**	**6,237,604,976.00**

3) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.2.3.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	161,150,000.00	161,135,670.00	99.99	0,00
JUMLAH		**161,150,000.00**	**161,135,670.00**	99.99	0,00

4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan menara

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan menara	0,00	0,00	0,00	122,430,000.00
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	**122,430,000.00**

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp115.471.089.584,00 atau 87.82% dari anggaran sebesar Rp131,490,757,080.00 Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 76,035,794,152.00 terdapat peningkatan belanja sebesar Rp 39,435,295,432.00 atau 51.86%. Rincian belanja modal - Jalan, irigasi dan jaringan antara lain:

No. Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.2.4.01.01	Belanja Modal Jalan	109.617.749.565,00	96.389.060.911,00	87,93	66.584.045.116,00
5.2.4.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.925.045.386,00	1.923.626.706,00	99,93	-
5.2.4.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.552.486.846,00	6.856.640.100,00	80,17	1.346.323.000,00
5.2.4.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.589.000.000,00	1.588.917.900,00	99,99	609.400.000,00
5.2.4.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	306.000.000,00	205.272.117,00	67,08	8.000.000,00
5.2.4.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	1.294.500.000,00	1.294.303.000,00	99,98	0,00
5.2.4.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	8.205.975.283,00	7.213.268.850,00	87,90	0,00
5 . 2 . 4 . 10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	960.010.000,00

No. Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5 . 2 . 4 . 11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00	0,00	6.142.176.036,00
5 . 2 . 4 . 16	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00	267.340.000,00
5 . 2 . 4 . 21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	118.500.000,00
	JUMLAH	**131.490.757.080,00**	**115.471.089.584,00**	**87,82**	**76.035.794.152,00**

Rincian belanja modal - jalan, irigasi, dan jaringan tahun 2021 untuk masing-masing OPD yaitu:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	1,294,500,000.00	1,294,303,000.00	99.98
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	124,001,540,571.00	108,198,066,139.00	87.26
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,135,618,124.00	925,296,455.00	81.48
4	Dinas Perhubungan	1,925,045,386.00	1,923,626,706.00	99.93
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3,083,052,999.00	3,079,351,167.00	99.88
6	Sekretariat Daerah	51,000,000.00	50,446,117.00	98.91
Jumlah		**131,490,757,080.00**	**115,471,089,584.00**	**87.82**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut:

1) Belanja Modal Jalan

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.2.4.01.01.0003	Pengadaan Jalan Kabupaten	107,907,780,274.00	94,889,413,289.00	59,783,796,607.00
5 . 2 . 4 . 01 . 04	Pengadaan Jalan Desa	0,00	0,00	6,265,662,466.00
5.2.4.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1,709,969,291.00	1,499,647,622.00	0,00
5 . 2 . 4 . 01 . 05	Pengadaan Jalan Khusus	0,00	0,00	534,586,043.00
	Jumlah	**109,617,749,565.00**	**96,389,060,911.00**	**66,584,045,116.00**

2) Belanja Modal Jembatan

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.2.4.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	1,925,045,386.00	1,923,626,706.00	0,00
	Jumlah	**1,925,045,386.00**	**1,923,626,706.00**	0,00

3) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.2.4.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	6,043,785,014.00	4,351,640,100.00	0,00
5.2.4.02.01.0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi	2,508,701,832.00	2,505,000,000.00	0,00
5 . 2 . 4 . 03 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan/Jaringan Irigasi	0,00	0,00	1,346,323,000.00
	Jumlah	**8,552,486,846.00**	**6,856,640,100.00**	**1,346,323,000.00**

4) Belanja Modal Instalasi Air Kotor

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.2.4.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	1,589,000,000.00	1,588,917,900.00	0,00
5 . 2 . 4 . 12 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	609,400,000.00
Jumlah		**1,589,000,000.00**	**1,588,917,900.00**	**609,400,000.00**

5) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.2.4.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	306,000,000.00	205,272,117.00	0,00
5 . 2 . 4 . 15 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya (PLTS)	0,00	0,00	8,000,000.00
Jumlah		**306,000,000.00**	**205,272,117.00**	**8,000,000.00**

6) Belanja Modal Instalasi Lain

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.2.4.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	1,294,500,000.00	1,294,303,000.00	0,00
Jumlah		**1,294,500,000.00**	**1,294,303,000.00**	0,00

7) Belanja Modal Jaringan Gas

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.2.4.04.04.0002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	8,205,975,283.00	7,213,268,850.00	0,00-
Jumlah		**8,205,975,283.00**	**7,213,268,850.00**	**-**

8) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Bangunan Air

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5 . 2 . 4 . 10 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut	0,00	0,00	960,010,000.00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**960,010,000.00**

9) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Air Minum/Air Bersih

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5 . 2 . 4 . 11 . 05	Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	6,142,176,036.00
Jumlah		**0,00**	**6.142.176.036,00**	**6,142,176,036.00**

10) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan–Pengadaan Instalasi Gardu Listrik

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5 . 2 . 4 . 16 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	0,00	0,00	176,110,000.00
5 . 2 . 4 . 16 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	0,00	0,00	91,230,000.00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**267,340,000.00**

11) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan- Pengadaan Jaringan Listrik

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5 . 2 . 4 . 21 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	0,00	0,00	118,500,000.00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**118,500,000.00**

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp 1.582.865.326,00 atau 177.39% dari anggaran sebesar Rp892,326,000.00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 4,538,329,723.00 terdapat penurunan belanja sebesar (Rp (2.955.464.397,00) atau 65,12% sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.2.5.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	539.946.000,00	1.231.282.326,00	228,038	0,00
5.2.5.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	352.380.000,00	351.583.000,00	99,77	0,00

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.2.5.08.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	41.150.000,00
5 . 2 . 5 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	0,00	0,00	0,00	251.230.142,00
5 . 2 . 5 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	4.245.949.581,00
Jumlah		**892.326.000,00**	**1.582.865.326,00**	**177,39**	**4.538.329.723,00**

Rincian realisasi belanja aset tetap lainnya untuk masing-masing OPD yaitu:

No	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	539.946.000,00	1.231.282.326,00	228,04
2	Badan Keuangan Daerah	352.380.000,00	351.583.000,00	99,77
Jumlah		**892.326.000,00**	**1.582.865.326,00**	177,39

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut:

1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.2.5.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	300,000,000.00	0,00	0,00
5.2.5.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	239,946,000.00	0,00	0,00
Jumlah		**539,946,000.00**	0,00	0,00

2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.2.5.08.01.0005	Belanja Modal Software	352,380,000.00	351,583,000.00	0,00
Jumlah		**352,380,000.00**	**351,583,000.00**	**0,00**

3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5.2.5.04.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Tanda Penghargaan	0,00	0,00	41,150,000.00
Jumlah		0,00	0,00	**41,150,000.00**

4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Pengadaan Buku

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5 . 2 . 5 . 01 . 01	Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	0,00	0,00	169,830,142.00
5 . 2 . 5 . 01 . 08	Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian dan Olahraga	0,00	0,00	81,400,000.00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**251,230,142.00**

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pengadaan Aset Tetap Renovasi

No Rek	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)
5 . 2 . 5 . 08 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	4,245,949,581.00
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**4,245,949,581.00**

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.4.4.3 Belanja Tidak Terduga	**2.114.665.260,00**	**1.587.597.109,00**

Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp1.587.597.109,00, dari alokasi anggaran sebesar Rp2.114.665.260,00 atau 75,08%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp24.195.818.997,00 maka terdapat penurunan senilai (Rp22.608.221.888,00) atau 93,44%. Belanja Tidak Terduga tahun 2021 digunakan untuk kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengamanan Pantai Lainnya pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Pengamanan Pantai Pastoran Desa Sikakap, Kecamatan Sikakap senilai Rp676.820.000,00. Bantuan bencana kebakaran bagi masyarakat sebesar Rp255.000.000,00, Biaya adm penutupan rekening tabungan Dorman/Fasif sebesar Rp586.365,00, Penyetoran sisa dana desa tahun 2015 s.d 2019 sebesar Rp455.190.744,00 dan pengembalian belanja dana hibah kepada Palang Merah Indonesi (PMI) Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp200.000.000,00 pada Badan Keuangan Daerah dengan rincian pencairan SP2D sebagai berikut :

No	TANGGAL SP2D	NO. SP2D	URAIAN	NILAI SP2D
1	5/31/2021	08.03/04.0/000211/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.00/P1 /5/21 (LS)	Penyetoran Sisa Dana Desa Tahun 2015 S/D 2019 Kabupaten Kepulauan Mentawai	455.190.744,00
2	6/21/2021	08.03/03.0/000235/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.00/P/ 6/2021 (LS)	Pembayaran Belanja Dana Hibah Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kepulauan Mentawai Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Pengelolaan dan Adarurat Dan Mendesak Tahun Anggaran	200.000.000,00
3	7/1/2021	08.03/03.0/000264/LS/ 5.02.0.00.0.00.01.00/P/ 7/2021 (LS)	Pembayaran Bantuanhibah Sosial Kepada Bpk Natalinus Taileleu Atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 23 Januari 2021 di Dusun Mangka Baga Desa Sinaka, Kec Pagai Selatan Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Tahun Anggaran 2021	15.000.000,00

No	TANGGAL SP2D	NO. SP2D	URAIAN	NILAI SP2D
4	7/12/2021	08.04/02.0/278/LS/5.02.0.00.0.00.01.00/P/7/2021 (LS)	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk Sudirman Atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 02 Desember 2020 di Dusun Pangasaat Desa Saibi Samukop Kecamatan Siberut Tengah, Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2021	15.000.000,00
5	7/16/2021	08.03/04.0/287/LS/5.02.0.00.0.00.01.00/P/7/2021 (LS)	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk Ismail Sirioke Atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 11 Januari 2020 di Desa Sotboyak Kecamatan Siberut Utara, Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2021	15.000.000,00
6	7/28/2021	08.03/04.0/295/LS/5.02.0.00.0.00.01.00/P/7/2021 (LS)	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk Anis Popok Tapodhaidhai Atas Musibah Rumah Ditimpa Pohon Pada Tanggal 09 April 2021 Di Dusun Betaet Desa Simalegi Kec Siberut Barat, Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2021	15.000.000,00
7	8/30/2021	08.03/04.0/375/LS/5.02.0.00.0.00.01.00/P/8/2021 (LS)	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk Nasdi Samaalei Atas Musibah Kebakaran Rumah pada Tanggal 27 Maret 2021 di Dusun Mangorut Desa Madobag Kec Siberut Selatan, pada Kegiatan Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2021	15.000.000,00
8	9/1/2021	08.03/04.0/394/LS/5.02.0.00.0.00.01.00/P/8/2021 (LS)	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk Rival Sakerebau Atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 14 Desember 2020 di Dusun Panatarat Desa Matobe Kecamatan Sikakap Pda Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Tahun Anggaran 2021	15.000.000,00
9	10/28/2021	08.03/04.0/462/LS/5.02.0.00.0.00.01.00/P/10/2021 (LS)	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk. Dominikus Bagariang Atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 06 Juli 2021 Di Dusun Makoddiai Desa Pasakiat Taileleu Kecamatan Siberut Barat Daya, Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggar	15.000.000,00
10	10/28/2021	08.03/04.0/463/LS/5.02.0.00.0.00.01.00/P/10/2021 (LS)	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk. Laurensius Garau Atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 11 Juni 2021 Di Dusun Beriulou Desa Kec. Sipora Selatan, Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2021	15.000.000,00
11	10/28/2021	08.03/04.0/464/LS/5.02.0.00.0.00.01.00/P/10/2021 (LS)	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk. Hengki Mardono Atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 11 Juni 2021 Di Dusun Tunang Kaliau Desa Matobe Kec. Sipora Selatan, Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2021	15.000.000,00
12	11/1/2021	08.03/04.0/471/LS/5.02.0.00.0.00.01.00/P/11/2021 (LS)	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk Tolly Susanto Samaloisa Atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 26 Juli 2021 Di Dusun Desa Bulasat Kec Pagai Selatan, Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2021	15.000.000,00
13	11/1/2021	08.03/04.0/472/LS/5.02.0.00.0.00.01.00/P/11/2021 (LS)	Pembayaran Biaya Adminstrasi Penutupan Rekening Tabungan Dorman/Fasif Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Sub Kegiatan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021	586.365,00

No	TANGGAL SP2D	NO. SP2D	URAIAN	NILAI SP2D
14	11/22/2021	08.03/04.0/496/LS/5.02.0.00.0.00.01.00/P/11/2021 (LS)	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk Marcus Siripeibu Atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 14 Januari 2021 Di Dusun Sirilanggai Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara, Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2021	15.000.000,00
15	12/17/2021	08.03/02.0/659/LS/5.02.0.00.0.00.1.0/P.04/12/2021 (LS)	Pembayraran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk. Roni Atas Musibah Rumah ditimpa Pohon di Dusun Betaet Selatan Desa Simalegi, pada tgl 16 November 2021 Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2021	15.000.000,00
16	12/17/2021	08.03/02.0/660/LS/5.02.0.00.0.00.1.0/P.04/12/2021 (LS)	Pembayraran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk. Marimin Taileleu Atas Musibah Kebakaran Rumah pada 25 Oktober 2021 di Dusun Maosa Desa Matobek Kec. Sipora Selatan, Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2021	15.000.000,00
17	12/17/2021	08.03/04.0/658/LS/5.02.0.00.0.00.1.0/P.04/12/2021 (LS)	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Bpk. Harlin Warta Sono atas Musibah Kebakaran Rumah pada tgl 15 Oktober 2019 di Dusun Saumanganyak Tengah Desa Saumanganyak Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2021	15.000.000,00
18	12/22/2021	08.03/02.0/702/LS/5.02.0.00.0.00.1.0/P.04/12/2021 (LS)	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk. Zakeus Sarereake Atas Musibah Kebakaran Rumah pada tgl 14 Oktober 2021 di Dusun Limu Desa Saliguma Kec. Sibeut Tengah, Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2021	15.000.000,00
19	12/22/2021	08.03/04.0/701/LS/5.02.0.00.0.00.1.0/P.04/12/2021 (LS)	Pembayaran Bantuan Hibah Sosial Kepada Bpk Thomas Samaloisa Atas Musibah Kebakaran Rumah Pada Tanggal 17 September 2021 Di Dusun Surat Aban Desa Bulasat Kecamatan Pagai Selatan, Pada Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2021	15.000.000,00
20	10/14/2021	08.03/04.0/455/LS/5.02.0.00.0.00.01.00/P/10/2021 (LS)	Belanja Biaya Penangan Rehabilitasi Bangunan Pantai Pastoran Sikakap. Desa Sikakap Pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak Tahun Anggaran 2021	676.820.000,00
21	12/28/2021	08.03/04.0/739/LS/5.02.0.00.0.00.1.0/P.04/12/2021 (LS)	Musibah Kebakaran Rumah An. Ibu Lala Sangong pada taggal 09 November 2021 di Dusun Limu Mangujuk Desa Saliguma Kec. Siberut Tengah	15.000.000,00
		JUMLAH		**1.587.597.109,00**

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.4.5 BELANJA TRANSFER	**119.789.616.987,00**	**119.166.749.510,00**

Belanja Transfer merupakan belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah desa dan belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan

31 Desember 2021 adalah sebesar Rp119.166.749.510,00 atau mencapai 99,48% dari alokasi anggaran sebesar Rp119.789.616.987,00. Jika dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp115.966.872.197,00 maka terdapat peningkatan sebesar Rp3.199.877.313,00 atau 2,76%. Realisasi belanja transfer dapat diuraikan sebagai berkut:

`No. Rekening	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
5.4.1	**BELANJA BAGI HASIL**	**2.506.385.687,00**	**2.446.929.619,00**	**97,63**	**1.563.200.931,00**
5.4.1.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kab/Kota dan Desa	751.915.706,00	705.432.930,00	93,82	440.862.752,00
5.4.1.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Kab/Kota dan Desa	1.754.469.981,00	1.741.496.689,00	99,26	1.122.338.179,00
5.4.2	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**	**117.283.231.300,00**	**116.719.819.891,00**	**99,52**	**114.403.671.266,00**
5.4.2.05	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	117.283.231.300,00	116.719.819.891,00	99,52	113.776.443.266,00
6 . 2 . 3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	627.228.000,00
Jumlah		**119.789.616.987,00**	**119.166.749.510,00**	**99,48**	**115.966.872.197,00**

	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.4.6 PEMBIAYAAN	**41.255.059.126,00**	**41.255.059.126,74**

Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp41.255.059.126,74 atau 100% dengan anggaran sebesar Rp41.255.059.126,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp29.950.726.933,23 terdapat peningkatan sebesar Rp11.304.332.193,51 atau 37,74%. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan realisasi pembiayaan melalui pelaksanaan kegiatan. Rincian Pembiayaan sebagai berikut:

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**41.255.059.126,00**	**41.255.059.126,74**	**100**	**11.835.939.277,02**
6.1.1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	**41.255.059.126,00**	**41.255.059.126,74**	**100**	**11.835.939.277,02**
6.1.1.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	33.043.426.282,74	0,00	0,00
6.1.1.05	Penghematan Belanja	3.516.398.716,00			
6.1.1.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	29.527.027.566,00	0,00	0,00	0,00

No Rek	Uraian	Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%	Realisasi 2020 (Rp)
6.1.1.08	Sisa Belanja Lainnya	8.211.632.844,00	8.211.632.844,00		
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Penyertaan Modal pada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembayaran Kegiatan Lanjutan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		**41.255.059.126,00**	**41.255.059.126,74**	**100**	**11.835.939.277,02**

Dari tabel tersebut dapat diuraikan bahwa realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp41.255.059.126,74 atau 100% dari anggaran sebesar Rp41.255.059.126,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp29.950.726.933,23 terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp29.419.119.849,72 atau 248,56%, sedangkan Pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2021 bernilai Rp0,00.

5.1.4.7 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
0,00	**42.013.999.823,09**

Dari Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 diperoleh Sisa Lebih PembiayaanAnggaran (SILPA) sebesar Rp42.013.999.823,09 yang merupakan hasil perhitungan sebagai berikut:

1.	Realisasi Pendapatan	Rp	830.153.085.297,37
2.	Realisasi Belanja	Rp	829.394.144.601,02
3.	**Defisit (1 – 2)**	**Rp**	**758.940.696,35**
4.	Penggunaan SILPA Tahun 2020	Rp	41.255.059.126,74
5.	Penyertaan Modal Pemerintah daerah	Rp	0,00
6.	**SILPA Tahun Berjalan (3 s.d. 5)**	**Rp**	**42.013.999.823,09**

Berikut rincian SILPA Tahun 2021 terdiri dari :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	DAK Fisik	8.777.685.962,00
2	DAK Non Fisik	9.309.060.809,00
3	Sisa DAK Tahun sebelumnya	6.269.947.856,10
4	Pemda KKM Dana Rutin	2.400.887.226,50
5	Pemda KKM Dana Gaji	1.603.481.046,00
6	Penerimaan Retribusi Wisata Selancar Kabupaten Kepulauan Mentawai (BN)	2.445.066.994,00
7	Rekening Kas Umum Daerah (Sisa dana desa, kegiatan pihak ketiga)	940.478.869,51
8	kas dibendahara penerimaan	16.000.000,00
9	kas dibendahara pengeluarga	21.637.000,00
10	Dana BOS	5.097.942.601,00
11	Dana FKTP	5.131.811.458,98
Jumlah		**42.013.999.823,09**

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

Dalam pelaksanaan APBD dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SILPA atau SIKPA Tahun Anggaran yang lalu dan Tahun Anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	2021	2020
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	41.255.059.126,74	29.950.726.933,23
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	41.255.059.126,74	29.950.726.933,23
3	**Sub Total**	**0,00**	**0,00**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	42.013.999.823,09	41.255.059.126,74
5	**Sub Total**	**42.013.999.823,09**	**41.255.059.126,74**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir**	**42.013.999.823,09**	**41.255.059.126,74**

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA Tahun Anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2021 sebesar Rp41.255.059.126,74

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai Penerimaan Tahun Berjalan merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Penggunaan SAL tahun 2021 merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp41.255.059.126,74.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam LRA nilai SILPA pada akhir tahun 2021 sebesar Rp42.013.999.823,09.

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan akumulasi SILPA Tahun Anggaran yang lalu dan Tahun Anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan dan lain-lain. Nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp42.013.999.823,09.

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2021 dengan nilai aset sebesar Rp1.991.726.393.838,34 kewajiban sebesar Rp5.302.517.096,00 dan ekuitas sebesar Rp1.986.423.876.742,34.

Rincian atas masing-masing pos di Neraca per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
5.3.1 Aset Lancar	**(Rp)**	**(Rp)**
	56.080.707.818,40	**65.809.957.384,71**

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai,atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp56.080.707.818,40 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	37.166.020.148,09	37.083.956.419,74
2	Kas di Bendahara Penerimaan	16.000.000,00	56.663.100,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	21.637.000,00	0,00
4	Kas di BLUD	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara BOS	5.097.942.601,00	4.114.453.198,00
6	Piutang Pajak	4.811.963.070,00	4.405.623.663,00
7	Piutang Retribusi	7.221.338,00	97.703.142,00
8	Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	6.844.342.051,00
9	Piutang Lainnya	390.835.512,36	390.835.512,36
10	Penyisihan Piutang	(3.786.275.821,25)	(3.438.488.266,35)
11	Beban Dibayar Dimuka	57.782.258,07	70.416.666,67
12	Persediaan	12.297.581.712,13	16.184.451.898,29
	JUMLAH	**56.080.707.818,40**	**65.809.957.384,71**

5.3.1.1 Kas di Kas Daerah	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	37.166.020.148,09	**37.083.956.419,74**

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp37.166.020.148,09. Saldo ini merupakan saldo kas daerah hasil rekonsiliasi yang berada pada pengelola bendaharawan umum daerah (BUD) yang disimpan di rekening Bank Nagari Cabang Tuapejat Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Bank Negara Indonesia Cabang Mentawai dan saldo kas di Rekening Bendahara FKTP di 15 Puskesmas yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rincian saldo Kas di Kas Daerah sesuai dengan rekening koran dan kas tunai sebagai berikut:

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	JUMLAH (Rp)
	REKENING KAS DAERAH		
1	2110.0101.00012.1	a.n. Pemda Kab. Kep. Mentawai/GAJI	1.603.481.046,00
2	2110.0101.00010-6	a.n. Pemda Kab. Kep. Mentawai/ Dana Pembangunan	1.975.747.288,51
3	2110.0101.00011-8	a.n. Pemda Kab. Kep. Mentawai/Dana Rutin	2.400.887.226,50
4	2110.0101.00510-4	a.n. Pemda Kab. Kep. Mentawai DAK Non DR Thn 2008	24.356.694.627,10
5	2358882366	a.n. Penerimaan Retribusi Wisata Selancar Kabupaten Mentawai (BNI)	2.445.066.994,00
	Jumlah 1		**32.781.877.182,11**
	REKENING DI BENDAHARA FKTP		
1	2110.0101.00554-2	a.n. Puskesmas Betaet	146.801.055,55
2	2110.0101.00550-5	a.n. Puskesmas Saibi Samukop	249.027.453,76

No	Nomor Rekening	Nama Rekening	JUMLAH (Rp)
3	2110.0101.00551-7	a.n. Puskesmas Saumanganya	66.971.185,84
4	2110.0101.00557-8	a.n. Puskesmas Peipei	496.388.504,91
5	2110.0101.00555-4	a.n. PuskesmasMuara Sikabaluan	377.205.591,00
6	2110.0101.00548-7	a.n. Puskesmas Mapadegat	743.962.487,00
7	2110.0101.00552-9	a.n. Puskesmas Sikakap	982.433.554,00
8	2110.0101.00556-6	a.n. Puskesmas Malakopa	248.184.306,00
9	2110.0101.00007-9	a.n. Puskesmas Muara Siberut	455.147.062,00
10	2110.0101.00553-1	a.n. Puskesmas Sioban	688.293.099,00
11	2110.0101.00570-1	a.n. Puskesmas Bosua	33.700.243,00
12	2110.0101.00569-4	a.n. Puskesmas Bulasat	401.458.990,00
13	2111.0101.00014-4	a.n Puskesmas Sarereiket	125.003.626,92
14	2110.0101.00594-4	a.n Puskesmas Sigapokna	41.935.578,00
15	2110.0101.00596-6	a.n Puskesmas Simatalu	75.298.722,00
	Jumlah 2		**5.131.811.458,98**
	TOTAL (1+2)		**37.913.688.641,09**

Berdasarkan tabel di atas, saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp32.781.877.182,11 merupakan saldo sesuai dengan rekening koran per 31 Desember 2021. Terdapat selisih sebesar (Rp747.668.493,00) yang merupakan SP2D Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang pekerjaan belanja konstruksi pembangunan tahap III gedung Badan Keuangan Daerah sebesar Rp754.960.800,00 pemindah bukuan pada bulan 4 Januari 2022, kelebihan cair gaji THR PNS Dinas Pendidikan bulan Mei sebesar Rp2.461.109,00 belum disetor dan kelebihan cair gaji PNS bulan November 2021 di Kecamatan Siberut Tengah sebesar Rp4.831.198,00 yang telah disetor tanggal 4 Maret 2022.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.3.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	**16.000.000,00**	**56.663.100,00**

Saldo kas sejumlah Rp16.000.000,00 merupakan dana yang secara administratif masih berada di Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2021. Jumlah tersebut adalah penerimaan retribusi penyeberangan air yang masih berada pada bendahara penerimaan Dinas Perhubungan yang belum disetor ke kas daerah.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.3.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	**21.637.000,00**	**0,00**

Pada akhir tahun 2021 terdapat Kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp21.637.000,00. Kas di bendahara pengeluaran ini merupakan sisa Uang Persediaan (UP) yang belum disetor bendahara pengeluaran OPD ke Kas Daerah pada akhir tahun anggaran 2021 diantaranya kas dibendahara pengeluaran Kecamatan Siberut Utara Sebesar Rp195.000,00, kas di bendahara pengeluaran kecamtan Siberut Barat Sebesar Rp3.422.000,00, kas di bendahara pengeluaran kecamatan Siberut Selatan sebanyak Rp17.250.000,00 dan kas pada bendahara pengeluaran kecamatan Sipora Selatan sebesar Rp770.000,00.

5.3.1.4 Kas Lainnya - Kas di Bendahara BOS	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	5.097.942.601,00	4.114.453.198,00

Saldo kas sejumlah Rp5.097.942.601,00 merupakan saldo di Bendahara BOS pada Dinas Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2021 yang terdiri dari saldo kas di bendahara pengeluaran Dana BOS Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp4.640.260.466,00 dan Saldo Kas di bendahara pengeluaran Dana BOS SMP sebesar Rp457.682.135,00. Akun ini untuk menyajikan saldo kas di Bendahara BOS karena pada TA 2021 pendapatan dan belanja terkait Dana BOS dianggarkan dalam APBD.

Rincian saldo Kas di Bendahara BOS SD sebesar Rp4.640.260.466,00 sebagai berikut:

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Rek	Kas di Tangan Bendahara	SALDO AKHIR
1	SD Negeri 01 Sikakap	SIKAKAP	-	80.891.709,00	80.891.709,00
2	SD Negeri 02 Taikako	SIKAKAP	5.788.464,00	54.667.349,00	60.455.813,00
3	SD Negeri 03 Taikako	SIKAKAP	-	544.703,00	544.703,00
4	SD Negeri 07 Matobe	SIKAKAP	-	5.422.957,00	5.422.957,00
5	SD Negeri 15 Sikakap	SIKAKAP	-	10.819.400,00	10.819.400,00
6	SD Negeri 17 Taikako	SIKAKAP	73.473,00	70.280.000,00	70.353.473,00
7	SD Negeri 21 Makalo	SIKAKAP	-	86.943.487,00	86.943.487,00
8	SD Negeri 26 Taikako	SIKAKAP	-	63.476.675,00	63.476.675,00
9	SD Negeri 32 Matobe	SIKAKAP	-	7.492.225,00	7.492.225,00
10	SD Negeri 35 Matobe	SIKAKAP	499.293,00	1.518.000,00	2.017.293,00
11	SD Negeri 36 Taikako	SIKAKAP	-	64.146.017,00	64.146.017,00
12	SD Negeri 38 Sikakap	SIKAKAP	-	3.841.845,00	3.841.845,00
13	SD Negeri 06 Sinaka	Pagai Selatan	268.331,00	30.000.000,00	30.268.331,00
14	SD Negeri 08 Makalo	Pagai Selatan	-	9.587.313,00	9.587.313,00
15	SD Negeri 09 Makalo	Pagai Selatan	-	73.566.400,00	73.566.400,00
16	SD Negeri 12 Malakopa	Pagai Selatan	-	122.886.582,00	122.886.582,00
17	SD Negeri 13 Bulasat	Pagai Selatan	-	70.940.761,00	70.940.761,00
18	SD Negeri 14 Malakopa	Pagai Selatan	8.937.744,00	84.768.600,00	93.706.344,00
19	SD Negeri 16 Makalo	Pagai Selatan	-	67.004.094,00	67.004.094,00
20	SD Negeri 22 Makalo	Pagai Selatan	-	62.773.263,00	62.773.263,00
21	SD Negeri 23 Sinaka	Pagai Selatan	-	60.711.772,00	60.711.772,00
22	SD Negeri 24 Malakopa	Pagai Selatan	-	12.109.611,00	12.109.611,00
23	SD Negeri 25 Malakopa	Pagai Selatan	238.156,00	73.970.000,00	74.208.156,00
24	SD Negeri 28 Makalo	Pagai Selatan	-	-	-
25	SD Negeri 29 Sinaka	Pagai Selatan	-	30.603.500,00	30.603.500,00
26	SD Negeri 30 Sinaka	Pagai Selatan	-	61.203.263,00	61.203.263,00
27	SD Negeri 31 Bulasat	Pagai Selatan	155.132,00	66.350.000,00	66.505.132,00
28	SD Negeri 34 Sinaka	Pagai Selatan	-	4.101.002,00	4.101.002,00
29	SD Negeri 39 Malakopa	Pagai Selatan	431.039,00	9.782.649,00	10.213.688,00
30	SD Negeri 40 Bulasat	Pagai Selatan	-	63.178.031,00	63.178.031,00

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Rek	Kas di Tangan Bendahara	SALDO AKHIR
31	SD Negeri 41 Bulasat	Pagai Selatan	-	41.622.465,00	41.622.465,00
32	SD Negeri 42 Sinaka	Pagai Selatan	-	10.922.563,00	10.922.563,00
33	SD Negeri 04 Betumonga	Pagai Utara	557.740,00	28.690.000,00	29.247.740,00
34	SD Negeri 05 Silabu	Pagai Utara	-	30.532.762,00	30.532.762,00
35	SD Negeri 10 Saumanganya	Pagai Utara	238.695,00	5.092.500,00	5.331.195,00
36	SD Negeri 11 Saumanganya	Pagai Utara	25.000,00	22.881.517,00	22.906.517,00
37	SD Negeri 18 Saumanganya	Pagai Utara	-	17.614.986,00	17.614.986,00
38	SD Negeri 19 Saumanganya	Pagai Utara	-	7.060.650,00	7.060.650,00
39	SD Negeri 20 Saumanganya	Pagai Utara	50.509,00	4.522.000,00	4.572.509,00
40	SD Negeri 27 Silabu	Pagai Utara	-	12.586.882,00	12.586.882,00
41	SD Negeri 33 Betumonga	Pagai Utara	110.971.870,00	-	110.971.870,00
42	SD Negeri 37 Saumanganya	Pagai Utara	208.424,00	53.241.000,00	53.449.424,00
43	SD Negeri 43 Silabu	Pagai Utara	-	176.044,00	176.044,00
44	SD Negeri 01 Sioban	Sipora Selatan	-	14.006.566,00	14.006.566,00
45	SD Negeri 02 Nemnemleleu	Sipora Selatan	-	1.931.095,00	1.931.095,00
46	SD Negeri 03 Beriulou	Sipora Selatan	-	6.277.531,00	6.277.531,00
47	SD Negeri 04 Bosua	Sipora Selatan	54.434,00	60.478.500,00	60.532.934,00
48	SD Negeri 06 Saureinu	Sipora Selatan	-	68.917,00	68.917,00
49	SD Negeri 07 Nemnemleleu	Sipora Selatan	-	64.068.197,00	64.068.197,00
50	SD Negeri 08 Matobe	Sipora Selatan	-	9.128.446,00	9.128.446,00
51	SD Negeri 09 Saureinu	Sipora Selatan	-	5.538.399,00	5.538.399,00
52	SD Negeri 10 Mara	Sipora Selatan	-	64.969.988,00	64.969.988,00
53	SD Negeri 14 Bosua	Sipora Selatan	69.596,00	83.320.000,00	83.389.596,00
54	SD Negeri 19 Matobe	Sipora Selatan	-	1.041.281,00	1.041.281,00
55	SD Negeri 20 Mara	Sipora Selatan	-	65.321.068,00	65.321.068,00
56	SD Negeri 25 Bosua	Sipora Selatan	-	31.495.638,00	31.495.638,00
57	SD Negeri 27 Beriulou	Sipora Selatan	42.500,00	12.962.509,00	13.005.009,00
58	SD Negeri 05 Goisooinan	Sipora Utara	-	2.275.016,00	2.275.016,00
59	SD Negeri 11 Tuapejat	Sipora Utara	-	1.217.070,00	1.217.070,00
60	SD Negeri 12 Betumonga	Sipora Utara	-	98.311,00	98.311,00
61	SD Negeri 13 Tuapejat	Sipora Utara	2.164.198,00	49.226.144,00	51.390.342,00
62	SD Negeri 15 Betumonga	Sipora Utara	-	1.569.283,00	1.569.283,00
63	SD Negeri 16 Tuapejat	Sipora Utara	-	21.667.133,00	21.667.133,00
64	SD Negeri 17 Tuapejat	Sipora Utara	-	36.740.340,00	36.740.340,00
65	SD Negeri 18 Tuapejat	Sipora Utara	1.044.133,00	9.994.200,00	11.038.333,00
66	SD Negeri 21 Goisooinan	Sipora Utara	-	23.095.059,00	23.095.059,00

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Rek	Kas di Tangan Bendahara	SALDO AKHIR
67	SD Negeri 22 Tuapejat	Sipora Utara	2.841.356,00	13.036.950,00	15.878.306,00
68	SD Negeri 23 Tuapejat	Sipora Utara	-	22.668.317,00	22.668.317,00
69	SD Negeri 24 Betumonga	Sipora Utara	-	6.328.954,00	6.328.954,00
70	SD Negeri 26 Tuapejat	Sipora Utara	-	1.857.454,00	1.857.454,00
71	SD Negeri 02 Matotonan	Siberut Selatan	-	54.861.113,00	54.861.113,00
72	SD Negeri 06 Madobag	Siberut Selatan	-	47.247.327,00	47.247.327,00
73	SD Negeri 07 Madobag	Siberut Selatan	-	71.605.428,00	71.605.428,00
74	SD Negeri 09 Muara Siberut	Siberut Selatan	-	10.137.622,00	10.137.622,00
75	SD Negeri 12 Muntei	Siberut Selatan	-	21.768.875,00	21.768.875,00
76	SD Negeri 13 Muara Siberut	Siberut Selatan	-	56.731.154,00	56.731.154,00
77	SD Negeri 15 Simalepet	Siberut Selatan	-	18.654.365,00	18.654.365,00
78	SD Negeri 21 Madobag	Siberut Selatan	1.368.078,00	30.710.000,00	32.078.078,00
79	SD Negeri 23 Muntei	Siberut Selatan	7.403.865,00	29.340.000,00	36.743.865,00
80	SD Negeri 24 Madobag	Siberut Selatan	406.745,00	34.374.000,00	34.780.745,00
81	SD Negeri 01 Saibi Samukop	Siberut Tengah	-	118.366.222,00	118.366.222,00
82	SD Negeri 03 Saibi Samukop	Siberut Tengah	-	31.252.075,00	31.252.075,00
83	SD Negeri 10 Saliguma	Siberut Tengah	1.074.286,00	-	1.074.286,00
84	SD Negeri 10 Cimpungan	Siberut Tengah	37.413,00	66.110.000,00	66.147.413,00
85	SD Negeri 13 Cimpungan	Siberut Tengah	358.212,00	2.571.800,00	2.930.012,00
86	SD Negeri 16 Saliguma	Siberut Tengah	-	53.516.382,00	53.516.382,00
87	SD Negeri 20 Saibi Samukop	Siberut Tengah	726.931,00	67.923.256,00	68.650.187,00
88	SD Negeri 22 Saliguma	Siberut Tengah	-	46.349.546,00	46.349.546,00
89	SD Negeri 04 Katurei	Siberut Barat Daya	546.418,00	8.780.000,00	9.326.418,00
90	SD Negeri 05 Katurei	Siberut Barat Daya	-	5.107.872,00	5.107.872,00
91	SD Negeri 08 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	-	70.349.737,00	70.349.737,00
92	SD Negeri 11 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	-	72.765.151,00	72.765.151,00
93	SD Negeri 14 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	-	84.667.012,00	84.667.012,00
94	SD Negeri 17 Muntei	Siberut Barat Daya	1.076.338,00	15.251.000,00	16.327.338,00
95	SD Negeri 18 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	70.183,00	30.000.000,00	30.070.183,00
96	SD Negeri 19 Katurei	Siberut Barat Daya	2.407.688,00	48.373.000,00	50.780.688,00
97	SD Negeri 25 Pasakiat Taileleu	Siberut Barat Daya	205.803,00	6.496.944,00	6.702.747,00
98	SD Negeri 26 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	218.418,00	70.742.103,00	70.960.521,00
99	SD Negeri 27 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	20.520.266,00	7.401.000,00	27.921.266,00
100	SD Negeri 28 Sagulubbeg	Siberut Barat Daya	-	122.794.899,00	122.794.899,00
101	SD Negeri 02 Sigapokna	Siberut Barat	-	20.428.622,00	20.428.622,00

No.	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Rek	Kas di Tangan Bendahara	SALDO AKHIR
102	SD Negeri 05 Simatalu	Siberut Barat	-	50.221.901,00	50.221.901,00
103	SD Negeri 11 Simalegi	Siberut Barat	153.394,00	17.050.000,00	17.203.394,00
104	SD Negeri 14 Simalegi	Siberut Barat	50.914.800,00	34.985.000,00	85.899.800,00
105	SD Negeri 16 Sigapokna	Siberut Barat	955.953,00	88.404.000,00	89.359.953,00
106	SD Negeri 17 Simatalu	Siberut Barat	2.271.927,00	-	2.271.927,00
107	SD Negeri 18 Simalegi	Siberut Barat	147.455,00	44.212.400,00	44.359.855,00
108	SD Negeri 19 Sigapokna	Siberut Barat	-	72.656.200,00	72.656.200,00
109	SD Negeri 22 Simatalu	Siberut Barat	38.902,00	-	38.902,00
110	SD Negeri 24 Sigapokna	Siberut Barat	2.035.313,00	54.994.866,00	57.030.179,00
111	SD Negeri 25 Simatalu	Siberut Barat	2.907.838,00	47.504.678,00	50.412.516,00
112	SD Negeri 26 Simalegi	Siberut Barat	354.686,00	30.090.888,00	30.445.574,00
113	SD Negeri 27 Simatalu	Siberut Barat	-	13.503.665,00	13.503.665,00
114	SD Negeri 28 Simatalu	Siberut Barat	125.000,00	10.000.000,00	10.125.000,00
115	SD Negeri 29 Simatalu	Siberut Barat	87.649,00	10.400.000,00	10.487.649,00
116	SD Negeri 01 Malancan	Siberut Utara	102.152,00	66.829.000,00	66.931.152,00
117	SD Negeri 03 Sotboyak	Siberut Utara	122.605,00	8.110.000,00	8.232.605,00
118	SD Negeri 04 Muara Sikabaluan	Siberut Utara	112.506,00	5.160.000,00	5.272.506,00
119	SD Negeri 06 Malancan	Siberut Utara	709.041,00	25.400.000,00	26.109.041,00
120	SD Negeri 07 Sirilogui	Siberut Utara	-	117.085.251,00	117.085.251,00
121	SD Negeri 08 Muara Sikabaluan	Siberut Utara	228.224,00	5.000.000,00	5.228.224,00
122	SD Negeri 09 Muara Sikabaluan	Siberut Utara	215.030,00	4.712.000,00	4.927.030,00
123	SD Negeri 12 Mongan Poula	Siberut Utara	904.098,00	6.934.198,00	7.838.296,00
124	SD Negeri 15 Bojakan	Siberut Utara	2.914.671,00	76.664.400,00	79.579.071,00
125	SD Negeri 20 Malancan	Siberut Utara	80.000,00	12.387.000,00	12.467.000,00
126	SD Negeri 21 Muara Sikabaluan	Siberut Utara	78.686,00	26.960.000,00	27.038.686,00
127	SD Negeri 23 Bojakan	Siberut Utara	14.096.710,00	36.774.200,00	50.870.910,00
	Jumlah SD		**250.637.371,00**	**4.389.623.095,00**	**4.640.260.466,00**

Rincian saldo kas di bendahara pengeluaran dana BOS SMP sebesar Rp**457.682.135,00** sebagai berikut:

No.	Nama Sekolah	KEC.	Saldo Rek	kas di tangan bendahara	SALDO AKHIR
1	SMP NEGERI 1 PUS	SIKAKAP	0,00	53.345.000,00	53.345.000,00
2	SMP Negeri 2 Sikakap	SIKAKAP	221.966,00	38.392.003,00	38.613.969,00
3	SMP Negeri 3 Sikakap	SIKAKAP	97.500,00	14.420.000,00	14.517.500,00
4	SMP Negeri 1 Pagai Selatan	Pagai Selatan	26.894,00	30.717.102,00	30.743.996,00
5	SMP Negeri 2 Pagai Selatan	Pagai Selatan	235.632,00	3.070.000,00	3.305.632,00
6	SMP Negeri 3 Pagai Selatan	Pagai Selatan	37.510,00	1.604.700,00	1.642.210,00

No.	Nama Sekolah	KEC.	Saldo Rek	kas di tangan bendahara	SALDO AKHIR
7	SMP Negeri 4 Pagai Selatan	Pagai Selatan	143.056,00	6.400.900,00	6.543.956,00
8	SMP Negeri 1 Pagai Utara	Pagai Utara	141.164,00	12.356.812,00	12.497.976,00
9	SMP Negeri 1 Sipora	Sipora Selatan	774.506,00	27.166.966,00	27.941.472,00
10	SMP Negeri 2 Sipora Selatan	Sipora Selatan	32.458,00	4.950.000,00	4.982.458,00
11	SMP NEGERI 1 SIPORA UTARA	Sipora Utara	59.636,00	4.620.000,00	4.679.636,00
12	SMP Negeri 2 Sipora	Sipora Utara	2.722.626,00	40.484.963,00	43.207.589,00
13	SMP NEGERI 1 SIBERUT SELATAN	Siberut Selatan	28.966,00	13.888.716,00	13.917.682,00
14	SMP NEGERI 2 SIBERUT SELATAN	Siberut Selatan	489.500,00	8.403.300,00	8.892.800,00
15	SMP NEGERI 1 SIBERUT TENGAH	Siberut Tengah	8.437.236,00	4.620.000,00	13.057.236,00
16	SMP NEGERI 2 SIBERUT TENGAH	Siberut Tengah	387.874,00	2.251.200,00	2.639.074,00
17	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT DAYA	Siberut Barat Daya	63.779,00	8.000,00	71.779,00
18	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT DAYA	Siberut Barat Daya	452.888,00	10.840.000,00	11.292.888,00
19	SMP NEGERI 1 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	351.158,00	110.376.100,00	110.727.258,00
20	SMP NEGERI 2 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	2.140.524,00	1.546.966,00	3.687.490,00
21	SMP NEGERI 3 SIBERUT BARAT	Siberut Barat	319.704,00	8.045.900,00	8.365.604,00
22	SMP NEGERI 1 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	412.706,00	37.131.000,00	37.543.706,00
23	SMP NEGERI 2 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	138.592,00	2.660.000,00	2.798.592,00
24	SMP NEGERI 3 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	166.598,00	-	166.598,00
25	SMP NEGERI 4 SIBERUT UTARA	Siberut Utara	1.320.034,00	1.180.000,00	2.500.034,00
	JUMLAH SMP		**19.202.507,00**	**438.479.628,00**	**457.682.135,00**

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.3.1.5 Piutang Pajak	**4.811.963.070,00**	**4.405.623.663,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang pajak per 31 Desember 2021 dimana tagihan pajak daerah tersebut sampai dengan tanggal neraca belum dilunasi atau disetorkan wajib pajak ke rekening kas daerah atau bendahara penerimaan yang terinci atas:

NO	Uraian	Per 31 Des 2020	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2021
1	Pajak Hotel	451.703.923,00	0	0	451.703.923,00
2	Pajak Restoran	62.776.800,00	0	0	62.776.800,00
3	Pajak PBB-P2	3.891.142.940,00	545.794.537,00	(139.455.130,00)	4.297.482.347,00
	Jumlah	**4.405.623.663,00**	**545.794.537,00**	**(139.455.130,00)**	**4.811.963.070,00**

Pada tahun 2021 dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) sebanyak 20.336 objek pajak dengan nilai Rp953.922.366,00 namun

yang bisa ditagih sebanyak Rp408.127.829,00 sehingga terdapat penambahan piutang pajak PBB sebesar Rp545.794.537,00, namun terdapat pengurangan piutang PBB sebesar Rp139.455.130,00 dengan adanya piutang PBB 2015 s.d 2020 yang dibayar objek pajak pada tahun 2021.

Saldo piutang pajak 31 Desember 2021 tersebut merupakan jumlah piutang daerah yang Surat Ketetapan Pajaknya telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Hotel

No	Nama	Pajak Hotel (Rp)	Nomor SKPP
1	PT.Internusa Bahagia	158.400.000,00	01
2	PT.Cahaya Bukit Margarabat	111.864.000,00	11
3	PT.Sura Wisata Sirloins	65.280.000,00	10
4	PT.Harta Karun	8.159.923,00	8
5	PT.Internusa Bahagia	108.000.000,00	6
	JUMLAH	**451.703.923,00**	

2. Piutang Pajak Restoran

No	Nama	Pajak Restoran (Rp)	Nomor SKPP
1	PT.Internusa Bahagia	19.800.000,00	02
2	PT.Cahaya Bukit Margarabat	13.156.800,00	12
3	PT.Sura wisata sirloins	8.160.000,00	9
4	PT.Harta Karun	8.160.000,00	7
5	PT.Internusa Bahagia	13.500.000,00	3
	JUMLAH	**62.776.800,00**	

3. Piutang PBB

Berikut rincian Piutang PBB tahun 2021 per kecamatan sebagai berikut:

NO.	NAMA KECAMATAN	POKOK KETETAPAN		REALISASI KETETAPAN		SISA POKOK KETETAPAN	
		SPPT	JUMLAH	SPPT	JUMLAH	SPPT	JUMLAH
1	Pagai Utara	1.399	32.850.412	807	19.394.812	592	13.455.600
2	Sipora Selatan	2.711	83.516.357	2.094	44.974.602	617	38.541.755
3	Siberut selatan	1.928	68.386.838	1.471	38.726.404	457	29.660.434
4	Siberut Utara	1.564	36.583.232	824	14.191.135	740	22.392.097
5	Pagai Selatan	2.572	55.712.281	1.569	32.851.120	1.003	22.861.161
6	Sikakap	1.882	94.682.746	1.166	54.307.146	716	40.375.600
7	Sipora Utara	3.236	402.454.098	1.391	134.270.316	1.845	268.183.782
8	Siberut Barat Daya	2.175	124.682.993	1.526	37.169.890	649	87.513.103
9	Siberut Tengah	1.547	33.181.574	580	11.105.746	967	22.075.828
10	Siberut Barat	1.322	21.871.835	1.297	21.136.658	25	735.177
T O T A L		**20.336,00**	**953.922.366,00**	**12.725,00**	**408.127.829,00**	**7.611,00**	**545.794.537,00**

Adapun kriteria kualitas Piutang PBB tahun 2021 berdasarkan kebijakan akuntansi berbasis akrual dapat di uraikan sebagai berikut:

Sektor	Tahun Pajak	Kriteria Kualitas Piutang (Rp)				
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Piutang atas Pengelolaan oleh Pemda						
	2021	545.794.537,00	0,00	0,00	0,00	545.794.537,00
	2020	0,00	508.354.262,00	0,00	0,00	508.354.262,00
	2019	0,00	241.633.650,00	0,00	0,00	241.633.650,00
	2018	0,00	0,00	102.229.490,00	0,00	102.229.490,00
	2017	0,00	0,00	445.381.472,00	0,00	445.381.472,00
	2016	0,00	0,00	0,00	528.953.007,00	528.953.007,00
	2015	0,00	0,00	0,00	637.630.334,00	637.630.334,00
	2014	0,00	0,00	0,00	701.131.316,00	701.131.316,00
Piutang Pelimpahan Pemerintah Pusat						
	2013	0,00	0,00	0,00	197.821.832,00	197.821.832,00
Perdesaan	2003 s/d 2012	0,00	0,00	0,00	319.755.171,00	319.755.171,00
	s/d 2002	0,00	0,00	0,00	54.754.121,00	54.754.121,00
Jumlah		**545.794.537,00**	**749.987.912,00**	**547.610.962,00**	**2.440.045.781,00**	**4.283.439.192,00**
	2013	0,00	0,00	0,00	23.412.855,00	23.412.855,00
Perkotaan	2003 s/d 2012	0,00	0,00	0,00	15.887.705,00	15.887.705,00
	s/d 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00	**39.300.560,00**
Total		**545.794.537,00**	**749.987.912,00**	**547.610.962,00**	**2.479.346.341,00**	**4.322.739.752,00**

5.3.1.6 Piutang Retribusi	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	7.221.338,00	**97.703.142,00**

Jumlah Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp**7.221.338,00** sedangkan saldo piutang retribusi tahun 2020 tercatat senilai Rp97.703.142,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat pengurangan saldo piutang retribusi sebesar Rp50.080.000,00. Pengurangan saldo piutang retribusi ini dilakukan karena koreksi pada saat audit Badan Pemeriksaan Keuangan karena diketahui terdapat kesalahan pencatatan piutang retribusi tahun sebelumnya, bahwa piutang retribusi senilai Rp50.080.000,00 bukan merupakan retribusi daerah yang harus dibayar oleh wajib retribusi namun jumlah tersebut merupakan pajak (PPN) atas sewa alat berat yang harus dibayar oleh pihak ketiga ke rekening Kas Negara, maka dilakukan koreksi pengurangan terhadap pencatatan nilai piutang retribusi daerah sehingga saldo piutang retribusi pada akhir tahun 2021 menjadi senilai Rp**7.221.338,00**. Saldo piutang retribusi tersebut merupakan tagihan retribusi pelayanan air bersih tahun 2021 yang belum tertagih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rincian piutang retribusi tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

NO	Uraian	Per 31 Des 2020	Penambahan	Pengurangan	Per 31 Des 2021
1	Pajak sewa pemakaian kekayaan daerah oleh TNI untuk kegiatan TMMD pada Dinas PUPR	50.080.000,00	0,00	50.080.000,00	0,00
2	Retribusi pelayanan air bersih TA. 2020 yang belum tertagih oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	47.623.142,00	0,00	40.401.804,00	7.221.338,00
	Jumlah	**97.703.142,00**	**0,00**	**90.481.804,00**	**0,00**

5.3.1.7 Piutang Transfer antar Daerah	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	**6.844.342.051,00**

Piutang Transfer antar Daerah merupakan piutang dana bagi hasil tahun anggaran 2020 sebesar Rp6.844.342.051,00 merupakan piutang bagi hasil pajak provinsi kurang bayar namun pada akhir tahun 2021 piutang tersebut sudah dibayar tanggal 8 Desember 2021 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga per 31 Desember piutang transfer antar daerah bernilai Rp0,00.

5.3.1.8 Piutang Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	390.835.512,36	**390.835.512,36**

Piutang lainnya TA 2021 sebesar Rp**399.935.512,36** Jumlah tersebut merupakan saldo piutang lainnya per 31 Desember 2021 yang belum dibayar hingga akhir tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Piutang	Saldo 31 Des 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Des 2021
	Lainnya	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Bagi Hasil Cukai Dan Tembakau tahun 2010	41.114.436,00	0,00	0,00	41.114.436,00
2	Piutang pihak ke tiga Pemb Kantor Camat Sipora Utara oleh Pagari Wau 2006	57.755.576,36	0,00	0,00	57.755.576,36
3	Piutang pihak ke tiga pembangunan jalan produksi dengan bangunan pelengkap oleh PT.Vandino Karya Perkasa pada Dinas Pertanian tahun 2009	18.289.260,00	0,00	0,00	18.289.260,00
4	Piutang pihak ke tiga pembangunan gedung rawat inap RS oleh PT. Insan KaryaTama tahun 2009	204.451.600,00	0,00	0,00	204.451.600,00
5	Piutang CV Berkat Dinas Pendidikan CV. Berkat tahun 2013	69.224.640,00	0,00	0,00	69.224.640,00
	Jumlah	**390.835.512,36**	**0,00**	**0,00**	**390.835.512,36**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan piutang lainnya terdiri dari:

1. Piutang Bagi Hasil Cukai dan Tembakau, saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp41.114.436,00 merupakan Bagi Hasil Cukai dan Tembakau Rp41.114.436,00 merupakan piutang bagi hasil cukai dan tembakau sejak tahun 2010 sampai sekarang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Piutang Pihak ketiga Pembangunan Kantor Camat Sipora, saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp57.755.576,36 merupakan piutang yang telah tercatat dari tahun 2006 dimana uang yang cair tidak sesuai dengan kondisi fisik bangunan yang ada, yang dilaksanakan oleh Pagari Wau.
3. Piutang Pihak Ketiga Pembangunan Jalan Produksi dengan bangunan pelengkap Dinas Pertanian, saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp18.289.260,00 merupakan kelebihan sisa pembayaran pekerjaan berupa keterlanjuran uang muka yang tidak terpotong dan masuk kerekening pihak ketiga (PT.Vandino Karya Perkasa) tahun 2009.
4. Piutang pihak ketiga pekerjaan pembangunan Gedung Rawat Inap RS, per 31 Desember 2021 sebesar Rp204.451.600 merupakan kelebihan sisa pembayaran pekerjaan berupa keterlanjuran uang muka yang tidak terpotong dan masuk ke rekening pihak ketiga (PT. Insan KaryaTama) tahun 2009.
5. Piutang Dinas Pendidikan, saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp69.224.640,00 merupakan kelebihan sisa pembayaran pekerjaan berupa keterlanjuran uang muka yang tidak terpotong dan masuk ke rekening pihak ketiga (CV. Berkat) tahun 2013.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.3.1.9 Penyisihan Piutang	**(3.786.275.821,25)**	**(3.438.488.266,35)**

Penyisihan piutang untuk tahun 2021 yang diperhitungkan berdasarkan umur piutang adalah sebesar (Rp**3.786.275.821,25**) yang terdapat pada Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari penyisihan piutang PBB-P2, penyisihan piutang pajak hotel dan pajak restoran, penyisihan piutang retribusi dan penyisihan piutang lainnya. Berikut uraian masing-masing penyisihan piutang tahun anggaran 2021 antara lain:

1. Penyisihan Piutang PBB-P2

Sektor	Tahun Pajak	Penyisihan Piutang					Piutang Netto
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah	
Penyisihan Nilai Piutang PBB-P2							
	2021	(2.728.972,69)	-	-	-	(2.728.972,69)	543.065.564,32
	2020	-	(50.835.426,20)	-	-	(50.835.426,20)	457.518.835,80
	2019	-	(24.163.365,00)	-	-	(24.163.365,00)	217.470.285,00
	2018		-	(51.114.745,00)	-	(51.114.745,00)	51.114.745,00
	2017	-	-	(222.690.736,00)	-	(222.690.736,00)	222.690.736,00
	2016	-	-	-	(528.953.007,00)	(528.953.007,00)	-

Sektor	Tahun Pajak	Penyisihan Piutang					Piutang Netto
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah	
	2015	-	-	-	(637.630.334,00)	(637.630.334,00)	-
	2014	-	-	-	(701.131.316,00)	(701.131.316,00)	-
Perdesaan	2013	-	-	-	(197.821.832,00)	(197.821.832,00)	-
	2003-2012	-	-	-	(319.755.171,00)	(319.755.171,00)	-
	s/d 2002		-	-	(54.754.121,00)	(54.754.121,00)	-
Jumlah		**(2.728.972,69)**	**(74.998.791,20)**	**(273.805.481,00)**	**(2.440.045.781,00)**	**(2.791.579.025,89)**	**1.491.860.166,12**
Perkotaan	2013	-	-	-	(23.412.855,00)	(23.412.855,00)	-
	2003-2012	-	-	-	(15.887.705,00)	(15.887.705,00)	-
	s/d 2002	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**-**	**-**	**-**	**(39.300.560,00)**	**(39.300.560,00)**	**-**
Sub Total		**(2.728.972,69)**	**(74.998.791,20)**	**(273.805.481,00)**	**(2.479.346.341,00)**	**(2.830.879.585,89)**	**1.491.860.166,12**

2. Penyisihan Piutang Hotel dan Restoran

Sektor	Tahun	Penyisihan Piutang				
		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah
HOTEL	2008	-	-	-	(451.703.923,00)	(451.703.923,00)
RESTORAN	2008	-	-	-	(62.776.800,00)	(62.776.800,00)
JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**(514.480.723,00)**	**(514.480.723,00)**

3. Penyisihan Piutang Lainnya

Tahun	Penyisihan Piutang				
	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah
2006	-	-	-	(57.755.576,36)	(57.755.576,36)
2009	-	-	-	(18.289.260,00)	(18.289.260,00)
2009	-	-	-	(204.451.600,00)	(204.451.600,00)
2010	-	-	-	(41.114.436,00)	(41.114.436,00)
2013	-	-	-	(69.224.640,00)	(69.224.640,00)
JUMLAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(390.835.512,36)**	**(390.835.512,36)**

		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.3.1.10	Beban Dibayar Dimuka	57.782.258,06	70.416.666,67

Jumlah Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp62.083.333,34 merupakan sewa gedung kantor UPT Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp26.008.064,52 dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp31.774.193,55 dengan rincian sabagai berikut:

No	Uraian	Periode	Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Sewa	Beban Dibayar Dimuka
				(Rp)	(Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Sewa rumah untuk kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah desa Malakopa di Dusun Eruk Paraboat Desa Malakopa Kec. Pagai Selatan selama 1 (satu) tahun	6 Juli 2021 s.d 6 Juli 2022	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah nomor:600/01/UPT-TUAPEJAT/DPUPR-KKM/VII-2021 tanggal 5 Juli 2021	12.000.000,00	6.193.548,39
2	Sewa rumah untuk Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Desa Taikako Kecamatan Sikakap di Dusun Leleu Bukku Desa Taikako	6 September 2021 s.d 6 September 2022	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Nomor: 600/ 03 /UPT-TUAPEJAT/DPUPR-KKM/IX-/2021 tanggal 6 September 2021	12.000.000,00	7.193.548,39
3	Sewa rumah untuk kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sikabaluan Kec. Siberut Utara di Dusun Pokai Desa Muara Sikabaluan Kec. Siberut Utara selama 1 (satu) tahun	6 September 2021 s/d 6 September 2022	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah nomor: 600/ 04 /UPT-TUAPEJAT/DPUPR-KKM/XI-2021 tanggal 6 September 2021	9.000.000,00	5.395.161,29
4	Sewa rumah untuk kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tuapejat Dinas PUPR di Dusun Karang Anyar Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara selama 1 (satu) tahun	6 Juli 2021 s.d 6 Juli 2022	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah nomor:600/ 02 /UPT-Tuapejat/DPUPR-KKM/VII-2021 tanggal 5 Juli 2021	14.000.000,00	7.225.806,45
	Jumlah			**47.000.000,00**	**26.008.064,52**
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Sewa Gedung kantor (sewa rumah) tempat pelayanan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Jln. Raya Tuapejat KM.2 Kec. Sipora Utara	1 Agustus 2021 s.d 14 Juli 2022	kontrak nomor:460/ 53/2021 tanggal 14 Juli 2021	25.000.000,00	13.440.860,2151
2	Sewa Gedung kantor (sewa rumah) tempat gudang kantor Dinas sosial P3A di Dusun Karang Anyar Sipora Jaya Kec. Sipora Utara	1 September 2021 s.d 31 Agustus 2022	Kontrak nomor:490/ 02/SG/DSP3A tanggal 31 Agustus 2021	27.500.000,00	18.333.333,3333
	Jumlah			**52.500.000,00**	**31.774.193,55**
	TOTAL			**99.500.000,00**	**57.782.258,06**

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.3.1.11 Persediaan	**12.297.581.712,13**	**16.184.451.898,29**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan tahun 2021 merupakan bahan pakai habis sebesar Rp**12.297.581.712,13.** Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 tahun 2016 tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah yang ada pada OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Kep. Mentawai dengan Rincian persediaan per OPD 31 Desember 2021 terdapat pada Lampiran 1. Persediaan berdasarkan jenis barang sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	2021	2020
		(Rp)	(Rp)
1	Alat Tulis Kantor	118.883.254,00	182.217.059,00
2	Barang Cetakan	317.136.159,08	468.070.759,00
3	Materai/Prangko	-	690.000,00
4	Bahan Bakar Minyak / Gas	-	234.872.013,00
5	Alat Kodektoran dan Alat Kesehatan	3.574.122.114,00	1.537.380.049,17
6	Obat-obatan dan bahan Kimia	7.423.974.215,05	5.373.546.038,12
7	Bibit Tanaman	-	-
8	Bahan Produksi Ikan	-	-
9	Pupuk/Bahan Kimia	-	-
10	Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12.502.000,00	87.786.610,00
11	Alat Listrik dan Elektronik	2.124.750,00	1.801.913,00
12	Bahan Suku Cadang	55.618.000,00	58.478.000,00
13	Peralatan dan Perlengkapan RT	-	4.250.000,00
14	Makanan dan Minuman	-	1.948.000,00
15	Material Bangunan	-	-
16	Pakaian Khusus dan hari tertentu	34.350.000,00	45.600.000,00
17	Pakaian Olahraga	59.661.000,00	
18	Cendramata	-	-
19	Perabot Kantor	27.152.400,00	
20	Barang yang akan diserahkan kemasyarkat	-	8.187.811.457,00
21	Natura dan Pakan Natura	4.427.230,00	-
22	Bahan Perlengkapan/peralatan Korban Bencana Barang Logistik (BPBD Mentawai)	667.630.590,00	-
	JUMLAH	**12.297.581.712,13**	**16.184.451.898,29**

Rincian jumlah persediaan pada masing-masing OPD sebagai berikut :

NO	OPD	2021	2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	1.013.902.239,00	1.332.173.255,88
3	Dinas Kesehatan	10.039.482.720,05	5.594.769.581,41
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57.143.500,00	58.478.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	730.700,00	322.000,00

NO	OPD	2021	2020
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	667.630.590,00	4.250.000,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	428.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.631.100,00	41.073.013,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	389.457,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	250.163.809,08	318.638.859,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	700.000,00
13	Dinas Perhubungan	0,00	1.948.980.222,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.225.000,00	56.800.000,00
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.223.295,00	12.355.910,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.972.200,00	3.492.500,00
18	Dinas Perikanan		-
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	59.661.000,00	11.250.000,00
20	Sekretariat Daerah	236.000,00	54.408.750,00
21	Inspektorat	0,00	211.640,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.752.640,00	2.785.200,00
23	Badan Keuangan Daerah	98.838.210,00	260.273.310,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
25	Sekretariat DPRD	41.671.519,00	21.595.200,00
26	Kecamatan Siberut Utara	34.350.000,00	34.350.000,00
27	Kecamatan Siberut Tengah	0,00	0,00
28	Kecamatan Siberut Barat	0,00	899.982.000,00
29	Kecamatan Siberut Barat Daya	0,00	0,00
30	Kecamatan Siberut Selatan	0,00	1.199.952.000,00
31	Kecamatan Sipora Utara	0,00	0,00
32	Kecamatan Sipora Selatan	0,00	1.346.323.000,00
33	Kecamatan Pagai Utara	39.950,00	0,00
34	Kecamatan Sikakap	1.435.040,00	0,00
35	Kecamatan Pagai Selatan	145.000,00	2.974.810.000,00
36	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	4.347.200,00	5.660.000,00
JUMLAH		**12.297.581.712,13**	**16.184.451.898,29**

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 tidak termasuk persediaan berupa obat kadaluwarsa/rusak/*expired* pada Dinas Kesehatan sebesar Rp647.050.427,38 dan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp168.288.004,76. Rincian obat kadaluwarsa /rusak/*expired* pada Dinas Kesehatan dan RSUD pada **Lampiran 2**.

5.3.2 Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	96.020.184.798,55	**95.491.405.383,62**

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dilaksanakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi Jangka Panjang tahun 2021 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut:

Investasi Non Permanen	:	0,00	0,00
Investasi Permanen	:	Rp96.020.184.798,55	Rp95.491.405.383,62
Jumlah Investasi Jangka Panjang	:	**Rp96.020.184.798,55**	**Rp95.491.405.383,62**

Adapun penjelasan atas masing-masing jenis investasi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

5.3.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	**0,00**

Pada tahun anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak memiliki Investasi Non Permanen.

5.3.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	96.020.184.798,55	**95.491.405.383,62**

Investasi permanen sebesar Rp**96.020.184.798,55** merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

No	Nama Perusahaan	Jenis Investasi	31 Des 2021 (Rp)	31 Des 2020 (Rp)
1	Bank Nagari	Saham Biasa.	78.578.000.000,00	78.578.000.000,00
2	BPR Sipora	Saham Hak Suara Khusus Sebanyak 250.000 Lembar Saham	5.452.263.128,61	4.953.973.458,03
3	BPR Pagai Utara Selatan (PUS)	Saham Biasa Sebanyak 250.000 Lembar Saham	1.042.338.460,94	1.011.848.716,59
4	Perusahaan Derah (Perusda) Kemakmuran Mentawai	Investasi jangka panjang	10.947.583.209,00	10.947.583.209,00
	Total		**96.020.184.798,55**	**95.491.405.383,62**

Dengan Saham Bank Nagari sebagai berikut:

No.	No. Surat Kolektif Saham	Tanggal	Nominal
1	A. 000010	20 September 2007	32.909.000.000,00
2	A. 000030	3 September 2009	3.236.000.000,00

No.	No. Surat Kolektif Saham	Tanggal	Nominal
3	A. 000049	6 September 2010	3.727.000.000,00
4	A. 000064	18 April 2010	3.440.000.000,00
5	A. 000099	10 Januari 2013	12.743.000.000,00
6	A. 000129	22 Januari 2014	2.523.000.000,00
7	A. 000143	10 September 2014	18.000.000.000,00
8	A. 000186	01 Juli 2016	2.000.000.000,00
	JUMLAH	**JUMLAH**	**78.578.000.000,00**

Penyertaan modal ini telah memberikan kontribusi dalam bentuk setoran laba dan dividen tunai sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp12.591.521.757,00, yang merupakan deviden penyertaan modal pada Bank Nagari.

Sedangkan deviden penyertaan modal pada BPR Sipora dan BPR PUS tidak ada karena modal dasar BPR Sipora dan BPR Pagai Utara Selatan (PUS) belum memenuhi standar ketentutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penilaian saldo investasi permanen pada Bank Nagari menggunakan metode biaya *(cost method)* karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai atas Bank Nagari dibawah 20%. Sedangkan penilaian saldo investasi permanen pada PT BPR Sipora, PT. BPR PUS, dan Perusahaan Daerah Kemakmuran Mentawai menggunakan metode ekuitas *(equity method*) karena kepemilikan diatas 20%.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2017 mendirikan Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai. Sesuai dengan Akta Notaris Nomor 47 tanggal 28 Desember 2017, bentuk badan hukum perusahaan tersebut adalah Perseroan Terbatas dengan nama PT.Kemakmuran Mentawai. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyertakan modal pada tahun 2017 sebesar Rp200.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Kemakmuran Mentawai. Pada APBD Tahun Anggaran 2019 penyertaan modal dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00 dengan realisasi pada akhir tahun 2019 sebesar Rp6.000.000.000,00 atau terealisasi 100%, namun dari penyertaan modal tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mendapat deviden, sedangkan tahun anggaran 2021 tidak ada penambahan penyertaan modal pada PT.Kemakmuran Mentawai.

Terdapat kenaikan nilai investasi permanen pada BPR Sipora per 31 Desember 2021. Kenaikan nilai investasi dihitung berdasarkan metode ekuitas *(equity method),* yaitu nilai investasi atas aset bersih dengan memperhitungkan saldo laba dan proporsi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan laporan keuangan BPR Sipora tahun 2021, total ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp**5.452.263.128,61** dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian	% Kepemilikan	Nilai (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai	99,01%	2.500.000.000,00
2	Penyertaan Modal KSUKB	0,99%	25.000.000,00

NO	Uraian	% Kepemilikan	Nilai (Rp)
3	Jumlah Modal Disetor	100%	2.525.000.000,00
4	Saldo Laba TA 2020		503.272.063,00
5	Bagian laba pemda (1 x 4)		498.289.669,58
6	Total Equitas TA 2020		4.953.973.459,03
7	Nilai Investasi Pemerintah Kab, Kepulauan Mentawai (99,01%) (5+6)		**5.452.263.128,61**

Pada BPR PUS juga terdapat kenaikan nilai investasi permanen per 31 Desember 2021. Kenaikan nilai investasi dihitung berdasarkan metode ekuitas (*equity method*) dengan total ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp**1.042.338.460,94** dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

No	Uraian	% Kepemilikan	Nilai (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai	99,01%	2.500.000.000,00
2	Penyertaan Modal KSUKB	0,99%	25.000.000,00
3	Jumlah Modal Disetor	100%	2.525.000.000,00
4	Saldo Laba TA 2021		30.794.611,00
5	Bagian laba pemda (1x4)		30.489.744,35
6	Total Equitas TA 2020		1.011.848.716,59
7	Nilai Investasi Pemerintah Kab, Kepulauan Mentawai (99,01%) (5+6)		**1.042.338.460,94**

Sedangkan Perusda Kemakmuran Mentawai mengalami penurunan nilai investasi permanen per 31 Desember 2021 yang dihitung berdasarkan metode ekuitas (*equity method*) dengan total ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp**10.947.583.209,00** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2020
1	Saldo investasi permanen per 31 Desember 2019	12.419.112.154,00
2	Persentasi Kepemilikan	100,00%
3	Laba/Rugi Perusda Tahun Buku	(1.471.528.945,00)
4	Bagian Laba/rugi Pemkab Kep. Mentawai (2 x 3)	(1.471.528.945,00)
5	Tambahan penyertaan modal TA	0
6	Saldo investasi permanen per 31 Desember 2020 (1+4+5)	**10.947.583.209,00**

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.3.3 Aset Tetap	**1.758.772.007.433,53**	**1.687.835.701.079,19**

Khusus untuk kebijakan akuntansi yang terkait dengan Akuntansi Aset Tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.758.772.007.433,53 mengalami kenaikan sebesar Rp70.936.306.354,34 atau 4,03% dari tahun 2020 sebesar Rp 1.687.835.701.079,19 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal Per 31/12/2020	Saldo Akhir Per 31/12/2021
1	Tanah	80.167.437.020,00	81.645.374.920,00
2	Peralatan dan Mesin	354.804.302.232,30	373.213.406.608,30
3	Gedung dan Bangunan	642.970.806.097,47	665.360.403.072,94
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.141.199.238.936,03	1.339.750.739.736,03
5	Aset Tetap Lainnya	18.946.541.582,00	20.580.681.404,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	128.399.475.260,00	52.955.574.094,00
7	Akumulasi Penyusutan	(678.652.100.048,61)	(774.734.172.401,74)
	Jumlah	**1.687.835.701.079,19**	**1.758.772.007.433,53**

Nilai perolehan aset tetap per 01 Januari 2021	Rp	2.366.487.801.127,80
Belanja Modal	Rp	164.639.582.130,00
Mutasi Tambah Tahun 2021	Rp	136.497.632.165,47
Mutasi Kurang 2021	Rp	(134.118.835.588,00)
Aset Tetap per 31 Desember 2021	Rp	2.533.506.179.835,27

Adapun saldo aset tetap berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Per 31 Desember 2021 sesuai nilai perolehan adalah sebagai berikut:
Penjelasan pada setiap pos-pos aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

No	OPD	Saldo Awal Per 1-1-2021	Realisasi Belanja Modal 2021	Penyesuaian/ Koreksi 2021 Tambah	Penyesuaian/ Koreksi 2021 Kurang	Saldo Akhir Per 31-12-2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	313.893.253.114,23	20.815.138.355,00	11.060.671.943	(6.117.137.435,00)	339.651.925.977,23
2	Dinas Kesehatan	244.380.773.928,50	18.609.897.771,00	6.360.749.307	(3.762.706.765,00)	265.588.714.241,50
3	Rumah Sakit Umum Daerah	65.054.429.780,00	1.907.006.098,00	-	(85.290.000,00)	66.876.145.878,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	939.821.045.204,65	110.373.391.437,00	107.726.248.626	(105.497.320.272,00)	1.052.423.364.995,65
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	139.096.442.403,42	1.050.647.655,00	6.741.410.474	(3.290.195.774,00)	143.598.304.758,42
6	Kantor Kesbangpol	1.711.652.084,00	-	-	-	1.711.652.084,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran	5.488.187.570,00	49.999.000,00	-	(840.000,00)	5.537.346.570,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.951.837.935,00	430.075.557,00	89.860.944	(318.183.983,00)	4.153.590.453,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81.257.611.097,00	2.458.664.700,00	1.573.010.734	(8.643.700.000,00)	76.645.586.531,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.318.242.422,00	-	-	(101.120.000,00)	5.217.122.422,00
11	Dinas Kependudukan dan Capil	2.834.649.505,00	104.940.000,00	106.455.544	-	3.046.045.049,00

No	OPD	Saldo Awal Per 1-1-2021	Realisasi Belanja Modal 2021	Penyesuaian/ Koreksi 2021 Tambah	Penyesuaian/ Koreksi 2021 Kurang	Saldo Akhir Per 31-12-2021
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	9.371.746.328,00	246.854.918,00	28.365.500	(192.709.000,00)	9.454.257.746,00
13	Dinas Perhubungan	54.999.192.245,00	2.470.595.796,00	349.420.430	(94.868.000,00)	57.724.340.471,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.156.178.021,00	66.191.340,00	238.510.000	(2.370.000,00)	6.458.509.361,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.963.112.425,00	7.813.500,00	17.651.040	(229.087.992,00)	7.759.488.973,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.514.899.207,00	-	-	(804.760.404,00)	1.710.138.803,00
17	Dinas Perikanan	44.212.355.637,00	302.957.800,00	364.380.981	(15.100.000,00)	44.864.594.418,47
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	24.271.140.585,00	-	-	(463.570.000,00)	23.807.570.585,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	45.708.946.026,00	3.079.351.167,00	39.646.000	(614.866.323,00)	48.213.076.870,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	167.160.448.177,00	136.400.000,00	58.038.300	(5.500.000,00)	167.349.386.477,00
21	Sekretariat Daerah	107.215.046.179,00	435.303.862,00	1.706.577.342	(1.408.361.700,00)	107.948.565.683,00
22	Sekretariat DPRD	15.103.066.776,00	656.459.000,00	-	(1.139.187.655,00)	14.620.338.121,00
23	Kecamatan Pagai Utara	1.775.159.844,00	56.899.000,00	-	-	1.832.058.844,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	6.250.977.880,00	19.030.000,00	7.200.000	(204.382.900,00)	6.072.824.980,00
25	Kecamatan Sipora Utara	5.364.377.935,00	22.850.000,00	-	(16.494.500,00)	5.370.733.435,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	5.396.026.774,00	37.488.000,00	-	(41.000.000,00)	5.392.514.774,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	4.040.025.841,00	36.579.000,00	-	-	4.076.604.841,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	3.399.852.795,00	-	29.435.000	-	3.429.287.795,00
29	Kecamatan Siberut Utara	4.226.979.994,00	10.991.000,00	-	-	4.237.970.994,00
30	Kecamatan Siberut Barat	2.431.809.768,00	-	-	-	2.431.809.768,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	2.513.594.250,00	149.248.000,00	-	(20.114.600,00)	2.642.727.650,00
32	Kecamatan Sikakap	1.950.604.830,00	-	-	-	1.950.604.830,00
33	Inspektorat	3.808.712.977,00	96.746.178,00	-	(21.000.000,00)	3.884.459.155,00
34	Bappeda	17.715.993.105,00	93.590.000,00	-	-	17.809.583.105,00
35	BKD	11.544.879.894,00	914.472.996,00	-	(853.628.285,00)	11.605.724.605,00
36	BKPSDM	8.584.548.591,00	-	-	(175.340.000,00)	8.409.208.591,00
	Jumlah	**2.366.487.801.127,80**	**164.639.582.130,00**	**136.497.632.165,00**	**(134.118.835.588,00)**	**2.533.506.179.835,27**

Penjelasan pada setiap pos-pos aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

5.3.3.1 Tanah	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	81.645.374.920,00	**80.167.437.020,00**

Saldo aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp81.645.374.920,00 mengalami penambahan sebesar Rp1.477.937.900,00 atau (1,81)% dari tahun 2020 sebesar Rp80.167.437.020,00 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :		
Belanja Modal Tahun 2021	Rp	0,00
Hibah	Rp	239.438.000,00
Koreksi Kurang Catat Tanah	Rp	1.143.451.900,00
Mutasi Antar OPD	Rp	230.000.000,00
Belanja Modal dari KIB C ke KIB A	Rp	100.048.000,00
Jumlah Mutasi Penambahan	**Rp**	**1.712.937.900,00**
Mutasi Pengurangan :		
Mutasi Tanah Antar OPD	Rp	230.000.000,00
Hibah Tanah ke Desa	Rp	5.000.000,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	**Rp**	**235.000.000,00**
Jumlah Bersih Mutasi	**Rp**	**1.477.937.900,00**

Dari rincian tersebut diatas dapat menggambarkan proses penambahan dan pengurangan aset tetap tanah sebesar **(Rp1.477.937.900,00).**

Penambahan Tanah sebesar Rp1.712.937.900,00 diantaranya sebagai berikut :

1. Hibah sebesar Rp239.438.000,00 diantaranya sebagai berikut :

NO	OPD	NILAI
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	196.075.000,00
2	DPMDP2KB	13.928.000,00
3	Kecamatan Siberut Tengah	29.435.000,00
JUMLAH		**239.438.000,00**

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp196.075.000,00 berupa Tanah Kantor Desa Bukit Pamewa seluas 6.325 m² Penggunaannya untuk Gedung Akademi Komunitas Mentawai sesuai dengan Surat dari Desa Bukit Pamewa Nomor : 590/211/PEMDES-BP/VII-2021 tanggal 30 Juli 2021Perihal Kesediaan Menghibahkan Tanah Perkantoran.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perlindungan Penduduk dan Keluarga berencana senilai Rp13.928.000,00 berupa sebagai berikut :

No.	Uraian	Unit	Luas	Nilai	No. Surat Pernyataan Hlbah
1	Balai KB Kec. Sipora Selatan	1	600 m²	7.200.000,00	127/SPHT/KES/IV-2016 tanggal 3 Maret 2016
2	Balai KB Kec. Pagai Selatan	1	720 m²	2.088.000,00	Tanggal 12 Agustus 2014
3	Balai KB Kec. Siberut Barat	1	600 m²	1.740.000,00	BA Penyerahan Lahan Tanggal 27 Januari 2017
4	Balai KB Kec. Siberut Tengah	1	600 m²	1.740.000,00	17/553/SBT-KKM/2018 tanggal 21 September 2018
5	Balai KB Kec. Siberut Barat Daya	1	400 m²	1.160.000,00	BA Serah terima tanah tanggal 26 April 2015
	T O T A L			**13.928.000,00**	

- Kecamatan Siberut Tengah berupa Tanah pada Kantor Camat Siberut Tengah dan Rumah Dinas Camat sebanyak 1 persil dengan nilai perolehan Rp29.435.000,00 dengan Luas 10150 m² beralamat di Desa Saibi Samukop.

2. Koreksi kurang catat tanah sebesar Rp1.143.451.900,00 diantaranya sebagai berikut :

NO	OPD	NILAI
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	285.949.200,00
2	Dinas Kesehatan	11.414.400,00
3	Dinas Perwaskim	561.200.000,00
4	BPBD	219.650.000,00
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	58.038.300,00
6	Kecamatan Sipora Selatan	7.200.000,00
JUMLAH		**1.143.451.900,00**

- Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp285.949.200,00 diantaranya sebagai berikut :

NO	NAMA SEKOLAH	Unit	Luas	Harga Perolehan (Aset Tetap)	Asal Usul	Ket	No Dokumen
1	SMPN 1 Sipora Utara (Betumonga)	1	17100	205.200.000,00	Hibah	Harga Berdasarkan NJOP	Sertifikat No AA 0282913 tanggal 23 Oktober 2020
2	SMPN 2 Sipora Selatan (Bosua)	1	3507	29.458.800,00	Hibah	Harga Berdasarkan NJOP	Sertifikat No AA 0282911 tanggal 23 Oktober 2020
3	SMPN 2 Sipora Selatan (Asrama Bosua)	1	1224	10.281.600,00	Hibah	Harga Berdasarkan NJOP	Sertifikat No AA 0282903 tanggal 16 Oktober 2020
4	SMPN 2 Sipora Selatan (Rumdis I Bosua)	1	647	5.434.800,00	Hibah	Harga Berdasarkan NJOP	Sertifikat No AA 0282919 tanggal 16 Oktober 2020
5	SMPN 2 Sipora Selatan (Rumdis II Bosua)	1	465	3.906.000,00	Hibah	Harga Berdasarkan NJOP	Sertifikat No AA 0282906 tanggal 16 Oktober 2020
6	SDN 20 Mara	1	1198	14.376.000,00	Hibah	Harga Berdasarkan NJOP	Sertifikat No AA 0282915 tanggal 16 Oktober 2020
7	SDN 21 Goiso Oinan (Gedung I)	1	2296	14.796.000,00	Hibah	Harga Berdasarkan NJOP	Sertifikat No AA 0282974 tanggal 08 Januari 2021

NO	NAMA SEKOLAH	Unit	Luas	Harga Perolehan (Aset Tetap)	Asal Usul	Ket	No Dokumen
8	SDN 21 Goiso Oinan (Gedung II)	1	1233	2.496.000,00	Hibah	Harga Berdasarkan NJOP	Sertifikat No AA 0282982 tanggal 08 Januari 2021
	TOTAL			**285.949.200,00**		**Ket**	

- Pada dinas Kesehatan sebesar Rp11.414.400,00 diantaranya sebagai berikut :

NO	NAMA	JLH	HARGA	LUAS	ASAL-USUL	TAHUN	KET	No Dokumen
1	Tanah Kantor Poskesdes Nemnem Leleu	1	8.256.000	688	Hibah	2021	Harga sesuai NJOP	Sertifikat No AA 0282924 tanggal 23 Oktober 2020
2	Tanah Kantor Pustu Katiet	1	3.158.400	376	Hibah	2021	Harga sesuai NJOP	Sertifikat No AA 0282922 tanggal 23 Oktober 2020
	TOTAL		**11.414.400**					

- Pada Dinas Perwaskim sebesar Rp561.200.000,00 diantaranya sebagai berikut :

No	NAMA	Unit	Harga Satuan	Luas	Asal usul	Ket	No Dokumen
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1	561.200.000,00	24000	Hibah	Harga sesuai NJOP	Sertifikat No AM 867621 tanggal 25 Mei 1999

- Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp219.650.000,00 berupa Tanah Hibah Luas 9550 M Sertfikat masih atas nama orang pribadi yang telah di hibahkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp58.038.300,00 berupa Tanah untuk Sentra Industri Kecil Menengah Lokasi Betumonga-Teraet dengan Luas 9837 dengan nomor Dokumen Sertifikat AA 0282965 tanggal 08 Januari 2021.

- Pada Kecamatan Sipora Selatan sebesar Rp7.200.000,00 berupa Tanah Kantor Desa Sioban dengan Luas 360 M.

3. Mutasi antar OPD senilai Rp230.000.000,00 berupa Tanah dari Pencatatan pada Dinas Pekekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa hibah tanah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp230.000.000,00 untuk Tanah Akademi Komunitas Kepulauan Mentawai dengan Nomor Sertifikat BT 017009 tanggal 26 Oktober 2016.

4. Reklasifikasi Belanja Modal dari KIB C ke KIB A senilai Rp100.048.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Pembelian Tanah SD Negeri 01 Sioban.

Sedangkan mutasi kurang aset tanah sebesar Rp235.000.000,00 diantaranya :

1. Dinas Pekekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa hibah tanah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp230.000.000,00 untuk Tanah Akademi Komunitas Kepulauan Mentawai.

2. Kecamatan Siberut Selatan berupa Hibah Tanah Kecamatan Siberut Selatan ke Desa Saliguma dengan luas 500 m² dengan nilai perolehan sebesar Rp5.000.000,00 beralamat di Desa malibagbag saliguma.

Rincian Aset Tetap Tanah Tahun 2021 sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2021
1.3.1.01.01	**TANAH PERSIL**	**28.514.478.200,00**	**1.712.937.900,00**	**(235.000.000)**	**29.992.416.100,00**
1.3.1.01.01.01	Tanah Bangunan Perumahan/GTempat Tinggal	1.049.346.000,00	561.200.000	-	1.610.546.000,00
1.3.1.01.01.02	Tanah Untuk Bangunan GedPerdagangan/Perusahaan	5.313.482.500,00	-	-	5.313.482.500,00
1.3.1.01.01.03	Tanah Untuk Bangunan Industri	65.019.500,00	58.038.300	-	123.057.800,00
1.3.1.01.01.04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	22.086.630.200,00	1.093.699.600	(235.000.000)	22.945.329.800,00
1.3.1.01.02	**TANAH NON PERSIL**	**18.869.893.820,00**	**0,00**	**-**	**18.869.893.820,00**
1.3.1.01.02.02	Tanah Kering	17.494.718.320,00	-	-	17.494.718.320,00
1.3.1.01.02.03	Tanah Perkebunan	1.375.175.500,00	-	-	1.375.175.500,00
1.3.1.01.03	**LAPANGAN**	**32.783.065.000,00**	**0,00**	**-**	**32.783.065.000,00**
1.3.1.01.03.01	Tanah Lapangan Olah Raga	248.000.000,00	-	-	248.000.000,00
1.3.1.01.03.03	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	0,00	-	-	-
1.3.1.01.03.06	Tanah Lapangan Terbang	0,00		-	-
1.3.1.01.03.07	Tanah Untuk Jalan	30.924.620.000,00		-	30.924.620.000,00
1.3.1.01.03.08	Tanah Untuk Bangunan Air	2.430.000,00	-	-	2.430.000,00
1.3.1.01.03.10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan	887.160.000,00	0,00	-	887.160.000,00
1.3.1.01.03.12	Tanah Untuk Makam	202.055.000,00	-	-	202.055.000,00
1.3.1.01.03.13	Tanah Untuk Taman	154.800.000,00	-	-	154.800.000,00
1.3.1.01.03.17	Tanah Kampung	364.000.000,00	-	-	364.000.000,00
	JUMLAH	**80.167.437.020,00**	**1.712.937.900,00**	**(235.000.000)**	**81.645.374.920,00**

Dari jumlah aset tanah secara keseluruhan terdapat tanah yang sudah mempunyai sertifikat yaitu senilai Rp14.953.964.520,00 dengan luas tanah 944.247 m², sedangkan tanah yang belum mempunyai sertifikat bernilai sebesar Rp51.671.829.400,00 dengan luas tanah 6.036.317,50m², selain itu terdapat aset tanah yang masih bermasalah seluas 909.363 m² pada Sekretariat Daerah yang diperoleh dari hibah masyarakat pada tahun 2014 senilai Rp15.019.581.000,00 yang berlokasi mulai dari depan kantor PLN Tuapejat sampai ke Jalan Susteran. Rincian terlampir pada **Lampiran 3.**

Adapun saldo aset tetap berupa tanah berdasarkan OPD per 31 Desember 2021 adalah :

No	OPD	Saldo Awal Per 01 Januari 2021	Realisasi Belanja Modal 2021	Penyesuaian/ Koreksi 2021		Saldo Akhir Per 31 Des 2021
				Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.967.636.500,00	-	812.072.200,00	-	7.779.708.700,00

No	OPD	Saldo Awal Per 01 Januari 2021	Realisasi Belanja Modal 2021	Penyesuaian/ Koreksi 2021		Saldo Akhir Per 31 Des 2021
				Tambah	Kurang	
2	Dinas Kesehatan	2.348.878.500,00	-	11.414.400,00	-	2.360.292.900,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1.620.000.000,00	-	-	-	1.620.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.610.410.700,00	-	-	(230.000.000,00)	31.380.410.700,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.035.572.000,00	-	561.200.000,00	-	1.596.772.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencanan Daerah	0,00	-	219.650.000,00	-	219.650.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	-	13.928.000,00	-	13.928.000,00
8	Dinas Perhubungan	1.044.104.120,00	-	-	-	1.044.104.120,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	887.160.000,00	-	-	-	887.160.000,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.500.000,00	-	-	-	14.500.000,00
11	Dinas Perikanan	1.967.118.000,00	-	-	-	1.967.118.000,00
12	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	330.973.200,00	-	-	-	330.973.200,00
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.840.005.500,00	-	-	-	6.840.005.500,00
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	348.450.000,00	-	58.038.300,00	-	406.488.300,00
15	Sekretariat Daerah	21.043.394.000,00	-	-	-	21.043.394.000,00
16	Sekretariat DPRD	170.350.000,00	-	-	-	170.350.000,00
17	Kecamatan Pagai Utara	59.000.000,00	-	-	-	59.000.000,00
18	Kecamatan Sipora Selatan	940.060.000,00	-	7.200.000,00	-	947.260.000,00
19	Kecamatan Sipora Utara	1.148.000.000,00	-	-	-	1.148.000.000,00
20	Kecamatan Siberut Selatan	516.000.000,00	-	-	(5.000.000,00)	511.000.000,00
21	Kecamatan Siberut Barat Daya	55.000.000,00	-	-	-	55.000.000,00
22	Kecamatan Siberut Tengah	0,00	-	29.435.000,00	-	29.435.000,00
23	Kecamatan Siberut Utara	577.224.500,00	-	-	-	577.224.500,00
24	Kecamatan Siberut Barat	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00
25	Kecamatan Pagai Selatan	42.000.000,00	-	-	-	42.000.000,00
26	Kecamatan Sikakap	292.500.000,00	-	-	-	292.500.000,00
27	Inspektorat	63.300.000,00	-	-	-	63.300.000,00
28	Bappeda	71.700.000,00	-	-	-	71.700.000,00
29	BKD	59.100.000,00	-	-	-	59.100.000,00
30	BKPSDM	95.000.000,00	-	-	-	95.000.000,00
	Jumlah	**80.167.437.020,00**	**0,00**	**1.712.937.900,00**	**(235.000.000)**	**81.645.374.920,00**

5.3.3.2 Peralatan dan mesin	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	373.213.406.608,30	**354.804.302.232,30**

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp373.213.406.608,30 dan mengalami kenaikan sebesar Rp18.409.104.376,00 atau 4.93% dari tahun 2020 sebesar Rp354.804.302.232,30, dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :			
-	Belanja Modal Tahun 2021	Rp	25.876.770.459,00
-	Reklasifikasi dari KIB C ke KIB B	Rp	74.815.600,00
-	Hibah dari Kementerian	Rp	1.190.185.432,00
-	Mutasi Masuk Antar OPD	Rp	785.887.000,00
	Jumlah Mutasi Penambahan	**Rp**	**27.927.658.491,00**
Mutasi Pengurangan :			
-	Reklasifikasi ke Ekstra	Rp	2.242.729.487,00
-	Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp	658.726.590,00
-	Reklasifikasi ke KIB C	Rp	48.380.000,00
-	Reklasifikasi ke KIB D	Rp	44.262.000,00
-	Reklasifikasi ke KIB E	Rp	404.057.496,00
-	Perubahan Kondisi Aset tetap dari Baik ke Rusak Berat	Rp	4.671.818.237,00
-	Penghapusan BMD Lelang 2021	Rp	526.485.150,00
-	Mutasi antar OPD	Rp	785.887.000,00
-	Pemusnahan BMD yang bernilai O dari Aset Tetap	Rp	136.208.155,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan	**Rp**	**9.518.554.115,00**
	Jumlah Bersih Mutasi	**Rp**	**18.409.104.376,00**

Dari rincian tersebut diatas menggambarkan proses kenaikan dan pengurangan aset tetap pada peralatan dan mesin sebesar Rp18.409.104.376,00 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

1. Penambahannya dari belanja modal bersumber dari APBD TA 2021 Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp25.876.770.459,00

2. Reklasifikasi dari KIB C ke KIB B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp74.815.600,00 dengan rincian sebeagai berikut :

No.	Nama Barang	Unit	Harga Perolehan (Satuan)	JUMLAH
1	- Meja 1/2 Biro	2	1.529.000,00	3.058.000,00
2	- Lemari Buku	2	1.870.000,00	3.740.000,00
3	- Meja 1/2 Biro	2	1.529.000,00	3.058.000,00
4	- Lemari Buku	2	1.870.000,00	3.740.000,00
5	- Meja 1/2 Biro	2	1.529.000,00	3.058.000,00

No.	Nama Barang	Unit	Harga Perolehan (Satuan)	JUMLAH
6	- Lemari Buku	2	1.870.000,00	3.740.000,00
7	- Meja 1/2 Biro	2	1.529.000,00	3.058.000,00
8	- Lemari Buku	2	1.870.000,00	3.740.000,00
9	- Meja 1/2 Biro	2	1.529.000,00	3.058.000,00
10	- Lemari Buku	2	1.870.000,00	3.740.000,00
11	- Meja 1/2 Biro	2	1.694.000,00	3.388.000,00
12	- Lemari Buku	2	2.805.000,00	5.610.000,00
13	- Meja 1/2 Biro	2	2.208.800,00	4.417.600,00
14	- Lemari Panel Kaca	2	2.750.000,00	5.500.000,00
15	- Meja 1/2 Biro	2	2.530.000,00	5.060.000,00
16	- Lemari Panel Kaca	2	3.300.000,00	6.600.000,00
17	Lemari Besi	2	3.300.000,00	6.600.000,00
18	Lemari Buku	1	1.750.000,00	1.750.000,00
19	Lemari Buku	1	1.900.000,00	1.900.000,00
TOTAL				**74.815.600,00**

3. Hibah dari Kementerian ke beberapa OPD sebesar Rp1.190.185.432,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	907.140.000,00
2	Dinas Kesehatan	265.394.392,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.651.040,00
	TOTAL	**1.190.185.432,00**

a. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp907.140.000,00 berupa :

No	Uraian	Jumlah
1	Dana TIK SD	465.490.000,00
2	Dana TIK SMP	441.650.000,00
TOTAL		907.140.000,00

- Dana TIK SD senilai 465.490.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
	Nama Sekolah	**: SDN 13 Muara Siberut**			
1	Axio Chromebook	15	UNIT	5.800.000,00	87.000.000,00
2	Axio Konektor HDMI	1	UNIT	198.000,00	198.000,00
3	Infocus Proyektor	1	UNIT	4.600.000,00	4.600.000,00
4	Dlink Modem Router	1	UNIT	1.300.000,00	1.300.000,00
	Nama Sekolah	**: SDN 09 Muara Sikabaluan**			
1	Axio Chromebook	15	UNIT	5.800.000,00	87.000.000,00

NO	NAMA BARANG	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH
2	Axio Konektor HDMI	1	UNIT	198.000,00	198.000,00
3	Infocus Proyektor	1	UNIT	4.600.000,00	4.600.000,00
4	Dlink Modem Router	1	UNIT	1.300.000,00	1.300.000,00
	Nama Sekolah	**: SDN 08 MATOBE**			
1	Axio Chromebook	15	UNIT	5.800.000,00	87.000.000,00
2	Axio Konektor HDMI	1	UNIT	198.000,00	198.000,00
3	Infocus Proyektor	1	UNIT	4.600.000,00	4.600.000,00
4	Dlink Modem Router	1	UNIT	1.300.000,00	1.300.000,00
	Nama Sekolah	**: SDN 05 KATURAI**			
1	Axio Chromebook	15	UNIT	5.800.000,00	87.000.000,00
2	Axio Konektor HDMI	1	UNIT	198.000,00	198.000,00
3	Infocus Proyektor	1	UNIT	4.600.000,00	4.600.000,00
4	Dlink Modem Router	1	UNIT	1.300.000,00	1.300.000,00
	Nama Sekolah	**: SDN 13 TUAPEJAT**			
1	Axio Chromebook	15	UNIT	5.800.000,00	87.000.000,00
2	Axio Konektor HDMI	1	UNIT	198.000,00	198.000,00
3	Infocus Proyektor	1	UNIT	4.600.000,00	4.600.000,00
4	Dlink Modem Router	1	UNIT	1.300.000,00	1.300.000,00
JUMLAH					**465.490.000,00**

- Dana TIK SMP senilai Rp441.650.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	HARGA SAT	UNIT	JLH ASET TETAP
SMPN 2 SIB. SELATAN				
1	Zirexcrombook	5.520.000	15	82.800.000,00
2	View Sonic	4.450.000	1	4.450.000,00
3	Wireless Router	940.000	1	940.000,00
4	Zirex Conector	140.000	1	140.000,00
SMPN 2 SIB. BARAT DAYA				
1	Zirexcrombook	5.520.000	15	82.800.000,00
2	View Sonic	4.450.000	1	4.450.000,00
3	Wireless Router	940.000	1	940.000,00
4	Zirex Conector	140.000	1	140.000,00
SMPN 2 SIB BARAT				
1	Zirexcrombook	5.520.000	15	82.800.000,00
3	View Sonic	4.450.000	1	4.450.000,00
2	Wireless Router	940.000	1	940.000,00
4	Zirex Conector	140.000	1	140.000,00
SMPN 3 SIB BARAT				
1	Zirexcrombook	5.520.000	15	82.800.000,00
3	View Sonic	4.450.000	1	4.450.000,00
2	Wireless Router	940.000	1	940.000,00
4	Zirex Conector	140.000	1	140.000,00
SMPN 2 SIPORA				
1	Zirexcrombook	5.520.000	15	82.800.000,00
3	View Sonic	4.450.000	1	4.450.000,00
2	Wireless Router	940.000	1	940.000,00
4	Zirex Conector	140.000	1	140.000,00
TOTAL				**441.650.000,00**

b. Dinas Kesehatan Hibah dari Kementerian Kesehatan senilai Rp265.394.392,00 berupa :

No.	URAIAN	unit	Harga Satuan	Jumlah
A	**BM ALAT ULTRA SONOGRAFI**			
1	PUSK MAPADEGAT	1	74.990.000,00	74.990.000,00
2	PUSK MUARA SIBERUT	1	74.990.000,00	74.990.000,00
3	PUSK SIKABAUAN	1	74.990.000,00	74.990.000,00
B	**BM LANSIA KIT (DANA DIPA APBN 2021)**			
1	PUSK SIGAPOKNA	1	353.875,00	353.875,00
2	PUSK MAPADEGAT	1	353.875,00	353.875,00
3	PUSK SIKABALUAN	1	353.875,00	353.875,00
4	PUSK SAREREKET	1	353.875,00	353.875,00
5	PUSK SIMATALU	1	353.875,00	353.875,00
6	PUSK SAUMANGANYA	1	353.875,00	353.875,00
7	PUSK BOSUA	1	353.875,00	353.875,00
8	PUSK SAIBI SAMUKOP	1	353.875,00	353.875,00
9	PUSK BULASAT	1	353.875,00	353.875,00
10	PUSK MALAKOPA	1	353.875,00	353.875,00
11	PUSK SIOBAN (PUSTU SAGITCI)	1	353.875,00	353.875,00
12	PUSK SIOBAN	1	353.870,00	353.870,00
C	**BM BUKU LANSIA KIT (DANA DIPA APBN 2021)**			
1	PUSK MAPADEGAT	250	8.004,00	2.001.000,00
2	PUSK SIOBAN	250	8.004,00	2.001.000,00
3	PUSK BETAET	200	8.004,00	1.600.800,00
4	PUSK MUARA SIBERUT	200	8.004,00	1.600.800,00
5	PUSK SIKABALUAN	200	8.004,00	1.600.800,00
6	PUSK PEIPEI	200	8.004,00	1.600.800,00
7	PUSK SAIBI	200	8.004,00	1.600.800,00
8	PUSK MALAKOPA	200	8.004,00	1.600.800,00
9	PUSK SAUMANGANYA	200	8.004,00	1.600.800,00
10	PUSK BOSUA	200	8.004,00	1.600.800,00
11	PUSK SIGAPOKNA	200	8.004,00	1.600.800,00
12	PUSK SIKAKAP	200	8.004,00	1.600.800,00
13	PUSK BULASAT	200	8.004,00	1.600.800,00
14	PUSK SIMATALU	200	8.004,00	1.600.800,00
15	PUSK SAREREKET	200	8.004,00	1.600.800,00
D	**BM LANSIA IVA KIT DANA(HIBAH DARI KEMENKES DIRJEN P2P APBN 2021)**			
1	PUSK SIKAKAP	1	874.269,00	874.269,00
2	PUSK SAUMANGANYA	1	874.269,00	874.269,00
3	PUSK SIOBAN	1	874.269,00	874.269,00
4	PUSK MAPADEGAT	1	874.269,00	874.269,00
5	PUSK MUARA SIBERUT	1	874.269,00	874.269,00
6	PUSK SIKABALUAN	1	874.269,00	874.269,00

No.	URAIAN	unit	Harga Satuan	Jumlah
7	PUSK BETAET	1	874.269,00	874.269,00
8	PUSK SAIBI SAMUKOP	1	874.269,00	874.269,00
9	PUSK PEIPEI	1	874.269,00	874.269,00
10	PUSK MALAKOPA	1	874.269,00	874.269,00
11	PUSK BULASAT	1	874.269,00	874.269,00
12	PUSK BOSUA	1	874.269,00	874.269,00
13	PUSK SIGAPOKNA	1	874.269,00	874.269,00
TOTAL				**265.394.392**

c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal senilai Rp17.651.040,00 berupa :

No	Nama Barang	Unit	Harga Satuan
1	PC All In One	1	12.683.770,00
2	Printer	1	3.239.170,00
3	Modem	1	1.728.100,00
Jumlah			**17.651.040,00**

4. Mutasi Antar OPD terjadi pada Sekretariat Daerah dari Sekretariat DPRD senilai Rp785.887.000,00 berupa Kendaran Dinas Roda 4 (empat) diantaranya sebagai berikut :

NO	Merk/Type	CC	Tahun	No. Rangka	No. Mesin	NO. POLISI	NO. BPKB	HARGA
1	Nissan/X-Trail 2.02WD M/T	1997	2010	MHBFF2CG3P AJ004031	MR20-00804SR	BA 1501 U	H-04562246	349.987.000,00
2	Toyota/Fortuner 4x2/2,7LXA/T	2694	2010	MHFZX69GX4 7016404	2TR687192	BA 1002 UZ		435.900.000,00
J U M L A H								**785.887.000,00**

Mutasi Pengurangan :

Sedangkan mutasi pengurangan nilai aset peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Barang Bukan Aset Tetap (Ekstrakompetabel) sebesar Rp2.242.729.487,00 diantaranya sebagai berikut :

NO	OPD	NILAI
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	875.677.790,00
2	Dinas Kesehatan	1.253.572.297,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.500.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	35.289.800,00
5	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	840.000,00
6	Dinas PMP2KB	6.974.000,00
7	Dinas Perhubungan	9.240.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.313.500,00
9	Dinas Perikanan	11.100.000,00
10	Sekretariat Daerah	6.107.500,20
11	Kecamatan Pagai Selatan	20.114.600,00

NO	OPD	NILAI
12	Inspektorat	21.000.000,00
	TOTAL	**2.242.729.487,00**

a. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp875.677.790,00 diantaranya sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Kursi Kerja Pejabat 3 unit x 1.347.273,00	4.041.819,00
2	Dana Bos SD	608.028.372,00
3	Dana Bos SMP	258.207.599,00
4	Dana TIK SMP	5.400.000,00
JUMLAH		875.677.790,00

b. Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.253.572.297,00 diantarannya sebagai berikut :
PADA LAMPIRAN 4

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.500.000,00 berupa Meja Mini 2 (dua) Unit.

d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp35.289.800,00 diantaranya sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Unit	Harga Satuan	Jumlah
1	- Kompor Gas	1	990.000,00	990.000,00
2	- Dispenser	4	210.000,00	840.000,00
3	- Kursi Staf	67	499.400,00	33.459.800,00
	Jumlah			**35.289.800,00**

e. Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran senilai Rp840.000,00 berupa Dispenser sebanyak 3 (tiga) Unit.

f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp6.974.000,00 berupa Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran sebanyak 5 (lima) unit.

g. Dinas Perhubungan senilai Rp9.240.000,00 berupa Tabung Pemadam Kebakaran 6 kg sebanyak 8 (delapan) unit.

h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp1.313.500,00 diantaranya sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Unit	Harga Satuan	Jumlah
1	- Microphone	2	500.000,00	1.000.000,00
2	- Gunting Seng	1	313.500,00	313.500,00
			Jumlah	**1.313.500,00**

i. Dinas Perikanan senilai Rp11.100.000,00 diantaranya sebagai berikut :

No	Jenis barang	Unit	Harga Perolehan	Jumlah
1	Dispenser	10	210.000,00	2.100.000,00
2	Hardisk 1 TB	9	1.000.000,00	9.000.000,00
			Jumlah	**11.100.000,00**

j. Sekretariat Daerah senilai Rp6.107.500,00 diantaranya sebagai berikut :

No	Uraian	Unit	Harga	Jumlah
A	**Belanja Modal Alat Bantu**			
1	Belanja Pompa Air	1	1.210.000,00	1.210.000,00
2	Belanja Pompa Air	3	1.228.333,00	3.685.000,00
3	Belanja Pompa Air	1	797.500,00	797.500,00
4	Magic COM	1	415.000,00	415.000,00
			JUMLAH	6.107.500,00

k. Kecamatan Pagai Selatan senilai Rp20.114.600,00 berupa kursi kerja sebanyak 41 (empat puluh satu) unit.

l. Inspektorat senilai Rp21.000.000,00 berupa Kursi Futura sebanyak 42 (empat puluh dua) unit.

2. Reklasifikasi ke Barang dan Jasa sebesar Rp658.726.590,00 diantaranya sebagai berikut :

NO	OPD	NILAI
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	523.750.190,00
2	Dinas Kesehatan	37.816.400,00
3	RSUD	85.290.000,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.370.000,00
5	Dinas Perikanan	4.000.000,00
6	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	5.500.000,00
	TOTAL	**658.726.590,00**

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp523.750.190,00 diantaranya sebagai berikut:

NO	Uraian	NILAI
1	Dana BOS SMP	76.545.300,00
2	Dana BOS SD	439.714.890,00
3	TIK SD	7.490.000,00
	TOTAL	**523.750.190,00**

b. Dinas Kesehatan senilai Rp37.816.400,00 diantaranya sebagai berikut :
- Dari LRA senilai Rp**13.004.000,00**

No.	URAIAN	Jlh	Harga Satuan	Jumlah
1	**GROOVED DIRECTOR 14,5 CM-017-050-145**			
	Puskesmas Mapaddegat	2	88.970,00	177.940,00
	Puskesmas Sioban	3	88.970,00	266.910,00
	Puskesmas Betaet	3	88.970,00	266.910,00

No.	URAIAN	Jlh	Harga Satuan	Jumlah
	Puskesmas Muara Siberut	2	88.970,00	177.940,00
	Puskesmas Sikabaluan	2	88.970,00	177.940,00
	Puskesmas Peipei	2	88.970,00	177.940,00
	Puskesmas Saibi	3	88.970,00	266.910,00
	Puskesmas Malakopa	3	88.970,00	266.910,00
	Puskesmas Saumanganya	3	88.970,00	266.910,00
	Puskesmas Sikakap	2	88.970,00	177.940,00
	Puskesmas Bulasat	3	88.970,00	266.910,00
	Puskesmas Bosua	1	88.970,00	88.970,00
	Puskesmas Sarereiket	1	88.970,00	88.970,00
	Puskesmas Sigapokna	1	88.970,00	88.970,00
	Puskesmas Simatalu	1	88.970,00	88.970,00
	Rumah Sakit Pratama	1	88.960,00	88.960,00
2	**TISSUE Forcep 1x2 teeth 14,5 cm-013-200-145**			
	Puskesmas Mapaddegat	1	160.727,00	160.727,00
	Puskesmas Sioban	2	160.727,00	321.454,00
	Puskesmas Betaet	2	160.727,00	321.454,00
	Puskesmas Muara Siberut	1	160.727,00	160.727,00
	Puskesmas Sikabaluan	1	160.727,00	160.727,00
	Puskesmas Peipei	1	160.727,00	160.727,00
	Puskesmas Saibi	2	160.727,00	321.454,00
	Puskesmas Malakopa	2	160.727,00	321.454,00
	Puskesmas Saumanganya	2	160.727,00	321.454,00
	Puskesmas Sikakap	1	160.727,00	160.727,00
	Puskesmas Bulasat	2	160.727,00	321.454,00
	Puskesmas Bosua	1	160.727,00	160.727,00
	Puskesmas Sarereiket	1	160.727,00	160.727,00
	Puskesmas Sigapokna	1	160.727,00	160.727,00
	Puskesmas Simatalu	1	160.727,00	160.727,00
	Rumah Sakit Pratama	1	160.733,00	160.733,00
3	**TISSUE Forcep 1x2 teeth 18,0 cm-013-200-180**			
	Puskesmas Mapaddegat	2	197.939,00	395.878,00
	Puskesmas Sioban	3	197.939,00	593.817,00
	Puskesmas Betaet	3	197.939,00	593.817,00
	Puskesmas Muara Siberut	2	197.939,00	395.878,00
	Puskesmas Sikabaluan	2	197.939,00	395.878,00
	Puskesmas Peipei	2	197.939,00	395.878,00
	Puskesmas Saibi	3	197.939,00	593.817,00
	Puskesmas Malakopa	3	197.939,00	593.817,00
	Puskesmas Saumanganya	3	197.939,00	593.817,00
	Puskesmas Sikakap	2	197.939,00	395.878,00
	Puskesmas Bulasat	3	197.939,00	593.817,00
	Puskesmas Bosua	1	197.939,00	197.939,00
	Puskesmas Sarereiket	1	197.939,00	197.939,00
	Puskesmas Sigapokna	1	197.939,00	197.939,00
	Puskesmas Simatalu	1	197.939,00	197.939,00
	Rumah Sakit Pratama	1	197.952,00	197.952,00
JUMLAH				**13.004.000,00**

- Hibah dari Kementerian Kesehatan senilai Rp24.812.400,00

No.	URAIAN	Unit	Harga Perolehan	Jumlah
1	**BM BUKU LANSIA KIT (DANA DIPA APBN 2021)**			
	PUSK MAPADEGAT	250	8.004,00	2.001.000,00
	PUSK SIOBAN	250	8.004,00	2.001.000,00
	PUSK BETAET	200	8.004,00	1.600.800,00
	PUSK MUARA SIBERUT	200	8.004,00	1.600.800,00
	PUSK SIKABALUAN	200	8.004,00	1.600.800,00
	PUSK PEIPEI	200	8.004,00	1.600.800,00
	PUSK SAIBI	200	8.004,00	1.600.800,00
	PUSK MALAKOPA	200	8.004,00	1.600.800,00
	PUSK SAUMANGANYA	200	8.004,00	1.600.800,00
	PUSK BOSUA	200	8.004,00	1.600.800,00
	PUSK SIGAPOKNA	200	8.004,00	1.600.800,00
	PUSK SIKAKAP	200	8.004,00	1.600.800,00

No.	URAIAN	Unit	Harga Perolehan	Jumlah
	PUSK BULASAT	200	8.004,00	1.600.800,00
	PUSK SIMATALU	200	8.004,00	1.600.800,00
	PUSK SAREREKET	200	8.004,00	1.600.800,00
TOTAL HIBAH				**24.812.400,00**

c. Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp85.290.000,00 diantaranya sebagai berikut :

No.	URAIAN	Unit	Harga Satuan	Jumlah
1	**Belanja Modal Alat Kedokteran**			
	Alat Kedokteran Umum			
	Dimed High Flow Heated Respiratory Humidifier comsumable Package	4	12.000.000,00	48.000.000,00
2	**Belanja Modal Unit Alat Laboratorium**			
	reagen Pack	5	4.015.000,00	20.075.000,00
	Electrode Conditioner	1	766.000,00	766.000,00
	De-Proteinizer	4	1.061.752,00	4.247.007,00
	Refil Solution for ISE Electrode	1	970.000,00	970.000,00
	Refil Solution for REF Electrode	1	1.750.000,00	1.750.000,00
	Linerity Control Material	8	1.063.999,00	8.511.993,00
	Calibrant A	1	970.000,00,00	970.000,00
Jumlah				**85.290.000,00**

d. Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp2.370.000,00 diantaranya sebagai berikut :

NO	URAIAN	Unit	Harga Satuan	JUMLAH
1	**Pengadaan Alat Komunikasi Lainnya**			
	- Solder Ringkit	10	27.000,00	270.000,00
	- Kabel Audio	2	550.000,00	1.100.000,00
	- Jack Audio	2	500.000,00	1.000.000,00
JUMLAH				**2.370.000,00**

e. Dinas Perikanan senilai Rp4.000.000,00 diantaranya sebagai berikut :

No	Uraian	Unit	Harga Satuan	Jumlah
1	**Belanja Modal Alat laboratorium Lingkungan Hidup**			
	Screen NET uk. 3x3x3	2	1.700.000,00	3.400.000,00
	Screen NET uk. 60x100	2	300.000,00	600.000,00
			JUMLAH	**4.000.000,00**

Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan senilai Rp5.500.000,00 berupa Pemeliharaan Wibsite UMKM.

3. Reklasifikasi Belanja Modal dari LRA KIB B ke KIB E pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp48.380.000,00 diantaranya sebagai berikut :

No.	URAIAN	Unit	HARGA SATUAN	Jumlah
1	**SDN 03 BERIULOU**			
	Bangunan Gudang Mesin Diesel	1	4.000.000,00	4.000.000,00
2	**SDN 24 BETUMONGA**			
	Bangunan Gudang Mesin Diesel	1	7.000.000,00	7.000.000,00
3	**SDN 01 SAIBI SAMUKOP**			
	Belanja Modal Bangunan Gudang Mesin	1	17.880.000,00	17.880.000,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool/Gapura	1	19.500.000,00	19.500.000
			TOTAL	**48.380.000,00**

4. Reklasifikasi Belanja Modal dari LRA KIB B ke KIB D pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp44.262.00,00 diantaranya sebagai berikut :

No.	Uraian	Unit	Harga Satuan	Jumlah
1	**SDN 03 TAIKAKO**			
	Jaringan listrik baru PLN	1	3.500.000,00	3.500.000,00
2	**SDN 32 MATOBE**			
	Meteran listrik PLN	1	3.500.000,00	3.500.000,00
3	**SDN 20 MARA**			
	Instalasi Saluran Air	1	1.920.000,00	1.920.000,00
4	**SDN 25 BOSUA**			
	Meteran listrik PLN	1	3.500.000,00	3.500.000,00
5	**SDN 16 TUAPEJAT**			
	Pembuatan Sumur	1	2.580.000,00	2.580.000,00
	WC Siswa	1	23.262.000,00	23.262.000,00
6	**SDN 39 MALAKOPA**			
	Instalasi Air Tadah Hujan	1	6.000.000,00	6.000.000,00
TOTAL				**44.262.000,00**

5. Reklasifikasi Belanja Modal dari LRA KIB B ke KIB D senilai Rp404.057.946,00 berupa buku-buku sekolah diantaranya sebagai berikut pada Lampiran 5

6. Perubahan Kondisi Aset Tetap dari Baik ke Rusak Berat senilai Rp4.671.818.237,00 di beberapa OPD diantaranya sebagai berikut :

NO	OPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36.347.000,00
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	247.993.333,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	101.120.000,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	227.774.492,00
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	804.760.404,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	575.220.323,00
7	Kecamatan Sipora Selatan	204.382.900,00
8	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	463.570.000,00
9	Sekretariat Daerah	1.370.237.000,00
10	Sekretariat DPRD	217.092.500,00
11	Badan Keuangan Daerah	423.320.285,00
	TOTAL	**4.671.818.237,00**

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp36.347.000,00 diantaranya sebagai berikut :

NO	NAMA SEKOLAH	TAHUN	Vol	HARGA SATUAN	TOTAL
1	**SMAN 2 SIKAKAP**				
	LEMARI KAYU	2016	1	3.998.500,00	3.998.500,00
	LEMARI KAYU	2016	1	3.998.500,00	3.998.500,00
2	**SMAN 1 PAGAI SELATAN**				
	LEMARI KAYU	2016	1	8.000.000,00	8.000.000,00
	PC UNIT	2016	1	8.600.000,00	8.600.000,00
	MEJA KERJA	2016	1	2.500.000,00	2.500.000,00
3	**SMAN 1 SIBERUT SELATAN**				
	MEJA 1/2 BIRO	2013	1	1.500.000,00	1.500.000,00
	MEJA 1/2 BIRO	2013	1	1.500.000,00	1.500.000,00
	MEJA 1/2 BIRO	2013	1	1.500.000,00	1.500.000,00
	MEJA 1/2 BIRO	2013	1	1.500.000,00	1.500.000,00
	MEJA 1/2 BIRO	2013	1	1.500.000,00	1.500.000,00

NO	NAMA SEKOLAH	TAHUN	Vol	HARGA SATUAN	TOTAL
4	**SMAN 2 SIPORA**				
	SOFA	2016	1	1.750.000,00	1.750.000,00
	JUMLAH				**36.347.000,00**

b. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp247.993.333,00 diantaranya sebagai berikut :

No	Nama Barang	unit	tahun pembelian	Harga
1	sepeda motor	1	2004	8.000.000,00
2	sepeda motor	1	2008	16.646.667,00
3	sepeda motor	1	2008	16.646.666,00
4	sepeda motor	1	2009	16.500.000,00
5	sepeda motor	1	2015	15.750.000,00
6	Speed Boat/Motor Tempel	1	2008	84.800.000,00
7	Perahu Penyeberangan	1	2016	44.825.000,00
8	Perahu Penyeberangan	1	2016	44.825.000,00
	Jumlah			**247.993.333,00**

c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan senilai Rp101.120.000,00 diantaranya sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Unit	Tahun	Harga Aset Tetap
1	Kursi Kerja Es III	1	2017	1.800.000,00
2	Betor	1	2018	32.500.000,00
3	Betor	1	2018	32.500.000,00
4	Betor	1	2018	34.320.000,00
	Jumlah			**101.120.000,00**

d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp227.774.492,00 diantaranya sebagai berikut :

No.	Uraian	unit	Nilai
1	Mitsubishi/Kuda Deluxe	1	88.539.692,00
2	Genset	1	2.151.500,00
3	Televisi	1	6.435.000,00
4	Handy Cam	1	5.918.000,00
5	Handy Cam	1	5.918.000,00
6	Antene SHF Portable	1	1.650.000,00
7	Printer	1	1.925.000,00
8	Unit Power Suply	1	2.374.850,00
9	PC Unit	1	7.865.000,00
10	PC Unit	1	7.865.000,00
11	Printer	1	1.822.550,00
12	Printer	1	1.839.750,00
13	AC Split	1	5.463.150,00
14	Unit Power Suply	1	2.915.000,00
15	Bendera Merah Putih	1	29.527.000,00
16	PC Unit	1	8.860.500,00
17	Printer	1	1.870.000,00
18	Printer	1	1.870.000,00
19	Mesin Potong Rumput	1	3.998.500,00
20	Unit Power Suply	1	2.970.000,00
21	Printer	1	5.340.000,00
22	Printer	1	3.993.000,00
23	AC Window	1	8.998.000,00
24	Michropon	1	9.625.000,00
25	Printer	1	2.100.000,00
26	Printer	1	1.980.000,00
27	Printer	1	1.980.000,00

No.	Uraian	unit	Nilai
28	Printer	1	1.980.000,00
		JUMLAH	**227.774.492,00**

e. Dinas Kearsipan dan perpustakaan senilai Rp804.760.404,00 diantaranya sebagai berikut :

No.	Uraian	Unit	Merk	Tahun Pembelian	Harga
1	Laptop	2	Toshiba	2010	39.798.000,00
2	Laptop	1	Toshiba	2012	6.704.500,00
3	Laptop	1	Acer	2016	6.704.500,00
4	Laptop	1	Acer	2016	8.222.500,00
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	MITSUBISHI / Kuda	2001	126.000.000,00
6	Mobil Unit Perpustakaan Keliling	1	TOYOTA / HILUX 2.0MT	2011	172.500.000,00
7	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	1	VIAR / KARYA 2 VR 2003R	2014	43.780.000,00
8	Sepeda Motor	1	Honda / NF125 TD	2009	16.335.000,00
9	Sepeda Motor	1	Honda / NF125 TD	2009	16.335.000,00
10	Distiling Apparatus	1	Samsung, Canon	2011	97.047.500,00
11	P.C Unit	1	Campas Presirio	2011	7.920.000,00
12	P.C Unit	1	Campas Presirio	2011	7.920.000,00
13	P.C Unit	1	Campas Presirio	2011	7.920.000,00
14	P.C Unit	1	-	2012	7.975.000,00
15	P.C Unit	1	HP ZR2040W	2012	3.000.000,00
16	P.C Unit	1	lenuvo / pc	2014	10.230.000,00
17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Epson	2009	10.450.000,00
18	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Epson LX 310 / Impacp	2016	3.630.000,00
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Epson LQ 2190 / PA31A	2016	6.800.000,00
20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Laser Jet	2011	1.850.000,00
21	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	-	2015	8.040.904,00
22	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Prolink	2009	2.915.000,00
23	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Prolink	2009	2.915.000,00
24	Televisi	1	Panasonic	2011	9.570.000,00
25	A.C. Sentral	1	SHARAP	2010	4.955.000,00
26	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	-	2012	1.650.000,00
27	Mesin Pemotong Rumput	1	-	2012	2.500.000,00
28	Layar Film/Projector	1	-	2012	9.900.000,00
29	Scanner (Universal Tester)	1	scaner	2014	7.000.000,00
30	recorder display lainnya (dst)	1	MPCJ 3720 / 3720	2014	8.195.000,00
31	Handy Cam	1	-	2014	9.450.000,00
32	Camera Video	1	-	2014	4.700.000,00
33	Filing Cabinet Besi	1	vip	2009	3.685.000,00
34	Filing Cabinet Besi	1	vip	2009	3.685.000,00
35	Filing Cabinet Besi	1	vip	2009	3.685.000,00
36	Filing Cabinet Besi	1	vip	2009	3.685.000,00
37	Lemari Penyimpan	1	-	2009	2.392.500,00
38	Lemari Penyimpan	1	-	2009	2.392.500,00
39	Lemari Penyimpan	1	-	2009	2.392.500,00
40	Lemari Penyimpan	1	-	2009	2.392.500,00
41	Lemari Penyimpan	1	Lokal	2009	1.870.000,00
42	Lemari Penyimpan	1	Lokal	2009	1.870.000,00
43	Lemari Penyimpan	1	Lokal	2009	1.870.000,00
44	Lemari Kayu	1	-	2011	5.000.000,00
45	Rak Kayu	1	Lokal	2010	1.969.000,00
46	Rak Kayu	1	Lokal	2010	1.969.000,00
47	Rak Kayu	1	Lokal	2010	1.969.000,00
48	Rak Kayu	1	Lokal	2010	1.969.000,00

No.	Uraian	Unit	Merk	Tahun Pembelian	Harga
49	Rak Kayu	1	Lokal	2010	1.969.000,00
50	Rak Kayu	1	Lokal	2010	1.969.000,00
51	Rak Kayu	1	Lokal	2010	1.969.000,00
52	Rak Kayu	1	Lokal	2010	1.969.000,00
53	Rak Kayu	1	Lokal	2010	1.969.000,00
54	Rak Kayu	1	Lokal	2010	1.969.000,00
55	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	-	2012	7.500.000,00
56	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	-	2015	2.832.500,00
57	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	-	2015	2.832.500,00
58	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	-	2009	3.168.000,00
59	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	-	2009	3.168.000,00
60	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	-	2009	3.168.000,00
61	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	-	2009	3.168.000,00
62	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	-	2009	3.168.000,00
63	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	-	2009	3.168.000,00
64	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	-	2009	3.168.000,00
65	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	-	2009	3.168.000,00
66	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	-	2009	3.168.000,00
67	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	-	2009	3.168.000,00
68	Kursi Tamu	1	-	2015	9.900.000,00
69	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	-	2009	3.987.500,00
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Frontline	2012	2.860.000,00
71	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Frontline	**2012**	2.860.000,00
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Fantoni	2009	2.475.000,00
73	Papan Nama Instansi	1	-	2009	2.310.000,00
74	Papan Nama Instansi	1	-	2011	4.000.000,00
75	Papan Nama Instansi	1	-	2011	4.000.000,00
JUMLAH					**804.760.404,00**

f. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp575.220.323,00 diantaranya sebagai berikut :

No.	Uraian	Unit	Merk	Tahun Pembelian	Harga
1	PC. Unit	1	Pentium III	2002	4.800.000,00
2	Lemari Kayu	1		2003	1.800.000,00
3	Lemari Kayu	1		2003	2.000.000,00
4	Laptop	1		2003	5.400.000,00
5	Sepeda Motor	1	Suzuki Thunder 125	2004	12.000.000,00
6	Sepeda Motor	1	Honda Supra Fit	2004	5.000.000,00
7	Lemar Kayu	1		2004	1.563.000,00
8	Overhead Projector	1		2004	5.775.000,00
9	Kursi Hadap depan Meja kerja Pejabat Eselon II	1	Jubi	2004	2.063.000,00
10	PC. Unit	3	Pentium IV	2004	15.000.000,00
11	Laptop	1	toshiba	2004	7.425.000,00
12	Laptop	1	toshiba	2004	5.625.000,00
13	Sepeda Motor	1	Honda Win	2005	6.000.000,00
14	Sepeda Motor	1	Honda Supra x	2006	9.000.000,00
15	Speed Boat / Motor Tempel	1	Yamaha	2006	48.850.000,00
16	Perkakas bengkel konstruksi logam lainnya	1		2006	2.183.839,00
17	Filling Cabinet Besi	1	Awico/Glori CC4L	2006	1.870.000,00
18	Monitor	1		2006	17.800.000,00

No.	Uraian	Unit	Merk	Tahun Pembelian	Harga
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		2006	7.500.000,00
20	Lemari Kayu	2		2007	8.745.000,00
21	Filing Cabinet Besi	4		2007	6.138.000,00
22	Overhead Projector	1	Thosiba DPT-T-45	2007	19.019.000,00
23	Kursi Biasa	1		2007	2.997.500,00
24	Handy Cam	1	DCR DVD 608	2007	5.483.500,00
25	Global Positioning System	1	Garmin	2008	2.425.000,00
26	Brandkas	1	Okida	2008	5.980.000,00
27	PC Unit	2	Slim V	2008	25.133.334,00
28	Meisn Ketik Manual Standard (14-16 inchi)	1	Olimpia	2009	2.000.000,00
29	PC Unit	1	Samsung	2009	9.800.000,00
30	Laptop	1	toshiba	2009	16.300.000,00
31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	LG	2009	11.400.000,00
32	Laptop	4	toshiba	2010	59.936.800,00
33	Peralatan Jaringan Lainnya	1	IP Star	2010	39.985.000,00
34	Sepeda Motor	1	Piagio Hitam	2012	17.930.000,00
35	Sepeda Motor	1	Piagio Hitam	2012	17.930.000,00
36	Sepeda Motor	1	Piagio Hitam	2012	17.930.000,00
37	Sepeda Motor	1	Piagio Hitam	2012	17.930.000,00
38	Sepeda Motor	1	Piagio Hitam	2012	17.930.000,00
39	PC Unit	1	HP Pavilion	2012	9.900.000,00
40	Laptop	2		2012	16.830.000,00
41	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1		2012	1.900.000,00
42	Unit Power Supply	2	ICA	2013	12.421.000,00
43	Stabilisator	2	Matsunaga	2013	7.579.000,00
44	Alat rumah tanggal Lain-lain	1	Lokal/Gorden+Batang	2013	9.840.000,00
45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	HP Laser Jet 1132 NVP	2013	4.800.000,00
46	Global Positioning System	1	Garmin / Montana 650	2014	8.269.470,00
47	Global Positioning System	4	Garmin / Montana 650	2014	33.077.880,00
48	Mesin Pemotong Rumput	1	Censo/StihiMS 170/180	2014	3.955.000,00
JUMLAH					**575.220.323,00**

f. Kecamatan Sipora Selatan senilai Rp204.382.900,00 diantaranya sebagai berikut :

No.	Uraian	Unit	Tahun	Harga Aset Tetap
1	Sepeda Motor	1	2008	19.934.000,00
2	Sepeda Motor	1	2008	19.934.000,00
3	Sepeda Motor	1	2008	19.934.000,00
4	Sepeda Motor	1	2008	19.934.000,00
5	Sepeda Motor	1	2009	18.920.000,00
6	Sound System	1	2009	26.510.000,00
7	Lemari Es	1	2010	2.430.900,00
8	Lemari Es	1	2011	1.800.000,00
9	A.C. Split	1	2012	13.226.000,00
10	P.C Unit	1	2012	15.000.000,00
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2012	9.750.000,00
12	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2013	10.500.000,00
13	Brandkas	1	2014	16.830.000,00
14	HT Drying	1	2015	2.420.000,00
15	HT Drying	1	2015	2.420.000,00
16	HT Drying	1	2015	2.420.000,00
17	HT Drying	11	2015	2.420.000,00
	TOTAL			**204.382.900,00**

g. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga senilai Rp463.570.000,00 diantaranya sebagai berikut :

No.	Uraian	Unit	Tahun	Harga Aset Tetap
1	Kapal Motor	1	2008	300.000.000,00
2	Speed Boat/Motor Tempel	1	2013	34.980.000,00
3	Speed Boat/Motor Tempel	1	2013	34.980.000,00
4	Speed Boat/Motor Tempel	1	2015	46.805.000,00
5	Speed Boat/Motor Tempel	1	2015	46.805.000,00
	TOTAL			**463.570.000,00**

h. Sekretariat Daerah senilai Rp1.370.237.000,00 diantaranya sebagai berikut :

No.	Uraian	Unit	Tahun	Harga Aset Tetap
1	Speed Boat/Motor Tempel	1	2013	39.875.000,00
2	Speed Boat/Motor Tempel	1	2013	39.875.000,00
3	Motor Boat	1	2013	1.093.367.000,00
4	Motor Boat	1	2013	49.280.000,00
5	Motor Boat	1	2013	49.280.000,00
6	Motor Boat	1	2013	49.280.000,00
7	Motor Boat	1	2013	49.280.000,00
	TOTAL			**1.370.237.000,00**

i. Sekretariat DPRD senilai Rp217.092.500,00 diantaranya sebagai berikut :

No.	Uraian	Unit	Tahun	Harga Aset Tetap
1	Motor Boat	1	2005	79.180.000,00
2	Motor Boat	1	2006	29.700.000,00
3	Perahu Penumpang	1	2006	20.350.000,00
4	Perahu Penumpang	1	2008	14.462.000,00
5	Perahu Penumpang	1	2008	25.000.500,00
6	Perahu Penyeberangan	1	2014	48.400.000,00
	TOTAL			**217.092.500,00**

j. Badan Keuangan Daerah senilai Rp423.320.285,00 diantaranya sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun Perolehan	unit	HARGA
1	Brankas	1999	1	8.000.000,00
2	Laptop	2008	1	24.585.000,00
3	Laptop	2009	1	22.522.500,00
4	Laptop	2009	1	22.522.500,00
5	Laptop	2009	1	22.522.500,00
6	Laptop	2009	1	22.522.500,00
7	Laptop	2009	1	22.275.000,00
8	Laptop	2009	1	22.275.000,00
9	Sepeda Motor(Yossy Nemer)	2009	1	13.585.000,00
10	Sepeda Motor(Afdel Halim)	2009	1	13.585.000,00
11	Filling Cabinet besi/Metal	2009	1	5.852.000,00
12	PC.Unit	2010	1	8.756.000,00
13	Meja Rapat	2011	1	3.350.000,00
24	AC Unit	2011	1	7.664.285,00
25	Bendera Merah Putih	2012	1	7.530.000,00
26	Printer	2012	1	9.775.000,00
27	Sepeda Motor	2012	1	15.663.000,00
28	Sepeda Motor	2012	1	29.700.000,00
29	Sepeda Motor	2013	1	70.300.000,00
30	PC.Unit	2013	1	14.795.000,00
31	PC.Unit	2014	1	17.820.000,00
32	PC.Unit	2014	1	17.820.000,00
33	Mesin Penghancur Kertas	2015	1	5.000.000,00
34	Printer	2015	1	3.500.000,00
35	Printer	2016	1	3.700.000,00
36	Printer	2017	1	3.410.000,00

No.	Uraian	Tahun Perolehan	unit	HARGA
37	Printer	2018	1	2.145.000,00
38	Printer	2018	1	2.145.000,00
	Jumlah			**423.320.285,00**

7. Penghapusan Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2021 senilai Rp526.485.150,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	OPD	NILAI
1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70.190.650,00
2	Dinas PMP2KB	185.735.000,00
3	Kecamatan Sipora Utara	16.494.500,00
4	Badan Keuangan Daerah	78.725.000,00
5	BKPSDM	175.340.000,00
	TOTAL	**526.485.150,00**

a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp70.190.650,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama Barang	Unit	Merk/Type	Tahun	Polisi	Harga
1	Sepeda motor	1	Honda/Karisma	2004	BA 7524UZ	8.000.000,00
2	sepeda motor	1	Kawasaki	2011	BA 2715 U	26.650.000,00
3	sepeda motor	1	Kawasaki/KLX150	2011	BA 2716 U	26.650.000,00
4	PC UNIT	1	Lenovo	2017	-	6.897.700,00
5	Peralatan Personal Komputer (printer)	1	HP Laserjet	2017	-	1.992.950,00
					Jumlah	**70.190.650,00**

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp185.735.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tahun	Unit	Jumlah
1	Perahu Penyeberangan	2014	1	59.400.000,00
2	Global Positioning System	2014	1	21.505.000,00
3	Motor Boat	2014	1	52.415.000,00
4	Motor Boat	2014	1	52.415.000,00
			JUMLAH	**185.735.000,00**

c. Kecamatan Sipora Utara senilai Rp16.494.500,00 berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Merk. Honda Supra X Tahun 2009.

d. Badan Keuangan Daerah senilai Rp78.725.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Unit	Merk/Type	Tahun	Harga(Rp)
1	UPS	1	ICA/STABILIZER	2010	4.500.000,00
2	Laptop	1	LENOVO	2012	47.300.000,00
3	Sepeda Motor/Dayat-Poniman	1	Kawasaki/KLX 150	2013	26.925.000,00
				Jumlah	**78.725.000,00**

e. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp175.340.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	Jenis Barang	Merk/Type	Tahun	No. Polisi	Harga
1	Sepeda Motor	Honda GL 160 D	2007	BA 6387 U ex BA 7665 UZ	19.800.000,00
2	Sepeda Motor	Honda / Vario	2010	BA 2822 U	19.360.000,00
3	Sepeda Motor	Honda / Vario	2010	BA 2823 U	19.360.000,00
4	Sepeda Motor	Honda / Vario	2010	BA 2825 U	19.360.000,00
5	Motor Boat	Yamaha/Enduro	2010		48.730.000,00
6	Motor Boat	Yamaha/Enduro	2010		48.730.000,00
				JUMLAH	**175.340.000,00**

8. Mutasi Antar OPD dari Sekretariat DPRD ke Sekretariat Daerah senilai Rp785.887.000,00 diantaranya sebgai berikut :

NO	Merk/Type	CC	Tahun	No. Rangka	No. Mesin	NO. POLISI	NO. BPKB	HARGA
1	Nissan/X-Trail 2.02WD M/T	1997	2010	MHBFF2CG3 PAJ004031	MR20-00804SR	BA 1501 U	H-04562246	349.987.000,00
2	Toyota/Fortuner 4x2/2,7LXA/T	2694	2010	MHFZX69GX 47016404	2TR687192	BA 1002 UZ		435.900.000,00
J U M L A H								**785.887.000,00**

9. Pemusnahan Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang Hasil Penilaian dari KPKNL Padang bernilai 0,00 terdapat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai senilai Rp136.208.155,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	TAHUN	Unit	NILAI PEROLEHAN
1	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	6.370.165,00
2	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	6.370.167,00
3	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	6.370.167,00
4	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	6.370.167,00
5	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	6.370.167,00
6	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	6.370.167,00
7	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
8	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
9	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
10	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
11	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
12	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
13	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
14	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
15	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
16	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
17	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
18	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
19	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
20	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
21	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
22	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
23	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
24	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
25	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
26	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
27	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
28	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
29	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
30	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	2008	1	2.500.000,00
31	Sofa/bigstar	2007	1	5.363.600,00
32	Sofa/bigstar	2007	1	5.363.600,00
33	Sofa/bigstar	2007	1	5.363.600,00
34	Sofa/bigstar	2007	1	5.363.600,00
35	Meja Rapat Pejabat lainnya	2007	1	1.770.755,00
36	Kursi Tamu/Padova	2012	1	14.762.000,00
			JUMLAH	**136.208.155,00**

Adapun rincian aset peralatan mesin sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
13201	**ALAT BESAR**				

Kode Rekening	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
1320101	**ALAT BESAR DARAT**	**22.127.013.736,00**	**0,00**	**0,00**	**22.127.013.736,00**
132010102	GRADER	8.146.500.000,00	0,00	0,00	8.146.500.000,00
132010103	EXCAVATOR	3.754.829.000,00	0,00	0,00	3.754.829.000,00
132010105	HAULER	2.879.170.636,00	0,00	0,00	2.879.170.636,00
132010107	COMPACTING EQUIPMENT	5.469.100.000,00	0,00	0,00	5.469.100.000,00
132010110	ALAT PENGANGKAT	1.436.615.100,00	0,00	0,00	1.436.615.100,00
132010111	MESIN PROSES	440.799.000,00	0,00	0,00	440.799.000,00
1320102	**ALAT BESAR APUNG**	**11.248.283,00**	**33.710.000,00**	0,00	**44.958.283,00**
132010203	AMPHIBI DREDGER	11.248.283,00	33.710.000,00	0,00	44.958.283,00
1320103	**ALAT BANTU**	**9.244.586.895,00**	**75.410.500,00**	0,00	**9.419.997.395,00**
132010301	ALAT PENARIK	12.375.000,00	0,00	0,00	12.375.000,00
132010303	COMPRESSOR	166.181.095,00	0,00	0,00	166.181.095,00
132010304	ELECTRIC GENERATING SET	7.901.856.050,00	50.609.500,00	0,00	7.952.465.550,00
132010305	POMPA	851.178.500,00	10.916.000,00	0,00	862.094.500,00
132137	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	212.654.250,00	108.885.000,00	0,00	321.539.250,00
132138	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1321312	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	100.342.000,00	0,00	0,00	100.342.000,00
13202	**ALAT ANGKUTAN**				
1320201	**ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR**	**53.431.525.412,00**	**4.072.188.858,00**	**(256.092.188,00)**	**57.247.622.082,00**
132020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	3.902.941.948,00	39.305.550,00	0,00	4.142.247.498,00
132020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	22.236.820.001,00	381.814.308,00	0,00	22.618.634.309,00
132020103	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	4.624.097.545,00	0,00	0,00	4.624.097.545,00
132020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	11.931.172.445,00	0,00	(112.992.188,00)	11.818.180.257,00
132215	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	44.550.000,00	0,00	0,00	44.550.000,00
132020106	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	9.953.048.473,00	3.451.069.000,00	0,00	13.404.117.473,00
132020109	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	738.895.000,00	0,00	(143.100.000,00)	595.795.000,00
1320202	**ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR**	**198.595.000,00**	0,00	0,00	**198.595.000,00**
132020201	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	13.898.000,00	0,00	0,00	13.898.000,00
132020202	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	184.697.000,00	0,00	0,00	184.697.000,00
1320203	**ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR**	**62.324.338.879,00**	**10.500.000,00**	**(1.368.791.000)**	**60.966.047.879,00**
132020301	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	44.032.570.764,00	0,00	(300.000.000,00)	43.732.570.764,00
132020302	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	13.888.593.428,00	0,00	(1.068.791.000)	12.819.802.428,00
132020303	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	3.457.119.687,00	0,00	0,00	3.457.119.687,00
132235	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	946.055.000,00	10.500.000,00	0,00	956.555.000,00
1320204	**ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR**	**2.446.386.100,00**	**0,00**	**(171.262.500)**	**2.275.123.600,00**
132020401	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	253.622.500,00	0,00	0,00	253.622.500,00
132020402	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	2.192.763.600,00	0,00	(171.262.500)	2.021.501.100,00
13203	**ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR**		0,00	0,00	
1320301	**ALAT BENGKEL BERMESIN**	**2.754.327.825,00**	**17.090.000,00**	0,00	**2.771.417.825,00**

Kode Rekening	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
132030101	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	2.008.693.500,00	0,00	0,00	2.008.693.500,00
132030102	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	34.974.500,00	0,00	0,00	34.974.500,00
132030103	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	332.339.925,00	0,00	0,00	332.339.925,00
132030104	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	3.136.000,00	0,00	0,00	3.136.000,00
132030105	PERKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	34.512.500,00	0,00	0,00	34.512.500,00
132030106	PERKAKAS BENGKEL KAYU	94.665.000,00	7.590.000,00	0,00	102.255.000,00
132030107	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	161.910.000,00	0,00	0,00	161.910.000,00
132030109	PERKAKAS PABRIK ES	84.096.400,00	9.500.000,00	0,00	93.596.400,00
1320302	**ALAT BENGKEL TAK BERMESIN**	**725.148.480,00**	**75.754.000,00**	**(2.183.839,00)**	**798.718.641,00**
132030201	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	105.583.839,00	0,00	(2.183.839,00)	103.400.000,00
1323222	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
132030203	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	4.125.000,00	0,00	0,00	4.125.000,00
132325	PERKAKAS PENGANGKAT	13.970.000,00	0,00	0,00	13.970.000,00
132030205	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	148.796.500,00	0,00	0,00	148.796.500,00
132030206	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	192.225.000,00	0,00	0,00	192.225.000,00
132030207	PERKAKAS BENGKEL KERJA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
132030208	PERALATAN TUKANG BESI	11.994.400,00	0,00	0,00	11.994.400,00
132030211	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	223.623.741,00	4.500.000,00	0,00	228.123.741,00
1323212	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	16.830.000,00	71.254.000,00	0,00	88.084.000,00
1320303	**ALAT UKUR**	**2.801.139.244,00**	**67.510.162,00**	**(4.142.350,00)**	**2.864.507.056,00**
132030301	ALAT UKUR UNIVERSAL	750.325.682,00	0,00	(4.142.350,00)	746.183.332,00
132030303	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	12.760.000,00	0,00	0,00	12.760.000,00
132030304	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	198.000.000,00	0,00	0,00	198.000.000,00
132030305	ALAT KALIBRASI	18.035.000,00	0,00	0,00	18.035.000,00
132030307	UNIVERSAL TESTER	262.124.645,00	3.880.000,00	0,00	266.004.645,00
132030308	ALAT UKUR/PEMBANDING	344.473.050,00	0,00	0,00	344.473.050,00
132030309	ALAT UKUR LAIN0,00LAIN	196.377.000,00	8.961.818,00	0,00	205.338.818,00
132030310	ALAT TIMBANGAN/BIARA	479.063.867,00	54.668.344,00	0,00	533.732.211,00
132030317	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	509.980.000,00	0,00	0,00	509.980.000,00
1223221	ALAT UKUR LAINNYA	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
13204	**ALAT PERTANIAN**				
1320401	**ALAT PENGOLAHAN**	**9.121.569.432,00**	**885.272.000,00**	0,00	**10.006.841.432,00**
132040101	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	85.849.500,00	0,00	0,00	85.849.500,00
132040102	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
132040103	ALAT PANEN	29.777.000,00	0,00	0,00	29.777.000,00
132040104	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	3.424.818.679,00	178.214.000,00	0,00	3.603.032.679,00
132040105	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	2.562.467.754,00	707.058.000,00	0,00	3.269.525.754,00
132040106	ALAT PROSESING	48.158.000,00	0,00	0,00	48.158.000,00
132040107	ALAT PASCA PANEN	10.780.000,00	0,00	0,00	10.780.000,00
132040108	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	2.693.581.000,00	0,00	0,00	2.693.581.000,00
132040109	ALAT0,00ALAT PETERNAKAN	209.777.499,00	0,00	0,00	209.777.499,00
1324110	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	51.410.000,00	0,00	0,00	51.410.000,00
13205	**ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**				
1320501	**ALAT KANTOR**	**13.433.576.788,00**	**194.318.080,00**	0,00	**13.627.894.868,00**
132050101	MESIN KETIK	496.633.325,00	7.492.500,00	0,00	504.125.825,00

Kode Rekening	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
132050102	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	143.015.000,00	0,00	0,00	143.015.000,00
132050103	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	169.977.500,00	0,00	0,00	169.977.500,00
132050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.673.542.948,00	37.214.000,00	0,00	6.710.756.948,00
132050105	ALAT KANTOR LAINNYA	5.950.408.015,00	149.611.580,00	0,00	6.100.019.595,00
1320502	**ALAT RUMAH TANGGA**	**38.680.267.154,12**	**1.572.863.618,00**	0,00	**40.253.130.772,12**
132050201	MEUBELAIR	16.988.263.417,12	577.200.303,00	0,00	17.565.463.720,12
132050202	ALAT PENGUKUR WAKTU	15.767.800,00	0,00	0,00	15.767.800,00
132050203	ALAT PEMBERSIH	968.143.300,00	65.136.500,00	0,00	1.033.279.800,00
132050204	ALAT PENDINGIN	5.371.903.928,00	360.005.805,00	0,00	5.731.909.733,00
132050205	ALAT DAPUR	466.947.900,00	3.780.000,00	0,00	470.727.900,00
132050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	14.577.236.037,00	555.460.510,00	0,00	15.132.696.547,00
132050207	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	292.004.772,00	11.280.500,00	0,00	303.285.272,00
1320503	**MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT**	**7.384.204.017,00**	**137.627.500,00**	**(102.054.755,00)**	**7.419.776.762,00**
132050301	MEJA KERJA PEJABAT	2.751.452.869,00	9.704.000,00	0,00	2.761.156.869,00
132050302	MEJA RAPAT PEJABAT	440.413.859,00	0,00	(99.991.755,00)	340.422.104,00
132050303	KURSI KERJA PEJABAT	1.625.312.589,00	96.911.500,00	0,00	1.722.224.089,00
132050304	KURSI RAPAT PEJABAT	104.906.400,00	0,00	0,00	104.906.400,00
132050305	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	18.145.000,00	0,00	(2.063.000,00)	16.082.000,00
132050306	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	165.550.000,00	7.612.000,00	0,00	173.162.000,00
132050307	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	2.278.423.300,00	23.400.000,00	0,00	2.301.823.300,00
13206	**ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR**				
1320601	**ALAT STUDIO**	**7.689.050.790,00**	**120.910.900,00**	0,00	**7.809.961.690,00**
132060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	4.428.448.663,00	6.743.000,00	0,00	4.435.191.663,00
132060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	2.617.262.577,00	97.741.000,00	0,00	2.715.003.577,00
132060104	PERALATAN CETAK	318.618.550,00	0,00	0,00	318.618.550,00
132060105	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	176.295.455,00	0,00	0,00	176.295.455,00
132616	ALAT STUDIO LAINNYA	148.425.545,00	16.426.900		164.852.445,00
1320602	**ALAT KOMUNIKASI**	**6.579.042.212,00**	**34.940.000,00**	0,00	**6.613.982.212,00**
132060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	1.815.057.900,00	27.940.000,00	0,00	1.842.997.900,00
132060202	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	1.027.290.666,00	0,00	0,00	1.027.290.666,00
132060203	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	1.003.376.600,00	0,00	0,00	1.003.376.600,00
132060204	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	2.491.619.446,00	0,00	0,00	2.491.619.446,00
132060206	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	241.697.600,00	0,00	0,00	241.697.600,00
132060211	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1320603	**PERALATAN PEMANCAR**	**1.711.389.051,00**	**224.869.260,00**	**(1.650.000,00)**	**1.934.608.311,00**
132060302	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	34.650.000,00	0,00	0,00	34.650.000,00
132060305	PERALATAN PEMANCAR SHF	210.989.500,00	0,00	0,00	210.989.500,00
132060306	PERALATAN ANTENA MF/MW	613.353.000,00	0,00	0,00	613.353.000,00
132060308	PERALATAN ANTENA VHF/FM	7.645.500,00	0,00	0,00	7.645.500,00
132060309	PERALATAN ANTENA UHF	4.051.000,00	0,00	0,00	4.051.000,00
132060310	PEERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	44.623.875,00	0,00	(1.650.000)	42.973.875,00
132060320	SWITCHER/MENARA ANTENA	114.662.230,00	0,00	0,00	114.662.230,00
132060321	FEEDER	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
132060322	HUMIDITY CONTROL	16.060.000,00	0,00	0,00	16.060.000,00
132060323	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	190.682.446,00	0,00	0,00	190.682.446,00
1326347	SUMBER TENAGA	469.721.500,00	224.869.260	0,00	694.590.760,00
13207	**ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN**				
1320701	**ALAT KEDOKTERAN**	**50.800.213.892,01**	**6.237.773.617,00**	0,00	**57.037.987.509,01**
132070101	ALAT KEDOKTERAN UMUM	18.849.138.453,00	2.286.011.677,00	0,00	21.135.150.130,00

Kode Rekening	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
132070102	ALAT KEDOKTERAN GIGI	8.942.202.886,00	0,00	0,00	8.942.202.886,00
132070103	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	99.570.296,00	54.236.636,00	0,00	153.806.932,00
132070104	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	6.299.439.465,68	99.201.272,00	0,00	6.398.640.737,68
132070105	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	6.661.271.332,00	297.847.783,00	0,00	6.959.119.115,00
132070106	ALAT KEDOKTERAN THT	2.012.921.471,00	11.189.184,00	0,00	2.024.110.655,00
132717	ALAT KEDOKTERAN MATA	12.950.000,00	23.115.000,00	0,00	36.065.000,00
132070108	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	560.492.050,00	224.970.000,00	0,00	785.462.050,00
132070110	ALAT KEDOKTERAN ANAK	947.390.438,33	31.413.335,00	0,00	978.803.773,33
132070111	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	515.251.544,00	31.420.269	0,00	546.671.813,00
132070112	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	1.115.400.645,00	0,00	0,00	1.115.400.645,00
132070114	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	13.920.456,00	143.660.958,00	0,00	157.581.414,00
132070115	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	1.122.544.943,00	0,00	0,00	1.122.544.943,00
132070119	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	293.842.832,00	51.572.992,00	0,00	345.415.824,00
13271210	ALAT KEDOKTERAT KULIT DAN KELAMIN	29.850.000,00	0,00	0,00	29.850.000,00
132070121	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	2.415.805.226,00	901.057.582,00	0,00	3.316.862.808,00
132070124	ALAT KEDOKTERAN I C U	522.181.500	193.309.092,00	0,00	715.490.592,00
132070125	ALAT KEDOKTERAN I C C U	95.040.354	1.595.993.471,00	0,00	1.691.033.825,00
132070129	ALAT KEDOKTERAN LAIINNYA	291.000.000,00	292.774.366,00	0,00	583.774.366,00
1320702	**ALAT KESEHATAN UMUM**	**952.511.999,00**	**428.281.782,00**	**-**	**1.380.793.781,00**
132070201	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	61.545.000,00	0,00	0,00	61.545.000,00
132070203	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	6.796.000,00	0,00	0,00	6.796.000,00
132070204	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	49.775.000,00	0,00	0,00	49.775.000,00
1327129	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	834.395.999,00	428.281.782,00	0,00	1.262.677.781,00
13208	**ALAT LABORATORIUM**				
1320801	**UNIT ALAT LABORATORIUM**	**12.733.635.311,17**	**944.447.635,00**	**(57.387.900,00)**	**13.620.695.046,17**
132080101	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	43.725.000,00	0,00	0,00	43.725.000,00
132080102	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	274.264.838,00	0,00	0,00	274.264.838,00
132080103	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	176.555.000,00	0,00	0,00	176.555.000,00
132080105	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	44.385.000,00	0,00	0,00	44.385.000,00
132080106	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	236.439.914,00	0,00	0,00	236.439.914,00
132080108	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	35.500.000,00	0,00	0,00	35.500.000,00
132080110	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	418.789.116,00	65.452.000,00	0,00	484.241.116,00
132080111	ALAT LABORATORIUM UMUM	2.336.630.223,05	154.856.000,00	0,00	2.491.486.223,05
132080112	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	465.624.274,00	10.000.000,00	0,00	475.624.274,00
132080113	ALAT LABORATORIUM KIMIA	405.028.313,12	28.110.000,00	0,00	433.138.313,12
132080114	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	609.195.000,00	0,00	0,00	609.195.000,00
132080115	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	16.541.250,00	0,00	0,00	16.541.250,00
132080116	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	12.310.082,00	1.694.000	0,00	14.004.082,00
132080117	ALAT LABORATORIUM FILM	169.305.900,00	20.100.000,00	0,00	189.405.900,00
132080118	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	79.537.675,00	0,00	0,00	79.537.675,00
132080119	ALAT LABORATORIUM FARMASI	706.034.121,00	0,00	0,00	706.034.121,00
132080120	ALAT LABORATORIUM FISIKA	850.117.000,00	5.400.000,00	0,00	855.517.000,00

Kode Rekening	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
132080126	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
132080130	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	5.995.000,00	0,00	0,00	5.995.000,00
132080134	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	29.700.000,00	0,00	(9.680.000,00)	20.020.000,00
132080137	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK	106.672.500,00	0,00	0,00	106.672.500,00
132080138	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	8.140.000,00	0,00	0,00	8.140.000,00
132080139	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	9.350.000,00	0,00	0,00	9.350.000,00
132080141	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	2.433.671.769,00	0,00	(47.707.900,00)	2.385.963.869,00
132080142	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	5.665.000,00	0,00	0,00	5.665.000,00
132080143	ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA	338.705.892,00	0,00	0,00	338.705.892,00
132080144	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	33.094.000,00	0,00	0,00	33.094.000,00
132080146	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	210.987.500,00	0,00	0,00	210.987.500,00
132080147	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	452.636.525,00	0,00	0,00	452.636.525,00
132080148	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	54.665.925,00	0,00	0,00	54.665.925,00
132080151	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	35.575.000,00	4.546.635,00	0,00	40.121.635,00
132080153	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA		55.577.000,00	0,00	55.577.000,00
132080155	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	53.762.744,00	544.212.000,00	0,00	597.974.744,00
132080156	ALAT LABORATORIUM LAIN	2.058.783.750,00	54.500.000,00	0,00	2.113.283.750,00
1328158	ALAT RABORATORIUM PENDIDIKAN	5.247.000,00	0,00	0,00	5.247.000,00
1320802	**UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR**	**543.428.924,00**	0,00	0,00	**543.428.924,00**
132080203	GENERAL LABORATORY TOOL	129.484.157,00	0,00	0,00	129.484.157,00
132080204	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	9.694.767,00	0,00	0,00	9.694.767,00
132080205	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	404.250.000,00	0,00	0,00	404.250.000,00
1320803	**ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH**	**3.793.479.863,00**	**25.306.220,00**	**(38.557.000,00)**	**3.780.229.083,00**
132080301	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	510.302.000,00	0,00	0,00	510.302.000,00
132080302	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	756.027.545,00	2.500.000,00	0,00	758.527.545,00
132080303	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	355.780.600,00	0,00	(1.500.000,00)	354.280.600,00
132080304	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	62.402.614,00	11.356.220,00	0,00	73.758.834,00
132080305	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	564.994.550,00	0,00	0,00	564.994.550,00
132080307	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	348.159.524,00	0,00	0,00	348.159.524,00
132080309	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	420.611.394,00	0,00	0,00	420.611.394,00

Kode Rekening	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
132080310	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	325.186.500,00	11.450.000,00	0,00	336.636.500,00
132080311	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	265.951.136,00	0,00	0,00	265.951.136,00
132080312	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	180.464.000,00	0,00	(37.057.000,00)	143.407.000,00
1328316	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
1320804	**ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA**	**223.545.000,00**	**9.350.000,00**	**(8.195.000,00)**	**224.700.000,00**
132080401	RADIATION DETECTOR	29.865.000,00	0,00	0,00	29.865.000,00
132842	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	3.450.000,00	6.850.000	0,00	10.300.000,00
132080404	RECORDER DISPLAY	141.910.000,00	0,00	(8.195.000,00)	133.715.000,00
132080405	SYSTEM/POWER SUPPLY	48.320.000,00	2.500.000	0,00	50.820.000,00
1320805	**ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN**	**226.218.145,00**	0,00	0,00	**226.218.145,00**
132080501	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00
132080502	ALAT KESEHATAN KERJA	86.218.145,00	0,00	0,00	86.218.145,00
1320806	**RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA**	**7.800.000,00**	0,00	0,00	**7.800.000,00**
132080602	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00
1320807	**ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP**	**2.372.882.767,00**	0,00	0,00	**2.372.882.767,00**
132080701	ALAT LABORATORIUM KWALITAS AIR DAN TANAH	557.717.015,00	0,00	0,00	557.717.015,00
132080702	ALAT LABORATORIUM KWALITAS UDARA	151.122.000,00	0,00	0,00	151.122.000,00
132080703	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	194.400.000,00	0,00	0,00	194.400.000,00
132080704	LABORATORIUM LINGKUNGAN	635.052.000,00	0,00	0,00	635.052.000,00
132080705	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	834.591.752,00	0,00	0,00	834.591.752,00
1320808	**PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA**	**845.067.897,00**	0,00	0,00	**845.067.897,00**
132080803	DATA ACCQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	44.209.000,00	0,00	0,00	44.209.000,00
132080806	PERALATAN UMUM	800.858.897,00	0,00	0,00	800.858.897,00
13209	**ALAT PERSENJATAAN**				
1320901	**SENJATA API**	**81.910.000,00**	0,00	0,00	**81.910.000,00**
132090110	SENJATA LAIN0,00LAIN	81.910.000,00	0,00	0,00	81.910.000,00
1320902	**PERSENJATAAN NON SENJATA API**	**889.366.600,00**	**51.246.351,00**	0,00	**940.612.951,00**
132090201	ALAT KEAMANAN	886.698.600,00	25.000.000,00	0,00	911.698.600,00
132923	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK	2.668.000,00	0,00	0,00	2.668.000,00
	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA		26.246.351,00	0,00	26.246.351,00
1320904	**ALAT KHUSUS KEPOLISIAN**	**147.931.000,00**	**16.242.000,00**	0,00	**164.173.000,00**
132090402	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	100.626.000,00	11.363.000,00	0,00	111.989.000,00
132944	PERALATAN DETEKSI INTEL	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
132947	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	32.455.000,00	2.000.000,00	0,00	34.455.000,00
132949	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORERNSIK	3.850.000,00	2.879.000,00	0,00	6.729.000,00
13210	**KOMPUTER**				
1321001	**KOMPUTER UNIT**	**27.292.582.617,00**	**4.256.827.220,00**	0,00	**31.549.409.837,00**
132100101	KOMPUTER JARINGAN	935.674.176,00	0,00	0,00	935.674.176,00
132100102	PERSONAL KOMPUTER	26.347.415.441,00	4.101.631.140,00	0,00	30.449.046.581,00

Kode Rekening	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
1321025	KOMPUTER UNIT LAINNYA	9.493.000,00	155.196.080,00	0,00	164.689.080,00
1321002	**PERALATAN KOMPUTER**	**10.461.252.597,00**	**761.076.205,00**	0,00	**11.222.328.802,00**
132100201	PERALATAN MAINFRAME	542.668.000,00	100.000,00	0,00	542.768.000,00
132100202	PERALATAN MINI KOMPUTER	262.866.950,00	0,00	0,00	262.866.950,00
132100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	5.264.487.653,00	651.833.105,00	0,00	5.916.320.758,00
132100204	PERALATAN JARINGAN	4.381.729.994,00	109.143.100,00	0,00	4.490.873.094,00
1321025	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
13215	**ALAT KESELAMATAN KERJA**				
1321503	**ALAT SAR**	**1.733.622.800,00**	**3.800.000,00**	0,00	**1.737.422.800,00**
132150302	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	1.733.622.800,00	3.800.000,00	0,00	1.737.422.800,00
1321504	**ALAT KERJA PENERBANGAN**	**331.280.000,00**	**56.470.000,00**	**(40.440.000,00)**	**347.310.000,00**
132150405	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	137.405.000,00	56.470.000,00	0,00	193.875.000,00
1321542	PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN	193.875.000,00	0,00	(40.440.000,00)	153.435.000,00
13216	**ALAT PERAGA**				
132161	**ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN**	**3.185.000,00**	0,00	0,00	**3.185.000,00**
1321611	ALAT PERAGA PELATIHAN	**3.185.000,00**	0,00	0,00	3.185.000,00
132171	**PERALATAN PROSES/PRODUKSI**	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
1321711	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
13218	**RAMBU - RAMBU**				
1321801	**RAMBU - RAMBU LALU LINTAS DARAT**	**603.778.162,00**	0,00	0,00	**603.778.162,00**
132180101	**RAMBU BERSUAR**	**190.883.250,00**	0,00	0,00	190.883.250,00
132180102	**RAMBU TIDAK BERSUAR**	**412.894.912,00**	0,00	0,00	412.894.912,00
13219	**PERALATAN OLAH RAGA**				
1321901	**PERALATAN OLAH RAGA**	**97.200.360,00**	**29.575.000,00**	0,00	**126.775.360,00**
132190102	PERALATAN PERMAINAN	44.350.000,00	0,00	0,00	44.350.000,00
132190103	PERALATAN SENAM	45.050.360,00	6.000.000,00	0,00	51.050.360,00
132190106	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	7.800.000,00	23.575.000	0,00	31.375.000,00

Adapun saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin berdasarkan OPD per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	OPD	Saldo Awal Per 31 Desember 2020	Realisasi Belanja Modal 2021	Penyesuaian/ Koreksi 2021		Saldo Akhir Per 31 Desember 2021
				Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.929.240.150,00	6.511.331.828,00	981.955.600,00	(1.932.474.476,00)	35.490.053.102,00
2	Dinas Kesehatan	61.101.337.639,30	10.606.188.361,00	265.394.392,00	(1.291.388.697,00)	70.681.531.695,30
3	Rumah Sakit Umum Daerah	36.697.764.793,00	1.907.006.098,00	-	(85.290.000,00)	38.519.480.891,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.847.281.526,00	409.534.818,00	-	(1.500.000,00)	30.255.316.344,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.748.756.531,00	125.351.200,00	-	(35.289.800,00)	2.838.817.931,00
6	Kantor Kesbangpol	1.130.547.842,00	-	-	-	1.130.547.842,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.859.976.370,00	49.999.000,00	-	(840.000,00)	4.909.135.370,00

No	OPD	Saldo Awal Per 31 Desember 2020	Realisasi Belanja Modal 2021	Penyesuaian/ Koreksi 2021		Saldo Akhir Per 31 Desember 2021
				Tambah	Kurang	
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.350.364.835,00	430.075.557,00	-	(318.183.983,00)	3.462.256.409,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.114.862.863,00	2.458.664.700,00	-	-	16.573.527.563,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.743.252.390,00	-	-	(101.120.000,00)	2.642.132.390,00
11	Dinas Kependudukan dan Capil	2.303.253.005,00	104.940.000,00	-	-	2.408.193.005,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3.903.558.625,00	85.719.248,00	-	(192.709.000,00)	3.796.568.873,00
13	Dinas Perhubungan	34.488.278.945,00	546.969.090,00	-	(9.240.000,00)	35.026.008.035,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.482.177.521,00	66.191.340,00	-	(2.370.000,00)	4.545.998.861,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.176.062.947,00	7.813.500,00	17.651.040,00	(229.087.992,00)	1.972.439.495,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.712.141.744,00	-	-	(804.760.404,00)	907.381.340,00
17	Dinas Perikanan	13.128.637.329,00	302.957.800,00	-	(15.100.000,00)	13.416.495.129,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5.121.225.028,00	-	-	(463.570.000,00)	4.657.655.028,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.231.062.817,00	-	-	(575.220.323,00)	2.655.842.494,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.685.326.880,00	136.400.000,00	-	(5.500.000,00)	2.816.226.880,00
21	Sekretariat Daerah	49.992.965.686,00	384.857.745,00	785.887.000,00	(1.376.344.500,00)	49.787.365.931,00
22	Sekretariat DPRD	8.995.337.646,00	656.459.000,00	-	(1.139.187.655,00)	8.512.608.991,00
23	Kecamatan Pagai Utara	1.008.965.844,00	56.899.000,00	-	-	1.065.864.844,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	1.469.046.225,00	19.030.000,00	-	(204.382.900,00)	1.283.693.325,00
25	Kecamatan Sipora Utara	2.127.901.900,00	22.850.000,00	-	(16.494.500,00)	2.134.257.400,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	1.498.881.039,00	37.488.000,00	-	-	1.536.369.039,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	1.483.664.029,00	36.579.000,00	-	-	1.520.243.029,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	1.206.432.795,00	-	-	-	1.206.432.795,00
29	Kecamatan Siberut Utara	1.665.204.125,00	10.991.000,00	-	-	1.676.195.125,00
30	Kecamatan Siberut Barat	1.043.326.500,00	-	-	-	1.043.326.500,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	1.936.327.250,00	149.248.000,00	-	(20.114.600,00)	2.065.460.650,00
32	Kecamatan Sikakap	1.076.030.930,00	-	-	-	1.076.030.930,00
33	Inspektorat	2.028.512.076,00	96.746.178,00	-	(21.000.000,00)	2.104.258.254,00
34	Bappeda	5.884.838.349,00	93.590.000,00	-	-	5.978.428.349,00
35	BKD	9.232.765.382,00	562.889.996,00	-	(502.045.285,00)	9.293.610.093,00
36	BKPSDM	4.398.992.676,00	-	-	(175.340.000,00)	4.223.652.676,00
	Jumlah	**354.804.302.232,30**	**25.876.770.459,00**	**2.050.888.032,00**	**(7.097.048.615,00)**	**373.213.406.608,30**

		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1.3.3.3	**Gedung dan Bangunan**	**665.360.403.072,94**	**642.970.806.097,47**

Saldo Aset Tetap Gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp665.360.403.072,94 merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, jika dibandingkan dengan saldo aset gedung dan bangunan tahun 2020 sebesar Rp.642.970.806.097,47 mengalami kenaikan sebesar Rp.22.389.596.975,47 atau 3,48% dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Penambahan :

-	Belanja modal tahun 2021	Rp.	21.708.856.761,00
-	Reklasifikasi masuk atas Belanja B J	Rp.	2.163.280.737,47
-	Reklasifikasi masuk dari KDP	Rp.	10.965.720.350,00
-	Reklasifikasi Penambahan dari Belanja Mutasi Antar OPD	Rp.	8.643.700.000,00
-	Reklasifikasi Penambahan hibah dari desa	Rp.	935.528.500,00
-	**Jumlah Mutasi Penambahan**	**Rp.**	**44.417.086.348,47**

Mutasi Pengurangan

-	Reklasifikasi Pengurangan Mutasi Antar OPD	Rp.	8.643.700.000,00
-	Reklasifikasi Pengurangan Hibah ke Desa	Rp.	1.035.228.300,00
-	Reklasifikasi Pengurangan Hibah ke Provinsi	Rp.	61.600.000,00
-	Reklasifikasi ke KIB A	Rp.	100.048.000,00
-	Reklasifikasi ke KIB B	Rp.	74.815.600,00
-	Reklasifikasi ke KIB B extra	Rp.	718.804.642,00
-	Reklasifikasi ke KIB D	Rp.	2.187.433.917,00
-	Reklasifikasi ke KIB F	Rp.	9.005.416.714,00
-	Reklasifikasi ke Kejaksaan	Rp.	199.617.200,00
-	Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp.	825.000,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan	**Rp.**	**22.027.489.373,00**
	Jumlah Bersih Mutasi	**Rp**	**22.389.596.975,47**

Mutasi penambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penambahan karena adanya realisasi belanja modal per 31 Desember 2021 sebesar Rp.21.708.856.759,00 pada OPD dengan rincian sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.072.524.201,00
2	Dinas Kesehatan	6.709.406.410,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	161.135.670,00
4	DPUPR	1.765.790.480,00
	TOTAL	**21.708.856.761,00**

- Reklasifikasi Penambahan dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.2.163.280.737,47 dengan rincian sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	223.284.300,00
2	Dinas Kesehatan	54.942.600,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.328.526,00
4	Dinas Sosial	89.860.944,00
5	Dukcapil	106.455.544,00
6	DPMP2KB	14.437.500,00
7	Diskominfo	188.900.000,00
8	DKP	364.380.981,47
9	Sekretariat Daerah	920.690.342,00
	TOTAL	**2.163.280.737,47**

- Reklasifikasi Penambahan dari KDP ke KIB C sebesar Rp10.965.720.350,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Gedung/bangunan Kantor BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sudah digunakan untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi.

- Reklasifikasi Penambahan dari Belanja Mutasi Antar OPD sebesar Rp8.643.700.000,00 diantaranya sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.211.226.500,00
2	Dinas Kesehatan	3.432.473.500,00
	TOTAL	**8.643.700.000,00**

- Reklasifikasi Penambahan hibah dari desa dengan nilai sebesar Rp.935.528.500,00 diantaranya sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	935.528.500,00
	TOTAL	**935.528.500,00**

Mutasi pengurangan nilai aset tetap gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Reklasifikasi Pengurangan Mutasi antar OPD sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.643.700.000,00
	TOTAL	**8.643.700.000,00**

- Reklasifikasi Pengurangan Hibah ke Desa dengan nilai sebesar Rp.1.035.228.300,00 diantaranya sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	999.228.300	Surat Keputusan Pengelola BMD No. 11 Tahun 2021 Tanggal 29 November 2021
2	Kecamatan Siberut Selatan	36.000.000	Surat Keputusan Pengelola BMD No. 6 Tahun 2021 Tanggal 13 September 2021
	TOTAL	**1.035.228.300,00**	

- Reklasifikasi Pengurangan Hibah ke Provinsi adalah sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	61.600.000	Surat Keputusan Pengelola BMD No. 07 Tahun 2021 Tanggal 04 Oktober 2021
	TOTAL	**61.600.000,00**	

- Reklasifikasi Pengurangan ke KIB A adalah sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.048.000,00
	TOTAL	**100.048.000,00**

- Reklasifikasi Pengurangan ke KIB B adalah sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	74.815.600,00
	TOTAL	**74.815.600,00**

- Reklasifikasi Pengurangan ke KIB B Extra adalah sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	718.804.642,00
	TOTAL	**718.804.642,00**

- Reklasifikasi Pengurangan ke KIB D adalah sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.187.433.917,00
	TOTAL	**2.187.433.917,00**

- Reklasifikasi Pengurangan ke KIB F adalah sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	41.532.500,00
2	Dinas Kesehatan	8.963.884.214,00
	TOTAL	**9.005.416.714,00**

- Reklasifikasi Pengurangan Hibah ke Kejaksaan sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah (Rp)	No BAST
1	DPUPR	199.617.200,00	640.6/03/BASTB/PPK/RG.KJS/DPUPR-KKM/2021 tanggal 22 Desember 2021
	TOTAL	**199.617.200,00**	

- Reklasifikasi Pengurangan ke Barang dan Jasa sebagai berikut :

No	OPD	Jumlah (Rp)
1	Sekretariat Daerah	825.000,00
	TOTAL	**825.000,00**

Adapun rincian asset tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
A	**Bangunan Gedung**				
1	**Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**588.858.635.696,47**	**43.890.500.099,47**	**-21.830.001.780,00**	**610.919.134.015,94**
1.1	Bangunan Gedung Kantor	246.727.305.835,24	27.780.579.262,47	(7.700.009.380)	266.807.875.717,71
1.2	Bangunan Gudang	7.971.674.094,00	83.987.000,00	0,00	8.055.661.094,00
1.3	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	1.114.667.336,00	0,00	0,00	1.114.667.336,00
1.4	Bangunan Gedung Instalasi	4.309.730.969,00	0,00	0,00	4.309.730.969,00
1.5	Bangunan Gedung Laboratorium	4.676.728.050,00	1.340.239.259,00	0,00	6.016.967.309,00
1.6	Bangunan Kesehatan	125.958.587.853,00		-6.520.660.085,00	119.437.927.768,00
1.7	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.141.941.500,00	0,00	0,00	1.141.941.500,00
1.8	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.061.248.573,00	210.880.010,00	0,00	9.272.128.583,00
1.9	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	140.933.197.555,23	4.691.660.509,00	0,00	145.624.858.064,23
1.10	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	88.100.000,00	60.087.500,00	0,00	148.187.500,00
1.11	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	12.286.377.955,00	0,00	0,00	12.286.377.955,00
1.12	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	260.045.330,00	0,00	0,00	260.045.330,00
1.13	Bangunan Gedung Garasi/Pool	3.732.494.727,00	0,00	0,00	3.732.494.727,00
1.14	Bangunan Gedung Perpustakaan	14.913.940.289,00	1.890.535.244,00	0,00	16.804.475.533,00
1.15	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.856.722.000,00	0,00	0,00	1.856.722.000,00
1.16	Bangunan Peternakan/Perikanan	463.156.000,00	0,00	0,00	463.156.000,00
1.17	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	11.043.816.340,00	7.832.531.315,00	-7.609.332.315,00	11.267.015.340,50
1.18	Bangunan Fasilitas Umum	143799291	0,00	0,00	143.799.291,00
1.19	Bangunan Gedung Pabrik	2.175.101.999,00	0,00	0,00	2.175.101.999,00
2	**Bangunan Gedung Tempat Tinggal**	**50.491.372.446,00**	**254.700.249,00**	**-197.487.593,00**	**50.548.585.102,00**
2.1	Rumah Negara Golongan I	9.777.284.544,00	0,00	-197.487.593,00	9.579.796.951,00
2.2	Rumah Negara Golongan II	2.293.733.100,00	0,00	0,00	2.293.733.100,00
2.3	Rumah Negara Golongan III	25.410.794.786,00	254.700.249,00	0,00	25.665.495.035,00
2.4	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	6.398.175.666,00	0,00	0,00	6.398.175.666,00
2.5	Asrama	5.966.554.350,00	0,00	0,00	5.966.554.350,00

2.6	Flat/Rumah Susun	644.830.000,00	0,00	0,00	644.830.000,00
B	**Monumen**				
1	**Candi/Tugu Peringatan/Prasasti**	**1.854.331.728,00**	**0,00**	**0,00**	**1.854.331.728,00**
1.1	Tugu	1.854.331.728,00	0,00	0,00	1.854.331.728,00
1.2	Bangunan Peninggalan	0	0,00	0,00	0,00
C	**Bangunan Menara**				
1	**Bangunan Menara Perambuan**	**1.364.574.100,00**	**0,00**	**0,00**	**1.366.574.100,00**
1.1	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	866.034.100,00	0,00	0,00	868.034.100,00
1.2	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	376.110.000,00	0,00	0,00	376.110.000,00
1.3	Bangunan Menara Telekomunikasi	122.430.000,00	0,00	0,00	122.430.000,00
D	**Tugu Titik Kontrol/Pasti**				
1	**Tugu/Tanda Batas**	**399.892.127,00**	**271.886.000,00**	**0,00**	**671.778.127,00**
1.1	Tugu/Tanda Batas Administrasi	250.076.000,00	271.886.000,00	0,00	521.962.000,00
1.2	Pagar	149.816.127,00	0,00	0,00	149.816.127,00
	JUMLAH	**642.970.806.097,47**	**44.417.086.348,47**	**-22.027.489.373,00**	**655.360.403.072,94**

Adapun saldo aset tetap berupa Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	OPD	Saldo Awal Per 1-1-2021	Realisasi Belanja	Penyesuaian/ Koreksi 2021		Saldo Akhir Per 31-12-2021
			Modal 2021	Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	260.453.247.291,23	13.072.524.201,00	6.370.039.300,00	-4.183.462.959,00	275.712.347.833,23
2	Dinas Kesehatan	166.276.646.797,20	6.709.406.410,00	3.487.416.100,00	-8.963.884.214,00	167.509.585.093,20
3	Rumah Sakit Umum Daerah	22.612.895.267,00	-	-	-	22.612.895.267,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.837.061.816,04	1.765.790.480,00	11.166.048.876,00	-119.617.200,00	26.569.283.972,04
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.177.809.459,00	-	-	-	10.177.809.459,00
6	Kantor Kesbangpol	468.610.982,00	-	-	-	468.610.982,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	600.589.000,00	-	-	-	600.589.000,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	470.700.000,00	-	89.860.944,00	-	560.560.944,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.269.010.291,00	-	-	-8.643.700.000,00	625.310.291,00
10	Dinas Lingkungan	699.122.000,00	-	-	-	699.122.000,00

	Hidup dan Kebersihan					
11	Dinas Kependudukan dan Capil	519.692.000,00		106.455.544,00	-	626.147.544,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5.273.892.953,00	161.135.670,00	14.437.500,00	-	5.449.466.123,00
13	Dinas Perhubungan	4.611.645.379,00	-	-	-	4.611.645.379,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	786.117.000,00	-	188.900.000,00	-	975.017.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.735.094.878,00	-	-	-	5.735.094.878,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	29.700.000,00	-	-	-	29.700.000,00
17	Dinas Perikanan	17.502.505.993,00	-	364.380.981,47	-	17.866.886.974,47
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	15.028.612.397,00	-	-	-	15.028.612.397,00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	18.105.090.720,00	-	-	-	18.105.090.720,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	22.596.646.004,00	-	-	-	22.596.646.004,00
21	Sekretariat Daerah	28.178.539.828,00		920.690.342,00	-825.000,00	29.098.405.170,00
22	Sekretariat DPRD	5.091.408.330,00	-	-	-	5.091.408.330,00
23	Kecamatan Pagai Utara	681.859.000,00	-	-	-	681.859.000,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	3.763.966.655,00	-	-	-	3.763.966.655,00
25	Kecamatan Sipora Utara	1.649.529.465,00	-	-	-	1.649.529.465,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	3.368.544.835,00	-	-	-36.000.000,00	3.332.544.835,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	1.652.497.000,00	-	-	-	1.652.497.000,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	2.106.545.000,00	-	-	-	2.106.545.000,00
29	Kecamatan Siberut Utara	1.751.942.000,00	-	-	-	1.751.942.000,00
30	Kecamatan Siberut Barat	1.236.651.000,00	-	-	-	1.236.651.000,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	496.020.000,00	-	-	-	496.020.000,00
32	Kecamatan Sikakap	534.016.400,00	-	-	-	534.016.400,00
33	Inspektorat	1.561.359.291,00	-	-	-	1.561.359.291,00
34	Bappeda	10.126.767.166,00	-	-	-	10.126.767.166,00
35	BKD	1.898.058.700,00	-	-	-	1.898.058.700,00
36	BKPSDM	3.818.411.200,00	-	-	-	3.818.411.200,00
	Jumlah	**642.970.806.097,47**	**21.708.856.761,00**	**22.708.229.587,47**	**-22.027.489.373,00**	**665.360.403.072,94**

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.3.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	**1.339.750.739.736,03**	**1.141.199.238.936,03**

Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai posisi 31 Desember 2021 dan 2020. Terdapat penambahan nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2021 sebesar Rp.198.551.500.800,00 atau 14,82% dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Penambahan:

- Belanja modal tahun 2021	Rp.	115.471.089.584,00
- Reklasifikasi dari KIB C	Rp.	2.187.433.917,00
- Reklasifikasi dari KIB F	Rp.	100.431.833.646,00
- Reklasifikasi dari KIB B	Rp.	44.262.000,00
- Reklasifikasi dari Barang dan Jasa	Rp.	5.568.397.318,00
- Mutasi antar OPD	Rp.	3.048.631.500,00
Jumlah Mutasi Penambahan	Rp.	**226.751.647.965,00**
Mutasi Pengurangan :		
- Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp.	31.192.200,00
- Reklasifikasi ke KDP	Rp.	20.216.069.065,00
- Hibah ke Desa	Rp.	4.965.917.900,00
- Mutasi Antar OPD	Rp.	2.986.968.000,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	Rp.	**28.200.147.165,00**
Jumlah Mutasi Bersih	Rp.	**198.551.500.800,00**

Penambahan nilai aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disebabkan antara lain:

- Adanya belanja modal yang dinilai dari APBD TA 2021 Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp.115.471.089.584,00 pada dinas sebagai berikut:

No.	OPD	Belanja Modal 2021 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.294.303.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	108.198.066.139,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	925.296.455,00
4	Dinas Perhubungan	1.923.626.706,00
5	Dinas Perikanan	0,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.079.351.167,00
7	Sekretariat Daerah	50.446.117,00
	TOTAL	**115.471.089.584,00**

- Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya reklasifikasi dari KIB C sebagai berikut:

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.187.433.917,00
	TOTAL	**2.187.433.917,00**

- Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya reklasifikasi dari KIB B sebagai berikut:

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	44.262.000,00
	TOTAL	**44.262.000,00**

- Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya reklasifikasi dari F sebesar Rp. 100.431.833.646,00 sebagai berikut:

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	97.113.317.172,00
2	Dinas Perhubungan	85.628.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	39.646.000,00
4	Dinas Perwaskim	3.193.242.474,00
	TOTAL	**100.431.833.646,00**

- Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya reklasifikasi dari Barang dan Jasa sebesar Rp.5.568.397.318,00 sebagai berikut:

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	219.318.930,00
2	Dinas Kesehatan	9.905.500,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.124.251.258,00
4	Dinas Perhubungan	214.921.630,00
	TOTAL	**5.568.397.318,00**

- Mutasi Antar OPD senilai Rp3.048.631.500,00 dari Dinas PUPR ke Dinas Perwaskim berupa Peningkatan Jaringan Air Bersih Tuapejat senilai Rp2.986.968.000,00 dan Mutasi dari perwaskim berupa KDP menjadi aset tetap KIB D senilai Rp61.663.500,00.

Pengurangan nilai aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disebabkan antara lain :

- Mutasi Kurang aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya Belanja Reklasifikasi ke Barang dan Jasa sebagai berikut:

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Daerah	31.192.200,00
	TOTAL	**31.192.200,00**

- Mutasi Kurang aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya Belanja Reklasifikasi ke KDP sebagai berikut:

No	OPD	NILAI (Rp)
1	DPUPR	20.216.069.065
	TOTAL	**20.216.069.065**

- Mutasi Kurang aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya Hibah ke Desa sebagai berikut:

No	OPD	NILAI (Rp)
1	DPUPR	4.965.917.900
	TOTAL	**4.965.917.900**

Berupa :

No	Nama Kegiatan	Vol	Nilai	No. BAST	Tanggal BAST
	Peningkatan SPAM di Kawasan Pedesaan				
1	- Dusun Bakailuk Desa Muntei	1	68.000.000,00	01/BAST/KKM-GG/XI/2021	29 November 2021
2	- Dusun Bere Desa Makalo	1	150.000.000,00	01/BAST/KKM-KK/XI/2021	29 November 2021
3	- Dusun Berkat Baru Desa Sikakap	1	200.000.000,00	01/BAST/KKM-BG/XI/2021	29 November 2021
4	- Dusun Berkat Desa Tuapejat	1	100.000.000,00	04/BAST-APBD-HMP/PAMSIMAS III-MTW/XI/2021	29 November 2021
5	- Dusun Goiso Oinan	1	255.000.000,00	01/BAST-APBD-HKP/PAMSIMAS III-MTW/XI/2021	29 November 2021
6	- Dusun Mabugei Desa Pasakiat	1	170.000.000,00	01/BAST/KKM-BG/XI/2021	29 November 2021
7	- Dusun Toroji Desa Saibi	1	75.000.000,00	01/BAST-HAMP-APBD-TOROJI/XI/2021	29 November 2021
8	Honor Fasilitator	1	16.000.000,00		
	Pemb. Pamsimas				
9	- Desa Matobek - Sipora Selatan	1	200.000.000,00	01/BAST-APBD-HKP/PAMSIMAS III-MTW/XI/2021	29 November 2021
10	- Dusun Mapoupou Desa Makalo	1	224.000.000,00	01/BAST-KKM-KK/XI-2021	29 November 2021
11	- Dusun Matobat Desa Sinaka	1	200.000.000,00	01/BAST-KKM-BG/XI-2021	29 November 2021
12	- Dusun Mongan Bosua Sipora Selatan	1	200.000.000,00	04/BAST-APBD-HKP/PAMSIMAS III-MTW/XI/2021	29 November 2021
13	- Dusun Pario Desa Muntei Sib Selatan	1	240.000.000,00	01/BAST/KKM-DM/XI/2021	25 November 2021
14	- Dusun Puro I Desa Muara Siberut	1	140.000.000,00	01/BAST-HKP-APBD-PURO/XI/2021	29 November 2021
15	- Dusun Talok Pulei Desa Makalo	1	160.000.000,00	01/BAST-KKM-BG/XI-2021	29 November 2021
16	Honor Fasilitator	1	16.000,000,00		
17	Penyediaan Jaringan Air Bersih dan sanitasi Berbasis Masyarakat Dusun Bunga Desa Sagulubbeg	1	280.000.000,00	01/BAST/KKM-BG/XI/2021	29 November 2021
18	Penyediaan Jaringan Air Bersih dan sanitasi Berbasis Masyarakat Dusun Gulug Gulug Desa Saumanyanya	1	371.000.000,00	01/BAST/KKM-GG/XI/2021	29 November 2021
19	Penyediaan Jaringan Air Bersih dan sanitasi Berbasis Masyarakat Dusun Kaleak Desa Sagulubbeg	1	280.000.000,00	01/BAST/KKM-KK/XI/2021	29 November 2021
20	Honor Fasilitator	1	16.000.000,00		
21	Pemb. Tangki Desa Sagulubbek Sib. Brt. Daya	1	468.979.900,00	01/BA/ST-OP/TSI/XII-2021	
22	Pemb. Tangki Kec. Sib. Brt. Daya	1	349.985.000,00	01/BA/ST-OP/TSI/XII-2021	09 Desember 2021

No	Nama Kegiatan	Vol	Nilai	No. BAST	Tanggal BAST
23	Pemb. Tangki Saumanganya - Kec. Pagai Utara	1	419.988.000,00	01/BA/ST-OP/TSI/XII-2021	
24	Pemb. Tangki Desa Saureinu - Kec. Sip. Utara	1	349.965.000,00	01/BA/ST-OP/TSI/XII-2021	
25	Honor Fasilitato	1	16.000.000,00		
	Total Seluruhnya		**4.965.917.900,00**		

- Mutasi kurang antar OPD dari Dinas PUPR ke Dinas Perwaskim senilai Rp2.986.968.000,00 berupa Peningkatan Jaringan Air Bersih Tuapejat – Simpang SP 2.

Adapun rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
13401	**Jalan Dan Jembatan**	**672.062.259.612**	**198.527.898.841**	**(15.864.428.965)**	**854.725.729.488**
1340101	**Jalan**	**530.335.886.338**	**198.527.898.841**	**(15.864.428.965)**	**712.999.356.214**
134010103	Jalan Kabupaten	490.149.086.338	197.953.547.674	(15.864.428.965)	672.238.205.047
134010105	Jalan Desa	19.353.574.443	-	-	19.353.574.443
134010109	Jalan Khusus	20.670.719.557	-	-	20.670.719.557
134010110	Jalan Lainnya	162.506.000	574.351.167		736.857.167
1340102	Jembatan	141.726.373.274	-	-	141.726.373.274
134010203	Jembatan Pada Jalan Kabupaten	93.987.532.140	-	-	93.987.532.140
134010205	Jembatan Pada Jalan Desa	32.485.895.054	-	-	32.485.895.054
134010209	Jembatan Pada Jalan Khusus	13.800.000	-	-	13.800.000
134010210	Jembatan Penyeberangan	15.239.146.080	-	-	15.239.146.080
13402	**Bangunan Air**	**200.772.439.392**	**14.991.480.783**	**(8.227.488.319)**	**207.536.431.856**
1340201	Bangunan Air Irigasi	77.812.560.258	7.024.289.600	(4.415.640.100)	80.421.209.758
134020101	Bangunan Waduk Irigasi	201.900.000	-	-	201.900.000
134020102	Bangunan Pengambilan Irigasi	6.719.771.325	-	-	6.719.771.325
134020103	Bangunan Pembawa Irigasi	26.130.829.228	24.370.500	-	26.155.199.728
134020104	Bangunan Pembuang Irigasi	9.831.432.530	-	-	9.831.432.530
134020105	Bangunan Pengaman Irigasi	10.064.802.868	4.391.273.100	(4.351.640.100)	10.104.435.868
134020106	Bangunan Pelengkap Irigasi	24.863.824.307	-	-	24.863.824.307
134020106	Bangunan Sawah Irigasi		2.608.646.000	(64.000.000)	2.544.646.000
1340202	Bangunan Pengairan Pasang Surut	27.444.959.350	-	-	27.444.959.350
134020201	Bangunan Waduk Pasang Surut	9.314.583.050	-	-	9.314.583.050
134020205	Bangunan Pengaman Pasang Surut	18.130.376.300	-	-	18.130.376.300
1340203	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	9.893.400	-	-	9.893.400

Kode Rekening	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2021
134020304	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	9.893.400	-	-	9.893.400
1340204	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	23.494.896.083	2.443.495.266	-	25.938.391.349
134020401	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	0	219.318.930		219.318.930
134020404	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	6.204.216.600	-	-	6.204.216.600
134020405	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	15.141.048.699	-	-	15.141.048.699
134020406	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	2.029.504.000	2.224.176.336	-	4.253.680.336
134020471	Bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan bencana alam lainnya	120.126.784	-		120.126.784
1340205	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	935.415.700	-	-	935.415.700
134020502	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	931.273.700	-	-	931.273.700
134020506	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	4.142.000	-	-	4.142.000
1340206	Bangunan Air Bersih/Air Baku	55.072.346.909	3.313.000.000	(3.478.071.219)	54.907.275.690
134020602	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	729.553.469	-	-	729.553.469
134020603	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	13.330.888.555	-	-	13.330.888.555
134020605	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	25.016.596.101	-	(165.071.219)	24.851.524.882
134020606	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	15.995.308.784	3.313.000.000	(3.313.000.000)	15.995.308.784
1340207	Bangunan Air Kotor	16.002.367.692	2.210.695.917	(333.777.000)	17.879.286.609
134020701	Bangunan Pembawa Air Kotor	6.944.450.121	2.011.507.418	-	8.955.957.539
134020703	Bangunan Pembuang Air Kotor	1.738.963.075	175.926.499	-	1.914.889.574
134020705	Bangunan Pelengkap Air Kotor	7.318.954.496	23.262.000	(333.777.000)	7.008.439.496
13403	**Instalasi**	**48.011.824.100**	**3.108.898.517**	**(1.620.110.100)**	**49.500.612.517**
1340301	Instalasi Air Bersih / Air Baku	23.401.653.436	10.500.000	-	23.412.153.436
134030103	Instalasi Air Tanah Dalam	33.600.000	-	-	33.600.000
134030105	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	23.368.053.436	10.500.000	-	23.378.553.436
1340302	Instalasi Air Kotor	14.447.617.304	2.893.126.400	(1.588.917.900)	15.751.825.804
134030201	Instalasi Air Buangan Domestik	14.447.617.304	1.588.917.900	(1.588.917.900)	14.447.617.304
134030204	Instalasi Kotor Lainnya		1.304.208.500		1.304.208.500

Kode Rekening	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2021
1340305	Instalasi Pembangkit Listrik	3.430.205.770	205.272.117	(31.192.200)	3.604.285.687
134030501	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (Plta)	218.308.000	-	-	218.308.000
134030502	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Pltd)	1.251.555.395	19.253.917	-	1.270.809.312
134030509	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Plts)	1.938.898.375	-	-	1.938.898.375
134030510	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (Pltb)	21.444.000	-	-	21.444.000
134030512	Instalasi Pembangkit Listrik lainnya		186.018.200	(31.192.200)	154.826.000
1340306	Instalasi Gardu Listrik	4.874.076.290	-	-	4.874.076.290
134030601	Instalasi Gardu Listrik Induk	1.273.701.410	-	-	1.273.701.410
134030602	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	2.552.244.940	-	-	2.552.244.940
134030603	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	872.019.940	-	-	872.019.940
134030604	Instalasi gardu listrik lainnya	176.110.000	-	-	176.110.000
1340307	Instalasi Pertahanan	1.660.495.300	-	-	1.660.495.300
134030701	Instalasi Pertahanan Di Darat	1.660.495.300	-	-	1.660.495.300
1340309	Instalasi Pengaman	197.776.000	-	-	197.776.000
134030901	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	197.776.000	-	-	197.776.000
13404	**Jaringan**	**220.352.715.832**	**7.635.250.043**	**-**	**227.987.965.875**
1340401	Jaringan Air Minum	37.786.193.060	7.624.750.043	-	45.410.943.103
134040101	Jaringan Pembawa	8.292.455.269	1.584.442.357	-	9.876.897.626
134040102	Jaringan Induk Distribusi	11.341.991.702	5.129.343.336	-	16.471.335.038
134040103	Jaringan Cabang Distribusi	7.142.909.450	-	-	7.142.909.450
134040104	Jaringan Sambungan Ke Rumah	11.008.836.639	-	-	11.008.836.639
134040105	Jaringan Air Minum Lainnya		910.964.350		910.964.350
1340402	Jaringan Listrik	181.094.903.030	10.500.000	-	181.105.403.030
134040201	Jaringan Transmisi	34.079.337.240	-	-	34.079.337.240
134040202	Jaringan Distribusi	146.936.335.790	-	-	146.936.335.790
134040203	Jaringan listrik lainnya	79.230.000	10.500.000	-	89.730.000
1340403	Jaringan Telepon	816.819.742	-	-	816.819.742
134040301	Jaringan Telepon Diatas Tanah	816.819.742	-	-	816.819.742
1340404	Jaringan Gas	654.800.000	-	-	654.800.000
134040402	Jaringan Pipa Distribusi	654.800.000	-	-	654.800.000
	JUMLAH	1.141.199.238.936	224.263.528.184	(25.712.027.384)	1.339.750.739.736

Rekapitulasi Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

NO	OPD	Saldo Awal Per 1-1-2021	Realisasi Belanja Modal 2021	Penyesuaian/ Koreksi 2021		Saldo Akhir Per 31-12-2021
				Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.229.243.515,00	-	2.451.014.847	-	5.680.258.362
2	Dinas Kesehatan	10.269.034.902,00	1.294.303.000	9.905.500	-	11.573.243.402
3	Rumah Sakit Umum Daerah	3.945.962.500,00	-	-	-	3.945.962.500
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	749.713.516.921,61	108.198.066.139	102.299.231.930	(28.168.954.965,00)	932.041.860.026
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	121.414.310.439,42	925.296.455	6.180..210.474	-	128.519.817.368
6	Kantor Kesbangpol	102.415.500,00	-	-	-	102.415.500
7	Kantor Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	111.153.600,00	-	-	-	111.153.600
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	53.569.408.388,00	-	-	-	53.569.408.388
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	4.900.000,00	-	-	-	4.900.000
11	Dinas Kependudukan dan Capil	9.800.000,00	-	-	-	9.800.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	60.095.650,00	-	-	-	60.095.650
13	Dinas Perhubungan	14.470.444.301,00	1.923.626.706	300.549.630	-	16.694.620.637
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34.661.000,00	-	-	-	34.661.000
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-	-
17	Dinas Perikanan	11.550.099.315,00	-	-	-	11.550.099.315
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3.633.462.710,00	-	-	-	3.633.462.710
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.050.417.289,00	3.079.351.167	39.646.000	-	20.169.414.456
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	141.471.337.293,00	-	-	-	141.471.337.293
21	Sekretariat Daerah	6.781.261.115,00	50.446.117	-	(31.192.200,00)	6.800.515.032
22	Sekretariat DPRD	776.717.550,00	-	-	-	776.717.550
23	Kecamatan Pagai Utara	24.915.000,00	-	-	-	24.915.000
24	Kecamatan Sipora Selatan	66.105.000,00	-	-	-	66.105.000
25	Kecamatan Sipora Utara	425.686.200,00	-	-	-	425.686.200
26	Kecamatan Siberut Selatan	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	832.906.000,00	-	-	-	832.906.000
28	Kecamatan Siberut Tengah	24.000.000,00	-	-	-	24.000.000
29	Kecamatan Siberut Utara	116.160.000,00	-	-	-	116.160.000
30	Kecamatan Siberut Barat	101.012.000,00	-	-	-	101.012.000
31	Kecamatan Pagai Selatan	20.692.000,00	-	-	-	20.692.000

NO	OPD	Saldo Awal Per 1-1-2021	Realisasi Belanja Modal 2021	Penyesuaian/ Koreksi 2021		Saldo Akhir Per 31-12-2021
				Tambah	Kurang	
32	Kecamatan Sikakap	40.370.000,00	-	-	-	40.370.000
33	Inspektorat	64.304.500,00	-	-	-	64.304.500
34	Bappeda	719.075.140,00	-	-	-	719.075.140
35	BKD	302.161.812,00	-	-	-	302.161.812
36	BKPSDM	259.609.295,00	-	-	-	259.609.295
Total		**1.141.199.238.936,03**	**115.471.089.584**	**111.280.558.381**	**-28.200.147.165,00**	**1.339.750.739.736,03**

5.3.3.5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
20.580.681.404,00	**18.946.541.582,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai posisi 31 Desember 2021 dan 2020. Terdapat penambahan nilai Aset Tetap Lainnya pada tahun 2021 sebesar Rp.1.634.139.822,00 atau 7,94% dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Penambahan:

- Belanja Modal Tahun 2021 (LRA)	Rp	1.582.865.326,00
- Reklasifikasi dari KIB B	Rp	404.057.496,00
Jumlah Mutasi Penambahan	**Rp**	**1.986.922.822,00**

Mutasi Pengurangan:

- Reklas Ke Barang dan Jasa	Rp	1.200.000,00
- Reklas Ke Aset Tidak Berujud	Rp	351.583.000,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	**Rp**	**352.783.000,00**
Jumlah Bersih Mutasi	**Rp**	**1.634.139.822,00**

Mutasi penambahan aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Modal Tahun 2021 pada OPD sebagai berikut:

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.231.282.326,00
2	Badan Keuangan Daerah	351.583.000,00
	TOTAL	**1.582.865.326,00**

- Penambahan aset tetap lainnya berasal dari realisasi belanja modal APBD TA 2021 sebesar Rp.1.231.282.326,00 pada Dinas Pendidikan berupa pengadaan buku ilmu pengetahuan umum dengan rincian sebagai berikut:

No.	KIB E	Jumlah (Aset Tetap)
1	SDN 01 SIKAKAP	24.432.000
2	SDN 03 TAIKAKO	6.500.000
3	SDN 07 MATOBE	4.472.000
4	SDN 15 SIKAKAP	14.836.000
5	SDN 21 MAKALO	13.360.000

No.	KIB E	Jumlah (Aset Tetap)
6	SDN 26 TAIKAKO	18.308.000
7	SDN 35 MATOBE	7.000.700
8	SDN 36 TAIKAKO	10.690.000
9	SDN 38 SIKAKAP	11.665.000
10	SDN 01 SIOBAN	22.199.500
11	SDN 02 NEMNEM LELEU	12.936.000
12	SDN 03 BERIULOU	8.317.700
13	SDN 04 BOSUA	7.700.400
14	SDN 06 SAUREINU	12.992.000
15	SDN 07 NEMNEM LELEU	1.598.000
16	SDN 08 MATOBE	9.124.700
17	SDN 09 SAUREINU	4.000.000
18	SDN 10 MARA	11.039.000
19	SDN 14 BOSUA	12.000.000
20	SDN 19 MATOBE	7.500.000
21	SDN 20 MARA	5.000.000
22	SDN 25 BOSUA	7.000.000
23	SDN 27 BERIULOU	9.600.000
24	SDN 05 GOISO OINAN	2.571.500
25	SDN 11 TUAPEJAT	1.720.000
26	SDN 12 BETUMONGA	10.000.000
27	SDN 16 TUAPEJAT	14.300.000
28	SDN 17 TUAPEJAT	17.880.000
29	SDN 18 TUAPEJAT	5.398.200
30	SDN 21 GOISO OINAN	6.500.000
31	SDN 22 TUAPEJAT	9.354.700
32	SDN 23 TUAPEJAT	11.468.900
33	SDN 26 TUAPEJAT	3.935.000
34	SDN 06 SINAKA	5.000.000
35	SDN 08 MAKALO	2.307.300
36	SDN 09 MAKALO	2.974.300
37	SDN 12 MALAKOPA	5.967.000
38	SDN 16 MAKALO	4.500.000
39	SDN 22 MAKALO	3.982.900
40	SDN 23 SINAKA	3.826.000
41	SDN 24 MALAKOPA	7.600.000
42	SDN 25 MALAKOPA	10,000.000
43	SDN 28 MAKALO	7.568.000
44	SDN 29 SINAKA	4.017.000
45	SDN 30 SINAKA	1.377.000
46	SDN 34 SINAKA	4.985.000
47	SDN 39 MALAKOPA	2.000.000
48	SDN 41 BULASAT	6.000.000
49	SDN 42 SINAKA	4.914.100
50	SDN 12 MONGANPOULA	12.739.402
51	SDN 06 MALANCAN	17.000.000
52	SDN 01 SAIBI SAMUKOP	45.000.000
53	SDN 03 SAIBI SAMUKOP	38.739.000
54	SDN 10 CIMPUNGAN	7.776.000
55	SDN 20 SAIBI SAMUKOP	17.962.824
56	SDN 22 SALIGUMA	9.720.500
57	SDN 03 SOTBOYAK	10.179.000
58	SDN 04 MA. SIKABALUAN	10.000.000
59	SDN 09 MA SIKABALUAN	13.015.000
60	SDN 23 BOJAKAN	13.055.600
61	SDN 07 SIRILOGUI	19.589.000
62	SDN 08 MA. SIKABALUAN	14.500.000
63	SDN 18 SIMALEGI	15.228.600
64	SDN 16 SIGAPOKNA	7.811.000
65	SDN 05 SIMATALU	5.064.000
66	SDN 27 SIMATALU	9.185.000
67	SDN 26 SIMALEGI	6.408.000
68	SDN 24 SIGAPOKNA	6.443.400
69	SDN 20 SAUMANGANYA	3.393.000

No.	KIB E	Jumlah (Aset Tetap)
70	SDN 27 SILABU	12.117.000
71	SDN 37 SAUMANGANYA	8.350.000
72	SDN 05 KATUREI	4.889.600
73	SDN 12 MUNTEI	7.859.000
74	SDN 17 MUNTEI	23.813.300
75	SDN 19 KATUREI	7.200.000
76	SDN 06 MADOBAG	10.662.000
77	SDN 07 MADOBAG	3.304.000
78	SDN 15 SIMALEPPET	11.023.900
79	SDN 26 SAGULUBBE	15.006.000
80	SDN 10 SALIGUMA	3.274.000
81	SDN 15 BOJAKAN	5.865.000
82	SDN 20 MALANCAN	10.000.000
83	SDN 21 MUARA SIKABALUAN	2.826.000
84	SDN 22 SIMATALU	20.000.000
85	SDN 25 SIMATALU	3.758.800
86	SDN 28 SIMATALU	6.176.200
87	SDN 29 SIMATALU	7.198.000
88	SDN 04 BETUMONGA	24.100.000
89	SDN 05 SILABU	15.159.500
90	SDN 01 MALANCAN	4.600.000
91	SDN 02 SIGAPOKNA	23.553.000
92	SDN 19 SIGAPOKNA	10.804.200
93	SDN 27 SAGULUBBE	20.958.000
94	SDN 16 SALIGUMA	28.000.000
95	SDN 10 SAUMANGANYA	8.325.400
96	SDN 11 SAUMANGANYA	9.800.000
97	SDN 04 KATUREI	6.900.000
98	SDN 09 MA. SIBERUT	25.345.000
99	SDN 13 MA. SIBERUT	18.622.500
100	SDN 14 PASAKIAT TAILELEU	42.245.000
101	SDN 18 PASAKIAT TAILELEU	14.442.500
102	SDN 18 SAUMANGANYA	8.278.000
103	SDN 19 SAUMANGANYA	2.649.200
104	SDN 23 MUNTEI	13.238.800
105	SDN 25 PASAKIAT TAILELEU	8.954.200
106	SDN 43 SILABU	10.000.000
107	SDN 02 MATOTONAN	56.284.000
108	SDN 08 SAGULUBBEG	9.273.000
109	SDN 21 MADOBAG	20.000.000
	TOTAL	1.230.082.326

- Penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp.404.057.496,00 berupa reklasifikasi dari dana BOS SMP yang terdapat pada Dinas Pendidikan berupa buku-buku ilmu pengetahuan dan alat peraga siswa SMP.

Mutasi pengurangan aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Reklasifikasi ke Barang dan Jasa dengan nilai sebesar Rp.1.200.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yakni pada SDN 25 Malakopa.
- Reklasifikasi ke Aset Tidak Berujud dengan nilai sebesar Rp351.583.000,00 pada Badan Keuangan Daerah yakni berupa Software Aplikasi Pajak PBBP2.

Adapun rincian aset tetap lainnya sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Saldo Per 1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
1.3.5.01	**Bahan Perpustakaan**				

Kode Rekening	Uraian	Saldo Per 1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
1.3.5.01.01	**Bahan Perpustakaan Tercetak**	**13.544.602.106,00**	**1.631.639.222,00**	**-1.200.000,00**	**15.175.041.328,00**
1.3.5.01.01.01	Buku Umum	10.173.579.821,00	1.254.794.798,00	-	11.428.374.619,00
1.3.5.01.01.02	Buku Filsafat	9.150.000,00	912.000	-	10.062.000,00
1.3.5.01.01.03	Buku Agama	156.686.014,00	155.286.300,00	-	311.972.314,00
1.3.5.01.01.04	Buku Ilmu Sosial	1.029.687.963,00	31.292.900,00	-	1.060.980.863,00
1.3.5.01.01.05	Buku Ilmu Bahasa	182.812.814,00	43.202.900,00	-	226.015.714,00
1.3.5.01.01.06	Buku Matematika Dan Pengetahuan Alam	394.344.765,00	83.646.974,00	(1.200.000)	476.791.739,00
1.3.5.01.01.07	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	66.617.989,00	25.656.800	-	92.274.789,00
1.3.5.01.01.08	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga	1.529.918.740,00	36.846.550,00	-	1.566.765.290,00
1.3.5.01.01.10	Serial	1.804.000,00	-	-	1.804.000,00
1.3.5.01.02	**Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro**	**107.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**107.250.000,00**
1.3.5.01.02.01	Audio Visual	107.250.000,00	-	-	107.250.000,00
1.3.5.01.03	**Kartografi, Naskah Dan Lukisan**	**1.607.335.300,00**	**1.477.000,00**	**0,00**	**1.608.812.300,00**
1.3.5.01.03.01	Bahan Kartografi	1.607.335.300,00	1.477.000	-	**1.608.812.300,00**
1.3.5.01.05	**Karya Grafika (Graphic Material)**	**301.474.500,00**	**0,00**	**0,00**	**301.474.500,00**
1.3.5.01.05.01	Karya Grafika	301.474.500,00	-	-	**301.474.500,00**
1.3.5.01.06	**Three Dimensional Artefacs And Realita**	**8.484.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.484.000,00**
1.3.5.01.06.01	Three Dimensional Artefacs And Realita	8.484.000,00	-	-	**8.484.000,00**
1.3.5.01.07	**Tarscalt**	**2.882.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.882.000,00**
1.3.5.01.07.01	Tarscalt	2.882.000,00	-	-	**2.882.000,00**
1.3.5.02	**Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**				
1.3.5.02.01	**Barang Bercorak Kesenian**	**645.628.794,00**	**0,00**	**0,00**	**645.628.794,00**
1.3.5.02.01.01	Alat Musik	451.697.882,00	-	-	**451.697.882,00**
1.3.5.02.01.02	Lukisan	193.930.912,00	-	-	**193.930.912,00**
1.3.5.02.02	**Alat Bercorak Kebudayaan**	**427.278.600,00**	**622.000,00**	**0,00**	**427.900.600,00**
1.3.5.02.02.01	Pahatan	22.585.000,00	-	-	**22.585.000,00**
1.3.5.02.02.02	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen Dan Benda Bersejarah	113.355.000,00	-	-	**113.355.000,00**
1.3.5.02.02.03	Barang Kerajinan	291.338.600,00	-	-	**291.338.600,00**
1.3.5.02.02.04	Alat Bercorak kebudayaan lainnya		622.000		**622.000,00**
1.3.5.02.03	**Tanda Penghargaan**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**
1.3.5.02.03.01	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	600.000,00	-	-	**600.000,00**
1.3.5.03	**Hewan**				
1.3.5.03.03	**Hewan lainnya**	**0**	**956400**	**0**	**956400**
1.3.5.03.03.01	Hewan lainnya	**0**	**956.400**	-	**956.400**
1.3.5.04	**Biota Perairan**				
1.3.5.04.01	**Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)**	**47.795.000,00**	**0,00**	**0,00**	**47.795.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Saldo Per 1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2021
		Rp	Rp	Rp	Rp
1.3.5.04.01.01	Ikan Budidaya	47.795.000,00	-	-	**47.795.000,00**
1.3.5.04.09	**Algae**	**0,00**	**243.200,00**	**0,00**	**243.200,00**
1.3.5.04.09.01	Algae	0,00	243.200	-	**243.200,00**
1.3.5.05	**Tanaman**	0			**0,00**
1.3.5.05.01	**Tanaman**	**2.253.211.282,00**	**0,00**	**0,00**	**2.253.211.282,00**
1.3.5.05.01.01	Tanaman	2.253.211.282,00	-	-	**2.253.211.282,00**
1.3.5.06	**barang Koleksi non Budaya**				
1.3.5.06.01	**barang Koleksi non Budaya**	**0,00**	**402.000,00**	**0,00**	**402.000,00**
1.3.5.06.01.07	barang Koleksi non Budaya		402.000		402.000
	Jumlah	**18.946.541.582,00**	**1.635.339.822,00**	**-1.200.000,00**	**20.580.681.404,00**

RekapitulasiAset Tetap Lainnya masing-masing OPD Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

NO	OPD	Saldo Awal Per 1 Januari 2021	Realisasi Belanja Modal 2021	Penyesuaian/Koreksi 2020		Saldo Akhir Per 31 Desember 2021
				Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.313.885.658,00	1.231.282.326	404.057.496,00	(1.200.000)	14.948.025.480,00
2	Dinas Kesehatan	206.890.850,00	-	-	-	206.890.850,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	177.807.220,00	-	-	-	177.807.220,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.088.700,00	-	-	-	17.088.700,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.623.000,00	-	-	-	2.623.000,00
6	Kantor Kesbangpol	10.077.760,00	-	-	-	10.077.760,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran	27.622.200,00	-	-	-	27.622.200,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.619.500,00	-	-	-	19.619.500,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.871.500,00	-	-	-	8.871.500,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.870.968.032,00	-	-	-	1.870.968.032,00
11	Dinas Kependudukan dan Capil	1.904.500,00	-	-	-	1.904.500,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	134.199.100,00	-	-	-	134.199.100,00
13	Dinas Perhubungan	8.721.500,00	-	-	-	8.721.500,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	723.500,00	-	-	-	723.500,00
15	Dinas Penanaman Modal dan	2.793.600,00	-	-	-	2.793.600,00

NO	OPD	Saldo Awal Per 1 Januari 2021	Realisasi Belanja Modal 2021	Penyesuaian/Koreksi 2020		Saldo Akhir Per 31 Desember 2021
				Tambah	Kurang	
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	773.057.463,00	-	-	-	773.057.463,00
17	Dinas Perikanan	63.995.000,00	-	-	-	63.995.000,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	156.867.250,00	-	-	-	156.867.250,00
0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	382.943.700,00	-	-	-	382.943.700,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	23.708.000,00	-	-	-	23.708.000,00
21	Sekretariat Daerah	1.218.885.550,00	-	-	-	1.218.885.550,00
22	Sekretariat DPRD	69.253.250,00	-	-	-	69.253.250,00
23	Kecamatan Pagai Utara	420.000,00	-	-	-	420.000,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	11.800.000,00	-	-	-	11.800.000,00
25	Kecamatan Sipora Utara	13.260.370,00	-	-	-	13.260.370,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	8.600.900,00	-	-	-	8.600.900,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	15.958.812,00	-	-	-	15.958.812,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	62.875.000,00	-	-	-	62.875.000,00
29	Kecamatan Siberut Utara	17.614.369,00	-	-	-	17.614.369,00
30	Kecamatan Siberut Barat	30.820.268,00	-	-	-	30.820.268,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	18.555.000,00	-	-	-	18.555.000,00
32	Kecamatan Sikakap	7.687.500,00	-	-	-	7.687.500,00
33	Inspektorat	91.237.110,00	-	-	-	91.237.110,00
34	Bappeda	109.876.000,00	-	-	-	109.876.000,00
35	BKD	52.794.000,00	351.583.000	-	(351.583.000)	52.794.000,00
36	BKPSDM	12.535.420,00	-	-	-	12.535.420,00
Total		**18.946.541.582,00**	**1.582.865.326,00**	**404.057.496,00**	**(352.783.000)**	**20.580.681.404,00**

3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	52.955.574.094,00	**128.399.475.260,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai posisi 31 Desember 2021 dan 2020. Terdapat pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2021 sebesar Rp.75.443.901.166,00 atau 58,75 % dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Penambahan:

-	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	Rp	9.006.416.714,00
-	Reklasifikasi dari barang dan jasa	Rp	2.625.864.881,00
-	Reklasifikasi dari KIB D	Rp	20.216.069.065,00
-	Penambahan DPAL tahun 2022	Rp	4.166.975.670,00
	Jumlah Mutasi Penambahan	**Rp**	**36.015.316.330,00**

Mutasi Pengurangan :

-	Reklasifikasi ke KIB D	Rp	100.431.833.646,00
-	Reklasifikasi ke KIB C	Rp	10.965.720.350,00
-	Mutasi Antar OPD	Rp	61.663.500,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan	**Rp**	**111.459.217.496,00**
	Jumlah Bersih Mutasi	**Rp**	**75.443.901.166,00**

Mutasi penambahan nilai aset tetap konstruksi dalam pengerjaan dengan dijelaskan sebagai berikut:

- Penambahan karena adanya reklasifikasi dari belanja Gedung dan Bangunan (KIB C) sebesar Rp.4.005.416.714,00 pada OPD dengan rincian sebagai berikut :

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	41.532.500,00
2	Dinas Kesehatan	**8.964.874.214,00**
	TOTAL	**9.006.406.714,00**

- Penambahan karena adanya reklasifikasi dari belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.2.625.864.881,00 pada OPD dengan rincian sebagai berikut :

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	114.310.847,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.059.712.500,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.353.360.734,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	49.610.000,00
5	Dinas Perhubungan	48.870.800,00
	TOTAL	**2.625.864.881,00**

- Penambahan karena adanya reklasifikasi dari belanja Jalan Irigasi dan Jaringan pada OPD dengan rincian sebagai berikut :

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.216.069.065,00
	TOTAL	**20.216.069.065,00**

- Penambahan DPAL tahun 2022

No	OPD	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	**4.166.975.670,00**
	TOTAL	**4.166.975.670,00**

Mutasi pengurangan nilai aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pengurangan karena adanya reklasifikasi dari belanja Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) sebesar Rp100.431.833.646,00 pada OPD dengan rincian sebagai berikut :

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	97.113.317.172,00
2	Dinas Perhubungan	85.628.000,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	39.646.000,00
4	Dinas Perwaskim	3.193.242.474,00
	TOTAL	**100.431.833.646,00**

- Reklasifikasi dari KIB F ke KIB C senilai Rp10.965.720.350,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- Mutasi antar OPD senilai Rp61.663.500 sebagai berikut :

No	OPD	Nilai (Rp)
1	Perwaskim	61.663.500,00
	TOTAL	**61.663.500,00**

Berikut rincian penambahan dan pengurangan aset konstruksi dalam pengerjaan sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Per 31 Desember 2021 Rp
	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
1	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	290.370.000,00	-	-	290.370.000,00
2	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	20.670.827.095,00	9.084.699.561,00	-10.965.720.350,00	18.789.806.306,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Pengerjaan	107.438.278.165,00	26.930.616.769,00	- 100..493.497.146,00	33.875.379.788,00
	Jumlah	**128.399.475.260,00**	**36.015.316.330,00**	**- 111.459.217.496,00**	**52.955.574.094,00**

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No	OPD	Saldo Awal Per 1-1-2021	Realisasi Belanja Modal 2021	Penyesuaian/ Koreksi 2020		Saldo Akhir Per 31-12-2021
				Tambah	Kurang	
1	Dinas Kesehatan	4.177.985.240,00	-	9.079.185.061,00	-	13.257.170.301,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	114.795.685.541,00	-	25.442.757.235,00	- 108.079.037.522,00	32.159.405.254,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.717.370.974,00	-	-	-3.254.905.974,00	462.465.000,00

No	OPD	Saldo Awal Per 1-1-2021	Realisasi Belanja Modal 2021	Penyesuaian/ Koreksi 2020		Saldo Akhir Per 31-12-2021
				Tambah	Kurang	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.295.458.055,00	-	1.353.360.734,00	-	5.648.818.789,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	41.532.500,00	-	41.532.500,00
6	Kecamatan Siberut Utara	98.835.000,00	-	-	-	98.835.000,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	803.736.450,00	-	-	-	803.736.450,00
8	Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan	99.426.000,00	-	-	- 39.646.000,00	59.780.000,00
9	Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian	34.980.000,00	-	-	-	34.980.000,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	49.610.000,00	-	49.610.000,00
11	Dinas Perhubungan	375.998.000,00	-	48.870.800,00	- 85.628.000,00	339.240.800,00
Total		**128.399.475.260,00**	-	**36.015.316.330,00**	**111.4595.217.496,00**	**52.955.574.094,00**

Adapun rinciannya Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dapat dilihat pada **Lampiran 7**

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.3.3.7 Akumulasi Penyusutan	**(678.652.100.048,61)**	**(678.652.100.048,61)**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp774.346.988.342,74) dan mengalami kenaikan sebesar (Rp95.694.888.302,13) atau 12,36% dari tahun 2020 sebesar (Rp678.652.100.048,61) dengan sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal Per 1 Januari 2021	Penyesuaian/ Koreksi 2021		Saldo Akhir Per 31 Desember 2021
			Tambah	Kurang	
1	Tanah				
2	Peralatan dan Mesin	257.928.044.537,00	28.818.446.292,13	-5.687.810.717,00	281.058.680.112,13
3	Gedung dan Bangunan	88.962.835.231,00	13.699.888.777,00	-614.956.348,00	102.047.767.660,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	331.761.220.272,61	59.866.504.357,00	0,00	391.627.724.629,61
5	Aset Tetap Lainnya				
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
	Jumlah	678.652.100.040,61	102.384.839.426,13	-6.302.767.065,00	774.734.172.401,74

Adapun saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berdasarkan OPD per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

NO	OPD	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2021	Semester I	Semester II	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	56.125.521.552,00	4.330.982.411,00	4.558.615.135,00	**65.464.809.251,00**
2	Dinas Kesehatan	54.506.997.904,00	5.000.538.877,18	5.513.190.172,00	65.078.655.686,18
3	Rumah Sakit Umum Daerah	33.716.389.468,00	1.322.723.853,95	1.354.256.057,00	**36.393.369.378,95**
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	304.726.117.427,61	23.825.983.404,00	25.382.190.369,00	**354.082.957.477,61**
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	25.080.017.634,00	2.470.286.250,00	2.485.818.821,00	**30.194.849.156,00**
6	Kantor Kesbangpol	1.013.607.727,00	35.252.095,00	34.206.314,00	**1.083.066.136,00**
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.505.481.970,00	243.261.798,00	241.920.932,00	**3.990.664.700,00**
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.054.498.781,00	83.141.621,00	97.862.773,00	**2.920.124.857,00**
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.529.114.803,00	1.450.596.146,00	1.024.204.287,00	**19.003.915.236,00**
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.082.838.930,00	142.954.679,00	142.954.684,00	**2.331.393.054,00**
11	Dinas Kependudukan dan Capil	1.951.838.732,00	79.805.791,00	76.051.432,00	**2.107.695.955,00**
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3.864.841.883,00	212.815.502,00	189.652.187,00	**4.113.023.572,00**
13	Dinas Perhubungan	28.603.017.219,00	1.626.192.467,00	1.654.105.933,00	**31.883.315.619,00**
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.100.313.868,00	242.337.857,00	239.661.754,00	**3.582.313.479,00**
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.505.629.320,00	137.107.216,00	133.189.572,00	**2.548.646.616,00**
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.427.677.696,00	44.949.527,00	43.624.838,00	**712.516.032,00**
17	Dinas Perikanan	18.725.916.702,00	758.236.698,00	653.179.745,00	**20.137.333.145,00**
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.752.362.388,00	493.603.486,00	491.112.569,00	**5.324.944.443,00**
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16.207.284.485,00	810.462.216,00	810.462.218,00	**17.252.988.596,00**
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	7.834.628.758,00	2.132.655.356,00	2.125.654.923,00	**12.092.939.037,00**
21	Sekretariat Daerah	42.259.335.228,00	2.767.207.341,00	1.981.941.687,00	**45.912.294.656,00**
22	Sekretariat DPRD	8.866.932.126,00	323.263.807,00	330.072.948,00	**8.381.081.226,00**
23	Kecamatan Pagai Utara	1.059.412.551,00	24.754.168,00	24.441.955,00	**1.108.608.674,00**
24	Kecamatan Sipora Selatan	2.495.116.315,00	60.749.858,00	61.146.312,00	**2.415.049.585,00**
25	Kecamatan Sipora Utara	2.329.163.761,00	75.054.849,00	74.310.381,00	**2.462.034.491,00**
26	Kecamatan Siberut Selatan	2.340.414.856,00	49.068.325,00	50.630.329,00	**2.426.433.510,00**
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	1.572.806.019,00	85.614.182,00	85.847.971,00	**1.744.268.172,00**
28	Kecamatan Siberut Tengah	1.301.704.067,00	50.162.823,00	45.932.962,00	**1.397.799.852,00**
29	Kecamatan Siberut Utara	1.649.457.903,00	87.629.678,00	80.052.088,00	**1.817.139.669,00**
30	Kecamatan Siberut Barat	973.465.325,00	55.741.034,00	52.719.892,00	**1.081.926.251,00**

NO	OPD	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2021	Semester I	Semester II	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021
31	Kecamatan Pagai Selatan	1.674.538.549,00	88.248.973,00	86.742.386,00	**1.849.529.908,00**
32	Kecamatan Sikakap	1.262.156.725,00	14.496.289,00	14.496.289,00	**1.291.149.303,00**
33	Inspektorat	2.439.797.893,00	56.303.027,00	59.674.772,00	**2.555.775.692,00**
34	Bappeda	5.925.758.959,00	342.349.349,00	332.893.737,00	**6.601.002.045,00**
35	BKD	8.530.010.048,00	338.239.038,00	355.296.854,00	**8.722.483.780,00**
36	BKPSDM	4.657.932.468,00	92.845.013,00	92.636.680,00	**4.668.074.161,00**
Total		**678.652.100.040,61**	**49.955.615.005,13**	**50.980.751.958,00**	**774.734.172.401,74**

5.3.4 Aset Lainnya	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	80.853.493.787,86	**82.756.796.163,62**

Jumlah tersebut merupakan nilai aset lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp**80.853.493.787,86** dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis	Saldo 31 Des 2021	Saldo 31 Des 2020
		(Rp)	(Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	1.338.253.318,00	607.841.468,00
2	Aset Tak Berwujud	10.019.125.626,82	9.667.542.626,82
3	Aset Lain – Lain	224.079.804.997,31	228.649.635.645,31
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(7.636.693.876,08)	(6.561.997.750,72)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(146.946.996.278,19)	(150.423.795.977,79)
6	Kas yang dibatasi penggunaannya	0,00	817.570.152,00
	Jumlah	**80.853.493.787,86**	**82.756.796.163,62**

5.3.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang merupakan Tuntutan Perbendaharaan atas kerugian negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara sebesar Rp607.841.468,00 dan dana bantuan bencana dari masyarakat sebesar Rp730.411.850,00 yang tahun sebelumnya dicatat pada akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya. Terdapat saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.338.253.318,00 yang terdiri dari:

NO	JENIS	SALDO PER 31 DES 2020 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	SALDO PER 31 DES 2021 (Rp)
1	Tuntutan Perbendaharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan saldo kas di bendahara pengeluaran TA 2005	597.936.530,00	0,00	s,00	597.936.530,00
2	Tuntutan Perbendaharaan pada Sekretariat DPRD An. ASNA (Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD)	9.904.938,00	0,00	0,00	9.904.938,00
3	Dana Bantuan Bencana Gempa dan Banjir dari Masyarakata pada Badan Penanggulangan Bencana	817.570.152,00	0,00	(87.158.302,00)	730.411.850,00
	JUMLAH	**1.425.411.620,00**	**0,00**	**0,00**	**1.338.253.318,00**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tuntutan Perbendaharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp597.936.530,00 yang merupakan saldo kas di bendahara pengeluaran TA 2005 yang telah ditetapkan dengan putusan pengadilan merupakan hasil temuan BPK tehadap kegiatan Proyek Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan DAK NON DR dan Pendamping DAK NON DR yang telah melalui proses hukum pidana atas nama Ali Arifin (mantan Plt. Kepala Dinas PU). Jumlah tersebut belum termasuk kasus yang sedang proses penyidikan hukum di Polda Sumatera Barat Padang terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas temuan BPK tahun 2020 sesuai dengan LHP Nomor 06/LHP/XVIII.PDG/01/2021 Tanggal 27 Januari 2021 terhadap belanja daerah pada kegiatan Swakelola Pemeliharaan jalan dan Jembatan dan Pembangunan Jalan Desa Strategis Tahun Anggaran 2020.
2. Tuntutan Perbendaharaan atas kekuarangan kas pada bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Tahun 2015 sebesar Rp9.904.938,00. Berdasarkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) atas nama Asna (Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD) sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas kerugian daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 41.C/LHP/XVIII.PDG/07/2016 Tanggal 25 Juli 2016.
3. Dana bantuan bencana gempa dan banjir yang berasal dari masyarakat Provinsi Sumatera Utara kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tanggap darurat Banjir Mentawai pada bulan April 2013 dan bantuan lauk pauk bencana Gempa Tahun 2007 yang ditampung dalam kas daerah dengan nomor rekening 2110.0101.00602.5 An. Bantuan Bantuan Bencana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dibuka pada Bank Nagari Cabang Mentawai dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 457 Tahun 2019 tanggal 31 Oktober 2019.

5.3.4.2 Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2021 sebesar Rp**10.019.125.626,82** berupa *software* pada beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada Tahun anggaran 2021 ada penambahan jumlah aset tak berwujud pada Badan Keuangan Daerah (BKD) sebesar Rp397.980.000,00 Berikut ini rincian aset tak berwujud antara lain:

NO	NAMA SOFTWARE	TAHUN PENGADAAN	SALDO PER 31 DES 2021 (Rp)	SALDO PER 31 DES 2020 (Rp)
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		419.760.000,00	419.760.000,00
1	Software gaji	2012	74.250.000,00	74.250.000,00
2	Jaringan Internet	2013	89.760.000,00	89.760.000,00
3	Software Kelas Unggul	2015	255.750.000,00	255.750.000,00
	RSUD		526.020.000,00	526.020.000,00
6	Aplikasi SIMRS	2017	526.020.000,00	526.020.000,00
	DINAS KESEHATAN		129.580.000,00	129.580.000,00
4	Software	2012	74.580.000,00	74.580.000,00
5	Software	2015	55.000.000,00	55.000.000,00
	BPBD		259.050.000,00	259.050.000,00
9	Sistem dan jaringan internet	2010	239.800.000,00	239.800.000,00
10	Software	2012	19.250.000,00	19.250.000,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		93.730.000,00	93.730.000,00
20	Software SIADINDA	2012	93.730.000,00	93.730.000,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		59.700.000,00	59.700.000,00
11	Jaringan Internet	2014	59.700.000,00	59.700.000,00
	DPMDP2KB		138.655.000,00	138.655.000,00
12	software gaji	2012	49.775.000,00	49.775.000,00
13	aplikasi SIADINDA	2012	88.880.000,00	88.880.000,00
	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perindag		49.500.000,00	49.500.000,00
21	Software gaji/SIADINDA	2013	49.500.000,00	49.500.000,00
	DPMPTSP		141.460.000,00	141.460.000,00
14	Software Penggajian	2013	49.500.000,00	49.500.000,00
15	Software SIADINDA	2014	91.960.000,00	91.960.000,00
	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga		404.940.000,00	404.940.000,00
16	Website	2014	39.270.000,00	39.270.000,00
17	System	2016	167.240.000,00	167.240.000,00
18	System surfing tax 2017	2017	149.930.000,00	149.930.000,00
19	System informasi satu pintu	2020	48.500.000,00	48.500.000,00
	Sekretariat Daerah		839.700.000,00	839.700.000,00
22	Software Sistem Gaji PNS	2012	68.750.000,00	68.750.000,00
23	Sistem Keuangan Berbasis Akrual / SIADINA	2015	129.250.000,00	129.250.000,00
24	Software Aplikasi Kepegawaian	2015	49.500.000,00	49.500.000,00
25	Software Aplikasi Surat	2015	49.830.000,00	49.830.000,00
26	Software Kearsipan Elektronik + Honor PBJ	2016	90.770.000,00	90.770.000,00
27	Software Windows 7	2016	14.850.000,00	14.850.000,00
28	Software (Aplikasi Kelembagaan)	2016	77.000.000,00	77.000.000,00
29	Website Portal Aplikasi	2016	79.420.000,00	79.420.000,00
30	Software Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2017	19.470.000,00	19.470.000,00
31	Aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Jabatan	2017	98.450.000,00	98.450.000,00
32	Aplikasi Sistem Informasi Standar Kompetensi Manajerial	2017	98.450.000,00	98.450.000,00
33	Aplikasi Sistem Informasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	2017	49.500.000,00	49.500.000,00
34	Jaringan Internet Wifi Wireless (Unifi. AP, AC, LR) LPSE dan ULP	2018	14.460.000,00	14.460.000,00
	BAPPEDA		3.681.277.626,82	3.681.277.626,82
41	Pengadaan Software E - Planning	2016	199.650.000	199.650.000
42	Pengadaan Software Pusdalisbang	2016	199.100.000	199.100.000
43	Pengadaan Software ArcGISDesktop	2016	49.885.000	49.885.000
c	Pengadaan Software Simonep	2017	199.980.000	199.980.000
45	Pengadaan Software E - Planning Berbasis Adroid	2018	382.260.000	382.260.000
46	Pengadaan Software E - Kemiskinan	2018	179.020.000	179.020.000

NO	NAMA SOFTWARE	TAHUN PENGADAAN	SALDO PER 31 DES 2021 (Rp)	SALDO PER 31 DES 2020 (Rp)
47	software aplikasi Sistem E-SAKIP	2019	118.800.000	118.800.000
48	software ArcGIS For Destop (Hibah LKN)	2019	36.296.126,82	36.296.126,82
49	Rencana induk bandar udara PeiPei	2020	1.720.884.000,00	1.720.884.000,00
50	Perencanaan Tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum	2020	595.402.500,00	595.402.500,00
	BADAN KEUANGAN DAERAH		2.209.998.000,00	1.858.415.000,00
51	SIMBADA	2007	98.800.000,00	98.800.000,00
75	Software SIADINDA	2012	88.880.000,00	88.880.000,00
52	Sofware PBB	2013	157.960.000,00	157.960.000,00
53	Software Bansos	2013	89.650.000,00	89.650.000,00
54	Sofware PBB Online Bank Nagari	2014	49.500.000,00	49.500.000,00
55	Software penyusunan Sistem Keuangan Daerah Berbasis Akrual DPPKAD	2014	196.570.000,00	196.570.000,00
56	Software penyusunan Sistem Keuangan Daerah Berbasis Akrual SKPD	2015	194.150.000,00	194.150.000,00
57	JARINGAN SERVER	2017	44.110.000,00	44.110.000,00
58	Aplikasi SPPD	2018	48.620.000,00	48.620.000,00
59	Aplikasi Website BKD	2018	48.620.000,00	48.620.000,00
60	Aplikasi Surat Menyurat	2018	48.675.000,00	48.675.000,00
61	Aplikasi SISUBET	2019	49.500.000	49.500.000
62	Aplikasi Monitoring Realisasi SP2D Online	2019	98.450.000	98.450.000
63	Aplikasi SIMONEV	2019	73.700.000	73.700.000
64	Aplikasi Manajemen PKD	2019	73.700.000	73.700.000
65	Aplikasi Jaringan Internet Mobile	2019	99.550.000	99.550.000
66	Aplikasi Simpatda	2020	99.495.000,00	99.495.000,00
67	Aplikasi BPHTB/ Bank Nagari	2020	99.495.000,00	99.495.000,00
68	Aplikasi BPHTB/ BPN	2020	99.495.000,00	99.495.000,00
69	Aplikasi E-Potensi	2020	99.495.000,00	99.495.000,00
70	Software Aplikasi Pajak PBB P2	2021	149.900.000,00	
71	Software Office Automation	2021	99.800.000,00	
72	Sofware EPPAT	2021	99.984.000,00	
73	Software Microsoft Office	2021	1.899.000,00	
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PSDM		443.880.000,00	443.880.000,00
74	Jaringan Internet M2	2010	30.500.000,00	30.500.000,00
75	Aplikasi SIADINDA	2011	97.075.000,00	97.075.000,00
76	Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)	2011	97.130.000,00	97.130.000,00
77	Windows Server 2008 OEM 50 Client (CAT)	2015	69.740.000,00	69.740.000,00
78	Pengembangan SIMPEG	2016	149.435.000,00	149.435.000,00
	Sekretariat DPRD		264.840.000,00	264.840.000,00
79	Software Aplikasi Gaji	2008	92.290.000,00	92.290.000,00
80	Software	2010	172.550.000,00	172.550.000,00
	Kecamatan Siberut Utara		97.295.000,00	97.295.000,00
81	Software SIADINDA	2012	97.295.000,00	97.295.000,00
	Siberut Barat Daya		49.500.000,00	49.500.000,00
82	Software SIADINDA	2015	49.500.000,00	49.500.000,00
	Kecamatan Sipora Utara		49.500.000,00	49.500.000,00
83	Software SIADINDA	2012	49.500.000,00	49.500.000,00
	Kecamatan Pagai Selatan		64.790.000,00	64.790.000,00
84	Internet	2015	64.790.000,00	64.790.000,00
	KANTOR KESBANGPOLINMAS		95.950.000,00	95.950.000,00
85	Software SIADINDA	2013	88.550.000,00	88.550.000,00
86	Software	2015	7.400.000,00	7.400.000,00
	Jumlah		**10.019.125.626,82**	**9.667.542.626,82**

5.3.4.3 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp224.079.804.997,31 terdiri dari:

a. Sebesar Rp3.900.000.000,00 yang merupakan penyajian Investasi berupa pembangunan perumahan/pemukiman PNS/Swasta dan DPRD di Km 2 Tuapejat Sipora ke aset lain-lain, sampai dengan hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai atas perjanjian tersebut dapat ditentukan sejak tahun 2014.

b. Sebesar Rp3.946.795.542,45 merupakan jaminan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan uang muka atas pekerjaan fisik Tahun Anggaran 2012-2014 yang telahdiklaim, namun sampai dengan 31 Desember 2020 belum dibayar seluruhnya oleh perusahaan penjamin.

c. Sebesar Rp99.045.000,00 sebelumnya merupakan investasi dana bergulir pada Dinas Pertanian sebesar Rp28.750.000,00 dalam bentuk sapi yang dimulai Tahun 2005. Sapi disalurkan di 4 kecamatan 12 desa, masing-masing desa mendapat sebanyak 3 ekor sapi (1 jantan dan 2 betina) untuk dikembangbiakkan dan Dana bergulir pada Dinas Perikanan sebesar Rp 70.295.000,00 yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk mesin 15 PK dan fiber penangkap ikan. Penerima kredit adalah masyarakat yang bergerak di bidang penangkapan ikan dilaut sebanyak 31 orang. Atas nilai sebesar Rp99.045.000,00 diperkirakan tidak dapat tertagih seluruhnya yang disajikan pada akumulasi penyusutan aset lain-lain. Saldo sebesar Rp99.045.000,00 disajikan di Aset Lainnya karena sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir bahwa karakteristik dana bergulir adalah berupa uang, bukan berupa barang.

d. Terdapat Aset lain-lain dari koreksi atas ketekoran kas dibendahara pengeluaran SDN 18 Saumanganya sebesar Rp2.000.000.000,00, ketekoran kas di bendahara pengeluaran SDN 09 Siberut sebesar Rp7.100.000,00, koreksi ketekoran kas di bendahara pengeluaran Dinas LInkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp113.651.456,00, ketekoran kas di bendahara pengeluaran Kecamatan Pagai Selatan sebesar Rp22.603.300,00 dan koreksi atas ketekoran kas di bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah sebesar Rp20.400.000,00 pada kegiatan tahun anggaran 2020.

e. Aset lain-lain yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp213.742.860.198,00 dan tahun 2020 sebesar Rp220.703.795.102,86,00 merupakan aset tetap dalam kondisi rusak berat, aset tetap dalam penelusuran, aset dikuasai pihak ketiga, aset hilang, mutasi aset dan hibah. Jika dibandingkan dengan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.960.934.904,00 atau 3,26%. Tindak lanjut atas aset-aset diantaranya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sepakat melaksanakan hibah Jalan Provinsi, Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Yayasan Pendidikan berupa TK atau Paud melalui Berita Acara Serah terima Hibah Barang dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2021.

Berikut ini uraian penambahan dan pengurangan aset lain-lain tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Rusak Berat	68.122.004.191,00	4.337.639.237,00	(7.437.886.046,00)	65.021.757.382,00
2.	Hibah	139.840.255.332,86	0,00	-1.982.882.595,86	137.857.372.737,00
3.	Aset Dalam Penelusuran	8.446.808.908,00	495.437.500,00	-108.536.000,00	8.833.710..408,00
4.	Aset Hilang (TGR)	211.053.700,00	0'00	-31.240.000,00	179.813.700,00
5.	Dikuasi oleh pihak ketiga	3.054.095.796,00	0'00	0'00	3.054.095.796,00
6.	Mutasi aset	1.029.577.175,00	0'00	-8.117.500,00	1.021.459.675,00
	JUMLAH	**220.703.795.102,86**	**4.833.076.737,00**	**(9.568.662.141,86)**	**215.968.209.698,00**

Aset lain–lain yang kondisi rusak berat pada tahun 2021 sebesar Rp65.021.757.382,00 dan tahun 2020 sebesar Rp68.122.004.191,00 pada masing-masing OPD yakni terdiri dari:

No.	Dinas	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2021
1	Dinas Pendidikan	5.399.143.248,00	36.347.000,00	0,00	5.435.490.248,00
2	Dinas Kesehatan	6.686.658.415,00	0,00	0,00	6.686.658.415,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	7.192.029.133,00	0,00	(6.057.879.948,00)	1.134.149.185,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.462.720.550,00	0,00	0,00	3.462.720.550,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kantor Kesbangpol	630.413.802,00	0,00	0,00	630.413.802,00
7	Kantor Satuan Polisi Pamomg Praja dan Pemadam Kebakaran	756.786.000,00	0,00	0,00	756.786.000,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	611.082.234,00	118.368.333,00	(63.906.200,00)	665.544.367,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	546.718.040,00	0,00	0,00	546.718.040,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.339.589.415,00	147.242.000,00	0,00	1.486.831.415,00
11	Dinas Kependudukan dan Capil	615.845.964,00	0,00	0,00	615.845.964,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	746.749.100,00	0,00	(79.700.000,00)	667.049.100,00
13	Dinas Perhubungan	5.047.665.645,00	62.414.000,00	0,00	5.110.079.645,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	13.585.000,00	0,00	13.585.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan	133.540.175,00	227.774.492,00	(10.757.200,00)	350.557.467,00

No.	Dinas	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2021
	PelayananTerpadu Satu Pintu				
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	223.899.682,00	804.760.404,00	0,00	1.028.660.086,00
17	Dinas Perikanan	2.923.741.781,00	0,00	0,00	2.923.741.781,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.108.240.700,00	471.687.500,00	0,00	1.579.928.200.00
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.213.278.602,00	606.240.323,00	0,00	1.819.518.925,00
20	DinasKoperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2.082.514.450,00	0,00	(11.110.000,00)	2.071.404.450,00
21	Sekretariat Daerah	16.068.974.205,00	1.173.117.000,00	0,00	17.242.091.205,00
22	Sekretariat DPRD	1.831.067.209,00	48.400.000,00	0,00	1.879.467.209,00
23	Kecamatan Pagai Utara	132.499.000,00	0,00	0,00	132.499.000,00
24	Kecamatan Sipora Selatan	828.762.450,00	204.382.900,00	0,00	1.033.145.350,00
25	Kecamatan Sipora Utara	743.178.000,00	0,00	0,00	743.178.000,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	277.852.000,00	0,00	0,00	277.852.000,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	918.765.600,00	0,00	0,00	918.765.600,00
28	KecamatanSiberut Tengah	347.301.100,00	0,00	0,00	347.301.100,00
29	Kecamatan Siberut Utara	619.513.300,00	0,00	0,00	619.513.300,00
30	Kecamatan Siberut Barat	577.152.145,00	0,00	0,00	577.152.145,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	820.749.400,00	0,00	0,00	820.749.400,00
32	Kecamatan Sikakap	638.388.830,00	0,00	0,00	638.388.830,00
33	Inspektorat	585.651.700,00	0,00	0,00	585.651.700,00
34	Bappeda	671.145.250,00	0,00	0,00	671.145.250,00
35	BKD	1.731.063.229,00	423.320.285,00	(1.004.805.198,00)	1.149.578.316,00
36	BKPSDM	358.182.657,00	0,00	(209.727.500,00)	148.455.157,00
37	PPKD	251.141.180,00	0,00	0,00	251.141.180,00
	TOTAL	**68.122.004.191,00**	**4.337.639.237,00**	**(7.437.886.046,00)**	**65.021.757.382,00**

Pada tahun 2021 terdapat penambahan aset dalam kondisi rusak sebesar Rp4.337.639.237,00 jika dibandingkan dengan saldo tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

a. Koreksi bertambah dari kondisi sebelumnya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan tabel diatas sebesar Rp36.347.000,00, berupa sisa aset Konkuren yang tidak bermanfaat dikarenakan sudah kondisi rusak berat.

b. Koreksi bertambah dari kondisi sebelumnya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp118.368.333,00 berdasarkan surat pernyataan dari OPD kepada Badan Keuangan Daerah beserta Koreksian dari BPK.

c. Koreksi bertambah dari kondisi sebelumnya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp147.242.000,00 yaitu 2 perbedaan yang dijelaskan yaitu aset lainnya dengan status penelusuran yang dipindahkan kedalam kelompok rusak berat sebesar Rp46.122.000 karena sudah ditemukan dan penambahan dari kondisi sebelumnya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat sebesar Rp101.120.000,00.

d. Koreksi bertambah aset dalam penelusuran ke aset rusak berat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp62.414.000,00 setelah dilakukan inventarisasi namun sudah dalam kondisi rusak berat, sehingga menambah nilai kedalam status aset rusak berat.

e. Koreksi bertambah aset rusak berat sebesar Rp13.585.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika akibat perolehan mutasi antar OPD dengan kondisi aset lainnya, sebagaimana sebelumya sudah berstatus aset lainnya pada OPD awalnya dengan status aset lainnya.

f. Koreksi bertambah dari kondisi sebelumnya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat pada Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu sebesar Rp227.774.492,00 berdasarkan surat pernyataan dari OPD kepada Badan Keuangan Daerah.

g. Koreksi bertambah dari kondisi sebelumnya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp804.760.000,00 berdasarkan surat pernyataan dari OPD kepada Badan Keuangan Daerah.

h. Koreksi bertambah dari kondisi sebelumnya aset yang kategori dimutasikan menjadi aset rusak berat pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp471.687.500,00 berdasarkan surat pernyataan dari OPD kepada Badan Keuangan Daerah beserta koreksian dari BPK

i. Koreksi bertambah dari kondisi sebelumnya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp606.240.323,00 dimana terdiri dari Koreksi kurang catat dari perlakuan barang yang dihibahkan dari barang yang bukan barang aset tetap sebesar Rp31.020.000,00 dan perubahan status aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp575.220.323,00.

j. Koreksi bertambah atas Koreksian Tim BPK turun ke Lapangan yang sebelumya asset tetap menjadi asset lainnya atau rusak berat pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.173.117.000,00

k. Koreksian bertambah atas Koreksian Tim BPK turun ke Lapangan yang sebelumya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat pada secretariat DPRD sebesar Rp48.400.000,00.

l. Koreksi bertambah akibat perubahan status dari aset tetap ke aset lainnya atau rusak berat sebesar Rp204.382.900,00 pada Kecamatan Sipora Selatan.

m. Koreksi bertambah dari kondisi sebelumnya aset tetap menjadi aset lainnya atau rusak berat sebesar Rp423.320.285,00 pada Badan Keuangan Daerah

Sedangkan pengurangan aset kondisi rusak berat sebesar Rp7.437.886.046,00 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Selanjutnya koreksi pengurangan aset lainnya kategori rusak berat pada Rumah Sakit Umum Daerah sudah dilakukan lelang dan penghapusan berdasarkan penilaiaan dari KPKNL kategori aset tidak bermanfaat lagi melalui surat keputusan Pengelola Barang dengan nilai 0 (nol) dan penghapusan aset rusak berat melalui pelelangan sebesar Rp5.863.069.948,00 bulan Desember 2021 dengan total nilai sebesar Rp6.057.879.948,00.
b. Koreksi berkurang aset rusak berat yang dihapus karena pelalangan Tahun 2021 sebesar Rp63.906.200,00 Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
c. Koreksi berkurang aset rusak berat yang dihapus karena pelalangan Tahun 2021 sebesar Rp79.700.000,00 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
d. Koreksi berkurang aset rusak berat yang sudah dilakukan penghapusan melalui surat keputusan pengelola berdasarkan penilaian dari KPKNL kategori aset yang tidak bermanfaat sebesar Rp10.757.200,00 Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
e. Koreksi berkurang aset rusak berat yang sudah dilakukan penghapusan melalui surat keputusan pengelola berdasarkan penilaian dari KPKNL kategori aset yang tidak bermanfaat sebesar Rp11.110.000,00 Tahun 2021 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
f. Koreksi pengurangan aset lainnya kategori rusak berat pada Badan Keuangan Daerah dan sudah dilakukan lelang dan penghapusan berdasarkan penilaiaan dari KPKNL kategori aset tidak bermanfaat lagi melalui surat keputusan Pengelola Barang dengan nilai 0 (nol) sebesar Rp65.542.500,00 dan penghapusan aset rusak berat melalui pelelangan sebesar Rp925.677.698,00,00 serta proses mutasi aset rusak berat kepada OPD Dinas Perindagkop sebesar Rp13.585.000,00 bulan Desember 2021 dengan total keseluruhan nilai sebesar Rp1.004.805.198,00.
g. Koreksi berkurang aset rusak berat yang dihapus karena pelalangan Tahun 2021 sebesar Rp209.727.500,00 Pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Aset lain-lainnya yang akan dihibahkan pada tahun 2021 sebesar Rp137.857.372.737,00 dan tahun 2020 sebesar Rp139.840.255.332,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Dinas	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.747.185.845,86	0,00	(952.612.595,86)	1.794.573.250,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	137.062.049.987,00	0,00	(999.250.000,00)	136.062.799.987,00
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	31.020.000,00	0,00	(31.020.000,00)	0,00
	SUB TOTAL	**139.840.255.332,86**	**0,00**	**1.982.882.595,86**	**137.857.372.737,00**

Dibandingkan tahun 2020 aset dihibahkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp1.982.882.595,86, dikarenakan telah terlaksananya hibah TK, PAUD yang tercatat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp949.612.595,00 serta penyerahan Hibah Konkuren sebesar Rp3.000.000,00 selanjutnya status jalan Provinsi yang tercatat pada aset lainnya juga sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sedangkan Hibah yang lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp31.020.000,00 merupakan peralihan status dari Hibah kepada Rusak Berat.

Aset lain-lainnya berupa aset dalam penelusuran pada tahun 2021 sebesar Rp8.338.272.908,00 dan tahun 2020 sebesar Rp8.446.808.908,00 sebagaimana telah dilakukan inventarisasi terhadap aset penelusuran tersebut dari OPD Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Dinas	Saldo 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	Saldo 2021
1	Dinas Pendidikan	775.750.000,00	0,00	0,00	775.750.000,00
2	Dinas Kesehatan	462.069.900,00	0,00	0,00	462.069.900,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	11.775.180,00	0,00	0,00	11.775.180,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	279.207.000,00	0,00	0,00	279.207.000,00
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	169.127.560,00	129.625.000,00	0,00	298.752.560,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	48.122.000,00	0,00	(46.122.000,00)	2.000.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	17.800.000,00	0,00	0,00	17.800.000,00
8	DinasPerhubungan	62.414.000,00	0,00	(62.414.000,00)	0,00
9	DinasPerikanan	448.413.576,00	0,00	0,00	448.413.576,00
10	DinasKetahananPangan dan Pertanian	36.604.700,00	0,00	0,00	36.604.700,00
11	Sekretariat Daerah	5.126.103.785,00	197.120.000,00	0,00	5.323.223.785,00
12	Sekretariat DPRD	70.648.630,00	168.692.500,00	0,00	239.341.130,00
13	Kecamatan Siberut Barat Daya	255.958.588,00	0,00	0,00	255.958.588,00
14	Kecamatan Siberut Utara	145.070.000,00	0,00	0,00	145.070.000,00
15	Bappeda	117.166.050,00	0,00	0,00	117.166.050,00
16	Badan Keuangan Daerah	150.251.462,00	0,00	0,00	150.251.462,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	152.933.477,00	0,00	0,00	152.933.477,00
18	PPKD	117.393.000,00	0,00	0,00	117.393.000,00
	SUB TOTAL	**8.446.808.908,00**	**495.437.500,00**	**(108.536.000,00)**	**8.338.710.408,00**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa aset dalam penelusuran belum mengalami penurunan yang berarti, artinya dari OPD Dinas-dinas yang terkait mengenai penelusuran ini belum maksimal dalam melakukan inventarisasi terhadap aset dalam penelusuran jika dibandingkan dengan tahun 2020. Harapan dari bidang aset dalam penelusuran ini bisa dihapus nantinya berupa dokumen-

dokumen yang dipersiapkan dan tidak terlepas dari aturan yang berlaku dalam proses penghapusannya.

Aset lain-lainnya berupa aset hilang (TP-TGR) pada tahun 2021 sebesar Rp179.813.700,00 dan tahun 2020 sebesar Rp211.053.700,00 dimana ada pengurangan aset tersebut setelah dilakukan penggantian aset tersebut melalui TP-TGR pada Tahun 2020 dari Dinas koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan namun OPD lain belum ada perubahannya dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama OPD	Aset Hilang (Rp)	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	Saldo 2021
1	Sekretariat Daerah	7.930.000,00	0,00	0,00	7.930.000,00
2	Kecamatan Siberut Selatan	14.575.000,00	0,00	0,00	14.575.000,00
3	Kecamatan Pagai Selatan	39.600.000,00	0,00	0,00	39.600.000,00
4	Dinas Perhubungan	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
5	Badan Penaggulangan Bencana Daerah	30.708.700,00	0,00	0,00	30.708.700,00
6	Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	31.240.000,00	0,00	(31.240.000,00)	0,00
7	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	37.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000,00
TOTAL		**211.053.700,00**	**0,00**	**(31.240.000,00)**	**179.813.700,00**

Begitu juga dengan aset lain-lainnya yang Dikuasi Pihak Ketiga pada tahun 2021 belum mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp3.054.095.796,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA OPD	DIKUASAI PIHAK KE 3 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 2021
1	Sekretariat DPRD	820.959.796,00	0,00	0,00	820.959.796,00
2	Sekretariat Daerah	2.233.136.000,00	0,00	0,00	2.233.136.000,00
TOTAL		**3.054.095.796,00**	**0,00**	**0,00**	**3.054.095.796,00**

Aset lain-lainnya yang dimutasikan pada tahun 2020 belum mengalami penurunan yang besar yaitu senilai Rp8.117.500,00 dengan rincian sebegai berikut :

No	Nama OPD	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Total 2021
1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8.117.500,00	0,00	(8.117.500,00)	0,00
2	Sekretariat DPRD	891.000.000,00	0,00	0,00	891.000.000,00
3	Kecamatan Siberut Selatan	31.955.000,00	0,00	0,00	31.955.000,00
4	Kecamatan Pagai Selatan	98.504.675,00	0,00	0,00	98.504.675,00
	TOTAL	**1.029.577.175,00**	0,00	**(8.117.500,00)**	**1.021.459.675,00**

Pengurangan sebesar Rp8.117.500,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa Koreksi pengurangan aset mutasi pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Rp8.117.500,00 berupa kendaraan dinas roda dua yang sudah dikembalikan lagi ke dinas karena kondisi yang sudah rusak berat sehingga menambah status jumlag aset rusak berat pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.

5.3.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud berupa *software* pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2021 sebesar (Rp7.636.693.876,08) dengan rinciannya Akumulasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

NO	NAMA SOFTWARE	AKUM AMORTISASI ATB PER 31 DES 2020 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	AKUM AMORTISASI ATB PER 31 DES 2021 (Rp)
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
1	Software gaji	74.250.000,00	0,00	0,00	74.250.000,00
2	Jaringan Internet	89.760.000,00	0,00	0,00	89.760.000,00
3	Software Kelas Unggul	255.750.000,00	0,00	0,00	255.750.000,00
	RSUD				0,00
4	*Software*	302.346.000,00	65.714.000,00	0,00	368.060.000,00
5	Aplikasi SIMRS	78.980.000,00	39.490.000,00	0,00	118.470.000,00
	DINAS KESEHATAN				0,00
6	*Software*	129.580.000,00	0,00	0,00	129.580.000,00
	BPBD				0,00
7	Sistem dan jaringan internet	239.800.000,00	0,00	0,00	239.800.000,00
8	*Software*	19.250.000,00	0,00	0,00	19.250.000,00
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				0,00
9	*Software* SIADINDA	93.730.000,00	0,00	0,00	93.730.000,00
	Dinas DUKCAPIL				0,00
10	Jaringan Internet	59.700.000,00	0,00	0,00	59.700.000,00
	DPMDP2KB				0,00
11	*software Gaji*	49.775.000,00	0,00	0,00	49.775.000,00
12	aplikasi SIADINDA	88.880.000,00	0,00	0,00	88.880.000,00
	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perindag				0,00
13	*Software* gaji	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
	DPMPTSP				0,00
14	Software Penggajian	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
15	Software SIADINDA	91.960.000,00	0,00	0,00	91.960.000,00
	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga				0,00
16	*Website*	39.270.000,00	0,00	0,00	39.270.000,00
17	*System*	167.240.000,00	0,00	0,00	167.240.000,00
18	*System surfing tax* 2017	119.944.000,00	0,00	0,00	119.944.000,00
19	*System informasi satu pintu*	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00
	Sekretariat Daerah				0,00
21	Software Sistem Gaji PNS	68.750.000,00	0,00	0,00	68.750.000,00
22	Sistem Keuangan Berbasis Akrual / SIADINA	129.250.000,00	0,00	0,00	129.250.000,00
23	Software Aplikasi Kepegawaian	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
24	Software Aplikasi Surat	49.830.000,00	0,00	0,00	49.830.000,00
25	Software Kearsipan Elektronik + Honor PBJ	90.770.000,00	0,00	0,00	90.770.000,00

NO	NAMA SOFTWARE	AKUM AMORTISASI ATB PER 31 DES 2020 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	AKUM AMORTISASI ATB PER 31 DES 2021 (Rp)
26	Software Windows 7	14.850.000,00	0,00	0,00	14.850.000,00
27	Software (Aplikasi Kelembagaan)	77.000.000,00	0,00	0,00	77.000.000,00
28	Website Portal Aplikasi	79.420.000,00	0,00	0,00	79.420.000,00
29	Software Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	15.576.000,00	3.894.000,00	0,00	19.470.000,00
30	Aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Jabatan	78.760.000,00	19.690.000,00	0,00	98.450.000,00
31	Aplikasi Sistem Informasi Standar Kompetensi Manajerial	78.760.000,00	19.690.000,00	0,00	98.450.000,00
32	Aplikasi Sistem Informasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	39.600.000,00	9.900.000,00	0,00	49.500.000,00
33	Jaringan Internet Wifi Wireless (Unifi. AP, AC, LR) LPSE dan ULP	8.676.000,00	2.892.000,00	0,00	11.568.000,00
	BAPPEDA				0,00
34	Pengadaan *Software* E - Planning	249.447.000,00	0,00	0,00	249.447.000,00
35	Pengadaan *Software* Pusdalisbang	159.280.000,00	0,00	0,00	159.280.000,00
36	Pengadaan *Software ArcGISDesktop*	39.908.000,00	0,00	0,00	39.908.000,00
37	Pengadaan *Software* Simonep	159.984.000,00	39.996.000,00	0,00	199.980.000,00
38	Pengadaan *Software* E - Planning Berbasis Adroid	229.356.000,00	76.452.000,00	0,00	305.808.000,00
39	Pengadaan *Software* E - Kemiskinan	107.412.000,00	35.804.000,00	0,00	143.216.000,00
40	software aplikasi Sistem E-SAKIP	47.520.000,00	23.760.000,00	0,00	71.280.000,00
41	software ArcGIS For Destop (Hibah LKN)	14.518.450,72	7.259.225,36	0,00	21.777.676,08
42	Rencana induk bandar udara PeiPei	344.176.800,00	344.176.800,00	0,00	688.353.600,00
43	Perencanaan Tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum	119.080.500,00	119.080.500,00	0,00	238.161.000,00
	BADAN KEUANGAN DAERAH				0,00
44	SIMBADA	98.800.000,00	0,00	0,00	98.800.000,00
45	Sofware PBB	157.960.000,00	0,00	0,00	157.960.000,00
46	Software Bansos	89.650.000,00	0,00	0,00	89.650.000,00
47	Sofware PBB Online Bank Nagari	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
48	Software penyusunan Sistem Keuangan Daerah Berbasis Akrual DPPKAD	196.570.000,00	0,00	0,00	196.570.000,00
49	Software penyusunan Sistem Keuangan Daerah Berbasis Akrual SKPD	194.150.000,00	0,00	0,00	194.150.000,00
50	JARINGAN SERVER	35.288.000,00	8.822.000,00	0,00	44.110.000,00
51	Aplikasi SPPD	29.172.000,00	9.724.000,00	0,00	38.896.000,00
52	Aplikasi Website BKD	29.172.000,00	9.724.000,00	0,00	38.896.000,00
53	Aplikasi Surat Menyurat	29.205.000,00	9.735.000,00	0,00	38.940.000,00
54	Aplikasi SISUBET	19.800.000,00	9.900.000,00	0,00	29.700.000,00
55	Aplikasi Monitoring Realisasi SP2D Online	39.380.000,00	19.690.000,00	0,00	59.070.000,00

NO	NAMA SOFTWARE	AKUM AMORTISASI ATB PER 31 DES 2020 (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	AKUM AMORTISASI ATB PER 31 DES 2021 (Rp)
56	Aplikasi SIMONEV	29.480.000,00	14.740.000,00	0,00	44.220.000,00
57	Aplikasi Manajemen PKD	29.480.000,00	14.740.000,00	0,00	44.220.000,00
58	Aplikasi Jaringan Internet Mobile	39.820.000,00	19.910.000,00	0,00	59.730.000,00
59	Aplikasi Simpatda	19.899.000,00	19.899.000,00	0,00	39.798.000,00
60	Aplikasi BPHTB/ Bank Nagari	19.899.000,00	19.899.000,00	0,00	39.798.000,00
61	Aplikasi BPHTB/ BPN	19.899.000,00	19.899.000,00	0,00	39.798.000,00
62	Aplikasi E-Potensi	19.899.000,00	19.899.000,00	0,00	39.798.000,00
63	*Software* SIMAKDA *(Dinas Kehutanan/PPKD)*	88.880.000,00	0,00	0,00	88.880.000,00
64	*Software Aplikasi Pajak PBB P2*	0,00	29.980.000,00	0,00	29.980.000,00
65	*Software Office Automation*	0,00	19.960.000,00	0,00	19.960.000,00
66	*Sofware EPPAT*	0,00	19.996.800,00	0,00	19.996.800,00
67	*Software Microsoft Office*	0,00	379.800,00	0,00	379.800,00
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PSDM				0,00
68	Jaringan Internet M2	30.500.000,00	0,00	0,00	30.500.000,00
69	Aplikasi SIADINDA	97.075.000,00	0,00	0,00	97.075.000,00
70	Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)	97.130.000,00	0,00	0,00	97.130.000,00
71	*Windows Server 2008 OEM 50 Client* (CAT)	69.740.000,00	0,00	0,00	69.740.000,00
72	Pengembangan SIMPEG	149.435.000,00	0,00	0,00	149.435.000,00
	Sekretariat DPRD				0,00
73	Software Aplikasi Gaji	92.290.000,00	0,00	0,00	92.290.000,00
74	Software	172.550.000,00	0,00	0,00	172.550.000,00
	Kecamatan Siberut Utara				0,00
75	*Software*	97.295.000,00	0,00	0,00	97.295.000,00
	Siberut Barat Daya				0,00
76	*Software*	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
	Kecamatan Sipora Utara				0,00
77	*Software*	49.500.000,00	0,00	0,00	49.500.000,00
	Kecamatan Pagai Selatan				0,00
78	*Internet*	64.790.000,00	0,00	0,00	64.790.000,00
	KANTOR KESBANGPOLINMAS				0,00
79	*Software* SIADINDA	88.550.000,00	0,00	0,00	88.550.000,00
80	*Software*	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00
	JUMLAH	**6.561.997.750,72**	**1.074.696.125,36**	**0,00**	**7.636.693.876,08**

Rekapitulasi akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud pada masing-masing OPD sebagai berikut:

NO	NAMA SOFTWARE	SALDO PER 31 DES 2021 (Rp)	SALDO PER 31 DES 2020 (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	419.760.000,00	419.760.000,00
2	RSUD	486.530.000,00	381.326.000,00

NO	NAMA SOFTWARE	SALDO PER 31 DES 2021 (Rp)	SALDO PER 31 DES 2020 (Rp)
3	DINAS KESEHATAN	129.580.000,00	129.580.000,00
4	BPBD	259.050.000,00	259.050.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	93.730.000,00	93.730.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	59.700.000,00	59.700.000,00
7	DPMDP2KB	138.655.000,00	138.655.000,00
8	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perindag	49.500.000,00	49.500.000,00
9	DPMPTSP	141.460.000,00	141.460.000,00
10	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	336.154.000,00	336.154.000,00
11	Sekretariat Daerah	836.808.000,00	780.742.000,00
12	BAPPEDA	2.117.211.276,08	1.470.682.750,72
13	BADAN KEUANGAN DAERAH	1.502.800.600,00	1.235.903.000,00
14	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PSDM	443.880.000,00	443.880.000,00
15	Sekretariat DPRD	264.840.000,00	264.840.000,00
16	Kecamatan Siberut Utara	97.295.000,00	97.295.000,00
17	Siberut Barat Daya	49.500.000,00	49.500.000,00
18	Kecamatan Sipora Utara	49.500.000,00	49.500.000,00
19	Kecamatan Pagai Selatan	64.790.000,00	64.790.000,00
20	KANTOR KESBANGPOLINMAS	95.950.000,00	95.950.000,00
	Jumlah	7.636.693.876,08	6.561.997.750,72

5.3.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi penyusutan aset lain-lain merupakan penyusutan atas aset lainnya karena penggunaan sesuai dengan masa manfaatnya. Saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2021 sebesar (Rp146.946.996.278,19) dan tahun 2020 sebesar (Rp150.423.795.977,79).
Saldo Akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2021 terdiri dari akumulasi penyusutan atas aset kondisi rusak, aset dalam penelusuran, dikuasai pihak ketiga, mutasi, hibah dan perkiraan penyisihan tidak tertagih atas aset lain-lain dana bergulir sebesar (Rp99.045.000,00).

Rekapitulasi akumulasi penyusutan aset lain-lain per OPD tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(6.606.875.462,30)	(6.713.103.148,90)
2	Rumah Sakit Umum Daerah	(1.125.992.365,00)	(7.183.872.313,00)
3	Dinas Kesehatan	(7.148.728.315,00)	(7.148.728.315,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(72.567.857.368,00)	(72.892.613.618,00)
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(756.786.000,00)	(756.786.000,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(577.426.740,00)	(577.426.740,00)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(789.096.927,00)	(780.209.794,00)
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(1.884.873.625,00)	(1.309.653.302,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(1.279.103.265,14)	(1.228.411.834,14)
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(609.881.714,00)	(609.881.714,00)

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(684.849.100,00)	(764.549.100,00)
13	Dinas Perhubungan	(5.123.763.645,00)	(5.123.763.645,00)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	(13.585.000,00)	
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	(2.063.137.159,00)	(2.105.487.159,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(350.557.467,00)	(133.540.175,00)
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(1.028.489.357,00)	(223.899.682,00)
18	Dinas Perikanan	(3.433.490.857,00)	(3.433.490.857,00)
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	(1.153.857.700,00)	(1.153.857.700,00)
20	Sekretariat Daerah	(23.436.143.990,00)	(23.436.143.990,00)
21	Inspektorat	(585.651.700,00)	(585.651.700,00)
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(788.311.300,00)	(788.311.300,00)
23	Badan Keuangan Daerah	(1.651.558.052,75)	(2.234.026.089,75)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(301.388.634,00)	(511.116.134,00)
25	Sekretariat DPRD	(3.609.032.777,00)	(3.609.032.777,00)
26	Kecamatan Siberut Utara	(764.583.300,00)	(764.583.300,00)
27	Kecamatan Siberut Tengah	(347.301.100,00)	(347.301.100,00)
28	Kecamatan Siberut Barat	(577.152.145,00)	(577.152.145,00)
29	Kecamatan Siberut Barat Daya	(1.174.724.188,00)	(1.174.724.188,00)
30	Kecamatan Siberut Selatan	(324.382.000,00)	(324.382.000,00)
31	Kecamatan Sipora Utara	(743.178.000,00)	(743.178.000,00)
32	Kecamatan Sipora Selatan	(1.031.834.518,00)	(828.762.450,00)
33	Kecamatan Pagai Utara	(132.499.000,00)	(132.499.000,00)
34	Kecamatan Sikakap	(638.388.830,00)	(638.388.830,00)
35	Kecamatan Pagai Selatan	(958.854.075,00)	(958.854.075,00)
35	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	(630.413.802,00)	(630.413.802,00)
Jumlah		**(144.893.749.478,19)**	**(150.423.795.977,79)**

5.3.4.6 Aset Yang Dibatasi Penggunaan

Aset yang dibatasi penggunaannya merupakan kas yang dibatasi penggunaannya berupa saldo kas yang ada pada rekening Bantuan Bencana Pemerintah Kabupaten Kepulaauan Mentawai yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada tahun 2020 terdapat Aset Yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp817.570.152,00 namun pada tahun 2021 Aset Yang Dibatasi Penggunaannya bernilai 0,00 karena merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa tidak terdapat nomenklatur akun Neraca - Aset/Kas yang dibatasi Penggunaannya maka pencatatannya dialihkan ke Tagihan Jangka Panjang.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.3.5 Kewajiban	Rp**5.302.517.096,00**	**1.631.549.487,00**

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2021 sebesar Rp**5.302.517.096,00**, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	5.302.517.096,00	813.979.335,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	817.570.152,00
Jumlah Kewajiban	**5.302.517.096,00**	**1.631.549.487,00**

5.3.5.1 Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	5.302.517.096,00	**813.979.335,00**

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2021 sebesar Rp287.599.926,00 merupakan jumlah kewajiban jangka pendek Bendahara Umum Daerah berupa potongan lainnya yang terdiri dari:
   - Kurang setor potongan pajak tahun 2020 sebesar Rp13.591,00
   - Kurang setor gaji terusan bulan Juli 2021 sebesar Rp49.310,00
   - Kurang setor gaji terusan bulan September 2021 sebesar Rp38.767,00
   - Kurang setor Taspen Bappeda 13 Juli sebesar Rp2.159.653,00
   - Kurang setor potongan gaji 13 KDH sebesar Rp525.600,00
   - Potongan Tabungan Perumahan bulan Januari sebesar Rp240.023.972,00 yang belum disetor karena tidak ada pos / rekening tempat setorannya.
   - Kurang setor potongan kekurangan gaji PNS Kantor Kesbangpol sebesar Rp489.081,00
   - Kurang setor potongan gaji 13 sebesar Rp46.827.750,00
   - Kurang setor pajak PPh 21 belanja honorarium Kecamatan Siberut Utara Rp195.000,00 yang sudah disetor tanggal 9 Maret 2022
   - Lebih setor Potongan Taspen Sekretariat DPRD sebesar (Rp6.532,00)
   - Lebih bayar Taspen P3K dinas Pendidikan sebesar (Rp2.716.266,00)

b. Utang jangka pendek lainnya sebesar Rp5.014.917.170,00 merupakan Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang Kapal Pemda sebesar Rp361.475.000,00 pada Dinas Perhubungan yang belum dibayarkan dikarenakan dasar pembayarannya belum kuat sehingga sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum dapat membayarnya, dan Pengembalian sisa dana hibah BOS tahun 2011 sebesar Rp486.466.500,00 yang belum dikembalikan karena masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan serta koreksi atas belanja modal 2021 yang sedang dalam proses pengajuan DPAL tahun 2022 senilai Rp4.166.975.500,00.

5.3.5.2 Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	0,00	**817.570.152,00**

Kewajiban Jangka Panjang tahun 2021 bernilai Rp**0,00** sedangkan tahun 2020 kewajiban jangka panjang sebesar Rp**817.570.152,00** merupakan kewajiban atas penggunaan dana Bantuan Bencana banjir dan bantuan lauk pauk yang terdapat pada rekening 2110.0101.00602.5 an. Bantuan Bantuan Bencana Pemerintah Kabupaten Kepuluan Mentawai.

5.3.6 Ekuitas	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	1.986.423.876.742,34	**1.930.155.430.524,14**

Ekuitas ini menggambarkan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per 31 Desember 2020. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp**1.986.423.876.742,34**.

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

A. Dasar Penyusunan Laporan Operasional

Dasar Penyusunan Laporan Operasional adalah:

1. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 70 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual.

B. Tujuan Laporan Operasional

Laporan Operasional bertujuan menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

C. Definisi

1. Pendapatan adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi setelah atau timbulnya kewajiban.
3. Pos Luar Biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
4. Surplus/defisit adalah selisih antara Pendapatan dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.4.1 Pendapatan – LO	**831.652.882.410,37**	**796.808.557.711,55**

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 menunjukkan Pendapatan-LO masing-masing sebesar Rp831.652.882.410,37 dan Rp796.808.557.711,55 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020
		(Rp)	(Rp)
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO		

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	4.292.094.029,00	4.077.683.488,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2.992.771.151,00	5.944.474.967,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisakan-LO	10.684.123.854,00	12.591.521.757,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah-LO	9.142.941.157,37	12.805.647.244,51
	Jumlah	**27.111.930.191,37**	**35.419.327.456,51**
II	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**		
1	Transfer Pemerintah Pusat-LO	742.958.193.981,00	651.129.757.019,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.381.199.082,00	0,00
3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	35.561.158.000,00
4	Transfer Pemerintah Provinsi	0,00	36.147.772.243,00
	Jumlah	**773.339.393.063,00**	**722.838.687.262,00**
III	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**		
1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	38.550.542.993,04
2	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	22.762.148.500,00	0,00
3	Pendapatan Hibah dari kemenkes-LO	5.606.784.226,00	0,00
4	Pendapatan Hibah Bahan Logistik dari Kementerian – LO	667.630.590,00	0,00
5	Pendapatan Hibah Tanah dari Kecamatan –LO	2.164.995.840,00	0,00
	Jumlah	**31.201.559.156,00**	**38.550.542.993,04**
	TOTAL PENDAPATAN	**831.652.882.410,37**	**796.808.557.711,55**

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah– LO

31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
27.111.930.191,37	**35.419.327.456,51**

Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2021 sebesar Rp27.111.930.191,37 dan tahun 2020 sebesar Rp35.419.327.456,51 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO**		
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	4.292.094.029,00	4.077.683.488,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2.992.771.151,00	5.944.474.967,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisakan-LO	10.684.123.854,00	12.591.521.757,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah-LO	9.142.941.157,37	12.805.647.244,51
	Jumlah	**27.111.930.191,37**	**35.419.327.456,51**

Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah -LO dengan Pendapatan Asli Daerah -LRA sebagai berikut:

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
	PENDAPATAN PAJAK DAERAH		
1	Pajak Hotel-LO	*641.884.990,00*	641.884.990,00
2	Pajak Restoran-LO	788.472.782,00	788.472.782,00
3	Pajak Reklame-LO	514.080,00	514.080,00
4	Pajak Penerangan Jalan-LO	1.621.555.607,00	1.621.555.607,00
5	Pajak Sarang Burung Walet-LO	500.000,00	500.000,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	50.192.091,00	50.192.091,00

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	985.314.767,00	553.717.955,00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	203.659.712,00	203.659.712,00
	Jumlah	**4.292.094.029,00**	**3.860.497.217,00**
	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH		
1	Retribusi Jasa Umum-LO	1.428.011.629,00	1.428.011.629,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	1.489.810.100,00	1.489.810.100,00
3	Retribusi Perizinan Tertentuh-LO	115.351.226,00	115.351.226,00
	Pendapatan retribusi daerah-LO	(40.401.804,00)	0,00
	Jumlah	**2.992.771.151,00**	**3.033.172.955,00**
	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	10.684.123.854,00	10.684.123.854,00
	Jumlah	**10.684.123.854,00**	**10.684.123.854,00**
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH		
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	92.347.850,00	92.347.850,00
2	Jasa Giro-LO	1.807.419.169,00	1.807.419.169,00
3	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	613.814.293,00	613.814.293,00
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	1.132.063.288,00	6.049.341.134,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	340.146.357,37	340.146.357,37
6	Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.238.473.619,00	1.238.473.619,00
7	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LRA	3.918.676.581,00	3.918.676.581,00
	Jumlah	**9.142.941.157,37**	**14.060.219.003,37**
TOTAL		**27.111.930.191,37**	**31.638.013.029,37**

Pada tahun anggaran 2021 terdapat selisih Pendapatan Asli Daerah-LRA dengan Pendapatan Asli Daerah – LO sebesar (Rp4.526.082.838,00) merupakan pengurangan hasil koreksi reklasifikasi karena kesalahan penginputan pendapatan transfer pemerintah Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) propinsi triwulan 2 (dua) sebesar (Rp4.917.277.846,00) dan Rp431.596.812,00 merupakan penambahan pada pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana uraian pada tabel berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah –LO

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
	PENDAPATAN PAJAK DAERAH		553015875			
1	Pajak Hotel-LO	641.884.990,00	0,00	0,00	641.884.990,00	0,00
2	Pajak Restoran-LO	788.472.782,00	0,00	0,00	788.472.782,00	0,00
3	Pajak Reklame-LO	514.080,00	0,00	0,00	514.080,00	0,00
4	Pajak Penerangan Jalan-LO	1.621.555.607,00	0,00	0,00	1.621.555.607,00	0,00
5	Pajak Sarang Burung Walet-LO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	50.192.091,00	0,00	0,00	50.192.091,00	0,00

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
7	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO	553.717.955,00	545.794.537,00	(114.197.725,00)	985.314.767,00	431.596.812,00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	203.659.712,00	0,00	0,00	203.659.712,00	-
	Jumlah	**3.860.497.217,00**	**545.794.537,00**	**(114.197.725,00)**	**4.292.094.029,00**	**431.596.812,00**

Penambahan piutang PBB sebesar Rp545.794.537,00 merupakan SPPT PBB tahun 2021 yang tidak tertagih dan terdapat pengurangan sebesar Rp114.197.725,00 merupakan piutang PBB tahun lalu yang sudah tertagih pada tahun 2021.

Berikut rincian penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah–LO tahun 2020 sebagai berikut:

b. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH					
1	Retribusi Jasa Umum-LO	1.428.011.629,00	0,00	0,00	1.428.011.629,00	0,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	1.489.810.100,00	0,00	0,00	1.489.810.100,00	0,00
3	Retribusi Perizinan Tertentuh-LO	115.351.226,00	0,00	0,00	115.351.226,00	0,00
4	Pendapatan retribusi daerah-LO atas piutang yang tak tertagih	0,00	(47.623.142,00)	7.221.338,00	(40.401.804,00)	(40.401.804,00)
	Jumlah	**3.033.172.955,00**	**7.221.338,00**	**(47.623.142,00)**	**2.992.771.151,00**	**(40.401.804,00)**

Dari tabel tersebut diatas terdapat selisih pendapatan retribusi daerah-LO dan pendapatan retribusi-LRA sebesar (Rp40.401.804,00). Selisih merupakan pengurangan Saldo awal piutang retribusi yang tak tertagih sebesar Rp.47.623.142,00, dan pembayaran piutang retribusi pelayanan air bersih sebesar Rp40.401.804,00, sehingga terdapat saldo akhir per 31 Desember 2021 piutang retribusi pelayanan air bersih sebesar Rp7.221.338,00.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO	**773.339.393.063,00**	**722.838.687.262,00**

Rincian Pendapatan Transfer-LO tahun 2021 sebesar Rp773.339.393.063,00 dan tahun 2020 sebesar Rp 722.838.687.262,00 sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO			
1	Dana Perimbangan	682.711.606.781,00	0,00
2	Dana Desa	60.246.587.200,00	0,00
3	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0,00	556.457.541.000,00

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
4	Dana Bagi Hasil Pajak-LO	0,00	8.714.026.529,00
5	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO	0,00	3.494.252.475,00
6	Dana Alokasi Khusus-LO	0,00	82.463.937.015,00
7	**Jumlah**	**742.958.193.981,00**	**651.129.757.019,00**
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA–LO			
8	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	30.381.199.082,00	36.147.772.143,00
	Jumlah	**30.381.199.082,00**	**36.147.772.143,00**
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER – LO		**773.339.393.063,00**	**687.277.529.162,00**

Perbandingan antara PendapatanTranfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO sebagai berikut:

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
	PENDAPATAN PAJAK DAERAH					
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO						
1	Dana Perimbangan	682.711.606.781,00	0,00	0,00	682.711.606.781,00	0,00
2	Dana Desa	60.246.587.200,00	0,00	0,00	60.246.587.200,00	0,00
	Jumlah	**742.958.193.981,00**	0,00	0,00	742.958.193.981,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA–LO						
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	32.308.263.287,00	0,00	(1.927.064.205,00)	30.381.199.082,00	(1.927.064.205,00)
	Jumlah	**32.308.263.287,00**	0,00	**(1.927.064.205,00)**	**30.381.199.082,00**	**(1.927.064.205,00)**
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER – LO		**775.266.457.268,00**	**0,00**	**(1.927.064.205,00)**	**773.339.393.063,00**	**(1.927.064.205,00)**

Pada pendapatan transfer terdapat selisih bagi hasil pajak – LO dengan pendapatan bagi hasil pajak–LRA Sebesar (Rp6.844.342.051,00). Selisih tersebut merupakan kurang bayar Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Bagi Hasil Pajak tahun 2020 yang telah ditranfer oleh pemerintah Provinsi pada tahun 2021.

		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.4.1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO**	**31.201.559.156,00**	**38.550.542.993,04**

Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO tahun 2021 sebesar 31.201.559.156,00 dan tahun 2020 sebesar Rp Rp38.550.542.993,04 sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
I	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**		
1	Pendapatan Hibah-LO	8.439.410.656,00	38.550.542.993,04
2	Pendapatan Hibah Dana BOS	22.762.148.500,00	0,00
Jumlah		**31.201.559.156,00**	**38.550.542.993,04**

Perbandingan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LRA antara lain:

No	Uraian	LRA	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	8.439.410.656,00	8.439.410.656,00
2	Pendapatan Hibah Dana BOS	23.248.615.000	22.762.148.500,00	(486.466.500,00)
	JUMLAH	**23.248.615.000**	**31.201.559.156,00**	**7.952.944.156,00)**

Selisih Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	23.248.615.000,00	0,00	(486.466.500,00)	22.762.148.500,00	(486.466.500,00)
2	Pendaptan Hibah - LO pada Dinas Kesehatan	0,00	5.606.784.226,00	0,00	5.606.784.226,00	5.606.784.226,00
3	Pendapatan Hibah - LO pada Dinas Pendidikan	0,00	2.038.743.500,00	0,00	2.038.743.500,00	2.038.743.500,00
4	Pendapatan Hibah- LO pada DPMDP2KB	0,00	13.928.000,00	0,00	13.928.000,00	13.928.000,00
5	Pendapatan Hibah- LOpada DPMPTSP	0,00	17.651.040,00	0,00	17.651.040,00	17.651.040,00
6	Pendapatan Hibah- LO pada Kec. Sipora Selatan	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
7	Pendapatan Hibah- LO pada kec sib tengah	0,00	29.435.000,00	0,00	29.435.000,00	29.435.000,00
8	Pendapatan Hibah- LO pada Dinas Koperindag	0,00	58.038.300,00	0,00	58.038.300,00	58.038.300,00
9	Pendapatan Hibah LO pada BPBD	0,00	667.630.590,00	0,00	667.630.590,00	667.630.590,00
JUMLAH		**23.248.615.000,00**	**8.439.410.656,00**	**(486.466.500,00)**	**31.201.559.156,00**	**7.952.944.156,00**

Pada lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO terdapat penambahan berupa pendapatan hibah-LO sebagai berikut :

a. Pada Dinas Pendidikan terdapat koreksi atas pegembalian hibah BOS yang dibayarakan Tahun 2022 sebesar Rp486.466.500,00 Hasil Koreksi Badan Pemeriksa Keuangan.

b. Pada Dinas kesehatan terdapat penambahan pendapatan hibah sebesar Rp5.606.784.226,00 merupakan hibah obat-obatan dari kementerian kesehatan.

c. Penambahan pendapatan hibah – LO pada Dinas pendidikan sebesar Rp2.038.743.500,00 yang terdiri dari pendapatan hibah tanah dari desa Bukit Pamewa sebesar Rp196.075.000,00, hibah TIK sebesar Rp907.140.000,00 dan Hibah Gedung dari Desa Bukit Pamewa sebesar Rp935.528.500,00

d. Penambahan pendapatan hibah-LO berupa tanah balai KB dari kecamatan pada DPMPKB sebesar Rp13.928.000,00,

e. Penambahan pendapatan hibah-LO berupa tanah pada dinas Koperindag sebesar Rp58.038.300,00,

f. Penambahan pendapatan hibah-LO dari Kementerian Investasi pada DPMPTSP sebesar Rp17.651.040,00,

g. Penambahan pendapatan hibah-LO berupa hibah tanah dari masyarakat pada kecamatan Siberut Tengah sebesar Rp29.435.000,00

h. Penambahan pendapatan hibah-LO berupa hibah tanah Desa Sioban pada Kecamatan Sipora Selatan sebesar Rp7.200.000,00.

i. Penambahan Pendapatan Hibah – LO pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp667.630.590,00 berupa bahan perlengkapan/peralatan korban bencana dan bahan-bahan logistic.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.4.2 Beban – LO	**773.917.022.050,32**	**722.075.265.688,28**

Beban-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp**773.917.022.050,32** dan tahun 2020 sebesar Rp722.075.265.688,28. Beban-LO pada tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	URAIAN	BEBAN - LO 2021 (Rp)	BEBAN - LO 2020 (Rp)
1	Beban Pegawai – LO	284.540.969.277,00	247.582.508.950,00
2	Beban Persediaan	50.155.288.889,78	68.565.926.728,35
3	Beban Jasa	130.139.430.814,62	156.310.236.935,33
4	Beban Pemeliharaan	7.027.027.663,53	12.170.938.382,00
5	Beban Perjalanan Dinas	46.584.216.644,00	55.129.530.479,00
6	Beban Bunga	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	9.585.794.613,00	6.734.707.000,00
8	Beban Hibah	19.777.337.264,00	4.035.684.836,00
9	Beban Bantuan Sosial	876.212.731,00	471.484.588,00
10	Beban Penyisihan Piutang	347.787.554,90	577.220.751,71
11	Beban Lain-lain	3.765.032.919,00	8.838.477.225,53
12	Beban Penyusutan Aset Tetap	100.856.715.912,13	101.689.717.196,00
13	Beban penyusutan Aset Lainnya	19.762.132,00	0,00
14	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.074.696.125,36	1.231.381.525,36
15	Beban Bagi Hasil	2.446.929.619,00	0,00
16	Beban Bantuan Keuangan	116.719.819.891,00	0,00
17	beban Transfer	0,00	58.737.451.091,00
	JUMLAH	**773.917.022.050,32**	**722.075.265.688,28**

a. Beban Pegawai-LO

Pengakuan beban pegawai-LO tahun 2021 sebesar Rp284.540.969.277,00 beban pegawai dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Beban Gaji dan Beban Tunjangan-LO	155.201.991.588,00	172.977.320.446,00

No	Uraian	2021	2020
		(Rp)	(Rp)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO	80.567.723.142,00	71.685.188.904,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	34.598.611.055,00	0,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.601.836.667,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO	161.934.202,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO	484.800.000,00	2.919.999.600,00
7	Beban Pegawai BOS-LO	4.924.072.623,00	0,00
JUMLAH		**284.540.969.277,00**	**247.582.508.950,00**

Tidak terdapat selisih antara beban pegawai-LO dan belanja pegawai-LRA seperti terlihat dalam tabel berikut:

No	Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Gaji dan Beban Tunjangan-LO	155.201.991.588,00	155.201.991.588,00	0,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO	80.567.723.142,00	80.570.246.198,00	0,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-LO	34.598.611.055,00	34.622.114.355,00	26.026.356,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.601.836.667,00	8.601.836.667,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO	161.934.202,00	161.934.202,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO	484.800.000,00	484.800.000,00	0,00
7	Beban Pegawai BOS-LO	4.924.072.623,00	4.924.072.623,00	0,00
JUMLAH		**284.540.969.277,00**	**284.566.995.633,00**	26.026.356,00

Berikut uraian beban pegawai-LO per rincian objek tahun 2021 sebagai berikut:

No	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**155.201.991.588,00**	**155.201.991.588,00**	**0,00**
1.1	Beban Gaji Pokok ASN	115.017.949.492,00	115.017.949.492,00	0,00
1.2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	11.004.847.133,00	11.004.847.133,00	0,00
1.3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	4.991.920.000,00	4.991.920.000,00	0,00
1.4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	4.703.956.000,00	4.703.956.000,00	0,00
1.5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.927.088.000,00	2.927.088.000,00	0,00
1.6	Beban Tunjangan Beras ASN	7.445.571.537,00	7.445.571.537,00	0,00
1.7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	202.769.239,00	202.769.239,00	0,00
1.8	Beban Pembulatan Gaji ASN	1.770.850,00	1.770.850,00	0,00
1.9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.921.206.870,00	7.921.206.870,00	0,00
1.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	236.231.964,00	236.231.964,00	0,00
1.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	708.695.612,00	708.695.612,00	0,00
1.12	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	39.984.891,00	39.984.891,00	0,00
2	**Beban Tambahan Penghasilan ASN**	**80.567.723.142,00**	**80.570.246.198,00**	**0,00**
2.1	BebanTambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	40.709.027.172,00	40.711.550.228,00	0,00
2.2	BebanTambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	164.351.937,00	164.351.937,00	0,00

No	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
2.3	BebanTambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.140.932.044,00	1.140.932.044,00	0,00
2.4	BebanTambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	38.553.411.989,00	38.553.411.989,00	0,00
3	**Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**34.598.611.055,00**	**34.622.114.355,00**	**0,00**
3.1	Beban Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	15.961.819.860,00	15.961.819.860,00	0,00
3.2	Beban Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	8.640.927.480,00	8.640.927.480,00	0,00
3.3	Beban Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00
3.4	Beban Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.530.000.015,00	1.530.000.015,00	0,00
3.5	Beban Belanja Honorarium	5.585.271.700,00	5.582.748.644,00	26.026.356,00
3.6	Beban Belanja Jasa Pengelolaan BMD	2.340.592.000,00	2.340.592.000,00	0,00
4	**Beban Gaji dan Tunjangan DPRD**	**8.601.836.667,00**	**8.601.836.667,00**	**0,00**
4.1	Beban Belanja Uang Representasi DPRD	443.415.000,00	443.415.000,00	0,00
4.2	Beban Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	37.522.800,00	37.522.800,00	0,00
4.3	Beban Belanja Tunjangan Beras DPRD	46.203.960,00	46.203.960,00	0,00
4.4	Beban Belanja Uang Paket DPRD	38.052.000,00	38.052.000,00	0,00
4.5	Beban Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	642.951.750,00	642.951.750,00	0,00
4.6	Beban Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	22.433.729,00	22.433.729,00	0,00
4.7	Beban Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	45.394.033,00	45.394.033,00	0,00
4.8	Beban Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.478.000.000,00	2.478.000.000,00	0,00
4.9	Beban Belanja Tunjangan Reses DPRD	619.500.000,00	619.500.000,00	0,00
4.10	Beban Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	169.163,00	169.163,00	0,00
4.11	Beban Belanja Pembulatan Gaji DPRD	0,00	0,00	0,00
4.12	Beban Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	1.663.644.232,00	1.663.644.232,00	0,00
4.13	Beban Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.561.400.000,00	2.561.400.000,00	0,00
4.14	Beban Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
5	**Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**	**161.934.202,00**	**161.934.202,00**	**0,00**
5.1	Beban Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.619.500,00	54.619.500,00	0,00
5.2	Beban Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
5.3	Beban Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.027.760,00	2.027.760,00	0,00
5.4	Beban Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.322.381,00	1.322.381,00	0,00
5.5	Beban Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	68.561,00	68.561,00	0,00
5.6	Beban Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.241.600,00	5.241.600,00	0,00
5.7	Beban Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	93.600,00	93.600,00	0,00
5.8	Beban Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	280.800,00	280.800,00	0,00
6	**Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**	**484.800.000,00**	**484.800.000,00**	**0,00**

No	URAIAN	LRA (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
6.1	Beban Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	184.800.000,00	184.800.000,00	0,00
6.2	Beban Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
7	**Belanja Pegawai BOS**	**4.924.072.623,00**	**4.924.072.623,00**	**0,00**
7.1	Beban Belanja Pegawai BOS	4.924.072.623,00	4.924.072.623,00	0,00
	JUMLAH	**284.566.995.633,00**	**284.540.969.277,00**	**26.026.356,00**

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat perbedaan antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai – LRA merupakan hasil koreksi atas ketekoran kas di bendahara pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) sebesar Rp3.423.056,00 dan ketekoran kas dibendaharan pengeluaran Sekretariat Daerah (Setda) sebesar Rp22.603.300,00.

b. Beban Barang dan Jasa-LO

Pengakuan beban barang dan jasa-LO sebesar Rp233.905.964.011,93 rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Persediaan	50.155.288.889,78	68.622.726.728,35	26,91
2	Beban Jasa	130.139.430.814,62	156.310.236.935,33	16,74
3	Beban Pemeliharaan	7.027.027.663,53	12.170.938.382,00	42,26
4	Beban Perjalanan Dinas	46.584.216.644,00	55.129.530.479,00	15,50
JUMLAH		**233.905.964.011,93**	**292.233.432.524,68**	**19,78**

1) Beban Persediaan-LO

Beban persediaan-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp50.155.288.889,78 rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Beban Bahan Pakai Habis-LO	50.020.800.760,78	34.905.574.324,48
2	Beban Barang Tak Habis Pakai-LO	134.488.129,00	0,00
3	Beban Bahan Material	0,00	9.577.734.992,29
4	Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	4.489.479.011,58
5	Beban Makanan dan Minuman	0,00	8.268.335.437,00
6	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	272.723.100,00
7	Belanja Pakaian Kerja	0,00	449.456.875,00
8	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	276.158.931,00
9	Beban BarangYang akan Diserahkan kepada Masy/Pihak Ketiga	0,00	10.326.464.057,00
	Jumlah	**50.155.288.889,78**	**68.565.926.728,35**

Terdapat selisih beban persediaan-LO dan belanja persediaan-LRA sebesar Rp**878.775.920,78** karena adanya penambahan saldo awal beban persediaan sebesar Rp9.627.792.918,91 dan

pengurangan saldo akhir tahun beban persediaan sebesar (Rp8.749.016.998,13) dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
I	**BEBAN BARANG PAKAI HABIS – LO**					
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	88.067.737,00	0,00	0,00	88.067.737,00	0,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	57.967.000,00	0,00	0,00	57.967.000,00	0,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.858.371.284,00	234.872.013,00	0,00	9.093.243.297,00	234.872.013,00
4	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	80.792.000,00	0,00	0,00	80.792.000,00	0,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	160.800.000,00	0,00	0,00	160.800.000,00	0,00
6	Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00
7	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	71.281.600,00	58.478.000,00	(55.618.000,00)	74.141.600,00	2.860.000,00
8	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.428.618.977,00	216.282.472,00	(145.876.854,00)	4.499.024.595,00	70.405.618,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.213.090.609,00	0,00	0,00	1.213.090.609,00	0,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.242.166.419,00	467.173.259,00	(316.336.159,08)	1.393.003.518,92	150.837.099,92
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	187.582.521,00	258.000,00	0,00	187.840.521,00	258.000,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	28.194.000,00	0,00	0,00	28.194.000,00	0,00
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.228.633.526,00	85.072.610,00	(27.763.000,00)	1.285.943.136,00	57.309.610,00
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	380.792.086,00	1.257.500,00	(352.950,00)	381.696.636,00	904.550,00
16	BebanPeralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	255.656.630,00	0,00	0,00	255.656.630,00	0,00

No.	Uraian	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	44.770.000,00	0,00	0,00	44.770.000,00	0,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	49.188.000,00	0,00	0,00	49.188.000,00	0,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.193.525.350,00	0,00	(24.083.000,00)	2.169.442.350,00	(24.083.000,00)
21	Beban Obat-Obatan-Obat	3.254.338.968,00	6.726.579.474,03	(6.793.388.761,05)	3.187.529.680,98	(66.809.287,02)
22	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.467.183.715,00	1.120.339.000,88	(619.529.454,00)	5.967.993.261,88	500.809.546,88
23	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.035.629.500,00	667.630.590,00	(667.630.590,00)	12.035.629.500,00	0,00
24	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.972.338.960,00	4.250.000,00	(4.427.230,00)	1.972.161.730,00	(177.230,00)
25	Beban Natura dan Pakan-Pakan	380.916.500,00	0,00	0,00	380.916.500,00	0,00
26	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	33.365.000,00	0,00	0,00	33.365.000,00	0,00
27	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	4.480.000,00	0,00	0,00	4.480.000,00	0,00
28	Beban Makanan dan Minuman Rapat	3.063.897.717,00	0,00	0,00	3.063.897.717,00	0,00
29	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	613.580.620,00	0,00	0,00	613.580.620,00	0,00
30	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	565.516.613,00	0,00	0,00	565.516.613,00	0,00
31	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	614.211.008,00	0,00	0,00	614.211.008,00	0,00
32	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	81.278.000,00	0,00	0,00	81.278.000,00	0,00
33	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	139.436.000,00	0,00	0,00	139.436.000,00	0,00
34	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	239.010.500,00	0,00	0,00	239.010.500,00	0,00
36	Beban Pakaian Batik Tradisional	26.865.000,00	0,00	0,00	26.865.000,00	0,00
37	Beban Pakaian Olahraga	78.771.000,00	11.250.000,00	(59.661.000,00)	30.360.000,00	(48.411.000,00)
38	Beban Pakaian	0,00	34.350.000,00	(34.350.000,00)	0,00	0,00

No.	Uraian	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Jumlah	**49.142.024.840,00**	**9.627.792.918,91**	**(8.727.404.198,13)**	**50.020.800.760,78**	**878.775.920,78**
II	**BEBAN BARANG TAK HABIS PAKAI – LO**					
1	Beban Komponen-Komponen Jembatan Baja	16.168.000,00	0,00	0,00	16.168.000,00	0,00
2	Beban Komponen-Komponen Peralatan	28.220.000,00	0,00	0,00	28.220.000,00	0,00
3	Beban Komponen-Komponen Lainnya	11.490.000,00	0,00	0,00	11.490.000,00	0,00
4	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	78.610.129,00	0,00	0,00	78.610.129,00	0,00
	Jumlah	**134.488.129,00**	**-**	**-**	**134.488.129,00**	**-**
	Total	**49.276.512.969,00**	**9.627.792.918,91**	**(8.749.016.998,13)**	**50.155.288.889,78**	**878.775.920,78**

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa terdapat penambahan saldo awal beban persediaan yang terdiri dari bahan–bahan bakar minyak sebesar Rp234.872.013,00, suku cadang alat angkutan sebesar Rp58.478.000,00, alat tulis kantor sebesar Rp216.282.472,00, bahan cetak senilai Rp467.173.259,00, benda pos sebesar Rp258.000,00, perabot kantor sebesar Rp85.072.610,00, alat listrik sebesar Rp1.257.500,00, obat-obatan senilai Rp6.726.579.474,03, obat-obatan lainnya senilai Rp1.120.339.000,88, barang untuk diserahkan kepada masyarakat Rp667.630.590,00, Natura dan pakan-natura sebesar Rp4.250.000,00, pakaian olahraga senilai Rp11.250.000,00 dan pakaian sebesar Rp34.350.000,00.

Terdapat pengurangan saldo akhir beban persediaan antara lain suku cadang alat angkutan sebesar (Rp55.618.000,00), alat tulis kantor senilai (Rp145.876.854,00), bahan cetak sebesar (Rp316.336.159,08), perabot kantor sebesar (Rp27.763.000,00), alat listrik sebesar (Rp352.950,00), bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar (Rp24.083.000,00), obat-obatan sebesar (Rp6.793.388.761,05), obat-obatan lainnya sebesar Rp(619.529.454,00), barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar (Rp667.630.590,00), natura dan pakan-natura sebesar (Rp4.427.230,00), pakaian olahraga sebesar (Rp59.661.000,00), dan pakaian senilai (Rp34.350.000,00).

Rincian beban persediaan masing-masing OPD tahun 2021 sebagai berikut :

NO	OPD	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	705.580.700,00	0,00	(9.100.000,00)	696.480.700,00	(9.100.000,00)
2	Dinas Kesehatan	11.987.931.206,00	6.726.579.474,03	(6.480.111.606,05)	12.234.399.073,98	246.467.867,98
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.646.195.951,00	1.163.885.250,88	(1.013.902.239,00)	2.796.178.962,88	149.983.011,88
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	957.954.138,00	58.478.000,00	(57.143.500,00)	959.288.638,00	1.334.500,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	405.246.013,00	0,00	0,00	405.246.013,00	0,00
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	120.443.300,00	5.660.000,00	(4.347.200,00)	121.756.100,00	1.312.800,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	477.617.800,00	322.000,00	(730.700,00)	477.209.100,00	(408.700,00)

NO	OPD	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	420.420.178,00	428.000,00	0,00	420.848.178,00	428.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	473.305.427,00	671.880.590,00	(667.630.590,00)	477.555.427,00	4.250.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	384.971.700,00	0,00	(1.706.400,00)	383.265.300,00	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	268.797.901,00	318.638.859,00	(250.163.809,08)	337.272.950,92	68.475.049,92
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	617.815.400,00	700.000,00	0,00	618.515.400,00	700.000,00
13	Dinas Perhubungan	266.478.982,00	239.250.222,00		505.729.204,00	239.250.222,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	179.332.600,00	0,00	(1.225.000,00)	178.107.600,00	(1.225.000,00)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	349.840.550,00	0,00	0,00	349.840.550,00	0,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	102.827.150,00	3.492.500,00	(4.972.200,00)	101.347.450,00	(1.479.700,00)
17	Dinas Perikanan	12.087.217.825,00	0,00	0,00	12.087.217.825,00	0,00
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	512.583.100,00	11.250.000,00	(59.661.000,00)	464.172.100,00	(48.411.000,00)
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.208.519.509,00	41.073.013,00	(17.631.100,00)	1.231.961.422,00	23.441.913,00
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	394.946.930,00	12.355.910,00	(1.223.295,00)	406.079.545,00	11.132.615,00
21	Sekretariat Daerah	7.329.994.361,00	54.408.750,00	(236.000,00)	7.384.167.111,00	54.172.750,00
22	Sekretariat DPRD	1.848.846.785,00	21.595.200,00	(41.671.519,00)	1.828.770.466,00	(20.076.319,00)
23	Kecamatan Pagai Utara	93.407.200,00	0,00	(39.950,00)	93.367.250,00	(39.950,00)
24	Kecamatan Sipora Selatan	109.257.280,00	0,00	0,00	109.257.280,00	0,00
25	Kecamatan Sipora Utara	187.664.350,00	0,00	0,00	187.664.350,00	0,00
26	Kecamatan Siberut Selatan	156.259.495,00	0,00	0,00	156.259.495,00	0,00
27	Kecamatan Siberut Barat Daya	232.885.825,00	0,00	0,00	232.885.825,00	0,00
28	Kecamatan Siberut Tengah	158.518.000,00	0,00	0,00	158.518.000,00	0,00
29	Kecamatan Siberut Utara	281.921.900,00	34.350.000,00	(34.350.000,00)	281.921.900,00	0,00
30	Kecamatan Siberut Barat	262.800.650,00	0,00	0,00	262.800.650,00	0,00
31	Kecamatan Pagai Selatan	170.060.300,00	175.000,00	(145.000,00)	170.090.300,00	30.000,00
32	Kecamatan Sikakap	96.472.842,00	0,00	(1.435.040,00)	95.037.802,00	(1.435.040,00)
33	Inspektorat	290.051.960,00	211.640,00	0,00	290.263.600,00	211.640,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	903.550.387,00	2.785.200,00	(2.752.640,00)	903.582.947,00	32.560,00
35	Badan Keuangan Daerah	2.365.206.104,00	260.273.310,00	(98.838.210,00)	2.526.641.204,00	161.435.100,00
36	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	221.589.170,00	0,00	0,00	221.589.170,00	0,00
JUMLAH		**49.276.512.969,00**	**9.627.792.918,91**	**(8.749.016.998,13)**	**50.155.288.889,78**	**878.775.920,78**

2) Beban Jasa-LO

Pengakuan beban jasa-LO tahun anggaran 2021 sebesar Rp130.139.430.814,62 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Uraian	LO - 2021	LO - 2020	Kenaikan /Penurunan
		(Rp)	(Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	95.225.703.083,02	18.486.595.928,00	415,11
2	Beban Premi Asuransi	4.669.471.460,00	3.799.420.176,00	22,90
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.459.468.224,00	2.112.685.179,00	100,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	433.487.208,60	1.226.531.163,33	(64,66)
5	Beban Jalan, Jaringan dan Irigasi	214.169.000,00	0,00	100,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.942.971.150,00	9.091.645.800,00	(78,63)
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.221.437.250,00	1.042.682.400,00	17,14
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	256.500.000,00	782.904.000,00	(67,24)
9	Beban Kursus/Pelatihan/Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS	1.528.428.200,00	803.577.000,00	90,20
10	Beban Honorarium PNS	0,00	25.637.042.610,00	(100,00)
11	Beban Honorarium Non PNS	0,00	80.251.128.259,00	(100,00)
12	Beban Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak lain/Masyarakat	6.524.906.000,00	7.589.257.400,00	(14,02)
13	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	0,00	0,00
14	Beban Barang Dana BOS	9.662.889.239,00	0,00	0,00
15	Beban Beasiswa Pendidikan Non PNS	0,00	5.461.767.020,00	(100,00)
16	Beban Pembangunan SDM Non Aparatur	0,00	25.000.000,00	(100,00)
	Jumlah	**130.139.430.814,62**	**156.310.236.935,33**	**(16,74)**

Terdapat selisih antara beban jasa-LO dan belanja jasa-LRA Sebesar (Rp8.094.635.035,67) dengan rincian sbb:

NO.	Uraian	LRA – 2021	TAMBAH	KURANG	LO - 2021	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Jasa Kantor	95.225.703.083,02	0,00	0,00	95.225.703.083,02	0,00
2	Beban Premi Asuransi	4.669.471.460,00	0,00	0,00	4.669.471.460,00	0,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.459.468.224,00	0,00	0,00	8.459.468.224,00	0,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	420.852.800,00	70.416.666,66	(57.782.258,06)	433.487.208,60	12.634.408,60
5	Beban Jalan, Jaringan dan Irigasi	214.169.000,00	0,00	0,00	214.169.000,00	0,00
6	Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	10.020.299.519,00	0,00	(8.102.968.369,00)	1.917.331.150,00	(8.102.968.369,00)
7	Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi	1.221.437.250,00	0,00	0,00	1.221.437.250,00	0,00
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	256.500.000,00	0,00	0,00	256.500.000,00	0,00

NO.	Uraian	LRA – 2021	TAMBAH	KURANG	LO - 2021	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
9	Beban Kursus/Pelatihan/Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS	1.554.068.200,00	0,00	0,00	1.554.068.200,00	0,00
10	Beban Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak lain/Masyarakat	6.524.906.000,00	0,00	0,00	6.524.906.000,00	0,00
11	Beban Barang Dana BOS	9.662.889.239,00	0,00	0,00	9.662.889.239,00	0,00
	Jumlah	**138.229.764.775,02**	**70.416.666,66**	**(8.160.750.627,06)**	**130.135.129.739,35**	**(8.090.333.960,40)**

Selisih berasal dari Penambahan saldo awal beban jasa sebesar Rp70.416.666,66 dan pengurangan saldo akhir beban jasa sebesar (Rp8.160.750.627,06). Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penambahan saldo awal sewa gedung dan bangunan sebesar Rp70.416.666,67 dan pengurangan saldo akhir beban sewa gedung dan bangunan sebesar (Rp57.782.258,07) dengan rincian sebagai berikut:

NO	OPD	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.000.000,00	37.500.000,00	(26.008.064,52)	58.491.935,48	(11.491.935,48)
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	52.500.000,00	32.916.666,67	(31.774.193,55)	53.642.473,12	(1.142.473,12)
Jumlah		**99.500.000,00**	**70.416.666,67**	**-57.782.258,07**	**112.134.408,60**	**(12.634.408,60)**

b. Terdapat pengurangan beban jasa konsultansi pada beberapa OPD sebesar Rp(8.102.968.369,00) dengan uraian sebagai berikut:

NO	OPD	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
		(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	(58.645.000,00)
2	Dinas Kesehatan	0,00	(179.158.947,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	(6.183.963.758,00)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	(1.353.360.734,00)
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	(14.437.500,00)
6	Dinas Perhubungan	0,00	(263.792.430,00)
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	(49.610.000,00)
	JUMLAH	**0,00**	**(8.102.968.369,00)**

Secara rinci penambahan dan pengurangan beban jasa per rincian objek tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO.	Uraian	LRA – 2021 (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO - 2021 (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	810.556.000,00	0,00	0,00	810.556.000,00	0,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.166.166.100,00	0,00	0,00	5.166.166.100,00	0,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	134.900.000,00	0,00	0,00	134.900.000,00	0,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.799.502.075,00	0,00	0,00	2.799.502.075,00	0,00
5	Honorarium Rohaniwan	39.100.000,00	0,00	0,00	39.100.000,00	0,00
6	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	39.600.000,00	0,00	0,00	39.600.000,00	0,00
7	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	486.280.000,00	0,00	0,00	486.280.000,00	0,00
8	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	12.114.841.000,00	0,00	0,00	12.114.841.000,00	0,00
9	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	21.919.785.918,02	0,00	0,00	21.919.785.918,02	0,00
10	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	137.818.000,00	0,00	0,00	137.818.000,00	0,00
11	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	88.082.100,00	0,00	0,00	88.082.100,00	0,00
12	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	390.820.000,00	0,00	0,00	390.820.000,00	0,00
13	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	555.805.000,00	0,00	0,00	555.805.000,00	0,00
14	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	139.835.858,00	0,00	0,00	139.835.858,00	0,00
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
16	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	733.790.000,00	0,00	0,00	733.790.000,00	0,00
17	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	236.670.000,00	0,00	0,00	236.670.000,00	0,00
18	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	7.280.000,00	0,00	0,00	7.280.000,00	0,00
19	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.133.522.611,00	0,00	0,00	22.133.522.611,00	0,00

NO.	Uraian	LRA – 2021 (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO - 2021 (Rp)	SELISIH (Rp)
20	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	29.760.000,00	0,00	0,00	29.760.000,00	0,00
21	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.751.427.640,00	0,00	0,00	7.751.427.640,00	0,00
22	Belanja Jasa Tenaga Ahli	832.592.328,00	0,00	0,00	832.592.328,00	0,00
23	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.243.240.946,00	0,00	0,00	4.243.240.946,00	0,00
24	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.728.361.719,00	0,00	0,00	2.728.361.719,00	0,00
25	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.079.664.772,00	0,00	0,00	2.079.664.772,00	0,00
26	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	133.980.000,00	0,00	0,00	133.980.000,00	0,00
27	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	22.470.000,00	0,00	0,00	22.470.000,00	0,00
28	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	201.480.000,00	0,00	0,00	201.480.000,00	0,00
29	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	156.559.609,00	0,00	0,00	156.559.609,00	0,00
30	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	0,00
31	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	40.050.000,00	0,00	0,00	40.050.000,00	0,00
32	Belanja Jasa Kalibrasi	187.400.000,00	0,00	0,00	187.400.000,00	0,00
33	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	5.370.200,00	0,00	0,00	5.370.200,00	0,00
34	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	475.050.000,00	0,00	0,00	475.050.000,00	0,00
35	Belanja Jasa Operator Kapal	1.151.292.118,00	0,00	0,00	1.151.292.118,00	0,00
36	Belanja Tagihan Telepon	34.425.088,00	0,00	0,00	34.425.088,00	0,00
37	Belanja Tagihan Air	126.183.451,00	0,00	0,00	126.183.451,00	0,00
38	Belanja Tagihan Listrik	2.558.436.292,00	0,00	0,00	2.558.436.292,00	0,00
39	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	462.900.000,00	0,00	0,00	462.900.000,00	0,00
40	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.450.591.648,00	0,00	0,00	3.450.591.648,00	0,00
41	Belanja Paket/Pengiriman	57.920.000,00	0,00	0,00	57.920.000,00	0,00
42	Belanja Registrasi/Keanggotaan	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
43	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	152.477.850,00	0,00	0,00	152.477.850,00	0,00
44	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	311.114.760,00	0,00	0,00	311.114.760,00	0,00
45	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.056.545.867,00	0,00	0,00	4.056.545.867,00	0,00

NO.	Uraian	LRA – 2021 (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO - 2021 (Rp)	SELISIH (Rp)
46	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	153.232.402,00	0,00	0,00	153.232.402,00	0,00
47	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	459.693.191,00	0,00	0,00	459.693.191,00	0,00
48	Belanja Sewa Electric Generating Set	2.604.920,00	0,00	0,00	2.604.920,00	0,00
49	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	108.338.600,00	0,00	0,00	108.338.600,00	0,00
50	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
51	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	49.880.000,00	0,00	0,00	49.880.000,00	0,00
52	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	8.261.039.784,00	0,00	0,00	8.261.039.784,00	0,00
53	Belanja Sewa Sumber Tenaga	2.604.920,00	0,00	0,00	2.604.920,00	0,00
54	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
55	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	262.777.800,00	52.083.333,33	(39.448.924,73)	275.412.208,60	12.634.408,60
56	Belanja Sewa Bangunan Gudang	27.500.000,00	18.333.333,33	(18.333.333,33)	27.500.000,00	0,00
57	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	23.215.000,00	0,00	0,00	23.215.000,00	0,00
58	Belanja Sewa Hotel	107.360.000,00	0,00	0,00	107.360.000,00	0,00
59	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	0,00	0,00	-	0,00
60	Belanja Sewa Jaringan Induk Distribusi	214.169.000,00	0,00	0,00	214.169.000,00	0,00
61	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Arsitektural	99.528.000,00	0,00	0,00	99.528.000,00	0,00
62	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	3.087.012.634,00	0,00	(2.053.800.034,00)	1.033.212.600,00	-2.053.800.034,00
63	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	199.692.500,00	0,00	0,00	199.692.500,00	0,00
64	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	23.676.000,00	0,00	0,00	23.676.000,00	0,00

NO.	Uraian	LRA – 2021 (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO - 2021 (Rp)	SELISIH (Rp)
65	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	5.746.998.258,00	0,00	(5.689.193.258,00)	57.805.000,00	-5.689.193.258,00
66	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	265.244.577,00	0,00	(261.244.577,00)	4.000.000,00	-261.244.577,00
67	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	98.730.500,00	0,00	(98.730.500,00)	0,00	-98.730.500,00
68	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	499.417.050,00	0,00	0,00	499.417.050,00	0,00
69	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Telematika	98.725.000,00	0,00	0,00	98.725.000,00	0,00
70	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	1.027.880.900,00	0,00	0,00	1.027.880.900,00	0,00
71	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan - Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	94.831.350,00	0,00	0,00	94.831.350,00	0,00
72	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	144.000.000,00	0,00	0,00	144.000.000,00	0,00
73	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	112.500.000,00	0,00	0,00	112.500.000,00	0,00
74	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.043.970.200,00	0,00	0,00	1.043.970.200,00	0,00
75	Belanja Sosialisasi	447.360.000,00	0,00	0,00	447.360.000,00	0,00
76	Belanja Bimbingan Teknis	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00
77	Belanja Diklat Kepemimpinan	10.738.000,00	0,00	0,00	10.738.000,00	0,00
78	Beban Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/pihak lain/Masyarakat	6.524.906.000,00	0,00	0,00	6.524.906.000,00	0,00
79	Beban Barang Dana BOS	9.662.889.239,00	0,00	0,00	9.662.889.239,00	0,00
	Jumlah	**138.229.764.775,02**	**70.416.666,66**	**(8.160.750.627,06)**	**130.139.430.814,62**	**(8.090.333.960,40)**

Berikut rincian Beban Jasa masing- masing OPD Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

NO	OPD	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.050.052.045,00	0,00	(58.645.000,00)	24.991.407.045,00	58.645.000,00

NO	OPD	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	Rumah Sakit Umum Daerah	9.965.205.106,00	0,00	0,00	9.965.205.106,00	0,00
3	Dinas Kesehatan	27.873.185.686,02	0,00	(179.158.947,00)	27.694.026.739,02	179.158.947,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.884.404.405,00	37.500.000,00	(6.209.971.822,51)	8.711.932.582,49	6.175.630.424,67
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.482.094.733,00	0,00	0,00	2.482.094.733,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.982.129.724,00	0,00	0,00	4.982.129.724,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.876.477.089,00	0,00	(1.353.360.734,00)	1.523.116.355,00	1.353.360.734,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	931.151.180,00	32.916.666,66	(31.774.193,55)	932.293.653,11	(1.142.473,11)
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.793.752.105,00	0,00	0,00	2.793.752.105,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1.335.156.356,00	0,00	0,00	1.335.156.356,00	0,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.059.835.651,00	0,00	0,00	1.059.835.651,00	0,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.534.720.079,00	0,00	(14.437.500,00)	2.520.282.579,00	14.437.500,00
13	Dinas Perhubungan	3.766.940.070,00	0,00	(263.792.430,00)	3.503.147.640,00	263.792.430,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.674.628.466,00	0,00	(49.610.000,00)	3.625.018.466,00	49.610.000,00
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	689.916.094,00	0,00	0,00	689.916.094,00	0,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	737.471.478,00	0,00	0,00	737.471.478,00	0,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	524.504.884,00	0,00	0,00	524.504.884,00	0,00
18	Dinas Perikanan	2.228.858.242,00	0,00	0,00	2.228.858.242,00	0,00
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2.260.124.912,00	0,00	0,00	2.260.124.912,00	0,00
20	Sekretariat Daerah	11.424.874.935,00	0,00	0,00	11.424.874.935,00	0,00
21	Inspektorat	2.368.602.400,00	0,00	0,00	2.368.602.400,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.617.714.216,00	0,00	0,00	1.617.714.216,00	0,00
23	Badan Keuangan Daerah	2.986.692.601,00	0,00	0,00	2.986.692.601,00	0,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.724.513.259,00	0,00	0,00	1.724.513.259,00	0,00
25	Sekretariat Daerah	3.373.193.266,00	0,00	0,00	3.373.193.266,00	0,00
26	Kecamatan Siberut Utara	283.451.343,00	0,00	0,00	283.451.343,00	0,00

NO	OPD	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
27	Kecamatan Siberut Tengah	402.114.000,00	0,00	0,00	402.114.000,00	0,00
28	Kecamatan Siberut Barat	344.444.000,00	0,00	0,00	344.444.000,00	0,00
29	Kecamatan Siberut Barat Daya	283.597.573,00	0,00	0,00	283.597.573,00	0,00
30	Kecamatan Siberut Selatan	309.426.797,00	0,00	0,00	309.426.797,00	0,00
31	Kecamatan Sipora Utara	584.543.865,00	0,00	0,00	584.543.865,00	0,00
32	Kecamatan Sipora Selatan	481.134.750,00	0,00	0,00	481.134.750,00	0,00
33	Kecamatan Pagai Utara	360.990.100,00	0,00	0,00	360.990.100,00	0,00
34	Kecamatan Sikakap	249.042.561,00	0,00	0,00	249.042.561,00	0,00
35	Kecamatan Pagai Selatan	393.152.732,00	0,00	0,00	393.152.732,00	0,00
36	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	391.668.072,00	0,00	0,00	391.668.072,00	0,00
JUMLAH		**138.229.764.775,02**	**70.416.666,66**	**(8.160.750.627,06)**	**130.139.430.814,62**	**8.090.333.960,40**

1) Beban Pemeliharaan-LO

Beban pemeliharaan-LO tahun 2021 sebesar Rp**7.027.027.663,53** dan tahun 2020 sebesar Rp12.170.938.382,00

Terdapat selisih beban pemeliharaan-LO dan belanja pemeliharaan-LRA sebesar Rp2.253.749.567,47, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	LRA	LO	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.594.273.254,00	4.594.273.254,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.782.645.477,00	528.895.909,53	2.253.749.567,47
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.903.858.500,00	1.903.858.500,00	0,00
	TOTAL	**9.280.777.231,00**	**7.027.027.663,53**	**2.253.749.567,47**

Uraian beban pemeliharaan Peralatan dan Mesin – LO per rincian objek tahun 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	54.231.418,00	0,00	0,00	54.231.418,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Electric Generating Set	2.656.000,00	0,00	0,00	2.656.000,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.538.981.463,00	0,00	0,00	1.538.981.463,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Kendaraan Bermotor Penumpang					
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	142.158.610,00	0,00	0,00	142.158.610,00	0,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.677.273.995,00	0,00	0,00	1.677.273.995,00	0,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya	19.513.000,00	0,00	0,00	19.513.000,00	0,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	244.675.250,00	0,00	0,00	244.675.250,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	87.854.600,00	0,00	0,00	87.854.600,00	0,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	104.667.200,00	0,00	0,00	104.667.200,00	0,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- Sumber Tenaga	93.590.000,00	0,00	0,00	93.590.000,00	0,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	247.714.000,00	0,00	0,00	247.714.000,00	0,00
15	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	236.707.718,00	0,00	0,00	236.707.718,00	0,00
16	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	126.250.000,00	0,00	0,00	126.250.000,00	0,00
17	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
	Jumlah	**4.594.273.254,00**	**0,00**	**0,00**	**4.594.273.254,00**	**0,00**

Uraian beban pemeliharaan Gedung dan Bangunan – LO per rincian objek tahun 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	LRA (Rp)	TAMBAH (Rp)	KURANG (Rp)	LO (Rp)	SELISIH (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.622.734.533,00	0,00	(2.163.888.623,47)	458.845.909,53	2.163.888.623,47
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	55.050.000,00	0,00	0,00	55.050.000,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung sekam	89.860.944,00	0,00	(89.860.944,00)	0,00	89.860.944,00
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow /Tempat Peristirahatan	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**2.782.645.477,00**	**0,00**	**(2.253.749.567,47)**	**528.895.909,53**	**2.253.749.567,47**

Selisih antara beban pemeliharaan gedung dan bangunan-LO dengan belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan-LRA berasal dari pengurangan belanja sebesar Rp2.253.749.567,47 pada beberapa OPD tahun 2021 berupa reklasifikasi belanja pemeliharaan menjadi penambah nilai asset tetap, berikut uraian penambahan dan pengurangan beban pemeliharaan Gedung dan bangunan-LO masing-masing OPD sebagai berikut :

No	OPD	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	Keterangan
1	Pendidikan	0,00	(383.958.230,00)	Kapitalisasi barang dan jasa menjadi aset tetap
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	(200.328.526,00)	Kapitalisasi barang dan jasa menjadi aset tetap
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	0,00	(89.860.944,00)	Kapitalisasi barang dan jasa menjadi aset tetap
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	(106.455.544,00)	Kapitalisasi barang dan jasa menjadi aset tetap
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	(188.900.000,00)	Kapitalisasi barang dan jasa menjadi aset tetap
6	Dinas Perikanan	0,00	(364.380.981,47)	Kapitalisasi barang dan jasa menjadi aset tetap
7	Sekretariat Daerah	0,00	(919.865.342,00)	Kapitalisasi barang dan jasa menjadi aset tetap
	JUMLAH	**0,00**	**(2.253.749.567,47)**	

Uraian beban pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi per rincian objek tahun 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.287.650.500,00	0,00	0,00	1.287.650.500,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan	9.841.000,00	0,00	0,00	9.841.000,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Pemeliharaan Aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	606.367.000	0,00	0,00	606.367.000,00	0,00
	Jumlah	**1.903.858.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.903.858.500,00**	**0,00**

Berikut rincian beban Pemeliharaan–LO masing- masing OPD Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

No	OPD	LRA	Tambah	Kurang	LO
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	420.004.253,00	0,00	(383.958.230,00)	36.046.023,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	438.650.070,00	0,00	0,00	438.650.070,00
3	Dinas Kesehatan	121.126.600,00	0,00	0,00	121.126.600,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.203.322.625,00	0,00	(200.328.526,00)	2.002.994.099,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	70.190.648,00	0,00	0,00	70.190.648,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	87.609.860,00	0,00	0,00	87.609.860,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	152.433.424,00	0,00	0,00	152.433.424,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	89.860.944,00	0,00	(89.860.944,00)	0,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16.928.000,00	0,00	0,00	16.928.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	64.130.000,00	0,00	0,00	64.130.000,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	126.380.544,00	0,00	(106.455.544,00)	19.925.000,00
12	Dinas Pember Masy dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Perhubungan	73.290.200,00	0,00	0,00	73.290.200,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	232.465.895,00	0,00	(188.900.000,00)	43.565.895,00
15	Dinas Koperasi UKM, Perinda	17.360.000,00	0,00	0,00	17.360.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60.621.636,00	0,00	0,00	60.621.636,00

No	OPD	LRA	Tambah	Kurang	LO
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	56.649.000,00	0,00	0,00	56.649.000,00
18	Dinas Perikanan	611.710.990,00	0,00	(364.380.981,47)	247.330.008,53
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	99.034.200,00	0,00	0,00	99.034.200,00
20	Sekretariat Daerah	3.306.072.102,00	0,00	(919.865.342,00)	2.386.206.760,00
21	Inspektorat	59.995.000,00	0,00	0,00	59.995.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	316.423.533,00	0,00	0,00	316.423.533,00
23	Badan Keuangan Daerah	256.752.500,00	0,00	0,00	256.752.500,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
25	Sekretariat DPRD	182.897.750,00	0,00	0,00	182.897.750,00
26	Kecamatan Siberut Utara	37.158.657,00	0,00	0,00	37.158.657,00
27	Kecamatan Siberut Tengah	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
28	Kecamatan Siberut Barat	17.488.800,00	0,00	0,00	17.488.800,00
29	Kecamatan Siberut Barat Daya	60.050.000,00	0,00	0,00	60.050.000,00
30	Kecamatan Siberut Selatan	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
31	Kecamatan Sipora Utara	23.360.000,00	0,00	0,00	23.360.000,00
32	Kecamatan Sipora Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Pagai Utara	14.795.000,00	0,00	0,00	14.795.000,00
34	Kecamatan Sikakap	2000000	0,00	0,00	2.000.000,00
35	Kecamatan Pagai Selatan	29.910.000,00	0,00	0,00	29.910.000,00
36	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00
Jumlah		**9.280.777.231,00**	**0,00**	**(2.253.749.567,47)**	**7.027.027.663,53**

2) Beban Perjalanan Dinas-LO

Beban perjalanan dinas-LO tahun 2021 sebesar Rp46.584.216.644,00 dan tahun 2020 sebesar Rp55.129.530.479,00. Pada tahun 2021 terdapat perbedaan/selisih antara Beban perjalanan dinas-LO dengan belanja perjalanan dinas-LRA merupakan koreksi atas ketekoran kas di Bendaharan Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp108.522.000,00 berikut uraian beban perjalanan dinas-LO per rincian objek tahun 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.195.933.959,00	0,00	0,00	24.195.933.959,00	0,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	621.824.647,00	0,00	0,00	621.824.647,00	0,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.704.980.038,00	0,00	(108.522.000,00)	21.596.458.038,00	(108.522.000,00)
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00

No	Uraian	LRA	TAMBAH	KURANG	LO	SELISIH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**46.692.738.644,00**	**0,00**	**(108.522.000,00)**	**46.584.216.644,00**	**(108.522.000,00)**

Berikut rincian beban Perjalanan Dinas–LO masing-masing OPD TA 2021 sebagai berikut :

Kode Rek	OPD	LRA (Rp)	Beban LO (Rp)
01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.301.104.255,00	2.301.104.255,00
01.02.01	Dinas Kesehatan	2.432.334.771,00	2.432.334.771,00
01.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	339.327.071,00	339.327.071,00
01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.325.008.493,00	3.325.008.493,00
01.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	466.230.710,00	466.230.710,00
01.05.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	281.105.848,00	281.105.848,00
01.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	151.360.500,00	151.360.500,00
01.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	774.895.234,00	774.895.234,00
01.06.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	913.420.714,00	913.420.714,00
02.05.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	412.689.564,00	304.167.564,00
02.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	560.168.900,00	560.168.900,00
02.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	875.040.358,00	875.040.358,00
02.09.01	Dinas Perhubungan	485.226.846,00	485.226.846,00
02.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	424.374.256,00	424.374.256,00
02.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	356.836.200,00	356.836.200,00
02.17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	258.963.650,00	258.963.650,00
03.01.01	Dinas Perikanan	1.209.152.788,00	1.209.152.788,00
03.02.01	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	742.895.800,00	742.895.800,00
03.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	857.953.700,00	857.953.700,00
03.07.01	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	341.447.534,00	341.447.534,00
04.01.03	Sekretariat Daerah	6.331.493.140,00	6.331.493.140,00
04.01.04	Sekretariat DPRD	10.941.469.176,00	10.941.469.176,00
04.01.05	Kecamatan Pagai Utara	331.962.000,00	331.962.000,00
04.01.06	Kecamatan Sipora Selatan	243.204.000,00	243.204.000,00
04.01.07	Kecamatan Sipora Utara	156.590.000,00	156.590.000,00

Kode Rek	OPD	LRA (Rp)	Beban LO (Rp)
04.01.08	Kecamatan Siberut Selatan	381.300.000,00	381.300.000,00
04.01.09	Kecamatan Siberut Barat Daya	199.260.000,00	199.260.000,00
04.01.10	Kecamatan Siberut Tengah	342.720.000,00	342.720.000,00
04.01.11	Kecamatan Siberut Utara	400.980.000,00	400.980.000,00
04.01.12	Kecamatan Siberut Barat	563.340.000,00	563.340.000,00
04.01.13	Kecamatan Pagai Selatan	485.680.709,00	485.680.709,00
04.01.14	Kecamatan Sikakap	314.200.000,00	314.200.000,00
04.02.01	Inspektorat	1.978.589.342,00	1.978.589.342,00
04.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.529.592.038,00	1.529.592.038,00
04.04.05	Badan Keuangan Daerah	4.006.470.670,00	4.006.470.670,00
04.05.07	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	976.350.377,00	976.350.377,00
	JUMLAH	**46.692.738.644,00**	**46.584.216.644,00**

3) Beban Subsidi-LO

Beban subsidi-LO tahun 2021 sebesar Rp Rp9.585.794.613,00 dan tahun 2020 sebesar Rp6.734.707.000,00. Beban subsidi-LO tahun 2021 merupakan subsidi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Perusahaan Daerah Kemakmuran Mentawai (Perusda) untuk kegiatan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa (PLTBM) sebesar Rp1.900.000.000,00, pemberian subsidi kepada PT. Mentawai Anugerah Sejahtera sebesar Rp3.852.450.000,00, dan kepada PT ASIMI untuk operasional Kapal Antar Pulau sebesar Rp3.833.344.613,00 sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Belanja Subsidi.

4) Beban Hibah-LO

Beban hibah-LO tahun 2021 sebesar Rp19.777.337.264,00 dan tahun 2020 sebesar Rp4.035.684.836,00, Beban hibah-LO merupakan beban hibah yang diberikan kepada:

No	Penerima Hibah	Beban Hibah -LO 2021	Beban Hibah - LO 2020
		(Rp)	(Rp)
1	Hibah Kepada BUMD	1.999.923.500,00	0,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.864.267.756,00	0,00
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	627.228.000,00	0,00
4	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	1.698.634.836,00
5	Beban Hibah BOP PAUD Masyarakat/ swasta	0,00	999.300.000,00
6	Beban Hibah Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan	0,00	1.155.250.000,00
7	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	0,00	182.500.000,00
8	beban hibah gedung kepada Pemerintah Desa	969.251.451,00	0,00
9	beban hibah barang yg diserahkan kepada masyarakat	13.316.666.557,00	0,00
Jumlah		**19.777.337.264,00**	**4.035.684.836,00**

Beban Hibah – LO Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Beban hibah kepada BUMD yaitu hibah kepada Akademi Komunitas Negeri (AKN) Kampus Mentawai sebesar Rp Rp1.999.923.500,00,
2. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia merupakan Hibah kepada penyelenggara PKBM sebesar Rp961.650.000,00, hibah kepada sekolah PAUD sebesar Rp261.000.000,00, hibah kepada Palang Merah Indonesia Kab. Kep. Mentawai sebesar Rp188.000.000,00 pada dinas Kesehatan, hibah kepada organisasi wanita DWP, GOW dan IKIAD sebesar Rp556.731.759,00 pada Dinas Sosial dan P3A, Hibah kepada Pemuda Pancasila Mentawai Rp25.000.000,00 dan hibah kepada organisasi Gerakan Pramuka Kepulauan Mentawai Kwartir Cabang 15 sebesar Rp50.000.000,00 pada Dinas Pariwisata, hibah kepada kegiatan Keagamaan Sidang Sinode BKPM di Siberut Tengah sebesar Rp320.000.000,00, beban hibah pada Dinas Perhubungan berupa bantuan 2 unit angkutan darat kepada Desa senilai Rp501.885.997,00.
3. Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan hibah pada 9 Partai Politik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp627.228.000,00, sebagaimana penjelasan terinci dapat dilihat pada bagian Belanja Hibah.
4. Terdapat beban hibah bangunan gedung berupa Uma Mentawai dari Dinas Pendidikan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp969.251.451,00.
5. Beban hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp13.316.666.557,00 merupakan beban hibah yang dicatat sebagai persediaan pada tahun sebelumnya yang telah diserahkan kepada masyarakat diantaranya hibah bangunan gedung kepada kantor kejaksaan pada Dinas PUPR sebesar Rp5.101.535.100,00, beban hibah pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp389.457 berupa alat-alat komposter, hibah pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.709.730.000, hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp56.800.000,00, hibah jalan P2D Mandiri pada Kecamatan Siberut Barat sebesar Rp899.982.000,00, hibah jalan P2D Mandiri di kecamatan Siberut Selatan sebesar 1.227.272.000,00, hibah jalan P2D Mandiri di Kecamatan Sipora Selatan sebesar Rp1.346.323.000,00, dan hibah pada kecamatan Pagai Selatan berupa Jalan Desa senilai Rp2.974.635.000,00 sebagaimana penjelasannya dapat diuraikan pada tabel dibawah ini.
6. Terdapat perbedaan nilai Beban Hibah – LO dengan Belanja Hibah-LRA sebesar Rp**14.285.918.008,00**, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Penerima Hibah	Belanja Hibah-LRA	Tambah	Kurang	Beban Hibah -LO
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Hibah Kepada BUMD	1.999.923.500,00	0,00	0,00	1.999.923.500,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.864.267.756,00	0,00	0,00	2.864.267.756,00
3	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	627.228.000,00	0,00	0,00	627.228.000,00
4	Beban hibah Bangunan Gedung Uma Mentawai	-	969.251.451,00	-	969.251.451,00
5	Beban hibah barang yg diserahkan kepada masyarakat	-	13.316.666.557,00	-	13.316.666.557,00
Jumlah		**5.491.419.256,00**	**14.285.918.008,00**	**0,00**	**19.777.337.264,00**

Perbedan antara beban hibah-LO dan belanja hibah-LRA merupakan adanya penambahan beban hibah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp969.251.451,00 berupa hibah bangunan gedung Uma Mentawai ke pemerintah desa dan penambahan beban hibah sejumlah Rp13.316.666.557,00 merupakan beban hibah barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat yang dicatat sebagai persediaan pada tahun sebelumnya dan penambahan beban hibah terhadap barang yang dihapuskan dengan proses lelang sebagaimana dijelaskan pada paragraph sebelumnya yaitu antara lain hibah jalan P2D ke Desa di kecamatan Siberut Barat senilai Rp.899.982.000, hibah jalan P2D ke Desa di kecamatan Siberut Selatan sebesar Rp1.227.272.000,00, hibah jalan P2D ke Desa di Kecamatan Sipora Selatan senilai Rp1.346.323.000,0 dan hibah jalan P2D ke Desa di Kecamtan Pagai Selatan senilai Rp2.074.635.000,00. Terdapat beban hibah pada Dinas Komukasi dan Informatika sebesar Rp56.800.000,00 berupa hibah barang radio transistor kepada masyarakat. Beban hibah senilai Rp1.709.730.000,00 pada Dinas Perhubungan berupa kapal fiber yang diserahkan kepada kelompok nelayan dan beban hibah pada dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan senilai Rp389.457,00 berupa barang Biopori yang sudah dihapuskan melalui lelang. Selain itu juga terdapat beban hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa hibah jalan ke desa senilai Rp4.901.917.900,00 dan hibah bangunan gedung kepada kantor Kejaksaan Kab. Kep. Mentawai senilai Rp199.617.200,00..

5) Beban Bantuan Sosial-LO

Beban Bantuan Sosial-LO tahun 2021 sebesar Rp876.212.731,00 merupakan beban bantuan sosial yang diberikan kepada anggota masyarakat dengan rincian dibawah ini:

No	Penerima Bansos	Realisasi 2021	Realisasi 2020
		(Rp)	(Rp)
1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	457.640.731,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	418.572.000,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	0,00	342.000.000,00
4	Beban Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	0,00	129.484.588,00
Jumlah		**876.212.731,00**	**471.484.588,00**

Beban bantuan sosial kepada individu tahun 2021 terealisasi sebesar Rp457.640.731,00 merupakan kegiatan pada Dinas Kesehatan berupa bantuan sosial yang direncanakan kepada individu yakni pemberian bantuan kepada ibu bersalin yang dirujuk ke Padang atau bantuan kepada ibu bersalin dari keluarga tidak mampu sesuai dengan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 14 Tahun 2021 Tanggal 15 April 2021, NPHD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Palang Merah Indonesia Kab. Kep. Mentawai Nomor: 477/NPHD/Dinkes/2021 tgl. 26/4/2021.

Sedangkan beban bantuan sosial kepada keluarga tahun 2021 sebesar Rp418.572.000,00 merupakan kegiatan Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa bantuan sosial yang direncanakan kepada keluarga dalam bentuk bantuan pemasangan instalasi listrik sebanyak 268 KK dengan dasar pembayaran Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 448 Tahun 2021 tanggal 27 Des 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 305

Tahun 2021 tentang Penerima Bantuan Sosial Penerangan Listrik bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten.

Antara beban bantuan sosial-LO dengan belanja bantuan sosial-LRA tahun 2021 tidak terdapat perbedaan, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

No	URAIAN	BELANJA LRA	Tambah	Kurang	BEBAN-LO	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	457.640.731,00	0,00	0,00	457.640.731,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	418.572.000,00	0,00	0,00	418.572.000,00	0,00
	Jumlah	**876.212.731,00**	**0,00**	**0,00**	**876.212.731,00**	**0,00**

6) Beban Penyusutan-LO

Beban penyusutan-LO tahun 2021 sebesar Rp100.856.715.912,13 merupakan beban penyusutan aset tetap pada 36 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan uraian sebagai berikut:

NO	URAIAN	BEBAN PENYUSUTAN 2021 (Rp)	BEBAN PENYUSUTAN 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.889.597.546,00	7.347.762.707,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	2.676.979.910,95	2.626.762.057,00
3	Dinas Kesehatan	10.513.729.049,18	9.877.161.518,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.208.173.773,00	47.180.302.771,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.956.105.071,00	8.748.857.919,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	485.182.730,00	510.990.445,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.028.851.932,00	3.045.247.771,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	181.004.394,00	144.678.369,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.620.924.434,00	1.907.070.437,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	285.909.363,00	277.981.485,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	155.857.223,00	129.578.392,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	402.467.689,00	458.857.002,00
13	Dinas Perhubungan	3.280.298.400,00	3.342.014.848,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	481.999.611,00	390.987.511,00
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	4.258.310.279,00	4.276.318.786,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	270.296.788,00	283.510.765,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	88.574.365,00	100.531.289,00
18	Dinas Perikanan	1.411.416.443,00	1.835.081.374,00
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	1.001.073.055,00	943.083.895,00
20	Sekretariat Daerah	4.100.285.728,00	4.296.873.907,00
21	Inspektorat	115.977.799,00	148.122.812,00

NO	URAIAN	BEBAN PENYUSUTAN 2021 (Rp)	BEBAN PENYUSUTAN 2020 (Rp)
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	675.243.086,00	800.480.457,00
23	Badan Keuangan Daerah	692.339.642,00	645.072.216,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	185.481.693,00	243.410.367,00
25	Sekretariat DPRD	653.336.755,00	699.824.671,00
26	Kecamatan Siberut Utara	167.681.766,00	194.459.219,00
27	Kecamatan Siberut Tengah	96.095.785,00	102.800.648,00
28	Kecamatan Siberut Barat	108.460.926,00	130.385.776,00
29	Kecamatan Siberut Barat Daya	171.462.153,00	203.270.746,00
30	Kecamatan Siberut Selatan	99.698.654,00	114.571.451,00
31	Kecamatan Sipora Utara	149.365.230,00	148.328.321,00
32	Kecamatan Sipora Selatan	121.896.170,00	131.537.879,00
33	Kecamatan Pagai Utara	49.196.123,00	82.396.508,00
34	Kecamatan Sikakap	28.992.578,00	60.981.253,00
35	Kecamatan Pagai Selatan	174.991.359,00	179.378.705,00
35	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	69.458.409,00	81.042.919,00
umlah		**100.856.715.912,13**	**101.689.717.196,00**

7) Beban Penyusutan Aset Lainnya

Beban penyusutan aset lainnya tahun 2021 sebesar Rp19.762.132,00 merupakan beban penyusutan aset lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.271.875,00, Dinas Sosial dan P3A sebesar Rp1.500.000,00, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebesar Rp13.336.192, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp495.000,00 Dinas Kearsipan sebesar Rp853.646,00, Badan Keuangan Daerah sebesar Rp1.196.251,00 dan Kecamatan Sipora Selatan sebanyak Rp1.109.168,00.

8) Beban Amortisasi-LO

Beban amortisasi-LO tahun 2021 sebesar Rp1.074.696.125,36 merupakan beban amortisasi aset tak berwujud pada OPD dengan rincian sebagai berikut:

No	OPD	Beban Amortisasi 2021 (Rp)	Beban Amortisasi 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	105.204.000,00	105.204.000,00
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	0,00	73.134.000,00
4	Sekretariat Daerah	56.066.000,00	90.320.000,00
5	Kecamatan Siberut Barat Daya	0,00	0,00
6	Kecamatan Pagai Selatan	0,00	0,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	646.528.525,36	736.255.525,36
8	Badan Keuangan Daerah	266.897.600,00	196.581.000,00
9	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	29.887.000,00
	Jumlah	**1.074.696.125,36**	**1.231.381.525,36**

9) Beban Penyisihan Piutang-LO

Beban penyisihan piutang-LO Tahun 2021 sebesar Rp347.787.554,90 merupakan beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak Bumi dan Bangunan pada OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

10) Beban Lain-Lain

Beban lain-lain - LO sebesar Rp3.765.032.919,00 merupakan belanja modal yang tidak menjadi aset tetap. Rincian Beban Lain-Lain – LO masing-masing OPD tahun 2021 sebagai berikut:

No	OPD	Beban Lain-lain 2021 (Rp)	Beban Lain-lain 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.167.812.622,00	1.234.581.910,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	85.290.000,00	63.624.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.291.388.697,00	422.638.939,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.500.000,00	5.886.167.662,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	35.289.800,00	16.874.400,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	840.000,00	3.600.000,00
7	Dinsos dan P3A	0,00	24.716.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	46.750.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa P2KB	6.974.000,00	50.203.000,00
10	Dinas Perhubungan	9.240.000,00	14.324.200,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.370.000,00	97.672.200,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	5.500.000,00	0,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	1.313.500,00	50.448.650,00
12	Dinas Perikanan	15.100.000,00	0,00
17	Sekretariat Daerah	37.299.700,00	89.852.950,00
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	10.800.000,00
14	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0,00	4.576.330,00
15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	6.750.000,00
20	Inspektorat	21.000.000,00	17.250.000,00
	Kecamatan Pagai Selatan	20.114.600,00	0,00
18	Sekretariat DPRD	0,00	33.997.500,00
19	Kecamatan Siberut Utara	0,00	45.556.800,00
23	Badan Keuangan Daerah (PPKD)	0,00	718.092.684,53
	JUMLAH	**3.765.032.919,00**	**8.838.477.225,53**

11) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak tahun 2021 sebesar Rp705.432.930,00 merupakan beban bagi hasil pajak daerah kepada 43 Pemerintah Desa di lingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tidak terdapat perbedaan antara Beban Transfer Bagi Hasil Pajak – LO dengan Transfer Bagi Hasil Pajak – LRA.

12) Beban Bagi Hasil Retribusi

Pengakuan beban transfer bagi hasil retribusi tahun 2021 sebesar Rp1.741.496.689,00 merupakan beban transfer bagi hasil retribusi kepada 43 (empat puluh tiga) Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tidak terdapat perbedaan antara Beban Transfer Bagi Hasil Pajak – LO dengan Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak – LRA.

13) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Pengakuan beban transfer bantuan keuangan ke Desa tahun 2021 sebesar Rp116.719.819.891,00 merupakan transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menunjang pelaksanaan tugas aparatur desa.

14) Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Pengakuan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya tahun 2021 bernilai Rp0,00 sedangkan tahun 2020 terdapat sebesar Rp Rp627.228.000,00 berupa bantuan keuangan kepada partai politik dilingkungan Kabupaten Kepulauan Mentawai

		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.4.3	**Surplus Defisit dari Operasi – LO**	**57.735.860.360,05**	**74.733.292.023,27**

Surplus dari Operasi-LO pada tahun 2021 terdapat sebesar Rp57.735.860.360,05 merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban Operasi.

		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.4.4	**Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional – LO**	**(807.082.432,38)**	**(648.505.702,62)**

Surplus/defisit kegiatan non operasional – LO pada tahun 2021 terdapat sebesar (Rp**807.082.432,38**), yaitu pada Dinas Kesehatan sebesar (Rp638.794.427,38) berupa Obat-obatan yang kadaluarsa/Expire dan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar (Rp168.288.005,00) berupa Obat-Obatan kadaluarsa/Expire, sedangkan tahun 2020 bernilai (Rp**648.505.702,62**) Defisit kegiatan non operasional tahun 2021 merupakan persediaan berupa obat yang telah *expired* pada RSUD.

		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.4.5	**Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa – LO**	**56.928.777.927,67**	**74.084.786.320,65**

Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa-LO pada tahun 2021 diperoleh sebesar Rp**56.928.777.927,67**

		31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
5.4.6	**Pos Luar Biasa – LO**	**(1.135.106.365,00)**	**(345.200.000,00)**

Beban Pos Luar Biasa tahun 2021 sebesar (Rp**1.135.106.365,00**). Nilai tersebut merupakan beban tidak terduga yang dikeluarkan untuk kegiatan Tidak Terduga tahun 2021 diantaranya untuk penyetoran sisa dana desa tahun 2015 s.d 2019 sebesar Rp455.190.744,00, Biaya admunistrasi penutupan rekening tabungan Dorman/Fasif SD pada Dinas Pendidikan Rp586.365,00, biaya penanganan rehabilitasi bangunan pengaman pantai pastoran sikakap desa sikakap pada Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang dan bantuan sosial bencana kebakaran dan musibah pohon tumbang sebesar Rp255.000.000,00 sebagaimana sebelumnya telah diuraikan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran bagian Belanja Tidak Terduga Tahun 2021.

5.4.7 Surplus/Defisit – LO	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	55.793.671.562,67	**73.739.586.320,65**

Surplus/defisit-LO merupakan selisih pendapatan-LO dengan beban-LO dengan kegiatan non operasional serta pos luar biasa. Pada tahun 2021 terjadi surplus-LO sebesar Rp55.793.671.562,67 sedangkan tahun 2020 diperoleh surplus-LO sebesar Rp73.739.586.320,65.

5.5. PENJELASAN POS –POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Arus Kas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Arus Kas Masuk	**830.060.737.447,37**	**832.886.813.996,51**
Arus Kas Keluar	**664.754.562.471,02**	**679.579.019.096,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**165.306.174.976,35**	**153.307.794.900,51**

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Pada Tahun 2021, terdapat Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp165.306.174.976,35 yang merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar Rp830.060.737.447,37 dengan Arus kas keluar sebesar Rp664.754.562.471,00. Rincian arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari:

NO	URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**		
2	***Arus Kas Masuk***		
3	Pendapatan Pajak Daerah	3.860.497.217,00	3.531.794.196,00
4	Hasil Retribusi Daerah	3.033.172.955,00	5.976.710.358,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.684.123.854,00	12.591.521.757,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.967.871.153,37	12.805.647.244,51
7	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.052.156.406,00	12.981.503.128,00
8	Dana Alokasi Umum	548.987.977.000,00	556.457.541.000,00
9	Dana Alokasi Khusus	111.671.473.375,00	82.463.937.015,00
10	Pendapatan Hibah	23.248.615.000,00	23.984.150.000,00
11	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	32.308.263.287,00	29.303.430.192,00

NO	URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
12	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	35.561.158.000,00
13	Dana Desa	60.246.587.200,00	57.229.421.106,00
14	***Jumlah Arus Kas Masuk***	**830.060.737.447,37**	**832.886.813.996,51**
15	***Arus Kas Keluar***		
16	Belanja Pegawai	284.566.995.633,00	349.810.972.110,00
17	Belanja Barang dan Jasa	243.479.793.619,02	178.545.979.368,00
18	Belanja Subsidi	9.585.794.613,00	6.734.707.000,00
19	Belanja Hibah	5.491.419.256,00	3.853.184.836,00
20	Belanja Bantuan Sosial	876.212.731,00	471.484.588,00
21	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.446.929.619,00	1.563.200.931,00
22	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	116.719.819.891,00	114.403.671.266,00
23	Belanja Tidak Terduga	1.587.597.109,00	24.195.818.997,00
24	***Jumlah Arus Kas Keluar***	**664.754.562.471,02**	**679.579.019.096,00**
25	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**	**165.306.174.976,35**	**153.307.794.900,51**

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Arus Kas Masuk	**92.347.850,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar	**164.639.582.130,00**	**142.003.462.707,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(164.547.234.280,00)**	**(142.003.462.707,00)**

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi defisit sebesar (Rp164.547.234.280,00) merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp92.347.850,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp164.639.582.130,00. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi tahun 2021 terdiri dari:

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Arus Kas Masuk:		
Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai	0,00	0,00
Penjualan Hasil Peralatan Mesin Hasil Lelang	92.347.850,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**92.347.850,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar:		
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.876.770.459,00	28.871.620.930,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.708.856.761,00	32.557.717.902,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	115.471.089.584,00	76.035.794.152,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	1.582.865.326,00	4.538.329.723,00

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**164.639.582.130,00**	**142.003.462.707,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(164.547.234.280,00)**	**142.003.462.707,00**

Selama Tahun 2021 arus kas keluar sebesar Rp164.639.582.130,00 yang merupakan pengeluaran dana dari kas daerah untuk belanja modal yaitu:

(1) Belanja Belanja Modal Tanah Tahun 2021 bernilai Rp0,00.

(2) Belanja peralatan dan mesin sebesar Rp25.876.770.459,00, merupakan akumulasi realisasi pengeluaran belanja peralatan dan mesin berupa pengadaan alat besar, pengadaan alat angkutan, pengadaan alat bengkel dan alat ukur, pengadaan alat kantor dan rumah tangga, pengadaan alat, studio, komunikasi dan pemancar, pengadaan alat kedokteran dan kesehatan, pengadaan alat laboratorium, pengadaan komputer.

(3) Belanja Gedung dan bangunan sebesar Rp21.708.856.761,00 merupakan akumulasi realisasi pengeluaran untuk belanja Gedung dan bangunan yakni pengadaan bangunan Gedung dan pengadaan tugu titik kontrol/pasti.

(4) Belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp115.471.089.584,00 merupakan akumulasi realisasi pengeluaran belanja jalan irigasi dan jaringan yang dipergunakan untuk pembuatan jalan dan jembatan, peningkatan dan perbaikan jalan, jembatan, bangunan irigasi dan jaringan.

(5) Belanja aset tetap lainnya sebesar Rp1.582.865.326,00 merupakan akumulasi realisasi pengeluaran untuk belanja aset tetap lainnya yang dipergunakan untuk pembelian bukuilmu pengetahuan umum, kesenian dan olahraga, pembelian tanaman dan barang-barang bercorak kebudayaan serta pengadaan aset tetap renovasi.

(6) Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah tahun 2021 bernilai Rp0,00 sedangkan tahun 2020 sebesar Rp0,00.

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	**31 Desember 2021 (Rp)**	**31 Desember 2020 (Rp)**
Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan merupakan selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar. Aliran kas dari aktivitas pendanaan Tahun 2021 dan tahun sebelumnya bernilai Rp0,00 atau nihil.

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Arus Kas Masuk	**42.982.323.420,00**	**38.216.462.847,00**
Arus Kas Keluar	**42.982.323.420,00**	**38.216.462.847,00**
Arus Kas Bersih dari Non Anggaran	**0,00**	**328,00**

Aktivitas transitoris atau aktivitas Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong oleh pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus kas bersih dari aktivitas Non Anggaran benilai Rp287.586.335**,00** merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar Rp42.982.323.420,00 dan arus kas keluar sebesar Rp42.694.737.085,00. Rincian aliran kas dari aktivitas transitoris Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
Arus Kas Masuk:		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	42.982.323.420,00	38.216.462.847,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**42.982.323.420,00**	**38.216.462.847,00**
Arus Kas Keluar:		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	42.694.737.085,00	38.216.462.847,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**42.694.737.085,00**	**38.216.462.847,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	**287.586.335,00**	**0,00**

5.5.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
	1.046.527.031.35	**11.304.332.193,51**

Kenaikan Kas Bersih selama periode Tahun 2021 sebesar Rp1.776.938.881,35 menunjukkan adanya surplus realisasi APBD Tahun 2021 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih besar dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	165.306.174.976,35	153.307.794.900,51
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(164.547.234.280,00)	(142.003.462.707,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	287.586.335,00	0,00
Kenaikan /Penurunan Kas	**1.046.527.031,35**	**11.304.332.193,51**

a. Saldo Awal Kas	31 Desember 2021	31 Desember 2020

(Rp)	(Rp)
41.198.409.617,74	**29.950.740.524,23**

Saldo awal kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) sebesar Rp41.198.409.617,74 merupakan saldo Kas di BUD per 1 Januari 2021.

b. Saldo Akhir Kas	**31 Desember 2021 (Rp)**	**31 Desember 2020 (Rp)**
	42.301.599.749,09	**41.255.072.717,74**

Saldo akhir kas di BUD sebesar Rp 43.032.011.599,09 merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai per tanggal 31 Desember 2021. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)
Kenaikan kas bersih selama periode	1.046.527.031,35	11.304.332.193,51
Saldo awal kas	41.198.409.617,74	29.950.740.524,23
Saldo kas di BUD dan bendaharan pengeluaran	56.663.100,00	0,00
Saldo Akhir Kas	**42.301.599.749,09**	**41.255.072.717,74**

Jika dibandingkan dengan saldo kas di Neraca, maka saldo Kas di Kas Daerah sesuai Laporan Arus Kas dapat dirinci sebagai berikut.

1. Kas di Kas Daerah	:	37.166.020.148,09
2. Kas di Bendahara Penerimaan	:	16.000.000,00
3. Kas di Bendahara FKTP	:	0,00
4. Kas di Bendahara Bos	:	5.097.942.601,00
5. Kas di Bendahara Pengeluaran	:	21.637.000,00
6. Kas lainnya	:	0,00
Jumlah	**:**	**42.301.599.749,09**

c. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	**31 Desember 2021 (Rp)**	**31 Desember 2020 (Rp)**
	16.000.000,00	**56.663.100,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke RKUD tahun 2021 sebesar Rp16.000.000,00 merupakan saldo kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan yang belum disetor tahun 2020 yang berasal retribusi penyeberangan di air sebesar Rp16.000.000,00.

5.6 PENJELASAN POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi LaporanPerubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	2	3	4
1	**EKUITAS AWAL**	**1.930.262.310.524,14**	**1.975.077.960.958,04**
2	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	**55.793.671.562,67**	**73.739.586.320,65**
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
6	Koreksi ekuitas	367.894.655,53	(118.555.236.754,55)
7	**EKUITAS AKHIR**	**1.986.423.876.742,34**	**1.930.262.310.524,14**

a. Saldo awal ekuitas Tahun 2021 sebesar Rp1.930.262.310.524,14 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2020 sesuai dengan neraca *audited*.

b. Surplus/defisit-LO sebesar Rp55.793.671.562,67 merupakan surplus atas kegiatan operasional Tahun 2021 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

c. Selain penambahan ekuitas dari Surplus atas kegiatan operasional Pemerintah Daerah Tahun 2021, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya sebesar 367.894.655,53 dengan rincian sebagai berikut:

Adapun Penambahan Koreksi Ekuitas Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke dalam rumah dinas Saumanganya di Dinas Kesehatan sebesar Rp990.000,00.
2. Koreksi kurang catat tanah kantor di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman aset tanah sekolah sebesar Rp561.200.000,00.
3. Koreksi kurang catat tanah bangunan rumah negara tanpa golongan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp219.650.000,00.
4. Koreksi atas kesalahan pencatat kurang bayar PPN pihak ketiga yang dicatat sebagai Piutang Retribusi meski tidak memenuhi asersi hak dan kewajiban Rp50.080.000,00.
5. Koreksi atas kesalahan pencatatan pembayaran PBB Pertamina pada tahun 2020 namun Piutang PBB atas pembayaran tersebut masih diakui Rp25.257.405,00.

Sedangkan Pengurangan Koreksi Ekuitas Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Koreksi mutasi aset dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke bangunan gedung SD ke Dinas Pendidikan dan mutasi bangunan rumah sakit dan lain-lain ke Dinas Kesehatan sebesar (Rp8.089.648.501,00).

2. Koreksi atas akumulasi penyusutan hibah gedung dan bangunan ke TK PAUD dari dinas Pendidikan sebesar Rp(812.928.533,40).
3. Koreksi Aset Lain-lain (mutasi ke provinsi) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp(674.493.750,00).
4. Koreksi akumulasi penyusutan hibah dari desa Bukit Pamewa sebesar (Rp202.182.200,00).
5. Penghapusan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan SMA 2 Sipora dinas Pendidikan sebesar (Rp44.353.000,00).
6. Koreksi ekuitas yang disebabkan oleh penghapusan lelang peralatan dan mesin di Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar (Rp31.449.000,00).
7. Koreksi ekuitas di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebesar (Rp 555.665,00).
8. Koreksi atas kesalahan pencatatan kas di Rekening Dana Bantuan Bencana sebagai Kewajiban Jangka Panjang (Rp730.411.850,00).
9. Koreksi atas peningkatan nilai Investasi Jangka Panjang pada BPR Sipora dan BPR Sikakap (Rp528.779.414,93).
10. Koreksi Akumulasi Penyusutan Reklasifikasi dari Gedung Bangunan ke KDP (Rp94.402.818,00).

d. Saldo akhir ekuitas Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.986.423.876.742,34

BAB VI
PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD)

Sehubungan dangan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun anggaran 2021 dalam proses pengelolaan keuangan mulai dari penganggaran sampai penatausahaan sudah menggunakan system aplikasi SIPD. Namun dalam implementasinya SIPD belum bisa digunakan dalam penyusunan laporan keuangan atau menu akuntansi dan pelaporannya belum tersedia, maka untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021 masih menggukan aplikasi SIMDA Keuangan sebagai aplikasi pendamping dalam pengelolaan keuangan khususnya untuk pelaporan. Penggunaan system aplikasi SIMDA Keuangan sebagai aplikasi pendamping SIPD di lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan mentawai untuk tahun 2021 di mulai pada bulan mei 2021 dengan system perekaman data dari SIPD ke Aplikasi Simda Keuangan.

Laporan yang dapat dihasilkan dengan menggunakan SIMDA Keuangan yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Dalam penyusunan LKPD juga menggunakan Aplikasi Simda BMD untuk pengelolaan Laporan Aset / BMD yang telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodefikasi sehingga dapat menunjang kelancaran penyusunan LKPD Tahun 2020.

Untuk laporan keuangan pemerintah desa juga juga masih menggunakan sistem aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) melalui kompilasi laporan 43 Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

6.2 REKENING BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, untuk itu dalam upaya meringankan biaya pendidikan dan penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu maka pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan bagi Sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap/SLB baik negeri maupun swasta yang sudah terdata dalam Data Pokok Pendidikan Dasar Dan Menengah (Dapodikdasmen) yang besarannya:

- Untuk tingkat SD Rp800.000,00/siswa/tahun
- Untuk tingkat SMP Rp1.000.000,00/siswa/tahun

Prioritas penggunaan dana bos ini adalah untuk membeli buku teks pelajaran sesuai kurikulum yang digunakan sekolah, baik pembelian buku baru, mengganti yang rusak dan membeli kekurangan agar tercukupi rasio satu siswa satu buku, disamping itu juga dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah lainnya.

6.3 KASUS HUKUM

Data perkara ligitasi dan non ligitasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Klaim pencairan jaminan uang muka pekerjaan lanjutan peningkatan jalan Sikabaluan-Pokai Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp510.332.200 dengan Nomor Perkara 81/Pdt.G/2016/PN.Pdg. Tergugat PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG dan Penggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada proses persidangan tingkat pertama memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Selanjutnya pada tingkat Banding, majelis hakim melalui Putusan Banding Nomor: 88/Pdt.G/2017/PT.Pdg tanggal 10 Oktober 2017 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 15 November 2016. Putusan Kasasi Nomor 2950 K/Pdt/2018 memutuskan menolak permohonan Kasasi PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG. Proses klaim pencairan uang muka sebesar Rp.510.332.200,00 terkendala karena PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG sejak tanggal 20 Maret 2019 berdasarkan keterangan OJK Padang telah dinyatakan pailit. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam hal ini telah menyurati PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG dan selanjutnya berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 180/75/Huk-2020 tanggal 16 November 2020 tentang Tagihan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan, OJK menindaklanjuti dengan pembentukan Tim Kurator. Sampai saat ini Tim Kurator yang dibentuk oleh OJK memberikan jawaban dengan Surat Himalaya Asuransi Dalam Likuidasi Nomor 025/TL-AHPDL/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang pada substansinya menyatakan akan membayar klaim pencairan uang muka setelah Tim Likuidasi melakukan pemeriksaan dan audit untuk memastikan posisi aset sampai tersedianya dana yang cukup untuk dilaksanakan pencairan kewajiban PT. Asuransi Himalaya Pelindung (Dalam Likuidasi).
2. Klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan lanjutan peningkatan jalan Sikabaluan-Pokai Tahun 2012 sebesar Rp247.494.000,00 dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses negosiasi dengan pihak PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG oleh pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai atas kuasa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/24/Huk-2018 tanggal 20 Februari 2018. Selanjutnyu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 180/75/Huk-2020 tanggal 16 November 2020 tentang Tagihan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan, OJK menindaklanjuti dengan pembentukan Tim Kurator. Sampai saat ini Tim Kurator yang dibentuk oleh OJK memberikan jawaban dengan Surat Himalaya Asuransi Dalam Likuidasi Nomor 025/TL-AHPDL/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang pada substansinya menyatakan akan membayar klaim pencairan uang muka setelah Tim Likuidasi melakukan pemeriksaan dan audit untuk memastikan posisi aset sampai tersedianya dana yang cukup untuk dilaksanakan pencairan kewajiban PT. Asuransi Himalaya Pelindung (Dalam Likuidasi).
3. Klaim pencairan jaminan uang muka pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Malakopa sebesar Rp.485.713.500,00. Tergugat PT. ASURANSI UMUM VIDEI, penggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses mediasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/07/DPU-KKM/V-2016, dengan jaminan pelaksanaan kegiatan irigasi Malakopa

berdasarkan nomor jaminan 06.91.01.0478.08.14 sebesar Rp.80.952.250,00 sudah disetor ke Kas Daerah melalui Bank Mandiri tanggal 26 Mei 2016.

4. Klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan non permanen Sirisurak Tahun 2014 sebesar Rp226.850.000,00 dengan pihak PT. ASURANSI MEGA PRATAMA, Nomor Perkara 74/Pdt.G/2018/PN.Pdg dengan status hukum *inkracht* (akta perdamaian) tanggal 3 Januari 2019. Pemerintah kabupaten Kepulauan Mentawai telah menindak lanjuti proses klaim dan telah disetor ke kas Daerah dengan rincian sebagai berikut: penyetoran tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 50.000.000,00, penyetoran tanggal 17 Februari 2020 senilai Rp. 50.000.000,00, penyetoran tanggal 18 November 2020 senilai Rp. 85.000.000,00, penyetoran tanggal 18 Januari 2021 senilai Rp. 25.000.000,00 dan penyetoran tanggal 22 Januari 2021 senilai Rp. 16.850.000,00.
5. Klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Pokai-Sirilanggai Tahun 2012 sebesar Rp147.621.900,00 dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses negosiasi dengan pihak PT. ASURANSI INTRA ASIA oleh pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai atas kuasa kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/22/Huk-2018 tanggal 20 Februari 2018. Pemerintah Daerah Kepulauan Mentawai melanjutkan proses mediasi melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Sekretariat Daerah Nomor 180/32/Huk-2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Somasi yang ditujukan kepada PT. ASURANSI INTRA ASIA. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Nomor SR-312/KO.052/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Tanggapan Pengaduan yang substansinya menyatakan bahwa PT. ASURANSI INTRA ASIA telah menanggapi somasi melalui Surat Nomor 00353/Klm-KP/AIA/III/20 tanggal 18 Maret 2020 perihal tanggapan Somasi Pencairan Jaminan Pelaksanaan.
6. Klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pokai (DAK Tambahan Tahun 2014) sebesar Rp194.675.500,00 dengan status hukum proses negosiasi dengan pihak PT. ASURANSI UMUM VIDEI oleh pihak kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai atas kuasa kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/21/Huk-2018 tanggal 20 Februari 2018. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten kepulauan Mentawai melalui Surat Sekretariat Daerah Nomor 180/33/Huk-2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal Somasi melalui Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat telah memberikan tanggapan Surat Nomor SR-312/KO.052/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Tanggapan Pengaduan yang substansinya bahwa Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat terus melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan Jakarta.
7. Klaim pencairan jaminan uang muka pekerjaan pembangunan jembatan Pokai (DAK Tambahan Tahun 2014) sebesar Rp297.322.582,00 dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses negosiasi dengan pihak PT. ASURANSI UMUM VIDEI oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dan sudah memberikan tanggapan dengan Surat Nomor SR-312/KO.052/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Tanggapan Pengaduan yang substansinya bahwa Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat terus melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan Jakarta.

8. Klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan lanjutan Pembangunan Jembatan Muara Taikako Tahun 2013 sebesar Rp110.580.460,00 dengan status hukum sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dalam proses negosiasi dengan pihak PT. ASURANSI INTRA ASIA bersama Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Nomor SR-312/KO.052/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Tanggapan Pengaduan yang substansinya bahwa Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat terus melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait di Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan Jakarta.
9. Klaim pencairan jaminan uang muka pekerjaan peningkatan jalan Pokai-Sirilanggai Tahun 2012 sebesar Rp297.760.600,00, dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses mediasi dengan pihak PT. ASURANSI UMUM VIDEI oleh pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai atas kuasa kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/20/Huk-2018 tanggal 20 Februari 2018.
10. Klaim pencairan jaminan uang muka pekerjaan Rehabilitasi Daerah Irigasi Mabolak sebesar Rp185.598.000,00 pada PT. ASURANSI UMUM VIDEI, penggugat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan status hukum sampai saat ini masih dalam proses mediasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 600/08/DPU-KKM/V-2016.
11. Perkara Tata Usaha Negara (PTUN) oleh PT.Combina Costraco terkait surat kepala Dinas PUPR Nomor 600/314/DPUPR tanggal 25 Juni 2020 perihal hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dengan nomor register perkara 14/G/2020/PTUN.PDG, status Proses persidangan.
12. Perkara Tata Usaha Negara (PTUN) oleh PT. Arupadhatu Adisesanti terhadap surat kepala Dinas PUPR Nomor: 600/327/DPUPR teranggal 30 Juni 2020tanggal 25 Juni 2020 perihal hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dengan nomor register perkara 15/G/2020/PTUN.PDG, status sudah Incrach
13. Kasus Pebangunan Jalan Mapinang-Saumanganya oleh Dirut PT. Hariyona (Deky Syamsir) terhadap Pemda Mentawai Cq. Kadis PUPR Cq.PPK No Perkara 81/Pdt.G/2021/PN.PDG status Incrach
14. Perkara Tata Usaha Negara (PTUN) oleh AMRIZON terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Bukit Pamewa (P2KD atas Pengumuman No. 23/P2KD-BP/2021 tentang Hasil Seleksi Tambahan (pembobotan) Bakal Calon Kepala Desa Bukit Pamewa Kec. Sipora Utara Periode 2021-2027 nomor perkara No. 20/G/2021/PTUN.PDG, Proses hokum sudah Incract.
15. Perkara Tata Usaha Negara (PTUN) oleh Religius terhadap Bupati Kepulauan Mentawai; Sdr. Shohib. S.Pd (tergugat Intervensi Keputusan Buapti No.252 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Keberatan Calon Kepala Desa Sidomakmur Kec. Sipora Utara dalam Pemilihan Kepala desa Serentak Tahun 2021, perkara Nomor 38/G/2021/PTUN.PDG, status proses Sidang.

6.4 PENJELASAN TENTANG PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2017

Terkait Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang penilaian kembali barang milik negara/daerah, Pemerintah Kabupnaten Kepulauan Mentawai belum melaksanakan karena belum terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan lebih lanjut penilaian kembali barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 Pasal 21.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 yang dapat kami sampaikan.

Kami terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang lebih baik dan akurat, sehingga terwujud tata kelola Pemerintahan yang baik dan Pemerintah yang bersih *(Good Governance and Clean Government).*

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran VIII : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
1	Piutang Pajak	2008				
2	- Pajak hotel		451.703.923,00	0,00	0,00	451.703.923,00
3	- Pajak Restoran		62.776.800,00	0,00	0,00	62.776.800,00
4	Piutang PBB-P2					
5	- Tahun 2021	2021	0,00	545.794.537,00	(25.257.405,00)	520.537.132,00
6	- Tahun 2020	2020	579.021.838,00	0,00	(70.667.576,00)	508.354.262,00
7	- Tahun 2019	2019	264.544.554,00	0,00	(22.910.904,00)	241.633.650,00
8	- Tahun 2018	2018	114.272.009,00	0,00	(12.042.519,00)	102.229.490,00
9	- Tahun 2017	2017	450.740.555,00	0,00	(5.359.083,00)	445.381.472,00
10	- Tahun 2016	2016	531.237.992,00	0,00	(2.284.985,00)	528.953.007,00
11	- Tahun 2015	2015	638.222.078,00	0,00	(591.744,00)	637.630.334,00
12	- Tahun 2014	2014	701.472.230,00	0,00	(340.914,00)	701.131.316,00
13	- Tahun 2013	2013	611.631.684,00	0,00	0,00	611.631.684,00
14	Piutang Bagi Hasil Pajak Propinsi					
15	- Bagi hasil cukai dan tembakau	2009	41.114.436,00	0,00	0,00	41.114.436,00
16	Piutang Pihak Ketiga					-
17	- Pemb. Ktr Camat Sipora Utara	2006	57.755.576,36	0,00	0,00	57.755.576,36
18	- Pengadaan Alkes Dinas Kesehatan	2005	0,00	0,00	0,00	-
19	- Pembangunan Jln Produksi dgn Bangunan Pelengkap (Dinas Pertanian)	2009	18.289.260,00	0,00	0,00	18.289.260,00
20	Pembangunan Gdg Rawat Inap RS	2009	204.451.600,00	0,00	0,00	204.451.600,00
21	Dinas Pendidikan CV.Berkat	2013	69.224.640,00	0,00	0,00	69.224.640,00
22	Piutang Jasa Giro Rekening Sekolah dari Propinsi	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
23	PKB Kurang Bayar	2018	3.654.962.050,00	0,00	(3.654.962.050,00)	0,00
24	BBNKB Kurang Bayar	2018	775.084.047,00	0,00	(775.084.047,00)	0,00
25	PBBKB Kurang Bayar	2018	2.400.088.429,00	0,00	(2.400.088.429,00)	0,00
26	Piutang Pajak Air Permukaan Lebih Bayar Tahun Sebelumnya	2018	14.207.525,00	0,00	(14.207.525,00)	0,00
27	Piutang Retribusi					
28	- Tahun 2018		0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Tahun 2014		97.703.142,00	0,00	(90.481.804,00)	7.221.338,00
30	Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat	2019				
31	- Piutang Dana Bagi Hasil PPh 21		0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Piutang Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH			**11.738.504.368,36**	**545.794.537,00**	**(7.074.278.985,00)**	**5.210.019.920,36**

Tuapejat, 19 Agustus 2022
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran IX : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
1	**1. Penyisihan Nilai Piutang PBB-P2**			
2	**2021**	520.537.132,00	(2.728.972,69)	517.808.159,32
3	2020	508.354.262,00	(50.835.426,20)	457.518.835,80
4	2019	241.633.650,00	(24.163.365,00)	217.470.285,00
5	2018	102.229.490,00	(51.114.745,00)	51.114.745,00
6	2017	445.381.472,00	(222.690.736,00)	222.690.736,00
7	2016	528.953.007,00	(528.953.007,00)	0,00
8	2015	637.630.334,00	(637.630.334,00)	0,00
9	2014	701.131.316,00	(701.131.316,00)	0,00
10	**Perdesaan**			
11	2013	197.821.832,00	(197.821.832,00)	0,00
12	2003-2012	319.755.171,00	(319.755.171,00)	0,00
13	s/d 2002	54.754.121,00	(54.754.121,00)	0,00
14	**Perkotaan**			
15	2013	23.412.855,00	(23.412.855,00)	0,00
16	2003-2012	15.887.705,00	(15.887.705,00)	0,00
17	s/d 2002	0,00	0,00	0,00
18	**2. Penyisihan Nilai Piutang Retribusi**			0,00
19	2017	0,00	0,00	0,00
20	2014	7.221.338,00	(50.080.000,00)	(42.858.662,00)
21	**3. Penyisihan Piutang Hotel dan Restoran**			0,00
22	2008	451.703.923,00	(451.703.923,00)	0,00
23	2008	62.776.800,00	(62.776.800,00)	0,00

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
24	**4. Penyisihan Piutang Lainnya**			
25	2006	57.755.576,36	(57.755.576,36)	0,00
26	2009	18.289.260,00	(18.289.260,00)	0,00
27	2009	204.451.600,00	(204.451.600,00)	0,00
28	2010	41.114.436,00	(41.114.436,00)	0,00
29	2013	69.224.640,00	(69.224.640,00)	0,00
Sub Total		**5.210.019.920,36**	**(3.786.275.821,25)**	**1.423.744.099,12**

Tuapejat, 19 Agustus 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran X : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2021

No	Nama Penerima Dana Bergulir	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
		N I H I L			
	JUMLAH				

Tuapejat, 19 Agustus 2022
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran XI : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal	Jumlah Modal yang telah Disertakan sampai dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah Disertakan sampai dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini	Jumlah Modal (Investasi) yang Diterima Kembali Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang Disertakan sampai dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1		Bank Nagari		Saham Biasa	0,00	32.909.000.000,00	0,00	32.909.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.909.000.000,00
2		BPR SIPORA		Saham Biasa	0,00	4.953.973.458,03	498.289.670,58	5.452.263.128,61	0,00	0,00	0,00	5.452.263.128,61
3		BPR PUS		Saham Biasa	0,00	1.011.848.716,59	30.489.744,35	1.042.338.460,94	0,00	0,00	0,00	1.042.338.460,94
5	2009	Bank Nagari		Saham Biasa	0,00	3.236.000.000,00	0,00	3.236.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.236.000.000,00
6	2010	Bank Nagari		Saham Biasa	0,00	7.167.000.000,00	0,00	7.167.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.167.000.000,00
8	2013	Bank Nagari		Saham Biasa	0,00	12.743.000.000,00	0,00	12.743.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.743.000.000,00
9	2014	Bank Nagari		Saham Biasa	0,00	20.523.000.000,00	0,00	20.523.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.523.000.000,00
10	2016	Bank Nagari		Saham Biasa	0,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
11	2017	PT Pembangunan Kemakmuran Mentawai		Penyertaan Modal	0,00	10.947.583.209,00	0,00	10.947.583.209,00	0,00	0,00	0,00	10.947.583.209,00
JUMLAH									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.020.184.798,55**

Tuapejat, 19 Agustus 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran XII : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	314.123.253.114,23	31.875.810.298,00	(6.117.137.435,00)	339.881.925.977,23
2	Rumah Sakit Umum Daerah	65.054.429.780,00	1.907.006.098,00	(85.290.000,00)	66.876.145.878,00
3	Dinas Kesehatan	244.380.773.928,50	24.970.647.078,00	(3.762.706.765,00)	265.588.714.241,50
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	939.591.045.204,65	218.099.640.063,00	(105.497.320.272,00)	1.052.193.364.995,65
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	139.096.442.403,42	7.792.058.129,00	(3.290.195.774,00)	143.598.304.758,42
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.488.187.570,00	49.999.000,00	(840.000,00)	5.537.346.570,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81.257.611.097,00	4.031.675.434,00	(8.643.700.000,00)	76.645.586.531,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.951.837.935,00	519.936.501,00	(318.183.983,00)	4.153.590.453,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	45.708.946.026,00	3.118.997.167,00	(614.866.323,00)	48.213.076.870,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5.318.242.422,00	0,00	(101.120.000,00)	5.217.122.422,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.834.649.505,00	211.395.544,00	0,00	3.046.045.049,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.371.746.328,00	275.220.418,00	(192.709.000,00)	9.454.257.746,00
13	Dinas Perhubungan	54.999.192.245,00	2.820.016.226,00	(94.868.000,00)	57.724.340.471,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.156.178.021,00	304.701.340,00	(2.370.000,00)	6.458.509.361,00
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	167.160.448.177,00	194.438.300,00	(5.500.000,00)	167.349.386.477,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.963.112.425,00	25.464.540,00	(229.087.992,00)	7.759.488.973,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.514.899.207,00	0,00	(804.760.404,00)	1.710.138.803,00
18	Dinas Perikanan	44.212.355.637,00	667.338.781,47	(15.100.000,00)	44.864.594.418,47
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	24.271.140.585,00	0,00	(463.570.000,00)	23.807.570.585,00
20	Sekretariat Daerah	107.215.046.179,00	2.141.881.204,00	(1.408.361.700,00)	107.948.565.683,00
21	Inspektorat	3.808.712.977,00	96.746.178,00	(21.000.000,00)	3.884.459.155,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.715.993.105,00	93.590.000,00	0,00	17.809.583.105,00
23	Badan Keuangan Daerah	11.544.879.894,00	914.472.996,00	(853.628.285,00)	11.605.724.605,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.584.548.591,00	0,00	(175.340.000,00)	8.409.208.591,00
25	Sekretariat DPRD	15.103.066.776,00	656.459.000,00	(1.139.187.655,00)	14.620.338.121,00

No.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
26	Kecamatan Pagai Utara	1.775.159.844,00	56.899.000,00	0,00	1.832.058.844,00
27	Kecamatan Sipora Selatan	6.250.977.880,00	26.230.000,00	(204.382.900,00)	6.072.824.980,00
28	Kecamatan Sipora Utara	5.364.377.935,00	22.850.000,00	(16.494.500,00)	5.370.733.435,00
29	Kecamatan Siberut Selatan	5.396.026.774,00	37.488.000,00	(41.000.000,00)	5.392.514.774,00
30	Kecamatan Siberut Barat Daya	4.040.025.841,00	36.579.000,00	0,00	4.076.604.841,00
31	Kecamatan Siberut Tengah	3.399.852.795,00	29.435.000,00	0,00	3.429.287.795,00
32	Kecamatan Siberut Utara	4.226.979.994,00	10.991.000,00	0,00	4.237.970.994,00
33	Kecamatan Siberut Barat	2.431.809.768,00	0,00	0,00	2.431.809.768,00
34	Kecamatan Pagai Selatan	2.513.594.250,00	149.248.000,00	(20.114.600,00)	2.642.727.650,00
35	Kecamatan Sikakap	1.950.604.830,00	0,00	0,00	1.950.604.830,00
36	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.711.652.084,00	0,00	0,00	1.711.652.084,00
JUMLAH		**2.366.487.801.127,80**	**301.137.214.295,47**	**(134.118.835.588,00)**	**2.533.506.179.835,27**

Tuapejat, 19 Agustus 2022
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran XIII : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Tanah	80.167.437.020,00	1.712.937.900,00	(235.000.000,00)	81.645.374.920,00
2	Peralatan dan Mesin	354.804.302.232,30	27.927.658.491,00	(9.518.554.115,00)	373.213.406.608,30
3	Gedung dan Bangunan	642.970.806.097,47	45.984.249.628,47	(23.594.652.653,00)	665.360.403.072,94
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.141.199.238.936,03	223.764.679.965,00	(25.213.179.165,00)	1.339.750.739.736,03
5	Aset Tetap Lainnya	18.946.541.582,00	1.986.922.822,00	(352.783.000,00)	20.580.681.404,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	128.399.475.260,00	37.581.489.610,00	(113.025.390.776,00)	52.955.574.094,00
7	Akumulasi Penyusutan	(678.652.100.048,61)	(102.804.864.879,13)	6.722.792.526,00	(774.734.172.401,74)
JUMLAH		**1.687.835.701.079,19**	**236.153.073.537,34**	**(165.216.767.183,00)**	**1.758.772.007.433,53**

Tuapejat, 19 Agustus 2022
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran XIV : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
REKAPITULASI ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2021
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dinas Kesehatan	4.177.985.240,00	0,00	9.079.185.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.257.170.301,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	114.795.685.541,00	0,00	0,00	25.442.757.235,00	0,00	0,00	(10.965.720.350,00)	(97.113.317.172,00)	0,00	0,00	32.159.405.254,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.717.370.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.254.905.974,00)	0,00	0,00	462.465.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.295.458.055,00	0,00	1.353.360.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648.818.789,00
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	41.532.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.532.500,00
6	Kecamatan Siberut Utara	98.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.835.000,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	803.736.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.736.450,00
8	Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan	99.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(39.646.000,00)	0,00	0,00	59.780.000,00
9	Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian	34.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.980.000,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	49.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.610.000,00
11	Dinas Perhubungan	375.998.000,00	0,00	0,00	48.870.800,00	0,00	0,00	0,00	(85.628.000,00)	0,00	0,00	339.240.800,00
	JUMLAH	**128.399.475.260,00**	**0,00**	**10.523.688.295,00**	**25.491.628.035,00**	**0,00**	**0,00**	**(10.965.720.350,00)**	**(100.493.497.146,00)**	**0,00**	**0,00**	**52.955.574.094,00**

Tuapejat,19 Agustus 2022
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran XV : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Uraian Aset Lainnya	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	817.570.152	0,00	(817.570.152,00)	0,00
2	Aset Tak Berwujud	9.667.542.626,82	351.583.000,00	0,00	10.019.125.626,82
3	Akumulasi Amortisasi	(6.561.997.750,72)	(1.074.696.125,36)	0,00	(7.636.693.876,08)
4	Aset Lain-Lain	228.649.635.645,31	2.391.104.256,00	(6.960.934.904,00)	224.079.804.997,31
5	Tagihan Jangka Panjang	607.841.468,00	730.411.850,00	0,00	1.338.253.318,00
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(150.423.795.977,79)	(3.926.309.722,00)	7.403.109.421,60	(146.946.996.278,19)
JUMLAH		**82.756.796.163,62**	**(1.527.906.741,36)**	**(7.778.505.056,00)**	**80.853.493.787,86**

Tuapejat, 19 Agustus 2022
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran XVI : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan	Saldo Awal	Transfer dari Kas Daerah	Transfer ke Kas Daerah	Saldo Akhir	Sisa Dana yang belum dicadangkan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH							

NIHIL

Tuapejat, 19 Agustus 2022
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran XVII : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2021

NO	Kewajiban Jangka Pendek	Nilai Awal	Penambahan	Pengurangan	Nilai Akhir
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	13.591,00	287.586.335,00	0,00	287.599.926,00
2	Utang Jangka Pendek Lainnya	813.965.744,00	4.653.442.170,00	(452.490.744,00)	5.014.917.170,00
		813.979.335,00	**4.941.028.505,00**	**(452.490.744,00)**	**5.302.517.096,00**

Tuapejat, 19 Agustus 2022
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2021

NO	Kewajiban Jangka Panjang	Nilai Awal	Penambahan	Pengurangan	Nilai Akhir
1	2	3	4	5	6
1	Utang Jangka Panjang Lainnya	817.570.152,00	0,00	(817.570.152,00)	0,00
JUMLAH		**817.570.152,00**	**0,00**	**(817.570.152,00)**	**0,00**

Tuapejat, 19 Agustus 2022
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran XIX : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DAFTAR KEGIATAN - KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kode Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Realisasi Tahun n - 2, Tahun n - 1, Tahun n			Jumlah Akumulasi Realisasi s.d Akhir TA 2021	Jumlah yang Dianggarkan dalam APBD Tahun Berikutnya
			Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7 = (4 + 5 + 6)	8
		N	I	H	I	L	
JUMLAH				-	-	-	-

Tuapejat, 19 Agustus 2022
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.

Lampiran XX.A : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2022
Tanggal : 19 Agustus 2022

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Perusahaan Daerah Tahun 2021	Sumber (a)	Status (b)	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS c)	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19=17x18
1	Bidang Perbankan																	
a	PT BPR. Pagai Utara Selatan	Laporan Keuangan Tahun 2021	Aktif	6.389.157.015,00		19.626.674,00	6.408.783.689,00	31.702.579,00	5.344.639.015,00	5.376.341.594,00	2.525.000.000,00			195.973.589,00	(1.688.531.494,00)	1.032.442.095,00	99,01	1.022.220.918,00
b	PT BPR. Sipora	Laporan Keuangan Tahun 2021	Aktif	19.475.943.163,00	588.628.458,00	232.684.034,00	20.297.255.655,00	622.218.510,00	14.220.572.858,00	14.842.791.368,00	2.525.000.000,00			542.310.161,00	2.387.154.126,00	5.454.464.287,00	99,01	5.400.459.690,00
Sub Total				**25.865.100.178,00**	**588.628.458,00**	**252.310.708,00**	**26.706.039.344,00**	**653.921.089,00**	**19.565.211.873,00**	**20.219.132.962,00**	**5.050.000.000,00**	**-**	**-**	**738.283.750,00**	**698.622.632,00**	**6.486.906.382,00**	**99,01**	**6.422.680.608,00**
1	Bidang Perdagangan																	
a	Perusda Kemakmuran Mentawai	Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Aktif	7.237.497.195	1.784.411.877	478.801.353	9.500.710.425,00	18.476.702	-	18.476.702	20.798.618.050	-	-	-	(11.795.185.680)	9.003.432.370,00	100,00	9.003.432.370
	Sub Total			**7.237.497.195**	**1.784.411.877**	**478.801.353**	**9.500.710.425**	**18.476.702**	**-**	**18.476.702**	**20.798.618.050**	**-**	**-**	**-**	**(11.795.185.680)**	**9.003.432.370**	**100,00**	**9.003.432.370**
Total Seluruh Bidang				**33.102.597.373**	**2.373.040.335**	**731.112.061**	**36.206.749.769**	**672.397.791**	**19.565.211.873**	**20.237.609.664**	**25.848.618.050**	**-**	**-**	**738.283.750**	**(11.096.563.048)**	**15.490.338.752**	**99,59**	**15.426.112.978**
Tahun 2020																		
1	Bidang Perbankan																	
a	PT BPR. Pagai Utara Selatan	Laporan Keuangan Tahun 2021	Aktif	6.446.413.708,00		22.587.610,00	6.469.001.318,00	31.771.051,00	5.435.582.783,00	5.467.353.834,00	2.525.000.000,00			323.316.396,00	(1.846.668.912,00)	1.001.647.484,00	99,01	991.731.173,00
b	PT BPR. Sipora	Laporan Keuangan Tahun 2021	Aktif	19.475.943.163,00	588.628.458,00	232.684.034,00	20.297.255.655,00	622.218.510,00	14.220.572.858,00	14.842.791.368,00	2.525.000.000,00			542.310.161,00	2.387.154.126,00	5.454.464.287,00	99,01	5.400.459.690,00
	Sub Total			**25.922.356.871,00**	**588.628.458,00**	**255.271.644,00**	**26.766.256.973,00**	**653.989.561,00**	**19.656.155.641,00**	**20.310.145.202,00**	**5.050.000.000,00**	**-**	**-**	**865.626.557,00**	**540.485.214,00**	**6.456.111.771,00**	**99,01**	**6.392.190.863,00**
1	Bidang Perdagangan																	
a	Perusda Kemakmuran Mentawai	Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Aktif	3.799.925.270	5.262.447.302	-	9.062.372.572	33.109.587	-	33.109.587	20.676.235.800	-	-	-	(11.646.972.815)	9.029.262.985	100,00	9.029.262.985
Sub Total				**3.799.925.270**	**5.262.447.302**	**-**	**9.062.372.572**	**33.109.587**	**-**	**33.109.587**	**20.676.235.800**	**-**	**-**	**-**	**(11.646.972.815)**	**9.029.262.985**	**100,00**	**9.029.262.985**
Total Seluruh Bidang				**29.722.282.141**	**5.851.075.760**	**255.271.644**	**35.828.629.545**	**687.099.148**	**19.656.155.641**	**20.343.254.789**	**25.726.235.800**	**-**	**-**	**865.626.557**	**(11.106.487.601)**	**15.485.374.756**	**99,59**	**15.421.453.848**

Tuapejat, 19 Agustus 2022
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D

Lampiran XX.B : **Peraturan Daerah**
Nomor : **2 Tahun 2022**
Tanggal : **19 Agustus 2022**

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

No	Perusahaan Daerah Tahun 2021	Sumber (a)	Status (b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di Luar Usaha	Beban di luar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10=7+8-9
1	Bidang Perbankan								
a	PT BPR. Pagai Utara Selatan	Laporan Keuangan Tahun 2021	Aktif	1.914.088.431,00	1.869.906.784,00	44.181.647,00	3.148.406,00	6.965.000,00	40.365.053,00
b	PT BPR. Sipora	Laporan Keuangan Tahun 2021	Aktif	4.455.815.958,00	3.878.533.529,00	577.282.429,00	3.767.284,00	11.031.350,00	570.018.363,00
Sub Total				**6.369.904.389,00**	**5.748.440.313,00**	**621.464.076,00**	**6.915.690,00**	**17.996.350,00**	**610.383.416,00**
1	Bidang Perdagangan								
a	Perusda Kemakmuran Mentawai	Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Aktif	245.437.600,00	137.342.950	108.094.650,00	20.126.097	1.483.959.199	(1.355.738.452,00)
Sub Total				**245.437.600,00**	**137.342.950,00**	**108.094.650,00**	**20.126.097,00**	**1.483.959.199,00**	**(1.355.738.452,00)**
			Total Seluruh Bidang	**6.615.341.989,00**	**5.885.783.263,00**	**729.558.726,00**	**27.041.787,00**	**1.501.955.549,00**	**(745.355.036,00)**
Tahun 2020									
1	Bidang Perbankan								
a	PT BPR. Pagai Utara Selatan	Laporan Keuangan Tahun 2021	Aktif	1.781.282.768,00	1.599.216.199,00	182.066.569,00	9.994.848,00	28.345.000,00	163.716.417,00
b	PT BPR. Sipora	Laporan Keuangan Tahun 2021	Aktif	4.295.787.331,00	3.653.128.311,00	642.659.020,00	2.392.139,00	17.539.274,00	627.511.885,00
Sub Total				**6.077.070.099,00**	**5.252.344.510,00**	**824.725.589,00**	**12.386.987,00**	**45.884.274,00**	**791.228.302,00**
1	Bidang Perdagangan								
a	Perusda Kemakmuran Mentawai	Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	Aktif	1.466.928.517,00	1.314.519.912	152.408.605,00	171.505.517	3.355.161.897	(3.031.247.775,00)
Sub Total				**1.466.928.517,00**	**1.314.519.912,00**	**152.408.605,00**	**171.505.517,00**	**3.355.161.897,00**	**(3.031.247.775,00)**
			Total Seluruh Bidang	**7.543.998.616,00**	**6.566.864.422,00**	**977.134.194,00**	**183.892.504,00**	**3.401.046.171,00**	**(2.240.019.473,00)**

Tuapejat, 19 Agustus 2022
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MARTINUS D.